PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasim Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027;
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah. Ini perlu dimasukkan sebagai dasar penyusunan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 06);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 09 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 09);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026 – 2046 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang Selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN RKPD

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan RKPD Tahun 2027.
(2) Penetapan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a. pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027; dan
b. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Pasal 4

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
    a. pendahuluan;
    b. gambaran umum kondisi daerah;
    c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
    d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
    e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
    f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
    g. penutup.
(2) Penyusun RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI BARITO KUALA,

H.BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H.ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 22

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

penyusunan RKPD yang memuat arah kebijakan, prioritas, serta kerangka pendanaan pembangunan daerah untuk satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, serta RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 mengusung tema **"Penguatan Sumber Daya Manusia dan peningkatan Investasi serta Infrastruktur Terintegrasi"**, yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing wilayah, serta memperkuat kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara teknokratis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta penyesuaian nomenklatur perencanaan dan penganggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan ketentuan terbaru lainnya. Dokumen Rancangan Akhir RKPD ini memuat gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, permasalahan dan isu strategis daerah, arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027. Selanjutnya, dokumen ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta menjadi bahan pembahasan pada tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan bersama dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Barito Kuala yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Marabahan, 30 Juni 2026

DR. H. BAHRUL ILMI, S.H. M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Hubungan Antar Dokumen	3
1.4 Maksud dan Tujuan	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	8
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Daerah Tahun 2025	8
2.2 Evaluasi Capaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan	102
2.3 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025	153
2.4 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD	185
2.5 Inovasi Daerah	285
2.6 Penyajian Data Pembangunan	294
2.7 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027	317
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	325
3.1 Arah Kebijakan Fiskal, Target Ekonomi Makrdo dan Pokok-pokok Kebijakan	325
3.2 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023-2025	386
3.3 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2027	402
3.4 Pendanaan non APBD	422
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	423
4.1 Tujuan dan Sasaran RKPD	423
4.2 Target Tujuan dan Sasaran RKPD Tahun 2027	458
4.3 Tema dan Fokus Pembangunan	471
4.4 Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai Sasaran RPJMD	471
4.5 Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai Target Indikator Tujuan dan Sasaran	474
4.6 Arah Kebijakan Pembangunan	481
4.7 Program Prioritas Pembangunan Daerah	499
4.8 Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Tahun 2027	509
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	532
5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan tahun 2027	532
5.2 Rencana Kerja dan Pendanaan untuk mencapai Program Prioritas Daerah	537
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	539
6.1 Indikator Kinerja Utama tahun 2027	539
6.2 Indikator Kinerja Kunci tahun 2027	540
6.3 Indikator Kinerja Daerah tahun 2027	550
BAB VII PENUTUP	554

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala Menurut Kecamatan 9
Tabel 2.2 Pola Ruang Kabupaten Barito Kuala 17
Tabel 2.3 Indeks Resiko Bencana Kab. Barito Kuala 2021-2025 18
Tabel 2.4 Perbandingan Penduduk berdasar Kecamatan dan Kelamin, dan berdasarkan kelompok usia tahun 2025 21
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk berumur 15 tahun ke atas Berdasar Aktifitas Selama Seminggu Terakhir Berdasar Kelamin Tahun 2025 22
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Agama yang Dianut Tahun 2025 23
Tabel 2.7 Pertumbuhan ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel Tahun 2025 24
Tabel 2.8 Tabel Nilai Inflasi Rata-Rata 5 Tahun Terakhir (2021 – 2025) Kabupaten Barito Kuala 25
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025) 26
Tabel 2.10 Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Barito Kuala berdasar Kecamatan 27
Tabel 2.11 Evaluasi Pelayanan Sanitasi Kabupaten Barito Kuala 27
Tabel 2.12 Rasio Gini di Kabupaten Barito Kuala 2021-2025 27
Tabel 2.13 Perolehan Nilai Komponen Penyusun IPM Kab. Barito Kuala Lima Tahun Terakhir (2021-2025) 28
Tabel 2.14 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, beserta Komponen Pendukungnya Tahun 2025 29
Tabel 2.15 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 32
Tabel 2.16 Jumlah Sekolah di Kabupaten Barito Kuala per Kecamatan tahun 2025 35
Tabel 2.17 Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Barito Kuala per Satuan Pendidikan tahun 2025 (orang) 36
Tabel 2.18 Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 38
Tabel 2.19 Sebaran Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 39
Tabel 2.20 Sebaran Dokter di Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 40
Tabel 2.21 Pelayanan Ibu Hamil dan Kondisi Ibu Hamil di Kabupaten Barito Kuala Selama 5 tahun terakhir (2021-2025) 41
Tabel 2.22 Kondisi Gizi Bayi di Barito Kuala tahun 2025 Berdasarkan Hasil Penimbangan di Masing-Masing Kecamatan 42
Tabel 2.23 Jumlah Angka Kematian Bayi di Kabupaten Barito Kuala 2021-2025 42
Tabel 2.24 Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala 3 (Tiga) Tahun Terakhir (2023-2025) 43
Tabel 2.25 Panjang Jalan Berdasar Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2025 44
Tabel 2.26 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2025 51
Tabel 2.27 Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 51
Tabel 2.28 Jumlah Korban Akibat Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 53
Tabel 2.29 Jumlah Penduduk berumur 15 tahun ke atas Berdasar Aktifitas Selama Seminggu Terakhir Berdasar Kelamin Tahun 2025 57
Tabel 2.30 Jumlah Penduduk berumur 15 tahun ke atas Berdasar Status Pekerjaan Utama Selama Seminggu Terakhir Berdasar Kelamin Tahun 2025 58

Tabel 2.31 Daftar Bank Sampah di Kabupaten Barito Kuala 61
Tabel 2.32 Sebaran Penduduk Berdasar Kelompok Umur di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 64
Tabel 2.33 Jumlah Kampung KB menurut Kecamatan dan Klasifikasinya Tahun 2025 65
Tabel 2.34 Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 66
Tabel 2.35 Data Trayek Angkutan dan Penumpang dan Rambu Sungai di Wilayah Peraian Kabupaten Barito Kuala 67
Tabel 2.36 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 72
Tabel 2.37 Jumlah Daya Terpasang, Produksi dan Penjualan Listrik serta Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025 76
Tabel 2.38 Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Barito Kuala berdasar Kecamatan Tahun 2025 76
Tabel 2.39 Rekapitulasi Data Pasar di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 77
Tabel 2.40 Jumlah Usaha Berdasar Skala Usaha di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 78
Tabel 2.41 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 79
Tabel 2.42 Jumlah Perusahaan Industri Besar, Sedang, Kecil dan Rumah Tangga berdasarkan jenisnya di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 80
Tabel 2.43 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2025 (ton) 81
Tabel 2.44 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2025 (ton) 82
Tabel 2.45 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berdasar Jenis Pendapatan Selama 2022-2024 84
Tabel 2.46 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berdasar Jenis Belanja Selama 2022-2024 84
Tabel 2.47 Jumlah ASN di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Berdasar Jabatan dan Jenis Kelamin 85
Tabel 2.48 Jumlah ASN di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Berdasarkan Tingat Pendidikan dan Jenis Kelamin 86
Tabel 2.49 Jumlah ASN di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin, PNS 87
Tabel 2.50 Jumlah ASN di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin, PPPK 87
Tabel 2.51 Jumlah Anggota Dewan Berdasar Jenis Kelamin dan Daerah Pemilihan Tahun 2025 88
Tabel 2.52 Jumlah Anggota Dewan Berdasar Jenis Kelamin dan Partai Politik Tahun 2025 88
Tabel 2.53 Jumlah Sidang/Rapat DPRD 5 Tahun Terakhir (2021 - 2025) 90
Tabel 2.54 Jumlah Surat Keputusan DPRD 5 Tahun Terakhir (2021 - 2025) 90
Tabel 2.55 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala (Persen), 2021 – 2025 92
Tabel 2.56 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala (Persen), 2021 – 2025 93
Tabel 2.57 Kontribusi Sektor terhadap PDRB (Estimasi Ranwal RKPD 2027) 94
Tabel 2.58 Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala 3 (Tiga) Tahun Terakhir (2023-2025) 95
Tabel 2.59 Panjang Jalan Berdasar Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2025 95
Tabel 2.60 Indikator SDM (Estimasi RKPD 2027) 97

Tabel 2.61 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 98
Tabel 2.62 Analisis Ringkas Daya Saing Daerah 101
Tabel 2.63 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025) 104
Tabel 2.64 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025 104
Tabel 2.65 Perbandingan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) antar Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025 105
Tabel 2.66 Perkembangan Kontribusi PDRB antar Kabupaten Barito Kuala dengan Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025) 106
Tabel 2.67 Perbandingan Tingkat Kemiskinan antar Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025 107
Tabel 2.68 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antar Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025 108
Tabel 2.69 Perkembangan Indeks Gini / Gini Rasio di Kabupaten Barito Kuala 5 Tahun Terakhir (2021-2025) 108
Tabel 2.70 Perbandingan Gini Rasio antatra Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Lima Tahun Terakhir (2021-2025) 109
Tabel 2.71 Perbandingan Gini Rasio antar Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025 109
Tabel 2.72 Komponen Penyusun Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Kuala Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir (2021-2025) 110
Tabel 2.73 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025 111
Tabel 2.74 Perkembangan Hasil Penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025) 113
Tabel 2.75 Nilai Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025 114
Tabel 2.76 Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional (Kota Surabaya) Tahun 2025 115
Tabel 2.77 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025 116
Tabel 2.78 Nilai Indeks Ketahanan Pangan antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025 118
Tabel 2.79 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Aspek Geografi dan Demografi 119
Tabel 2.80 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Kesejahteraan Masyarakat 119
Tabel 2.81 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Daya Saing Daerah 121
Tabel 2.82 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Pelayanan Umum 122
Tabel 2.83 Capaian SPM Bidang Pendidikan Barito Kuala 2023-2025 154
Tabel 2.84 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan Barito Kuala 155
Tabel 2.85 Capaian SPM Bidang Kesehatan Barito Kuala 2023-2025 157
Tabel 2.86 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan Barito Kuala 159
Tabel 2.87 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Barito Kuala 2023-2025 165
Tabel 2.88 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum Barito Kuala 165
Tabel 2.89 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Barito Kuala 2023-2025 167
Tabel 2.90 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum Barito Kuala 167
Tabel 2.91 Capaian SPM Bidang Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Barito Kuala 2023-2025 169

Tabel 2.92 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Barito Kuala 170
Tabel 2.93 Capaian SPM Bidang Sosial di Barito Kuala 2023-2025 171
Tabel 2.94 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Sosial di Barito Kuala 173
Tabel 2.95 Evaluasi Capaian SDGs Tahun 2024 Kabupaten Barito Kuala 181
Tabel 2.96 Indikator, Kebijakan dan Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Barito Kuala 182
Tabel 2.97 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 Keseluruhan 186
Tabel 2.98 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 SKPD Dinas Kesehatan 186
Tabel 2.99 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 SKPD Dinas Pendidikan 186
Tabel 2.100 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 SKPD Sekretariat Daerah 187
Tabel 2.101 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 SKPD Dinas Perhubungan 187
Tabel 2.102 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 187
Tabel 2.103 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 188
Tabel 2.104 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 SKPD Dinas Sosial 189
Tabel 2.105 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 189
Tabel 2.106 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 Hasil Verifikasi TAPD 191
Tabel 2.107 Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 286
Tabel 2.108 Daftar Usulan Inovasi Daerah Tahun 2026 289
Tabel 2.109 Sumber Data Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 296
Tabel 2.110 Daftar Data Daerah Kabupaten Barito Kuala 299
Tabel 2.111 Data Prioritas Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 300
Tabel 2.112 Peran Pemangku Kepentingan dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Barito Kuala 302
Tabel 2.113 Peran Portal Data Daerah dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 304
Tabel 2.114 Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 306
Tabel 2.115 Pemanfaatan Data Geospasial dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 309
Tabel 2.116 Matriks SWOT Kabupaten Barito Kuala 322
Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Barito Kuala 326
Tabel 3.2 Keterkaitan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dengan Program Strategis Nasional (Pro-SN) 329
Tabel 3.3 Skenario Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2027 330
Tabel 3.4 PDRB Kabupaten Barito Kuala Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2023–2025 338
Tabel 3.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021–2025 (Miliar Rupiah) 341
Tabel 3.6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021–2025 347
Tabel 3.7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2021–2025 (Miliar Rupiah) 351
Tabel 3.8 Distribusi (Share) PDRB Kabupaten Barito Kuala Menurut Pengeluaran Tahun 2021–2025 361
Tabel 3.9 (TC – 20) Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala 388

Tabel 3.10 (TC-21) Proyeksi Penghitungan Kebutuhan Belanja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 391
Tabel 3.11(TC-22) Proyeksi Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 395
Tabel 3.12 Matriks Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 410
Tabel 3.13 Komposisi PAD Tahun 2027 412
Tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan Transfer Tahun 2027 413
Tabel 3.15 Skenario Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2027 414
Tabel 3.16 Komposisi belanja daerah Tahun 2027 415
Tabel 4.1 Dukungan Kabupaten Barito Kuala terhadap Progran Prioritas Nasional 425
Tabel 4.2 Program Strategis Nasional (ProSN) 427
Tabel 4.3 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN) 429
Tabel 4.4 Dukungan terhadap Program Tematik Pembangunan 446
Tabel 4.5 Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2027 453
Tabel 4.6 Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 456
Tabel 4.7 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 458
Tabel 4.8 Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Kuala 460
Tabel 4.9 Tujuan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 462
Tabel 4.10 Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran RKPD Tahun 2027, Prioritas Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 464
Tabel 4.11 Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 467
Tabel 4.12 Capaian Pelayanan Air Minum Kabupaten Barito Kuala 475
Tabel 4.13 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 478
Tabel 4.14 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 479
Tabel 4.15 Arah Kebijakan Prioritas II Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah 487
Tabel 4.16 Prioritas Pengembangan Infrastruktur Jalan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 489
Tabel 4.17 Penguatan Readiness Criteria (RC) Proyek Prioritas Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 490
Tabel 4.18 Arah Kebijakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2027 491
Tabel 4.19 Arah Kebijakan Pengembangan Transportasi Tahun 2027 492
Tabel 4.20 Arah Kebijakan Prioritas IV Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 495
Tabel 4.21 Arah Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 496
Tabel 4.22 Matriks Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2027 498
Tabel 4.23 Matriks Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 503
Tabel 4.24 Matriks Keterkaitan Prioritas Pembangunan, Program Prioritas, Indikator Sasaran, Perangkat Daerah, dan Pendanaan Tahun 2027 506
Tabel 4.25 Kontribusi Prioritas Pembangunan terhadap Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2027 507
Tabel 4.26 Identifikasi Risiko Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 514
Tabel 4.27 Penilaian Risiko Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 517
Tabel 4.28 Strategi Mitigasi Risiko Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 520
Tabel 4.29 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Risiko Pembangunan Daerah Tahun 2027 524
Tabel 4.30 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barito Kuala 527
Tabel 4.31 Keselarasan prioritas daerah, sasaran, urusan dan program prioritas 529
Tabel 5.1 Matriks Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Kuala 534

Tabel 5.2 Pagu Indikatif Berdasarkan Prioritas 537
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Kuala 539
Tabel 6.2 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barito Kuala 540
Tabel 6.3 Indikator Kinerja Kunci per Urusan 541
Tabel 6.4 Target Indikator Kinerja Daerah 550

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Barito Kuala 10
Gambar 2.2 Curah Hujan dalam mm, Lima Tahun Terakhir 12
Gambar 2.3 Perkembangan Penduduk di Kab. Barito Kuala 19
Gambar 2.4 Sebaran Kepadatan Penduduk di Kab. Barito Kuala tahun 2025 20
Gambar 2.5 Pergerakan Tingkat Inflasi Rata-Rata 5 Tahun Terakhir 25
Gambar 2.6 Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kab. Barito Kuala 2021-2025 56
Gambar 2.7 Tren Indeks Pemberdayaan Gender di Kab. Barito Kuala 2020-2024 59
Gambar 2.8 Tren Indeks Ketimpangan Gender di Kab. Barito Kuala 2020-2024 59
Gambar 2.9 Tren Indeks Pembangunan Gender di Kab. Barito Kuala 2020-2024 60
Gambar 2.10 Tren Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Barito Kuala 2021-2025 103
Gambar 2.11 PDRB per Kapita Kabupaten di Kab. Barito Kuala 2021-2025 105
Gambar 2.12 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala 2021-2025 106
Gambar 2.13 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barito Kuala 107
Gambar 2.14 Perkembangan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Barito Kuala 116
Gambar 2.16 Perkembangan Nilai Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala 117
Gambar 2.17 Alur Pengelolaan Data Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 297
Gambar 2.18 Integrasi Portal Data Daerah dengan Portal Satu Data Indonesia Nasional 304
Gambar 2.19 Pemanfaatan Data Geospasial dalam Penyusunan RKPD 310
Gambar 2.20 Peta Tingkat Kemiskinan berdasarkan desil 1 Kabupaten Brito Kuala 311
Gambar 2.21 Peta Tingkat Kemiskinan berdasarkan desil 2 Kabupaten Brito Kuala 312
Gambar 2.22 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Barito Kuala 313
Gambar 2.23 Peta Fasilitas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala 314
Gambar 2.24 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Barito Kuala 315
Gambar 2.25 Peta Prioritas Penanganan Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala 316
Gambar 3.1 PDRB ADHB Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021–2025 339
Gambar 3.2 Tren PDRB ADHK Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021–2025 342
Gambar 3.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 348
Gambar 3.4 komposisi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 353
Gambar 3.5 Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran kabupaten Barito Kuala 2021-2025 359
Gambar 3.6 komposisi PDRB Kabupaten Barito Kuala menurut pengeluaran tahun 2025 362
Gambar 4.1 Siklus Manajemen Risiko Pembangunan Daerah 525

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. RKPD memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan selama satu tahun, sekaligus menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa RKPD harus disusun secara teknokratis, partisipatif, politis, serta mengintegrasikan pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dengan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD memiliki fungsi strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. RKPD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan dan penganggaran, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, kualitas penyusunan RKPD sangat menentukan konsistensi antara kebijakan pembangunan, pengalokasian sumber daya, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Peraturan Perundang-undangan Nasional

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025–2045
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025–2029
10. Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2027
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

B. Peraturan Teknis

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Derah tahun 2027

C. Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang RPJMD Tahun 2025–2029
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang RPJPD Tahun 2025–2045
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang RPJMD Tahun 2025–2029
5. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko

Dasar hukum ini menjadi landasan dalam menjamin bahwa penyusunan RKPD dilakukan secara legal, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 dilaksanakan dalam konteks pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 yang merupakan periode penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah. Pada tahap ini diperlukan penguatan sinergi antar perangkat daerah, peningkatan efektivitas program prioritas, serta penajaman sasaran pembangunan agar target indikator pembangunan dapat dicapai sesuai tahapan yang telah direncanakan.

Selain itu, dinamika pembangunan global, nasional, dan regional yang berkembang sangat cepat memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Barito Kuala. Tantangan tersebut antara lain meliputi perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan investasi, pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Di sisi lain, posisi strategis Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian dari kawasan Banjarbakula, daerah penyangga Kota Banjarmasin, serta salah satu lumbung pangan nasional memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan pertanian modern, hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan kawasan permukiman, peningkatan konektivitas wilayah, dan penguatan investasi daerah.

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan dan peluang tersebut, penyusunan RKPD Tahun 2027 mengusung tema **"Penguatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Investasi serta Infrastruktur Terintegrasi"**. Tema tersebut merupakan penjabaran tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 sekaligus selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027. Melalui tema tersebut diharapkan pembangunan daerah mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan investasi, memperkuat konektivitas wilayah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. RKPD disusun sebagai penjabaran tahunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 yang tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang sebagaimana

ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2045. Dalam penyusunannya, RKPD juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 agar terwujud sinkronisasi pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. Selanjutnya, RKPD menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS, dan APBD Tahun Anggaran 2027. Dengan keterkaitan tersebut, RKPD berfungsi sebagai simpul integrasi antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, sekaligus memastikan terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 juga dilaksanakan melalui proses yang partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain mengakomodasi aspirasi masyarakat, penyusunan RKPD juga memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025, capaian indikator kinerja daerah, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berbagai kebijakan strategis nasional dan daerah.

Dengan demikian, RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, adaptif terhadap dinamika pembangunan, konsisten dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, serta mampu mengarahkan seluruh sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang **Sejahtera, Agamis, Terpadu, dan Unggul (BATOLA SATU)** melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, kualitas pelayanan publik, dan pembangunan yang berkelanjutan2.2 Evaluasi Capaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan

1.4 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan RKPD Tahun 2027 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
3. Mengintegrasikan berbagai kebijakan pembangunan

B. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah:

1. Menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2027
2. Menyusun program dan kegiatan pembangunan yang terarah dan terukur
3. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi:

1.1 Latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RKPD Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RKPD.

1.2 Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.

1.3 Hubungan antar dokumen

1.4 Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2027.

1.5 Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam RKPD Tahun 2027.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum daerah yang meliputi:

2.1 Evaluasi capaian kinerja daerah berupa IKU dan IKD tahun 2025 (capaian tahun pertama RPJMD Tahun 2025-2029).

2.2 Evaluasi capaian program, kegiatan, subkegiatan cukup dimuat dalam laporan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.

2.3 Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025.

2.4 Rumusan permasalahan dan isu strategis Tahun 2027 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, evaluasi hasil RKPD Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.

2.5 Telaah pokok-pokok pikiran DPRD, yang selaras dengan isu, prioritas pembangunan daerah, dan program prioritas pembangunan daerah.

2.6 Inovasi daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.7 Penyajian data didasarkan pada e-walidata SIPD dan sumber data lainnya.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran keuangan daerah yang meliputi:

3.1 Arah kebijakan fiskal, target ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan yang menjadi acuan bagi penyusunan anggaran di daerah.

3.2 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023-2025.

3.3 Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2027 yang disusun berdasarkan proyeksi dalam RPJMD Tahun 2025-2029, kinerja keuangan tahun 2023-2025, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis (proyeksi keuangan tidak harus sama dengan RPJMD Tahun 2025-2029).

3.4 Pendanaan non-APBD.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan:

4.1 Tujuan dan sasaran RKPD (wajib sama dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029).

4.2 Penentuan target tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 (target IKU/IKD dapat melebihi/berkurang dari target RPJMD Tahun 2025-2029).

4.3 Tema dan fokus pembangunan yang didasarkan pada penahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tema dan fokus RKP Tahun 2027.

4.4 Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

4.5 Prioritas Pembangunan Daerah mempertimbangkan ketercapaian target indikator tujuan dan sasaran (IKU/IKD), tema dan fokus pembangunan, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

4.6 Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Provinsi Tahun 2027, tema RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

4.7 Program prioritas RKPD Tahun 2027 yang dirumuskan berdasarkan evaluasi efektivitas program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang juga sudah diselaraskan dengan RKP Tahun 2027, tema RKPD 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan:

5.1 Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan

RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.

5.2 Rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM, dan tematik lainnya sesuai konteks daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menyajikan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi:

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.

5.2 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki posisi strategis, baik dari sisi geografis maupun potensi sumber daya alam. Wilayah ini terletak di bagian barat provinsi dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten serta wilayah laut, sehingga memiliki peran penting sebagai penghubung aktivitas ekonomi antar wilayah.

Secara administratif, Kabupaten Barito Kuala terdiri dari 17 kecamatan dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh dataran rendah dan kawasan rawa. Kondisi geografis ini menjadikan wilayah Barito Kuala sangat dipengaruhi oleh sistem pasang surut air, terutama dari Sungai Barito dan wilayah pesisir Laut Jawa. Selain itu, keberadaan beberapa sungai besar seperti Sungai Barito, Sungai Negara, dan Sungai Kapuas memberikan manfaat besar sebagai jalur transportasi, sumber irigasi, serta pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, kondisi geografis tersebut juga menghadirkan tantangan, khususnya terkait risiko bencana banjir, genangan air, serta keterbatasan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah. Oleh karena itu, pembangunan di Kabupaten Barito Kuala perlu memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan potensi wilayah dan mitigasi risiko bencana.

Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 2.996,46 km². Terletak pada 2^{o} 29’ 50” – 3^{o} 30’ 18” Lintang Selatan dan 114^{o} 20’ 50” – 114^{o} 50’ 18” Bujur Timur dan berada pada pertemuan 3 (tiga) sungai besar yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuasdan Sungai Negara yang bermuara ke Kecamatan Tabunganen Awalnya ke Laut Jawa. Letak wilayah Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin, Banjar dan Kota Banjarmasin, selengkapnya adalah sebagai berikut.

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin
b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Laut Jawa;
c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah; dan
d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.

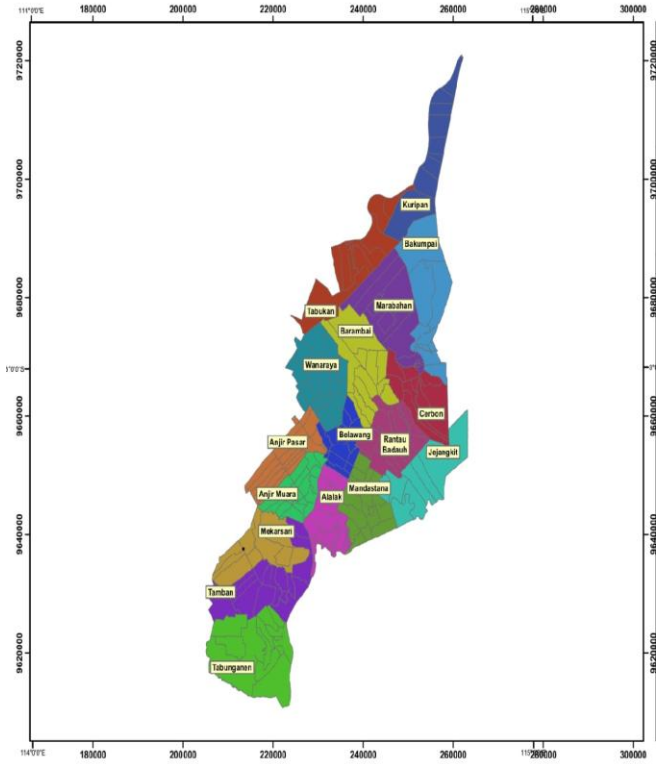
Wilayah Kabupaten Barito Kuala terbagi menjadi 17 (Tujuh Belas) kecamatan yang mana luas masing-masing kecamatan dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km^2)
1.	Tabunganen	Tabunganen Kecil	228,76
2.	Tamban	Purwosari I	170,91
3.	Mekarsari	Tamban Raya	134,44
4.	Anjir Pasar	Anjir Pasar Kota II	108,19
5.	Anjir Muara	Anjir Muara Kota	91,95
6.	Alalak	Handil Bakti	102,06
7.	Mandastana	Tabing Rimbah	115,52
8.	Jejangkit	Jejangkit Pasar	165,35
9.	Belawang	Belawang	72,13
10.	Wanaraya	Kolam Kiri	156,27
11.	Barambai	Barambai	163,11
12.	Rantau Badauh	Sungai Gampa	129,12
13.	Cerbon	Bantuil	118,58
14.	Bakumpai	Lepasan	182,00
15.	Marabahan	Marabahan Kota	177,36
16.	Tabukan	Teluk Tamba	168,65
17.	Kuripan	Rimbun Tulang	141,44
TOTAL (dalam Km^2)			2.425,83

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kecamatan Tabunganen merupakan Kecamatan terluas yakni 228,76 Km^2 atau 9,43% dari total luas wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belawang yakni 72,13 Km^2 atau hanya 2,97% dari total luas Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya dapat dilihat gambaran peta Kabupaten Barito Kuala, seperti pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Barito Kuala
Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

2.2 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.2.1 Kondisi Geografi

Kabupaten Barito Kuala memiliki topografi yang relatif datar dengan ketinggian wilayah antara 0,2 hingga 3 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayahnya berupa rawa dan lahan basah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kondisi ini menjadikan sektor pertanian, khususnya pertanian lahan pasang surut, sebagai salah satu sektor unggulan daerah.

Dari sisi hidrologi, wilayah ini dilalui oleh beberapa sungai besar yang memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat. Sungai-sungai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai sumber air untuk kegiatan pertanian, perikanan, serta kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Secara klimatologis, Kabupaten Barito Kuala memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Pola curah hujan yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir turut mempengaruhi kondisi pertanian dan potensi terjadinya bencana banjir.

A. Topgrafi Daerah

Kabupaten Barito Kuala merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0,2 sampai dengan 3 mdpl (meter dari permukaan laut) yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut

air dan sebagian tergenang dan didominasi oleh rawa. Karena merupakan dataran rendah maka hampir di semua kecamatan tumbuh hutan galam yang digunakan sebagai bahan bangunan dan purun yang dimanfaatkan untuk anyaman tikar, bakul dsb. Barito Kuala dibelah oleh Sungai Barito yang membentang dari selatan sebagai muara sungainya (Kecamatan Tabunganen) hingga ke-utara (Kecamatan Kuripan)

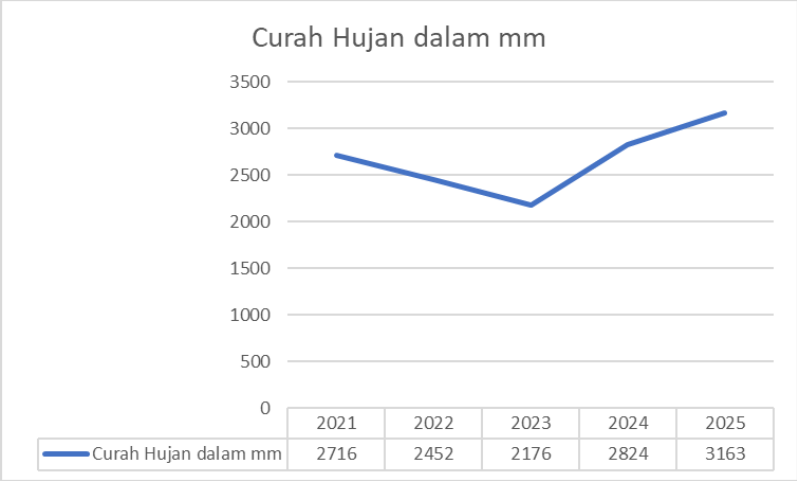
B. Hidrologi Daerah

Kondisi wilayah Kabupaten Barito Kuala sangat strategis karena wilayahnya dilalui oleh Sungai Barito, Sungai Negara dan Sungai Kapuas yang bermuara ke laut Jawa. Kabupaten Barito Kuala berada pada pertemuan tiga sungai tersebut. Sungai – sungai tersebut menjadi jalur transportasi bagi angkutan berbagai hasil bumi baik antar kabupaten dalam provinsi Kalimantan Selatan maupun antar provinsi di Kalimantan. Disamping berfungsi sebagai prasarana transportasi, Sungai Barito juga sebagai jaringan irigasi utama untuk berbagai usaha pertanian dan perikanan.

Selain Sungai Barito, sungai yang ada di Kabupaten Barito Kuala antara lain: Selain Sungai Barito, sungai yang ada di Kabupaten Barito Kuala antara lain:Sungai Negara, Sungai Kapuas, Sungai Alalak, Sungai Puntik, Saluran Drainase Tamban, Saluran Drainase Anjir Pasar, Saluran Drainase Tabukan dan Saluran Drainase Tabunganen.

C. Kondisi Klimatologis Daerah

Seperti umumnya daerah-daerah lain yang berada di Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala termasuk daerah yang beriklim tropis. Data curah hujan tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2021 sampai dengan 2025 menunjukkan bahwa curah hujan agregat tertinggi terjadi pada tahun 2025 dengan mencapai 3.163 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 250 hari. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 2.176 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 159 hari. Pergerkan curah hujan dari 2021 hingga 2023 cendereung menurun tiap tahunnya, namun dari 2024 menuju 2025 terjadi kenaikan curah hujan yang cukup tinggi. Bulan Tertinggi curah hujan dalam lima tahun selalu bergantian berkisar dari Bulan Desember – Januari, sedangkan Bulan Terendah curah hujan dalam lima tahun cenderung terjadi pada Bulan Juli. Grafis perkembangan curah hujan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2 Curah Hujan dalam mm, Lima Tahun Terakhir
Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2022-2026

D. Potensi Pengembangan Wilayah

1) Potensi Penggunaan Lahan

Kabupaten Barito Kuala mempunyai potensi terbesar pada sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Berdasarkan sektor ini, jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari penggunaan lahan pertanian dan lahan non pertanian.

a. Pertanian

Berbicara tanaman pangan, Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu lumbung padi bagi provinsi Kalimantan Selatan. Lahan sawah yang ada di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 seluruhnya merupkana lahan non irigasi dengan total luasan 117.419 Ha, dimana Kecamatan Tamban menjadi yang terluas dengan 11.371 ha dan Kecamatan Marabahan menjadi yang terkecil dengan hanya 1.895 ha. Pada tahun 2025 produksi padi di Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar 323.183 ton GKG (Gabah Kering Giling) dengan luas panen sebesar 91.057 ha. Beras Anjir menjadi produk/komoditas unggulan di Kabupaten Barito Kuala dan banyak diperjualbelikan hingga ke luar daerah.

Selain itu di Kabupaten Barito Kuala juga menghasilkan tanaman pangan lainnya seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Total produksi jagung di Kabupaten Barito Kuala sepanjang tahun 2025 sebesar 5.317,01 ton dengan produksi terbersarnya berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Wanaraya. Total produksi kacang tanah tahun 2025 adalah sebesar 78,41 ton yang sebagian besar dihasilkan di Kecamatan Wanaraya. Total produksi ubi kayu tahun 2025 sebesar 10.377,49 ton yang sebagian besari dihasilkan di Kecamatan Mekarsari. Terakhir total produksi ubi jalar tahun 2025 sebanyak 126,56 ton yang pada tahun ini hanya dihasilkan di dua kecamatan yaitu di Kecamatan Wanaraya dan Rantau Badauh. (*sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026*)

b. Hortikultura

Disamping pada sektor tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura Kabupaten Barito Kuala juga memiliki keunggulan yang kompetitif di Provinsi Kalimantan Selatan. Produk Hortikultura Jeruk Siam dan Nenas adalah dua komoditas buah-buahan dimana Barito Kuala memberikan sumbangsih yang besar pada total produksi buah tersebut di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2025, total produksi Jeruk Siam mencapai 559.187,27 kw (kuintal) yang mana produksi paling besar ada di Kecamatan Barambai dengan produksi sebanyak 204.976 kw, dilanjutkan produksi total Nenas pada tahun 2025 mencapai 23.684,50 kw yang mana produksi paling besar ada di Kecamatan Mekarsari dengan besaran produksi sebanyak 20.592 kw. Produksi buah-buahan lainnya yang tercatat selama tahun 2025 diantaranya adalah Semangka sebesar 96,8 kw, Melon sebesar 135,5 kw, Mangga sebesar 8.807,04 kw, , Pisang sebesar 1.660,25 kw, Pepaya sebesar 164,9 kw, Jambu Air sebesar 122,65 kw, Jambu Biji sebesar 242,67 kw, Nangka sebesar 360,07 kw, Pepaya sebesar 164,9 kw, Rambutan sebesar 484,5 kw, dan Sirsak 126,53 kw.

Selanjutnya, Produk Hortikultura pada segmen tanaman sayuran di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025 paling besar adalah tanaman Jamur Tiram dengan produksi sebesar 1.660 kw, dilanjutkan dengan Cabai Rawit sebesar 1.357,7 kw, Cabai Besar sebesar 1.335,4 kw, Ketimun sebesar 1.138,5 kw, Terung sebesar 908,9 kw, Daun Bawang sebesar 781,25 kw, Tomat sebesar 659 kw, dan Kacang Panjang sebesar 559,2 kw (*sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026*)

c. Perkebunan

Selain tanaman pangan dan hortiklutra, Kabupaten Barito Kuala juga memproduksi tanaman perkebunan, dengan produksi terbesar pada komoditas kelapa sawit, yakni sebesar 48.154,79 ton di sepanjang tahun 2025. Selain kelapa sawit, juga terdapat komoditas kelapa, karet, purun, dan sagu. Adapun total produksi tanaman perkebunan tersebut, berturut-turut adalah untuk Kelapa sebesar 5.396,84 ton; Karet sebesar 7.639,96 ton; Purun sebesar 421,88 ton; dan Sagu sebesar 5,39 ton (*sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026*)

d. Peternakan dan Perikanan

Populasi ternak pada tahun 2025 di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh Sapi Potong, yakni sebanyak 3.991 ekor. Sapi Potong tersebut sebagian besar terdapat di Kecamatan Wanaraya dan Kecamatan Mandastana. Selain Sapi Potong, terdapat juga ternak kambing dengan populasi sebanyak 1.009 ekor yang terdapat pada semua kecamatan, kecuali Kecamatan Kuripan. Sebaliknya di Kecamatan Kuripan terdapat ternak yang tidak ada pada kecamatan lain, yaitu Kerbau sebanyak 940 ekor. Di Kabupaten Barito Kuala juga terdapat ternak Babi, yakni sebanyak 84 ekor yang hanya berada di Kecamatan Barambai. Selama tahun 2025, total ternak yang telah dipotong adalah sebanyak 850 ekor Sapi Potong, 30 ekor Kerbau, dan 167 ekor Kambing yang mana sebagian besar dilaksanakan pada hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya total produksi daging ternak

selama tahun 2025 adalah 1.075,25 kw dari Sapi Potong, 69,27 kw dari Kerbau, dan 21,13 kw dari Kambing.

Unggas yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala sepanjang tahun 2025 adalah Ayam Pedaging sebanyak 2.979.066 ekor dengan yang terbanyak berada di Kecamatan Wanaraya yaitu sebesar 2.851.000 ekor; Ayam Kampung sebanyak 159.447 ekor yang terbagi rata di 17 Kecamatan; Itik sebanyak 34.726 ekor, dan Itik Manila sebanyak 2.029 ekor. Adapun unggas tersebut ada yang diambil dagingnya maupun telurnya. Total unggas yang telah dipotong adalah sebanyak 34.102 ekor Ayam Kampung, 1.543.750 ekor Ayam Pedaging, 215 ekor Itik, dan 76 ekor Itik Manila yang dari pemotongan tersebut dihasilkan produksi daging unggas selama tahun 2025 adalah 262,59 kw dari Ayam Kampung, 18.102,01 kw dari Ayam Pedaging, 2,72 kw dari Itik dan 0,84 kw dari Itik Manila. Kemudian telur yang dihasilkan dari unggas ini adalah 130.443,60 kg dari Ayam Kampung dengan produksi merata di ke-17 kecamatan dengan rata-rata produksi 7.000 s.d 8.000 kg, 278.261,94 kg dari Itik dengan produksi terbanyak di Kecamatan Tamban, dan 10.983,66 kg dari Itik Manila dengan produksi terbanyak di Kecamatan Bakumpai.

Sebagai wilayah yang dilalui salah satu sungai terpanjang, yakni Sungai Barito, serta berbatasan langsung dengan wilayah laut, maka masyarakat Kabupaten Barito Kuala cukup banyak yang mengusahakan perikanan tangkap. Pada tahun 2025, tercatat ada sekitar 808 rumah tangga yang melakukan penangkapan perikanan laut dengan produksi sebesar 3.548,77 ton, yang terkonsentrasi di Kecamatan Tabunganen dan Kecamatan Tamban. Selain itu, terdapat 1.167 rumah tangga yang melakukan penangkapan di perairan umum dengan total produksi sebesar 6.301,39 ton.

Selain perikanan tangkap, di Kabupaten Barito Kuala juga banyak rumah tangga yang melakukan budidaya perikanan, di mana sebagian besar menggunakan kolam, dan ada juga yang menggunakan tambak dan jaring apung. Adapun produksi perikanan budidaya sepanjang 2025 adalah sebesar 11.992,98 ton (*sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026*)

e. Pariwisata

Kabupaten Barito Kuala secara berkelanjutan dengan pengembangan pariwisata menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Melindungi lingkungan yang dimanfaatkan;
- Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kegiatan masyarakat;
- Menyajikan produk bermuatan pembelajaran, pendidikan dan rekreasi dari nilai-nilai karakteristik (alam dan budaya lokal);
- Memberi sumbangan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah; dan

- Menekan sejauh mungkin dampak negatif yang ditimbulkan dari rangkaian kegiatan pariwisata.

Pemanfaatan potensi SDA, SDM lokal, seni budaya dan adat khas dalam konsep pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan (masyarakat, pengusaha, BUMN/BUMD, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat) secara bersinergi, terkoordinasi dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga memberikan ruang yang luas bagi desa untuk memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di wilayahnya baik dalam pengelolaan daya tarik/atraksi wisata, peningkatan aksesibilitas, fasilitas penunjang dan pemanfaatan peluang usaha jasa pariwisata melalui badan usaha milik desa dan pemberdayaan kelompok sadar wisata. Pemasaran pariwisata dilakukan berdasarkan pertimbangan kemudahan aksesibilitas dan potensi jenis atraksi wisata.

Sepanjang tahun 2025 tercatat 207.963 wisatawan domestik yang berwisata di Kabupaten Barito Kuala dengan puncak kunjungan pada bulan Desember. Sedangkan wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Barito Kuala adalah 323 orang. Sebagian besar kunjungan wisatawan mancanegara tersebut dilakukan pada awal tahun (Januari s.d Maret). Sarana penunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Barito Kuala, antara lain tersedianya 4 penginapan dan 569 rumah makan/restoran yang tersebar di setiap kecamatan. Tercatat ada 7 objek wisata alam di Kabupaten Barito Kuala yaitu Pulau Bakut, Pulau Kembang, Rambai Mangrove Center, Agropolitan Terantang/Kampung Inggris, Susur Sungai Barito, Pulau Kaget, dan Pulau Curiak. Selain itu, terdapat 5 objek wisata buatan yaitu RTH Jembatan Rumpiang, Agrowisata Talaran Setara, Ulek (Siring) Marabahan, Kawasan Wisata Jembatan Barito, dan Jejangkit Ecopark. Terakhir ada 1 (satu) objek wisata religi yaitu Makam Datuk Abdussamad di Kecamatan Marabahan (*sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026*)

2) Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Pola Ruang

Pengembangan wilayah ke depan berdasarkan rencana pola ruang yang terkait dengan pengembangan potensi ekonomi terbagi atas kawasan budidaya, kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri dan pergudangan dan kawasan pariwisata. Jenis budidaya yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala meliputi budidaya pertanian dan budidaya perkebunan. Kawasan perdagangan dan jasa dijadikan kawasan strategis yang cepat tumbuh yang menjadi tempat pergudangan, perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan dan peruntukan lainnya.

Tabel 2.2 Pola Ruang Kabupaten Barito Kuala

NO	JENIS KAWASAN LINDUNG DAN LOKASI	LUAS (HA)
1	**Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**	
	Kawasan Lindung Gambut	
	1. Kecamatan Kuripan	79,72
Total		**79,72**
2	**Kawasan Perlindungan Setempat**	
	A. Sempadan Sungai	
	Anjir Pasar	-
	Anjir Muara	110,96
	Bakumpai	497,59
	Barambai	93,74
	Belawang	133,46
	Cerbon	96,76
	Jejangkit	-
	Alalak	74,41
	Kuripan	394,63
	Mandastanah	-
	Marabahan	-
	Mekarsari	-
	Rantau Badauh	41,16
	Tabukan	162,04
	Tabunganen	317,33
	Tamban	101,13
	Wanaraya	-
Total		**2023,197849**
3	**Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal**	**-**
	1. Kawasan tradisional Panglima Wangkang, terdiri atas :	-
	a. Kompleks Makam H. Abdussamad	
	b. Rumah bulat garing joglo	
	c. Rumah adat Banjar di Kec. Marabahan	
	d. Makam Datu Aminin dan Makam Datu Kayan di Kec. Alalak	
	2. Lain-lain terdiri atas :	
	a. Makam Datuk Ilyas Bakul	
	b. Makam Tabib Gabun	
	c. Makam Syahidun	
	d. Makam Habib Alwi	
	e. Makam Syarifah Ratu Shella	
	f. Makam Panglima Jaya Arja	
4	**Kawasan Konservasi**	
	Kawasan Suaka Alam	
	Anjir Muara	38,23

NO	JENIS KAWASAN LINDUNG DAN LOKASI	LUAS (HA)
	Alalak	80,21
	Tabunganen	3836,69
Total		**3955,13**
5	**Kawasan Rawan Bencana Alam**	
	1. Kawasan rawan gelombang pasang	-
	a. Terdapat di Kec. Tabukan, Kec. Marabahan, Kec. Cerbon, Kec. Rantau Badauh, Kec. Belawang, Kec. Anjir Pasar, Kec. Anjir Muara, Kec. Alalak, Kec. Tamban dan Kec. Tabunganen	
	2. Kawasan rawan banjir	
	a. Terdapat di Kec. Kuripan, Kec. Bakumpai, Kec. Tabunganen, Kec. Mandastana, Kec. Jejangkit dan Kec. Tabukan yang terdiri atas :	
	✓ Daerah pesisir/pantai, meliputi sepanjang pantai Selatandan wilayah Kecamatan Tabunganen	
	✓ Daerah dataran banjir tersebar pada daerah rendah dan rawa di Kec. Bakumpai	
	✓ Daerah sempadan sungai meliputi Kec. Tabukan dan Kec. Kuripan	
	3. Kawasan kebakaran hutan	
	Tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.	
6	**Kawasan Cagar Budaya**	
	1. Kawasan tradisional Panglima Wangkang, terdiri atas :	-
	a. Kompleks Makam H. Abdussamad	
	b. Rumah bulat garing joglo	
	c. Rumah adat Banjar di Kec. Marabahan	
	d. Makam Datu Aminin dan Makam Datu Kayan di Kec. Alalak	
	2. Lain-lain terdiri atas :	
	a. Makam Datuk Ilyas Bakul	
	b. Makam Tabib Gabun	
	c. Makam Syahidun	
	d. Makam Habib Alwi	
	e. Makam Syarifah Ratu Shella	
	f. Makam Panglima Jaya Arja	
Total Kawasan Lindung		**6.058,048**

Sumber: RPJPD Kab. Barito Kuala

Kawasan industri besar sebagain besar berlokasi di Kecamatan Tamban, Tabunganen, Anjir Muara dan Alalak. Kemudian untuk kawasan industri sedang diarahkan ke Kecamatan Alalak Tamban, Anjir Muara, Tabunganen dan Rantau Badauh. Terakhir pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Barito Kuala diarahkan dengan potensi wisata religius, wisata buatan dan wisata alam yang tersebar di seluruh Kabupaten Barito Kuala sesuai potensi yang ada.

E. Kawasan Rawan Bencana

Topografi Kabupaten Barito Kuala yang relatif datar dan berada hanya 0,2 - 3 meter di atas permukaan laut (mdpl) menyebabkan Kabupaten Barito Kuala rawan terhadap genangan-genangan air baik yang disebabkan oleh air hujan maupun dari pengaruh pasang surut air laut. Potensi banjir kiriman juga bisa saja terjadi karena posisi Kabupaten Barito Kuala yang berada di antara pertemuan 2 (dua) sungai besar yakni Sungai Barito dan Sungai Negara. Curah hujan yang cukup tinggi dari daerah atau wilayah hulu serta pasang air laut merupakan sumber penyebab terjadinya bencana alam banjir di Kabupaten Barito Kuala.

Adapun daerah-daerah yang rawan banjir yaitu di Kecamatan Kuripan, Bakumpai, Tabunganen, Mandastana, Jejangkit dan Tabukan. Sedangkan daerah yang rawan bencana gelombang pasang adalah Kecamatan Tabukan, Marabahan, Cerbon, Rantau Badauh, Belawang, Anjir Pasar, Alalak, Tamban dan Tabunganen.

Potensi Bencana dapat dilihat dari Indeks Resiko Bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dapat diakses secara *online* melalui website https://inarisk.bnpb.go.id/irbi. Berikut adalah tabel Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.3 Indeks Resiko Bencana Kab. Barito Kuala 2021-2025

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Indeks Resiko Bencana Kab. Barito Kuala	155,96	140,65	149,6	156,15	156,15

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Indeks Resiko Bencana dilihat jika semakin rendah nilai indeks yang diperoleh, maka semakin rendah resiko bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten tersebut, begitupula sebaliknya. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 3 (Tiga) tahun terakhir, Resiko Bencana di Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dimana kemungkinan disebabkan pengaruh alam baik secara internal maupun eksternal.

2.2.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2025, jumlah penduduk tercatat sekitar 334 ribu jiwa. Pertumbuhan penduduk ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi, namun di sisi lain juga menuntut peningkatan pelayanan dasar dan penyediaan infrastruktur.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Barito Kuala tidak merata, dengan konsentrasi tertinggi berada di wilayah yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi dan akses transportasi. Selain itu, struktur penduduk

didominasi oleh usia produktif, yang merupakan potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah apabila dapat dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

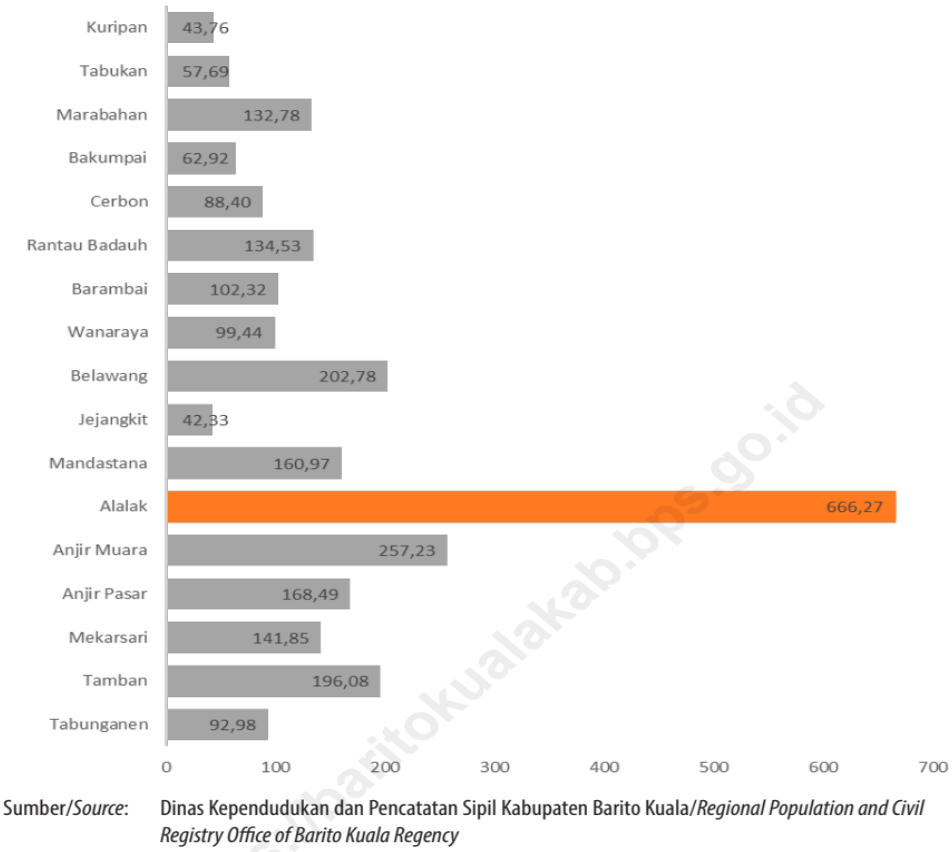
Dari sisi ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor primer, sehingga perlu dilakukan transformasi ekonomi secara bertahap menuju sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Secara umum penduduk Kabupaten Barito Kuala terdiri dari beberapa suku yaitu Suku Dayak Bakumpai, Banjar, Jawa, Bali, Sunda, Madura dan Sasak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun terakhir (2021-2025) tercatat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2021, Penduduk di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebanyak 316.960 jiwa, kemduian meningkat di tahun 2022 sebanyak 321.770, tahun 2023 sebanyak 324.502 jiwa, tahun 2024 tercatat sebanyak 329.779 jiwa, hingga terakhir pada 2025 tercatat sebanyak 334.958 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada info grafis berikut.



Gambar 2.3 Perkembangan Penduduk di Kab. Barito Kuala
Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2022-2026

Kepadatan Penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Alalak dengan kepadatan sebesar 662,27 jiwa/km^2 diikuti oleh Kecamatan Anjir Muara yaitu sebesar 257,23 jiwa/km^2. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Jejangkit yaitu sebesar 42,33 jiwa/km^2 . Selebihnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.4 Sebaran Kepadatan Penduduk di Kab. Barito Kuala tahun 2025
Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

Pada aspek demografis ini dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

1) Perbandingan Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025 sebanyak 334.958 jiwa, yang terdiri dari 169.297 laki-laki dan 164.998 perempuan. Jika dilihat berdasarkan kelompok jenis kelaminnya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,61 yang artinya jika terdapat 100 penduduk perempuan, maka akan terdapat sejumlah 102 atau 103 penduduk laki-laki. Lebih detailnya, jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin, dan juga berdasar rentang/kelompok usia di Barito Kuala pada tahun 2025 dapat dilihat pada kedua tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Perbandingan Penduduk berdasar Kecamatan dan Kelamin, dan berdasarkan kelompok usia tahun 2025

Kecamatan *District*	Jenis Kelamin/*Sex*		
	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
Tabunganen	10.804	10.466	21.270
Tamban	17.043	16.470	33.513
Mekarsari	9.691	9.379	19.070
Anjir Pasar	9.178	9.051	18.229
Anjir Muara	11.982	11.670	23.652
Alalak	34.314	33.686	68.000
Mandastana	9.395	9.200	18.595
Jejangkit	3.589	3.410	6.999
Belawang	7.439	7.188	14.627
Wanaraya	7.596	7.281	15.540
Barambai	8.449	8.240	16.689
Rantau Badauh	8.739	8.631	17.370
Cerbon	5.312	5.171	10.483
Bakumpai	5.930	5.522	11.452
Marabahan	11.752	11.799	23.551
Tabukan	4.910	4.819	9.729
Kuripan	3.174	3.015	6.189
Barito Kuala	**169.297**	**164.998**	**334.958**

Sumber/*Source*: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala/*Regional Population and Civil Registry Office of Barito Kuala Regency*

Kelompok Umur *Age Groups*	Jenis Kelamin/*Sex*		
	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	10.700	9.907	20.607
5–9	13.755	13.087	26.842
10–14	14.644	13.999	28.643
15–19	14.254	13.604	27.858
20–24	14.400	13.251	27.651
25–29	12.500	11.423	23.923
30–34	12.898	12.002	24.900
35–39	12.738	12.608	25.346
40–44	13.138	13.105	26.243
45–49	12.898	12.882	25.780
50–54	11.203	11.533	22.736
55–59	9.588	9.524	19.112
60–64	6.849	6.610	13.459
65–69	4.710	5.103	9.813
70–74	2.746	2.674	5.420
75+	2.618	4.007	6.625
Barito Kuala	**169.639**	**165.319**	**334.958**

Sumber/*Source*: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala/*Regional Population and Civil Registry Office of Barito Kuala Regency*

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

2) Berdasarkan Pekerjaan

Jumlah penduduk pada usia kerja per tahun 2025 adalah sebanyak 251.351 Jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 180.935 jiwa, yang terdiri dari penduduk yang bekerja sebesar 175.099 jiwa dan penduduk yang menganggur (pengangguran terbuka) sebesar 5.836 jiwa. Sedangkan penduduk yang termasuk dalam golongan bukan angkatan kerja sebanyak 70.416 jiwa, yang terdiri dari penduduk yang bersekolah sebesar 22.109 jiwa, mengurus rumah tangga sebesar 44.411 jiwa dan termasuk

kategori lainnya sebesar 3.896 jiwa. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin serta persentase penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk berumur 15 tahun ke atas Berdasar Aktifitas Selama Seminggu Terakhir Berdasar Kelamin Tahun 2025

Kegiatan Utama *Main Activity*	Jenis Kelamin/*Sex*		
	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Laki-Laki+ Perempuan *Male+Female*
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja/*Labour force*	109.815	71.120	180.935
1. Bekerja/*Working*	106.164	68.935	175.099
2. Pengangguran terbuka/*Unemployment*	3.651	2.185	5.836
II. Bukan angkatan kerja/*Not in labour force*	17.159	53.257	70.416
1. Sekolah/*Attending school*	10.940	11.169	22.109
2. Mengurus rumah tangga/*Housekeeping*	3.764	40.647	44.411
3. Lainnya/*Others activities*	2.455	1.441	3.896
Jumlah/*Total*	**126.974**	**124.377**	**251.351**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja *Labour Force Participation Rate*	**86,49**	**57,18**	**71,98**
Tingkat Pengangguran *Unemployment Rate*	**3,32**	**3,07**	**3,23**

Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/*BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey*

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

3) Berdasarkan Agama

Pada tahun 2025, hampir sebagian besar penduduk di Kabupaten Barito Kuala menganut agama Islam. Selain dari agama Islam, juga ada penganut Kristen Protestan sebanyak 1.347 orang dengan total penganut agama ini terbanyak berada di Kecamatan Alalak. Kemudian penganut Kristen Katolik sebanyak 686 orang dengan total penganut agama ini terbanyak juga berada di Kecamatan Alalak. Lalu penganut Hindu sebanyak 1.472 orang dengan total penganut agama ini terbanyak berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Barambai dan Wanaraya, dan terakhir ada penganut Budha dengan total penganut sebanyak 54 orang yang berada di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Alalak dan Kecamatan Tamban. Detail mengenai sebaran penduduk berdasarkan agama yang dianut per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Agama yang Dianut Tahun 2025

Kecamatan *District*	Islam	Protestan *Protestant*	Katolik *Catholic*	Hindu	Budha *Buddha*	Lainnya *Others*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tabunganen	21.267	3	–	–	–	–
Tamban	33.497	7	4	3	2	–
Mekarsari	19.069	1	–	–	–	–
Anjir Pasar	18.219	6	4	–	–	–
Anjir Muara	23.611	13	28	–	–	–
Alalak	66.991	701	206	50	52	–
Mandastana	18.542	45	8	–	–	–
Jejangkit	6.958	24	17	–	–	–
Belawang	14.598	18	11	–	–	–
Wanaraya	14.812	88	4	636	–	–
Barambai	15.821	117	4	747	–	–
Rantau Badauh	17.332	22	16	–	–	–
Cerbon	10.250	55	178	–	–	–
Bakumpai	11.235	111	102	4	–	–
Marabahan	23.363	88	68	32	–	–
Tabukan	9.729	–	–	–	–	–
Kuripan	6.105	48	36	–	–	–
Barito Kuala	**331.399**	**1.347**	**686**	**1.472**	**54**	**–**

Sumber/*Source*: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala/Regional Population and Civil *Registry Office of Barito Kuala Regency*

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Secara umum, kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Aspek Kesejahteraan Masyarakat dapat dilihat pada 3 (Tiga) aspek yaitu Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial, dan Fokus Seni Budaya dan Olahraga.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah persentase kenaikan (atau penurunan) nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) dalam periode tertentu, yang datanya dirilis secara resmi oleg Badan Pusat Statistik (BPS). Laju Pertumbuhan PDRB menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena ia menunjukkan 77apakah aktivitas ekonomi daerah meningkat atau menurun, apakah dunia usaha sedang berkembang atau lesu, apakah daya beli masyarakat cenderung naik atau turun, dan juga menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi. Berikut diperlihatkan tabel pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Barito Kuala dan juga 12 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.7 Pertumbuhan ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel Tahun 2025

Kabupaten/Kota + Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Persen)
	2025
KALIMANTAN SELATAN	5,22
TANAH LAUT	5,14
KOTABARU	5,34
BANJAR	5,07
BARITO KUALA	5,27
TAPIN	4,24
HULU SUNGAI SELATAN	5,11
HULU SUNGAI TENGAH	5,01
HULU SUNGAI UTARA	5,02
TABALONG	4,69
TANAH BUMBU	5,52
BALANGAN	4,51
KOTA BANJARMASIN	5,66
KOTA BANJAR BARU	6,49

Sumber: BPS Kalsel

2) Laju Inflasi

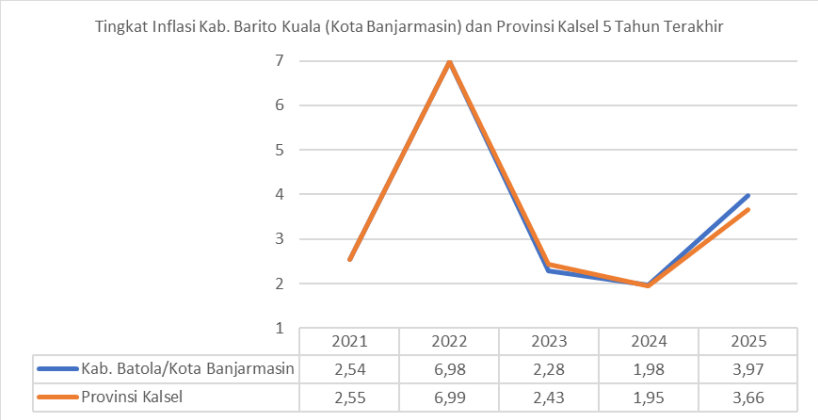
Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun, sedangkan inflasi adalah suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum (*price level*) cenderung naik. Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Kecenderungan tingkat inflasi di Kabupaten Barito Kuala mengacu inflasi di Kota Banjarmasin. Berdasar pada data dari website publikasi data BPS Kalimantan Selatan di laman *kalsel.bps.go.id*, Tingkat Inflasi di Kota Banjarmasin selama 5 tahun terakhir mengalami naik-turun yang cukup signifikan yang dapat dilihat pada tabel dan infografis di bawah. mengacu pada Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Banjarmasin dan Perbandingannya dengan Provinsi Kalimantan Selatan antara Kab. Barito Kuala (Kota Banjarmasin)

Tabel 2.8 Tabel Nilai Inflasi Rata-Rata 5 Tahun Terakhir (2021 – 2025)
Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten	2021	2022	2023	2024	2025*
Barito Kuala	2,54%	6,98%	2,28%	1,98%	3,97%
Kalimantan Selatan	**2,55%**	**6,99%**	**2,43%**	**1,95%**	**3,66%**

Sumber: BPS Kalsel



Gambar 2.5 Pergerakan Tingkat Inflasi Rata-Rata 5 Tahun Terakhir
Sumber: kalsel.bps.go.id

Berdasar tabel dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Tingkat Inflasi antara Kota Banjarmasin yang menjadi acuan untuk tingkat inflasi di Kabupaten Barito Kuala selalu beriringan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi selama tahun 2021 hingga 2023 selalu berada dibawah sedikit dari Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan, kecuali pada tahun 2024 dan 2025 dimana Tingkat Inflasi Kota Banjarmasin berada di atas Provinsi Kalimantan Selatan. Secara perkembangannya selama 2021 hingga 2022 tingkat inflasi meningkat dengan puncak tertingginya berada di tahun 2022 dimana tingkat inflasi berada di atas 5%, namun kemudian mulai menurun dan hingga tahun 2024, sudah berada pada level 1,98% untuk Kota Banjarmasin dan 1,95% untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2025 khususnya pada akhir tahun mengalami peningkatan menjadi 3,97% dimungkinkan karena pada bulan desember wilayah Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Barito Kuala mengalami bencana banjir yang cukup lama sehingga meningkatnya permintaan bahan makanan yang mngekibatnya meningkatnya inflasi seperti beras local dan ikan haruan yang biasanya mempengaruhi inflasi khsusnya di daerah Kabupaten Barito Kuala.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada 2 (dua) sisi, yaitu terkait **Kemiskinan** dan **Pembangunan Manusia**.

1. Kemiskinan

Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala berjumlah 13.965 orang, sedangkan pada tahun sebelumnya di 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala berjumlah 14.044 orang, yang artinya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala turun sebanyak 79 orang. Lebih detailnya, kondisi kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun terakhir (2021 hingga 2025) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2021	16.099	5,11	355.160	0,565	0,121
2022	15.055	4,75	375.707	0,711	0,173
2023	14.707	4,60	417.110	1,144	0,395
2024	14.044	4,36	437.579	0,689	0,156
2025	13.965	4,31	459.547	0,569	0,124

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa secara jumlah dan persentase penduduk miskin, di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 sampai 2025 perlahan tapi pasti menurun secara signifikan. Selanjutnya, garis kemiskinan tiap tahun selalu mengalami peningkatan, hingga tahun 2025 mencapai Rp. 459.547,00 / Kapita / Bulan. Sedangkan pada Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemsikinan mengalami naik-turun selama 5 tahun terakhir, dengan puncak tertinggi berada pada tahun 2023 dan terendah berada pada tahun 2021. Ada 3 hal yang sangat mempengaruhi kemiskinan terutama terkait kemiskinan esktrem, yaitu *akses terhadap air bersih, sanitasi*, dan *pendapatan masyarakat*.

- Berdasar data dari BPS Kalimantan Selatan, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Barito Kuala di tahun 2025 adalah sebesar 71,05%* , masih cukup jauh di bawah Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai angka 86,8%. Ini disebabkan karena masih banyaknya penggunaan jamban di bantaran sungai oleh masyarakat Kabupaten Barito Kuala sebagai sarana sanitasi.
- Selanjutnya terkait akses terhadap air bersih, berdasar rilis data oleh PDAM Kabupaten Barito Kuala melalui BPS Kabupaten Barito Kuala, total pelanggan yang mendapat akses air bersih PDAM adalah sebanyak 41.403 pelanggan, dengan pelanggan terbanyak di Kecamatan Alalak dan Mandastana. Jika dibandingkan dengan total penduduk Kabupaten Barito Kuala, maka total penduduk yang sudah memiliki akses air bersih PDAM adalah sebesar 12,36%, meningkat sebesar 0,42% dari tahun sebelumnya (2024) yaitu sebesar 11,94%. Detail mengenai cakupan akses air bersih PDAM dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.10 Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Barito Kuala berdasar Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan *District*	Pelanggan *Number of Customers*	Air Disalurkan *Distributed Water* (m^3)	Penjualan *Sold Water* (m^3)	Nilai *Value* (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen	539	100.198	89.344	365.041.000
Tamban-Mekarsari	319	58.660	52.530	239.642.000
Anjir Pasar-Anjir Muara	2.902	837.784	588.513	3.636.953.500
Alalak-Mandastana	25.550	5.695.764	4.487.221	29.258.193.000
Jejangkit	403	85.336	67.914	428.761.000
Belawang-Wanaraya	790	196.760	176.802	1.002.544.500
Barambai	1.549	447.225	364.522	2.012.487.500
Rantau Badauh	1.447	399.767	376.834	2.068.305.000
Cerbon	1.064	302.716	287.731	1.548.327.000
Bakumpai	247	58.121	50.842	305.454.500
Marabahan	5.542	2.138.055	1.430.068	8.382.560.500
Tabukan-Kuripan	1.051	302.988	218.955	1.252.808.000
Barito Kuala	**41.403**	**10.623.374**	**8.191.276**	**50.501.077.500**

Sumber/*Source*: PDAM Kabupaten Barito Kuala/*PDAM of Barito Kuala Regency*

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

Tabel 2.11 Evaluasi Pelayanan Sanitasi Kabupaten Barito Kuala

Indikator	2024	2025	Perubahan	Tindak Lanjut RKPD 2027
Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (SR)	1.192	614	**-48,5%**	Perluasan SPALD, rehabilitasi jaringan, pembangunan sanitasi komunal
Indikator RPJMD	Sanitasi Layak	Sanitasi Layak	-	Diselaraskan menjadi **Akses Sanitasi Aman**
Integrasi Program	Belum optimal	Belum optimal	-	Integrasi dengan penurunan stunting, air minum aman, drainase, dan pengendalian genangan
Target RKPD 2027	-	-	-	Pemulihan cakupan layanan SPM dan peningkatan akses sanitasi aman

- Terakhir terkait pendapatan, dapat dilihat pada Rasio Gini (Ketimpangan Pendapatan) di Kabupaten Barito Kuala. Berikut dilihatkan perkembangan Rasio Gini di Kabupaten Barito Kuala selama tahun 2021 hingga 2025.

Tabel 2.12 Rasio Gini di Kabupaten Barito Kuala 2021-2025

Tahun ***Year***	**Rasio Gini** ***Gini Ratio***
2021	0,284
2022	0,289
2023	0,312
2024	0,272

Tahun *Year*	Rasio Gini *Gini Ratio*
2025	0,269

Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Bisa dilihat pada tabel diatas, bahwa Rasio Gini/Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Barito Kuala sempat mengalami peningkatan dari tahun 20210 hingga 2023, yang mengindikasikan jarak ketimpangan pendapatan di masyarakat yang semakin tinggi. Namun, tahun 2024 hingga 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan yang mengindikasikan bahwa kesenjangan pendapatan di masyarakat Kabupaten Barito Kuala mulai mengecil.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya berikaitan dengan **Pembangunan Manusia**. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025 adalah sebesar 72,5 dengan kategori "Tinggi", dimana indeks tersebut mengalami kenaikan 0,65 poin dari tahun 2024 dimana nilai indeks IPM tahun 2024 adalah 71,4. Adapun komponen penyusun IPM terdiri atas: Umur Harapan Hidup yang pada tahun 2025 adalah sebesar 72,85 Tahun; Rata-Rata Lama Sekolah yang pada tahun 2025 adalah sebesar 7,99 Tahun; Harapan Lama Sekolah yang pada tahun 2025 adalah sebesar 12,69 tahun; dan Pengeluaran per Kapita yang pada tahun 2024 adalah sebesar 11.469.000 ribu rupiah/kapita/tahun. Perkembangan komponen IPM selama 5 tahun di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.13 Perolehan Nilai Komponen Penyusun IPM Kab. Barito Kuala Lima Tahun Terakhir (2021-2025)

Tahun	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun))	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Kapita/ Tahun)	IPM
2021	71,56	12,40	7,55	9.868	69,08
2022	71,94	12,54	7,63	10.230	69,87
2023	72,28	12,55	7,74	10.750	70,67
2024	72,52	12,56	7,92	11.168	71,40
2025	72,85	12,69	7,99	11.469	72,05

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

Meskipun baik secara indeks IPM maupun ke-4 komponen penyusun IPM mengalami kenaikan yang cukup signifikan tiap tahunnya selama 5 tahun terakhir, namun pada tahun 2025 Indeks IPM di Kabupaten Barito Kuala menjadi yang paling rendah diantara 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Barito Kuala berada sekitar 0,34 point selisih dari Kabupaten Hulu

Sungai Utara yang tahun sebelumnya masih di bawah Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala memiliki selisih nilai sebesar 3,79 yang terbilang cukup jauh. Perbandingan nilai IPM Kabupaten Barito Kuala dengan 13 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan dan dengan Provinsi Kalimantan Selatan itu sendiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14 Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, beserta Komponen Pendukungnya Tahun 2025

PROV/KAB/KOTA	NILAI IPM	HARAPAN LAMA SEKOLAH	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	USIA HARAPAN HIDUP
KALIMANTAN SELATAN	**76,10**	**13,12**	**8,82**	**74,49**
TANAH LAUT	74,32	12,7	8,09	74,88
KOTABARU	73,03	12,23	7,71	74,03
BANJAR	75,11	13,05	8,15	73,87
BARITO KUALA	72,05	12,69	7,99	72,85
TAPIN	74,98	12,6	8,38	75,09
HULU SUNGAI SELATAN	74,81	12,78	8,18	73,27
HULU SUNGAI TENGAH	74,26	12,58	8,45	73,02
HULU SUNGAI UTARA	72,67	13,47	8	72,95
TABALONG	76,94	13,18	9,37	74,95
TANAH BUMBU	75,09	12,8	8,44	74,68
BALANGAN	74,78	13,35	8,34	74,14
KOTA BANJARMASIN	80,88	14,02	10,36	75,38
KOTA BANJAR BARU	82,20	14,87	11,07	75,44

Sumber: BPS Kalimantan Selatan

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Jumlah organisasi kepemudaan

yang ada menyebar di beberapa kecamatan diantaranya merupakan organisasi pemuda yang sudah cukup terkenal di masyarakat seperti: AMPI, KNPI, Karang Taruna, dan Kelompok Pemuda Produktif yang telah terdaftar dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Penyelenggaraan kegiatan olah raga, yang dilaksanakan/diprogramkan oleh Pemerintah Daerah meliputi: Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kompetisi, Festival, Kejurda, dan Turnamen-turnamen lainnya dan kegiatan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat/swasta/sponsor/pihak ketiga. Kegiatan olah raga yang rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah seperti event dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan dan Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

Selanjutnya mengenai situs budaya, selain makam Datuk H. Abdussamad masih banyak makam yang didatangi peziarah seperti makam Panglima Wangkang, Datuk Ilyas Bakul, Datuk Syahidun, Datuk Aminim, Datuk Khayan, Habib Alwi, Syarifah Ratu Sela, dan Jaya Arja serta wisata sejarah lainnya seperti rumah bulat dan rumah budaya. Kelompok kesenian budaya dan keagamaan juga tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Jenis kesenian budaya dan keagamaan tersebut antara lain Maulid Habsyi, Rebana, Sinoman Hadrah, Kuda Lumping, Kuda Gepang, Reog dan Keroncong.

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum merupakan salah satu fungsi utama pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Barito Kuala secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik, yang tercermin dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berada pada kategori baik.

Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi, termasuk penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum meratanya kualitas pelayanan di seluruh wilayah. Selain itu, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan perizinan menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui mutu pelayanan administrasi pemerintahan digunakan indikator indeks kepuasan

masyarakat. Pengukuran capaian indeks kepuasan masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mana terdapat 14 (empat belas) unsur yang menjadi indikator kepuasan masyarakat terhadap suatu bentuk pelayanan publik. Mutu pelayanan di Kabupaten Barito Kuala dikategorikan baik bila indeks kepuasan masyarakat berada pada interval nilai 62,81 – 81,25. Indikator-indikator kepuasan masyarakat terhadap suatu bentuk pelayanan publik tersebut antara lain:

a) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
b) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
c) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
d) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
e) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
f) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
g) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
h) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
i) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
j) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
k) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
l) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
m) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi saran dan prasarana pelayananm yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
n) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk

mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tiap tahun dilaksanakan sebanyak 2 kali yang terbagi atas 2 semester. Semester 1, yaitu pada Bulan Desember sampai dengan Bulan Mei dan Semester 2, yaitu pada Bulan Juni sampai dengan Bulan November. Unit Penyelenggara Pelayanan yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat adalah Satuan / Unit Kerja yang tugas dan fungsinya memberikan langsung pelayanan kepada masyarakat. Ada 55 unit pelayanan yang wajib melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, baik pelaksana survei, indikator yang digunakan dan metodelogi yang diterapkan.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri dan langsung oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan, mulai dari penyebaran kuisioner, penghitungan kuisioner dan penyusunan laporan hasil survei. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan survei dengan mewajibkan semua unit penyelenggara pelayanan menyampaikan laporan hasil survei kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dijadikan bahan evaluasi capaian kinerja pelayanan pada masing-masing unit penyelenggara pelayanan. Dengan demikian, diharapkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh unit penyelenggaran pelayanan secara mandiri dan langsung dapat dipantau dan dievaluasi progres atau kemajuan capaian kinerja pelayanannya setiap tahun.

Brerikut Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang disajikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam Laporan Pelaksanaan SKM di Pemerintah Kabupaten Barito Kuala .

Tabel 2.15 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

No	**Nama SKPD**	**Penilaian Periode 1 (Desember 2024-Mei 2025)**		**Penilaian Periode 2 (Juni 2025-November 2025)**	
		Nilai	**Kategori**	**Nilai**	**Kategori**
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95,41	A	95,65	A
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	93,43	A	94,35	A
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89,95	A	90,14	A
4	Dinas Ketahanan	82,96	B	83,2	B

No	Nama SKPD	Penilaian Periode 1 (Desember 2024-Mei 2025)		Penilaian Periode 2 (Juni 2025-November 2025)	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
	Pangan dan Perikanan				
5	Dinas Perkebunan dan Peternakan	84,04	B	88,5	A
6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	86,59	B	91,01	A
7	Dinas Kesehatan	91,41	A	87,27	B
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	93,47	A	93,47	A
9	Dinas Lingkungan Hidup	88,13	B	88,99	A
10	Dinas Pendidikan	93,25	A	92,87	A
11	Dinas Sosial	92,69	A	85,48	B
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	84,76	B	92,35	B
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85,09	B	88,33	A
14	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	92,32	A	95,84	A
15	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	88,27	B	84,38	B
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	84,86	B	83,18	B
17	RSUD H. Abdul Aziz Marabahan	82,01	B	82,52	B
18	Klinik Utama Setara	81,42	B	83,72	B
19	Kecamatan Tabunganen	91,39	A	92,03	A
20	Kecamatan Mekarsari	92,11	A	93,24	A
21	Kecamatan Tamban	84,57	B	93,24	A
22	Kecamatan Anjir Pasar	91,81	A	92,18	A
23	Kecamatan Anjir Muara	90,42	A	91,37	A
24	Kecamatan Alalak	91,31	A	92	A
25	Kecamatan	91,3	A	91,07	A

No	Nama SKPD	Penilaian Periode 1 (Desember 2024-Mei 2025)		Penilaian Periode 2 (Juni 2025-November 2025)	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
	Mandastana				
26	Kecamatan Jejangkit	91,5	A	92,5	A
27	Kecamatan Rantau Badauh	91,01	A	92,05	A
28	Kecamatan Cerbon	92,19	A	92,25	A
29	Kecamatan Bakumpai	83,51	B	83,53	B
30	Kecamatan Belawang	82,18	B	82,44	B
31	Kecamatan Wanaraya	88,13	B	88,27	B
32	Kecamatan Barambai	92,25	A	91,5	A
33	Kecamatan Marabahan	91,61	A	92,1	A
34	Kecamatan Tabukan	94,9	A	94,19	A
35	Kecamatan Kuripan	90,14	A	90,17	A
36	Kelurahan Marabahan Kota	91,72	A	91,78	A
37	Kelurahan Ulu Benteng	81,25	B	81,75	B
38	Kelurahan Lepasan	85	B	85	B
39	Kelurahan Handil Bakti	89,21	A	89,23	A
40	Kelurahan Berangas	78,82	B	83,57	B
41	Kelurahan Berangas Barat	86,25	B	88,61	A
42	PKM Tabunganen	86,13	B	88,25	B
43	PKM Mekarsari	87,05	B	88,99	A
44	PKM Tamban	86,9	B	86,96	B
45	PKM Anjir Pasar	86,44	B	91,99	A
46	PKM Anjir Muara	86,13	B	86,28	B
47	PKM Berangas	86,21	B	86,4	B
48	PKM Mandastana	80,13	B	87,46	B
49	PKM Jejangkit	87,89	B	88,13	B
50	PKM Rantau Badauh	85,29	B	86,17	B
51	PKM Bantuil	91,41	A	90,84	A
52	PKM Lepasan	91,05	A	91,2	A
53	PKM Belawang	87,2	B	88	B
54	PKM Wanaraya	88,79	A	88,83	A
55	PKM Barambai	90,88	A	91,09	A
56	PKM Marabahan	86,47	B	89,84	A
57	PKM Tabukan	88,15	B	88,23	B
58	PKM Kuripan	90,2	A	90,56	A
59	PKM Jelapat	86,4	B	87,19	B
60	PKM Semangat Dalam	96	A	96,1	A
	Hasil Penilaian Rata-	**89**	**A**	**89,13**	**A**

No	Nama SKPD	Penilaian Periode 1 (Desember 2024-Mei 2025)		Penilaian Periode 2 (Juni 2025-November 2025)	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
	Rata				

Sumber: Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025

Dari data yang disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala ini dapat diambil kesimpulan bahwa selama tahun 2021 hingga Semester I 2023, Nilai IKM stabil diangka 85. Peningkatan mulai terjadi saat memasuki Semester II 2023 hingga pada Semester II yang meningkat menuju angka 87, menunjukkan adanya peningkatan kepuasan masayarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Selain indeks kepuasan masyarakat, juga telah dilakukan pengukuran terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun capaian dan evaluasi mengenai SPM dapat dilihat pada subbab khusus mengenai Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bab ini.

Aspek Pelayanan Umum ini kemudian terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu Apsek Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar, Wajib Non-Dasar, Pilihan, dan Penunjang seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

A. Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar

1) Fokus Pelayanan Umum Urusan Pendidikan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 seperti yang dituangkan dalam Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2026, penyebaran sekolah di Kabupaten Barito Kuala dapat dikatakan cukup merata di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Secara keseluruhan, perkembangan jumlah sekolah di Kabupaten Barito Kuala juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 jumlah sekolah di Kabupaten Barito Kuala adalah 760 buah sekolah dengan rincian pada jenjang Pendidikan TK/RA sebanyak 275 unit, pendidikan SD/MI saat ini tersedia 329 buah unit, SMP/MTs sebanyak 105 unit, SMA/MA sebanyak 46 unit, dan SMK sebanyak 5 unit yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Lebih detailnya mengenai jumlah sekolah di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.16 Jumlah Sekolah di Kabupaten Barito Kuala per Kecamatan tahun 2025

KECAMATAN	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK
Tabunganen	17	1	21	3	5	4	1	1	1
Tamban	26	1	26	5	8	5	2	2	1

KECAMATAN	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK
Mekarsari	14	3	11	10	2	6	1	4	0
Anjir Pasar	7	0	18	4	2	3	1	3	0
Anjir Muara	18	4	20	7	3	2	1	2	1
Alalak	41	6	36	6	10	3	4	3	1
Mandastana	18	0	19	0	3	2	1	1	0
Jejangkit	2	0	11	0	2	0	1	0	0
Belawang	9	0	16	0	2	0	1	0	0
Wanaraya	16	0	14	6	4	4	1	1	0
Barambai	11	1	13	3	3	2	1	1	0
Rantau Badauh	12	4	16	6	4	3	1	2	0
Cerbon	11	1	11	1	2	2	0	1	0
Bakumpai	6	1	10	1	3	1	1	1	0
Marabahan	22	2	15	1	4	3	1	3	1
Tabukan	11	1	9	2	2	2	1	1	0
Kuripan	9	0	9	0	3	0	1	0	0
Barito Kuala	250	25	275	55	62	42	20	26	5

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

Selanjutnya dibahas mengenai jumlah guru dan murid di Kabupaten Barito Kuala sampai pendataan pada tahun 2025. Total guru di Kabupaten Barito Kuala yang terdata adalah sejulmah 6.581 orang dan jumlah murid di Kabupaten Barito Kuala yang terdata adalah sejumlah 66.539 orang dengan perincian berdasar tingkat pendidikan seperti pada tabel dibawah.

Tabel 2.17 Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Barito Kuala per Satuan Pendidikan tahun 2025 (orang)

	TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
Guru	985	3.021	1.288	853	165
Murid	8.177	32.956	14.120	9.182	2.129

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah guru terbanyak ada pada jenjang SD/MI, sedangkan guru paling sedikit ada pada jenjang SMK, begitupula dengan jumlah muridnya.

Jumlah maksimal peserta didik setiap ruang kelas pada jenjang SD/MI adalah 28 peserta didik, jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK adalah 32 peserta didik. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui persentase sekolah menurut SNP, sehingga dapat ditentukan sekolah atau daerah mana yang belum memenuhi SNP menurut rasio siswa per rombel, dan dapat sebagai bahan untuk perencanaan peningkatan mutu proses belajar mengajar. Dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) Barito Kuala masih berada di bawah SNP yang berarti jumlah ruang kelas masih dapat menampung sejumlah peserta didik yang ada. Yang perlu ditingkatkan adalah kualitas dan fasilitas pendukung lainnya sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan. Dalam pasal 17 telah disebutkan, untuk jenjang Sekolah Dasar, perbandingan guru terhadap siswa adalah 1 : 20. Hal ini menjadi kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).Dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 65 dikatakan bahwa aturan ini secara efektif berlaku 10 tahun sejak UU No. 14 Tahun 2005 ditetapkan, yang artinya sejak tahun 2016 yang baru lalu mutlak diberlakukan. Ini kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang menyatakan akan mulai diberlakukan pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017 (Permendikbud No. 17 Tahun 2016 Point A No. 5)

Berdasar pada penjelasan mengenai pengelolaan pelayanan umum pada pendidikan, dapat disimpulkan beberapa masalah yang ditemui, diantaranya:

a. Meskipun rata-rata fasilitas untuk sekolah dari tingkat TK sampai SD sudah tersebar dengan cukup merata di setiap kecamatan, namun fasilitas sekolah tingkat menengah (SMP dan seterusnya) masih terbilang minim di Kabupaten Barito Kuala sehingga secara tidak langsung menyebabkan minimnya peserta didik di Kabupaten Barito Kuala yang mengenyam pendidikan menengah sampai menengah ke atas.
b. Senada dengan poin a, sebaran guru yang mengajar pada tingkat menengah sampai menengah ke atas masih terbilang minim, karena menyesuaikan jumlah peserta didik yang ada.

2) Fokus Pelayanan Umum Urusan Kesehatan

Dalam kerangka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selalu berupaya untuk menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan paramedis. Ketersediaan berbagai sarana kesehatan yang meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, Sarana Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), Sarana Produksi dan Distribusi Farmasi dan Alat Kesehatan dan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, secara kuantitas sudah terpenuhi untuk pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Berdasar data dari Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2026, Fasilitas Kesehatan yang tersedia di Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 adalah Rumah Sakit Umum sebanyak 1 unit yaitu RSUD H. Abdul Aziz di Kota Marabahan, 1 Poliklinik di Kecamatan Alalak, Puskesmas sebanyak 19 unit yang tersebar di seluruh 17 Kecamatan, Puskesmas Pembantu sebanyak 58 unit, dan Apotek sebanyak 8 unit yang secara detail per Kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.18 Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2025

Kecamatan	Rumah Sakit	Klinik Utama	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Tabunganen	-	-	1	5	-
Tamban	-	-	1	5	-
Mekarsari	-	-	2	2	-
Anjir Pasar	-	-	1	4	-
Anjir Muara	-	-	1	3	1
Alalak	-	1	2	6	2
Mandastana	-	-	1	5	2
Jejangkit	-	-	1	1	-
Belawang	-	-	1	4	-
Wanaraya	-	-	1	4	-
Barambai	-	-	1	3	-
Rantau Badauh	-	-	1	3	-
Cerbon	-	-	1	3	1
Bakumpai	-	-	1	3	-
Marabahan	1	-	1	4	2
Tabukan	-	-	1	2	-
Kuripan	-	-	1	1	-
Barito Kuala	2	1	19	58	8

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

Selain seperti yang dijelaskan pada tabel di atas, beberapa kecamatan juga sudah tersedia Puskesmas Keliling sebanyak 26 buah yang terdiri dari kendaraan bermotor sebanyak 21 buah dan perahu bermotor sebanyak 5 buah. Selain fasilias kesehatan yang disediakan dan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, juga tersedia beberapa fasiliats kesehatan yang dibangun dan dikelola oleh pihak lain seperti oleh pihak swasta dan TNI/Polri. Sarana Kesehatan pada TNI/Polri sebanyak 3 buah dan Swasta sebanyak 5 buah.

Selanjutnya adalah jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sampai pada tahun 2025 sebanyak 1.094 orang yang terdiri atas: Tenaga Medis, Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Nutrisionis, Tenaga Keterapian, Tenaga Keteknisan Medis, dan Ahli Teknologi Laboratorium Medis yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.19 Sebaran Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2025

Kecamatan *District*	Tenaga Medis[1] *Medical Worker*[7]	Psikologi Klinis *Clinical Psychology*	Tenaga Keperawatan *Nursing Worker*	Tenaga Kebidanan *Midwifery Worker*	Tenaga Kefarmasian *Pharmaceutical Worker*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tabunganen	3	–	16	15	3
Tamban	2	–	15	19	3
Mekarsari	7	–	26	24	5
Anjir Pasar	3	–	15	21	2
Anjir Muara	4	–	11	23	2
Alalak	15	–	40	44	12
Mandastana	3	–	8	24	2
Jejangkit	2	–	8	13	3
Belawang	3	–	11	18	3
Wanaraya	3	–	12	20	3
Barambai	4	–	9	18	2
Rantau Badauh	4	–	17	16	2
Cerbon	3	–	8	12	3
Bakumpai	4	–	8	17	2
Marabahan	42	1	102	55	25
Tabukan	2	–	8	16	1
Kuripan	4	–	6	13	1
Barito Kuala	**108**	**1**	**320**	**368**	**74**

Kecamatan *District*	Tenaga Kesehatan Masyarakat *Public Health Worker*	Tenaga Kesehatan Lingkungan *Enviromental Health Worker*	Tenaga Gizi *Nutritionist*	Tenaga Keterapian *Fisik Physical Therapists*
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tabunganen	1	1	4	–
Tamban	2	1	3	–
Mekarsari	3	1	4	–
Anjir Pasar	3	1	4	–
Anjir Muara	1	2	3	–
Alalak	7	5	9	–
Mandastana	1	1	1	–
Jejangkit	3	1	2	–
Belawang	3	1	2	–
Wanaraya	1	1	2	–
Barambai	1	1	3	–
Rantau Badauh	1	2	2	–
Cerbon	2	2	4	–
Bakumpai	1	1	2	–
Marabahan	4	6	7	3
Tabukan	2	1	2	–
Kuripan	4	2	2	–
Barito Kuala	**40**	**30**	**56**	**3**

https://baritokualakab.bps.go.id

Kecamatan *District*	Tenaga Keteknisan Medis *Medical Technicians*	Tenaga Teknik Biomedika *Biomedical Enginer*	Tenaga Kesehatan Tradisional *Traditional Health Worker*	Ahli Teknologi Laboratorium Medik *Medical Laboratory Scientist*
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tabunganen	1	–	–	1
Tamban	1	–	–	1
Mekarsari	2	–	–	2
Anjir Pasar	3	–	–	2
Anjir Muara	1	–	–	2
Alalak	5	–	–	7
Mandastana	1	–	–	2
Jejangkit	1	–	–	1
Belawang	1	–	–	2
Wanaraya	1	–	–	1
Barambai	2	–	–	1
Rantau Badauh	1	–	–	2
Cerbon	3	–	–	2
Bakumpai	1	–	–	1
Marabahan	12	8	–	19
Tabukan	1	–	–	1
Kuripan	1	–	–	1
Barito Kuala	**38**	**8**	**–**	**48**

https://baritokualakab.bps.go.id

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

Selain daripada tenaga kesehatan seperti tabel di atas, juga terdapat 109 dokter di Kabupaten Barito Kuala sampai pada tahun 2025 yang terdiri atas Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi. Sebaran dokter tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.20 Sebaran Dokter di Kabupaten Barito Kuala tahun 2025

Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi
Tabunganen	2	-	1
Tamban	1	-	1
Mekarsari	5	-	2
Anjir Pasar	2	-	1
Anjir Muara	3	-	1
Alalak	9	2	4
Mandastana	2	-	1
Jejangkit	1	-	1
Belawang	2	-	1
Wanaraya	2	-	1
Barambai	3	-	1
Rantau Badauh	3	-	1
Cerbon	2	-	1
Bakumpai	2	-	2
Marabahan	17	22	4
Tabukan	1	-	1
Kuripan	2	-	2
Barito Kuala	59	24	26

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

Berdasar tabel di atas, bahwa sebaran tenaga kesehatan dan dokter terkonsentrasi di Kecamatan Marabahan, ini dikarenakan posisi Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Barito Kuala yang menjadi satu-satunya di Kabupaten Barito Kuala berada di Kecamatan Marabahan. Setelahnya sebaran terbanyak ada di Kecamatan Alalak dimana selain konsentrasi penduduk yang cukup tinggi berada pada kecamatan tersebut, juga di Kecamatan Alalak terdapat Poliklinik Setara yang sedang berproses untuk menjadi Rumah Sakit.

Secara umum ketersediaan tenaga dokter jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan sebaran penduduk di Kabupaten Barito Kuala masih diperlukan penambahan secara jumlah yang disertai dengan pemerataan penyebarannya di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sementara ini ketersediaan tenaga dokter dalam hal ini dokter umum masih lebih besar berada pada fasilitas kesehatan yang tergolong dalam wilayah perkotaan terutama d rumah sakit yang berada di ibukota kabupaten.

Berbicara tentang pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan bayi juga menjadi prioritas. Pelayanan terhadap ibu hamil dapat dilihat dari pelayanan pada Kunjungan K1, K4, dan Pemberian Tablet Tambah Darah (Zat Besi/Fe). Berikut dapat dilihat kondisi selama 5 tahun terakhir dari 2021-2025 terkait cakupan pelayanan pada Ibu Hamil dan juga angka kematian ibu hamil di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.21 Pelayanan Ibu Hamil dan Kondisi Ibu Hamil di Kabupaten Barito Kuala Selama 5 tahun terakhir (2021-2025)

Tahun	Jumlah Ibu Hamil	Melakukan Kunjungan K1	Melakukan Kunjungan K4	Mendapat Tablet Tambah Darah/Zat Besi (Fe)	Kurang Energi Kronis (KEK)	Kematian Ibu Hamil
2021	4.577	4.577	4.173	925	925	6
2022	3.962	3.962	3.382	666	666	3
2023	4.268	4.268	4.013	545	545	6
2024	4.391	4.391	4.044	673	673	5
2025	4.239	4.148	3.976	665	665	5

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

Dilihat pada tabel di atas, bahwa jumlah ibu hamil tiap tahun selama 5 tahun naik turun, dan semua ibu hamil melaksanakan dan mendapat kunjungan K1 kecuali pada tahun 2025. Pada kunjungan K4, tidak semua ibu hamil melaksanakan dan mendapatkan dari total ibu hamil yang terdata. Selanjutnya untuk ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai 2023, meksipun sempat mengalami kenaikan kembali pada tahun 2024 dan menurun kembali di 2025. Semua ibu hamil yang mengalami KEK mendapat tablet tambah darah selama 5 tahun terakhir. Terakhir pada kematian ibu hamil mengalami naik-turun selama 5 tahun terakhir, dengan

yang paling rendah terjadi pada tahun 2022 dengan hanya sebanyak 3 orang. Setelah ibu hamil, pelayanan terhadap bayi terutama kondisi gizi bayi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22 Kondisi Gizi Bayi di Barito Kuala tahun 2025 Berdasarkan Hasil Penimbangan di Masing-Masing Kecamatan

Kecamatan *District*	Puskesmas *Public Health Center*	Bayi Ditimbang *Infant Weighed*	Status Gizi *Nutritional Status*			
			Buruk *Malnutri-tion*	Kurang *Lack of Nutrients*	Baik *Good Nutrition*	Lebih *Excess Nutrients*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tabunganen	Tabunganen	1.131	27	75	982	9
Tamban	Tamban	1.058	11	51	981	1
Mekarsari	Mekarsari	470	25	55	372	3
	Jelapat	1.363	1	49	1.211	14
Anjir Pasar	Anjir Pasar	895	–	20	782	16
Anjir Muara	Anjir Muara	1.352	8	39	1.250	9
Alalak	Berangas	1.936	26	163	1.577	59
	Semangat Dalam	2.321	1	28	2.257	1
Mandastana	Mandastana	1.043	16	92	863	16
Jejangkit	Jejangkit	400	11	47	314	11
Belawang	Belawang	793	–	62	649	23
Wanaraya	Wanaraya	783	7	79	601	51
Barambai	Barambai	916	5	46	785	25
Rantau Badauh	Rantau Badauh	955	17	90	766	37
Cerbon	Bantuil	578	19	53	441	21
Bakumpai	Lepasan	657	1	51	551	21
Marabahan	Marabahan	1.583	4	39	1.269	78
Tabukan	Tabukan	2.191	8	104	1.763	90
Kuripan	Kuripan	332	1	30	266	11
Jumlah/*Total*		**20.757**	**188**	**1.173**	**17.680**	**496**

Sumber/*Source:* Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala/*Health Office of Barito Kuala Regency*

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala dalam Barito Kuala Dalam Angka 2026

Dari tabel di atas bahwa dari total 20.757 bayi yang ditimbang, sebanyak 17.680 bayi berada dalam kondisi gizi baik menandakan kondisi bayi di Kabupaten Barito Kuala sampai pada pendataan 2025 didominasi dengan gizi baik, selebihnya ada 1.173 bayi dalam kondisi gizi kurang, 496 bayi dalam kondisi gizi berlebih, dan terakhir sebanyak 188 bayi berada dalam kondisi gizi buruk. Kondisi yang ditemukan dari pendataan bayi pada tabel di atas berindikasi pada angka kematian bayi di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021-2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.23 Jumlah Angka Kematian Bayi di Kabupaten Barito Kuala 2021-2025

Tahun	Jumlah Kematian Bayi
2021	59
2022	54
2023	58
2024	28
2025	36

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

Berdasar pada penjelasan mengenai pengelolaan pelayanan umum pada kesehatan, dapat disimpulkan beberapa masalah yang ditemui, diantaranya:

a. Rumah Sakit di Kabupaten Barito Kuala hanya tersedia satu, yaitu yang berada di Ibukota

Kecamatan Marabahan sekaligus Ibukota Kabupaten Barito Kuala, yaitu di Kota Marabahan. Ini menyebabkan masyarakat yang berdomisili jauh dari Marabahan cukup kesusahan mengakes fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau fasilitas kesehatan dengan peralatan yang lebih lengkap/canggih;

b. Sebaran tenaga kesehatan dan dokter sebagian besar masih terkonsentrasi di Kecamatan Marabahan;
c. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala saat ini, tenaga kesehatan maupun dokter yang tersedia masih terbilang kurang;
d. Masih cukup banyaknya ditemukan bayi dengan kondisi gizi kurang hingga gizi buruk, dikarenakan selain masih belum maksimalnya pelayanan kepada bayi dan ibu di masyarakat karena beberapa kondisi, juga disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pola konsumsi makanan bergizi oleh ibu, begitupula pemberian gizi kepada bayinya.

3) Fokus Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam memperlancar aktivitas pemerintahan dan perekonomian tentunya diperlukan kondisi jalan yang memadai. Panjang jalan di Kabupaten Barito Kuala selama 3 (Tiga) tahun terakhir (2023-2025) adalah sepanajang 782,74 km, dengan pembagian berdasarkan kondisi dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.24 Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala 3 (Tiga) Tahun Terakhir (2023-2025)

Kondisi Jalan *Condition of Roads*	2023	2024	2025*
(1)	(2)	(3)	(4)
Baik/*Good*	233,40	275,46	279,66
Sedang/*Moderate*	93,12	82,34	85,42
Rusak/*Damage*	49,81	52,88	34,62
Rusak Berat/*Severely Damage*	406,41	372,07	383,04
Jumlah/*Total*	**782,74**	**782,74**	**782,74**

Sumber/*Source*: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala/*Public Works Office of Barito Kuala Regency*

Sumber: Dinas PUPR dalam Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2026

Tercatat selama tiga tahun terakhir sampai pada tahun 2024, kondisi jalan baik di Kabupaten Barito Kuala selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya kondisi jalan dalam kondisi sedang dan rusak berat sempat mengalami penurnan dari tahun 2023 ke 2024, namun kembali meningkat di tahun 2025, dengan sebaliknya pada kondisi jalan yang rusak mengalami kenaikan pada 2023 ke 2024, namun menurun saat di tahun 2025. Selanjutnya pada tabel dibawah dijelaskan panjang jalan di Kabupaten Barito Kuala selama 3 tahun terakhir berdasar jenis permukaan jalan dalam satuan kilometer (km).

Tabel 2.25 Panjang Jalan Berdasar Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2025

Jenis Permukaan Jalan *Type of Road Surface*	2023	2024	2025*
(1)	(2)	(3)	(4)
Aspal/*Paved*	424,24	435,91	430,39
Kerikil/*Gravel*	259,89	252,85	256,52
Tanah/*Soil*	68,07	61,44	61,25
Lainnya/*Others*	30,54	32,55	34,58
Jumlah/*Total*	**782,74**	**782,74**	**782,74**

Sumber/*Source:* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala/*Public Works Office of Barito Kuala Regency*

barikab.bps.go.id

Sumber: Dinas PUPR dalam Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2026

Berdasar tabel di atas, bahwa jalan dengan permukaan aspal stabil di angka 430 km, namun untuk jalan yang masih menggunakan permukaan tanah mengalami penurunan yang cukup signifikan tiap tahunnya, menunjukkan panjang jalan yang ditingkatkan di Kabupaten Barito Kuala selalu meningkat setiap tahunnya.

Berdasar pada penjelasan mengenai pengelolaan pelayanan umum pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat disimpulkan beberapa masalah yang ditemui, diantaranya:

a. Kondisi medan di Kabupaten Barito Kuala yang didominasi rawa-rawa menyebabkan peningkatan maupun perluasan permukaan jalan menjadi tantangan tersendiri dan memerlukan biaya yang tidak sedikit;
b. Banyaknya alat angkutan berat yang melintasi di jalanan Kabupaten Barito Kuala menyebabkan kerusakan jalan yang tidak terhindarkan;
c. Adanya perbedaan kewenangan pengelolaan jalan di Kabupaten Barito Kuala menyebabkan intervensi Pemerintah Daerah untuk pengelolaan jalan menjadi terbatas.

Infrastruktur jalan merupakan salah satu prasarana strategis yang berperan dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bagi Kabupaten Barito Kuala yang memiliki karakteristik wilayah agraris dan menjadi salah satu lumbung pangan Provinsi Kalimantan Selatan, keberadaan jaringan jalan yang mantap menjadi faktor penting dalam mendukung sistem produksi pertanian, distribusi hasil panen, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi lokal.

Secara umum, kondisi jaringan jalan Kabupaten Barito Kuala terus mengalami peningkatan melalui pembangunan, peningkatan kapasitas, dan pemeliharaan jalan secara bertahap. Namun demikian, masih terdapat ruas jalan dengan kondisi rusak sedang dan rusak berat, terutama pada jalan produksi, jalan usaha tani, dan ruas penghubung antarwilayah yang menjadi akses utama menuju sentra-sentra produksi pertanian. Kondisi tersebut mengakibatkan tingginya biaya angkut hasil panen, meningkatnya waktu tempuh distribusi, serta menurunnya efisiensi rantai pasok komoditas pertanian.

Kabupaten Barito Kuala memiliki beberapa kawasan strategis pertanian yang berperan sebagai sentra produksi padi, khususnya di **Kecamatan Tamban, Tabunganen, dan Alalak**. Kawasan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional. Oleh karena itu, kualitas infrastruktur jalan yang menghubungkan kawasan produksi menuju pusat pengumpulan, penggilingan, pergudangan, dan pasar menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sistem logistik pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, rekonstruksi jalan yang mengalami kerusakan berat perlu menjadi prioritas pembangunan daerah. Peningkatan kualitas jalan produksi dan jalan usaha tani tidak hanya akan memperlancar mobilitas hasil pertanian, tetapi juga meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi, mempercepat distribusi pupuk dan benih, mengurangi kehilangan hasil panen (*post-harvest losses*), serta meningkatkan daya saing komoditas pertanian Kabupaten Barito Kuala.

Selain mendukung sektor pertanian, peningkatan kemantapan jalan juga memberikan manfaat terhadap pengembangan kawasan permukiman, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, investasi, serta pengembangan sentra perdagangan dan industri pengolahan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak yang luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan infrastruktur jalan pada Tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kemantapan jaringan jalan kabupaten melalui rekonstruksi ruas jalan rusak berat, peningkatan jalan produksi dan jalan usaha tani, pembangunan konektivitas menuju kawasan pertanian, kawasan permukiman, serta kawasan ekonomi strategis. Kebijakan tersebut mendukung pencapaian **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** bidang Pekerjaan Umum sekaligus memperkuat pelaksanaan **Program Strategis Nasional (Pro-SN)** pada bidang **Ketahanan Pangan**, **Pertumbuhan Ekonomi**, dan **Pengembangan Wilayah**.

Pelayanan sanitasi merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penyediaan sanitasi yang memadai tidak hanya berpengaruh terhadap penurunan angka penyakit berbasis lingkungan, tetapi juga

menjadi salah satu indikator utama dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Tujuan 6, serta mendukung percepatan penurunan stunting.

Sejalan dengan kebijakan **RPJMN Tahun 2025–2029**, **RKP Tahun 2027**, dan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, indikator pembangunan bidang sanitasi tidak lagi hanya berorientasi pada **akses sanitasi layak**, tetapi diarahkan menuju **akses sanitasi aman (Safely Managed Sanitation Services)**. Perubahan indikator tersebut bertujuan agar pelayanan sanitasi tidak hanya dinilai dari keberadaan fasilitas sanitasi, tetapi juga memperhatikan aspek pengelolaan air limbah domestik yang aman, keberlanjutan pelayanan, perlindungan kesehatan masyarakat, serta pengendalian pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027, indikator pembangunan sanitasi perlu diselaraskan dengan indikator nasional berupa **persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi aman**, sehingga terdapat kesesuaian antara dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten.

Berdasarkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sanitasi, jumlah layanan **pengolahan air limbah domestik** melalui sambungan rumah mengalami penurunan dari **1.192 Sambungan Rumah (SR) pada Tahun 2024 menjadi 614 Sambungan Rumah (SR) pada Tahun 2025**, atau menurun sekitar **48,5 persen**. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap kapasitas penyelenggaraan pelayanan sanitasi, baik dari aspek pendanaan, pembangunan infrastruktur, maupun keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kapasitas pendanaan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), masih terbatasnya cakupan pelayanan perpipaan, kebutuhan rehabilitasi jaringan eksisting, keterbatasan sarana pendukung operasional, serta luasnya wilayah pelayanan yang harus dijangkau, khususnya pada kawasan permukiman perdesaan dan kawasan rawa.

Di sisi lain, masih terdapat kawasan permukiman yang menghadapi persoalan sanitasi, drainase lingkungan, serta genangan air yang berpotensi menurunkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi prevalensi stunting, mengingat sanitasi yang belum memadai berhubungan erat dengan tingginya risiko infeksi dan gangguan tumbuh kembang anak.

Oleh karena itu, pembangunan sanitasi tidak dapat dilaksanakan secara sektoral, melainkan harus diintegrasikan dengan pembangunan kesehatan, penyediaan air minum, penataan permukiman,

pengendalian banjir, pengelolaan drainase perkotaan, serta program percepatan penurunan stunting. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep pembangunan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2027 akan memperkuat kebijakan pembangunan sanitasi melalui peningkatan investasi infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), rehabilitasi dan perluasan jaringan pelayanan, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sarana sanitasi komunal pada kawasan prioritas, peningkatan kualitas drainase lingkungan, pengurangan kawasan genangan, serta peningkatan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi aman sekaligus mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), target RPJMN Tahun 2025–2029, dan SDGs Tujuan 6.

4) Fokus Pelayanan Umum Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Dalam definisnya, rumah dibagi beberapa jenis, yaitu:

- Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
- Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan,

tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Informasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala adalah bahwa berdasarkan SK Kawasan Kumuh tahun 2017, luas kawasan kumuh di Kabupaten Barito Kuala adalah seluas 251,08 Ha dengan wewenang di bawah 10 hektar per kawasan. Hingga tahun 2024 telah ditangani seluas 157,242 ha atau 62,63%, ini termasuk capaian penanganan tahun ini yaitu sebesar 60.218 ha atau 23,98% dari total kawasan kumuh.

Selanjutnya Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga menjadi tantangan serius yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Kembali informasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala adalah bahwa dari total 82.271 unit rumah di kabupaten Barito Kuala, sebanyak 14.562 unit teridentifikasi sebagai RTLH berdasar pada pendapatan tahun 2021. Sampai pada tahun 2024, telah ditangani sebanyak 3.223 unit atau sebanyak 22,13%, yang terdiri dari 126 unit dengan dana dari APBD kabupaten, 225.unit melalui APBD provinsi, 250 Unit melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Pemerintah Pusat, dan 4 unit melalui Dana CSR BAZNAS.

Urusan pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah karena menjadi salah satu prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai program dan proyek prioritas pemerintah. Ketersediaan lahan yang jelas status hukumnya, bebas dari sengketa, serta sesuai dengan rencana tata ruang merupakan bagian penting dari **Readiness Criteria (RC)** yang menjadi salah satu persyaratan dalam pengusulan program pembangunan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, berbagai proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sistem penyediaan air minum, sanitasi, kawasan permukiman, pendidikan, kesehatan, serta kawasan ekonomi memerlukan dukungan kesiapan lahan agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara tepat waktu dan tidak mengalami hambatan administrasi maupun hukum.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan pertanahan melalui inventarisasi aset tanah pemerintah daerah, percepatan legalisasi aset, penyelesaian permasalahan pertanahan, sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta koordinasi dengan **Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala** dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap lokasi pembangunan.

Selain itu, setiap usulan pembangunan yang akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Pusat diarahkan agar telah memenuhi **Readiness Criteria (RC)**, khususnya terkait kesiapan lahan. Upaya tersebut dilakukan melalui identifikasi lokasi, verifikasi status

kepemilikan tanah, penyelesaian administrasi pertanahan, serta penyediaan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesiapan lahan menjadi faktor penting untuk meningkatkan peluang Kabupaten Barito Kuala memperoleh dukungan pendanaan dari berbagai sumber, termasuk APBD Provinsi, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Instruksi Presiden, hibah pemerintah, maupun skema **Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**. Dengan tersedianya lahan yang siap dibangun (*land ready*), proses pelaksanaan proyek dapat dilakukan lebih cepat, mengurangi risiko keterlambatan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Oleh karena itu, penguatan tata kelola pertanahan diarahkan tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum atas aset pemerintah daerah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesiapan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.

Penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembangunan perumahan tidak hanya bertujuan menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan wilayah, serta mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan **RPJMN Tahun 2025–2029**, **RKP Tahun 2027**, dan target **Sustainable Development Goals (SDGs)**, pembangunan perumahan diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap **rumah layak huni**, percepatan pengurangan **backlog perumahan**, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), serta penanganan kawasan permukiman kumuh secara terpadu. Oleh karena itu, target pembangunan bidang perumahan Kabupaten Barito Kuala perlu diselaraskan dengan target nasional agar terdapat kesinambungan antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten.

Kabupaten Barito Kuala masih menghadapi tantangan berupa kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keberadaan rumah tidak layak huni, serta kawasan permukiman yang memerlukan peningkatan kualitas infrastruktur dasar. Selain itu, pertumbuhan kawasan permukiman baru sebagai dampak perkembangan wilayah Banjarbakula juga memerlukan penyediaan infrastruktur permukiman yang memadai agar perkembangan kawasan berlangsung secara terarah dan berkelanjutan.

Penanganan kawasan kumuh tidak hanya difokuskan pada peningkatan kualitas fisik lingkungan, tetapi juga dilakukan melalui pendekatan terpadu yang meliputi peningkatan kualitas rumah, penyediaan akses air minum aman, sanitasi aman, drainase lingkungan, jalan lingkungan, pengelolaan persampahan, ruang terbuka publik, serta pemberdayaan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan

mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, penyediaan **Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)** menjadi komponen penting dalam mendukung pengembangan kawasan permukiman baru. Penyediaan jalan lingkungan, drainase, jaringan air minum, sanitasi, penerangan jalan, ruang terbuka hijau, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum harus dilakukan secara terintegrasi agar kawasan yang berkembang memiliki kualitas lingkungan yang baik dan mampu mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada Tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat peningkatan rumah layak huni, mengurangi backlog perumahan, mempercepat penanganan kawasan kumuh, serta memperkuat penyediaan PSU pada kawasan pertumbuhan baru sebagai bagian dari pengembangan wilayah Kabupaten Barito Kuala.

5) Fokus Pelayanan Umum Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan pada Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah kabupaten terdiri atas:

1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Pelayanan informasi rawan bencana;
3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- Warga yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Warga yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan

- Warga yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Capaian SPM pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2025 pada subbab khusus yang membahas evaluasi capaian pelaksanaan Standar Pelayananan Minimal (SPM). Sedangkan capaian lainnya dalam hal mendukung penegakan Trantibumlinmas dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.26 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Kejahatan	Penyelesaian Kejahatan	Persentase Penyelesaian Perkara (%)	Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan
2023	265	213	80	82
2024	282	387	137	87
2025	300	126	42	92

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah kasus kejahatan dari tahun 2023 ke 2025 yang cukup signifikan, namun tingkat penyelesaian pada tahun 2025 menjadi capaian yang terendah dari 3 tahun terakhir, sehingga berdampak pada resiko penduduk terkena tindak kejahatan yang meningkat di 2025. Selain kasus kejahatan secara umum, di Tahun 2025 juga terdapat penyelsaian terhadap kasus Narkoba yang telah ditangani oleh pihak berwenang sebanyak 47 kasus yang terdiri dari 44 Laki-Laki dan 3 Perempuan. Selanjutnya adalah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala selama tahun 2025.

Tabel 2.27 Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Kecamatan ***Subdistrict***	**Banjir** ***Flood***	**Puting Beliung** ***Tornado***	**Orang Tenggelam** ***Drown***	**Kebakaran Rumah** ***House Fire***	**Kebakaran Hutan dan Lahan** ***Forest and Land Fires***
Tabunganen	-	2	-	4	1
Tamban	-	2	-	-	-
Mekarsari	-	5	1	1	-
Anjir Pasar	-	-	-	3	2
Anjir Muara	-	3	-	2	-
Alalak	1	-	-	5	-
Mandastana	1	-	-	-	-
Jejangkit	1	-	-	-	-
Belawang	-	1	-	1	-
Wanaraya	-	-	-	-	-

Kecamatan *Subdistrict*	Banjir *Flood*	Puting Beliung *Tornado*	Orang Tenggelam *Drown*	Kebakaran Rumah *House Fire*	Kebakaran Hutan dan Lahan *Forest and Land Fires*
Barambai	-	-	-	1	-
Rantau Badauh	-	3	-	2	-
Cerbon	-	-	-	1	-
Bakumpai	1	-	1	2	2
Marabahan	-	-	-	4	2
Tabukan	1	-	-	-	-
Kuripan	1	-	-	-	5

Sumber: BPBD dalam Barito Kuala dalam Angka 2026

Tabel 2.28 Jumlah Korban Akibat Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Kecamatan	Banjir			Puting Beliung			Orang Tenggelam			Kebakaran Rumah		
	Meninggal Dunia/ Hilang Fatality/ Missing	Luka/Sakit Casualty	Terdampak dan Mengungsi *Affected and* Evacuated	Meninggal Dunia/ Hilang Fatality/ Missing	Luka/Sakit Casualty	Terdampak dan Mengungsi *Affected and* Evacuated	Meninggal Dunia/ Hilang Fatality/ Missing	Luka/Sakit Casualty	Terdampak dan Mengungsi *Affected and* Evacuated	Meninggal Dunia/ Hilang Fatality/ Missing	Luka/Sakit Casualty	Terdampak dan Mengungsi *Affected and* Evacuated
Tabunganen	-	-	-	-	-	13 KK/38 Jiwa	-	-	-	-	-	6 KK/18 Jiwa
Tamban	-	-	-	-	-	2 KK/4 Jiwa	-	-	-	-	-	-
Mekarsari	-	-	-	-	-	10 KK/34 Jiwa	1 Jiwa	-	-	-	-	6 KK/6 Jiwa
Anjir Pasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 KK/12 Jiwa
Anjir Muara	-	-	-	-	-	5 KK/13 Jiwa	-	-	-	-	-	2 KK/5 Jiwa
Alalak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 KK/9 Jiwa
Mandastana	-	-	5.930 KK/18.343 Jiwa	-	-	14 KK/41 Jiwa	-	-	-	-	-	2 KK/2 Jiwa
Jejangkit	-	-	822 KK/1.790 Jiwa	-	-	27 KK/76 Jiwa	-	-	-	-	-	-
Belawang	-	-	-	-	-	1 KK/4 Jiwa	-	-	-	-	-	1 KK/4 Jiwa
Wanaraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barambai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 KK/6 Jiwa

Kecamatan	Banjir			Puting Beliung			Orang Tenggelam			Kebakaran Rumah		
	Meninggal Dunia/ Hilang Fatality/ Missing	Luka/Sakit Casualty	Terdampak dan Mengungsi *Affected and* Evacuated	Meninggal Dunia/ Hilang Fatality/ Missing	Luka/Sakit Casualty	Terdampak dan Mengungsi *Affected and* Evacuated	Meninggal Dunia/ Hilang Fatality/ Missing	Luka/Sakit Casualty	Terdampak dan Mengungsi *Affected and* Evacuated	Meninggal Dunia/ Hilang Fatality/ Missing	Luka/Sakit Casualty	Terdampak dan Mengungsi *Affected and* Evacuated
Rantau Badauh	-	-	-	-	-	8 KK/30 Jiwa	-	-	-	-	-	2 KK/2 Jiwa
Cerbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 KK/5 Jiwa
Bakumpai	-	-	-	-	-	-	1 Jiwa	-	-	-	-	6 KK/6 Jiwa
Marabahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 KK/6 Jiwa
Tabukan	-	-	933 KK/3.063 Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuripan	-	-	1.833 KK/5.230 Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPBD dalam Barito Kuala dalam Angka 2026

Pada 2 tabel diatas, dapat dilihat bahwa kejadian bencana yang umum terjadi di Kabupaten Barito Kuala adalah Banjir, Puting Beliung, Kebakaran baik rumah maupun hutan/lahan. Pada Kebakaran Hutan dan Lahan, daerah yang terdampak adalah seluas 75,6 Ha yang tersebar di Kecamatan Tabunganen, Anjir Pasar, Mandastana, Jejangkit, Bakumpai, Marabahan dan Kuripan dengan yang terbesar adalah di Jejangkit dengan daerah terdampak seluas 41,5 Ha, yang mana ini disebabkan karena kondisi Jejangkit yang memiliki banyak lahan rentan terbakar dan mendapat dampak kebakaran dari daerah tetangga.

Dalam menyukseskan Bidang Trantibumlinmas, dukungan personil/pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Kuala terdiri dari ASN Struktural sebanyak 12 Orang, ASN Fungsional sebanyak 34 Orang, ASN Pelaksana sebanyak 9 Orang, Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 14 Orang, Tenaga Kontrak sebanyak 30 Orang, dan THL Damkar sebanyak 3 Orang, sedangkan dukungan personil pada BPBD terdiri dari Seluruh ASN BPBD, Pusdalops, TNI dan POLRI, PMI, dan relawan.

Adapun kendala yang dihadapi untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Sesuai Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 ttg Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, Personil SATPOL PP Kabupaten Barito Kuala minimal 250 Orang. Sedangkan Personil yang dimiliki adalah berjumlah 102 Orang;
- Terbatasnya anggaran, SDM, dan peralatan prasarana pendukung.
- Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Barito Kuala.

Upaya yang telah untuk menangani permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

- Pendataan dan Pemetaan ideal kebutuhan personil untuk diajukan sebagai penambahan personil.
- Memaksimalkan anggaran dan peralatan dengan penentuan titik rawan pelanggaran Perda.
- Sosialisasi Perda dan Perkada sesuai dengan Anggaran yang tersedia.
- Usulan untuk Penambahan anggaran, SDM, dan peralatan prasarana pendukung.

6) Fokus Pelayanan Umum Urusan Sosial

Pelayanan dalam bidang Sosial di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten terdiri atas:

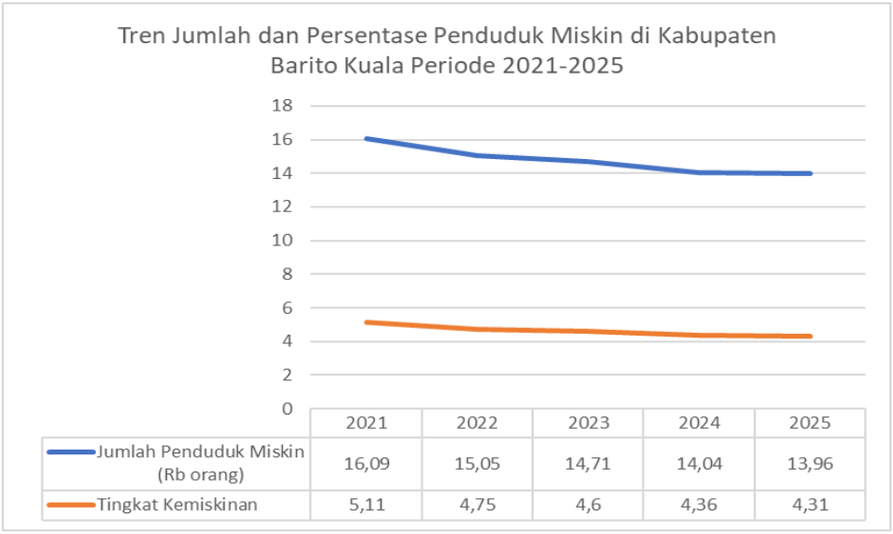
- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;

- Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
- Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
- Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
- Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Capaian SPM pada Urusan Sosial pada tahun 2025 dapat dilihat pada Subbab khusus yang membahas Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Permasalahan kemiskinan menjadi aspek utama yang diperhatikan dalam urusan sosial. Gambaran kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025 adalah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala berjumlah 13.965 orang, sedangkan pada tahun sebelumnya 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala berjumlah 14.044 orang, yang artinya secara absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala turun sebanyak 79 orang. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun dapat dilihat pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk Miskin (Rb orang)	16,09	15,05	14,71	14,04	13,96
Tingkat Kemiskinan	5,11	4,75	4,6	4,36	4,31

Gambar 2.6 Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kab. Barito Kuala 2021-2025
Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2026

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun terakhir dari 2021 hingga 2025 mengalami penurunan yang siginifikan tiap tahunnya, yang menunjukkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Barito Kuala semakin meningkat tiap tahun. Hal itu tidak terlepas dari upaya program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Kuala untuk penanganan kemiskinan, khusunya untuk kemiskinan ekstrem adalah:

1) Program pengelolaan sumber daya air (SDA), termasuk didalamnya Irigasi Padat Karya (Dinas PUPR)
2) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, termasuk didalamnya PAMSIMAS (Dinas PUPR)

3) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, termasuk didalamnya pengelolaan sanitasi sesuai standar (Dinas PUPR)
4) Penyediaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD (Dinas Pendidikan)
5) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan)
6) Penyediaan Biaya Prosenil Peserta Didik (Beasiswa) (Dinas Pendidikan)
7) Penyediaan Dana BOS SD (Dinas Pendidikan)
8) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (Dinas Pendidikan)
9) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial)
10) Program Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial)
11) Program Pemberdayaan Sosial (Dinas Sosial)
12) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)
13) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) (Dinas PMD)
14) Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Disperkim)
15) Pelatihan-pelatihan dalam hali ini diantarannya manajemen agrowisata bagi pelaku usaha, Pelatihan budidaya jamur tiram, Pelatihan keterampilan non institusional pengolahan hasil pertanian, dan Pelatihan keterampilan institusional pengolahan hasil pertanian (Disnakertrans)

B. Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Non-Dasar

1) Ketenagakerjaan

Dari total 334.958 jiwa penduduk Kabupaten Barito Kuala per tahun 2025, tentunya ada yang merupakan kelompok Penduduk Usia Kerja (PUK). Kelompok ini berada pada rentang umur 15 tahun ke atas. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2025, ada 251.351 jiwa yang berada di dalam kelompok PUK. kelompok PUK kemudian dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja dengan 180.935 jiwa dan bukan angkatan kerja dengan 70.416 jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur Lima belas tahun ke atas sebesar 71,98%, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja sebesar 3,23%, seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.29 Jumlah Penduduk berumur 15 tahun ke atas Berdasar Aktifitas Selama Seminggu Terakhir Berdasar Kelamin Tahun 2025

Kegiatan Utama *Main Activity*	Jenis Kelamin/*Sex*		
	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Laki-Laki+ Perempuan *Male+Female*
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja/*Labour force*	109.815	71.120	180.935
1. Bekerja/*Working*	106.164	68.935	175.099
2. Pengangguran terbuka/*Unemployment*	3.651	2.185	5.836
II. Bukan angkatan kerja/*Not in labour force*	17.159	53.257	70.416
1. Sekolah/*Attending school*	10.940	11.169	22.109
2. Mengurus rumah tangga/*Housekeeping*	3.764	40.647	44.411
3. Lainnya/*Others activities*	2.455	1.441	3.896
Jumlah/*Total*	**126.974**	**124.377**	**251.351**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja *Labour Force Participation Rate*	**86,49**	**57,18**	**71,98**
Tingkat Pengangguran *Unemployment Rate*	**3,32**	**3,07**	**3,23**

Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/*BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey*

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2026

Sealnjutnya dapat dilihat kondisi ketenagakerjaan pada angkatan kerja yang bekerja sebanyak 175.099 orang, sebaran berdasar status pekerjaan utama dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30 Jumlah Penduduk berumur 15 tahun ke atas Berdasar Status Pekerjaan Utama Selama Seminggu Terakhir Berdasar Kelamin Tahun 2025

Status Pekerjaan Utama *Main Employment Status*	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri *Own account worker*	18.414	11.747	30.161
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar *Employer assisted by temporary worker/ unpaid worker*	21.929	11.133	33.062
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar *Employer assisted by permanent worker/ paid worker*	3.229	2.132	5.361
Buruh/Karyawan/Pegawai/*Employee*	48.942	20.280	69.222
Pekerja bebas *Casual worker*	6.198	1.967	8.165
Pekerja keluarga/tak dibayar *Family worker/unpaid worker*	7.452	21.676	29.128
Jumlah/*Total*	**106.164**	**68.935**	**175.099**

Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/*BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey*

https://baritokualakab.bps.go.id

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2026

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa status pekerjaan utama yang paling banyak berada pada buruh/kayawan baik untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan banyak sebagai Pekerja keluarga, yang mana disini maksudnya adalah pekerja yang ikut usaha keluarga.

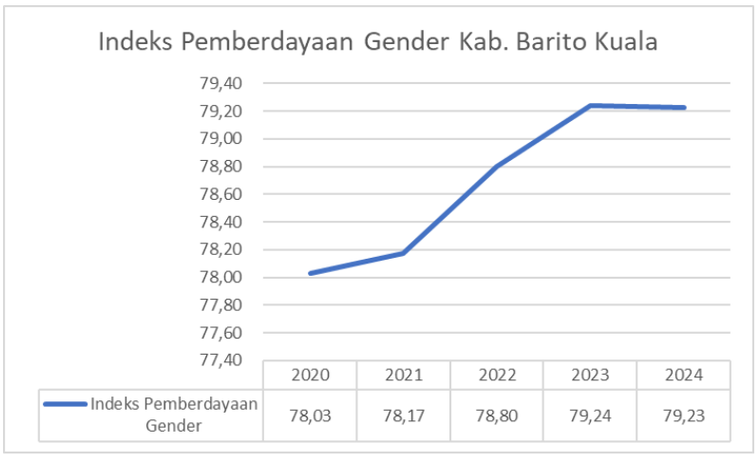
2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Koodinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

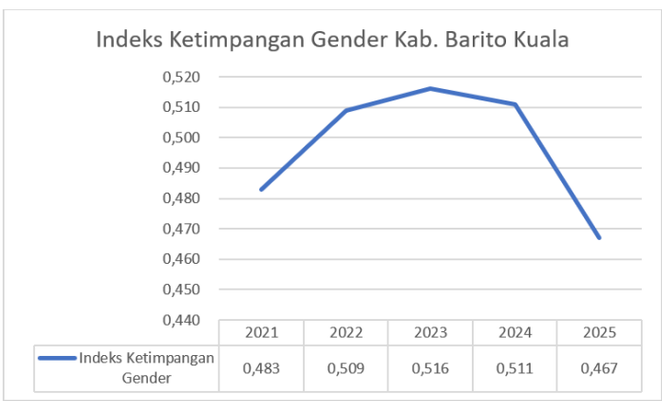
Sesuai dengan Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 2 tahun 2009 tentang kebijakan kota layak anak, diharapkan dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya kota layak anak dan kota ramah anak. Selanjutnya untuk melihat pemberdayaan gender di suatu daerah dapat dilihat pada 3 (Tiga) Indeks, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indeks Pemberdayaan Gender adalah Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik di suatu negara atau wilayah, serta sejauh mana perempuan memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang yang setara dengan laki-laki, dimana dinyatakan dalam skala 0–100. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi tingkat pemberdayaan gender di suatu wilayah. Pada tahun 2024, Indeks Pemberdayaan Gender semakin meningkat 5 tahun terakhir, namun dari 2023 ke 2024 tercatat stagnan, hal tersebut dapat dilihat pada infografis tren Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Barito Kuala selama 5 (Lima) Tahun terakhir, dari 2020 hingga 2024 seperti yang terekam dalam BPS Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 2.7 Tren Indeks Pemberdayaan Gender di Kab. Barito Kuala 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

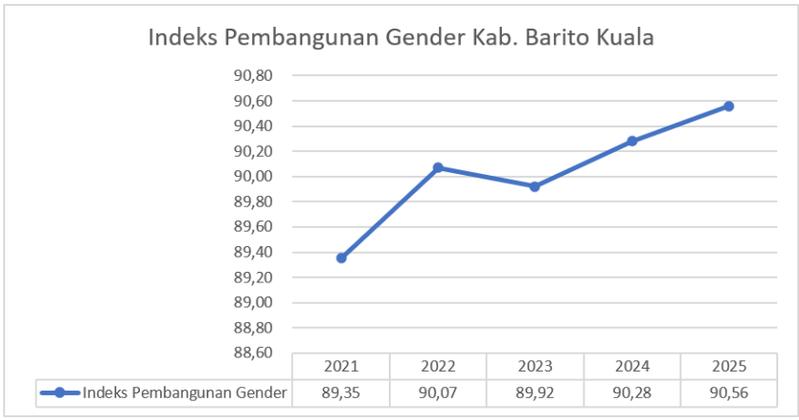
Indeks Ketimpangan Gender adalah Indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek utama pembangunan manusia yaitu Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan dan Partisipasi Ekonomi, dimana dinyatakan dalam skala 0 – 1, semakin mendekati 0, artinya ketimpangan gender rendah yang berarti kesetaraan gender lebih baik di suatu wilayah, begitupula sebaliknya. Pada tahun 2025, Indeks Ketimpangan Gender menurun cukup tinggi dari tahun 2024 yang mana menunjukkan ketimpangan gender semakin baik. Hal tersebut dapat dilihat pada infografis tren Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Barito Kuala selama 5 (Lima) Tahun terakhir, dari 2021 hingga 2025 seperti yang terekam dalam BPS Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 2.8 Tren Indeks Ketimpangan Gender di Kab. Barito Kuala 2021-2025
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Terakhir adalah Indeks Pembangunan Gender, yaitu indikator statistik yang mengukur kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender merupakan

turunan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang membandingkan nilai IPM laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan, yaitu Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Hidup Layak. Indeks ini digunakan untuk mengukur ketimpangan gender dalam pembangunan, menjadi dasar penyusunan kebijakan responsif gender, dan mengevaluasi keberhasilan program pemberdayaan perempuan. Penilaian indeks ini memasang angka standar 100, dimana berarti tidak ada kesenjangan antara Laki-Laki dan Perempuan, apabila dibawah 100, maka Perempuan dianggap lebih tertinggal daripada Laki-Laki, begitupula sebaliknya. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Gender semakin meningkat bertahap dari 2020 sampai 2025, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 menuju 2023 namun dalam skala yang sangat kecil. Hal tersebut dapat dilihat pada infografis tren Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Barito Kuala selama 5 (Lima) Tahun terakhir, dari 2021 hingga 2025 seperti yang terekam dalam BPS Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 2.9 Tren Indeks Pembangunan Gender di Kab. Barito Kuala 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Sampai pada saat dokumen ini dibuat, rilis data daripada 3 (Tiga) Indeks yang terkait Pemberdayaan Gender tersebut yang belum diperbaharui sampai tahun 2025 adalah Indeks Pemberdayaan Gender oleh Badan Pusat Statistik baik Kabupaten Barito Kuala maupun Provinsi Kalimantan Selatan.

3) Lingkungan Hidup

Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dinilai dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun bagian-bagian yang mempengaruhi IKLH adalah Indeks Kualiatas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan/Indeks Kualitas Lahan (IKTL/IKL), dan Pengelolaan Timbulan Sampah dalam Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah. Pada Tahun 2025 berdasar informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, Perolehan Nilai IKLH di Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 adalah sebesar 71,44 yang terdiri atas Indeks Kualitas Air sebesar 64,42. Indeks Kualitas Udara sebesar 84,69, Indeks Kualitas Tutupan Lahan/Indeks Kualitas Lahan sebesar 59,02, dan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah sebesar 71,95.

Telah dilaksanakan berbagai upaya pengendalian terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan yang menjadi fokus dari kegitan pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup termasuk penanganan persampahan di Kabupaten Barito Kuala melalui Bank Sampah. Bank Sampah ini berfungsi mengatur volume sampah, menciptatakan nilai ekonomi dari sampah yuang dikelola, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, dan tentu saja memberdayakan Masyarakat

Barito Kuala dalam mengelola sampahnya secara mandiri. Berikut dapat dilihat data Bank Sampah yang terdata di seluruh Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.31 Daftar Bank Sampah di Kabupaten Barito Kuala

NO	NAMA BANK SAMPAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	Bank Sampah MTsN Marabahan	Jl. Vetran Rt.13 Marabahan	Marabahan
2	Bank Sampah Komplek Bakumpai Permai	Jl. Jend. Sudirman Rt.14 Marabahan	Marabahan
3	Bank sampah SMAN 1 Marabahan	Jl. AES Nasution No.66 Marabahan	Marabahan
4	Bank Sampah SMKN 1 Marabahan	Jl. Jend. Sudirman No. 87 Marabahan	Marabahan
5	Bank Sampah SDN Marabahan 2	Jl. Pahlawan No.21 Rt.14 Marabahan	Marabahan
6	Bank sampah SMPN 3 Marabahan	Jl. Jend. Sudirman No.75 Marabahan	Marabahan
7	Bank Sampah Ibtidaussalam	Jl. Teans Kalimantan Desa Andaman II Anjir Pasar	Anjir Pasar
8	Bank Sampah KSM Persada Jaya	Komplek Persada Permai Baru II jalur III Desa Semangat dalam Alalak	Alalak
9	Bank Sampah SDN Ulu Benteng 2	Jl. Gusti m. Seman Marabahan	Marabahan
10	Bank Sampah SMPN 1 Marabahan	Jl. Tarutan Jaya No. 333 Marabahan	Marabahan
11	Bank Sampah Papadaan	Jl. Panglima Batur RT.04 Kel. Ulu Benteng	Marabahan
12	Bank Sampah Sungai Rasau	Jl. Panglima Batur RT.10 Kel. Ulu Benteng	Marabahan
13	Bank Sampah MTsN Anjir Muara Km.20	Jl Trans Kalimantan Km.24 Desa Anjir Muara lama Rt.06 Kec. Anjir Muara	Anjir Muara
14	Bank Sampah Maju Bersama	Jl. Panglima Wangkang Rt. 13 Rw. 004 Kel. Marabahan Kota	Marabahan
15	Bank Sampah SDN Handil Bakti	Jl. Trans Kalimantan Km.2.5 No.12 Handil Bakti Kec. Alalak	Alalak
16	Bank Sampah Komplek Family Permai	Jl. Vetran Rt. 023 Kel. Marabahan Kota	Marabahan
17	Bank Sampah Asmil Nasution	Jl. AES Nasution Rt. 017 Kel. Marabahan Kota	Marabahan
18	Bank Sampah SDN Bantuil 1	Jl. Simpang Nungki Bantuil Kec. Cerbon	Cerbon
19	Bank Sampah BLH Batola	Jl.Jend. Sudirman No. 76 Marabahan	Marabahan
20	Bank Sampah MAN 5 Marabahan	Jl Trans Kalimantan Km.24 Desa Anjir Muara lama Rt.06 Kec. Anjir Muara	Anjir Muara
21	Bank Sampah Kenanga	Jl. H. M. Ruslan Rt. 03 Desa Bantuil Kec. Cerbon	Cerbon
22	Bank sampah Seroja	Jl. H. M. Ruslan Rt. 02 Desa Bantuil Kec. Cerbon	Cerbon
23	Bank Sampah SMPN 5 Marabahan	Jl.Sabumi Kec. Marabahan	Marabahan
24	Bank Sampah MAN 1 Marabahan	Jl. Vetran Rt.13 Marabahan	Marabahan
25	Bank Sampah SDN Ulu Benteng 3	Jl. Panglima Batur Rt. 05 No. 192 Marabahan	Marabahan
26	Bank Sampah SDN Ulu Benteng 5	Jl. Jend.Sudirman Komkplek Bumi Bakumpai Permai Marabahan	Marabahan
27	Bank Sampah SDN Bagus 2	Jl. S.Parman Rt. 06 Desa Bagus	Marabahan
28	Bank sampah Marabahan 3	Jl. Veteran Rt. XIII Marabahan Kota	Marabahan
29	Bank Sampah Mekar Bersama	Desa Barambai kolam Kanan Rt. 07 Kec. Barambai	Barambai
30	Bank Sampah Sama Arep (pasar)	Jl.Panglima wangkang Marabahan.	Marabahan
31	Bank Sampah Al Mujahidin	Jl. Jenderal Sudirman Rt.14 No. 76 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan	Marabahan
32	Bank Sampah SDN Marabahan 1	Jl. Pahlawan Rt. 14 Kec. Marabahan	Marabahan
33	Bank Sampah Sungai Pantai 1	Sungai Pantai Rt.08 Kecamatan Rantau Badauh	Rantau Badauh

34	Bank Sampah Mulia Abadi (Induk)	Jl. Kecamatan Cerbon	Cerbon	
35	Bank Sampah Tarutan Bersinar	Jl. Tarutan Komplek Tarutan Permai Marabahan	Marabahan	
36	Bank Sampah Sehat Mulia SMPN 2 Alalak	Jl. Brigjend H. Hasan Basri Km. 11 Kec. Alalak	Alalak	
37	Bank Sampah Desa Sungai Gampa	Desa Sungai Gampa	Rantau Badauh	
38	Bank Sampah SDN Sungai Gampa 2	Jl. Brigjen h. Hasan Basri Rt. 05 Desa Sungai gampa Kec. Rantau Badah	Rantau Badauh	
39	Bank Sampah Sehat Ceria SDN Penghulu	Jl.Haryono MT Rt.III Desa Penghulu	Marabahan	
40	Bank Sampah SDN Semangat Dalam 3	Jl. Komp. Persada Permai Permai Rt. 21 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak	Alalak	
41	Bank Sampah Dinas Pertanian dan TPH	Jl. Jend. Sudirman Kompek Perkantoran Marabahan	Marabahan	
42	Bank Sampah SDN Ulu Benteng 1	Jl. Putri Junjung Buih Rt. 17 Kel. Ulu Benteng Marabahan	Marabahan	
43	Bank Sampah Taufik	Jl. AES Nasution GG. Taufik Marabahan	Marabahan	
44	Bank Sampah SDN Sungai Gampa Asahi	Jln. Brigjen H.Hasan Basri km.28 Sungai Gampa Asahi RT 11	Rantau Badauh	
45	Bank Sampah SDN Ulu Benteng 4	Jln. Panglima Batur	Marabahan	
46	Bank Sampah SDN Bagus 1	Jln. S. Parman Desa Bagus RT 1 Kec.Marabahan	Marabahan	
47	Bank Sampah SDN Jejangkit Muara 1	Desa Jejangkit Muara Rt.6 Kec. Jejangkit Kab Batola	Jejangkit	
48	Bank Sampah SDN Antar Baru 1	Jl.Anjir Talaran Km.7 Kec. Marabahan Kab. Batola	Marabahan	
49	Bank Sampah Lestari Mandiri Desa Semangat Dalam	Desa Semanagat Dalam Rt. 44 Kec. Alalak	Alalak	
50	Bank Sampah Kuala Lupak	Desa Kuala Lupak	Tabungancn	
51	Bank Sampah Jejangkit Muara	Desa Jejangkit Muara	Jejangkit	
52	Bank Sampah SDN Banitan	Desa Banitan	Bakumpai	
53	Bank Sampah Desa Banitan	Desa Banitan	Bakumpai	
54	Bank Sampah Desa Karang Bunga	Desa Karang Bunga	Mandastana	
55	Bank Sampah Alya Regency	jln Jendral Sudirman	Marabahan	
56	Bank Sampah SMAN 1 Barambai	jln. Jenderal Sudirman RT 14 RW 1 Ray V Barambai Kolam Kiri	Barambai	
57	Bank Sampah Desa Bagus	Desa Bagus	Marabahan	
58	Bank Sampah Kelurahan Ulu Benteng	jln. Jendral Sudirman Rt.13 RW.001 Kel.Ulu Benteng	Marabahan	
59	bank Sampah MI Ulumul Qur'an	jln.Brigjend. H. Hasan Basri KM 29 Desa Sungai Gampa Asahi	Rantau Badauh	
60	Bank Sampah Kelurahan Marabahan Kota	Jln. Aes Nasution RT.17 RW.001	Marabahan	
61	Bank Sampah Desa Penghulu	Desa Penghulu	Marabahan	
62	Bank Sampah Tatah Mesjid	Desa Tatah Mesjid	Alalak	
63	Bank Sampah PT. Talenta Bumi	PT. Talenta Bumi Kecamatan Bakumpai	Bakumpai	
64	Bank Sampah SDN Anjir Serapat Muara	jln. Simpang Marabahan Desa Anjir Serapat Muara No. 50 RT. 07	Anjir Muara	
65	Bank Sampah Indah Bersama	Jln. Soemarno RT. 07 RW. 02 Ray. 03	Barambai	
66	Bank Sampah Maju Bersama	Desa Tabukan Raya	Tabukan	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

Pembangunan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan tidak hanya berorientasi pada pelestarian sumber daya alam, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim, mengurangi risiko bencana, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Salah satu indikator utama pembangunan lingkungan hidup adalah **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan berdasarkan komponen kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Capaian IKLH Kabupaten Barito Kuala menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan, terutama pada **komponen kualitas tutupan lahan** yang menjadi salah satu faktor penentu keberlanjutan fungsi ekologis wilayah.

Karakteristik Kabupaten Barito Kuala yang didominasi kawasan rawa, lahan pertanian, sempadan sungai, serta kawasan pesisir menjadikan upaya perlindungan tutupan lahan sebagai salah satu prioritas pembangunan lingkungan hidup. Perubahan fungsi lahan, berkurangnya vegetasi, serta tekanan pembangunan pada kawasan tertentu berpotensi menurunkan kualitas lingkungan apabila tidak diimbangi dengan upaya konservasi dan rehabilitasi yang memadai.

Selain itu, pelaksanaan program pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Tahun 2025 belum dapat terlaksana secara optimal akibat adanya penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 di **Desa Sungai Pitung**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan

pembangunan infrastruktur lingkungan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan pendanaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat, komunikasi publik, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

Pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. Pendekatan pembangunan lingkungan hidup perlu lebih mengedepankan **dialog, mediasi, sosialisasi, dan edukasi lingkungan** sejak tahap perencanaan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai manfaat, keamanan, serta dampak pengelolaan lingkungan terhadap kesehatan dan keberlanjutan pembangunan.

Di sisi lain, peningkatan kualitas lingkungan juga memerlukan penguatan fungsi ekologis kawasan melalui rehabilitasi lahan, penanaman pohon, perlindungan kawasan lindung, serta peningkatan **Ruang Terbuka Hijau (RTH)**, khususnya pada kawasan perkotaan, kawasan permukiman, dan kawasan strategis yang mengalami perkembangan pesat. Peningkatan RTH tidak hanya mendukung pencapaian target IKLH, tetapi juga memberikan manfaat dalam mengurangi suhu perkotaan, meningkatkan kualitas udara, mengendalikan limpasan air hujan, serta meningkatkan kualitas ruang publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan, memperluas ruang terbuka hijau, memperkuat pengelolaan limbah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, serta memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

4) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data dari BPS Kabupaten Barito Kuala dalam Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2026 menunjukan Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 berjumlah 334.958 jiwa yang terdiri dari laki–laki 169.639 jiwa dan perempuan 165.319 jiwa dengan Rasio Jenis Kelamin sebesar 102,61. Distribusi penduduk menurut kecamatan terbesar terletak pada Kecamatan Alalak sebanyak 68.000 jiwa, sedangkan distribusi penduduk terkecil adalah Kecamatan Kuripan dengan jumlah penduduk sebanyak 6.189 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk per km^2 di Kabupaten Barito Kuala adalah 138,08 jiwa/km^2, dimana kembali Kecamatan Alalak adalah kecamatan terpadat dengan kepadatan sebanyak 666,27 jiwa/km^2 , sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatannya yaitu Kecamatan Jejangkit sebesar 42,33 jiwa/km^2.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2024 menunjukkan bahwa demografi penduduk di Kabupaten Barito Kuala didominasi penduduk dengan usia 10-14 tahun dengan total 28.643 jiwa dengan rincian 14.644 laki-laki dan 13.999 perempuan. Detail sebaran penduduk berdasar kelompok umur dan jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32 Sebaran Penduduk Berdasar Kelompok Umur di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Kelompok Umur *Age Groups*	Jenis Kelamin/*Sex*		
	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	10.700	9.907	20.607
5–9	13.755	13.087	26.842
10–14	14.644	13.999	28.643
15–19	14.254	13.604	27.858
20–24	14.400	13.251	27.651
25–29	12.500	11.423	23.923
30–34	12.898	12.002	24.900
35–39	12.738	12.608	25.346
40–44	13.138	13.105	26.243
45–49	12.898	12.882	25.780
50–54	11.203	11.533	22.736
55–59	9.588	9.524	19.112
60–64	6.849	6.610	13.459
65–69	4.710	5.103	9.813
70–74	2.746	2.674	5.420
75+	2.618	4.007	6.625
Barito Kuala	**169.639**	**165.319**	**334.958**

Sumber/*Source*: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala/*Regional Population and Civil Registry Office of Barito Kuala Regency*

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2026

Ruang lingkup pelayanan kependudukan yang saat ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari pelayanan pembuatan Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dan yang terbaru adalah penerbitan Kartu Identiats Anak (KIA) yang merupakan program dari pemerintah nasional.

5) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah. Sampai dengan tahun 2025, berdasar dari Ekspos Hasil Pemutakhiran Indeks Desa Tahun 2025 yang disampaikan pada 12 Mei 2026, Kabupaten Barito Kuala dengan total desa sebanyak 195 desa, terdapat 104 Desa dengan Kategori Mandiri, 85 Desa dengan Kategori Maju, 6 Desa dengan Kategori Berkembang, dan tidak memiliki desa dengan kategori Desa tertinggal. Terdapat 23 desa yang berhasil mengalami kenaikan status pada tahun 2025 dibanding pada tahun sebelumnya (2024).

6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program pengendalian penduduk merupakan salah satu strategi dalam mensukseskan pembangunan di suatu daerah. Semakin besar jumlah penduduk, maka biaya pembangunan akan semakin tinggi, misalnya untuk subsidi pangan, pendidikan, bahan bakar dan juga subsidi kesehatan. Oleh karena itu pemerintah menggalakkan Program KB (Keluarga Berencana) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Pada tabel-tabel berikut dijelaskan kondisi pelaksanakan Program KB di Kabupaten Barito Kuala seperti yang

terdata pada Barito Kuala Dalam Angka tahun 2026.

Tabel 2.33 Jumlah Kampung KB menurut Kecamatan dan Klasifikasinya Tahun 2025

Kecamatan *District*	Dasar *Basic Level*		Berkembang *Developing Level*	
	Jumlah *Total*	Persentase *Percentage*	Jumlah *Total*	Persentase *Percentage*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen	14	100,00	–	–
Tamban	1	6,25	4	25,00
Mekarsari	14	93,33	1	6,67
Anjir Pasar	15	100,00	–	–
Anjir Muara	14	77,78	2	11,11
Alalak	8	57,14	3	21,43
Mandastana	9	100,00	–	–
Jejangkit	12	92,31	1	7,69
Belawang	6	75,00	2	25,00
Wanaraya	9	100,00	–	–
Barambai	5	55,56	3	33,33
Rantau Badauh	8	72,73	–	–
Cerbon	2	22,22	7	77,78
Bakumpai	8	72,73	3	27,27
Marabahan	–	–	7	70,00
Tabukan	12	92,31	–	–
Kuripan	–	–	3	42,86
Barito Kuala	**137**	**68,16**	**36**	**17,91**

Kecamatan *District*	Mandiri *Independent Level*		Berkelanjutan *Sustainable Level*	
	Jumlah *Total*	Persentase *Percentage*	Jumlah *Total*	Persentase *Percentage*
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tabunganen	–	–	–	–
Tamban	4	25,00	7	43,75
Mekarsari	–	–	–	–
Anjir Pasar	–	–	–	–
Anjir Muara	1	5,56	1	5,56
Alalak	2	14,29	1	7,14
Mandastana	–	–	–	–
Jejangkit	–	–	–	–
Belawang	–	–	–	–
Wanaraya	–	–	–	–
Barambai	–	–	1	11,11
Rantau Badauh	2	18,18	1	9,09
Cerbon	–	–	–	–
Bakumpai	–	–	–	–
Marabahan	–	–	3	30,00
Tabukan	–	–	1	7,69
Kuripan	–	–	4	57,14
Barito Kuala	**9**	**4,48**	**19**	**9,45**

Sumber/*Source:* Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala */ Department of Population Control, Family Planning, Women Empowerment, and Child Protection*

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2026

Pada tahun 2025, terdapat 137 Kampung KB di Kabupaten Barito Kuala yang masih berada pada kelas dasar yang tersebar di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Kuripan. Sementara untuk status yang berkembang sudah ada 36 Kampung KB yang tersebar di Kecamatan Mekarsari, Tamban, Anjir Muara, Alalak, Jejangkit, Belawang, Barambai, Cerbon, Bakumpai, Marabahan, dan Kuripan. Kemudian ada 9 Kampung KB yang sudah berstatus mandiri yang tersebar di Kecamatan Tamban, Anjir Muara, Alalak, dan Rantau Badauh. Terakhir ada 19 Kampung KB yang berstatus Berkelanjutan yang tersebar di Kecamatan Tamban, Anjir Muara, Alalak, Barambai, Rantau Badauh, Marabahan, Tabukan, dan Kuripan.

Tabel 2.34 Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Kecamatan ***Subdistrict***	**KKB** ***Family Planning Clinnics***	**PPKBD** ***Village Family PlanningService Units***
(1)	(2)	(3)
Tabunganen	1	14
Tamban	1	16
Mekarsari	2	9
Anjir Pasar	1	15
Anjir Muara	1	15
Alalak	3	18
Mandastana	1	14
Jejangkit	1	7
Belawang	1	13
Wanaraya	1	13
Barambai	1	11
Rantau Badauh	1	9
Cerbon	1	8
Bakumpai	1	9
Marabahan	5	10
Tabukan	1	11
Kuripan	1	9
Barito Kuala	**24**	**201**

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2026

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa klinik Keluarga Berencana juga sudah tersebar secara merata di seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala dengan total sebanyak 24 unit, terbanyak di Kecamatan Marabahan sebanyak 5 unit, begitupula dengan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa dengan jumlah pos terbanyak berada di Kecamatan Alalak dan yang plaing sedikit berada di Kecamatan Jejangkit, dengan total keseluruhan sebanyak 201 unit.

Adapun untuk jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana yang terekam dalam Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2026 adalah sebanyak 53.079 pasangan dengan yang terdaftar sebagaui Peserta KB Aktif adalah sebanyak 38.201 pasangan, dengan pasangan terbanyak berada di Kecamatan Alalak sebanyak 7.861 pasangan. Sedangkan untuk Peserta KB Baru Pasca Persalinan adalah sebanyak 1.249 pasangan dengan Pasangan terbanyak berada di Kecamatan Marabahan dengan total 272 pasangan.

7) Perhubungan

Meningkatnya kualitas akses jalan darat menyebabkan peningkatan dari volume kendaraan bermotor yang beroperasi maupun melintas di Kabupaten Barito Kuala. Menurut UPPD Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan dalam Barito Kuala Dalam Angka 2026 tercatat pada tahun 2025 ada sebanyak 74.507 unit kendaraan dengan rincian kendaraan roda 2 sebanyak 64.367 unit, kendaraan roda 3 sebanyak 68 unit, dan kendaraan roda 4/lebih sebanyak 10.072 unit, dimana untuk kendaraan beroda 4/lebih ini diisi oleh Microbus, Minibus, Bus, Pick Up, Light Truck, Truck, Mobil Sedan dan Jeep. Selanjutnya Kabupaten

Barito Kuala sampai dengan tahun 2025 ini memiliki 24 Trayek angkutan Darat yang tersebar di seluruh kawasan Kabupaten, namun hanya 6 Trayek yang masih aktif. Kemudian juga terdapat 43 rambu sungai yang terpasang di seluruh jalur transportasi sungai di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.35 Data Trayek Angkutan dan Penumpang dan Rambu Sungai di Wilayah Peraian Kabupaten Barito Kuala

TRAYEK ANGKUTAN DAN PENUMPANG

No	Trayek	Jumlah Armada	Keterangan
1	Pantang Baru - Muara Dadahup	2	Lintas Kabupaten / Antar Provinsi
2	Marabahan - Kuripan (Speed Boat)	3	Lintas Kabupaten
3	Marabahan - Kuripan	4	Lintas Kabupaten
4	Balukung Lama - Balukung Baru	10	Lintas Kabupaten
5	Palingkau - Banitan	2	Lintas Kabupaten
6	Ulu Benteng - Murung Raya	6	Lintas Kabupaten
7	Marabahan - Lepasan	13	Lintas Kabupaten
8	Pendalaman Baru - Sungai Gampa	20	Lintas Kabupaten
9	Patih Selera - Bambangin	13	Lintas Kabupaten
10	Samuda - Belawang	1	Lintas Kabupaten
11	Murung Keramat - Binaan Baru	2	Lintas Kabupaten
12	Jelapat Baru - Berangas	3	Lintas Kabupaten
13	Jelapat I - Kuin Cerucuk	6	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
14	Jenamas - Rantau Badauh (Speedboat)	1	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
15	Barambai - Banjarmasin	2	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
16	Wanaraya - Banjarmasin	1	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
17	Belawang - Banjarmasin	1	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
18	Tamban - Banjarmasin	1	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
19	Mekarsari - Banjarmasin	1	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
20	Tabunganen - Banjarmasin	2	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
21	Jejangkit - Banjaramsin	1	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
22	Sungai Lauk - Banjar Raya	2	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
23	Saka Kajang - Banjar Raya	3	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
24	Muara Tamban - Muara Mantuil	3	Lintas Kabupaten dalam Provinsi

No	Jenis Rambu	Jumlah Rambu	Lokasi	Tahun Pengadaan
1	Rambu Wajib	5	Jembatan Rumpiang	2011
2	Rambu Wajib	2	Wilayah Perairan Ujung Panti	2012
3	Rambu Wajib	2	Wilayah Perairan Kuripan	2012
4	Rambu Wajib	2	Wilayah Perairan Tabukan	2012
5	Rambu Peringatan	3	Perairan Sungai Barito	2013
6	Rambu Peringatan	5	Sungai Mekarsari	2015
7	Rambu Peringatan	5	Sungai Belawang	2017
8	Rambu Petunjuk	7	Perairan Sungai Anjir Talaran	2013
9	Rambu Petunjuk	7	Perairan Sungai Anjir Talaran	2015
10	Rambu Petunjuk	5	Sungai Pendalaman Baru	2017

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Barito Kuala memiliki karakteristik wilayah yang unik karena didominasi oleh jaringan sungai besar, seperti Sungai Barito, Sungai Negara, Sungai Alalak, dan berbagai anak sungai yang sejak dahulu menjadi jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian. Kondisi geografis tersebut

menjadikan transportasi sungai memiliki peran strategis sebagai bagian dari sistem konektivitas wilayah, khususnya pada kawasan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan jalan darat.

Di samping transportasi sungai, jaringan transportasi darat juga terus berkembang sebagai dampak meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Oleh karena itu, sistem transportasi Kabupaten Barito Kuala perlu dikembangkan secara terpadu agar mampu mendukung kelancaran mobilitas penduduk, distribusi logistik, pengembangan investasi, serta pelayanan publik secara lebih efektif.

Berdasarkan kondisi eksisting, dari **24 trayek angkutan darat dan sungai yang telah terdaftar, saat ini hanya 6 trayek yang masih aktif beroperasi**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar trayek belum dapat berfungsi secara optimal akibat keterbatasan permintaan angkutan, perubahan pola mobilitas masyarakat, kondisi infrastruktur pendukung, serta belum optimalnya integrasi antara moda transportasi darat dan transportasi sungai.

Belum optimalnya pelayanan angkutan umum juga berdampak terhadap kelancaran distribusi komoditas pertanian, perikanan, dan hasil perkebunan yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Barito Kuala. Sebagai salah satu lumbung pangan Provinsi Kalimantan Selatan, sistem logistik daerah memerlukan jaringan transportasi yang efisien agar biaya distribusi dapat ditekan dan daya saing produk daerah semakin meningkat.

Selain aspek konektivitas, keselamatan transportasi sungai juga masih memerlukan perhatian, khususnya terkait ketersediaan **Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)**, rambu-rambu sungai, tanda alur pelayaran, serta fasilitas keselamatan lainnya pada jalur distribusi hasil pertanian dan angkutan masyarakat. Penguatan aspek keselamatan menjadi penting mengingat transportasi sungai masih dimanfaatkan sebagai salah satu moda utama pada beberapa wilayah di Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan sektor perhubungan pada Tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan keterpaduan sistem transportasi darat dan sungai melalui penguatan konektivitas antarwilayah, revitalisasi trayek angkutan, peningkatan keselamatan transportasi sungai, serta pengembangan sistem logistik daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan.

8) Komunikasi dan Informatika

Di tengah maraknya penggunaan berbagai teknologi komunikasi modern serta banyaknya jasa pengiriman swasta, PT Pos Indonesia selaku pionir jasa pengiriman di Indonesia masih tetap eksis di Kabupaten Barito Kuala, di mana sampai pada tahun 2025 berdasar data dari Kabupaten Barito Dalam Angka Tahun 2026 memiliki 12 cabang pembantu yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, kecuali di Kecamatan Tabunganen, Mekarsari, Jejangkit, Cerbon, dan Bakumpai. Kemudian dalam hal komunikasi selular, pada tahun 2025 ada 9 Desa yang sudah bisa menerima jaringan 4G/LTE, 1 Desa yang masih berada pada jaringan 3G/HSDPA/EVDO, dan ada 191 Desa yang masih tidak ada penerima sinyal, namun bukan berarti tidak dapat mengakses koneksi sama sekali karena kover sinyal yang sudah ada dari desa atau kecamatan yang sudah memiliki akses sinyal dari berbagai operator selular yang beroperasi di Kabupaten Barito Kuala.

Transformasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia, serta penyelenggaraan informasi geospasial menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data.

Sejalan dengan kebijakan nasional, **Indeks Bhumandala** atau **Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial (JIG)** telah menjadi salah satu komponen penilaian dalam **Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Indeks PEMDI)**. Oleh karena itu, penguatan penyelenggaraan informasi geospasial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Informasi geospasial berperan penting dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang, pengambilan keputusan berbasis lokasi, pengelolaan kebencanaan, pengembangan infrastruktur, pelayanan publik, serta evaluasi pembangunan. Pemanfaatan data spasial juga mendukung implementasi **Satu Data Indonesia** sehingga seluruh perangkat daerah menggunakan referensi data yang sama, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan memperkuat implementasi **lima pilar Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG)**, yaitu:

1. **Kebijakan** penyelenggaraan informasi geospasial yang terintegrasi dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
2. **Kelembagaan** melalui penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
3. **Teknologi** berupa pengembangan infrastruktur, aplikasi, dan layanan informasi geospasial.
4. **Standar** melalui penerapan standar nasional penyelenggaraan data geospasial.
5. **Sumber Daya Manusia** melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi geospasial.

Penerapan kelima pilar tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial, memperkuat implementasi Satu Data Indonesia, meningkatkan nilai **Indeks Bhumandala**, serta mendukung peningkatan **Indeks PEMDI** Kabupaten Barito Kuala.

9) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah Koperasi yang Aktif pada tahun 2025 adalah sebanyak 39 koperasi di Kabupaten Barito Kuala yang tersebar di hampir semua kecamatan, kecuali di Kecamatan Tabunganen, Anjir Pasar, Anjir Muara, dan Belawang. Namun secara keseluruhan koperasi yang ada di Kabupaten Barito Kuala berjumlah 124 unit yang terdiri dari 33 Koperasi Unit Desa (KUD), 27 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), 4 Koperasi Karyawan (Kopkar), dan 60 Koperasi lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan (*sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026*)

Kabupaten Barito Kuala juga telah melakukan pengembangan dan inovasi kain sasirangan dimana pemerintah daerah melakukan intensifikasi pendampingan dan pelatihan kepada para pengrajin yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Barito Kuala. Salah satu desain kain batik sasirangan sudah terdaftar di Kemenkumham sebagai Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Barito Kuala dengan motif padi,

purun, jeruk dan gigi haruan (ciri khas Barito Kuala). Hasil identifikasi pengrajin yang ada di Kabupaten Barito Kuala setidaknya terdapat di 6 (enam) kecamatan antara lain Sasirangan Nazwa di Desa Pendalaman Kecamatan Barambai, Parhan Sasirangan di Desa Patih Selera Kecamatan Belawang, Wahyu Sasirangan di Desa Gandaria Kecamatan Anjir Pasar, Aulia Sasirangan di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak, Lampau Sasirangan di Desa Sungai Sahurai Kecamatan Rantau Badauh, dan Santik Sasirangan di Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana.

Purun Tikus merupakan jenis tanaman rumput yang tumbuh di daerah rawa berair. Sejauh ini di Provinsi Kalimantan Selatan, tanaman purun tikus hanya dapat tumbuh di Barito Kuala dan menjadi ciri khas Barito Kuala. Hingga saat ini hasil identifikasi pengrajin purun tikus/danau tersebar di 3 (tiga) kecamatan antara lain: Kerajinan Anyaman Purun Tikus di Desa Parimata Kec. Belawang, Kerajinan Anyaman Purun Danau di Kelurahan Lepasan Kec. Bakumpai, Kerajinan Anyaman Purun Danau di Desa Asia Baru Kec. Kuripan. Seluruh pengrajin anayaman purun ini mengembangkan hasil olahan purun tersebut dalam bentuk Masker Purun kombinasi kain, Tas Purun Kombinasi Kulit, Tas Purun kombinasi Sasirangan, Wadah Tisu, Box File, Kotak Souvenir dan Topi Kreasi purun yang semuanya merupakan jenis handicraft pada sektor pariwisata. Hal ini memiliki peluang yang cukup besar terutama mendukung pariwisata tidak hanya di daerah Barito Kuala tetapi juga pada sektor wisata populer di Kalimantan Selatan.

Sejauh ini dalam peningkatan kualitas produk kerajinan Anyaman Purun Tikus, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melakukan kerjasama dengan pengrajin tas kulit dari Yogyakarta dan Tanggerang. Dalam peningkatan kualitas produk kerajinan anyaman purun danau, pemerintah daerah juga telah melakukan kerjasama dengan PT. Eco Fesyen Indonesia (EFI) dan Kementerian Koperasi RI.

10) Penanaman Modal

Salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Dalam kaitan tersebut peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak.

Iklim investasi di Kabupaten Kaupaten Barito Kuala terus berkembang dan menarik investor dari tahun ke tahun seiring bertambahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini yang ditargetkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dari tahun ke tahun. Untuk mendorong iklim investasi yang bai, Kabupaten Barito Kuala memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dibentuk atas kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Proyeksi investasi di Kabupaten Barito Kuala diperkirakan terus berkembang karena adanya peningkatan aktivitas perekonomian dan usaha baik yang dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta maupun oleh

masyarakat sendiri. Disamping itu semakin membaik dan kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Barito Kuala akan mendorong minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Barito Kuala. Keadaan ini menuntuk tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi, terampil dan produktif. Selain itu, perkembangankondisi infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), kajian-kajian potensi dan peluang investasi, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada perusahaan yang ada diwilayah Kabupaten Barito Kuala juga mendorong pertumbuhan investasi di wilayah ini.

Pelayananan perizinan yang tepat waktu merupakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala yang berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dengan menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan DPMPTSP 85% dan peningkatan nilai investasi daerah 50 milliar pertahun selama 4 tahun ke depan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala menargetkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi terutama pengembangan sistem pelayanan perizinan dan no perizinan Kabupaten Barito Kuala yang aplikatif sehingga masyarakat/pelaku usaha dapat mengakses informasi berupajenis perizinan, persyaratan perizinan, proses perizinan, perkembangan investasi, perkembangan penerbitan perizinan, perkembangan retribusi, indeks kepuasan masyarakat dan potensi serta peluang investasi di Kabupaten Barito Kuala dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap tahun. Hal ini didukung kondisi teknologi yang berkembang cepat dengan adanya perbaikan dan pengembangan sistem pelayanan terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2022 pindah kantor dari kantor yang ada ke Mall Pelayanan Publik (MPP) yang diresmikan oleh Menpan – RB Azwar Anas pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 dengan jumlah pelayanan sebanyak 158 Pelayanan dari 17 intansi.

Tabel 2.36 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Kecamatan *District*	Perusahaan *Establishment*	Tenaga Kerja *Employee*	Nilai Investasi (Ribu Rp.) *Investment (Thousand Rp.)*	Nilai Produksi (Ribu Rp.) *Production Value (Thousand Rp.)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen	468	1.223	39.005.674	41.194.818
Tamban	41	96	10.831.000	1.722.500
Mekarsari	67	115	1.500.850	1.509.251
Anjir Pasar	111	227	828.800	1.920.590
Anjir Muara	124	254	952.225	1.051.400
Alalak	129	272	726.000	923.800
Mandastana	105	140	1.107.250	1.587.900
Jejangkit	21	81	128.000	163.000
Belawang	31	248	232.500	299.500
Wanaraya	106	172	1.773.100	31.549.185
Barambai	248	547	87.961.108	4.487.948
Rantau Badauh	229	367	2.836.150	1.939.135
Cerbon	107	217	1.279.500	1.637.330
Bakumpai	97	253	626.940	624.020
Marabahan	106	249	822.900	1.274.425
Tabukan	107	1.551	103.443.017	147.391.067
Kuripan	33	53	261.600	368.200
Barito Kuala	**2.130**	**6.065**	**254.316.614**	**239.644.069**

Sumber/*Source*: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala/*Cooperative Unit, Industry, and Trading Service of Barito Kuala Regency*

https://baritokualakab.bps.go.id

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2026

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai investasi yang didasari pada jumlah perusahaan dan tenaga kerja di Kabupaten Barito Kuala adalah sejumlah Rp. 254.316.614.000, dimana unit perusahaan terbanyak berada di Kecamatan Tabunganen dengan 468 Perusahaan, Tenaga Kerja terbanyak berada di Kecamatan Tabukan yaitu sebanyak 1.551 orang, Nilai investasi tertinggi berada di Kecamatan Tabukan dengan nilai investasi sebesar Rp. 103.443.017.000, dan terakhir nilai produksi paling tinggi berada di Kecamatan Tabukan yaitu sebesar Rp. 147.391.067.000 berdasar data dari Dinas Kopeasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dalam Barito Kuala Dalam Angka tahun 2026.

11) Seni Budaya dan Olahraga

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Jumlah organisasi kepemudaan yang ada menyebar di beberapa kecamatan diantaranya merupakan organisasi pemuda yang sudah cukup terkenal di masyarakat seperti: AMPI, KNPI, Karang Taruna, dan Kelompok Pemuda Produktif yang telah terdaftar dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Penyelenggaraan kegiatan olah raga, yang dilaksanakan/diprogramkan oleh Pemerintah Daerah meliputi: Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kompetisi, Festival, Kejurda, Festival Layang – layang, Balogo dan Turnamen-turnamen lainnya dan kegiatan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat/swasta/sponsor/pihak ketiga. Kegiatan olah raga yang rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah seperti event dalam rangka memeriahkan

hari kemerdekaan dan Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

Pada situs budaya, selain makam Datuk H. Abdussamad masih banyak makam yang didatangi peziarah seperti makam Panglima Wangkang, Datuk Ilyas Bakul, Datuk Syahidun, Datuk Aminim, Datuk Khayan, Habib Alwi, Syarifah Ratu Sela, dan Jaya Arja serta wisata sejarah lainnya seperti rumah bulat dan rumah budaya. Kelompok kesenian budaya dan keagamaan juga tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Jenis kesenian budaya dan keagamaan tersebut antara lain Maulid Habsyi, Rebana, Sinoman Hadrah, Kuda Lumping, Kuda Gepang, Reog dan Keroncong.

C. Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Pariwisata

Pemerintah daerah juga memberikan ruang yang luas bagi desa untuk memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di wilayahnya baik dalam pengelolaan daya tarik/atraksi wisata, peningkatan aksesibilitas, fasilitas penunjang dan pemanfaatan peluang usaha jasa pariwisata melalui badan usaha milik desa dan pemberdayaan kelompok sadar wisata. Pemasaran pariwisata dilakukan berdasarkan pertimbangan kemudahan aksesibilitas dan potensi jenis atraksi wisata.

Sepanjang tahun 2025 tercatat 207.963 wisatawan domestik yang berwisata di Kabupaten Barito Kuala dengan puncak kunjungan pada Bulan Desember. Sedangkan wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Barito Kuala adalah 323 orang dengan puncak kunjungan justru terjadi pada Bulan Januari. Sarana penunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Barito Kuala, antara lain tersedianya 4 penginapan dan 569 rumah makan/restoran yang tersebar di setiap kecamatan. Tercatat ada 7 objek wisata alam di Kabupaten Barito Kuala yaitu Pulau Bakut, Pulau Kembang, Rambai Mangrove Center, Agropolitan Terantang/Kampung Inggris, Susur Sungai Barito, Pulau Kaget, dan Pulau Curiak. Selain itu, terdapat 5 objek wisata buatan yaitu RTH Jembatan Rumpiang, Agrowisata Talaran Setara, Ulek (Siring) Marabahan, Kawasan Wisata Jembatan Barito, dan Jejangkit Ecopark. Terakhir ada 1 (satu) objek wisata religi yaitu Makam Datuk Abdussamad di Kecamatan Marabahan *(sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026*)

2) Pertanian

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu lumbung padi bagi provinsi Kalimantan Selatan. Lahan sawah yang ada di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 seluruhnya merupkana lahan non irigasi dengan total luasan 117.419 Ha, dimana Kecamatan Tamban menjadi yang terluas dengan 11.371 ha dan Kecamatan Marabahan menjadi yang terkecil dengan hanya 1.895 ha. Pada tahun 2025 produksi padi di Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar 323.183 ton GKG (Gabah Kering Giling) dengan luas panen sebesar 91.057 ha. Beras Anjir menjadi produk/komoditas unggulan di Kabupaten Barito Kuala dan banyak diperjualbelikan hingga ke luar daerah.

Selain itu di Kabupaten Barito Kuala juga menghasilkan tanaman pangan lainnya seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Total produksi jagung di Kabupaten Barito Kuala sepanjang tahun 2025 sebesar 5.317,01 ton dengan produksi terbersarnya berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Wanaraya. Total produksi kacang tanah tahun 2025 adalah sebesar 78,41 ton yang sebagian

besar dihasilkan di Kecamatan Wanaraya. Total produksi ubi kayu tahun 2025 sebesar 10.377,49 ton yang sebagian besari dihasilkan di Kecamatan Mekarsari. Terakhir total produksi ubi jalar tahun 2025 sebanyak 126,56 ton yang pada tahun ini hanya dihasilkan di dua kecamatan yaitu di Kecamatan Wanaraya dan Rantau Badauh.

Disamping pada sektor tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura Kabupaten Barito Kuala juga memiliki keunggulan yang kompetitif di Provinsi Kalimantan Selatan. Produk Hortikultura Jeruk Siam dan Nenas adalah dua komoditas buah-buahan dimana Barito Kuala memberikan sumbangsih yang besar pada total produksi buah tersebut di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2025, total produksi Jeruk Siam mencapai 559.187,27 kw (kuintal) yang mana produksi paling besar ada di Kecamatan Barambai dengan produksi sebanyak 204.976 kw, dilanjutkan produksi total Nenas pada tahun 2025 mencapai 23.684,50 kw yang mana produksi paling besar ada di Kecamatan Mekarsari dengan besaran produksi sebanyak 20.592 kw. Produksi buah-buahan lainnya yang tercatat selama tahun 2025 diantaranya adalah Semangka sebesar 96,8 kw, Melon sebesar 135,5 kw, Mangga sebesar 8.807,04 kw, , Pisang sebesar 1.660,25 kw, Pepaya sebesar 164,9 kw, Jambu Air sebesar 122,65 kw, Jambu Biji sebesar 242,67 kw, Nangka sebesar 360,07 kw, Pepaya sebesar 164,9 kw, Rambutan sebesar 484,5 kw, dan Sirsak 126,53 kw.

Selanjutnya, Produk Hortikultura pada segmen tanaman sayuran di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025 paling besar adalah tanaman Jamur Tiram dengan produksi sebesar 1.660 kw, dilanjutkan dengan Cabai Rawit sebesar 1.357,7 kw, Cabai Besar sebesar 1.335,4 kw, Ketimun sebesar 1.138,5 kw, Terung sebesar 908,9 kw, Daun Bawang sebesar 781,25 kw, Tomat sebesar 659 kw, dan Kacang Panjang sebesar 559,2 kw.

Selain tanaman pangan dan hortiklutra, Kabupaten Barito Kuala juga memproduksi tanaman perkebunan, dengan produksi terbesar pada komoditas kelapa sawit, yakni sebesar 48.154,79 ton di sepanjang tahun 2025. Selain kelapa sawit, juga terdapat komoditas kelapa, karet, purun, dan sagu. Adapun total produksi tanaman perkebunan tersebut, berturut-turut adalah untuk Kelapa sebesar 5.396,84 ton; Karet sebesar 7.639,96 ton; Purun sebesar 421,88 ton; dan Sagu sebesar 5,39 ton.

Populasi ternak pada tahun 2025 di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh Sapi Potong, yakni sebanyak 3.991 ekor. Sapi Potong tersebut sebagian besar terdapat di Kecamatan Wanaraya dan Kecamatan Mandastana. Selain Sapi Potong, terdapat juga ternak kambing dengan populasi sebanyak 1.009 ekor yang terdapat pada semua kecamatan, kecuali Kecamatan Kuripan. Sebaliknya di Kecamatan Kuripan terdapat ternak yang tidak ada pada kecamatan lain, yaitu Kerbau sebanyak 940 ekor. Di Kabupaten Barito Kuala juga terdapat ternak Babi, yakni sebanyak 84 ekor yang hanya berada di Kecamatan Barambai. Selama tahun 2025, total ternak yang telah dipotong adalah sebanyak 850 ekor Sapi Potong, 30 ekor Kerbau, dan 167 ekor Kambing yang mana sebagian besar dilaksanakan pada hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya total produksi daging ternak selama tahun 2025 adalah 1.075,25 kw dari Sapi Potong, 69,27 kw dari Kerbau, dan 21,13 kw dari Kambing.

Unggas yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala sepanjang tahun 2025 adalah Ayam Pedaging sebanyak 2.979.066 ekor dengan yang terbanyak berada di Kecamatan Wanaraya yaitu sebesar 2.851.000 ekor; Ayam Kampung sebanyak 159.447 ekor yang terbagi rata di 17 Kecamatan; Itik sebanyak 34.726 ekor,

dan Itik Manila sebanyak 2.029 ekor. Adapun unggas tersebut ada yang diambil dagingnya maupun telurnya. Total unggas yang telah dipotong adalah sebanyak 34.102 ekor Ayam Kampung, 1.543.750 ekor Ayam Pedaging, 215 ekor Itik, dan 76 ekor Itik Manila yang dari pemotongan tersebut dihasilkan produksi daging unggas selama tahun 2025 adalah 262,59 kw dari Ayam Kampung, 18.102,01 kw dari Ayam Pedaging, 2,72 kw dari Itik dan 0,84 kw dari Itik Manila. Kemudian telur yang dihasilkan dari unggas ini adalah 130.443,60 kg dari Ayam Kampung dengan produksi merata di ke-17 kecamatan dengan rata-rata produksi 7.000 s.d 8.000 kg, 278.261,94 kg dari Itik dengan produksi terbanyak di Kecamatan Tamban, dan 10.983,66 kg dari Itik Manila dengan produksi terbanyak di Kecamatan Bakumpai (*Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026*)

3) Kehutanan

Berdasar data dari Kalimantan Selatan dalam Angka tahun 2026, didapat data bahwa sampai pada tahun 2025 luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Barito Kuala adalah 144,9 Ha, lahan konservasi daratan seluas 3.666,69 Ha, hutan produksi yang dapat dikonservasi seluas 876,66 Ha, dan jumlah luas hutan dan perairan seluas 4688,25 ha. Data ini berdasar Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Serta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Tahun 2023.

Selanjutnya Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Tahun 2024, di Kabupaten Barito Kuala ada 4 Kawasan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 13313/MenLHK-PKTL/PKH/PLA.2/2023 Tanggal 22 Desember 2023 yaitu:

- SM Kuala Lupak seluas 3.295,34 Ha
- SM Pulau Kaget seluas 318,62 Ha
- TWA Pulau Kembang seluas 79,34 Ha
- TWA Pulau Bakut seluas 19,58 Ha

Sealnjutnya mengenai sebaran Titik Panas/Hotspot tahun 2025 di Kabupaten Barito Kuala adalah sebanyak 44 titik berdasarkan data dari Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2026, menjadikan Kabupaten Barito Kuala sebagai Kabupaten dengan Titik Panas/Hotspot terendah dari 11 Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

4) Sumber Daya Energi dan Mineral

Berdasar data dari Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2026, pada tahun 2025 terdapat total pelanggan listrik sebanyak 123.196, bertambah sebanyak 3.546 pelanggan dari tahun 2024 yang berjumlah 119.650 pelanggan. Kemudian pada tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah produksi listrik dibanding tahun 2024, diikuti dengan jumlah listrik yang terjual juga dari tahun 2024. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut mengenai produksi dan penjualan listrik serta jumlah pelanggan selama 5 tahun terakhir (2021-2025), berdasar data dari PLN yang disarikan dalam Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2026.

Tabel 2.37 Jumlah Daya Terpasang, Produksi dan Penjualan Listrik serta Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025

Tahun *Year*	Daya Terpasang *Installed Electricity Power* (KW)	Produksi Listrik *Electricity Production* (KWh)	Listrik Terjual *Electricity Sold* (KWh)	Dipakai Sendiri *Own Used* (KWh)	Susut/ Hilang *Shrinkage/ Lost* (KWh)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021	119.935.874	220.433.378	211.577.577	494.051	8.361.750
2022	124.949.174	216.516.277	204.730.474	991.329	10.794.474
2023	137.879.020	217.201.102	205.054.680	1.099.892	11.046.530
2024	149.537.924	246.138.448	227.497.876	1.170.180	17.470.392
2025	157.451.774	260.479.636	243.697.352	1.278.285	15.503.998

Tahun *Year*	Jumlah Pelanggan *Number of Electricity Customers*
(1)	(2)
2021	106.879
2022	110.715
2023	115.858
2024	119.650
2025	123.196

Sumber/*Source*: PT PLN (PERSERO) Wilayah Kabupaten Barito Kuala/*Regional PT PLN (PERSERO) of Barito Kuala Regency*

Sumber: Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2026

Selanjutnya jumlah air bersih yang disalurkan sepanjang tahun 2025, berdasarkan data PDAM Barito Kuala tercatat sebesar 10.623.374 m^3 air dengan nilai penjualan sebesar Rp 50.501.077.500,00, dengan lokasi penyaluran dan penjualan terbesar berada di poros Kecamatan Alalak-Mandastana. Total pelanggan yang mendapat akses air bersih PDAM adalah sebanyak 41.403 pelanggan, dengan pelanggan terbanyak di Poros Kecamatan Alalak-Mandastana. Detail mengenai cakupan akses air bersih PDAM dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.38 Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Barito Kuala berdasar Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan *District*	Pelanggan *Number of Customers*	Air Disalurkan *Distributed Water* (m^3)	Penjualan *Sold Water* (m^3)	Nilai *Value* (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen	539	100.198	89.344	365.041.000
Tamban-Mekarsari	319	58.660	52.530	239.642.000
Anjir Pasar-Anjir Muara	2.902	837.784	588.513	3.636.953.500
Alalak-Mandastana	25.550	5.695.764	4.487.221	29.258.193.000
Jejangkit	403	85.336	67.914	428.761.000
Belawang-Wanaraya	790	196.760	176.802	1.002.544.500
Barambai	1.549	447.225	364.522	2.012.487.500
Rantau Badauh	1.447	399.767	376.834	2.068.305.000
Cerbon	1.064	302.716	287.731	1.548.327.000
Bakumpai	247	58.121	50.842	305.454.500
Marabahan	5.542	2.138.055	1.430.068	8.382.560.500
Tabukan-Kuripan	1.051	302.988	218.955	1.252.808.000
Barito Kuala	**41.403**	**10.623.374**	**8.191.276**	**50.501.077.500**

Sumber/*Source*: PDAM Kabupaten Barito Kuala/*PDAM of Barito Kuala Regency*

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

5) Perdagangan

Sarana perdagangan di Kabupaten Barito Kuala tidak mengalami peningkatan dari tahun 2024 hingga 2025. Total sarana perdangangan baik tahun 2024 maupun 2025 berjumlah sebanyak 926 unit, dengan rincian pasar sebanyak 51 unit, 20 unit toko, dan 855 unit kios. Adapun daftar pasar yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39 Rekapitulasi Data Pasar di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Pasar *Market*	Lokasi *Location*	Luas (m^2) *Area (m^2)*		Kios *Kiosk*	Los *Stall*	Pedagang *Traders*
		Lahan *Land*	Bangunan *Building*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pasar Baru Marabahan Barat (Harian)	Marabahan	14.440	1.844	196	60	315
Pasar Baru Marabahan Timur (Minggu)	Marabahan	–	–	–	–	...
Pasar Wangkang (Harian)	Marabahan	1.660	950	83	72	213
Pasar Ikan Wangkang (Minggu)	Marabahan	–	–	–	–	...
Pasar Antar Jaya (Minggu)	Marabahan	220	64	–	21	50
Pasar Antar Baru (Rabu)	Marabahan	–	–	–	–	...
Pasar Sei Gampa (Kamis)	Rantau Badauh	3.500	466	–	50	404
Pasar Sei Pantai (Selasa)	Rantau Badauh	140	–	–	–	70
Pasar Danda Jaya (Jum'at)	Rantau Badauh	1.100	252	–	52	110
Pasar KUD Basunondo	Rantau Badauh	–	–	–	–	...
Pasar Barambai Muara (Senin)	Barambai	2.500	378	–	42	150
Pasar Barambai Kolam Kiri (Minggu)	Barambai	3.500	64	–	50	200
Pasar Rabu (Rabu)	Barambai	2.800	60	–	20	75
Pasar Sei Seluang (Sabtu)	Belawang	2.500	189	–	30	120
Pasar Karang Buah	Belawang	–	–	–	–	...
Pasar Bambangin	Belawang	–	–	–	–	...
Pasar Belawang	Belawang	–	–	–	–	...
Pasar Kolam Kiri (Selasa)	Wanaraya	2.100	180	–	32	136
Pasar Sidomulyo (Selasa)	Wanaraya	1.500	72	–	25	110
Pasar Sumber Rahayu	Wanaraya	–	–	–	–	...
Pasar Simpang Jaya	Wanaraya	–	–	–	–	...
Pasar Anjir Muara (Kamis dan Minggu)	Anjir Muara	3.500	216	–	41	195
Pasar Codeco (Sabtu)	Anjir Muara	600	–	–	–	30
Pasar KM. 21 (Jum'at)	Anjir Muara	700	–	–	–	70
Pasar Anjir Pasar (Rabu)	Anjir Pasar	7.200	1.476	40	104	350

https://baritokualakab.bps.go.id

Pasar *Market*	Lokasi *Location*	Luas (m^2) *Area (m^2)*		Kios *Kiosk*	Los *Stall*	Pedagang *Traders*
		Lahan *Land*	Bangunan *Building*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pasar KM.14 (Selasa)	Anjir Pasar	600	–	–	–	82
Pasar Jejangkit (Selasa)	Jejangkit	2.800	308	–	42	135
Pasar Tabing Rimbah (Jum'at)	Mandastana	1.200	340	–	42	70
Pasar Tanipah (Senin)	Mandastana	1.716	216	–	32	130
Pasar Karang Bunga (Minggu)	Mandastana	–	–	–	–	...
Pasar KM. 6 (Sabtu)	Tamban	2.000	1.700	–	150	350
Pasar Subarjo/Jelapat I (Minggu)	Tamban	850	376	–	42	150
Pasar KM. 12	Mekarsari	–	–	–	–	...
Pasar KM. 5 (Jum'at)	Mekarsari	12.500	468	–	70	350
Pasar KM. 17 (Kamis)	Mekarsari	1.100	–	–	14	115
Pasar Jelapat II (Selasa)	Mekarsari	2.000	–	–	40	125
Pasar Mekarsari (Kamis)	Mekarsari	1.700	–	–	24	130
Pasar Tabunganen Muara (Minggu)	Tabunganen	3.100	432	–	92	240
Pasar beringin Kencana (Kamis)	Tabunganen	1.400	126	–	14	114
Pasar Desa Pemurus (Selasa)	Tabunganen	3.000	84	–	21	150
Pasar Induk Handil Bakti (Harian)	Alalak	31.000	5.040	271	160	150
Pasar Berangas Barat (Senin)	Alalak	7.500	7.500	300	50	350
Pasar Beringin	Alalak	–	–	–	–	...
Pasar Semangat Dalam	Alalak	–	–	–	–	...
Pasar Rimbun Tulang (Minggu)	Kuripan	4.000	600	–	50	50
Pasar Tabatan Baru (Sabtu)	Kuripan	400	–	–	–	75
Pasar Jambu (Kamis)	Kuripan	400	–	–	–	50
Pasar Kabuau (Minggu)	Kuripan	–	–	–	–	...
Pasar Asia Baru	Kuripan	–	–	–	–	...
Pasar Tabukan Raya (Senin)	Tabukan	2.100	378	–	44	315
Pasar Bantuil (Jum'at)	Cerbon	–	–	–	–	...

Sumber/*Source*: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala/*Cooperative Unit, Industry, and Trading Service of Barito Kuala Regency*

https://baritokuala.kab.bps.go.id

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

Selanjutnya dapat dilihat jumlah usaha menurut kecamatan, berdasarkan skala usaha yang yang diterbitkan izinnya oleh aplikasi OSS RBA di Kabupaten Barito Kuala di mana pada tahun 2025 terdapat 45 Usaha Besar, 9 Usaha Menengah, dan 6.669 Usaha Kecil dan Mikro seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.40 Jumlah Usaha Berdasar Skala Usaha di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Kecamatan ***Subdistrict***	**Usaha Besar** ***Large Enterprise***	**Usaha Menengah** ***Medium Enterprise***	**Usaha Kecil dan Mikro** ***Small & Micro Enterprise***
(1)	(2)	(3)	(4)
Tabunganen	4	-	267
Tamban	12	-	300
Mekarsari	1	-	238
Anjir Pasar	-	-	301
Anjir Muara	1	-	265
Alalak	13	5	1.912
Mandastana	-	-	303

Kecamatan *Subdistrict*	Usaha Besar *Large Enterprise*	Usaha Menengah *Medium Enterprise*	Usaha Kecil dan Mikro *Small & Micro Enterprise*
Jejangkit	1	-	109
Belawang	1	-	245
Wanaraya	1	-	235
Barambai	1	-	285
Rantau Badauh	2	-	346
Cerbon	1	-	202
Bakumpai	-	-	176
Marabahan	4	4	1.177
Tabukan	3	-	156
Kuripan	2	-	152
Barito Kuala	**45**	**9**	**6.669**

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

6) Perindustrian

Terdapat 2.130 perusahaan pada tahun 2025 di Kabupaten Barito Kuala dengan total investasi perusahaan yang tercatat sebanyak Rp 254.316.614.000,00 dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak 6.065 tenaga kerja, dengan total nilai produksi sebesar Rp 239.644.069.000. Selain itu, berdasar skalanya, Industri di Kabupaten Barito Kuala berjumlah total sebanyak 2.130 unit yang dapat dikelompokkan menjadi industri kecil yang masih menjadi yang terbanyak dengan 2.115 unit, diikuti industri menengah sebanyak 10 unit, dan industri besar sebanyak 5 unit. Selebihnya dapat dilihat pada 2 tabel dibawah ini.

Tabel 2.41 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Kecamatan *District*	Perusahaan *Establishment*	Tenaga Kerja *Employee*	Nilai Investasi (Ribu Rp.) *Investment (Thousand Rp.)*	Nilai Produksi (Ribu Rp.) *Production Value (Thousand Rp.)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen	468	1.223	39.005.674	41.194.818
Tamban	41	96	10.831.000	1.722.500
Mekarsari	67	115	1.500.850	1.509.251
Anjir Pasar	111	227	828.800	1.920.590
Anjir Muara	124	254	952.225	1.051.400
Alalak	129	272	726.000	923.800
Mandastana	105	140	1.107.250	1.587.900
Jejangkit	21	81	128.000	163.000
Belawang	31	248	232.500	299.500
Wanaraya	106	172	1.773.100	31.549.185
Barambai	248	547	87.961.108	4.487.948
Rantau Badauh	229	367	2.836.150	1.939.135
Cerbon	107	217	1.279.500	1.637.330
Bakumpai	97	253	626.940	624.020
Marabahan	106	249	822.900	1.274.425
Tabukan	107	1.551	103.443.017	147.391.067
Kuripan	33	53	261.600	368.200
Barito Kuala	**2.130**	**6.065**	**254.316.614**	**239.644.069**

Sumber/*Source*: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala/*Cooperative Unit, Industry, and Trading Service of Barito Kuala Regency*

https://baritokualakab.bps.go.id

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2026

Tabel 2.42 Jumlah Perusahaan Industri Besar, Sedang, Kecil dan Rumah Tangga berdasarkan jenisnya di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Jenis Industri *Type of Industries*	Besar *Large*	Menengah *Medium*	Kecil *Small*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	–	–	1	1
Aktivitas Jasa Informasi	–	–	1	1
Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Ybdi	–	–	1	1
Aktivitas Penerbitan	–	–	1	1
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya	–	–	6	6
Industri Alat Angkutan Lainnya	–	4	48	52
Industri Bahan Kimia	–	–	13	13
Industri Barang Galian Bukan Logam	–	–	41	41
Industri Barang Logam (Bukan Mesin)	–	–	23	23
Industri Farmasi dan Obat Tradisional	–	–	7	7
Industri Furnitur	–	–	34	34
Industri Karet dan Plastik	–	–	23	23
Industri Kayu, Gabus dan Anyaman	3	–	157	160
Industri Kendaraan Bermotor	–	–	1	1
Industri Kulit dan Alas Kaki	–	–	2	2
Industri Logam Dasar	–	–	74	74
Industri Makanan	1	1	971	973
Industri Mesin dan Perlengkapan Ytdl	–	–	6	6
Industri Minuman	–	–	88	88
Industri Pakaian Jadi	–	–	137	137
Industri Pencetakan dan Reproduksi	–	–	3	3
Industri Pengolahan Lainnya	–	–	11	11
Industri Peralatan Listrik	–	–	3	3
Industri Produk Batu Bara dan Minyak	1	1	–	2
Industri Tekstil	–	–	18	18
Konstruksi Khusus	–	–	2	2
Pendidikan	–	–	1	1
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	–	–	4	4
Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	–	–	2	2
Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	–	–	377	377
Reparasi dan Pemasangan Mesin	–	4	37	41
Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	–	–	22	22
Barito Kuala	**5**	**10**	**2.115**	**2.130**

Sumber/*Source*: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala/*Cooperative Unit, Industry, and Trading Service of Barito Kuala Regency*

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2026

7) Transmigrasi

Pembinaan kawasan transmigrasi, tiap tahunnya telah dilakukan melalui Program Pengembangan Kawasan transmigrasi melalui kegiatan penguatan tahapan satuan kemandirian melalui bidang infrastruktur, sosial ekonomi kelembagaan dengan pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit yang merupakan desa utama SKP B Kawasan transmigrasi Cahaya Baru, sedangkan penguatan SDM dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pelatihan untuk pelaku usaha yaitu pelatihan

budidaya jamur tiram untuk pelaku usaha di Kawasan transmigrasi dengan pelatih/narasumber dari kelompok jamur tiram Mutiara alam binaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala, peserta pelatihan 30 orang berasal dari 6 (enam) desa perwakilan SKP di Kawasan transmigrasi.

Pelatihan selanjutnya adalah workshop administrasi keuangan sederhana untuk pelaku usaha dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang pelaku usaha dari perwakilan SKP di Kawasan transmigrasi disamping itu ada pula bantuan untuk kelompok Kambang Barenteng Desa Cahaya Baru berupa peralatan mesin serbuk instan untuk usaha pembuatan jamu instan dan pelatihan pembuatan jamu instan.

Selain melalui kegiatan APBD pengembangan Kawasan transmigrasi juga dilaksanakan melalui TP APBN dengan program daerah tertinggal, Kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, dimana sebelumnya tahun 2022 kegiatan difokuskan pada peningkatan infrastruktur wilayah berupa pembuatan jembatan box culvert, pada Desa Dinar Baru Kec. Rantau Badauh, peningkatan TALUD Jalan Boulevard pusat KTM. Selain itu dalam upaya peningkatan SDM melalui kegiatan mental spiritual juga dilakukan rehabilitasi Mushalla Desa Sampurna Kecamatan Jejangkit.

8) Kelautan dan Perikanan

Sebagai wilayah yang dilalui salah satu sungai terpanjang, yakni Sungai Barito, serta berbatasan langsung dengan wilayah laut, maka masyarakat Kabupaten Barito Kuala cukup banyak yang mengusahakan perikanan tangkap. Pada tahun 2025, tercatat ada sekitar 808 rumah tangga yang melakukan penangkapan perikanan laut dengan produksi sebesar 3.548,77 ton, yang terkonsentrasi di Kecamatan Tabunganen dan Kecamatan Tamban. Selain itu, terdapat 1.167 rumah tangga yang melakukan penangkapan di perairan umum dengan total produksi sebesar 6.301,39 ton.

Selain perikanan tangkap, di Kabupaten Barito Kuala juga banyak rumah tangga yang melakukan budidaya perikanan, di mana sebagian besar menggunakan kolam, dan ada juga yang menggunakan tambak dan jaring apung. Adapun produksi perikanan budidaya sepanjang 2025 adalah sebesar 11.992,98 ton (sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026). Lebih detailnya mengenai produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.43 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2025 (ton)

Kecamatan ***Subdistrict***	**Perikanan Laut** ***Marine Fisheries***		**Perairan Umum** ***Inland Water***		**Jumlah** ***Total***	
	2024	**2025**	**2024**	**2025**	**2024**	**2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tabunganen	3.148,70	3.425,79	45,69	48,59	3.194,39	3.474,38
Tamban	255,30	122,98	201,59	215,99	456,89	338,97
Mekarsari	-	-	443,34	464,37	443,34	464,37
Anjir Pasar	-	-	-	-	-	-
Anjir Muara	-	-	491,14	529,17	494,14	529,17
Alalak	-	-	342,32	367,18	342,32	367,18
Mandastana	-	-	171,44	183,59	171,44	183,59
Jejangkit	-	-	-	-	-	-
Belawang	-	-	166,24	178,19	166,24	178,19
Wanaraya	-	-	-	-	-	-
Barambai	-	-	378,10	404,97	378,10	404,97

Kecamatan *Subdistrict*	Perikanan Laut *Marine Fisheries*		Perairan Umum *Inland Water*		Jumlah *Total*	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Rantau Badauh	-	-	403,50	431,97	403,50	431,97
Cerbon	-	-	595,15	739,75	595,15	739,75
Bakumpai	-	-	1.124,49	1.204,12	1.124,49	1.204,12
Marabahan	-	-	287,47	307,78	287,47	307,78
Tabukan	-	-	423,70	469,77	423,70	469,77
Kuripan	-	-	695,59	755,95	695,59	755,95
Barito Kuala	**3.404,00**	**3.404,00**	**5.772,76**	**6.301,39**	**9.176,76**	**9.850,16**

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2025-2026

Tabel 2.44 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024-2025 (ton)

Kecamatan *Subdistrict*	Tambak *Brackish WaterPand*		Kolam *Fresh WaterPond*		Jaring Apung *Floating Cage Net*		Jumlah *Total*	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tabunganen	11.638,73	11.333,50	3,15	355,00	-	-	11.641,88	11.688,50
Tamban	-	-	7,67	22,36	-	-	7,67	22,36
Mekarsari	-	-	4,30	9,41	-	-	4,30	9,41
Anjir Pasar	-	-	-	4,95	-	-	-	4,95
Anjir Muara	-	-	5,33	1,75	-	-	5,33	1,75
Alalak	-	-	4,15	29,97	-	-	4,15	29,97
Mandastana	-	-	1,47	2,42	-	-	1,47	2,42
Jejangkit	-	-	0,24	0,79	-	-	0,24	0,79
Belawang	-	-	11,88	-	-	-	11,88	-
Wanaraya	-	-	-	-	-	-	-	-
Barambai	-	-	2,77	5,74	-	-	2,77	5,74
Rantau Badauh	-	-	1,55	1,86	-	-	1,55	1,86
Cerbon	-	-	0,53	7,80	-	-	0,53	7,80
Bakumpai	-	-	-	-	13,51	15,59	13,51	15,59
Marabahan	-	-	-	18,60	243,15	182,59	243,15	201,10
Tabukan	-	-	1,85	0,72	-	-	1,85	0,72
Kuripan	-	-	-	-	-	-	-	-
Barito Kuala	**11.638,73**	**11.333,50**	**44,88**	**461,38**	**256,66**	**198,09**	**11.940,27**	**11.992,98**

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2025-2026

Kabupaten Barito Kuala menjadi salah satu kabupaten yang membudidayakan komoditas ikan air tawar ini. Hingga tahun 2025 terdapat 4 kecamatan yang melakukan proses budidaya serta 1 kecamatan yang melakukan pengolahan ikan Haruan, yaitu sebagai berikut:

- Budi daya ikan Haruan di Kecamatan Tabukan

Memiliki potensi lahan pengembangan seluas 4.404 m². Budidaya menggunakan sistem bioflok yang berlokasi di Desa Teluk Tamba. Telah terbentuk Pokdakan sebanyak 8 kelompok dengan 99 pembudidaya dan telah dijadikan sebagai Kampung Haruan untuk menghasilkan produk albumin.

- Budi daya ikan Haruan di Kecamatan Jejangkit

Budidaya sistem terpal yang berlokasi di Desa Jejangkit Pasar. Telah terbentuk kelompok pembudidaya ikan sebanyak 9 kelompok dengan 105 orang pembudidaya ikan. Pada tahun 2017 mendapatkan bantuan benih gabus 25.000 ekor dan pakan 2 ton

- Budi daya ikan Haruan di Kecamatan Mandastana

Potensi lahan pengembangan di Mandastana adalah seluas 2.150 m². Budidaya sistem terpal berkembang

di Desa Tatah Halayung dan Desa Tanipah. Telah terbentuk kelompok pembudidaya ikan sebanyak 6 kelompok dengan 66 orang pembudidaya ikan.

- Budi daya ikan Haruan di Kecamatan Tamban

Potensi lahan pengembangan yang dimiliki adalah seluas 1.575 m². Usaha pembenihan dan pembesaran yang berlokasi di Desa Jalapat Baru dan telah terbentuk 1 Pokdakan dengan 10 orang pembudidaya ikan. Pakan yang diberikan berupa ikan sepat hasil tangkapan dilingkungan sekitar.

- Pengembangan hasil olahan ikan di Kecamatan Bakumpai

Potensi lahan pengembangan di Kecamatan Bakumpai masih tersedia. Hasil olahannya berupa Kerupuk Ikan Haruan dengan areal pemasaran dalam dan luar Barito Kuala. Telah terbentuk POKLAHSAR HARUAN sebanyak 2 kelompok.

D. Pelayanan Urusan Pemerintahan Penunjang

1) Perencanaan dan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan lebih pada keselarasan antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan tahunan hingga keselarasannya dengan APBD. Penjabaran Program RPJMD periode terbaru (2025-2029) kedalam RKPD hingga APBD tahun 2025 menghasilkan rincian total 230 Program dengan 585 kegiatan, berdasarkan pada APBD Perubahan tahun 2025.

Sedangkan berdasar hasil evaluasi capaian program selama tahun 2025, yang dikelompokkan berdasar skala capaian yang termaktub dalam Tabel T.E-1 Permendagri 86 Tahun 2017 adalah bahwa ada 224 Program dan 562 Kegiatan yang Mencapai Target atau sebesar 96,73% dari total keseluruhan Program dan Kegiatan yang eksis di 2025, kemudian ada 6 Program dan 22 Kegiatan yang Tidak Mencapai Target atau sebesar 3,27% dari total program dan kegiatan yang eksis di 2025. Detail mengenai evaluasi terhadap perencanaan dan pembangunan dapat dilihat pada subbab khusus mengenai evaluasi capaian kinerja di bab ini.

2) Keuangan

Keuangan Pemerintah diilihat dari bagaimana Pemerintah Daerah dapat menghasilkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer, maupun sumber lainnya yang sah untuk kemudian dijadikan belanja Pemerintah Daerah untuk Pembangunan maupun penunjang lainnya. Berdasar data yang diperoleh dari Barito Kuala Dalam Angka 2026, Pada tahun 2024 total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah Rp. 1.914.671.166,23 yang kemudian direalisasikan menjadi belanja daerah dengan total sebanyak Rp. 1.660.183.801,85. Detail baik realisasi pendapatan maupun realisasi belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut selama 3 tahun terakhir (2022-2024)

Tabel 2.45 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berdasar Jenis Pendapatan Selama 2022-2024

Jenis Pendapatan/*Kind of Revenues*	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/*Regional Revenue*	**71.267.378,35**	**97.380.866,59**	**112.705.523,01**
1.1 Pajak Daerah/*Regional Tax*	25.308.005,56	28.953.674,23	30.822.327,26
1.2 Retribusi Daerah/*Regional Retribution*	3.972.799,35	3.648.113,31	25.645.164,92
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Regional—Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth*	10.122.349,62	11.892.720,40	11.516.297,18
1.4 Lain—lain PAD yang Sah/*Other Regional Revenue*	31.864.223,81	52.886.358,65	44.721.733,64
2. Pendapatan Transfer/*Transfer Revenue*	**1.472.019.365,55**	**1.418.780.185,03**	**1.801.965.643,22**
2.1 Dana Perimbangan/*Balance Funds*	1.205.677.067,71	1.125.357.223,51	1.482.967.167,23
2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya/ *Other Central Government Transfer Revenue*	149.636.488,00	160.808.051,00	176.009.926,00
2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi/ *Provincial Government Transfer Revenue*	116.705.809,84	132.614.910,53	142.988.549,99
3. Lain—lain Pendapatan yang Sah/*Other Revenue*	**12.310.121,49**	**89.635,00**	**–**
3.1 Pendapatan Hibah/*Grant*	7.046.788,73	89.635,00	–
3.2 Lainnya/*Others*	5.263.332,76	–	–
Jumlah/*Total*	**1.555.596.865,38**	**1.516.250.686,63**	**1.914.671.166,23**

Sumber/*Source*: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala/*Board of Finance and Asset Management of Barito Kuala Regency*

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2026

Tabel 2.46 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berdasar Jenis Belanja Selama 2022-2024

Jenis Pendapatan *Kind of Revenues*	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Belanja Operasional/*Operational Expenditures*	888.867.164,77	1.015.788.222,15	1.250.187.942,93
1.1 Belanja Pegawai/*Personnel Expenditures*	574.100.367,02	597.465.705,63	721.931.268,43
1.2 Belanja Barang dan Jasa/*Goods and Services Expenditures*	286.652.897,54	355.946.017,09	448.404.479,75
1.3 Belanja Bunga/*Interest Expenditures*	–	–	–
1.4 Belanja Subsidi/*Subsidies Expenditures*	260.604,00	–	–
1.5 Belanja Hibah/*Grant Expenditures*	27.373.143,22	58.063.419,64	78.535.761,40
1.6 Belanja Bantuan Sosial/*Social Aid Expenditures*	480.153,00	4.313.079,79	1.316.433,34
1.7 Belanja Bantuan Keuangan/*Financial Aids Expenditures*	–	–	–
2. Belanja Modal/*Capital Expenditures*	257.427.302,71	319.480.087,02	409.635.608,92
2.1 Belanja Tanah/*Land Expenditures*	652.029,00	1.764.136,37	8.641.969,69
2.2 Belanja Peralatan dan Mesin/*Tool and Machine Expenditures*	38.321.929,21	61.730.827,14	45.482.320,20
2.3 Belanja Gedung dan Bangunan/*Building Expenditures*	76.946.504,19	101.496.171,24	142.482.443,02
2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan/*Road, Irrigation and Network Expenditures*	141.009.883,56	151.926.623,26	208.499.077,59
2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya/*Other Fixed Asset Expenditures*	496.956,75	1.019.078,92	423.108,03
2.6 Belanja Aset Lainnya/*Other Asset Expenditures*	–	1.543.250,09	4.106.690,39
3. Belanja Tidak Terduga/*Unpredicted Expenditures*	229.450,00	1.546.266,05	360.250,00
3.1 Belanja Tidak Terduga/*Unpredicted Expenditures*	229.450,00	1.546.266,05	360.250,00
Jumlah/*Total*	**1.146.523.917,48**	**1.336.814.575,23**	**1.660.183.801,85**

Sumber/*Source*: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala/*Board of Finance and Asset Management of Barito Kuala Regency*

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2026

Terakhir mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berdasar data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2026 pada tahun 2025 telah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPTT) sebanyak 104.099 unit, dengan ketetapan sebesar Rp. 5.183.358.005. Adapun realiasasinya adalah sebesar Rp 3.387.675.033 atau sebesar 65,36%, dimana ini masih terbilang cukup rendah dan perlu ditingkatkan.

3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Berbicara tentang kepegawaian tidak terlepas dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kabupaten Barito Kuala, yang sekarang terdiri atas 2 unsur, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Pada tahun 2025, terdapat sejumlah 5.944 orang ASN yang bertugas, dengan rincian 3.852 orang berstatus PNS dan 2.092 orang berstatus PPPK. PNS berdasarkan posisinya dapat dibagi menjadi Pejabat Struktural dan Fungsional, sedangkan PPPK hanya pada posisi Pejabat Fungsional. Detail sebaran ASN di Kabupaten Barito Kuala berdasar jabatannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47 Jumlah ASN di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Berdasar Jabatan dan Jenis Kelamin

Jabatan *Occupation*	Aparatur Sipil Negara *State Civil Service*		
	Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(8)	(9)	(10)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama *Senior Executives*	–	–	–
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya *Middle Executives*	–	–	–
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama *Junior Executives*	27	1	28
Administrator/*Administrator*	85	52	137
Pengawas/*Supervisor*	146	113	259
Eselon V/*5th Echelon*	–	–	–
Jabatan Fungsional Dosen *Certain Functional Position for Lecturer*	–	–	–
Jabatan Fungsional Guru *Certain Functional Position for Teacher*	1.040	2.111	3.151
Jabatan Fungsional Medis *Certain Functional Position for Medical Field*	205	680	885
Jabatan Fungsional Teknis *Certain Functional Position for Technical Field*	216	152	368
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana *General Functional Position*	662	454	1.116
Jumlah/*Total*	**2.381**	**3.563**	**5.944**

Sumber/*Source*: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala/*Education and Training Personnel Agency of Barito Kuala Regency*

https://baritokualakab.bps.go.id

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam Barito Kuala dalam Angka 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ASN di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dengan formasi terbanyak berada pada formasi Jabatan Fungsional Guru. Sedangkan dari total keseluruhan, ASN di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh Perempuan dengan selisih sebanyak 1.182 orang dari Laki-Laki, menunjukkan keterlibatan perempuan pada ASN sudah sangat baik. Selanjutnya

dapat kita lihat detail ASN Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan berdasarkan jenjang pendidikan yang diselesaikan, berdasar pada tabel berikut.

Tabel 2.48 Jumlah ASN di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Berdasarkan Tingat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan *Educational Level*	Aparatur Sipil Negara *State Civil Service*		
	Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(8)	(9)	(10)
Sekolah Dasar (SD) *Primary School*	20	3	23
Sekolah Menengah Pertama (SMP) *Junior High School*	50	5	55
Sekolah Menengah Atas (SMA) *Senior High School*	409	162	571
Diploma I/Akta I *Diploma I/Akta I*	–	2	2
Diploma II/Akta II *Diploma II/Akta II*	30	29	59
Diploma III/Akta III *Diploma III/Akta III*	177	633	810
Diploma IV/Akta IV *Diploma IV/Akta IV*	21	52	73
S1/Sarjana *Under Graduate/Bachelor*	1.511	2.556	4.067
S2/Pasca Sarjana *Graduate*	162	121	283
S3/Doktor/Ph.D *Post Graduate*	1	–	1
Jumlah/*Total*	**2.381**	**3.563**	**5.944**

Sumber/*Source*: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala/*Education and Training Personnel Agency of Barito Kuala Regency*

https://baritokualakab.bps.go.id

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam Barito Kuala dalam Angka 2026

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa ASN di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh lulusan Strata 1 atau Sarjana dengan total sebanyak 4.067 orang, disusul lulusan Diploma III atau Akta III sebanyak 810 orang, dan yang paling sedikit adalah lulusan Strata 3 atau Doktor yang sampai saat ini hanya tersisa 1 orang.

Terakhir, dapat kita lihat sebaran ASN di Kabupaten Barito Kuala berdasar Tingkat Kepangkatannya, dimana untuk PNS dan PPPK memiliki struktur kepangkatan yang berbeda. Pada jenjang PNS tersusun atas tingkatan I sampai IV dengan yang terendah adalah I.a dan tertinggi IV.e, sedangkan PPPK tersusun atas Pangkat dalam susunan angka romawi dari Tingkat I hingga XVII.

Tabel 2.49 Jumlah ASN di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin, PNS

Pangkat/Golongan/Ruang *Hierarchy*		Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)		(2)	(3)	(4)
Golongan I/*Range I*		**21**	**3**	**24**
1. I/A	(Juru Muda/*Junior Clerk*)	–	–	–
2. I/B	(Juru Muda Tingkat I/*First Class Junior Clerk*)	3	–	3
3. I/C	(Juru/*Clerk*)	7	–	7
4. I/D	(Juru Tingkat I/*First Class Clerk*)	11	3	14
Golongan II/*Range II*		**218**	**155**	**373**
5. II/A	(Pengatur Muda/*Junior Supervisor*)	19	1	20
6. II/B	(Pengatur Muda Tingkat I/*First Class Junior Supervisor*)	36	7	43
7. II/C	(Pengatur/*Supervisor*)	64	60	124
8. II/D	(Pengatur Tingkat I/*First Class Supervisor*)	99	87	186
Golongan III/*Range III*		**1.048**	**1.616**	**2.664**
9. III/A	(Penata Muda/*Junior Superintendent*)	211	244	455
10. III/B	(Penata Muda Tingkat I/*First Class Junior Superintendent*)	277	342	619
11. III/C	(Penata/*Superintendent*)	219	506	725
12. III/D	(Penata Tingkat I/*First Class Superintendent*)	341	524	865
Golongan IV/*Range IV*		**408**	**383**	**791**
13. IV/A	(Pembina/*Administrator*)	151	153	304
14. IV/B	(Pembina Tingkat I/*First Class Administrator*)	205	175	380
15. IV/C	(Pembina Utama Muda/*Junior Administrator*)	50	55	105
16. IV/D	(Pembina Utama Madya/*Middle Administrator*)	1	–	1
17. IV/E	(Pembina Utama/*Senior Administrator*)	1	–	1
Jumlah/*Total*		**1.695**	**2.157**	**3.852**

Sumber/*Source*: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala/*Education and Training Personnel Agency of Barito Kuala Regency*

Tabel 2.50 Jumlah ASN di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin, PPPK

Pangkat/Golongan/Ruang *Hierarchy*	Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
I	3	1	4
II	–	–	–
III	10	1	11
IV	–	–	–
V	146	78	224
VI	–	–	–
VII	50	146	196
VIII	–	–	–
IX	466	1.169	1.635
X	11	11	22
XI	–	–	–
XII	–	–	–
XIII	–	–	–
XIV	–	–	–
XV	–	–	–
XVI	–	–	–
XVII	–	–	–
Jumlah/*Total*	**686**	**1.406**	**2.092**

Sumber/*Source*: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala/*Education and Training Personnel Agency of Barito Kuala Regency*

Sumber kedua Tabel: BKPP dalam Barito Kuala Dalam Angka 2026

https://baritokualakab.bps.go.id

Dari kedua tabel di atas, bahwa PNS di Kabupaten Barito Kuala didominasi Golongan III / Penata, senada dengan tingkat pendidikan yang diselesaikan oleh PNS di Kabupaten Barito Kuala yang masih didominasi lulusan sarjana. Sedangkan untuk PPPK didominasi oleh Pangkat/Golongan IX (Sembilan) yangs secara hierarkis setara dengan Golongan III.a pada PNS.

4) Penelitian dan Pengembangan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, salah satu fungsi Lembaga penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota adalah memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/ kota disamping sebagai koordinator penyelenggaran kegiatan kajian/ penelitian di kabupaten/ kota. Dalam hal peningkatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan kegiatan kajian/ penelitian dan lomba inovasi daerah. Kajian/ penelitian dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Lomba inovasi daerah dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan ruang kepada masyarakat dan ASN yang telah dan sedang melakukan penelitian dan pengembangan diberbagai bidang dan dari perlombaan inovasi ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat masyarakat dan ASN untuk melakukan berbagai inovasi. Dari perlombaan inovasi ini juga akan menjadi penyaring inovasi mana yang memiliki manfaat luas untuk masyarakat yang selanjutnya diperjuangkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjadi penelitian komprehensip dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan lomba inovasi daerah di kabupaten Barito Kuala didukung dengan adanya Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/559/KUM/2022 tanggal 30 Desember 2022, perihal Satu SKPD Satu Inovasi, bahwa setiap SKPD wajib menmbuat minimal satu inovasi setiap tahun anggaran.

Tolak ukur pemerintahan daerah yang inovatif yaitu dari Innovative Goverment Award (IGA). Dimana setiap organisasi pemerintah daerah diharapkan melakukan pengembangan inovasi terhadap kebutuhan unit organisasinya dengan mengedepankan efektif dan efisien. Capaian Skor IGA kabupaten barito kuala pada tahun 2024 berkisar antara 49-50 yang termasuk dalam Kategori Inovatif, dimana termasuk dalam rata-rata IGA Nasional yaitu di angka 49,43. Berdasarkan informasi yang disampaikan Sekretaris Daerah dalam Antaranews, bahwa Kabupaten Barito Kuala berada pada peringkat 8 dari 13 Skor IGA Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, meningkat dari tahun sebelumnya (2023) dimana berada pada posisi paling bawah. Selanjutnya untuk Capaian Skor IGA tahun 2025 sampai dokumen ini ditulis masih proses penilaian oleh BSKDN Kemendagri.

5) Pengawasan

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan yaitu 1,00% (satu persen) dari total belanja APBD untuk daerah yang APBD nya sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sesuai Permendagri Pedoman Penyusunan APBD.

Pada tahun 2025, telah dianggarkan total anggaran pengawasan sebesar Rp 3.137.390.575 yang mana penyesuaian anggaran berdasarkan *Mandatory Spending* Pengawasan baru dimulai pada Anggaran Perubahan 2025, sehingga penyerapan anggaran pengawasan pada 2025 belum maksimal. Namun hal tersebut tidak menyebabkan penurunan kinerja pada pengawasan, terbukti dengan Pencapaian Persen

Penyelesaian Hasil TLHP BPK RI pada tahun 2025 tercapai 96,77% dari yang ditargetkan sesuai perjanjian kinerja 2025 adalah sebesar 85%. Kemudian juga pada Pencapian Persen Penyelesaian Hasil TLHP APIP pada tahun 2025 tercapai 96,47%, dari yang ditargetkan sesuai perjanjian kinerja 2025 adalah sebesar 85% (*Sumber: Evaluasi Perjanjian Kinerja 2025 Tri. IV*)

6) Sekretariat Dewan

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi yang prima dan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD, ini berkaitan dengan produk hukum seperti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), keputusan DPRD, dan Raperda Inisiatif. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dewan, hearing,kegiatan reses, kunjungan kerja dalam dan luar daerah serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. Berikut disajikan tabel-tabel mengenai Sekretariat Dewan yang meliputi Jumlah Anggota Dewan menurut Daerah Pemilihan dan Partai, Jumlah Sidang/Rapat, dan Jumlah Surat Keputusan yang dikeluarkan selama tahun 2025, seperti yang terekam dalam Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2026.

Tabel 2.51 Jumlah Anggota Dewan Berdasar Jenis Kelamin dan Daerah Pemilihan Tahun 2025

No	Daerah Pemilihan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	I	6	1	7
2	II	5	2	7
3	III	4	3	7
4	IV	8	-	8
5	V	4	2	6
	TOTAL	**27**	**8**	**35**

Sumber: Sekretariat DPRD dalam Barito Kuala dalam Angka 2026

Tabel 2.52 Jumlah Anggota Dewan Berdasar Jenis Kelamin dan Partai Politik Tahun 2025

No	Partai Politik	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Golongan Karya	9	3	12
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	1	3
3	Partai Amanat Nasional	2	1	3
4	PDI Perjuangan	2	1	3
5	Partai Kebangkitan Bangsa	1	-	1
6	Partai Persatuan Pembangunan	6	-	6
7	Partai Nasional Demokrat	3	1	4
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	1	3
	TOTAL	**27**	**8**	**35**

Sumber: Sekretariat DPRD dalam Barito Kuala dalam Angka 2026

Berdasar 2 tabel di atas, Jumlah Anggota DPRD Tahun 2025 berdasar jenis kelamin masih didominasi laki-laki dengan total 27 orang dan perempuan sendiri berjumlah 8 orang. Sedangkan berdasar daerah pemilihan, yang paling banyak ada di Dapil IV dengan total sebanyak 8 anggota, dan paling sedikit ada di Dapil V dengan total sebanyak 6 anggota. Sedangkan berdasar Partai Politik, anggota paling banyak berasal dari Parta Golongan Karya (Golkar) dengan total 12 anggota, dan paling sedikit dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan total 1 anggota.

Tabel 2.53 Jumlah Sidang/Rapat DPRD 5 Tahun Terakhir (2021 - 2025)

No	Jenis Sidang	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Rapat Paripurna	21	24	16	14	15
2	Rapat Paripurna Istimewa	-	-	-	-	-
3	Rapat Intern DPRD	20	19	-	11	7
4	Rapat Badan Kehormatan DPRD	-	2	-	-	-
5	Rapat Badan Pembentukan Perda	3	9	2	1	1
6	Rapat Badan Musyawarah	20	21	15	17	16
7	Rapat Badan Anggaran	13	8	12	11	17
8	Rapat Panitia Khusus	16	28	-	-	-
9	Rapat Fraksi	-	-	-	1	1
10	Rapat Intern Komisi	-	-	2	12	-
11	Rapat Komisi	-	-	10	63	71
12	Rapat Gabungan Komisi	-	-	16	22	27
13	Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi	-	-	4	6	5
14	Kunjungan Kerja Komisi DalamDaerah Kabupaten	-	-	17	-	-
15	Kunjungan Kerja Komisi LuarDaerah Kabupaten	-	-	5	-	-
16	Kunjungan Kerja Komisi LuarProvinsi	-	-	173	-	-
17	Kunjungan Reses DPRD	-	-	3	-	3
18	Rapat Pembahasan Perda-Perda	-	-	12	28	24

Sumber: Sekretariat DPRD dalam Barito Kuala dalam Angka 2026

Tabel 2.54 Jumlah Surat Keputusan DPRD 5 Tahun Terakhir (2021 - 2025)

No	Jenis Surat Keputusan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Surat Keputusan DPRD	36	51	47	51	44
2	Peraturan Daerah	5	12	7	7	10
3	Pendidikan dan Pelatihan DPRD	2	3	3	3	-

Sumber: Sekretariat DPRD dalam Barito Kuala dalam Angka 2026

Pada 2 tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sidang pada tahun 2025 sedikit naik daripada tahun 2024 dengan peningkatan 1 sidang lebih banyak. Sedangkan pada Surat Keputusan yang dikeluarkan, terjadi penurunan pada tahun 2025 dari tahun 2024 dengan total jumlah surat yang dikeluarkan pada tahun 2025 sebanyak 54 surat, menurun sebanyak 7 surat dari tahun 2024 yang sejumlah 61 surat.

2.5 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah, menarik investasi, meningkatkan produktivitas, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Barito Kuala, daya saing daerah sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta iklim investasi yang berkembang.

Secara umum, Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi daya saing yang cukup kuat, khususnya pada sektor berbasis sumber daya alam. Namun demikian, untuk meningkatkan daya saing secara optimal, diperlukan upaya transformasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor strategis.

2.5.1 Potensi Sektor Unggulan Daerah

Sektor unggulan utama Kabupaten Barito Kuala adalah sektor pertanian, yang didukung oleh luasnya lahan rawa dan sistem pasang surut yang khas. Daerah ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Selatan, khususnya dalam produksi padi. Sistem pertanian pasang surut menjadi keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki oleh banyak daerah lain.

Selain itu, sektor hortikultura juga memiliki potensi yang besar, terutama komoditas jeruk siam dan nenas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan telah dikenal di pasar regional. Sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya, juga berkembang cukup baik dengan dukungan sumber daya perairan yang melimpah. Di sisi lain, sektor peternakan dan perkebunan juga memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai bagian dari diversifikasi ekonomi daerah. Namun demikian, sebagian besar sektor unggulan tersebut masih didominasi oleh aktivitas produksi primer (hulu), sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sektor hilir (pengolahan dan pemasaran) agar daya saing produk daerah dapat meningkat.

Struktur ekonomi Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini tercermin dari kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB yang diperkirakan masih menjadi yang terbesar dibanding sektor lainnya.

Barito Kuala merupakan daerah dengan potensi terbesar berada pada sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga dalam struktur yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi didominasi oleh kontribusi sektor pertanian yakni berkisar antara 27 sampai dengan 28 persen dari PDRB Kabupaten Barito Kuala.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 memperlihatkan adanya kecenderungan membaik (meningkat) dari tahun ke tahun. Kendati demikian, pada sektor usaha ada beberapa yang mengalami penurunan di tahun 2025 yang mana ini perlu menjadi perhatian bersama seluruh pihak. Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi per sektor di Kabupaten Barito Kuala berdasar pada Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.55 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala (Persen), 2021 – 2025

Lapangan Usaha/ *Industry*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024***	**2025****
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
A. Pertanian, Kehutanan,dan Perikanan/ *Agriculture, forestry, and Fishing*	1,13	0,93	2,30	4,77	8,15
B. Pertambangan dan Penggalian/ *Mining and Quarrying*	4,54	4,10	3,53	0,69	3,63
C. Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	2,82	1,69	0,82	3,94	2,88
D. Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	4,52	5,75	6,06	4,60	5,56
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah,Limbah, dan Daur Ulang/ *Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	6,26	5,32	5,13	3,96	4,75
F. Kontruksi/ *contruction*	6,97	6,89	6,88	5,89	4,02
G. Perdagangan Besar danEceran; Reparasi Mobildan Sepeda Motor/ *wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	2,85	6,92	6,65	4,36	5,01
H. Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	1,88	4,36	4,11	6,29	5,36
I. Penyediaan Akomodasidan Makan Minum/ *Accommodation and food Service Activities*	2,82	8,47	6,39	8,44	7,04
J. Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	7,75	6,73	6,33	5,80	5,29
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	-0,06	-0,87	7,17	5,12	3,54
L. Real Estat/*Real EstateActivities*	5,45	5,79	7,56	5,85	5,16
M,N Jasa Perusahaan/ *Business Activities*	4,91	7,26	5,97	5,66	6,02

Lapangan Usaha/ *Industry*	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan,dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	1,06	0,32	2,63	4,18	3,26
P. Jasa Pendidikan/*Education*	4,74	5,07	3,80	5,70	4,35
Q. Jaasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	8,83	5,46	5,83	4,76	5,03
R,S,T,U Jasan Lainnya/ *Other Service Activities*	3,90	6,09	4,80	6,29	7,37
Penduduk Domestik Regional Bruto/*Gross Regionbal Domestic Product*	**3,17**	**3,59**	**4,07**	**5,01**	**5,27**

** = Angka Sementara, ** = Angka Sangat Sementara*
Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2022 – 2026

Tabel 2.56 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala (Persen), 2021 – 2025

Jenis Pengeluaran ***Type of Expenditure***	**2021**	**2022**	**2023**	**2024***	**2025****
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga *Household Consumption Expenditure*	0,65	5,46	4,91	6,24	5,16
Pengeluaran Konsumsi LNPRT *NPISH Consumption Expenditure*	1,34	4,32	7,81	17,83	3,84
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah *Government Consumption Expenditure*	2,76	-1,59	3,38	6,22	1,39
Pembentukan Model Tetap Bruto *Gross Fixed Capital Formation*	4,56	6,19	4,9	4,7	1,82
Perubahan Inventori *Changes in Inventories*	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa *Net Exports of Goods and Services*	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto/ *Gross Regional Domestic Product*	**3,17**	**3,59**	**4,07**	**5,01**	**5,27**

** = Angka Sementara, ** = Angka Sangat Sementara*
Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2021 – 2025

Berbicara tentang Kemampuan Ekonomi Daerah, tidak akan lepas dari namanya PDRB. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas

dasar harga konstan. Selama kurun waktu tahun 2021-2025 besaran PDRB ADHB maupun ADHK menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha maupun Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 telah mencapai 12.199,11 Miliyar Rupiah, bertambah sebesar 849,5 Miliyar Rupiah dibanding tahun 2024 yang tercatat 11.349,61 Miliyar Rupiah. Kemudian Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Menurut Lapangan Usaha maupun Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025 telah mencapai 7.082,55 Milyar Rupiah, bertambah sebesar 354,86 Miliyar Rupiah dari tahun 2024 yang tercatat sebesar 6.727,68 Miliyar Rupiah.

Sealnjutnya dapat dilihat kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.57 Kontribusi Sektor terhadap PDRB (Estimasi Ranwal RKPD 2027)

Sektor Ekonomi	Kontribusi (%)	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	± 35–40%	Sektor dominan
Perdagangan	± 15–18%	Pendukung distribusi
Industri Pengolahan	± 10–12%	Masih berkembang
Konstruksi	± 8–10%	Infrastruktur
Lainnya	± 20–25%	Jasa dan sektor lain

Dari tabel tersebut, Sektor utama yang mempengaruhi PDRB adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang meliputi:

- **Padi (lumbung pangan daerah)**
- Hortikultura: jeruk siam, nenas
- Perikanan: budidaya dan tangkap
- Peternakan skala rakyat

Namun demikian, pada sektor ini terdapat beberapa permasalahan utama, yaitu:

- Produktivitas belum optimal
- Minimnya pengolahan hasil panen (hilirisasi produk yang masih rendah)
- Ketergantungan pada kondisi alam yang dinamis
- Dampak yang diberikan masih berbasis kuantitas, belum kualitas dan nilai tambah

2.5.2 Infrastruktur Pendukung Daya Saing

Kondisi geografis yang didominasi oleh rawa dan sungai juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di Barito Kuala memerlukan pendekatan khusus yang adaptif terhadap kondisi lingkungan, seperti pembangunan jalan berbasis elevasi atau penguatan tanggul.

Peningkatan infrastruktur yang terintegrasi akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Infrastruktur menjadi faktor penting dalam meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi daerah. Gambaran kondisi infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala secara garis besar adalah:

- Jalan kabupaten kondisi mantap: ± 60–70%
- Akses antar kecamatan belum merata
- Infrastruktur irigasi masih terbatas (sebagian besar masih alami)
- Wilayah rawan banjir/genangan cukup luas

Infrastruktur tentu saja berbicara mengenai transportasi dan fasilitas wilayah yang mendukung kehidupan masyarakat demi memperlancar aktivitas pemerintahan dan perekonomian. Panjang jalan di Kabupaten Barito Kuala selama 3 (Tiga) tahun terakhir (2023-2025) adalah sepanajang 782,74 km, dengan pembagian berdasarkan kondisi dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 2.58 Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala 3 (Tiga) Tahun Terakhir (2023-2025)

Kondisi Jalan *Condition of Roads*	2023	2024	2025*
(1)	(2)	(3)	(4)
Baik/*Good*	233,40	275,46	279,66
Sedang/*Moderate*	93,12	82,34	85,42
Rusak/*Damage*	49,81	52,88	34,62
Rusak Berat/*Severely Damage*	406,41	372,07	383,04
Jumlah/*Total*	**782,74**	**782,74**	**782,74**

Sumber/*Source*: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala/*Public Works Office of Barito Kuala Regency*

Sumber: Dinas PUPR dalam Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2026

Tercatat selama tiga tahun terakhir sampai pada tahun 2025, kondisi jalan baik di Kabupaten Barito Kuala selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya kondisi jalan dalam kondisi sedang dan rusak berat sempat mengalami penurnan dari tahun 2023 ke 2024, namun kembali meningkat di tahun 2025, dengan sebaliknya pada kondisi jalan yang rusak mengalami kenaikan pada 2023 ke 2024, namun menurun saat di tahun 2025. Selanjutnya pada tabel dibawah dijelaskan panjang jalan di Kabupaten Barito Kuala selama 3 tahun terakhir berdasar jenis permukaan jalan dalam satuan kilometer (km)

Tabel 2.59 Panjang Jalan Berdasar Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2025

Jenis Permukaan Jalan *Type of Road Surface*	2023	2024	2025*
(1)	(2)	(3)	(4)
Aspal/*Paved*	424,24	435,91	430,39
Kerikil/*Gravel*	259,89	252,85	256,52
Tanah/*Soil*	68,07	61,44	61,25
Lainnya/*Others*	30,54	32,55	34,58
Jumlah/*Total*	**782,74**	**782,74**	**782,74**

Sumber/*Source*: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala/*Public Works Office of Barito Kuala Regency*

Sumber: Dinas PUPR dalam Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2026

Berdasar tabel di atas, bahwa jalan dengan permukaan aspal stabil di angka 430 km, namun untuk jalan yang masih menggunakan permukaan tanah mengalami penurunan yang cukup signifikan tiap tahunnya, menunjukkan panjang jalan yang ditingkatkan di Kabupaten Barito Kuala selalu meningkat setiap tahunnya.

Kendati demikian, ada beberapa permasalahan terkait infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala, diantaranya yang ditemukan:

- Konektivitas antar wilayah yang belum merata
- Kondisi jalan di beberapa daerah yang masih perlu ditingkatkan
- Keterbatasan infrastruktur irigasi dan pengendalian air
- Infrastruktur pendukung ekonomi seperti pasar, gudang, dan kawasan industri yang masih terbatas
- Akses distribusi hasil pertanian belum optimal
- Keterbatasan jalan produksi dan jalan usaha tani
- Infrastruktur logistik belum terintegrasi

Dampak dari beberapa permasalahan di atas, menyebabkan biaya distribusi tinggi, sehingga berpotensi menurunkan daya saing produk daerah.

2.5.3 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam menentukan daya saing daerah. Kabupaten Barito Kuala memiliki jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar, yang merupakan potensi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 seperti yang dituangkan dalam Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2026, penyebaran sekolah di Kabupaten Barito Kuala dapat dikatakan cukup merata di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Secara keseluruhan, perkembangan jumlah sekolah di Kabupaten Barito Kuala juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 jumlah sekolah di Kabupaten Barito Kuala adalah 760 buah sekolah dengan rincian pada jenjang Pendidikan TK/RA sebanyak 275 unit, pendidikan SD/MI saat ini tersedia 329 buah unit, SMP/MTs sebanyak 105 unit, SMA/MA sebanyak 46 unit, dan SMK sebanyak 5 unit yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala *(sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026*)

Kemudian dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat dan produktif, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan. Dalam kerangka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, Pemerintah berupaya untuk menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan paramedis. Ketersediaan berbagai sarana kesehatan yang meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, Sarana Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), Sarana Produksi dan Distribusi Farmasi dan Alat Kesehatan dan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, secara kuantitas sudah terpenuhi untuk pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Berdasar data dari Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2026, Fasilitas Kesehatan yang tersedia di Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 adalah Rumah Sakit Umum sebanyak 1 unit yaitu RSUD H. Abdul Aziz di Kota Marabahan, 1 Poliklinik di

Kecamatan Alalak, Puskesmas sebanyak 19 unit yang tersebar di seluruh 17 Kecamatan, Puskesmas Pembantu sebanyak 58 unit, dan Apotek sebanyak 8 unit *(sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026*)

Tabel 2.60 Indikator SDM (Estimasi RKPD 2027)

Indikator	Nilai Perkiraan	Keterangan
IPM	± 68–70	Masih kategori sedang
Rata-rata lama sekolah	± 7–8 tahun	Setara SMP
Tingkat pengangguran terbuka	± 3–5%	Relatif rendah
Penduduk usia produktif	Dominan	Bonus demografi

Namun demikian, kualitas SDM masih menjadi tantangan, sehingga dapat berimplikasi pada SDM belum mampu mendorong transformasi ekonomi. Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan diantaranya:

- Tingkat pendidikan yang belum merata
- Keterampilan tenaga kerja yang masih terbatas
- Minim tenaga kerja terampil sektor industri
- Kesesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi tenaga kerja

Melihat tantangan di atas, peningkatan kualitas SDM perlu difokuskan pada:

- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
- Pengembangan pelatihan vokasi dan keterampilan kerja
- Penguatan *link and match* atau kesesuiaan dan keselarsan antara dunia pendidikan dan dunia kerja

Dengan peningkatan kualitas SDM, diharapkan tenaga kerja lokal dapat lebih kompetitif dan mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi daerah, karena daya saing daerah juga sangat ditentukan oleh kualitas SDM.

2.5.4 Iklim Investasi dan Dunia Usaha

Iklim investasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi investasi yang cukup besar, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan hasil pertanian. Proyeksi investasi di Kabupaten Barito Kuala diperkirakan terus berkembang karena adanya peningkatan aktivitas perekonomian dan usaha baik yang dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta maupun oleh masyarakat sendiri. Disamping itu semakin membaik dan kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Barito Kuala akan mendorong minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Barito Kuala. Keadaan ini menuntuk tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi, terampil dan produktif. Selain itu, perkembangankondisi infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), kajian-kajian potensi dan peluang investasi, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada perusahaan yang ada diwilayah Kabupaten Barito Kuala juga mendorong pertumbuhan investasi di wilayah ini.

Pelayananan perizinan yang tepat waktu merupakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala yang berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dengan menargetkan Indeks Kepuasan

Masyarakat terkait pelayanan DPMPTSP 85% dan peningkatan nilai investasi daerah 50 milliar pertahun selama 4 tahun ke depan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala menargetkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi terutama pengembangan sistem pelayanan perizinan dan no perizinan Kabupaten Barito Kuala yang aplikatif sehingga masyarakat/pelaku usaha dapat mengakses informasi berupajenis perizinan, persyaratan perizinan, proses perizinan, perkembangan investasi, perkembangan penerbitan perizinan, perkembangan retribusi, indeks kepuasan masyarakat dan potensi serta peluang investasi di Kabupaten Barito Kuala dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap tahun. Hal ini didukung kondisi teknologi yang berkembang cepat dengan adanya perbaikan dan pengembangan sistem pelayanan terpadu. Pelayanan investasi itu didukung dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Barito Kuala tahun 2022 diresmikan oleh Menpan – RB Azwar Anas pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 dengan jumlah pelayanan sebanyak 158 Pelayanan dari 17 intansi.

Tabel 2.61 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Kecamatan *District*	Perusahaan *Establishment*	Tenaga Kerja *Employee*	Nilai Investasi (Ribu Rp.) *Investment (Thousand Rp.)*	Nilai Produksi (Ribu Rp.) *Production Value (Thousand Rp.)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen	468	1.223	39.005.674	41.194.818
Tamban	41	96	10.831.000	1.722.500
Mekarsari	67	115	1.500.850	1.509.251
Anjir Pasar	111	227	828.800	1.920.590
Anjir Muara	124	254	952.225	1.051.400
Alalak	129	272	726.000	923.800
Mandastana	105	140	1.107.250	1.587.900
Jejangkit	21	81	128.000	163.000
Belawang	31	248	232.500	299.500
Wanaraya	106	172	1.773.100	31.549.185
Barambai	248	547	87.961.108	4.487.948
Rantau Badauh	229	367	2.836.150	1.939.135
Cerbon	107	217	1.279.500	1.637.330
Bakumpai	97	253	626.940	624.020
Marabahan	106	249	822.900	1.274.425
Tabukan	107	1.551	103.443.017	147.391.067
Kuripan	33	53	261.600	368.200
Barito Kuala	**2.130**	**6.065**	**254.316.614**	**239.644.069**

Sumber/*Source*: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala/*Cooperative Unit, Industry, and Trading Service of Barito Kuala Regency*

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2026

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai investasi yang didasari pada jumlah perusahaan dan tenaga kerja di Kabupaten Barito Kuala adalah sejumlah Rp. 254.316.614.000, dimana unit perusahaan terbanyak berada di Kecamatan Tabunganen dengan 468 Perusahaan, Tenaga Kerja terbanyak berada di Kecamatan Tabukan yaitu sebanyak 1.551 orang, Nilai investasi tertinggi berada di Kecamatan Tabukan dengan nilai investasi sebesar Rp. 103.443.017.000, dan terakhir nilai produksi paling tinggi berada di Kecamatan Tabukan yaitu sebesar Rp. 147.391.067.000 berdasar data dari Dinas Kopeasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dalam Barito Kuala Dalam Angka tahun 2026.

Selain melalui perusahaan, investasi di Kabupaten Barito Kuala juga didukung oleh koperasi dan sarana perdagangan. Jumlah Koperasi yang Aktif pada tahun 2025 adalah sebanyak 39 koperasi di Kabupaten

Barito Kuala yang tersebar di hampir semua kecamatan, kecuali di Kecamatan Tabunganen, Anjir Pasar, Anjir Muara, dan Belawang. Namun secara keseluruhan koperasi yang ada di Kabupaten Barito Kuala berjumlah 124 unit yang terdiri dari 33 Koperasi Unit Desa (KUD), 27 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), 4 Koperasi Karyawan (Kopkar), dan 60 Koperasi lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan (*sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026*).

Sarana perdagangan di Kabupaten Barito Kuala tidak mengalami peningkatan dari tahun 2024 hingga 2025. Total sarana perdangangan baik tahun 2024 maupun 2025 berjumlah sebanyak 926 unit, dengan rincian pasar sebanyak 51 unit, 20 unit toko, dan 855 unit kios. Selanjutnya dapat dilihat jumlah usaha menurut kecamatan, berdasarkan skala usaha yang yang diterbitkan izinnya oleh aplikasi OSS RBA di Kabupaten Barito Kuala di mana pada tahun 2025 terdapat 45 Usaha Besar, 9 Usaha Menengah, dan 6.669 Usaha Kecil dan Mikro.

Terakhir, aspek yang mendukung investasi di Kabupaten Barito Kuala adalah aspek budaya dan pariwisata. Pada situs budaya, selain makam Datuk H. Abdussamad masih banyak makam yang didatangi peziarah seperti makam Panglima Wangkang, Datuk Ilyas Bakul, Datuk Syahidun, Datuk Aminim, Datuk Khayan, Habib Alwi, Syarifah Ratu Sela, dan Jaya Arja serta wisata sejarah lainnya seperti rumah bulat dan rumah budaya. Kelompok kesenian budaya dan keagamaan juga tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Jenis kesenian budaya dan keagamaan tersebut antara lain Maulid Habsyi, Rebana, Sinoman Hadrah, Kuda Lumping, Kuda Gepang, Reog dan Keroncong.

Pada pariwisata, Sepanjang tahun 2025 tercatat 207.963 wisatawan domestik yang berwisata di Kabupaten Barito Kuala dengan puncak kunjungan pada Bulan Desember. Sedangkan wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Barito Kuala adalah 323 orang dengan puncak kunjungan justru terjadi pada Bulan Januari. Sarana penunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Barito Kuala, antara lain tersedianya 4 penginapan dan 569 rumah makan/restoran yang tersebar di setiap kecamatan. Tercatat ada 7 objek wisata alam di Kabupaten Barito Kuala yaitu Pulau Bakut, Pulau Kembang, Rambai Mangrove Center, Agropolitan Terantang/Kampung Inggris, Susur Sungai Barito, Pulau Kaget, dan Pulau Curiak. Selain itu, terdapat 5 objek wisata buatan yaitu RTH Jembatan Rumpiang, Agrowisata Talaran Setara, Ulek (Siring) Marabahan, Kawasan Wisata Jembatan Barito, dan Jejangkit Ecopark. Terakhir ada 1 (satu) objek wisata religi yaitu Makam Datuk Abdussamad di Kecamatan Marabahan *(sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026*)

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan iklim investasi, antara lain:

- Penyederhanaan perizinan melalui sistem pelayanan terpadu
- Peningkatan transparansi dan kepastian hukum
- Promosi potensi daerah kepada investor
- Sistem perizinan sudah mulai menggunakan digitalisasi sistme (OSS)

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, yang kemungkinan besar menyebabkan daya tarik investasi belum optimal, seperti:

- Keterbatasan infrastruktur pendukung investasi
- Aksesibilitas wilayah yang belum optimal
- Keterbatasan kawasan industri atau sentra ekonomi
- Realisasi investasi masih didominasi skala kecil-menengah, dan belum banyak industri besar masuk

Berkaca dari permasalahan dan kendala yang ditemui, maka kedepannya diperlukan strategi yang lebih agresif dalam menarik investasi, terutama yang berbasis pada potensi lokal dan mampu menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja.

2.5.5 Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah di era digital. Di Kabupaten Barito Kuala, pemanfaatan teknologi masih dalam tahap berkembang, terutama di sektor pertanian dan pelayanan publik.

Berbicara dengan perkembangan teknologi, tidak bisa terlepas dari Teknologi Komunikasi dan Informatika. Di tengah maraknya penggunaan berbagai teknologi komunikasi modern serta banyaknya jasa pengiriman swasta, PT Pos Indonesia selaku pionir jasa pengiriman di Indonesia masih tetap eksis di Kabupaten Barito Kuala, di mana sampai pada tahun 2025 berdasar data dari Kabupaten Barito Dalam Angka Tahun 2026 memiliki 12 cabang pembantu yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, kecuali di Kecamatan Tabunganen, Mekarsari, Jejangkit, Cerbon, dan Bakumpai. Kemudian dalam hal komunikasi selular, pada tahun 2025 ada 9 Desa yang sudah bisa menerima jaringan 4G/LTE, 1 Desa yang masih berada pada jaringan 3G/HSDPA/EVDO, dan ada 191 Desa yang masih tidak ada penerima sinyal, namun bukan berarti tidak dapat mengakses koneksi sama sekali karena kover sinyal yang sudah ada dari desa atau kecamatan yang sudah memiliki akses sinyal dari berbagai operator selular yang beroperasi di Kabupaten Barito Kuala *(sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026*)

Pemanfaatan teknologi di Barito Kuala sejuah ini masih terus berkembang, terutama pada:

- Digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik
- Penggunaan alat pertanian modern, meskipun masih terbatas
- Pemasaran produk lokal yang sudah mulai menggunakan teknologi informasi/ digital

Namun demikian, tantangan dan permasalahan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur digital, literasi teknologi masyarakat, kapasitas aparatur, dan Inovasi daerah belum terstruktur. Permasalahan ini memiliki dampak tidak langsung pada produktivitas dan efisiensi belum maksimal. Oleh karena itu, penguatan inovasi dan digitalisasi perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing

Beberapa peluang yang dapat dikembangkan pada inovasi dan teknologi antara lain adalah:

- Penerapan teknologi pertanian modern (smart farming)
- Digitalisasi pemasaran produk lokal

- Pengembangan sistem informasi pelayanan publik yang lebih pintar
- Pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan

Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Barito Kuala merupakan upaya untuk penguatan tata Kelola data pembangunan untuk mendukung pengambilan kebijakan public yang akurat dan transparan. Peran Diskominfo adalah sebagai penyedia dan pengelola utama yang menerima laporan daftar data dari berbagai perangkat daerah. Forum ini juga merupakan wadah koordinasi untuk menetapkan kesepakatan daftar data yang harus dilaporkan oleh setiap SKPD, pengelolaan data ini jug adidorong melalui integrasi system informasi seperti e-walidata SIPD

2.5.6 Analisis Umum Daya Saing Daerah

Secara keseluruhan, daya saing Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh sektor berbasis sumber daya alam, dengan keunggulan pada sektor pertanian dan perikanan. Namun, untuk meningkatkan daya saing secara berkelanjutan, diperlukan transformasi menuju ekonomi yang lebih produktif, inovatif, dan berbasis nilai tambah. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

- Penguatan sektor unggulan berbasis hilirisasi
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi
- Peningkatan iklim investasi yang kondusif
- Penguatan inovasi dan digitalisasi

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Barito Kuala mampu meningkatkan daya saingnya, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga nasional, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memperkuat analisis, berikut ringkasan kondisi daya saing:

Tabel 2.62 Analisis Ringkas Daya Saing Daerah

Aspek	Kondisi	Kategori
Sektor Unggulan	Kuat (pertanian dominan)	Potensial
Infrastruktur	Cukup, belum merata	Perlu ditingkatkan
SDM	Sedang	Perlu peningkatan
Investasi	Rendah–menengah	Perlu dorongan
Teknologi	Rendah	Perlu akselerasi

Berdasarkan analisis di atas, daya saing Kabupaten Barito Kuala masih berada pada tahap **berkembang (developing region)**, dengan kekuatan utama pada sektor pertanian dan sumber daya alam. Namun, daya saing tersebut masih bersifat **tradisional** dan belum sepenuhnya berbasis inovasi, teknologi, dan nilai tambah. Permasalahan utama terletak pada:

- Rendahnya hilirisasi produk
- Keterbatasan infrastruktur
- Kualitas SDM yang belum optimal
- Minimnya investasi besar

Sementara itu, peluang yang dapat dimanfaatkan meliputi:

- Program nasional ketahanan pangan
- Dukungan pengembangan kawasan
- Digitalisasi ekonomi
- Potensi pasar regional Kalimantan

Terakhir, untuk meningkatkan daya saing daerah, arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah:

1) **Penguatan sektor unggulan berbasis hilirisasi** (dari produksi → pengolahan → pemasaran)
2) **Peningkatan kualitas SDM** (pendidikan, pelatihan vokasi, link and match)
3) **Pembangunan infrastruktur terintegrasi** (jalan produksi, irigasi, logistik)
4) **Peningkatan iklim investasi** (kemudahan perizinan, promosi potensi)
5) **Digitalisasi dan inovasi daerah** (*smart farming*, *e-government*, UMKM digital)

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA (2025)

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya merupakan langkah penting untuk menilai sejauh mana capaian indikator, baik Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Daerah mencapai target yang ditetapkan, dan kemudian menganalisa permasalahan yang ditemui oleh OPD Pelaksana selama proses menuju pencapaian targetnya. Hasil evaluasi ini menjadi bahan penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, khususnya dalam menentukan program prioritas, memperbaiki kelemahan yang ada, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

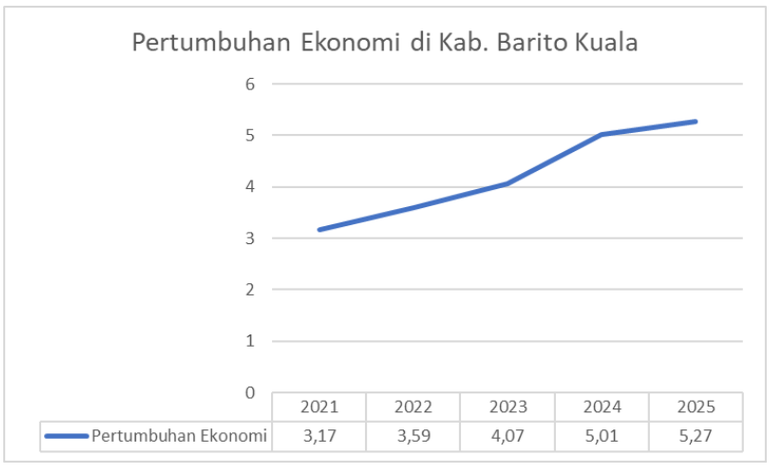
2.2.1 Evaluasi Indikator Utama

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah umumnya diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang menggambarkan pertambahan nilai ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin besar pula aktivitas produksi dan distribusi barang serta jasa yang berlangsung dalam perekonomian daerah tersebut.

Data pertumbuhan ekonomi daerah umumnya bersumber dari publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, yang secara berkala menyajikan perkembangan indikator makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah karena berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan pendapatan daerah. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus

meningkat. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan dan penguatan aktivitas ekonomi daerah dari tahun ke tahun.



Gambar 2.10 Tren Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Barito Kuala 2021-2025
Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan bertahap pada 2021 hingga 2025. Pemulihan perekonomian Kabupaten Barito Kuala pasca pandemi ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh ekspansif sebesar 3,59% pada 2022, dan ekonomi semakin menguat pada 2025 dengan pertumbuhan sebesar 5,27%. Secara umum, tren peningkatan pertumbuhan ekonomi selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Barito Kuala berada pada jalur yang positif dan stabil. Kondisi ini diharapkan dapat terus dipertahankan melalui penguatan sektor-sektor produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Selanjutnya berdasar dari BPS Kabupaten Barito Kuala, dapat dilihat perbandingan selama 5 tahun ke belakang (2021-2025) perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025)

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/*Regency*						
1	Tanah Laut	3,47	5,12	4,78	5,01	5,14
2	Kotabaru	3,35	4,58	4,29	5,30	5,34
3	Banjar	3,21	4,48	4,35	4,75	5,07
4	Barito Kuala	3,17	3,59	4,07	5,01	5,27
5	Tapin	3,43	4,91	4,88	4,87	4,24
6	Hulu Sungai Selatan	4,19	4,02	5,27	5,14	5,11
7	Hulu Sungai Tengah	3,01	3,92	4,11	4,95	5,01
8	Hulu Sungai Utara	3,21	4,08	4,51	4,41	5,02
9	Tabalong	3,27	5,29	4,90	4,87	4,69
10	Tanah Bumbu	4,23	5,45	4,84	4,82	5,52
11	Balangan	3,27	5,24	4,17	4,15	4,51
Kota/*Municipality*						
1	Banjarmasin	3,41	5,69	5,62	5,63	5,66
2	Banjarbaru	3,33	7,93	6,81	6,71	6,49

Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik dan sumber lain/*BPS-Statistics Indonesia and other sources*

https://baritokualakab.bps.go.id

Sumber : Barito Kuala Dalam Angka tahun 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025, capaian tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala sedikit dibawah Kabupaten Kotabaru, dengan selisih sebesar 0,07%, menjadikan Kabupaten Barito Kuala berada pada peringkat ke-5 dari 13 Kabupaten/Kota dalam hal pertumbuhan ekonomi di tahun 2025.

Kemdian diperlihatkan perbadingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala, dengan Provinsi Kalimantan Selatan maupun dengan Nasional itu sendiri.

Tabel 2.64 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025

	Kabupaten Barito Kuala	Provinsi Kalimantan Selatan	Nasional/Indonesia
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,27	5,22	5,11

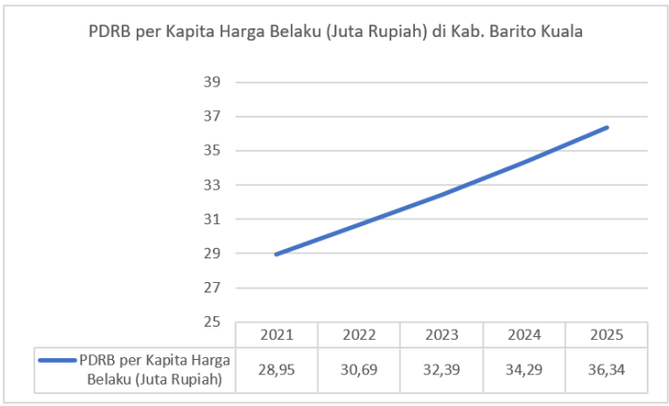
Sumber: Badan Pusat Statistik (Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan, dan BPS Nasional)

Dari tabel di atas, bahwa dapat dilihat Pertumbuhan Ekonomi kumulatif tahun ke tahun (*c to c*) Kabupaten Barito Kuala lebih unggul sebesar 0,05 persen dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan lebih unggul 0,16 persen dari Nasional.

B. PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indikator ini dihitung berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pada wilayah yang bersangkutan. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi setiap penduduk dalam suatu wilayah. Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita di Kabupaten Barito Kuala merupakan PDRB atas dasar harga berlaku.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, pada tahun 2025 nilai PDRB per kapita Kabupaten Barito Kuala tercatat sebesar 36,34 juta rupiah. Nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selama periode 2021–2025, PDRB per kapita Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren peningkatan yang konsisten.



Gambar 2.11 PDRB per Kapita Kabupaten di Kab. Barito Kuala 2021-2025
Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Dari infografis di atas, dapat dilihat rata-rata peningkatan PDRB per Kapita dari tahun 2021 hingga 2025 adalah 1,87 Juta Rupiah. Peningkatan ini mencerminkan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi daerah serta meningkatnya produktivitas masyarakat.. Selanjutnya akan dilihat bersama perbandingan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional.

Tabel 2.65 Perbandingan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) antar Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025

	Kabupaten Barito Kuala	Provinsi Kalimantan Selatan	Nasional/Indonesia
PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	36,34	70,58	83,7

Sumber: Badan Pusat Statistik (Kab. Barito Kuala, BPS Nasional), Media Center Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan pada tabel di atas, PDRB per Kapita Kabupaten Barito Kuala masih cukup tertinggal jauh baik dari Provinsi Kalimantan Selatan maupun Indonesia, yang akan menjadi evaluasi bersama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan capaian PDRB per Kapita-nya.

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota adalah salah satu indikator makro ekonomi daerah yang menunjukkan seberapa besar peran atau sumbangan suatu kabupaten/kota terhadap total PDRB wilayah yang lebih besar, biasanya provinsi atau nasional. Indikator ini sering digunakan dalam analisis ekonomi wilayah untuk melihat pusat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah. Manfaat dari indikator Ini diantaranya: Mengetahui daerah pusat pertumbuhan ekonomi daerah dengan kontribusi besar biasanya menjadi motor penggerak ekonomi provinsi; sebagai alat analisis struktur ekonomi wilayah dan perencanaan pembangunan; sebagai alat untuk mengidentifikasi potensi ekonomi daerah; dan sebagai alat untuk evaluasi kinerja ekonomi daerah.

Sesuai namanya, perhitungan Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota di Kabupaten Barito Kuala membandingkan dengan PDRB pada Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2025, PDRB Kabupaten

Barito Kuala (Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB) adalah sebesar 12.199,11 miliar rupiah, dan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 adalah sebesar 305.126,93 miliar rupiah, yang darinya didapat bahwa Kontribusi PDRB Kabupaten Barito Kuala terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 4,00%. Berikut ditampilkan tabel perkembangan Kontribusi PDRB Kabuapten Barito Kuala terhadap Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 tahun terakhir (2021-2025), berdasar data dari Barito Kuala Dalam Angka 2026 dan Kalimantan Selatan Dalam Angka 2026.

Tabel 2.66 Perkembangan Kontribusi PDRB antar Kabupaten Barito Kuala dengan Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025)

Tahun	PDRB Kabupaten Barito Kuala (dalam Miliar Rupiah)	PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (dalam Miliar Rupiah)	% Kontribusi
2021	9.174,92	197.882,42	4,64
2022	9.867,87	215.098,65	4,59
2023	10.567,88	269.192,02	3,93
2024	11.349,61	286.840,06	3,96
2025	12.199,11	305.126,93	4,00

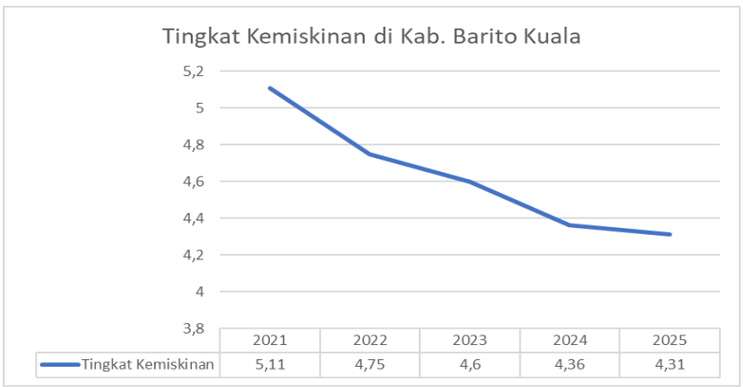
Sumber: Kabupaten Barito Kuala dan Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Barito Kuala mengalami naik-turun dengan stabil dikisaran 4%. Mulai tahun 2021 hingga 2023, kontribusi tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun pada tahun-tahun selanjutnya kembali meningkat sampai pada tahun 2025 hingga kembali ke kisaran angka 4%.

C. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala dihitung berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dengan total jumlah penduduk dikalikan 100 persen. Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik yang bersifat makanan dan non-makanan.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren penurunan. Pada Tahun 2025 tercatat sebesar 4,31 persen, menurun dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 4,36 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat serta dampak dari pelaksanaan program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di daerah.



Gambar 2.12 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala 2021-2025
Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang menurun. Pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 5,11 persen, kemudian menurun menjadi 4,75 persen pada Tahun 2022 dan 4,60 persen pada Tahun 2023. Tren penurunan tersebut berlanjut pada Tahun 2024 dengan capaian sebesar 4,36 persen, serta kembali menurun pada Tahun 2025 menjadi 4,31 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat serta efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya akan dilihat bersama perbandingan Tingkat (Persentase) Penduduk Miskin/Tingkat Kemiskinan antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional.

Tabel 2.67 Perbandingan Tingkat Kemiskinan antar Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025

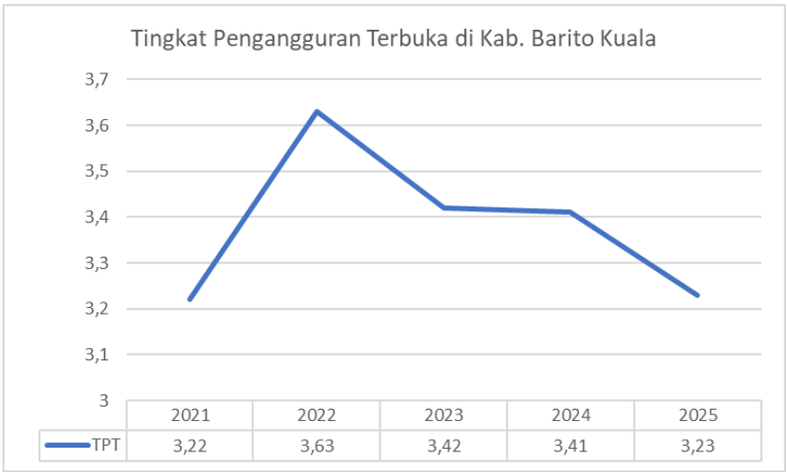
	Kabupaten Barito Kuala	Provinsi Kalimantan Selatan	Nasional/Indonesia
Tingkat Kemiskinan (%)	4,31	3,73	8,25

Sumber: Badan Pusat Statistik (Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan, dan BPS Nasional)

Berdasarkan pada tabel di atas, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala masih cukup lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Selatan, namun jika dibandingkan dengan skala Nasional, Kabupaten Barito Kuala jauh lebih unggul (lebih rendah) dengan selisih sebanyak 4,14%.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk yang bekerja merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Barito Kuala Tahun 2025 termasuk Kabupaten dengan angka TPT yang rendah dan di bawah TPT Provinsi yaitu dengan nilai 3,23 persen. Hal ini juga sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Barito Kuala dengan nilai diatas TPAK Kalimantan Selatan yaitu dengan nilai 71,98%. Data angkat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebagai berikut.



Gambar 2.13 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barito Kuala Selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025)
Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Kuala selama periode 2021-2022 menunjukkan adanya peningkatan, akan tetapi angka TPT ini mulai menurun pada 2023 hingga 2025 secara perlahan, mengambalikan kondisi pada 2025 hampi sama seperti di 2023. Secara umum, perkembangan ini mengindikasikan bahwa kesempatan kerja di Kabupaten Barito Kuala mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja.

Selanjutnya akan dilihat bersama perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional.

Tabel 2.68 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antar Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025

	Kabupaten Barito Kuala	Provinsi Kalimantan Selatan	Nasional/Indonesia
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,23	4,16	4,74

Sumber: Badan Pusat Statistik (Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan, dan BPS Nasional)

Berdasarkan pada tabel di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Kuala berada lebih unggul (lebih rendah) dari Provinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional, dimana lebih rendah 0,93% dari Kalimantan Selatan, dan lebih rendah 1,51% dari Nasional.

E. Gini Rasio

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Barito Kuala menggunakan Indeks Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Kabupaten Barito Kuala. Nilai rasio gini berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu), dimana nilai yang semakin mendekati 1 (satu) mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, rasio gini yang semakin mendekati nilai 0 (nol), semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 (nol) pada rasio gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, rasio gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna, dimana satu orang dapat memiliki semua pendapatan, sementara yang lainnya tidak memiliki apapun. Semakin besar atau melebar indeks rasio gini, berarti kelompok miskin lebih lambat untuk menjadi kaya, sedangkan yang sudah kaya justru lebih cepat untuk bertambah kaya. Nilai rasio gini yang dianggap tinggi jika berkisar pada angka 0,50 sampai 0,70, sedangkan nilai 0,20 sampai 0,35 tergolong yang distribusi pendapatannya relatif merata.

Tabel 2.69 Perkembangan Indeks Gini / Gini Rasio di Kabupaten Barito Kuala 5 Tahun Terakhir (2021-2025)

Tahun	Gini Rasio
2021	0,284
2022	0,289
2023	0,312
2024	0,272
2025	0,269

Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Barito Kuala selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif fluktuatif namun cenderung menurun pada

dua tahun terakhir. Pada Tahun 2021 Indeks Gini Ratio tercatat sebesar 0,284, kemudian meningkat menjadi 0,289 pada Tahun 2022 dan 0,312 pada Tahun 2023. Selanjutnya pada Tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 0,272 dan kembali menurun pada Tahun 2025 menjadi 0,269. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala relatif rendah dan cenderung membaik, sehingga mencerminkan semakin meratanya hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat Gini Rasio antara Kabupaten Barito Kuala dengan 13 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.70 Perbandingan Gini Rasio antatra Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Lima Tahun Terakhir (2021-2025)

Provinsi/Kabupaten/Kota	Gini Ratio				
	2021	2022	2023	2024	2025
TANAH LAUT	0,232	0,263	0,259	0,257	0,301
KOTABARU	0,306	0,331	0,316	0,296	0,289
BANJAR	0,344	0,300	0,297	0,259	0,309
BARITO KUALA	0,284	0,289	0,312	0,272	0,269
TAPIN	0,289	0,291	0,281	0,260	0,276
HULU SUNGAI SELATAN	0,275	0,260	0,293	0,288	0,274
HULU SUNGAI TENGAH	0,331	0,228	0,225	0,251	0,268
HULU SUNGAI UTARA	0,378	0,301	0,271	0,276	0,266
TABALONG	0,288	0,337	0,284	0,300	0,292
TANAH BUMBU	0,281	0,292	0,280	0,309	0,295
BALANGAN	0,277	0,266	0,258	0,218	0,271
KOTA BANJARMASIN	0,35	0,330	0,370	0,347	0,332
KOTA BANJAR BARU	0,361	0,341	0,321	0,300	0,318

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Barito Kuala mendapatkan nilai Gini Rasio yang baik, sedikit dibawah dari Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan Gini Rasio antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

Tabel 2.71 Perbandingan Gini Rasio antar Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025

	Kabupaten Barito Kuala	Provinsi Kalimantan Selatan	Nasional/Indonesia
Gini Rasio (Nilai Indeks)	0,269	0,281	0,363

Sumber: Badan Pusat Statistik (Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan, dan BPS Nasional)

Berdasarkan pada tabel di atas, Gini Rasio Kabupaten Barito Kuala berada lebih unggul (lebih rendah) dari Provinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional, dimana lebih rendah 0,012 poin dari Kalimantan Selatan, dan lebih rendah 0,094 dari Nasional.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi Struktur Penduduk yang dominan dan Dependency Ratio yang rendah dapat menjadi tanda bahwa Kabupaten Barito Kuala memiliki jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk memanen Bonus Demografi sebaik mungkin. Tetapi perlu ditekankan bahwa ini bukan berarti Kabupaten Barito Kuala “pasti mampu” memanfaatkan Bonus Demografi karena menurut Oosthuizen (2021) perlu ada juga dukungan dari kualitas SDM, pekerjaan, dan investasi. Jika melihat dari kualitas SDM, maka salah satu

indikator yang dapat digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut United Nations Development Programme (2024), IPM merupakan Indeks komposit yang mampu memberikan gambaran menyeluruh karena menangkap kemampuan manusia dari sisi keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, IPM kemudian disusun berdasarkan indikator Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan untuk mendapatkan kemampuan manusia dari sisi keuangan, Umur Harapan Hidup Saat Lahir untuk mendapatkan kemampuan manusia dari sisi kesehatan, serta Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah untuk mendapatkan kemampuan manusia dari sisi pendidikan, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72 Komponen Penyusun Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Barito Kuala Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir (2021-2025)

Tahun ***Years***	**Umur Harapan Hidup (Tahun)** ***Life Expectancy (Year)***	**Harapan Lama Sekolah (Tahun)** ***Expectancy Years School (Year)***	**Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)** ***Mean Year School (Year)***	**Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Kapita/ Tahun)** ***Expenditure per Capita (Thousand Rupiah/ Capita/Year)***	**IPM** ***HDI***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021	71,56	12,40	7,55	9.868	69,08
2022	71,94	12,54	7,63	10.230	69,87
2023	72,28	12,55	7,74	10.750	70,67
2024	72,52	12,56	7,92	11.168	71,40
2025	72,85	12,69	7,99	11.469	72,05

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2026

Berdasarkan tabel di atas, Nilai IPM Kabupaten Barito Kuala selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dan mulai pada tahun 2023 telah memasuki range 70 ke atas dimana termasuk dalam kategori IPM "Tinggi". Dari sisi kemampuan secara ekonomi sebagai salah satu komponen penyusun IPM, penduduk di Barito Kuala tahun 2025 memiliki rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar 11,47 juta Rupiah/Orang/Tahun. Nilai ini termasuk nilai terendah dan tentu di bawah nilai di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki nilai sebesar 13,76 juta Rupiah/Orang/Tahun. Semakin kecil rata-rata pengeluaran per kapita menunjukkan semakin kecil juga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan konsumsi secara rata-rata oleh masyarakat Komponen IPM lainnya dilihat berdasarkan dimensi kesehatan, penduduk di Barito Kuala tahun 2025 memiliki nilai Umur Harapan Hidup adalah 72,85 tahun yang merupakan nilai terendah se-Kalimantan Selatan. Artinya rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir adalah 72,85 tahun.

Komponen terakhir dari dimensi pendidikan, terdapat dua indikator di dalamnya yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kedua indikator ini digunakan karena RLS menggunakan data pada penduduk usia 25 tahun ke atas dan HLS menggunakan data penduduk 7-24 tahun. RLS di Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 merupakan daerah terendah kedua setelah Kabupaten Kotabaru dengan nilai 7,71 tahun. Indikator ini menginterpretasikan bahwa di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 memiliki penduduk di atas 25 tahun yang secara rata-rata telah menempuh pendidikan 7,71 tahun atau setara dengan kelas 1 (satu) SMP dan putus sekolah di kelas 2 (dua) SMP. Tentu angka ini masih sangat jauh jika

dibandingkan dengan Program Wajib Belajar 14 tahun yang disiapkan oleh pemerintah. Tetapi jika melihat HLS di Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala tidak menjadi yang terendah karena memiliki nilai HLS sebesar 12,69 tahun. Meski begitu ini masih berada di bawah HLS Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 13,12 tahun. HLS dengan nilai 12,69 tahun artinya penduduk di Kabupaten Barito Kuala diharapkan menamatkan pendidikan sampai 12,69 tahun atau kurang lebih lulus pendidikan SMA

Selanjutnya dapat dilihat perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional pada tahun 2025.

Tabel 2.73 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025

	Kabupaten Barito Kuala	Provinsi Kalimantan Selatan	Nasional/Indonesia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	72,05	76,10	75,90

Sumber: Badan Pusat Statistik (Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan, dan BPS Nasional)

Berdasar pada tabel di atas, Nilai IPM Kabupaten Barito Kuala meskipun sudah masuk kategori tinggi (70 ke atas), namun masih dibawah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional. Akan tetapi, Nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan sedikit di atas Nilai IPM Nasional dengan lebih unggul sebesar 0,20 poin.

G. Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)

Penurunan gas rumah kaca (GRK) tercapai adanya penggunaan peralatan rumah tangga dan industri yang lebih efisien, seperti lampu LED, AC berlabel hemat energi, dan Rehabilitasi hutan (reboisasi) dan pengurangan kebakaran hutan/lahan serta Pengurangan sampah melalui metode *reduce, reuse, recycle* (3R), penggunaan barang sekali pakai.

Kegiatan sudah dilaksanakan 100% pada tahun 2025 dan akan terus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang. Pembuatan dokumen IGRK adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi mengenai emisi gas rumah kaca dari berbagai sumber dan penyerapanya, kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan hasil ekspose terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Barito Kuala, profil emisi daerah ini terkonsentrasi pada beberapa sektor utama:

- Sektor Kehutanan & Lahan**:** Penyumbang emisi terbesar akibat perubahan penggunaan lahan dan pengelolaan lahan gambut.
- Sektor Pertanian**:** Mengingat Batola adalah lumbung padi, penggunaan pupuk kimia dan emisi metana (CH_4) dari sawah tergenang menjadi kontributor signifikan.
- Sektor Limbah**:** Pengelolaan sampah domestik dan limbah cair yang belum optimal.

Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi besar untuk menjadi model pengelolaan emisi di ekosistem lahan basah:

1) Restorasi dan Konservasi Mangrove Rambai

Keberadaan kawasan konservasi seperti Pulau Bakut dan hutan mangrove rambai merupakan "penyerap karbon" (*carbon sink*) alami yang efektif. Perlindungan kawasan ini dapat menurunkan angka emisi bersih secara drastis dalam laporan IGRK.

2) Optimalisasi Pertanian Rendah Emisi

   Peralihan ke varietas padi hemat air atau penggunaan pupuk organik dapat mengurangi emisi gas metana. Peluang ini besar mengingat luasnya lahan pertanian di Barito Kuala.

3) Program Kampung Iklim (Proklim)

   Banyaknya desa di Kabupaten Barito Kuala yang mulai aktif dalam Proklim mempermudah verifikasi data aksi mitigasi di tingkat tapak, yang memperkuat validitas laporan IGRK.

4) Pemanfaatan Energi Terbarukan

   Potensi biomassa dari limbah pertanian (sekam padi) dan limbah perkebunan sawit dapat dikembangkan menjadi energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Kabupaten Barito Kuala menghadapi tantangan cukup kompleks karena berkaitan dengan karakteristik wilayah dan aktivitas ekonomi:

1) Pengelolaan Lahan Gambut

   Lahan gambut di Kabupaten Barito Kuala menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Tantangannya adalah mencegah kekeringan lahan di musim kemarau yang memicu Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Satu kejadian karhutla besar dapat menghapus semua capaian penurunan emisi dalam setahun.

2) Akurasi Data Sektoral

   Penyusunan IGRK memerlukan data yang detail dari berbagai SKPD dan sektor swasta (misalnya penggunaan energi di industri atau jumlah limbah). Seringkali, sinkronisasi data antar-lembaga masih menjadi kendala teknis.

3) Limbah Metana dari Persawahan

   Sistem sawah pasang surut yang selalu tergenang secara alami memproduksi metana. Mencari keseimbangan antara menjaga ketahanan pangan (produksi padi) dan menekan emisi adalah tantangan kebijakan yang berat.

4) Alih Fungsi Lahan

   Tekanan kebutuhan lahan untuk pemukiman dan perkebunan sawit skala besar berisiko mengurangi tutupan vegetasi permanen, yang secara otomatis meningkatkan angka emisi dalam perhitungan IGRK.

Pencapaian IGRK di Barito Kuala merupakan panduan untuk kebijakan pembangunan. Fokus utama harus tertuju pada Tata Kelola Air di Lahan Gambut untuk mencegah karhutla dan Modernisasi Sektor Pertanian agar lebih ramah lingkungan.

Sampai pada penyusunan RKPD 2027, Baik Kabupaten Barito Kuala maupun Provinsi Kalimantan Selatan, Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK masih tahap perhitungan, namun untuk capaian secara nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 165,31 juta ton CO_2e.

H. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) atau biasa disebut indeks kualitas pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan gabungan dari beberapa indikator lingkungan hidup, seperti kualitas air, udara, dan lahan. Perhitungan IKLH mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, dengan Komponen-komponen yang diukur antara lain: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun pergerakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala selama 5 (Lima) tahun terakhir (2021-2025) dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.74 Perkembangan Hasil Penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Selama 5 Tahun Terakhir (2021-2025)

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,21	63,41	63,12	64,01	71,44

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

Dokumen IKPLHD merupakan laporan kinerja Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan/atau program kerja sesuai prinsif metodelogi Pembangunan Berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup. IKPLHD merupakan instrumen penting untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Bagi Kabupaten Barito Kuala, yang secara geografis didominasi oleh lahan basah dan pasang surut, pencapaian indeks ini memiliki dinamika tersendiri. Meskipun memiliki beban lingkungan yang cukup berat, Barito Kuala memiliki beberapa peluang strategis:

- Ekosistem Lahan Basah & Mangrove Rambai**:** Keberadaan kawasan konservasi seperti Pulau Bakut dan hutan mangrove rambai merupakan aset besar untuk mendongkrak IKTL.
- Komitmen Kebijakan Lokal**:** Adanya regulasi daerah mengenai pengelolaan sampah dan pembatasan plastik dapat secara langsung memperbaiki parameter limbah domestik yang memengaruhi IKA.
- Potensi Pertanian Berkelanjutan**:** Sebagai lumbung padi Kalimantan Selatan, peralihan ke pola pertanian organik atau minim pestisida dapat mengurangi residu kimia di aliran sungai.
- Partisipasi Masyarakat**:** Budaya sungai yang kental membuat program seperti "Sungai Martapura Bungas" (yang berimbas ke Barito) lebih mudah mendapatkan dukungan komunitas lokal.

Tantangan di Barito Kuala cukup spesifik karena faktor geografis dan aktivitas ekonomi:

- Tekanan Alih Fungsi Lahan**:** Perluasan perkebunan kelapa sawit dan pemukiman seringkali mengurangi tutupan lahan alami, yang secara langsung menekan skor IKTL.
- Pencemaran Limbah Domestik**:** Masih banyaknya aktivitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) langsung di sungai mengakibatkan kadar *E. coli* dan bahan organik di air tetap tinggi.
- Ancaman Karhutla**:** Saat musim kemarau, lahan rawa gambat di Batola sangat rentan terbakar. Hal ini menjadi ancaman serius bagi IKU (Indeks Kualitas Udara) karena kabut asap.

- Limbah Tambang & Industri di Hulu**:** Sebagai kabupaten yang berada di hilir Sungai Barito, Batola seringkali menerima "kiriman" polutan dari aktivitas industri atau tambang di kabupaten tetangga yang lebih hulu.

Agar mencapai target IKPLHD yang lebih optimal, diperlukan langkah-langkah konkret sebagai berikut.

- Revitalisasi Riparian**:** Penanaman kembali vegetasi di pinggir sungai untuk menyaring polutan secara alami.
- Pembangunan IPAL Komunal**:** Mengurangi pembuangan limbah rumah tangga langsung ke badan sungai.
- Penguatan Satgas Karhutla**:** Fokus pada pencegahan dini di tingkat desa (Desa Mandiri Peduli Api)

Selanjutnya dapat dilihat perbandingan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional pada tahun 2025 pada tabel berikut.

Tabel 2.75 Nilai Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025

	Kabupaten Barito Kuala	Provinsi Kalimantan Selatan	Nasional/Indonesia
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH (Nilai)	71,44	78,23	73,53

Sumber: DLH Kab. Barito Kuala, DLH Prov. Kalimantan Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup & BPS

Berdasar pada tabel di atas, Nilai IKLH Kabupaten Barito Kuala masih dibawah Provinsi Kalimantan Selatan maupun nasional, meskipun Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan nilai yang lebih baik daripada perolehan nasional.

I. Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks Infrastruktur adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas infrastruktur di suatu wilayah. Indeks ini biasanya dipakai dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mengetahui sejauh mana infrastruktur mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, indeks ini menggambarkan kondisi beberapa jenis infrastruktur utama, seperti:

- Infrastruktur transportasi: panjang dan kondisi jalan, jembatan, dan akses transportasi wilayah
- Infrastruktur dasar permukiman: air bersih, sanitasi, dan drainase
- Infrastruktur energi dan utilitas: listrik dan jaringan telekomunikasi
- Infrastruktur sosial: fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan

Indeks tersebut biasanya dihitung menggunakan metode penggabungan beberapa indikator (composite index) sehingga menghasilkan satu nilai yang menunjukkan tingkat perkembangan infrastruktur suatu daerah. Nilainya sering dinormalisasi dalam skala tertentu (misalnya 0 - 100 atau 0-1), di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kondisi infrastruktur yang lebih baik.

Pada Kabupaten Barito Kuala, sampai saat ini belum ada penilaian resmi yang dapat disebut langsung sebagai “Indeks Infrastruktur Daerah”. Namun salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi pembangunan infrastruktur adalah *Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)*. Pada tahun 2025, nilai IKK Kabupaten Barito Kuala sebesar 107,09 poin. Maksud dari penilaian itu berarti IKK menunjukkan tingkat kemahalan pembangunan infrastruktur atau bangunan dibanding kota acuan terdekeat (Surabaya), dengan nilai 107,09 berarti biaya konstruksi di Barito Kuala sekitar 7% lebih mahal dibanding kota acuan tersebut. Angka ini juga merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun tersebut.

Tabel 2.76 Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional (Kota Surabaya) Tahun 2025

	Kabupaten Barito Kuala	Provinsi Kalimantan Selatan	Nasional/Indonesia (Acuan: Surabaya)
Indeks Kemahalan Konstruksi (Nilai)	107,09	101,88	100

Sumber: Badan Pusat Statistik (Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan, dan BPS Nasional)

Tingginya biaya pembangunan infrastruktur di Barito Kuala dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah yang didominasi rawa dan banyak dipisahkan sungai, sehingga pembangunan jalan atau jembatan membutuhkan struktur dan material lebih banyak daripada daerah lain.

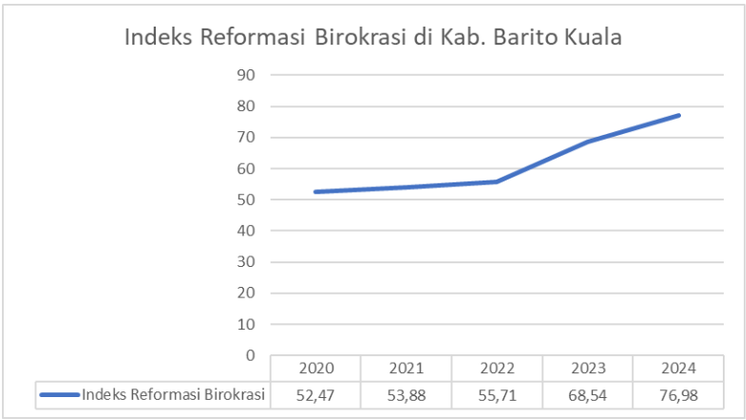
J. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana reformasi birokrasi telah diterapkan di instansi daerah. Reformasi birokrasi sendiri merujuk pada upaya untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Indeks ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi proses perubahan dalam birokrasi pemerintah agar lebih profesional, bersih dari korupsi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beberapa aspek yang dinilai dalam IRB antara lain:

1) Tata Kelola Pemerintahan. Menilai sejauh mana prinsip-prinsip good governance diterapkan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
2) Kualitas Pelayanan Publik. Mengukur kualitas dan aksesibilitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat.
3) Manajemen Sumber Daya Manusia. Menilai bagaimana pengelolaan SDM di pemerintahan, seperti rekrutmen, pelatihan, dan pemberdayaan pegawai.
4) Pengelolaan Anggaran. Mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.
5) Pencegahan Korupsi. Menilai langkah-langkah yang diambil untuk mencegah korupsi dalam birokrasi, termasuk adanya sistem pengawasan dan penegakan hukum.

IRB digunakan oleh pemerintah untuk merencanakan dan memonitor perkembangan reformasi birokrasi di seluruh instansi, serta untuk mendorong perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil dari penilaian IRB dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kebijakan dan sistem dalam birokrasi pemerintah agar lebih baik dan lebih efisien.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dengan nomor surat B/64/RB.06/2025, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 adalah 76,98 dengan kategori "BB". Sedangkan untuk capaian tahun 2025, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Kuala masih belum dikeluarkan secara final oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Adapun pergerakan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada gambar infografis di bawah.



Gambar 2.14 Perkembangan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Barito Kuala Selama 5 Tahun Terakhir (2020-2024)
Sumber: LHE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Melihat data pada gambar di atas, selama 5 tahun Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Barito Kuala mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan yang cukup besar terjadi pada tahun 2022 menuju 2023, namun sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam LHE Pelaksanaan RB di Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 bahwa hasil evaluasi tahun 2023 ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan berdasar Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian yang signifikan, sehingga perbandingan baru bisa dilakukan kembali untuk tahun 2023 dan seterusnya.

Selanjutnya dapat dilihat perbandingan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional pada tahun 2025 pada tabel berikut.

Tabel 2.77 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025

	Kabupaten Barito Kuala	Provinsi Kalimantan Selatan	Nasional/Indonesia
Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	76,98*	86,63	-

Sumber: Media Center Prov. Kalimantan Selatan, KemenpanRB

Pada IRB, Nilai di Kabupaten Barito Kuala masih dibawah Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah masuk dalam predikat A-, sedangkan untuk nasional tidak ada yang bisa dibandingkan karena memang tidak ada Nilai IRB untuk skala nasional.

K. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kondisi ketahanan pangan suatu wilayah (provinsi, kabupaten, atau kota). Indeks ini menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan pangan yang cukup, terjangkau, dan bergizi bagi masyarakatnya secara berkelanjutan. IKP disusun oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan biasanya digunakan untuk: Menilai kondisi ketahanan pangan suatu daerah, mengidentifikasi wilayah rawan pangan, dan membandingkan tingkat ketahanan pangan antar wilayah di Indonesia. Perhitungan IKP didasarkan pada 3 aspek utama dengan beberapa indikator pendukung, yaitu:

- Ketersediaan pangan: Menggambarkan kemampuan wilayah menyediakan pangan yang cukup. Contoh indikator: rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan.
- Keterjangkauan pangan: Menggambarkan kemampuan masyarakat memperoleh pangan. Contoh indikator: persentase penduduk miskin, proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan, akses listrik.
- Pemanfaatan pangan: Menggambarkan kualitas konsumsi dan kondisi gizi masyarakat. Contoh indikator: rata-rata lama sekolah perempuan, akses air bersih, tenaga kesehatan, prevalensi stunting, angka harapan hidup.

Nilai IKP biasanya berada pada skala 0–100. Semakin tinggi nilainya, semakin baik kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Berdasar rilis data dari Statitsik Konsumsi Pangan 2025 yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, pada tahun 2025 Nilai IKP Kabupaten Barito Kuala adalah 84,42. Perkembangan Nilai IKP selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada infografis berikut.



Gambar 2.15 Perkembangan Nilai Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala Selama 3 Tahun Terakhir (2023-2025)
Sumber: Statistik Konsumsi Pangan 2025 Kementerian Pertanian

Selama 3 tahun terakhir, nilai Indeks Ketahanan Pangan selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya secara signifikan. Berdasar informasi dari Statitsik Konsumsi Pangan 2025 juga didapat peningkatan yang bagus, dimana pada tahun 2023 masih berada di peringkat 143, kemudian di 2024 meningkat menjadi peringkat 106, dan kenaikan yang sangat tajam terjadi di tahun 2025 dimana berhasil masuk dalam 10 besar kabupaten se-Indonesia di peringkat ke-9, dan menjadi peringkat ke-4 dari 11 Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Sealatan.

Selanjutnya dapat dilihat perbandingan Nilai Indeks Ketahanan Pangan antara Kabupaten Barito Kuala,

Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional pada tahun 2025 pada tabel berikut.

Tabel 2.78 Nilai Indeks Ketahanan Pangan antara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025

	Kabupaten Barito Kuala	Provinsi Kalimantan Selatan	Nasional/Indonesia
Indeks Ketahanan Pangan (Nilai)	84,42	81,98	73,00

Sumber: Statistik Konsumsi Pangan 2025, Badan Pangan Nasional

Dari tabel di atas, Kabupaten Barito Kuala unggul dari Nasional dalam Ketahanan Pangan, bahkan juga unggul dari Provinsi Kalimantan Selatan yang mana pada tahun 2025 menduduki peringkat pertama dalam kategori Provinsi dalam Indeks Ketahanan Panagn, menunjukkan Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Barito Kuala sangat berpotensi menjadi lumbung ketahanan pangan daerah maupun nasional.

2.6.2 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah dibagi menjadi 4 Aspek, yaitu Geografi dan Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah. dan Pelayanan Umum. Data Indikator Kinerja Daerah yang diambil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang kemudian diturunkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025.

Tabel 2.79 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Aspek Geografi dan Demografi

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	64,02	66,36	71,44	
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	0,02	0,02	0,02	
Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	-	74,97	75,72	
Penurunan Emisi GRK (Ton CO2 eq) - Kumulatif	Ton CO_2e	-	1.104.809,10	1.115.857,19	
Penurunan Emisi GRK (Ton CO2 eq) - Tahunan	Ton CO_2e	-	96.847,25	97,815,72	
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	156,15	129	67,6	
Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	-	215,88	n/a	
Kapasitas Air Baku	m3/detik	-	5,79	5,65	
Akses Air Siap Minum Perpipaan	Persen	-	25	0	
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	11,01	13	11,62	
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	86,35	94	67,17	Nilai sesuai dengan realisasi SIPN

Tabel 2.80 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Kesejahteraan Masyarakat

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,02	5,1	5.27	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,41	3,39	3.23	
Indeks Gini	Angka	0,272	0,257	0.269	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,4	72	72.05	
Angka Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,07	74,4	72.85	
Prevalensi Stunting	Persen	10,39	9,5	8.53	
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	-	28	n/a	
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,92	8	7.99	
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,56	12,96	12.69	
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	73,53	74,26	n/a	
Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,51	0,46	0.47	
Tingkat kemiskinan	Persen	4,36	4	4.31	
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	-	9,37	n/a	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	-	55,57	n/a	
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	-	53,78	n/a	
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	98,96	99	99.71	
Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	127	≤10	128	
Jumlah Kematian Balita	Per 1.000 kelahiran hidup	12	≤10	9	
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	45,73	90	57	
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	81,5	90	84.5	
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	Persen	66,52	40,52	n/a	
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	Persen	58,71	20,36	n/a	
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	-	44,1	73,28	Kepesertaan tahun 2024 Target Sebanyak 1010 Orang Tercapai 530 Orang Kesepertaan Tahun 2025 Target Sebanyak 8.810 Orang Tercapai 6456 Orang (Program Perlindungan Berupa Jaminan Kematian Dan Jaminan Kecelakaan Kerja Pekerja Rentan)
Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal Kab/Kota	Persen	-	30	0	Selama Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025, jumlah pekerja formal penyandang disabilitas pada perusahaan di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebanyak 0 (nol) orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terdapat penyerapan tenaga kerja disabilitas di sektor formal, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesempatan kerja yang lebih inklusif melalui pembinaan dan koordinasi dengan perusahaan

Tabel 2.81 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Daya Saing Daerah

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,46	73,5	71,98	
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	-	33,28	n/a	
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	-	1,4	n/a	
Tingkat Inflasi di Barito Kuala	Persen	1,98	1,9	3,97	Mengacu pada tingkat Inflasi di Kota Banjarmasin
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	35,19	35,49	n/a	
Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,29	15,28	n/a	
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	-	2,5	2,57	
Jumlah tamu wisatawan (hotel/Orang)	Orang	-	350.000	208.286	
Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Kab/Kota	Persen	-	4,8	n/a	
Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kab/Kota	Persen	11,25	11,73	n/a	
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota	Persen	1,07	1,3	n/a	
Rasio Kewirausahaan Daerah Kab/Kota	Persen	1,82	2	n/a	
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,93	1,26	n/a	
Return on Asset (RoA) BUMD	Persen	-	0,1	n/a	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan)	Persen	57,66	58,12	n/a	
Indeks Inovasi Daerah	Angka	39,4	40	51,38	
Kontribusi Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persen	-	99,91	n/a	
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	-	6,36	n/a	
Koefisien harga antar wilayah tingkat kabupaten	Angka	-	7,28	n/a	
Ekspor barang dan jasa	Persen	-	-17,28	n/a	
Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap PDRB Kawasan Metropolitan Banjarbakula	Persen	-	12,52	n/a	
Kredit UMKM ke bank umum/PDRB	Persen	-	14,36	n/a	
Inklusi Keuangan	Persen	-	87,98	n/a	
Indeks Daya Saing Daerah	Angka	-	3,54	n/a	

Tabel 2.82 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Pelayanan Umum

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,94	71,2		
Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	80,44	81,5		
Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,28	96,88		
Indeks SPBE	Angka	2,59	2,64	2,99	
Indeks PEMDI	Angka	-	-	-	Nilai Belum Keluar, Baru Berlaku di 2026
Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,28	4,35		
Indeks Integritas Nasional	Angka	73,2	76,36		
Maturitas SPIP	Nilai	3,29	3,3		
Nilai SPI	Nilai	73,2	75,22		
Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen	-	90	90	
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	-	62,62		
INDIKATOR OUTCOME BERDASARKAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
A. PENDIDIKAN					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2		
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	92,91	93,2	92,75	
Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	97,41	98,65	97,05	
Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	85,81	86,2	83,82	
Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,01	68,5	62,01	
Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,01	68,5	55,01	
Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71,03	68,5	71,03	
Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,4	68,5	62,4	
Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	62,11	85	62,11	
Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	65,05	85	65,05	
Tingkat Implementasi Kurikulum Merdeka	%	100	90	100	
Persentase Pendidik Tersertifikasi	%	59,01	85	n/a	
Persentase Satuan Pendidikan Berizin	%	100	90	100	
Tingkat Literasi Bahasa dan Sastra	Nilai	66,52	68,5	n/a	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	92,91	93,2	92.75	
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,6	98,65	98.76	
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	95,16	95,4	95.34	
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	85,81	86,2	83.82	
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi	%	59,01	85	n/a	
Persentase satuan pendidikan berizin	%	100	90	100	
Nilai literasi membaca	Nilai	66,52	68,5	66.52	
B. KESEHATAN					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Jumlah Kematian Ibu	Jumlah	5	≤10	5	
Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	10,39	9,5	8.5	
Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	92,097	93	104.41	
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	99,113	99,2	107.6	
Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	98,677	98,8	107.91	
Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	85,2	87	82,9	
Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	86,194	87	101.95	
Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	97.739	98	100.45	
Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	84,71	85,5	93.45	
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90.013	90,5	103.57	
Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	100.41	
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	
Cakupan penemuan pemeriksaan kesehatan ginjal	%	32,5	35	n/a	
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	
Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	106.53	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100	100	108.88	
Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	98	80	94	
Persentase Ketersediaan Obat Esensial	%	99,68	100	99.56	
Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif	%	100	100	100	
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,58	0,59	0,39	
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	92,1	92,3	104.41	
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,11	99,15	107.6	
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,68	98,75	107.91	
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	86,19	86,5	101.95	
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97,74	97,8	100.45	
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	84,71	85	93.45	
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	90,01	90,2	103.57	
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100.41	
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	106.53	
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	108.88	
Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	98	80	94	
Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan sesuai standar	%	100	85	68	Obat = 99.56 Alat Kesehatan = 36.41
C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	41,4	41,92	n/a	
Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	-	-	n/a	
Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	64,5	65,32	n/a	
Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	67,1	69,06	n/a	
Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	73,17	74	n/a	
Persentase Pengurangan Sampah Regional	%	2	15	n/a	
Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	78,76	79	n/a	
Persentase Genangan yang Tertangani	%	-	55	n/a	
Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100	100	n/a	
Persentase Bangunan Gedung Hijau	%	-	10	n/a	
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	41,72	45,71	n/a	
Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analis	%	74.716	77	n/a	
Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	50	60	n/a	
Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	27,8	39,8	n/a	
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	54,28	55	n/a	
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi	%	0	2	n/a	
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74,12	74,5	n/a	
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	%	67,2	67,8	n/a	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	70,5	71	n/a	
Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100	100	n/a	
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	67,86	68,2	n/a	
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	74,72	75,2	n/a	
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	n/a	
Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	75,33	75,7	n/a	
Cakupan layanan sistem drainase	%	-	65	n/a	
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	45,1	46	n/a	
Indeks Kualitas Lingkungan Permukiman	Indeks	-	60	n/a	
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	43,99	44,01	n/a	
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	n/a	
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	n/a	
persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	-	6,89	n/a	
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	13,786	12,5	n/a	
Persentase Kawasan Kumuh yang Ditingkatkan	%	-	0,83	n/a	
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	57,996	59	n/a	
Persentase Pelaku Usaha Perumahan Tersertifikasi	%	-	70	n/a	
Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	n/a	
Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi	%	100	100	n/a	
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani	%	-	6,89	n/a	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	13,79	12,5	n/a	
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	58	59	n/a	
Indeks Kualitas Permukiman	Indeks	-	65	n/a	
Persentase bangunan perumahan berizin	%	-	75	n/a	
E. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	
Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	
Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	67,74	
Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	85	85	
Persentase penanganan pra bencana	%	100	80	100	
Persentase penanganan pasca bencana	%	100	80	100	
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0,31	0,4	1,57	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	6,82	6,7	15	
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman	%	-	70	100	
Tingkat Kesiapsiagaan Bencana	Indeks	100	100	100	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
F. SOSIAL					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	79,85	
Persentase PSKS yang Meningkat Kapasitasnya	%	60	65	70	
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	
Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	
Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	31,6	80	83	
Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	72	75	75	
Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	
Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	43,39	55	100	
Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	
Persentase korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100	100	100	
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	-	45		
Tingkat kelayakan taman makam pahlawan	%	85	85	85	
INDIKATOR OUTCOME BERDASARKAN URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
A. TENAGA KERJA					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	4.354	4,7	5.2	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	3.840.435.854	3.887.881.212	38,404,358.55	PDRB atas dasar Harga Konstan = 6.728.290.000 Penduduk yang bekerja = 175.196 Orang
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	87.669	87,8	87,91	Pencari Kerja Terdaftar = 571 Orang Pencari Kerja ditempatkan = 502 Orang
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	78.049	78,5	n/a	
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	78,05	78,5	n/a	
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja	%	87,67	87,8	87,91	Pencari Kerja Terdaftar = 571 Orang Pencari Kerja ditempatkan = 502 Orang
B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	n/a	
Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	69	70	n/a	
Persentase Data Terpilah Gender	%	60	65	n/a	
Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	75	80	n/a	
Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	n/a	
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	12,1	12,5	n/a	
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	n/a	
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000	18,44	18	n/a	
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	64	65	n/a	
Persentase pemenuhan hak anak	%	78	80	n/a	
C. PANGAN					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Tingkat Kemandirian Pangan Daerah	%	-	75	n/a	
Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	96.632	96,8	108.69	
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	11,94	10	18.91	
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	96,63	96,8	108.69	
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	4,69	4,2	5.58	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,43	85	88.97	
Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	%	70	80	81.09	
D. PERTANAHAN					
Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	0	5	n/a	
Persentase Ganti Kerugian yang Diselesaikan	%	-	75	n/a	
Luas Tanah Ulayat yang Ditetapkan	%	-	70	n/a	
Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	-	70	n/a	
Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	-	80	n/a	
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	%	100	100	n/a	
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	96,38	96,5	n/a	
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	100	100	n/a	
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan	%	100	100	n/a	
Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	n/a	
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0	5	n/a	
Persentase ganti kerugian yang terealisasi	%	-	85	n/a	
Luas tanah ulayat (tanah bengkok) yang ditetapkan	Ha	-	50	n/a	
Jumlah izin pembukaan tanah	Izin	-	25	n/a	
Persentase bidang tanah bersertifikat	%	-	70	n/a	
Persentase tanah yang terpetakan	%	-	75	n/a	
Persentase SDM pertanahan yang kompeten	%	-	80	n/a	
Persentase wilayah pesisir yang tertata	%	-	60	n/a	
Persentase informasi pertanahan terintegrasi	%	-	70	n/a	
Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	%	-	75	n/a	
E. LINGKUNGAN HIDUP					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Persentase Dokumen Lingkungan yang Tersusun	%	70	75	100	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Indeks	64,02	66,36	71.44	
Indeks Keanekaragaman Hayati	Indeks	60	65	n/a	
Persentase Limbah B3 yang Dikelola	%	70	75	n/a	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	100	100	100	
Persentase Masyarakat Peduli Lingkungan	%	100	100	100	
Jumlah Penghargaan Lingkungan yang Diberikan	Jumlah	0	1	1	
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	75.326	75,7	n/a	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - IKA (Indeks Kualitas Air)	Indeks	51,82	65,16	64.42	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - IKU (Indeks Kualitas Udara)	Indeks	96,63	71,48	84.69	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - IKL (Indeks Kualitas Lahan)	Indeks	24,64	58,96	59.01	
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	75,33	75,7	n/a	
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan	%	100	100	100	
Persentase pengendalian pencemaran air	%	68	70	n/a	
Persentase pengelolaan limbah B3	%	72	75	n/a	
Jumlah MHA yang terlindungi haknya	Jumlah	0	0	0	
Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan	Jumlah	2	2	2	
Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	Jumlah	0	1	1	
Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	
F. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	77,17	Untuk baseline 2024 nilai sakip 68,78. Untuk target nilai sakip 2025 nilai 72 dengan capaian 77,17.
Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	6,5	28	52,62	Untuk baseline 2024 70%. Untuk target 2025 menjadi 81% dengan capaian 52,62%
Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	91,5	91,5	97,54	Untuk baseline 2024 94,33%. Untuk target 2025 menjadi 99% dengan capaian 97,54%
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	80	100	93,41	Untuk baseline 2024 91,95%. Untuk target 2025 menjadi 100% dengan capaian 93,41%
Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	95,93	100	6,95	Untuk baseline 2024 6,50%. Untuk target 2025 menjadi 68% dengan capaian 6,95%

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	57,84	100	61,84	Untuk baseline 2024 58,12%. Untuk target 2025 menjadi 65% dengan capaian 61,84%
Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	34,90	100	39,00	Untuk baseline 2024 36,07%. Untuk target 2025 menjadi 43% dengan capaian 39%
Persentase Pemanfaatan SIAK	%	60	100	80	Untuk baseline 2024 60%. Untuk target 2025 menjadi 100% dengan capaian 80%
Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	100	100	100	Untuk baseline 2024 100%. Untuk target 2025 menjadi 100% dengan capaian 100%
Perekaman KTP elektronik	%	99,28	99,35	98,86	Untuk baseline 2024 99,28%. Untuk target 2025 menjadi 100% dengan capaian 98,86%
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	91,93	92,2	93,41	Untuk baseline 2024 91,93%. Untuk target 2025 menjadi 92,2% dengan capaian 93,41%
Kepemilikan akta kelahiran	%	95,93	96,1	97,54	Untuk baseline 2024 95,93%. Untuk target 2025 menjadi 96,1% dengan capaian 97,54%
Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah memanfaatkan data kependudukan	%	13,33	100	80	Untuk baseline 2024 13,33%. Untuk target 2025 menjadi 100% dengan capaian 80%
Ketersediaan data penduduk yang akurat	%	-	100	100	Untuk baseline 2024 0%. Untuk target 2025 menjadi 100% dengan capaian 100%
G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Persentase peningkatan status desa mandiri	%	79.245	79,5	n/a	
Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	-	75	n/a	
Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	n/a	
Jumlah kerja sama antar desa	Jumlah	-	15	n/a	
Persentase desa dengan administrasi yang tertib	%	80	85	n/a	
Persentase lembaga masyarakat yang aktif	%	75	80	n/a	
H. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	2,35	2,3	n/a	
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	24,7	24,6	n/a	
Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	84.706	84,8	n/a	
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7.238	7,1	n/a	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,28	2,26	n/a	
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (mCPR)	%	84,71	84,8	n/a	
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,24	7,1	n/a	
I. PERHUBUNGAN					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	60,25	61,5	n/a	
Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,89	0,9	n/a	
Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	-	65	n/a	
Tingkat Keselamatan Pelayaran	%	99,99	80	n/a	
Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,89	0,9	n/a	
Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota)	Rasio	0,37	0,36	n/a	
Jumlah trayek pelayaran yang terlayani	Jumlah	21	8	n/a	
J. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	72,88	
Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	97,87	
Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	-	80	100	
Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	10.127	11	16,67	
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet	%	100	100	100	
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	10,13	11	16,85	
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	%	64,04	64,5	100	
K. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Persentase Koperasi Simpan Pinjam Berizin	%	100	75	n/a	
Persentase Koperasi yang Diawasi	%	100	70	n/a	
Persentase KSP/USP Sehat	%	62,5	63	n/a	
Persentase Pengurus Koperasi Terlatih	%	18	65	n/a	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Persentase Koperasi Aktif	%	45	65	n/a	
Persentase UMKM yang Diberdayakan	%	49	55	n/a	
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	1,09	3	n/a	
Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	48.825	49,5	n/a	
Pertumbuhan Wirausaha	%	41,88	42	n/a	
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	62,5	63	n/a	
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	48,83	49,5	n/a	
Jumlah koperasi yang berizin	Jumlah	126	45	n/a	
Jumlah pengurus koperasi yang terlatih	Jumlah	30	150	n/a	
Tingkat Pengembangan UMKM	%	41,88	70	n/a	
Persentase koperasi berbadan hukum	%	100	85	n/a	
L. PENANAMAN MODAL					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	6.373	6,6	n/a	
Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	33	75	n/a	
Jumlah Investor yang Tertarik	Jumlah	8	8	n/a	
Rata-rata Waktu Penyelesaian Izin Investasi	Hari	5	5	n/a	
Persentase Kepatuhan Investor	%	80	80	n/a	
Persentase Data Investasi Terintegrasi	%	75	75	n/a	
Jumlah kegiatan promosi investasi	Jumlah	6	12	n/a	
Rata-rata waktu penyelesaian perizinan (hari)	Hari	5	5	n/a	
Persentase realisasi investasi terhadap komitmen	%	40	80	n/a	
Persentase keterpaduan data penanaman modal	%	70	75	n/a	
M. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	60,25	61,5	n/a	
Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	1.693	1,8	0,22	
Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	10	11	2.7	
Persentase Gugus Depan Aktif	%	4.459	25	100	
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,69	1,8	15.98	
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	4,46	4,6	1.21	
Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	10	11	6	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Jumlah anggota pramuka aktif	Orang	-	2,5	14.846	
N. STATISTIK					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,31	2,6	2,31	
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	%	100	100	100	
Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	
O. PERSANDIAN					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Indeks	60,93	61,5	60,93	
Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	60,93	61,5	60,93	
P. KEBUDAYAAN					
Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	
Persentase Situs Sejarah yang Terpelihara	%	70	75	100	
Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	65	70	80	
Jumlah Pengunjung Museum	Orang	-	-	-	Kab barito Kuala tidak memiliki Museum
Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	
Jumlah sanggar seni tradisional	Jumlah	20	25	468	
Jumlah situs sejarah yang terdata	Jumlah	14	15	15	
Jumlah kunjungan museum	Orang	-	-	-	Kab barito Kuala tidak memiliki Museum
Q. PERPUSTAKAAN					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	68,24	68,5	n/a	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	76,57	76,8	1.03	Ada penyesuaian perhitungan yang dilakukan oleh Perpusnas
Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	Jumlah	-	8	n/a	
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	68,24	68,5	59.29	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	76,57	76,8	1.03	Ada penyesuaian perhitungan yang dilakukan oleh Perpusnas
Jumlah naskah kuno yang didigitalisasi	Jumlah	-	20	n/a	
R. KEARSIPAN					

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	75,43	75,8	88.2	
Persentase Arsip Vital yang Terlindungi	%	100	100	-	Untuk Arsip Vital yang dilindungi Dinas Perpustakanan dan Kearsipan Tidak Menyimpan adanya di Masing2 SKPD yang Menciptanya Contoh Sertifikat Tanah adanya di BPKAD
Persentase Layanan Arsip Tepat Waktu	%	-	85	80	
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	75,43	75,8	75.97	
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	100	100	100	
Jumlah penggunaan arsip yang terdata	Jumlah	0	150	398	Sesuai Data Pengguna di Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
INDIKATOR OUTCOME BERDASARKAN URUSAN PILIHAN					
A. KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Produksi Perikanan Tangkap	Ribu Ton	9,17	9,8	9850,152	
Produksi Perikanan Budi Daya	Ribu Ton	11,94	7,5	11,993	
Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	%	-	75	-	
Nilai Ekspor Hasil Perikanan	Kg/Kap/Tahun	67,86	67,93	-	Tidak ada Ekspor Hasil Perikanan
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	%	97,48	97,6	102	
Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	11,94	15	11,993	
Persentase penanganan pelanggaran	%	-	85	-	
Nilai ekspor produk perikanan (miliar)	Miliar Rupiah	-	50	-	Tidak ada Ekspor Hasil Perikanan
B. PARIWISATA					
Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	-	3	3,39	
Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	-32,5	-30	0	Untuk kabupaten Barito Kuala belum tersedia akomodasi hotel berbintang dan non bintang
Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	-	25	5	
Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tersertifikasi	Orang	-	80	30	Kegiatan ini bersifat partisipasif provinsi kalimantan selatan, Pemerintah kabupaten Barito Kuala melalui Disporbudpar belum menyelenggarakan karna masih bersifat pendataan

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-32,5	-28	70,90	
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	1,85	2	5,93	
Tingkat hunian akomodasi	%	18,69	19	27,97	
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,57	2,6	2,57	
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,72	2,75	25,13	
Jumlah SDM pariwisata tersertifikasi	Orang	-	200	75	Kegiatan bersifat partisipatif, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Disporbudpar belum melaksanakan kegiatan ini karna masih tahapan pendataan
C. PERTANIAN					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Peningkatan produksi tanaman pangan	Ribu Ton	354674	356624	401958	
Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0,02	0,69	0.48	
Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	4	4,10	4.1	
Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	2,5	6	4.05	Target 5%
Persentase Prasarana Pertanian yang Berfungsi	Ha	115042	115574	120538.00	
Persentase Hewan Ternak yang Sehat	%	70	75	75.00	
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	85	87,5	87.5	
Persentase Usaha Pertanian Berizin	%	93	94	n/a	
Persentase Petani yang Terlayani Penyuluhan	%	70	75	75	
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha/Tahun	3,74	3,76	3.90	
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-0,2	-0,15	35.83	
Tingkat ketersediaan prasarana pertanian	%	-	80	80	
Persentase penanganan bencana pertanian	%	-	85	85	
Jumlah usaha pertanian berizin	Jumlah	-	300	n/a	
Jumlah petani yang mendapat penyuluhan	Orang	-	8000	1202	
D. KEHUTANAN					
Luas hutan adat yang ditetapkan (Ha)	Ha	-	100	-	IKD PROVINSI

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
E. PERDAGANGAN					
Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Rupiah	0	450.000.000	n/a	
Persentase Pasar Rakyat yang Revitalisasi	%	50	55	n/a	
Tingkat Stabilitas Harga Bahan Pokok	%	41.505	45	n/a	
Nilai Ekspor Daerah	Rupiah	0	80.000.000	n/a	
Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	100	n/a	
Persentase Produk Dalam Negeri di Pasar Modern	%	100	100	n/a	
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	72,97	73,5	n/a	
Persentase kinerja realisasi pupuk	%	41,5	42,5	n/a	
Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	%	100	100	n/a	
Koefisien harga antar wilayah tingkat kabupaten	Angka	0	7,2	n/a	
Ekspor barang dan jasa	%	0	-16	n/a	
Proporsi produk lokal di pasar	%	0	45	n/a	
F. PERINDUSTRIAN					
Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah	%	72,3	72,6	n/a	
Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	6.993	7,1	n/a	
Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	125	122	n/a	
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	6,99	7,1	n/a	
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri	%	72,3	72,6	n/a	
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI)	%	100	100	n/a	
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI)	%	0	90	n/a	
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	%	0	85	n/a	
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	125	120	n/a	
G. TRANSMIGRASI					
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direncanakan	Unit	100	1	0	Tidak ada rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi baru

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibangun	Unit	-	0,5	0	Tidak ada pembangunan Kawasan Transmigrasi baru
Persentase Kawasan Transmigrasi Berkembang	%	-	55	0	Kawasan Transmigrasi saat ini berstatus Mandiri
Jumlah unit permukiman transmigrasi yang dibangun	Unit	-	5	0	Tidak ada pembangunan Unit Permukiman Transmigrasi baru
Tingkat kemandirian kawasan transmigrasi	%	-	70	76.53	Status Kawasan Transmigrasi saat ini Mandiri
INDIKATOR OUTCOME BERDASARKAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
A. SEKRETARIAT DAERAH					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Indeks Kesejahteraan Masyarakat	Indeks	34,47	65	n/a	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	5,1	5,27	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,54	68,7	76,98*	*2024
B. SEKRETARIAT DPRD					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	n/a	
Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	n/a	
Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	%	80	85	n/a	
C. PERENCANAAN					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	82,5	90,91	
Tingkat Sinkronisasi Perencanaan	%	100	87	100	
Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	%	-	90	n/a	
Tingkat keselarasan perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten	%	-	85	n/a	
D. KEUANGAN					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	16,2	15,5	34	
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	5.882	6,5	7,67	
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	80	85	79,22	
Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	100	100	100	
Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	47,85	20	36,72	
Persentase Penurunan SILPA	%	2,7	5	11,73	
Persentase BMD yang Tersertifikasi	%	73	75	80,87	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Persentase Target Pendapatan yang Tercapai	%	72,3	72,6	95,87	
Opini BPK atas laporan keuangan	Status	WTP	WTP	WTP	
Persentase aset daerah yang terdokumentasi	%	90	90	100	
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	%	60,3	60,75	87,63	
Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	%	16,87	19,62	12,37	
Deviasi realisasi PAD terhada PAD dalam APBD	%	24,96	28,64	3,08	
Manajemen Aset	Nilai	4	4	4	
Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	13,64	17,04	10,73	
E. KEPEGAWAIAN					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	-	Indeks RB pada Bidang Organisasi Pemda
Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Nilai	3	3,2	-	Nilai Indeks NSPK 2025 sampai saat ini belum dikeluarkan BKN
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	66,5	70	78.52	Nilai Indeks dari BKN
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	%	70,23	72,61	73.55	
Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	%	22,25	23,64	21.69	
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	%	34,42	35,12	36.64	
F. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	125	80	49	
Persentase ASN yang telah mengikuti diklat	%	80	80	33	
G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	-	55	n/a	
Jumlah penelitian yang dimanfaatkan	Jumlah	-	15	n/a	
H. INSPEKTORAT DAERAH					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	76,99	
Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Angka	9	4	10	
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,29	3,3	2,423	
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3,1	3	
Manajemen Risiko Indeks	Indeks	2,87	3,2	2,219	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	95,31	85	96,77	
Persentase OPD yang Difasilitasi	%	-	80	100	
Nilai SPI	Nilai	73,2	76	78,85	
I. KECAMATAN					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	75	n/a	
Persentase Desa/Kelurahan Berdaya	%	-	70	n/a	
Angka Gangguan Ketertiban Umum	Angka	-	6	n/a	
Persentase Penanganan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	85	n/a	
Persentase Desa dengan Akuntabilitas Baik	%	-	75	n/a	
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	-	3,9	n/a	
Persentase Desa Mandiri	%	-	25	n/a	
Indeks Transformasi Digital Pemerintahan	Indeks	-	2,5	n/a	
Indeks Pembangunan Desa (IPD)	Indeks	-	65	n/a	
J. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	n/a	
Indeks Karakter Pancasila	Indeks	74,3	75	75	
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	%	76	78	76	
Persentase Ormas yang Dibina	%	80	84	84	
Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks	75	70	70	
Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks	78,84	79	n/a	Nilai IKN Tahun 2026 belum di umumkan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Indeks Keharmonisan Kehidupan Beragama	Indeks	84,26	85	77,89	
Jumlah organisasi masyarakat yang aktif & terdaftar	Jumlah	40	150	39	
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	58,55	56	59,98	
K. PENGADAAN					
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	n/a	
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	83,15	89,86	n/a	
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	38,13	41,8	n/a	
Peningkatan penggunaan produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	%	27,18	31,37	n/a	

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	KETERANGAN
L. TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK					
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	97,22	97,68	n/a	
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	n/a	
INDIKATOR REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH (SEMUA URUSAN)					
Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks	70,94	71,2	79,85	

2.6.3 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Tindak Lanjut

A. Faktor Pendorong

- Kerjasama yang baik antara internal SKPD, lintas sectoral, maupun dengan pihak eksternal (di luar lingkungan pemerintah);
- Kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal perencanaan, atau tetap terlaksana dengan baik dan semaksimal mungkin jika tidak sesuai perencanaan awal;
- Evaluasi rutin yang dilaksanakan internal SKPD sehingga dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan SKPD dalam mencapai targetnya; dan
- Pada Beberapa Kecamatan, partisipasi masyarakat mengikuti musrenbang kecamatan mengalami kemajuan sehingga menyebabkan usulan yang masuk di desa banyak yang terakomodir dalam musrenbang kabupaten.

B. Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat yang dilaporkan SKPD selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
   - Dalam pecapaian kinerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terkendala dari kurangnya kesadaran PNS untuk melengkapi data pribadi SKPD sehingga banyak keterlambatan data yang disampaikan. Selain itu kebijakan migrasi data yang dilakukan BKN dari Aplikasi SIASN dan SIMPEGNAS BKN juga membuat beberapa pengelolaan data pegawai menjadi terhambat namun bisa teratasi secara bertahap
   - Ada beberapa Tenaga Kesehatan yang belum memiliki sertifikasi uji kompetensi bagi perawat, diklat kebidanan untuk bidan, diklat dasar atau uji kompetensi bagi penyuluh pertanian dan polisi pamong praja dan untuk kepala puskesmas kenaikan pangkatnya diwajibkan memakai angka kredit karena telah difungsionalkan
   - Masih kurangnya kesadaran PNS untuk mengikuti TUBEL (Tugas Belajar)
   - Masih kurangnya penawaran dari Lembaga Pendidikan Formal
   - Terbatasnya biaya Tubel PNS
   - Terbatasnya kuota peserta setiap pemanggilan oleh penyelenggara diklat (BPSDMD Prop. Kalsel) dan adanya Perubahan pola kontribusi menjadi pola fasilitasi
   - Masih belum maksimal pembuatan BAP oleh SKPD sehingga meperlambat kerja tim Majelis
   - Belum selesainya proses pengajuan Satyalencana 2025 ke Mendagri
2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
   - Harga dan biaya yang cenderung berubah
   - Dana Transfer ke daerah (TKD) untuk TA 2026 mengalami penurunan RP.263M dari TA 2025 atau sekitar 18,15%, penurunan TKD mengakibatkan raperda APBD TA 2026 yang telah di serahkan ke DPRD harus di sesuaikan kembali.
   - Tarik ulurnya pagu anggaran SKPD karena kebijakan kepala daerah untuk memenuhi visi misi Kepala Daerah, sehingga mengakibatkan penyusunan RAPBD TA 2026 berjalan lebih lambat
   - Kegiatan internalisasi kapasitas TAPD batal dilaksanakan karena efisiensi anggaran

- Penyusunan Perubahan APBD TA 2025 telah selesai dilakukan, tetapi berjalannya waktu ada terjadi 2 (dua) kali pergeseran anggaran setelah perubahan APBD
- Hasil rekonsliasi asset yang terlambat
- Adanya salah rekening pengganggaran yang menyebabkan harus dilakukan jurnal koreksi
- Data data laporan yang sering terlambat disampaikan oleh bendahara atau PPTK
- Pertanggung jawaban keuangan belum maksimal karena, kegiatan rapat, fotocopy dokumen ikut kegiatan rutin sekertariat
- Dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Kas yang tersedia masih banyak yang tidak dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan
- Anggaran peengadaan atau penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor belum dilaksnakan karenaa ada efisiensi anggaran
- Ada ASN yang mengikuti diklat tanpa biaya kontribusi sehingga biaya kontribusi tidak terealisasi
- Belum tercapainya target jumblah porsi logistik dikarenakan belum maksimalnya agenda rapat yang dilaksanakan dan tamu yang berkunjung berkurang
- Rendahnya serapan/realisasi keuangan pada Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah disebabkan karena kegiatan perjalanan dinas untuk study tiru Tim MPKD dan TPKD batal dilaksanakan, mengingat padatnya jadwal kegiatan Tim MPKD dan TPKD dalam menindaklanjuti penyelesaian Temuan kerugian daerah dengan Tim dari BPK RI
- Draft dokumen Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi yang terbaru sudah diajukan dan diserahkan ke bagian hukum Sekretariat Daerah untuk diproses, tetapi menurut bagian hukum, Aplikasi untuk proses fasilitasi perbup di propinsi sudah ditutup per bulan Desember 2025 sehingga berkas/draft dokumen Perbup kebijakan akuntansi baru dapat di proses mulai bulan Januari 2026
- Kemampuan SDM Pengurus Barang yang masih kurang terkait penatausahaan Barang Milik Daerah Pengurus Barang yang sering berganti-ganti
- Masih adanya SKPD yang belum menyerahkan Sertipikat dan BPKB asli ke Pengelola Barang
- Masih banyaknya tanah bermasalah laporan SKPD belum dapat diselesaikan
- Setiap Tahun Selalu terjadi pergantian Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Gaji SKPD, yang mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan bendahara karena harus belajar dari awal lagi
- Setiap Tahun Selalu Ada Update Aplikasi baru dalam Rangkaian Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan PEMDA
- Pada Tahun Anggaran 2025 untuk Proses Penandatanganan baik Surat Keputusan/Peraturan Bupati meelum makan waktu lebih lama sebelum di TTD Kepala Daerah karena ada tambahan Proses.

3) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
   - Untuk capaian fisik sudah tercapai, namun ada beberapa honor narsum yang tidak terealisasi karena terdapat acara yang tidak terlaksana. Kendala yang cukup menggangu proses

perencanaan karena dalam pengumpulan maupun input di SIPD seringkali melebihi dari waktu yang telah ditetapkan sedangkan tahapan perencanaan tetap berjalan sehingga banyak pekerjaan yang tumpang tindih yang mengakibatkan kualitas perencanaan jauh dari yang diharapkan

- Kurang disiplinnya SKPD mitra dalam menyusun dokemun sesuai dengan peraturan dan kedisiplinan dalam ketaatan waktu dalam penyelesaian penyusunan dokumen
- Kurangnya kapasitas dan Kuantitas SDM di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sub koor Infrastruktur dan Kewilayahan.

4) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

- Secara keseluruhan, capaian realisasi keuangan untuk sub bidang pembukuan dan pelaporan sudah proporsional yaitu di angka Rp. 102.521.570,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 107.457.867,- atau 95,41%. Dari rincian sub Kegiatan, ada satu kegiatan yaitu Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang capaiannya hanya sebesar Rp. 10.750.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 15.655.000,- atau 68,67%. Hal ini disebabkan karena adanya permintaan rekonsiliasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman (Penyediaan Jasa Boga/Katering) yang diajukan di akhir tahun dan sifatnya mendesak untuk dilaksanakan yaitu dari Kecamatan Barambai yang terdiri dari 11 Desa dan Kecamatan Marabahan yang terdiri dari 8 Desa dan 2 Kelurahan. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan nilai setoran Desa/Kelurahan sesuai dengan nilai setoran objek katering yang ada di wilayahnya. Kegiatan ini memerlukan perhatian khusus karena tekait dengan besarnya nilai setoran objek pajak katering sebagai dasar untuk perhitungan dana bagi hasil desa. Karena permintaan rekonsiliasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman (Penyediaan Jasa Boga/Katering) dari Kecamatan Barambai dan Kecamatan Marabahan di akhir tahun sehingga kegiatan rekonsiliasi penerimaan retribusi SKPD Penghasil belum sempat dilaksanakan di tahun 2025
- Kurang optimalnya sarana yang mendukung dalam jalannya pelayanan pajak daerah khususnya pelayanan di Kecamatan Alalak yaitu tidak adanya Personal Computer dan Printer yang memfasilitasi
- Belum terfasilitasinya untuk pelayanan pajak daerah secara keliling karena adanya efesiensi anggaran padahal sebelumnya kegiatan ini sudah di anggarkan dan direncanakan kegiatan ini ada pada triwulan II 2025
- Kurang disiplin Wajib Pajak Daerah dalam hal penyetoran yang tepat waktu, Wajib Pajak tidak melaporkan besaran pajaknya sesuai penghasilan. Aparat Desa/Kelurahan kurang memperhatikan waktu jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sehingga mendapatkan denda pajak
- Kurang disiplin Wajib Pajak Daerah dalam hal penyetoran penerimaan PAD yang tepat waktu

5) Dinas Sosial

- Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya izin pengumpulan uang dan barang
- Pemberian bantuan transport untuk eks napi tergantung dari kondisi lapangan sehingga jika tidak ada eks napi atau OT yang perlu diberikan bantuan transport maka tidak ada realisasi
- Masih belum validnya data yang diberikan oleh Desa sehingga memperlambat penyaluran bantuan, maka kedepannya petugas Dinas Sosial turun langsung ke Lapangan untuk

verifikasi data

- Adanya KPM yang sudah banyak mendapatkan graduasi artinya berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi PKM PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan.

6) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
   - Perlu dilakukan perencanaan sebelum menetapkan penyedia maupun konsultan perencanaan dan pengawasan untuk Pembangunan, seperti perencanaan dalam hal ruang lingkup pekerjaan, kebutuhan teknis, jadwal pelaksanaan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku.
   - Adanya fluktuasi harga pangan di setiap pasar yang beragam atau berbeda-beda, jadi perlunya pendataan harga pasar terperinci
   - Harga Beras CPP di Perum Bulog dapat berubah-ubah karena Perum Bulog Kanwil Kalsel mengikuti harga dari pusat, sehingga jika ada perubahan harga PKS antar dinas akan di addendum baik itu addendum berupa kuantitas beras atau menyetorkan selisih harga
   - Jumlah lokasi Sosialisasi Pangan B2SA masih sangat terbatas, padahal antusias kader pangan masing-masing desa sangat tinggi. Sehingga hanya 3 desa saja yang dapat mengikuti kegiatan tersebut.
   - Kernampuan anggota KWT dalam mengelola kegiatan Teras Pangan B2SA masih terbatas, sehingga perlu pendampingan lebih baik dari Penyuluh dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala
7) Dinas Lingkungan Hidup
   - Gangguan Teknis pada Aplikasi atau Sistem Penggajian
   - Masih Kurangnya Kurangnya pemahaman SDM tentang regulasi pengelolaan asset
   - Terjadinya kerusakan mendadak pada Peralatan dan mesin
   - Kurangnya Pengetahuan terkait Proses Pengadaan Barang dan Jasa/Kontruksi;
   - Minimnya pada Proses Persiapan sehingga penentuan Harga Perkiraan sementara tidak optimal karena hanya dilakukan survey harga terbatas pada 2 (dua) Toko saja
   - Kendala serapan anggaran kurang dari 90% yaitu adanya peralihan status personil di laboratorium yang sebelumnya tenaga honor lepas menjadi PPPK penuh waktu. Untuk status tenaga honor lepas menjadi PPPK penuh waktu diganti setelah anggaran perubahan ditetapkan sehingga tidak dapat digeser ke belanja yang lain sehingga anggaran untuk belanja jasa administrasi tidak terealisasi dari bulan September sampai dengan Desember 2025. Kemudian untuk anggaran kedatangan assessor dari Komite Akreditasi Nasional pada pelaksanaan survailen 2 dan penambahan ruang lingkup yang sebelumnya dianggarkan untuk 3 orang tidak sepenuhnya terealisasi karena yang datang hanya 2 orang
   - Masih kurangnya sosialisası terhadap masyarakat / areal perusahaan akan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
   - Masih kurangnya pemanfaatan fungsi hutan dan lahan pada masyarakat / areal Perusahaan
   - Pada musim kemarau biasa terjadinya kebakaran tanaman, hutan dan lahan
   - Kurangnya transportir yang berizin sehingga limbah medis yang terangkut menjadi terbatas serta sarana penyimpanan sementara limbah
   - Dengan berkembangnya IT, untuk memudahkan dan mengoptimalkan urusan perizinan salah

satunya dengan menggunakan aplikasi AMDAL.net. Kendala yang sering muncul biasanya terkait koneksi dan jaringan yang terkadang Down Server atau sedang dalam masa Maintenance

- Penilaian Adipura dilaksanakan pada minggu III bulan Oktober 2025 dan secara fisik dilapangan masih banyakyang harus dilakukan pembenahan titik pantau untuk dapat memenuhi standar kriteria penilalan Adipura
- Sosialisasi Sekolah Adiwiyata tidak dapat dilaksanakan karena adanya efesienal Anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sehingga DLH hanya melakukan pembinaan dan monitoring saja ke sekolah untuk persiapan penilaian sekolah
- SDM penanganan sampah masih kurang.
- Kurang kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar.
- Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga masih kurang

8) Dinas Pendidikan
   - Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik yang bersumber dari DAK FISIK tidak dilaksanakan karena Petunjuk Teknis Tidak Ada sampai akhir tahun
   - Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas pada SDN Sukaramai tidak dilaksanakan, karena pihak Pelaksana mengundurkan diri dengan alasan kontrak pekerjaan terlambat terbit (Diawal Oktober 2025)
9) Dinas Pehubungan
   - Sempat terkendala karena adanya peralihan dari aplikasi e-catalogue v.5 ke e-catalogue v.6 untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Alhamdulillah dapat diselesaikan dan direalisasikan pada Triwulan III T.A 2025
   - Rendahnya indeks Rasio Konektivitas Transportasi Jalan, yang disebabkan oleh 2 hal, yaitu : Rendahnya indeks Rasio Konektivitas Angkutan Kecamatan, dimana jumlah kawasan Kecamatan yang dioperasikan Angkutan Massal tidak mengalami peningkatan (0 kawasan Kecamatan), dan Rendahnya indeks Rasio Konektivitas Angkutan Antar Kecamatan dalam Kabupaten, dimana jumlah Terminal Tipe C yang dibangun atau yang tersedia belum memenuhi kebutuhan (2 buah Terminal)
10) Dinas Perkebunan dan Peternakan
   - Pelaksanaan pemeriksaan kebuntingan masih terkendala oleh para peternak yang jarang berada di rumah pada saat petugas datang untuk memberikan pelayanan PKB, padahal sebelumnya sudah dilakukan pemberitahuan sehari sebelumnya. Hal ini menyebabkan capaian pemeriksaan kebuntingan masih minim.
   - Produktivitas ternak sapi Bali di sebagian wilayah Kabupaten Barito Kuala masih relatif kurang baik, karena belum sepenuhnya menerapkan tata laksana pemeliharaan yang benar.
   - Secara umum, sebetulnya masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan sentra perbibitan ternak sapi telah memahami teknis pemeliharaan sapi potong, namun dalam tataran pelaksanaan sebagian besar belum mampu menjadikan usaha perbibitan ternak sapi tersebut sebagai suatu usaha yang berkelanjutan dengan tata laksana berbasis agribisnis

- Kemampuan pelaku usaha/kelompok tani ternak dalam mengakses permodalan dan membangun jaringan pemasaran masih menjadi kendala utama karena keterbatasan SDM dan pola pikir anggota kelompok/peternak atau pelaku usaha yang pragmatis sehingga diperlukan kesadaran pelaku usaha/kelompok dalam merubah pola pikir untuk membangun kemandirian kelompok dalam mengembangkan usaha peternakan yang lebih baik dan berdaya saing
- Unit pengolahan hasil peternakan kurang berkembang karena tingkat pemahaman masyarakat terkait peningkatan nilai tambah produk peternakan belum optimal
- Terbatasnya tenaga medik veteriner dan paramedik veteriner menyebabkan sebagian kegiatan masih harus dirangkap oleh pejabat structural
- Kurangnya kesadarannya petani ternak untuk melaporkan lalu lintas ternaknya
- Kepedulian terhadap pelaksanaan Biosecurity masih kurang
- Belum beroperasional secara maksimal Pos Pantau lalu lintas ternak (check Point) milik Kabupaten Barito Kuala, sehingga keluar masuknya ternak di Wilayah Kabupaten Barito Kuala banyak yang tidak terdata dan terkontrol semaksimal mungkin.
- Belum adanya petugas lalu lintas ternak pada Seksi Kesmavet, sehingga hanya dilaksanakan oleh Petugas Puskeswan dan dari Bidang Keswan dan Kesmavet yang turun untuk mencari data dan melaksanakan desinfeksi terhadap ternak yang baru masuk dan peredaran pangan asal hewan sehingga tidak optimalnya kinerja.
- Kurangnya kesadaran para pedagang untuk melaporkan keluar masuk membawa ternak ke wilayah Barito Kuala atau sebaliknya, sehingga masih banyak ternak dan produk asal hewan yang belum tercatat dengan baik
- Untuk Kegiatan Pelatihan Sertifikasi ISPO pekebun belum bisa dilaksanakan pada tahun 2025 karena untuk pelaksanaan pelatihan harus melewati lembaga pelatihan

11) Dinas Komunikasi dan Informatika

- Kurang maksimalnya serapan perjalanan dinas dalam kota untuk peliputan karena disesuaikan dengan peraturan terbaru perjalanan dinas dalam kota, untuk belanja honorarium tenaga administrasi kantor anggarannya tidak bisa diubah pada anggaran pergeseran maupun anggaran perubahan sehingga menjadi silva anggaran diakhir tahun
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola TIK yang belum memiliki kompetensi khusus di bidang DNS, keamanan domain dan pengelolaan hosting.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten yaitu Terbatasnya jumlah tenaga ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mendukung tugas penyelenggaraan SPBE dalam mengelola kebijakan dan infrastruktur TI pemerintah.
- Keterbatasan kapasitas server dan perangkat keras yang tidak memadai untuk menangani beban data yang terus bertambah dan Infrastruktur jaringan yang lambat atau tidak stabil, terutama di daerah terpencil.
- Aplikasi rentan terhadap serangan siber atau kebocoran data karena kurangnya fitur keamanan.
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia pada bidang Statistik
- Admin data SKPD berganti setiap tahun, sehingga sedikit kesulitan untuk pendataan kegiatan

pengolahan data sektoral yang ada di SKPD

- Masalah keamanan seringkali kurang mendapatkan perhatian bahkan kadang berada di urutan paling akhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Jika tidak menggangu performa sistem, maka masalah keamanan sistem seringkali tidak begitu diutamakan. Keberadaan internet telah menciptakan suatu revolusi tersendiri di berbagai sektor, Para pengguna internet semakin lama semakin meningkat jumlahnya. dan saat ini internet menjadi kebutuhan pokok sebagaimana peran telekomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. faktor resiko terbesar adalah terjadinya insiden keamanan siber yang tidak diinginkan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja

12) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

- Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus / Pengelola Koperasi relatif masih rendah dan sering terjadi pergantian, karena habis masa jabatan
- Kesadaran Anggota Koperasi untuk berpartisifasi terhadap kegiatan Koperasi masih rendah terutama dalam upaya pemupukan modal sendiri.
- Tidak adanya anggaran sosialasi kepada pedagang pasar, sehingga menyebabkan pedagang kurang mentaati peraturan yang berlaku
- Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu distribusi LPG 3 kg dan barang tidak standar (kadaluarsa)
- Belum tersediannya gudang/tempat khusus penyimpanan Alat standar kemetrologian
- Masih belum bisa menabah ruang lingkup pelayanan Tera/Tera Ulang untuk timbangan jembatan
- Fasilitas penunjang SRG masih belum lengkap.
- Keterampilan dan Kreatifitas Pelaku IKM yang masih rendah
- Pemasaran produk IKM masih terbatas
- Minimnya Anggaran Pemantauan dan Pengawasan terhadap perusahaan Industri
- Minimnya Anggaran Pemantauan dan Pengawasan terhadap perusahaan Industri
- Belum tersediannya gudang/tempat khusus penyimpanan Alat standar kemetrologian
- Masih belum bisa menabah ruang lingkup pelayanan Tera/Tera Ulang untuk timbangan jembatan

13) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Tahapan pekerjaan di Triwulan I masih dalam proses pengumpulan data dan survei lokasi sehingga progres fisik masih belum berjalan
- Penyerapan anggaran sampai pada ahkir Desember 2025 ini tidak maksimal karena ada 3 paket pakerjaan dengan nilai Rp. 4.200.000.000,- yang tidak dapat dilaksanakan, di sebabkan karena waktu yang tersedia tidak memungkinkan untuk dilaksanakan tender
- Kegiatan Konsultan Pembuatan Masterplan dan DED TPU Tarutan Kecamatan Marabahan dan Konsultan Pembuatan Masterplan dan DED TPU Kecamatan Wanaraya tidak terlaksana karena kendala pada tahap persiapan, khususnya belum lengkapnya data dan kejelasan status lahan, sehingga pelaksanaan tidak memungkinkan dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
- Proses sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU belum berjalan optimal karena keterbatasan kegiatan sosialisasi yang terjadwal, serta belum tersedianya pedoman

teknis yang mudah diakses dan dipahami secara menyeluruh.

- Beberapa paket fisik pekerjaan menjadi SILPA karena kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, antara lain akibat kendala teknis dan administratif, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta penyesuaian prioritas program, sehingga anggaran tidak terserap pada tahun berjalan.
- Pelaksanaan verifikasi dan penyerahan PSU perumahan dari pengembang masih menghadapi kendala berupa ketidaksiapan dokumen administrasi dan teknis, ketidaksesuaian kondisi fisik PSU dengan ketentuan yang berlaku, serta keterbatasan koordinasi antara pengembang dan pemerintah daerah sehingga proses verifikasi dan penyerahan belum dapat dilaksanakan secara optimal
- Penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan dan ketidaksinkronan data kepemilikan tanah, perbedaan persepsi kriteria penerima santunan, serta proses verifikasi lapangan yang memerlukan waktu cukup panjang akibat kondisi geografis dan administrasi yang beragam di setiap wilayah
- Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah belum berjalan optimal akibat perbedaan pemahaman regulasi antar perangkat daerah, keterbatasan data pertanahan yang terintegrasi, serta kurangnya forum koordinasi yang rutin antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat terdampak, sehingga berpotensi memperlambat pelaksanaan pembangunan.
- Penyelesaian santunan tanah musnah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan data dan bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, perbedaan persepsi dalam penetapan kriteria tanah musnah, serta proses verifikasi dan penilaian yang memerlukan waktu cukup lama, sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian santunan dan pelaksanaan pembangunan.

14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- Masih banyaknya arsip yang belum dikelola dengan baik di SKPD
- SDM Arsiparis masih banyak belum mengerti tentang pengelolaan arsip
- Kurangnya perhatian SKPD terhadap pentingnya arsip
- Kurangnya sarana dan prasarana
- Kurangnya anggaran SKPD untuk menata arsip
- Nilai Pengawasan Kearsipan Internal SKPD Rendah
- SKPD belum bisa memberikan data sesuai form isian pengawasan kearsipan
- Pengelolaan arsip statis SKPD masih belum maksimal
- SKPD masih banyak belum melakukan penyusutan arsip/pemusnahan arsip
- Kurang nya SKPD dalam penyusutan arsip/ pemusnahan sehingga menyulitkan Lembaga kearsipan dalam mencari data arsip statis.
- Seringnya gangguan pada aplikasi SIKN dan JIKN sehingga menghambat dalam input data arsip statis.
- Belum ada kesempatan arsiparis untuk mengikuti pelatihan di Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Arsiparis / pengelola kearsipan yang ada di lembaga kearsipan maupun di SKPD

pendidikannya bukan berlatar belakang kearsipan.

- Banyaknya arsip pembubaran dan penggabungan SKPD belum di tata pada SKPD yang bersangkutan.
- Masih Banyak SKPD Belum Melakukan Penyusutan/ pemusnahan, dikhawatirkan arsip hilang/rusak
- Banyaknya arsip yang kena bencana di Kecamatan/Desa belum dilaporkan ke Lembaga kearsipan daerah.
- Kegiatan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah belum semua sekolah memahami dan menerapkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) secara menyeluruh
- Belum optimalnya tenaga perpustakaan atau pengelola perpustakaan di sekolah/desa/kelurahan dalam melengkapi data

15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Pengolahan data sebagian masih secara manual
- Jaringan internet yang belum maksimal
- Pelaku usaha yang melakukaan proses perijinaan terkadang tidak memiliki fasilitas alat telekomunikasi

16) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Kondisi pasang surut pada sebagian sungai menyebabkan normalisasi terhambat akibat banjir pada saat air pasang
- Kondisi sebagian lokasi pekerjaan yang sulit diakses pada saat musim hujan
- Kondisi geografis Barito Kuala yang mayoritas tanah rawa menyebabkan biaya pembangunan yang lebih besar
- Proses rehabilitasi saluran terhambat akibat masa tanam padi oleh para petani (Menunggu waktu tanam selesai)
- Drainase eksisting berupa saluran sehingga masih 2 arah, perlu perencanan untuk drainase perkotaan yang 1 arah
- Kurangnya kualitas air baku di Barito Kuala menyebabkan pengolahan air minum menjadi lebih sulit
- Kesadaran masyarakat akan sanitasi yang sesuai standar masih kurang
- Masih banyak masyarakat yang tidak melakukan proses perizinan dalam pemanfaatan ruang

17) Satuan Polisi Pamong Praja

- Terjadinya perubahan jadwal kegiatan pimpinan yang tidak diinformasikan ke Satpol PP dan masalah lainnya, kemudian terjadi alih fungsi anggota Satpol PP dan terjadinya keterlambatan Satpol PP di tempat acara karena sarna dan prasaran tidak mendukung dan sudah terealisasi
- Permasalahanan dilapangan banyak Lapak PKL yang sudah dilakukan penertiban tetapi kembali lagi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dan tidak adanya tempat relokasi yang memadai untuk menampung PKL serta mengakibatkan terjadinya kemacetan yang mengganggu pengguna jalan kurangnya peran

serta SKPD terkait.

- Permasalahan yang dihadapi yaitu tidak semua Desa se Kabupaten Barito Kuala memiliki Satlinmas Desa ada beberapa Desa sudah membentuk Satlinmas Desa tetapi belum dibuatkan SK Satlinmas oleh Kepala Desa
- Permasalahan dalam hal pengawasan dan pembinaan terdapat banyaknya bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan melanggar Peraturan Daerah mengenai letak bangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah

18) Kecamatan Alalak

- Kegiatan SKM dilaksanakan pada triwulan ke 4 (empat) sehingga memperlambat dalam pencapaian realisasi.
- Kegiatan musrenbang desa telah dilaksanakan ditingkat kabupaten sehingga tidak anggarannya tidak terealisasi
- Permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan Laporan Akhir Tahun tersebut terkait dengan data yang lambat disampaikan baik kecamatan maupun kelurahan

19) Kecamatan Anjir Pasar

- Perpanjangan pajak Kendaraan dinas biasanya mengalami keterlambatan dalam pembayaran di Marabahan karena pemilik kendaraan sering lupa dalam melaksanakan pembayaran sehingga terkena denda. Selain itu, kendaraan dinas tidak dalam kondisi prima karena pemilik motor dinas tidak melaksanakan servis berkala

20) Kecamatan Barambai

- Perpanjangan pajak Kendaraan dinas biasanya mengalami keterlambatan dalam pembayaran di Marabahan karena pemilik kendaraan sering lupa dalam melaksanakan pembayaran sehingga terkena denda. Selain itu, kendaraan dinas tidak dalam kondisi prima karena pemilik motor dinas tidak melaksanakan servis berkala
- Kuesioner yang diterima dari desa sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian
- Kurangnya Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Barambai sehingga banyak tugas yang di rangkap oleh ASN yang lain.

21) Kecamatan Jejangkit

- Untuk Kegiatan atau Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat masih belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam tahap pengurusan dengan pihak terkait.

22) Kecamatan Tabunganen

- Alat tulis kantor terkendala dalam pembelian karena pedagang alat tulis kantor yang berada disekitar kantor kecamatan terbatas dan jumlahnya sedikit untuk alat tulis yang dijual sehingga menyulitkan alat tulis kantor dalam jumlah maksimal sehingga harus mencari ke kecamatan lain

C) Tindak Lanjut

Berdasar faktor penghambat dan faktor lainnya yang telah dijelaskan pada point sebelumnya, maka dapat diambil beberapa tindak lanjut yang dapat dipertimbangkan, diantaranya:

a. Mempertahankan capaian fisik rata-rata Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang sudah bagus, dan untuk SKPD yang masih dibawah target untuk semakin memperkuat evaluasi, koordinasi,

dan konsolidasi internal organisasi untuk mencapai targetnya;

b. Perlunya perhatian kelola keuangan khusus untuk SKPD yang capaiannya terbilang rendah (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (49,38%), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (68,8%), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (73,11%)), baik dari segi perencanaan anggaran, proses, hingga eksekusi akhir;
c. Rekomendasi tindak lanjut untuk beberapa faktor penghambat umum yang ditemui diantaranya:
d. Perlunya perencanaan yang lebih matang dalam menentukan arus kas, dan juga perlunya pengaturan arus kas yang fleksibel dari pimpinan jika sewaktu terjadi perubahan rencana tidak terduga;
e. Perlunya penambahan SDM di beberapa SKPD yang tentunya juga diiringi dengan SKPD yang harus segera mengusulkan keperluan penambahan SDM di SKPD nya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing jabatan yang diusulkan;
f. Perlunya peremajaan maupun penggantian sarana prasarana pendukung kegiatan SKPD disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, dan dapat diusulkan penambahan jika memang dirasa sangat mendesak dengan berkonsultasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait Aset SKPD/Kecamatan.
g. Kendala teknis yang ditemui dilapangan agar menjadi prioritas untuk diperbaiki ataupun dicarikan solusi alternatifnya agar kegiatan tetap dapat terlaksana sesuai jadwal dan target.
h. Perlunya bimtek dan penguatan kapasitas berkala untuk Pengelola Administrasi Keuangan terutama untuk menyesuaikan dengan Aplikasi Terbaru maupun Peraturan Mengenai Administrasi Keuangan yang Terbaru.
i. Perlunya meningkatkan koordinasi antar stakeholder, terutama kepada Pimpinan Daerah melalui Protokol Forkopimda, agar kegiatan terutama yang akan melibatkan Kepala Daerah dapat terlaksana dengan selancar dan semaksimal mungkin.

2.3 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibagi menjadi 6 (Enam) urusan, yaitu:

1) Urusan Pendidikan

SPM urusan Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah kabupaten terdiri atas:

- Pendidikan anak usia dini;
- Pendidikan dasar; dan
- Pendidikan kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis PelayananDasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;

- Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
- Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Berikut adalah capaian SPM Pendidikan, selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2023-2025) seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.83 Capaian SPM Bidang Pendidikan Barito Kuala 2023-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	94,49%	100%	93,22%	100%	99,83%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	97,9%	100%	97,21%	100%	99,37%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam	100%	87,79%	100%	88,16%	100%	99,54%

		pendidikan kesataraan						

Sumber: Laporan Penerapan Standar Peayanan Minimal (SPM) Kab. Barito Kuala 2023-2025

Pada tabel di atas, pada capaian SPM Pendidikan Usia Dini dan Dasar sempat mengalami penurunan dari tahun ke 2023 menuju 2024, namun naik kembali di 2025. Sementara capaian pelayanan dasar pendidikan kesetaraan selalu mengalami kenaikan yang siginifikan tiap tahunnya.

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayananan minimal pendidikan beserta solusi yang diusulkan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.84 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan Barito Kuala

No	Permasalahan	Solusi
1	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini sehingga masih ditemukannya anak usia 5-6 tahun yang belum bersekolah di PAUD	Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada masyarakat
2	Belum terdatanya siswa usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah diluar Kabupaten Barito Kuala	Peningkatan kualitas sarpras, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3	Belum terdatanya siswa yang bersekolah di Pondok Pesantren Salafiyah (Pondok Pesantren yang tidak terdata di EMIS)	Koordinasi dengan Satuan Pendidikan yang menaungi Pondok Pesantren mengenai jumlah siswa yang bersekolah di Pondok Pesantren Salafiyah
4	Keterbatasan anggaran baik untuk pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan pemenuhan pemberian layanan peserta didik	Peningkatan Anggaran baik untuk pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan pemenuhan pemberian layanan peserta didik
5	SDM yang terbatas dalam pendataan ATS	Melibatkan SDM berdasarkan kebutuhan dalam pendataan Anak Tidak Sekolah
6	Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang masih belum merata di seluruh kecamatan	Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar berdasarkan kebutuhan

7	Masih ditemukannya Penduduk yang tidak melakukan cabut berkas Kependudukan pada saat pindah domisili	Melakukan koordinasi dengan Disdukcapil terkait Penduduk yang tidak melakukan cabut berkas pada saat pindah domisili
8	Masih ditemukannya Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7-12 tahun dengan berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi, pernikahan dini, disabilitas	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

Sumber: Laporan Penerapan Standar Peayanan Minimal (SPM) Kab. Barito Kuala 2023-2025

2) Urusan Kesehatan

SPM urusan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten terdiri atas:

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan balita
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Pelayanan pada usia lanjut
- Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi
- Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*, yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif)

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- Ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
- Ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- Bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- Balita untuk Jenis Peiayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
- Usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- Usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- Usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

- Penderita hipertensi untuk Jenis Peiayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- Penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- Orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- Orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia Human Immunodeficiency Virus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Berikut adalah capaian SPM Kesehatan, selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2023-2025) seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.85 Capaian SPM Bidang Kesehatan Barito Kuala 2023-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	72,09%	100%	69,39%	100%	99,89%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100%	78,03%	100%	69,29%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	88,6%	100%	76,3%	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	83,54%	100%	83,94%	100%	97,94%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	93,63%	100%	97,02%	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	84,04%	100%	89,24%	100%	94,32%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	74,02%	100%	91,75%	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	61,78%	100%	100%	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		sesuai standar						
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	96,74%	100%	100%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	86,36%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Penerapan Standar Peayanan Minimal (SPM) Kab. Barito Kuala 2023-2025

Pada tabel di atas, rata-rata capaian Pelayanan Dasar SPM Kesehatan mengalami dinamika naik-turun pada capaiannya, terkecuali pada Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang konsisten selama tiga tahun terakhir selalu mencapai target atau 100%.

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayananan minimal urusan bidang kesehatan beserta solusi yang diusulkan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.86 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan Barito Kuala

No	Permasalahan	Solusi
1	Keterbatasan SDM kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas	Peningkatan kapasitas SDM kesehatan Melalui pelatihan dan pembinaan teknis secara berkala bagi tenaga kesehatan, kader, serta pengelola

No	Permasalahan	Solusi
		program untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan.
2	Beberapa sarpras pelayanan kondisinya masih kurang memadai yang berdampak pada ketidakpuasan masyarakat dan rendahnya pemanfaatan layanan	Pemenuhan dan optimalisasi Sarpras kesehatan melalui Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan guna mendukung pelaksanaan sesuai standar
3	Cakupan wilayah layanan yang luas dengan jumlah petugas yang terbatas	Peningkatan kapasitas SDM kesehatan Melalui pelatihan dan pembinaan teknis secara berkala bagi tenaga kesehatan, kader, serta pengelola program untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan.
4	Sistem informasi kesehatan belum optimal (data tidak terintegrasi)	Perhitungan Anggaran menggunakan aplikasi Sistem Costing Biaya Kesehatan (SISCOBIKES) untuk efisiensi anggaran
5	Kurangnya pelatihan neonatal untuk bidan dan kehadiran bidan desa di wilayah tugas belum optimal.	1. Peningkatan Kunjungan Nifas dan Neonatal dengan melakukan kunjungan rumah (home visit) aktif oleh bidan desa/perawat untuk memastikan bayi baru lahir (0-28 hari) mendapatkan pelayanan sesuai standar, terutama didaerah terpencil. Peningkatan Kompetensi Nakes: Pelatihan berkala bagi bidan dan perawat terkait penanganan neonatal (KN) dan nifas, serta supervisi fasilitatif secara rutin dari Dinas Kesehatan.
6	Fasilitas pelayanan PONED belum optimal, peralatan medis terbatas, dan kurangnya kalibrasi alat.	Penguatan Puskesmas PONED: Mengoptimalkan fungsi Puskesmas Mampu PONED (Pelayanan Obstetri

No	Permasalahan	Solusi
		Neonatal Emergensi Dasar) untuk menangani kasus risiko tinggi sebelum dirujuk ke RS
7	Masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap praktik persalinan tradisional (dukun bayi) dibandingkan dengan tenaga kesehatan	Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat: Mengaktifkan kembali Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita untuk meningkatkan pemahaman keluarga akan pentingnya pemeriksaan pascapersalinan
8	Aksesibilitas pelayanan kesehatan masih menjadi kendala signifikan akibat jarak tempuh yang relatif jauh, kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai, serta keterbatasan sarana transportasi, khususnya bagi ibu bersalin, sehingga berpotensi menghambat pemanfaatan layanan secara tepat waktu	Penyediaan Sarana/Prasarana yang menunjang pelayanan
9	Keterbatasan jumlah dan kompetensi kader, tingginya beban kerja tenaga kesehatan disertai minimnya pelatihan, serta belum optimalnya kehadiran petugas di tempat tugas	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan: Memberikan pelatihan rutin bagi bidan/perawat terkait manajemen tumbuh kembang balita, deteksi dini (SDIDTK), dan pelaporan sesuai SOP untuk mengurangi kelemahan teknis.
10	Alat deteksi dini tumbuh kembang (DDTK) belum lengkap, metode pelayanan masih terbatas dan kurang interaktif, serta pencatatan dan pelaporan data belum terdokumentasi secara optimal.	Penguatan Sistem Rujukan dan Fasilitas kesehatan sesuai standar, dan Peningkatan Data serta Pemetaan Sasaran
11	Pengetahuan orang tua mengenai pentingnya pemantauan gizi dan perkembangan balita masih terbatas	Koordinasi lintas sektor dilakukan dengan

No	Permasalahan	Solusi
		melibatkan aparat desa dan kecamatan dalam mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi di Posyandu, serta pelaksanaan edukasi gizi untuk menanggulangi permasalahan gizi masyarakat
12	Keterbatasan jumlah tenaga medis yang terlatih disertai beban kerja ganda menyebabkan pelaksanaan skrining kesehatan tidak merata	Pelatihan Kader Kesehatan Sekolah: Melatih guru atau siswa (Dokter Kecil) untuk membantu pemeriksaan kesehatan dasar (seperti pengukuran TB/BB) guna mengatasi kekurangan SDM Puskesmas.
13	Ketersediaan alat kesehatan untuk pemeriksaan, seperti Snellen chart dan alat ukur TB/BB, masih belum lengkap atau sudah usang	Optimalisasi UKS/UKS: Mengaktifkan kembali Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai ujung tombak. Puskesmas bertindak sebagai pembina dalam penjaringan, pemeriksaan berkala, dan imunisasi
14	Kurangnya komitmen pihak sekolah dalam mendukung kegiatan penjaringan kesehatan dan penyediaan data siswa	Melaksanakan skrining proaktif melalui kunjungan rutin ke sekolah guna menjangkau anak yang kesulitan mengakses Puskesmas, dan Membangun kemitraan dengan guru dan kepala sekolah untuk mendukung skrining dan pelaporan
15	Perubahan target sasaran di pertengahan tahun dan rendahnya literasi digital berdampak pada ketidakoptimalan pelaporan berbasis elektronik	Perencanaan Anggaran Terintegrasi: Memastikan anggaran SPM tercantum dalam dokumen perencanaan Puskesmas (RUK/RPK) dan didukung komitmen anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD), dilanjutkan Pemantauan Berkala: Melaksanakan evaluasi tahunan SPM beserta

No	Permasalahan	Solusi
		pemantauan kinerja bulanan untuk identifikasi hambatan secara tepat waktu.
16	Akses menuju sekolah-sekolah di wilayah terpencil masih terbatas, mempengaruhi efektivitas pelaksanaan skrining kesehatan	Penyediaan Sarana/Prasarana yang menunjang pelayanan
17	Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya skrining kesehatan menyebabkan sebagian warga enggan mengikuti pemeriksaan karena merasa sehat. Selain itu, muncul ketakutan terhadap hasil diagnosis penyakit, seperti diabetes atau hipertensi. Kendala waktu dan jarak juga menjadi hambatan, mengingat kesibukan bekerja serta lokasi Puskesmas atau Posbindu PTM yang relatif jauh	Peningkatan Cakupan & Akses (Skrining Aktif): menggencarkan program CKG di desa, melakukan jemput bola/skrining aktif di tempat keramaian atau rumah warga, dan mengintegrasikan skrining kesehatandengan pelayanan lain (KIA, KB, Keswa, dan Kesja).
18	Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan serta adanya petugas yang merangkap tugas lain berdampak pada efektivitas pelayanan. Selain itu, sarana dan logistik, termasuk alat pemeriksaan seperti tensimeter, alat cek gula darah, stik, serta bahan habis pakai, masih terbatas. Kemampuan teknis petugas juga perlu ditingkatkan.	Penguatan Sarana & SDM: Pelatihan teknis skrining PTM bagi petugas Puskesmas dan kader, serta Pemenuhan kit Posbindu (alat ukur TB/BB, tensi, gula darah, kolesterol).
19	Permasalahan terkait data dan pelaporan masih ditemukan, antara lain duplikasi data, kegiatan yang tumpang tindih, serta prosedur pelaporan yang kompleks. Kondisi geografis wilayah, seperti	Monitoring & Evaluasi: Peningkatan koordinasi dan monev berkala dengan jaringan Puskesmas dan Optimalisasi pencatatan dan pelaporan berbasis web

No	Permasalahan	Solusi
	daerah rawa atau terpencil, turut membatasi jangkauan pelayanan. Selain itu, koordinasi lintas sektor belum optimal dalam menggerakkan partisipasi masyarakat	
20	Keterbatasan mobilitas dan tingginya sindrom geriatri (demensia, inkontinensia, gangguan keseimbangan) mempersulit akses ke pelayanan	Solusi Operasional & Layanan (Peningkatan Akses) mulai dari Puskesmas Keliling dan Posyandu Lansia Aktif, Home Care/Kunjungan Rumah, Integrasi Layanan, dan Inovasi "Jemput Bola
21	Rendahnya kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam menjalani kontrol rutin	Solusi Edukasi & Penggerakan Masyarakat mulai dari Konseling Kelompok (Pendekatan Psikososial), Penyuluhan Berbasis Keluarga, hingga Refreshing Kader Lansia
22	Terdapat kekurangan tenaga kesehatan yang terlatih, keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk alat cek gula darah dan perlengkapan Posbindu. Selain itu, edukasi proaktif kepada masyarakat masih minim, sehingga kesadaran masyarakat dalam melakukan deteksi dini juga tergolong rendah.	Solusi Manajemen & Sumber Daya, mulai dari Perbaikan Logistik dan Administrasi, Penggunaan Dana BOK (Biaya Operasional Kesehatan) hingga Penguatan Peran Kader

Sumber: Laporan Penerapan Standar Peayanan Minimal (SPM) Kab. Barito Kuala 2023-2025

3) Urusan Pekerjaan Umum

SPM urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala. Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum merupakan penjabaran dari Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota yang berada di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten terdiri atas:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Berikut adalah capaian SPM Pekerjaan Umum, selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2023-2025) seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.87 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Barito Kuala 2023-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Peneydiaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Penerapan Standar Peayanan Minimal (SPM) Kab. Barito Kuala 2023-2025

Pada tabel di atas, rata-rata capaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum pada kedua pelayanan dasarnya selalu mencapai target yang dtetapkan selama tiga tahun terakhir. Namun dalam pencapaian target tersebut, tentu saja beberapa permasalahan telah ditemui dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayananan minimal bidang urusan pekerjaan umum beserta solusi yang diusulkan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.88 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum Barito Kuala

No	Permasalahan	Solusi
1	Demografi penduduk di Kabupaten Barito Kuala yang tersebar dengan jarak antarpemukiman yang berjauhan menyebabkan perencanaan penyediaan akses air minum memerlukan investasi yang besar,	Mengintensifkan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai penerapan pola hidup bersih dan sehat, khususnya

No	Permasalahan	Solusi
	khususnya untuk pembangunan jaringan perpipaan	dalam penggunaan air bersih serta sanitasi yang layak.
2	Sebagian masyarakat memiliki pola pikir dan budaya yang pada umumnya masih bergantung pada sungai sebagai pusat aktivitas rumah tangga, khususnya untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK).	Mengintensifkan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai penerapan pola hidup bersih dan sehat, khususnya dalam penggunaan air bersih serta sanitasi yang layak.
3	Keterbatasan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun ini mengakibatkan Kabupaten Barito Kuala tidak memperoleh DAK untuk sektor air minum, maupun sanitasi	Mengalokasikan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menyebabkan intervensi hanya dapat difokuskan pada wilayah prioritas. Strategi lainnya adalah mengupayakan alternatif sumber pendanaan lainnya, antara lain melalui dukungan dari Pemerintah Provinsi maupun pihak swasta.

Sumber: Laporan Penerapan Standar Peayanan Minimal (SPM) Kab. Barito Kuala 2023-2025

4) Urusan Perumahan Rakyat

SPM urusan perumahan rakyat di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Berikut adalah capaian SPM Urusan Bidang Perumahan Rakyat, selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2023-2025) seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.89 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Barito Kuala 2023-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Penerapan Standar Peayanan Minimal (SPM) Kab. Barito Kuala 2023-2025

Pada tabel di atas, rata-rata capaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat pada kedua pelayanan dasarnya selalu mencapai target yang dtetapkan selama tiga tahun terakhir. Namun dalam pencapaian target tersebut, tentu saja beberapa permasalahan telah ditemui dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayananan minimal bidang urusan pekerjaan umum beserta solusi yang diusulkan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.90 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum Barito Kuala

No	Permasalahan	Solusi
1	Keterbatasan jumlah tenaga tukang berdampak pada lambatnya progres	Mengupayakan penambahan tenaga

	pembangunan fisik rumah rehabilitasi bagi korban bencana yang menerima bantuan	kerja dengan mendatangkan tukang dari luar daerah guna memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kerja.
2	Kesulitan dalam memperoleh lahan pengganti bagi masyarakat yang terdampak relokasi	1. Melakukan pendataan calon penerima bantuan yang memiliki lahan siap bangun; dan 2. Melaksanakan identifikasi lahanlahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan menggunakan Jasa Konsultan

Sumber: Laporan Penerapan Standar Peayanan Minimal (SPM) Kab. Barito Kuala 2023-2025

5) Urusan Ketentraman Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah kabupaten terdiri atas:

- Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pelayanan informasi rawan bencana;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayananinformasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Berikut adalah capaian SPM Urusan Bidang Perumahan Rakyat, selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2023-2025) seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.91 Capaian SPM Bidang Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Barito Kuala 2023-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	96,67%	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	75,85%	100%	100%	100%	89,33%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	78,48%	100%	100%	100%	61,46%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	99,17%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Penerapan Standar Peayanan Minimal (SPM) Kab. Barito Kuala 2023-2025

Pada tabel di atas, rata-rata capaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada keempat pelayanan dasarnya mengalami dinamika naik-turun capaian selama tiga tahun terakhir, terkecuali untuk Pelayanan Dasar Kebakaran yang selalu konsisten selama tiga tahun terakhir selalu mencapai targetnya. Dinamika pencapaian SPM ini dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yang telah ditemui dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayananan minimal pada bidang ini, beserta solusi yang diusulkan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.92 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Barito Kuala

No	Permasalahan	Solusi
1	Personil lapangan yang minim/terbatas	Penambahan personil untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan
2	Kurangnya Kapasitas Aparatur yang bertugas	Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan simulasi kegiatan bagi aparatur pemerintah, relawan, dan masyarakat.
3	Ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan Trantibumlinmas masih terbatas,	Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya kegiatan pelayanan Trantibumlinmas
4	Walaupun telah dilaksanakan sosialisasi, patroli, dan penertiban secara rutin, namun masih ada ditemukannya pedagang kaki lima yang beraktivitas di sepanjang Jalur Hijau. Kebanyakan pedagang yang berjualan bukan berasal dari Kabupaten Barito Kuala	1. Telah dilakukan penertiban terhadap PKL yang masih berjualan di sepanjang jalur hijau untuk tidak berjualan kembali 2. Meningkatkan pelaksanaan Sosialisasi terhadap Perda No 6 Tahun 2019 3. Diperlukan penyediaan lokasi relokasi yang memadai bagi pedagang yang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5	Belum optimalnya komunikasi, penyebaran informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana masih rendah, terutama di wilayah rawan bencana.	Meningkatkan kegiatan sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
6	Data dan pemetaan wilayah rawan bencana belum sepenuhnya diperbarui secara berkala	Memperbarui data dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkala sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan
7	Minimnya penyediaan anggaran pada kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban baik di darat maupun di perairan, serta pelatihan manajemenlogistik pada situasi darurat bencana
8	Sulitnya medan menuju lokasi bencana serta sulitnya jaringan komunikasi	Menyediakan akses menuju lokasi darat melalui koordinasi dan kerja sama dengan DPUPR, serta untuk lokasi terdampak bencana banjir, pelaksanaan

		akses dilakukan melalui koordinasi dengan Polair, Balai Wilayah Sungai (BWS), dan Basarnas
9	Kurangnya pengenalan jalur evakuasi darurat kepada masyarakat	Melakukan sosialisasi jalur evakuasi secara langsung atau lewat media komunikasi lainnya

Sumber: Laporan Penerapan Standar Peayanan Minimal (SPM) Kab. Barito Kuala 2023-2025

6) Urusan Sosial

SPM urusan Sosial di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten terdiri atas:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Berikut adalah capaian SPM Urusan Bidang Perumahan Rakyat, selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2023-2025) seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.93 Capaian SPM Bidang Sosial di Barito Kuala 2023-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2023		2024		2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		rehabilitasi sosial diluar panti						
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Penerapan Standar Peayanan Minimal (SPM) Kab. Barito Kuala 2023-2025

Pada tabel di atas, rata-rata capaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial pada kelima pelayanan dasarnya selalu mencapai target yang dtetapkan selama tiga tahun terakhir. Namun dalam pencapaian target tersebut, tentu saja beberapa permasalahan telah ditemui dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayananan minimal bidang urusan pekerjaan umum beserta solusi yang diusulkan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.94 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Sosial di Barito Kuala

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih banyak penyandang disabilitas terlantar yang belum terdata secara akurat, keterbatasan anggaran dan SDM dalam melakukan pendampingan serta minimnya alat bantu bagi penyandang disabilitas.	Melakukan pendataan dan verifikasi secara berkala melalui koordinasi dengan kecamatan dan desa/kelurahan, mengusulkan bantuan alat bantu dan program ATENSI ke Kementerian Sosial, serta meningkatkan peran pekerja sosial dan relawan sosial dalam pendampingan.
2	Masih ditemukan anak terlantar yang belum mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, kurangnya pengawasan keluarga, serta terbatasnya program pembinaan dan pendampingan bagi anak.	Meningkatkan koordinasi dengan perangkat desa, sekolah dan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), melakukan asesmen dan pendampingan, serta mengusulkan bantuan sosial dan program pembinaan dari pemerintah pusat maupun daerah.
3	Sebagian lansia terlantar belum mendapatkan pelayanan dasar secara optimal karena keterbatasan data, minimnya dukungan keluarga serta keterbatasan anggaran untuk pelayanan lansia.	Melakukan pendataan lansia terlantar secara berkala, memberikan bantuan sosial dan layanan dasar melalui program pemerintah, serta menjalin kerja sama dengan panti sosial, lembaga sosial dan relawan dalam pendampingan lansia
4	Masih terdapat gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di wilayah	Melakukan penjangkauan dan pembinaan bersama Satpol PP dan instansi terkait, memberikan layanan rehabilitasi sosial dan pelatihan

No	Permasalahan	Solusi
	kabupaten/kota, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberi di jalan serta keterbatasan sarana penanganan	keterampilan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyalurkan bantuan melalui lembaga resmi.
5	Keterbatasan logistik dan sumber daya dalam penanganan korban bencana, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal pada saat tanggap darurat dan paska bencana	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPBD, Tagana dan lembaga sosial, menyiapkan logistik bencana secara memadai, serta melakukan pendataan korban bencana secara cepat untuk penyaluran bantuan sosial.

Sumber: Laporan Penerapan Standar Peayanan Minimal (SPM) Kab. Barito Kuala 2023-2025

2.3.1 Capaian Pelaksanaan Prioritas Nasional (PRO-SN)

Pelaksanaan Prioritas Nasional (PN/PRO SN) di Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian dari upaya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam implementasinya, berbagai program pembangunan daerah telah diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuh Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam RKP. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2025, capaian pembangunan di Barito Kuala menunjukkan tren positif, meskipun masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu ditangani secara strategis.

PN 1: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Capaian:

- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 mencapai 5,27 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,01 persen.
- Pendapatan per kapita meningkat dari Rp34,29 juta pada tahun 2024 menjadi Rp36,34 juta pada tahun 2025.
- Tingkat kemiskinan menurun dari 4,36 persen menjadi 4,31 persen.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 3,41 persen menjadi 3,23 persen.
- Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) membaik dari 0,272 menjadi 0,269.
- Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor unggulan daerah 27 persen konstribusi di PDRB.

Permasalahan:

- Ketergantungan ekonomi terhadap sektor primer masih tinggi.
- Hilirisasi produk pertanian dan perikanan belum berkembang optimal.
- Nilai tambah komoditas unggulan daerah masih rendah.
- Investasi sektor industri pengolahan masih terbatas.
- Fluktuasi harga komoditas masih memengaruhi pendapatan masyarakat.

Kondisi perekonomian Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi 5,27 persen disertai peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan angka kemiskinan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah mulai memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dominasi sektor primer menunjukkan bahwa transformasi ekonomi masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, pengembangan hilirisasi produk unggulan, peningkatan investasi, penguatan UMKM, serta pengembangan industri berbasis pertanian dan perikanan perlu terus didorong guna meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah.

PN 2: Pengembangan Wilayah dan Pemerataan Pembangunan

Capaian:

- Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi terus dilaksanakan untuk meningkatkan konektivitas wilayah.
- Pengembangan kawasan penyangga Banjarbakula mulai memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
- Infrastruktur pertanian dan kawasan produksi terus diperkuat.
- Alokasi belanja pelayanan dasar mencapai 61,66 persen dari total APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025.

Permasalahan:

- Ketimpangan pembangunan antarwilayah masih terjadi.
- Sebagian wilayah perdesaan, pesisir, dan rawa masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas.
- Konektivitas kawasan produksi belum sepenuhnya optimal.
- Biaya pembangunan infrastruktur pada wilayah rawa relatif tinggi.

Pembangunan wilayah terus menunjukkan kemajuan melalui peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Namun kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang didominasi kawasan rawa dan daerah aliran sungai menyebabkan kebutuhan pembangunan infrastruktur masih cukup besar. Oleh karena itu pembangunan wilayah perlu difokuskan pada pemerataan akses pelayanan dasar, peningkatan konektivitas kawasan produksi, dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

PN 3: Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Capaian:

- Penurunan angka kemiskinan menjadi 4,31 persen.
- Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,23 persen.
- Pertumbuhan UMKM dan ekonomi kerakyatan terus meningkat.
- Pengembangan pemasaran digital produk lokal mulai berkembang.

Permasalahan:

- Industri pengolahan masih terbatas.
- Akses pembiayaan UMKM belum optimal.
- Kompetensi kewirausahaan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
- Pemanfaatan teknologi digital dalam usaha masyarakat belum merata.

Transformasi ekonomi Kabupaten Barito Kuala menunjukkan perkembangan positif yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya angka kemiskinan serta pengangguran. Namun demikian, struktur ekonomi masih perlu diperkuat melalui pengembangan industri pengolahan, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan UMKM, dan peningkatan daya saing pelaku usaha.

PN 4: Pembangunan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Capaian:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 71,40 menjadi 72,05.
- Komponen pendidikan dan kesehatan menunjukkan tren perbaikan.
- Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah terus meningkat.
- Prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan.

Permasalahan:

- Kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan.
- Kesenjangan akses layanan pendidikan dan kesehatan antarwilayah masih terjadi.
- Keterampilan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Masih terdapat kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus.

Peningkatan IPM menjadi 72,05 menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Barito Kuala mengalami kemajuan yang cukup baik. Perbaikan indikator pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa investasi pembangunan SDM mulai memberikan hasil positif. Namun demikian, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan kompetensi tenaga kerja masih menjadi prioritas pembangunan daerah.

PN 5: Infrastruktur Berkualitas dan Berkeadilan

Capaian:

- Belanja urusan pelayanan dasar mencapai Rp1,17 triliun atau sekitar 61,66 persen dari total belanja daerah.
- Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan sarana prasarana dasar terus ditingkatkan.
- Infrastruktur pendukung sektor pertanian dan kawasan permukiman terus berkembang.

Permasalahan:

- Kebutuhan pembangunan infrastruktur masih tinggi.
- Keterbatasan fiskal daerah.
- Pemeliharaan infrastruktur belum optimal.
- Kesenjangan kualitas infrastruktur antarwilayah masih terjadi.

Infrastruktur menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat. Besarnya alokasi belanja pelayanan dasar menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Namun kebutuhan pembangunan yang masih besar menuntut inovasi pembiayaan dan peningkatan efisiensi pembangunan.

PN 6: Transformasi Digital

Capaian:

- Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus berkembang.
- Digitalisasi pelayanan publik mulai diterapkan pada berbagai perangkat daerah.
- Pengembangan Satu Data Daerah terus diperkuat.

Permasalahan:

- Infrastruktur digital belum merata.
- Literasi digital masyarakat masih rendah.
- Integrasi sistem informasi antar perangkat daerah belum optimal.

Transformasi digital menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan. Ke depan diperlukan penguatan infrastruktur digital, integrasi sistem informasi daerah, serta peningkatan kapasitas SDM agar transformasi digital dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap kualitas pelayanan publik.

PN 7: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Capaian:

- Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan tren peningkatan.

- Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terus membaik.
- Implementasi perencanaan berbasis kinerja semakin kuat.
- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah semakin terintegrasi.

Permasalahan:

- Kualitas SDM aparatur masih perlu ditingkatkan.
- Inovasi pelayanan publik belum merata.
- Integrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi masih perlu diperkuat.

Reformasi birokrasi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah. Penguatan kualitas aparatur, digitalisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta inovasi pelayanan publik menjadi agenda utama dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan PRO SN di Kabupaten Barito Kuala telah berjalan dengan arah yang tepat, namun masih memerlukan percepatan dalam transformasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Dengan strategi yang tepat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan daerah diharapkan dapat menjadi lebih efektif.

2.3.2 Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau secara internasional dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), merupakan seperangkat tujuan, target, dan indikator yang disepakati dunia di mana diharapkan dapat digunakan secara universal oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Nantinya, SDGs ini diharapkan dapat digunakan negara-negara tersebut untuk membingkai agenda dan kebijakan politik mereka selama 15 tahun ke depan. Serangkaian tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB ini bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030.

SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB yang dilaksanakan di New York, Amerika Serikat pada 25 September 2015. Hasil tersebut disetujui oleh 190 Negara dan berlaku selama 2016 hingga 2030, yaitu:

1) Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)
   Tujuan ini bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan di seluruh dunia, bukan hanya kemiskinan ekstrem, tapi juga bentuk kemiskinan lainnya yang mencakup kekurangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pendidikan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.
2) Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)
   Tujuan ini bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan

nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.

3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being*)

   Tujuan ini bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Dengan kata lain, semua orang — dari bayi sampai lansia — harus punya akses ke layanan kesehatan yang baik, terjangkau, dan berkualitas, agar bisa hidup lebih lama, sehat, dan produktif.

4) Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)

   Tujuan ini ingin menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang — tanpa memandang usia, jenis kelamin, status ekonomi, atau latar belakang.

5) Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)

   Tujuan ini ingin menghapus semua bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, serta memberdayakan mereka dalam semua aspek kehidupan — di rumah, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama.

6) Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*)

   Tujuan ini bertujuan untuk menjamin akses air bersih dan sanitasi yang aman untuk semua orang, serta mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Air bersih dan sanitasi yang layak sangat penting untuk kesehatan, kehidupan yang bermartabat, dan kelestarian lingkungan.

7) Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)

   Tujuan ini bertujuan untuk memastikan akses universal terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang. Energi sangat penting untuk kehidupan sehari-hari—untuk penerangan, memasak, bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Tapi energi juga harus ramah lingkungan, agar tidak memperburuk perubahan iklim.

8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)

   Tujuan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja yang layak bagi semua orang. Artinya, setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang aman, adil, produktif, dan memberi penghasilan yang layak, tanpa diskriminasi dan eksploitasi.

9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*)

   Tujuan ini bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan inovasi. Dengan kata lain, dunia butuh industri yang kuat, teknologi yang maju, dan infrastruktur yang modern agar bisa menciptakan lapangan kerja, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

10) Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)

    Tujuan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam dan antar negara, baik kesenjangan pendapatan, akses, kesempatan, maupun perlakuan terhadap kelompok rentan. Jadi intinya, semua orang — tanpa memandang asal-usul, status ekonomi, disabilitas, jenis kelamin, usia, atau latar belakang lainnya — punya hak dan kesempatan yang setara.

11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*)

    Tujuan ini bertujuan untuk membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tahan terhadap

bencana, dan berkelanjutan. Dengan dunia yang semakin urban — lebih dari separuh populasi dunia tinggal di kota — sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan kota tidak merusak lingkungan dan tetap nyaman untuk semua orang, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*)
Tujuan ini bertujuan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan — artinya, cara kita menggunakan sumber daya, memproduksi barang, dan mengelola limbah harus efisien, tidak boros, dan tidak merusak lingkungan. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

13) Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)
Tujuan ini bertujuan untuk mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Perubahan iklim adalah masalah global yang berdampak pada semua negara — mulai dari kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, banjir, kekeringan, hingga naiknya permukaan laut.

14) Melestarikan dan Memanfaatkan Lautan, Laut, dan Sumber Daya Kelautan Secara Berkelanjutan (*Life Below Water*)
Tujuan ini berfokus pada perlindungan ekosistem laut dan pesisir, serta pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan agar tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan masa depan. Laut bukan hanya sumber makanan, tapi juga pengatur iklim, penghasil oksigen, dan sumber penghidupan bagi miliaran orang di dunia, termasuk nelayan dan masyarakat pesisir.

15) Menjaga Ekosistem Daratan (*Life on Land*)
Tujuan ini bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan ekosistem daratan secara berkelanjutan, termasuk hutan, lahan kering, keanekaragaman hayati, dan tanah. Intinya: alam daratan seperti hutan, pegunungan, dan tanah adalah fondasi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, jadi harus dijaga agar tetap lestari dan berfungsi dengan baik.

16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice and Strong Institutions*)
Tujuan ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif, di mana setiap orang memiliki akses ke keadilan, dan lembaga-lembaga negara bekerja secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*)
Tujuan ini menekankan pentingnya kerja sama global, baik antar negara, lembaga internasional, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu, untuk mewujudkan semua target SDGs.

Kabupaten Barito Kuala memiliki total 135 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) untuk periode 2022-2026 yang terbagi atas 4 Pilar: Sosial, Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Hukum & Tata Kelola. 135 Indikator ini terbagi ke dalam 27 SKPD/OPD dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, yang dipecah menjadi Pilai Sosial sebanyak 65 Indikator, Pilar Ekonomi 30 Indikator, Pilar Lingkungan Hidup sebanyak 31 Indokator dan terakhir Pilar Hukum dan Tata Kelola sebanyak 9 Indikator.

Tabel 2.95 Evaluasi Capaian SDGs Tahun 2024 Kabupaten Barito Kuala

No	Pilar Dalam Metadata SDGs	Jumlah Indikator	Indikator Tercapai	Indikator Belum Tercapai (Menuju atau Membutuhkan Perhatian Khusus)	Penyebab/Permasalahan
1	Pilar Sosial	65	45	20	• Rendahnya minat pekerja di sektor pertanian; • Rendahnya kesadaran masyarakat untuk peningkatan pola hidup sehat; • Kondisi geografis wilayah dan sebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan masih adanya daerah yang belum terlayani air minum dan perlunya anggaran besar • Tidak terdatanya penduduk usia sekolah yang pindah ke luar daerah dan pesantren
2	Pilar Ekonomi	30	20	10	Pertumbuhan ekonomi seluruh sektor melambat karena masihpemulihan akibat pandemi dan bencana alam
3	Pilar Lingkungan Hidup	31	19	12	• Rendahnya kesadaran masyarakat untuk peningkatan pola hidup sehat • Kondisi geografis wilayah dan sebaran penduduk yang tidak merata sehingga masih adanya daerah yang belum terlayani pengangkutan persampahan dan perlunya anggaran besar
4	Pilar Hukum dan Tata Kelola	9	6	3	Belum optimalnya pelayanan kependudukan khususnya daerah perbatasan dengan Kota Banjarmasin
	Jumlah	**135**	**90**	**45**	

Sumber: https://sdgs.bappedakalsel.tech/

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa masih ada beberapa indikator tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs yang belum tercapai, dengan beberapa penyebab dan permasalahannya seperti tertera pada kolom penyebab/permasalahannya. Beberapa data diatas masih perlu pembaharuan karena capaian yang ada baru sampai pada tahun 2024, sehingga update data pada website https://sdgs.bappedakalsel.tech/ sebagai portal informasi perkembangan SDGs yang dikelola Provinsi Kalimantan Selatan perlu dicek kembali dan dipastikan untuk diperbaharui sampai pada tahun 2025.

Dalam hal mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, maka disusun beberapa kebijakan dan target yang ditetapkan seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.96 Indikator, Kebijakan dan Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Indikator	Tantangan	Kebijakan	Target
PILAR SOSIAL				
1. Tanpa Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan Ekstrim	Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Optimalnya Perlindungan Sosial
2. Tanpa Kelaparan	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada anak di bawah 5 (Lima) Tahun / Balita	Penanganan Kasus Stunting	Peningkatan Penuntasan Stunting melalui Pendekatan Integrasi Multisektor	Prevalensi Stunting (EPPGBM)
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Angka Kematian Ibu (AKI), Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);	Sarana dan Prasarana Kesehatan	1. Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan Primer dan Lanjutan 2. Peningkatan Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Medis dan Kesehatan	1. Angka Kematian ibu (AKI) 2. Optimalnya layanan kesehatan ibu, bayi, dan balita 3. Optimalnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4. Pendidikan Berkualitas	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat	Penerapan Wajib Belajar 9 Tahun	Peningkatan Penerapan Wajib PAUD 1 Tahun dan Sekolah 9 Tahun	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
5. Kesetaraan Gender	Peningkatan Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Penurunan Indeks Ketimpangan Gender	Optimalnya upaya mewujudkan kesetaraan gender

Tujuan	Indikator	Tantangan	Kebijakan	Target
PILAR LINGKUNGAN				
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman, Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan yang masih belum menjangkau semua wilayah	1. Peningkatan pemenuhan akses air minum aman dan sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah 2. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi 3. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kualitas air minum 4. Peningkatan penyediaan Lembaga pelaksanana penyelenggara SPAM yang bekinerja baik dan optimnal	○ Sistem penyediaan air minum pedesaan terjangkau seluruh wilayah ○ Seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Penanganan dan Pengendalian Kawasan Kumuh	Peningkatan Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan	Masyarakat mendapat hunian layak dan terjangkau
PILAR EKONOMI				
7. Energi Bersih dan Terjangkau	Konsumsi Listrik per Kapita	Belum optimalnya penerapan ekonomi biru dan hijau	Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau (ramah energi)	Pembangunan ekonomi berjalan secara berkelanjutan
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita	PDRB dan Laju PDRB menurun karena hanya bertumpu dan satu sektor	Peningkatan Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian	Dominasi Sektor Pertanian yang diikuti dengan Peningkatan Nilai Tambah
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Inovasi Pengelolahan Produk Pertanian	Peningkatan Pengembangan pusat-pusat industri di berbagai wilayah melalui hilirisasi komoditi unggulan	1. Potensi Produk Unggulan Daerah (PLUD) 2. Inovasi pengolahan produk pertanian

Tujuan	Indikator	Tantangan	Kebijakan	Target
17. Kemitraan Tujuan	Persentase Pengguna Internet	Meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi	Peningkatan Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh wilayah	Optimalnya penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA				
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman	1. Peningkatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama 2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga- lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Sumber: Paparan Pelaksanaan TPB/SDGs dan Keterlibatan TJSLP di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

2.4 TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD adalah aspirasi dan hasil penelaahan DPRD yang bersumber dari penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, serta masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, yang kemudian dirumuskan menjadi usulan program/kegiatan pembangunan daerah untuk dimasukkan dalam proses perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Secara sederhana, Pokir DPRD merupakan bentuk penyaluran kebutuhan masyarakat dari lembaga legislatif kepada pemerintah daerah agar menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah.

Pokir DPRD memiliki kedudukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam penyusunan:

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pokir DPRD harus diselaraskan dengan:

- Visi dan Misi Kepala Daerah,
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
- Prioritas Pembangunan Daerah,
- Kemampuan Keuangan Daerah,
- Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Fungsi dari adanya Pokir DPRD diantaranya:

1) Sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah
   Pokir menjadi jalur agar kebutuhan masyarakat yang belum tertampung dalam perencanaan teknokratis pemerintah dapat masuk dalam agenda pembangunan.
2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
   Melalui DPRD, masyarakat memiliki ruang untuk ikut menentukan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian pembangunan tidak hanya berasal dari perencanaan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan.
3) Mendukung pemerataan pembangunan
   Pokir dapat membantu memperhatikan kebutuhan wilayah yang mungkin belum menjadi prioritas utama pemerintah daerah, terutama di daerah pemilihan anggota DPRD.
4) Menjadi bahan penyusunan program dan anggaran daerah
   Pokir menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD sehingga anggaran

daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5) Fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan

Pokir juga memperkuat fungsi pengawasan DPRD karena DPRD dapat melihat apakah aspirasi masyarakat yang disam

Pada tahun 2025, berdasarkan Laporan Akhir POKIR SIPD 2025 didapatkan bahwa dari 55 Paket Kegiatan POKIR SIPD, telah terlaksana sepenuhnya berdasarkan tabel berikut.

Tabel 2.97 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 Keseluruhan

No.	SKPD PELAKSANA	PAGU AWAL PERENCANAAN SIPD (Rp)	PELAKSANAAN		REALISASI KEUANGAN		REALISASI OUPUT (FISIK		KETERANGAN
			ALOKASI (Rp)	JUMLAH OUTPUT	(Rp)	(%)	OUTPUT TERCAPAI	(%)	
1	DINAS KESEHATAN	800,000,000	800,000,000	3	794,018,610	99.25%	3	100%	
2	DINAS PENDIDIKAN	600,000,000	600,000,000	3	598,576,000	99.76%	3	100%	
3	SETDA	300,000,000	300,000,000	1	300,000,000	100%	1	100%	Hibah dalam bentuk uang
4	DISHUB	400,000,000	400,000,000	2	367,748,155	91.94%	2	100%	
5	DINAS PUPR	6,800,000,000	7,000,000,000	32	6,738,333,781	96.26%	32	98%	
6	DINAS PERKIM	2,100,000,000	2,100,000,000	12	1,897,633,407	90%	12	100%	
7	DINAS SOSIAL	100,000,000	100,000,000	1	94,570,890	95%	1	100%	
8	DKPP	200,000,000	200,000,000	1	194,883,000	97%	1	100%	
		11,300,000,000	**11,500,000,000**	**55**	**10,985,763,843**	**96%**	**55**	**100%**	

Tabel 2.98 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 SKPD Dinas Kesehatan

No.	NAMA USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU AWAL (Rp)	PELAKSANAAN			NILAI KONTRAK (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI OUPUT (FISIK	
				PAGU (Rp)	VOL	SATUAN		(Rp)	(%)	VOL	(%)
1	Peningkatan Halaman Puskesmas Kec. Mandastana	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	200,000,000	200,000,000	1	Paket	196,349,602	196,349,602	98%	1	100%
2	Mobil Ambulan untuk Warga Komp. Wira Bakti RT.11 dan RT.12	AKHMAD BANI	400,000,000	400,000,000	1	Unit	399,711,000	399,711,000	100%	1	100%
3	Rehab Poskesdes Handil Bakti Komp Griya Permata Jalan Mawar I RT. 14 Kel Handil Bakti	HENDRI DYAH ESTININGRUM, SH	200,000,000	200,000,000	1	Paket	197,958,008	197,958,008	99%	1	100%
JUMLAH			**800,000,000**	**800,000,000**	**3**		**794,018,610**	**794,018,610**	**99%**	**3**	**100%**

Tabel 2.99 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 SKPD Dinas Pendidikan

No.	NAMA USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU AWAL (Rp)	PELAKSANAAN			NILAI KONTRAK (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI OUPUT (FISIK	
				PAGU (Rp)	VOL	SATUAN		(Rp)	(%)	VOL	(%)
1	Peninggian Halaman SDN Bandar Karya kec. Tabukan, 15x100 m	Halimah	200,000,000	199,020,000	1	Paket	199,020,000	199,020,000	100%	1	100%
2	Pembuatan Pagar TK Negeri Mekarsari	H. Maslan, S. Pd,MA	200,000,000	200,536,000	1	Unit	200,536,000	200,536,000	100%	1	100%
3	Peninggian Halaman dan Pagar SDN Indah Sari	H. Maslan, S. Pd,MA	200,000,000	199,020,000	1	Paket	199,020,000	199,020,000	100%	1	100%
JUMLAH			**600,000,000**	**598,576,000**	**3**		**598,576,000**	**598,576,000**	**100%**	**3**	**100%**

Tabel 2.100 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 SKPD Sekretariat Daerah

No.	NAMA USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU AWAL (Rp)	PELAKSANAAN			NILAI HIBAH (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI OUPUT (FISIK	
				PAGU (Rp)	VOL	SATUAN		(Rp)	(%)	VOL	(%)
1	Pembangunan Langgar Nurul Fata Desa Sungai	SYAHRUDIN. HS	300,000,000	300,000,000	1	Paket	300,000,000	300,000,000	100%	1	100%
			300,000,000	**300,000,000**	**1**		**300,000,000**	**300,000,000**	**100%**	**1**	**100%**

Tabel 2.101 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 SKPD Dinas Perhubungan

No.	NAMA USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU AWAL (Rp)	PELAKSANAAN			NILAI KONTRAK (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI OUPUT (FISIK)	
				PAGU (Rp)	VOL	SATUAN		(Rp)	(%)	VOL	(%)
1	Pembangunan Dermaga Desa Sungai Telan Besar	Syaiful As'ari, SH	200,000,000	184,000,000	1	Unit	183,860,360	183,860,360	92%	1	100%
2	Pembuatan Dermaga Sungai Desa	H. MURJANI,S.Sos	200,000,000	184,000,000	1	Unit	183,887,795	183,887,795	92%	1	100%
JUMLAH			**400,000,000**	**368,000,000**	**2**		**367,748,155**	**367,748,155**	**92%**	**2**	**100%**

Tabel 2.102 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	NAMA USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU AWAL (Rp)	PELAKSANAAN			NILAI KONTRAK (Rp)	REALISASI KEUANGAN		EALISASI OUPUT (FISI	
				PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	SATUAN		(Rp)	(%)	OUTPUT TERCAPA I	(%)
1	Rehabilitasi Jembatan Handil Aji	Harmuni	200,000,000	200,000,000	1	Unit	178,666,667	178,666,667	89.33%	1	100%
2	Peningkatan Jalan Inspeksi DIR Tinggiran Darat	Harmuni	200,000,000	200,000,000	1,000	Meter	198,744,000	198,744,000	99.37%	1,000	100%
3	Peningkatan Halaman Kantor Kelurahan Handil Bakti	H.Bahriannoor, S.Ap	200,000,000	200,000,000	306.31	m2	199,689,352	199,689,352	99.84%	306.31	100%
4	Peningkatan Jalan Ruas No.043	BASRIN	200,000,000	400,000,000	0.5	km	398,260,000	398,260,000	99.57%	0.5	100%
5	Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas 11	BASRIN	200,000,000	200,000,000	0.5	km	198,991,000	198,991,000	99.50%	0.5	100%
6	Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas 12	BASRIN	200,000,000	200,000,000	0.5	km	198,991,000	198,991,000	99.50%	0.5	100%
7	Peningkatan Jalan Ruas No.038	BASRIN	200,000,000	400,000,000	0.5	km	397,791,000	397,791,000	99.45%	0.5	100%
8	Peningkatan Jalan Ruas No.108	Akhmad Bani	400,000,000	400,000,000	0.3	km	398,959,000	398,959,000	99.74%	0.3	100%
9	Pemeliharaan Rutin Jalan Bima Sakti	JUNAIDIN	200,000,000	200,000,000	0.3	km	198,975,000	198,975,000	99.49%	0.3	100%
10	Pembuatan Siring Jalan Bima sakti	JUNAIDIN	200,000,000	200,000,000	0.15	km	198,903,000	198,903,000	99.45%	0.15	100%
11	Peningkatan Jalan Inspeksi DIR Simpang Arja	REIDAN WINATA	200,000,000	200,000,000	900	Meter	178,540,540	178,540,540	89.27%	900	100%
12	Peningkatan Jalan Inspeksi DIR Pindahan Baru	REIDAN WINATA	200,000,000	200,000,000	900	meter	178,709,009	178,709,009	89.35%	900	100%
13	Peningkatan Jalan Inspeksi DIR Tabunganen Pemurus	Syaiful As'ari, SH	200,000,000	200,000,000	700	meter	198,680,000	198,680,000	99.34%	700	100%
14	Rehabilitasi Siring Sungai Simpang Dadar	Syaiful As'ari, SH	200,000,000	200,000,000	95	meter	198,533,000	198,533,000	99.27%	95	100%
15	Rehabilitasi Siring Handil Jejangkit	Halimah	200,000,000	200,000,000	65	meter	198,111,000	59,433,300	30%	20	30%
16	Rehabilitasi Siring Handil Jejangkit Mati	Halimah	200,000,000	200,000,000	78	meter	178,442,342	178,442,342	89.22%	78	100%
17	Rehabilitasi Siring Sungai Kemuning raya	Halimah	200,000,000	200,000,000	0.067	km	198,828,000	198,828,000	99.41%	0.067	100%
18	Peningkatan Jalan Inspeksi DIR Anjir Serapat Lama	SYAHRANI	200,000,000	200,000,000	200	Meter	198,685,000	198,685,000	99.34%	200	100%
19	Pembuatan Siring Handil Daham	SYAHRANI	200,000,000	200,000,000	70	meter	198,915,000	198,915,000	99.48%	70	100%

No.	NAMA USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU AWAL (Rp)	PELAKSANAAN			NILAI KONTRAK (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI OUPUT (FISI	
				PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	SATUAN		(Rp)	(%)	OUTPUT TERCAPAI	(%)
20	Peningkatan Halaman Mesjid Besar Al Misbahul Munir Desa Tamban Raya	H. Maslan, S. Pd,MA	200,000,000	200,000,000	76.55	meter	199,538,571	199,538,571	99.77%	76.55	100%
21	Peningkatan Jalan Inspeksi DIR Sekata Baru	H. Maslan, S. Pd,MA	200,000,000	200,000,000	470	meter	198,412,000	198,412,000	99.21%	470	100%
22	Rehabiltiasi Siring sungai tabunganen tengah	H. MURJANI,S.Sos	200,000,000	200,000,000	108	meter	198,897,000	198,897,000	99.45%	108	100%
23	Peningkatan Jalan Inspeksi DIR Semangat Dalam	MUHRAN	200,000,000	200,000,000	1,000	Meter	198,477,000	198,477,000	99.24%	1,000	100%
24	Peningkatan Jalan Inspeksi DIR Sungai Pantai	SLAMET RIYADI	200,000,000	200,000,000	220	meter	198,638,000	198,638,000	99.32%	220	100%
25	Peningkatan Jalan Inspeksi DIR Sei Gampa	SLAMET RIYADI	200,000,000	200,000,000	900	meter	198,146,000	198,146,000	99.07%	900	100%
26	Peningkatan Jalan Inspeksi DIR Anjir Pasar Lama	Muhammad Zamruni, S. Sos	200,000,000	200,000,000	156	Meter	198,262,000	198,262,000	99.13%	156	100%
27	Peningkatan Jalan Inspeksi DIR Anjir Pasar Kota II	Muhammad Zamruni, S. Sos	200,000,000	200,000,000	850	Meter	198,665,000	198,665,000	99.33%	850	100%
28	Peningkatan Jalan Inspeksi DIR Andaman II	Muhammad Zamruni, S. Sos	200,000,000	200,000,000	225	Meter	198,397,000	198,397,000	99.20%	225	100%
29	Peningkatan Jalan Inspeksi DIR Gandaria	Muhammad Zamruni, S. Sos	200,000,000	200,000,000	500	Meter	198,262,000	198,262,000	99.13%	500	100%
30	Rehabilitasi Jembatan Sungai Gandaraya	SYAHRUDIN. HS	200,000,000	200,000,000	2	unit	198,331,000	198,331,000	99.17%	2	100%
31	Rehabiltiasi Siring Handil Rawa rawa	Jurmiah, S. AP	200,000,000	200,000,000	270	Meter	198,821,000	198,821,000	99.41%	270	100%
32	Rehabilitasi Gorong-Gorong Jelapat	Jurmiah, S. AP	200,000,000	200,000,000	5	Unit	198,751,000	198,751,000	99.38%	5	100%
			6,600,000,000	**7,000,000,000**	**9,101**		**6,877,011,481**	**6,738,333,781**	**96%**	**9,055**	**98%**

Tabel 2.103 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	NAMA USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU AWAL (Rp)	PELAKSANAAN			NILAI KONTRAK (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI OUPUT (FISIK)	
				PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	SATUAN		(Rp)	(%)	OUTPUT TERCAPAI	(%)
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju Pemakaman Desa Karang Buah	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	200,000,000	200,000,000	498	Meter	199,932,093	199,932,093	100%	498	100%
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT.10 Desa Karang Indah	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	200,000,000	200,000,000	500	Meter	199,947,296	199,947,296	100%	500	100%
3	Rehab Jalan titian desa tinggiran 2 luar RT 14 dan 15	JUNAIDIN	200,000,000	200,000,000	54	Meter	199,115,028	199,115,028	100%	54	100%
4	Rehabilitasi Jembatan simpang halayung RT 08 desa sungai sahurai	REIDAN WINATA	200,000,000	200,000,000	9.12	Meter	199,835,633	199,835,633	100%	9.12	100%
5	Pembangunan jembatan desa sungai sahurai rt 02	REIDAN WINATA	100,000,000	100,000,000	15.6	Meter	199,879,511	199,879,511	100%	15.6	100%
6	Pembangunan jembatan desa sungai sahurai rt 04	REIDAN WINATA	100,000,000	100,000,000							

No.	NAMA USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU AWAL (Rp)	PELAKSANAAN			NILAI KONTRAK (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI OUPUT (FISIK)	
				PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	SATUAN		(Rp)	(%)	OUTPUT TERCAPAI	(%)
7	Rehab Jembatan ulin desa Sinar baru RT 11	REIDAN WINATA	200,000,000	200,000,000	3.0	Meter	199,767,963	199,767,963	99.9%	3.0	100%
8	Peningkatan Jalan Komplek Budi Naik Sejahtera	M. AGUNG PURNOMO, S.Psi	200,000,000	200,000,000	201	Meter	199,541,898	199,541,898	99.8%	201	100%
9	Bedah Rumah 2 Rumah 50.000.000 x 2 Handil Bakti RT 15	M. AGUNG PURNOMO, S.Psi	100,000,000	100,000,000	1	Unit	99,891,364	99,891,364	99.9%	1	100%
10	Gorong-gorong Saluran Air di Komplek Mawar RT 14 Handil Bakti	M. AGUNG PURNOMO, S.Psi	200,000,000	200,000,000	3	gorong-gorong	199,907,498	199,907,498	100.0%	3	100%
11	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tamban Raya RT 05	H. Maslan, S. Pd,MA	200,000,000	200,000,000	412.5	Meter	199,910,464	199,910,464	100.0%	412.5	100%
12	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tamban Raya Rt 05	H. Maslan, S. Pd,MA	200,000,000	200,000,000	222	Meter	199,851,955	199,851,955	99.9%	222	100%
			2,100,000,000	**2,100,000,000**	**1,919**		**2,097,580,703**	**2,097,580,703**	**99.9%**	**1,919**	**100%**

Tabel 2.104 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 SKPD Dinas Sosial

No.	NAMA USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	PERENCANAAN		SATUAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI OUPUT (FISIK)	
			PAGU	VOL		(Rp)	(%)	VOL	(%)
1	Pengadaan Tenda dan perlengkapannya Desa Bandar Karya RT 05 kec. Tabukan,5 set	Halimah	100,000,000	1	paket	94,570,890	95%	1	100%
			800,000,000	**1**		**94,570,890**	**95%**	**1**	**100%**

Tabel 2.105 Realisasi Kegiatan POKIR SIPD 2025 SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No.	NAMA USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	PERENCANAAN		SATUAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI OUPUT (FISIK)	
			PAGU	VOL		(Rp)	(%)	VOL	(%)
1	Bantuan Benih Ikan Desa Anjir Muara Kota Kec. Anjir Muara	Halimah	200,000,000	1	paket	194,883,000	97%	1	100%
			200,000,000	**1**		**194,883,000**	**97%**	**1**	**100%**

Sumber: Laporan Pelaksanaan POKIR SIPD Kab. Barito Kuala 2025

Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan POKIR 2025 adalah terletak pada proses pengusulan Pokok-Pokok Pikiran Anggota Dewan dalam Sistem SIPD. Sebagaimana Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD harus disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD. Ini dapat diartikan bahwa usulan dari anggota legeslatif DPRD yang diperoleh dari hasil penjaringan aspirasi selama masa resis, yang selanjutnya usulan tersebut dirumuskan dan diinput oleh anggota DPRD ke dalam aplikasi SIPD dan di vefikasi oleh Sekertariat DPRD, Bappeda/Bapperida, SKPD terkait serta oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam pelaksanaannya ada sejumlah

usulan Pokir yang diinput pada aplikasi SIPD oleh anggota DPRD setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD, sehingga secara otomatis usulan tersebut tertolak oleh SIPD.

Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi lagi, maka pada tahun 2026 ini Bapperida telah bersurat sebanyak 2 (dua) kali kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala untuk Sosialisasi Kamus Pokir dan dan Workshop Input Usulan Pokir dan untuk mengingatkan bahwa batas waktu terakhir penginputan Pokir tahun 2027 pada SIPD pada tanggal 23 Maret 2026, yaitu:

1) Surat Sekretaris Daerah Nomor : 005/42/SETDA/2026 tanggal 13 Januari 2026 Hal Undangan Sosialisasi Kamus Pokir dan dan Workshop Input Usulan Pokir.
2) Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/112/PPD-Bapperida/2026 tanggal 10 Februari 2026 Hal. Penyampaian Usualan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Sehingga dari usaha tersebut, maka didapat Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada tahun 2026 yang telah masuk dalam SIPD, dan telah diverifikasi oleh Tim Penyusun Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.106 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 Hasil Verifikasi TAPD

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
1	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN TIDAK MEMADAI	PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN	DESA KOLAM KIRI RT.01 - RT.20 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	1	SET	200.000.000,00
2	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	PENIMBUNAN HALAMAN SEKOLAH SDN KARYA TANI I	DESA KARYA TANI RT.02/RW.01 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Uni	200.000.000,00
3	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN	DESA KOLAM KIRI RT.01 - RT.20 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	100	BUAH	700.000.000,00
4	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	PENIMBUNAN HALAMAN SEKOLAH SDN KOLAM KIRI I	DESA KOLAM KIRI DUSUN II RT13 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
5	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA KESENIAN UNTUK MASYARAKAT	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GAGUYUPAN KUDA LUMPING PURWOYAKSO	DESA KOLAM KIRI RT.01 - RT.20 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	1	SET	50.000.000,00
6	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN ALAT TRAKTOR JONDER	DESA KOLAM KIRI RT.09 - RT.14 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	350.000.000,00
7	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	LAMPU PENERANGAN JALAN	DESA KOLAM KIRI DALAM DUSUN II RT.04 - RT.07 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	30	BUAH	210.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
8	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	JALAN KABUPATEN RUSAK	PENGERASAN DAN PENGASPALAN JALAN ARAH KE KECAMATAN	DESA KOLAM KIRI RAY 1 - 5, DAN DESA BARAMBAI RAY 0 - 3 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	3000	METER	200.000.000,00
9	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGERASAN JALAN	DESA KOLAM KIRI RAY 7 RT.14/RT.15 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1200	Meter	1.200.000.000,00
10	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGASPALAN JALAN POROS	DESA KOLAM KIRI RT.01 - RT.15 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1500	Meter	1.500.000.000,00
11	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PEMBANGUNAN DAN PENGASPALAN JALAN	DESA KOLAM KIRI RAY 6 RT.10/RT.12 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
12	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGASPALAN JALAN POROS	DESA KOLAM KIRI DALAM RAY 3 - 5 RT.07 - RT.11 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	800	Meter	800.000.000,00
13	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	Bedah rumah Rt 6 Desa puntik tengah, Kec. Mandastana. 1 rumah	Rt 6 Desa Puntik Tengah, Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	-
14	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peninggian jalan Rt 7 Desa puntik tengah, Kec. Mandastana	Rt 7 Desa Puntik Tengah, Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	1000	Meter	1.000.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
					PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
15	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	FASILITAS KESEHATAN RUSAK/TIDAK MEMADAI	Penambahan Jalan Titian di Gudang instalasi Farmasi Dinkes Marabahan	Gudang instalasi Farmasi Dinkes Marabahan, Kab. Barito Kuala	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	75	meter	200.000.000,00
16	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Peningkatan Jalan Komplek kebun jeruk 2 Rt 08, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak	Komplek kebun jeruk 2 Rt 08, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	50	Meter	50.000.000,00
17	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Rt 15 Desa tatah masjid, Kec. Alalak	Jalan Rt 15 Desa tatah masjid, Kec. Alalak , Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
18	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Peningkatan Jalan Persada Raya 1 Rt 19 Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak	Persada Raya 1 Rt 19 Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak , Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
19	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Cor gang Rt 16 Desa Berangas Timur, Kec.Alalak.	Cang Rt 16 Desa Berangas Timur, Kec.Alalak., Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	paket	200.000.000,00
20	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Rt 21dan Rt 28 Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak	Rt 21dan Rt 28 Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak , Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
21	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Peningkatan Jl Griya Bakti Rt 17, Desa Semangat dalam, Kec. Alalak.	Jl komplek Griya Bakti Rt 17, Desa Semangat dalam, Kec. Alalak., Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	200	Meter	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
					PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
22	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Pembangunan jembatan menuju Gang kayu bulan (Jl. Transkalimantan-Gang Kayu bulan). Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak.	Jl. Transkalimantan-Gang Kayu bulan Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak., Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	100.000.000,00
23	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan jalan cluster antasari Rt 31, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak.	jalan cluster antasari Rt 31, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak., Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
24	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	Pembangunan WC rumah warga Desa Pulau ALalak, Kec. Alalak.	Desa Pulau ALalak, Kec. Alalak., Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	paket	200.000.000,00
25	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN TIDAK MEMADAI	Armada BPK Putra sewangi Pemadam Kebakaran, Desa Pulau sewangi, Kec. Alalak	Desa Pulau sewangi, Kec. Alalak , Kab. Barito Kuala	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	1	paket	200.000.000,00
26	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan jalan Cor beton Rt 16 Desa Berangas Barat, Kec. Alalak	Rt 16 Desa Berangas Barat, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	51	meter	51.000.000,00
27	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan alternatif belakang puskesmas & gorong-gorong, Desa Berangas Barat, Kec. Alalak.	Desa Berangas Barat, Kec. Alalak., Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	paket	200.000.000,00
28	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	Bedah rumah Rt 05 Desa Lokrawa, Kec. Mandastana.	Rt 05 Desa Lokrawa, Kec. Mandastana. , Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	1	buah	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
					PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
29	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT	Pemasangan Jalur Pipa PDAM gang Rt 03, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak.	Rt 03, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak., Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	paket	-
30	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Peningkatan jalan Komplek citra permata, Desa Semangat Dalam. Kec. Alalak.	jalan Komplek citra permata, Desa Semangat Dalam. Kec. Alalak. , Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	100	Meter	100.000.000,00
31	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN TIDAK MEMADAI	Bantuan Perlengkapan BPK Pemadam Kebakaran Desa puntik Tengah, Kec. Mandastana	Desa puntik Tengah, Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	1	paket	200.000.000,00
32	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Pembangunan Ruang SDN Tanipah 3, Kec. Mandastana.	SDN Tanipah 3, Kec. Mandastana., Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
33	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan jalan cinta mulia Rt 19, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak	jalan cinta mulia Rt 19, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	100	Meter	100.000.000,00
34	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jl. Meranti 4 Rt 25, Kel. handil bakti, Kec. Alalak	Jl. Meranti 4 Rt 25, Kel. handil bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
35	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan jalan Rt 45 jalur 13 Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak (p = 200 m , L = 6 M)	jalan Rt 45 jalur 13 Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
36	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Inspeksi Rt 5 Desa Hilir Mesjid, Kec.	Rt 5 Desa Hilir Mesjid, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	800	meter	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
			Anjir Pasar (P= 400 m, L = 2 m)		KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
37	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Gang Rt 6 Desa Hilir Mesjid, Kec. Anjir Pasar (P = 70 m, L= 2 m)	Jalan Gang Rt 6 Desa Hilir Mesjid, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	140	meter	140.000.000,00
38	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGERASAN JALAN INSPEKSI	DESA KOLAM KIRI DALAM RAY 1 - 3 RT.07 - RT.10 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	800	Meter	800.000.000,00
39	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI	DESA KOLAM KIRI DALAM DUSUN I RAY 1 RT.06 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
40	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI	DESA KOLAM KIRI DALAM DUSUN II RAY 6 - 9 RT.10 - RT.14 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	600	Meter	600.000.000,00
41	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGERASAN JALAN INSPEKSI	DESA KOLAM KIRI DALAM RAY 5 - 9 RT.10 - RT. 14 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
42	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGERASAN JALAN INSPEKSI	DESA KARYA TANI RT.01 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
43	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA SEI TERAS LUAR KECAMATAN TABUNGANEN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
44	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA KARANG MEKAR HANDIL FATMAH KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	3000	Meter	3.000.000.000,00
45	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA JELAPAT II KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	3000	Meter	3.000.000.000,00
46	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA TINGGIRAN TENGAH HANDIL KARANG ANYAR KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
47	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA TINGGIRAN TENGAH HANDIL ANANG KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
48	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGASPALAN JALAN LINGKUNGAN	DESA TINGGIRAN TENGAH HANDIL MASJID KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
49	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA TINGGIRAN DARAT HANDIL GANTUNG KECAMATAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	2000	Meter	2.000.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
50	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA TAMBAN RAYA HANDIL IBRAHIM KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
51	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA TAMBAN RAYA HANDIL FATIMAH KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
52	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA TAMBAN RAYA HANDIL SUKA MAJU KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
53	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA TAMBAN RAYA HANDIL SETIA WARGA KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
54	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA TAMBAN RAYA HANDIL BUYA KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
55	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA INDAH SARI HANDIL USAHA BERSAMA KEAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
56	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA KARANG MEKAR SEKONDER KIRI KECAMATAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	1000	Meter	1.000.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
57	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PENUNJANG FUNGSI HUNIAN	Peninggian Tanah Pemakaman Desa Tanipah, Kec. Mandastana	Desa Tanipah, Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	paket	-
58	HARMUNI	FASILITAS KESEHATAN RUSAK/TIDAK MEMADAI	REHAB PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU)	DESA TINGGIRAN DARAT KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	200.000.000,00
59	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA TINGGIRAN DARAT HANDIL SETIA KAWAN KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	2000	Meter	2.000.000.000,00
60	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA TINGGIRAN DARAT HANDIL ABANG KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	2000	Meter	2.000.000.000,00
61	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA TINGGIRAN DARAT HANDIL MARTASAI KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	2000	Meter	2.000.000.000,00
62	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA TINGGIRAN DARAT HANDIL HASIM KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	2000	Meter	2.000.000.000,00
63	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA TINGGIRAN DARAT HANDIL MASJID	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	1000	Meter	1.000.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
64	SYAIFUL ASARI, S.H.	DERMAGA/PELABUHAN RUSAK	Pembuatan Titian dan Dermaga di RT 12 desa Tabunganen Pemurus, Kec. Tabunganen	RT 12 desa Tabunganen Pemurus, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	1	paket	200.000.000,00
65	SYAIFUL ASARI, S.H.	DERMAGA/PELABUHAN RUSAK	Pembuatan titian dan dermaga RT 14 desa Tabunganen Pemurus, Kec. Tabunganen	RT 14 desa Tabunganen Pemurus, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	1	paket	200.000.000,00
66	SYAIFUL ASARI, S.H.	SIRING SUNGAI RUSAK	Peningkatan Jalan Inspeksi dan Siring Rt 4 Desa Tabunganen Pemurus, kec Tabunganen	Rt 4 Desa Tabunganen Pemurus, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	paket	200.000.000,00
67	SYAIFUL ASARI, S.H.	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan Halaman dan Siring SDN Tabunganen Muara 2	SDN Tabunganen Muara 2, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
68	SYAIFUL ASARI, S.H.	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PENUNJANG FUNGSI HUNIAN	Peningkatan Jalan Menuju Alkah Muslimin RT 5 Desa Tabuganen Tengah	RT 5 Desa Tabuganen Tengah, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
69	SYAIFUL ASARI, S.H.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Lanjutan Peningkatan Jalan Inspeksi dan Cor RT 9 & 10 Desa Tabunganen Tengah, Kec. Tabunganen	RT 9 & 10 Desa Tabunganen Tengah, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
70	SYAIFUL ASARI, S.H.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan jalan Inspeksi Rt 7, Desa Tabunganen Tengah, Kec. Tabunganen	Rt 7, Desa Tabunganen Tengah, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	paket	-
71	SYAIFUL ASARI, S.H.	MASIH KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA SANITASI UNTUK MASYARAKAT	Pembangunan MCK Umum di Desa Tabunganen Tengah	Desa Tabunganen Tengah, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	paket	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
					KAB. BARITO KUALA			
72	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PEMBANGUNAN MASJID JAMI DARUL IMAN	DESA KOLAM KIRI RT.01 - RT.20 KECAMATAN BARAMBAI, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	300.000.000,00
73	HARMUNI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PENINGKATAN HALAMAN MADRASAH ISTIQOMAH	DESA TINGGIRAN DARAT RT.14 KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	200.000.000,00
74	HARMUNI	ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR	REHAB SALURAN AIR	DESA TINGGIRAN DARAT HANDIL SETIA KAWAN KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	3	KILOMETER	200.000.000,00
75	HARMUNI	ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR	REHAB SALURAN AIR	DESA TINGGIRAN DARAT HANDIL ABANG KECAMMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	3	KILOMETER	200.000.000,00
76	HARMUNI	ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR	REHAB SALURAN AIR	DESA TINGGIRAN DARAT HANDIL MARTASARI KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	3	KILOMETER	200.000.000,00
77	HARMUNI	ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR	REHAB SALURAN AIR	DESA TINGGIRAN DARAT HANDIL HASIM KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	3	KILOMETER	200.000.000,00
78	HARMUNI	ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR	REHAB SALURAN AIR	DESA TINGGIRAN DARAT HANDIL PEKAPURAN KECAMATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	3	KILOMETER	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				MEKARSARI, Kab. Barito Kuala				
79	HARMUNI	ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR	REHAB SALURAN AIR	DESA TIGGIRAN DARAT HANDIL GANTUNG KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	5	KILOMETER	200.000.000,00
80	HARMUNI	ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR	REHAB SALURAN AIR	DESA TINGGIRAN DARAT HANDIL MASJID KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	5	KILOMETER	200.000.000,00
81	HARMUNI	ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR	REHAB SALURAN AIR	DESA TINGGIRAN DARAT HANDIL AJI KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	5	KILOMETER	200.000.000,00
82	HARMUNI	ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR	REHAB SALURAN AIR	DESA TINGGIRAN DARAT HANDIL AGAP KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	3	KILOMETER	200.000.000,00
83	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	REHAB JALAN LINGKUNGAN	DESA TINGGIRAN TENGAH HANDIL MESJID KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
84	HARMUNI	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA UNTUK MASYARAKAT	PEMBANGUNAN GEDUNG BULU TANGKIS	DESA TINGGIRAN DARAT KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	1	TEMPAT	200.000.000,00
85	HARMUNI	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	PENEARANGAN JALAN UMUM	DESA TINGGIRAN DARAT KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	50	BUAH	350.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
86	HASIMUDIN	GORONG-GORONG RUSAK	PENGADAAN GORONG-GORONG	DESA ROHAM RAYA RT.01 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	5	BUAH	200.000.000,00
87	HASIMUDIN	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN HAND TRAKTOR	DESA ROHAM RAYA RT.13 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	50.000.000,00
88	HASIMUDIN	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN HAND TRAKTOR	DESA SIMPANG JAYA RT.04 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	50.000.000,00
89	HASIMUDIN	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN HAND TRAKTOR	DESA PINANG HABANG RT.04 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	50.000.000,00
90	HASIMUDIN	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	MESIN PERONTOK PADI	DESA KOLAM KIRI RT.11 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	36.000.000,00
91	HASIMUDIN	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN HAND TRAKTOR	DESA BANYIUR RT.03 KECAMATAN ANJIR PASAR, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	50.000.000,00
92	HASIMUDIN	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN HAND TRAKTOR	DESA SUNGAI PUNGGU RT.06 KECAMATAN ANJIR MUARA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	3	UNIT	150.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
93	HASIMUDIN	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	PENGADAAN TENDA	DESA ROHAM RAYA RT. 12/RT.13 KECAMATNA WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	2	SET	100.000.000,00
94	HASIMUDIN	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	PENGADAAN TENDA	DESA ROHAM RAYA RT.02/RT.03/RT.04 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	2	SET	100.000.000,00
95	HASIMUDIN	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	PENGADAAN TENDA	DESA SIDOMULYO RT.01/RT/02/RT.03 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	2	SET	100.000.000,00
96	HASIMUDIN	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	PENGADAAN TENDA	DESA ANJIR PASAR LAMA RT.06/RT07 KECAMATAN ANJIR PASAR, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	2	SET	100.000.000,00
97	HASIMUDIN	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	PENGADAAN TENDA	DESA GANDARIA KECAMATAN ANJIR PASAR, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	2	SET	100.000.000,00
98	HARMUNI	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	PENGADAAN TENDA HAJATAN	DESA TINGGIRAN DARAT KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	4	SET	100.000.000,00
99	HARMUNI	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	PENGADAAN TENDA HAJATAN	DESA TINGGIRRAN TENGAH KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	2	SET	100.000.000,00
100	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGERASAN JALAN INSPEKSI	DESA KARYA JADI RT.02 KECAMATAN TABUKAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
101	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGERASAN JALAN LINGKUNGAN	DESA KARYA JADI RT.06 KECAMATAN TABUKAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
102	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGERASAN JALAN PEMUKIMAN	DESA KARYA JADI RT.07 KECAMATAN TABUKAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
103	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGERASAN JALAN INSPEKSI	DESA KARYA MAKMUR RT.03 KECAMATAN TABUKAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
104	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGERASAN JALAN INSPEKSI	DESA KARYA MAKMUR RT.02 KECAMATAN TABUKAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
105	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGERASAN JALAN INSPEKSI	DESA KARYA MAKMUR RT.01 KECAMATAN TABUKAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
106	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN ALAT TRAKTOR	DESA KARYA JADI RT.02 KECAMATAN TABUKAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	2	UNIT	100.000.000,00
107	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN ALAT TRAKTOR	DESA KARYA JADI RT.06 KECAMATAN TABUKAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	UNIT	50.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
					KAB. BARITO KUALA			
108	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN ALAT TRAKTOR	DESA KARYA MAKMUR RT.03 KECAMATAN TABUKAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	50.000.000,00
109	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	COR BETON JALAN LINGKUNGAN	DESA ANJIR MUARA LAMA HANDIL ALI RT.06 KECAMATAN ANJIR MUARA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
110	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PEMBUATAN BADAN JALAN SEKONDER KANAN	DESA TINGGIRAN DARAT SEKONDER KANAN KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
111	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN INSPEKSI	DESA ROHAM RAYA RAY 5 RT.15 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
112	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN INSPEKSI	DESA ROHAM RAYA HANDIL II RT.15 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
113	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN INPEKSI	DESA ROHAM RAYA SUNGAI SALUANG RT.12 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
114	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN DESA	DESA ROHAM RAYA RT.02 - RT.04 KECAMATAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	1000	Meter	1.000.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				WANARAYA, Kab. Barito Kuala	KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
115	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN DESA	DESA ROHAM RAYA RT.04 - DESA TUMIH KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
116	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN HANDIL BAMBANGIN	DESA ROHAM RAYA RT.12 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
117	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN DESA	DESA SIDOMULYO RT.18 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
118	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN DESA	DESA SIDOMULYO RT.19 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
119	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN INSPEKSI	DESA SIMPANG JAYA RT.04 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
120	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN INSPEKSI	DESA SIMPANG JAYA RT.05 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
121	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN INSPEKSI	DESA PINANG HABANG RT.06 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
122	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN DESA	DESA KOLAM KIRI RT.20 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
123	HASIMUDIN	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	JEMBATAN ANTAR DESA KOLAM KIRI KE ROHAM RAYA	DESA KOLAM KIRI RT.09 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	BUAH	-
124	HASIMUDIN	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	JEMBATAN ANTAR DESA KOLAM KIRI KE SUKARAMAI	DESA KOLAM KIRI RT.02 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	BUAH	-
125	H. BAHRIANNOOR, S.AP	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Ruang Kelas Untuk SD Negeri Panca Karya Kecamatan Alalak Rusak Berat	Jl. Ray 11 RT.01 Desa Panca Karya Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
126	H. BAHRIANNOOR, S.AP	KURANGNYA RUANG GURU UNTUK SEKOLAH TK/SD/SMP	Kurangnya Ruang Guru dan Ruang Kepala Sekolah SD Negeri Panca Karya Kecamatan Alalak	Jl. Ray 11 RT.01 Desa Panca Karya Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
127	HALIMAH	SIRING SUNGAI RUSAK	Penyiringan Handil Jejangkit RT 06 Desa Bandar Karya Kec. Tabukan	Handil Jejangkit RT 06 Desa Bandar Karya Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	km	200.000.000,00
128	HALIMAH	SIRING SUNGAI RUSAK	Penyiringan Handil Jejangkit Mati RT 05, Kec. Tabukan	Handil Jejangkit Mati RT 05, Kec. Tabukan, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	km	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
129	HALIMAH	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan dan pengerasan jalan handil tabukan RT 01	handil tabukan RT 01 , Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
130	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN DESA	DESA KOLAM KIRI RT.08/RT.09/RT.10 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
131	HALIMAH	DERMAGA/PELABUHAN RUSAK	Pembuatan Dermaga Desa Tabatan RT 05	Desa Tabatan RT 05, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	200.000.000,00
132	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN INSPEKSI	DESA ANJIR PASAR LAMA HANDIL PANGULU RT.06/RT.07 KECAMATAN ANJIR PASAR, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
133	HALIMAH	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA UNTUK MASYARAKAT	Pembuatan Lapangan Futsal Desa Tabatan Baru,	Desa Tabatan Baru,, Kab. Barito Kuala	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	1	paket	200.000.000,00
134	HALIMAH	SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN TIDAK MEMADAI	Pengadaaan 3 paket lengkap Mesin Pemadam Kebakaran	Desa Tabatan Baru, Kab. Barito Kuala	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	3	paket	600.000.000,00
135	HALIMAH	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan dan pembuatan Jalan Veteran gang Datu RT 023 RW 04 Marabahan Kota, Kec. Marabahan	Jalan Veteran gang Datu RT 023 RW 04 Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
136	HALIMAH	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA UNTUK MASYARAKAT	Pembuatan Lapangan Futsal Desa Antar Raya RT 003, Kec. Marabahan	Desa Antar Raya RT 003, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	1	paket	200.000.000,00
137	HALIMAH	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA UNTUK MASYARAKAT	Penyiringan Lapangan Sepak Bola desa Tabukan Raya RT 06	desa Tabukan Raya RT 06, Kab. Barito Kuala	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	1	paket	200.000.000,00
138	HALIMAH	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Cor Jalan Pelabuhan Dermaga Desa Tabukan Raya	Desa Tabukan Raya, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
139	HALIMAH	JALAN KABUPATEN RUSAK	Penyiringan Jalan Poros Kabupaten Desa Bandar Karya	Jalan Poros Kabupaten Desa Bandar Karya, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	paket	200.000.000,00
140	HALIMAH	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pengerasan Jalan Handil Haliwad Desa Tabukan Raya	Jalan Handil Haliwad Desa Tabukan Raya, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
141	HALIMAH	PAGAR SEKOLAH TK/SD/SMP RUSAK	Pembuatan Pagar Sekolah SMP N 1 Desa Teluk Tamba	Sekolah SMP N 1 Desa Teluk Tamba, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
142	HALIMAH	RUANG GURU SEKOLAH TK/SD/SMP RUSAK	Renovasi Kantor/Ruang Guru SDN Bandar Karya	SDN Bandar Karya, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
143	HALIMAH	WC SEKOLAH TK/SD/SMP RUSAK	Pembuatan WC SDN Bandar Karya	SDN Bandar Karya, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
144	HALIMAH	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Peninggian/peningkatan Ruang Belajar/Kelas Sekolah SDN Bandar Karya	SDN Bandar Karya, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
145	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN DESA	DESA TUMIH RT.09/RT.10 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
146	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN INSPEKSI	DESA TUMIH RT.10/RT.11 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
147	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGERASAN JALAN	DESA BABAT RAYA RT.09 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
148	H. MURJANI, S.Sos.	DERMAGA/PELABUHAN RUSAK	PEMBUATAN DERMAGA SUNGAI	TABUNGANEN TENGAH RT.11 KECAMATAN TABUNGANEN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	1	BUAH	200.000.000,00
149	H. MURJANI, S.Sos.	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	PEMBUATAN HALAMAN SMPN 1 TABUNGANEN	DESA TABUNGANEN KECIL RT.06 KECAMATAN TABUNGANEN, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
150	H. MURJANI, S.Sos.	DERMAGA/PELABUHAN RUSAK	PEMBUATAN DEMAGA SUNGAI	DESA TANGGUL REJO RT.03 KECAMATAN TABUNGANEN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	1	BUAH	200.000.000,00
151	H. MURJANI, S.Sos.	DERMAGA/PELABUHAN RUSAK	PEMBUATAN DERMAGA SUNGAI	DESA SUNGAI TERAS LUAR RT.03 KECAMATAN TABUNGANEN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	1	BUAH	200.000.000,00
152	H. MURJANI, S.Sos.	MASIH KURANGNYA SARANA DAN	PEMBUATAN 2 BUAH MCK	DESA TABUNGANEN MUARA RT.02 DAN DESA TABUNGANEN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2	BUAH	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
		PRASARANA SANITASI UNTUK MASYARAKAT		MUARA RT.10 KECAMATAN TABUNGANEN, Kab. Barito Kuala	KAB. BARITO KUALA			
153	H. MURJANI, S.Sos.	SIRING SUNGAI RUSAK	PEMBUATAN SIRING SUNGAI DEPAN PUSKESMAS TABUNGANEN	DESA TABUNGANEN KECIL RT.06 KECAMATAN TABUNGANEN, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	0,2	KILOMETER	200.000.000,00
154	H. MURJANI, S.Sos.	MASIH KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA SANITASI UNTUK MASYARAKAT	PEMBUATAN 2 BUAH MCK	DESA KARYA BARU RT.03 DAN DESA TABUNGANEN KECIL RT.06 KECAMATAN TABUNGANEN, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	2	BUAH	-
155	H. MURJANI, S.Sos.	TK/SD/SMP BELUM MEMILIKI PAGAR	PEMBUATAN PAGAR SDN TABUNGANEN TENGAH I	DESA TABUNGANEN TENGAH RT.04 KECAMATAN TABUNGANEN, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
156	YAMANI	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	PEMBANGUNAN JEMBATAN PERMUKIMAN	DESA TAMBAN MUARA BARU RT.08/RT.09/RT.12 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	6	Unit	600.000.000,00
157	YAMANI	JALAN KABUPATEN RUSAK	PENGASPALAN JALAN KABUPETN	DESA TAMBAN BANGUN HANDIL KALUA RT.02/RT.03 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1000	METER	200.000.000,00
158	YAMANI	SIRING JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	PENYIRINGAN JALAN DESA	DESA TAMBAN BANGUN HANDIL KALUA RT.03 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	20	METER	-
159	YAMANI	GORONG-GORONG RUSAK	PEMASANGAN GORONG-GORONG	DESA PURWOSARI II RT.01 KECAMATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	2	BUAH	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				TAMBAN, Kab. Barito Kuala	PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA			
160	YAMANI	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	PEMBANGUNAN JEMBATAN PERMUKIMAN	DESA TAMBAN SARI BARU RT.07 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	2	Unit	200.000.000,00
161	YAMANI	SIRING JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	PENYIRINGAN JALAN PERMUKIMAN	DESA TAMBAN SARI BARU RT.06/RT.07 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
162	YAMANI	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	PEMBANGUNAN JEMBATAN PERMUKIMAN	DESA PURWOSARI BARU RT.05 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	4	Unit	400.000.000,00
163	YAMANI	SIRING JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	PENYIRINGAN JALAN PERMUKIMAN	DESA TAMBAN BANGUN BARU RT.05/RT.06 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	METER	-
164	YAMANI	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN MESIN PERONTOK PADI	DESA TAMBAN MUARA BARU RT.01/RT.02 - RT.12 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	2	UNIT	36.000.000,00
165	YAMANI	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN MESIN PERONTOK PADI	DESA PURWOSARI II RT.06 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	2	UNIT	36.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
166	YAMANI	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN MESIN PEMOTONG RUMPUT	DESA PURWOSARI II RT.05/RT.06 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	2	UNIT	10.000.000,00
167	YAMANI	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN MESIN PERONTOK PADI	DESA TAMBAN BANGUN RT.01 - RT.10 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	4	UNIT	72.000.000,00
168	YAMANI	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN MESIN PERONTOK PADI	DESA TAMBAN BANGUN BARU RT.01 - RT.05 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	3	UNIT	54.000.000,00
169	YAMANI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	REHAB LANGGAR AL MUNAWARAH/AL KHAIR/DARUL IBADAH	TAMBAN MUARA BARU RT.02/RT.07/RT.08 KECAMATAAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	3	UNIT	150.000.000,00
170	YAMANI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PEMBANGUNAN LANGGAR DARUL ISTIQAMAH	DESA TAMBAN BANGUN RT.09 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	200.000.000,00
171	YAMANI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	REHAB LANGGAR NURUL IMAN	DESA PURWOSARI II HANDIL GARUDA RT.03 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	75.000.000,00
172	YAMANI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	REHAB LANGGAR DARUL KIRAM	DESA PURWOSARI II RT.05 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	75.000.000,00
173	YAMANI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG	REHAB MASJID YANPI	TAMBAN BANGUN BARU RT.04	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	100.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
		MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)		KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala				
174	H. MURJANI, S.Sos.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN PANDAN SARI MENUJU SMAN 1 TABUNGANEN SIMPANG PALUI	DESA TABUNGANEN TENGAH RT.03 KECAMATAN TABUNGANEN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
175	H. MURJANI, S.Sos.	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	REHAB PELEBARAN JEMBATAN KECIL SEPANJANG JALAN PANDAN SARI SIMPANG PALUI	DESA TABUNGANEN TENGAH RT.03 KECAMATAN TABUNGANEN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	3	Unit	300.000.000,00
176	H. MURJANI, S.Sos.	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PEMBUATAN PAGAR DAN PENINGGIAN KUBURAN MUSLIMIN NURUS ISLAM	DESA TABUNGANEN TENGAH RT.04 KECAMATAN TABUNGANEN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	150.000.000,00
177	HARMUNI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PENINGGIAN HALAMAN MADRASAH NURUSSALAM	DESA TINGGIRAN DARAT RT.12 KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	150.000.000,00
178	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PEMBANGUNAN SEKOLAH MADRASAH SANAWIYAH	DESA KARYA JADI RT.06/RT.07 KECAMATAN TABUKAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	300.000.000,00
179	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PEMBANGUNAN LANGGAR/MUSHOLA	DESA KARYA MAKMUR RT.03 KECAMATAN TABUKAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	300.000.000,00
180	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PEMBANGUNAN LANGGAR/MUSHOLA	DESA KAARYA JADI BENAMA RT.06/RT.07 KECAMATAN TABUKAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	300.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
181	MUHAMMAD BUDIMAN, S.P	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN AIR BERSIH	DESA KARYA JADI BENAMA RT.06/RT.07 KECAMATAN TABUKAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	10	BUAH	-
182	HASIMUDIN	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PENGADAAN PENGERASAN SUARA/PERANGKAT ALAT HABSYI DAN SERAGAM	DESA KOLAM KIRI RT.10 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	KELOMPOK	60.000.000,00
183	HASIMUDIN	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PEMBANGUNAN GEDUNG MADRASAH SANAWIYAH	DESA BABAT RAYA RT.10 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	350.000.000,00
184	HASIMUDIN	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PEMBANGUNAN GEDUNG TK AL QUR'AN	DESA ANJIR SERAPAT BARU RT.03 KECAMATAN ANJIR MUARA, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	350.000.000,00
185	HASIMUDIN	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	REGAB MUSHOLA AL HIJRAH	DESA SIDOMULYO RT.18 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	75.000.000,00
186	YAMANI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN POROS KIRI TAMBAN	DESA TAMBAN MUARA BARU RT.04/RT.05 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	745	Meter	745.000.000,00
187	YAMANI	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	PEMBANGUNAN JEMBATAN	DESA TAMBAN MUARA BARU RT.06 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	2	Unit	200.000.000,00
188	YAMANI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGERASAN JALAN INSPEKSI	DESA TAMBAN MUARA BARU RT.06 KECAMATAAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	300	Meter	300.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				TAMBAN, Kab. Barito Kuala	KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
189	YAMANI	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	PEMBANGUNAN JEMBATAN COR	DESA TAMBAN BANGUN RT.08 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	3	BUAH	-
190	YAMANI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGERASAN JALAN INSPEKSI	DESA PURWOSARI II HANDIL CINTA BERSIH RT.06 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
191	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	Bedah Rumah Komplek Mawar, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak	Komplek Mawar, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	-
192	YAMANI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGERASAN JALAN INSPEKSI	DESA PURWOSARI II HANDIL BABIRIK RT.05 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
193	YAMANI	SIRING JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	PENYIRINGAN JALAN POROS KANANTAMBAN	DESA PURWOSARI II RT.02 - RT.06 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
194	YAMANI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGERASAN JALAN TEMBUS PENGHUBUNG KE KECAMATAN	DESA PURWOSARI II RT.01 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
195	YAMANI	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	REHAB JEMBATAN PENYEBRANGAN SUNGAI	DESA PURWOSARI II RT.01/RT.03/RT.05 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	3	Unit	300.000.000,00
196	YAMANI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN POROS KIRI TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU RT.01/RT.03/RT.05 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	METER	-
197	YAMANI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PENGADAAN ALAT HABSYI	TAMBAN MUARA BARU RT.05/RT.08/RT.10 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	3	KELOMPOK	75.000.000,00
198	YAMANI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PENGADAAN ALAT HABSYI	DESA TAMBAN BANGUN BARU RT.01 - RT.06 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	KELOMPOK	30.000.000,00
199	YAMANI	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	PENGADAAN TENDA SEROBONG	DESA TAMBAN MUARA BARU RT.03/RT.08/RT.10 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	3	SET	100.000.000,00
200	YAMANI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	REHAB DAN PENINGKATAN HALAMAN LANGGAR SILAMUTTARBIYAH	DESA PURWOSARI II RT.07 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	100.000.000,00
201	YAMANI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PENGADAAN ALAT SUARA UNTUK KELOMPOK BURDAH	DESA PURWOSARI II RT.04/RT.05/RT.06 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	2	KELOMPOK	30.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
202	YAMANI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PENGADAAN TANDON AIR UNTUK LANGGAR	DESA PURWOSARI II RT.05/RT.06/RT.07 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	3	UNIT	45.000.000,00
203	YAMANI	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	PENGADAAN TENDA	DESA PURWOSARI II RT.03/RT.06/RT.07 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	3	SET	100.000.000,00
204	YAMANI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PENGADAAN ALAT HABSYI	DESA PURWOSARI II RT.04 - RT.07 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	2	KELOMPOK	50.000.000,00
205	YAMANI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PENGADAAN ALAT HABSYI	DESA TAMBAN BANGUN KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	KELOMPOK	30.000.000,00
206	YAMANI	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	PENGADAAN TENDA	DESA TAMBAN SARI BARU RT.06/RT.07 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	SET	100.000.000,00
207	YAMANI	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	PEMBANGUNAN PENYEBRANGAN SUNGAI	DESA TAMBAN MUARA BARU RT.09/RT.12 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	2	Unit	200.000.000,00
208	YAMANI	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	PEMBANGUNAN PENYEBRANGAN HANDIL LANGKAH ARJUNA	DESA PURWOSARI II RT.07 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	100.000.000,00
209	GUNAWAN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN DESA	DESA JEJANGKIT MUARA KECAMATAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	6000	METER	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
210	GUNAWAN	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	JEMBATAN PENYEBRANGAN	DESA JEJANGKIT MUARA KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	3	BUAH	-
211	GUNAWAN	TABAT/PINTU AIR RUSAK	PINTU AIR TABAT ULIN	DESA JEJANGKIT MUARA KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	6	BUAH	200.000.000,00
212	GUNAWAN	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	JEMBATAN BOX CULVERT DIJALAN KABUPATEN	DESA JEJANGKIT MUARA KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	6	BUAH	-
213	GUNAWAN	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	ALAT PERTANIAN HANDTRAKTOR	DESA JEJANGKIT MUARA KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	5	UNIT	250.000.000,00
214	GUNAWAN	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	PENGADAAN TENDA	DESA JEJANGKIT MUARA KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	6	SET	100.000.000,00
215	GUNAWAN	JALAN KABUPATEN RUSAK	PENINGKATAN JALAN KABUPATEN PASCA BANJIR	DESA JEJANGKIT MUARA KEACAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	6000	METER	-
216	GUNAWAN	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	REHAB MASJID SABILAL MUTTAQIN	DESA JEJANGKIT MUARA KEACAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	75.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
217	GUNAWAN	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	REHAB BANGUNAN SEKOLAH SDN JEJANGKIT MUARA 2 UNTUK 4 KELAS DAN PEINGKATAN HALAMAN SEKOLAH	DESA JEJANGKIT MUARA KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ru	200.000.000,00
218	GUNAWAN	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PENINGKATAN HALAMAN PESANTREN YAYASAN HIDAYATUTTHALIBIN DAN PEMBUATAN KENOPI UNTUK PARKIRAN	DESA JEJANGKIT MUARA KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	120.000.000,00
219	GUNAWAN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN DESA	DESA SAMPURNA KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
220	GUNAWAN	FASILITAS KESEHATAN RUSAK/TIDAK MEMADAI	PENINGKATAN HALAMAN PUSKESDES DAN KENOPI SERTA PELUASAN RUANGAN PELAYANAN	DESA SAMPURNA KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	200.000.000,00
221	GUNAWAN	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	REHAB MASJID NURUL TAQWA	DESA SAMPURNA KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	75.000.000,00
222	GUNAWAN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN PERMUKIMAN	DESA JEJANGKIT PASAR KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	5000	METER	-
223	GUNAWAN	JALAN KABUPATEN RUSAK	PENINGKATAN JALAN KABUPATEN	DESA JEJANGKIT PASAR KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	6000	METER	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
224	GUNAWAN	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	BOX CULVERT JEMBATAN KABUPATEN	DESA JEJANGKIT PASAR KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	10	BUAH	-
225	GUNAWAN	TABAT/PINTU AIR RUSAK	PINTU AIR TABAT ULIN	DESA JEJANGKIT PASAR KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	6	BUAH	200.000.000,00
226	GUNAWAN	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	ALAT MESIN HANDTRAKTOR	DESA JEJANGKIT PASAR KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	4	UNIT	200.000.000,00
227	GUNAWAN	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) SEPANJANG JALAN KABUPATEN	DESA JEJANGKIT PASAR KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	200	BUAH	1.400.000.000,00
228	GUNAWAN	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	JEMBATAN PENYEBRANGAN SUNGAI	DESA JEJANGKIT PASAR KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	3	BUAH	-
229	GUNAWAN	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	REHAB MASJID MIFTAHUL KHAIR	DESA JEJANGKIT PASAR KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	75.000.000,00
230	GUNAWAN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN DESA	DESA BAHANDANG KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
231	GUNAWAN	FASILITAS KESEHATAN RUSAK/TIDAK MEMADAI	PENIINGKATAN HALAMAN POSKESDES	DESA BAHANDANG KECAMATAN	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala				
232	GUNAWAN	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	PEMBUATAN JEMBATAN ULIN	DESA BAHANDANG KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	4	Unit	400.000.000,00
233	GUNAWAN	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	REHAB MASJID AL MUHAJIRRIN	DESA BAHANDANG KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	75.000.000,00
234	GUNAWAN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN PERMUKIMAN	DESA SUNGAI SAHURAI KECAMATAN RANTAU BADAUH, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	6000	METER	-
235	GUNAWAN	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	ALAT MESIN HANDTRAKTOR	DESA SUNGAI SAHURAI KECAMATAN RANTAU BADAUH, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	4	UNIT	100.000.000,00
236	GUNAWAN	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	JEMBATAN PENYEBRANGAN SUNGAI	DESA JEJANGKIT TIMUR KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	3	Unit	150.000.000,00
237	GUNAWAN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN PERMUKIMAN PASCA KEBANJIRA	DESA JEJANGKIT TIMUR KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
238	GUNAWAN	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN	REHAB MASJID BAITURRAHMAN	DESA JEJANGKIT TIMUR KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	75.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
		BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)						
239	GUNAWAN	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	BOX CULVERT JEMBATAN	DESA JEJANGKIT BARAT KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	10	Unit	500.000.000,00
240	GUNAWAN	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	JEMBATAN PENYEBRANGAN SUNGAI	DESA JEJANGKIT BARAT KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	4	Unit	200.000.000,00
241	GUNAWAN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN PERMUKIMAN	DESA JEJANGKIT BARAT KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	3000	Meter	3.000.000.000,00
242	GUNAWAN	TABAT/PINTU AIR RUSAK	PIBTU AIR TABAT ULIN	DESA JEJANGKIT BARAT KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	6	BUAH	200.000.000,00
243	HARMUNI	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN HANDTRAKTOR	DESA TINGGIRAN DARAT DAN DESA TAMBAN TAMBAN RAYA KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	4	UNIT	100.000.000,00
244	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA TINGGIRAN TENGAH HANDIL AJI KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
245	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PEBIBFKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA JELAPAT II HANDIL HANURA KECAMATAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	1000	Meter	1.000.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
246	HASIMUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	LEVELLING JALAN POROS	DESA BABAT RAYA RT.01 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	2000	Meter	2.000.000.000,00
247	HASIMUDIN	SIRING JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	SIRING DEPAN LANGGAR MIFTAHUL JANNAH	DESA KOLAM KIRI RT.09 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	25	Meter	100.000.000,00
248	HASIMUDIN	SIRING JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	SIRING + GORONG-GORONG 1 BUAH DLANGGAR NURUL HUDHA	DESA KOLAM KIRI RT.10 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	25	Meter	100.000.000,00
249	HASIMUDIN	GORONG-GORONG RUSAK	JEMBATAN/GORONG-GORONG HANDIL TUMIH	DESA TUMIH RT.09 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	BUAH	-
250	YAMANI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PENAMBAHAN INSENTIF LDK DESA DAN KAUM MASJID 40 ORANG	DESA TAMBAN BANGUN RT.01 - RT.10 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	2	KELOMPOK	192.000.000,00
251	YAMANI	MASIH KURANGNYA PELATIHAN UMKM	PELATIHAN SASIRANGAN/TATA RIAS DAN MENJAHIT	DESA TAMBAN BANGUN RT.01 - RT.10 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	2	KELOMPOK	30.000.000,00
252	YAMANI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PEMBUATAN WC DAN TEMPAT WUDHU LANGGAR AL AMIN/ AL MUNAWARAH/ AL KHAIR	DESA TAMBAN MUARA BARU RT.02/RT.03/RT/10 KECAMATAN	SEKRETARIAT DAERAH	3	UNIT	120.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				TAMBAN, Kab. Barito Kuala				
253	YAMANI	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	PENGADAAN TIANG LISTRIK DAN JARINGAN LISTRIK PLN	DESA TAMBAN MUARA BARU RT.07 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	20	BUAH	300.000.000,00
254	YAMANI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	REHAB DAN PEMBUATAN TEMPAT WUDHU DAN WC, SERTA PENGADAAN ALAT EKOSISTEM MASJID JAMI' AL KAUTSAR	DESA TAMBAN MUARA BARU RT.12 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	150.000.000,00
255	YAMANI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PEMBUATAN KENOPI DAN TEMPAT WUDHU MASJID AL AMIN	DESA TAMBAN SARI RT.07 KECAMATAN TAMBAN, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	100.000.000,00
256	GUNAWAN	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PPENGADAAN ALAT PERTANIAN HANDTRAKTOR	DESA JEJANGKIT BARAT KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	5	UNIT	250.000.000,00
257	GUNAWAN	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	REHAB MASJID MIFTAHUL JANNAH	DESA JEJANGKIT BARAT KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	75.000.000,00
258	GUNAWAN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	JALAN POROS TRANSMIGRASI	DESA CAHAYA BARU KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1200	Meter	1.200.000.000,00
259	GUNAWAN	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	JEMBATAN ULIN	DESA CAHAYA BARU KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	5	Unit	400.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
260	GUNAWAN	TABAT/PINTU AIR RUSAK	TABAT/PINTU AIR	DESA CAHAYA BARU KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	4	BUAH	200.000.000,00
261	GUNAWAN	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	PENGADAAN HANDTRAKTOR	DESA CAHAYA BARU KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	4	UNIT	100.000.000,00
262	GUNAWAN	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	REHA MASJID NURUL MUHAJIRRIN	DESA CAHAYA BARU KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	75.000.000,00
263	GUNAWAN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN PERMUKIMAN	DESA SUNGAI GAMPA MUARA KECAMATAN RANTAU BADAUH, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	3000	Meter	3.000.000.000,00
264	GUNAWAN	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	REHAB JEMBATAN PERMUKIMAN	DESA SUNGAI GAMPA MUARA KECAMATAN RANTAU BADAUH, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	6	Unit	300.000.000,00
265	GUNAWAN	ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR	NORMALISASI ALIRAN SUNGAI	DESA SUNGAI GAMPA MUARA KECAMATAN RANTAU BADAUH, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	6	KILOMETER	200.000.000,00
266	GUNAWAN	ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR	NORMALISASI ALIRAN SUNGAI PERTANIAN	DESA SUNGAI SAHURAI KECAMATAN RANTAU BADAUH, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	8	KILOMETER	200.000.000,00
267	GUNAWAN	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	JEMBATAN PENYEBRANGAN ARAH PERTANIAN	DESA SUNGAI SAHURAI KECAMATAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	10	BUAH	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				RANTAU BADAUH, Kab. Barito Kuala	KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
268	GUNAWAN	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	JEMBATAN PERTANIAN UNTUK PENYEBRANGAN ALAT PERTANIAN	DESA JEJANGKIT BARAT KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	6	Unit	300.000.000,00
269	GUNAWAN	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	JEMBATAN PANJANG 17x3 METER	DESA SAMPURNA KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
270	SAYYID MUHAMMAD ANIES	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	REHAB PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI A.N YANTO	DESA TANJUNG HARAPAN RT.5 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	BUAH	-
271	SAYYID MUHAMMAD ANIES	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	REHAB PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI A.N MAULISA NORRITA	DESA TANJUNG HARAPAN RT.2 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	BUAH	-
272	SAYYID MUHAMMAD ANIES	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PERBAIKAN JALAN	DESA PANCA KARYA KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
273	SAYYID MUHAMMAD ANIES	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	REHAB PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI A.N BADRUDIN	DESA PANCA KARYA KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	BUAH	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
274	SAYYID MUHAMMAD ANIES	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PERBAIKAN JALAN	DESA SUNGAI LUMBAH HANDIL PANDAN RT.09/RT.10 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
275	SAYYID MUHAMMAD ANIES	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	PENGADAAN PERLENGKAPAN TENDA DAN KURSI	DESA SUNGAI LUMBAH RT.05 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	SET	100.000.000,00
276	SAYYID MUHAMMAD ANIES	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	KOSTUM GRUP YASINAN IBU-IBU 25 ORANG	DESA SUNGAI LUMBAH RT.04 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	KELOMPOK	25.000.000,00
277	SAYYID MUHAMMAD ANIES	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	KOSTUM DAN TERBANG GRUP MAULID 50 ORANG	DESA SUNGAI LUMBAH RT.04 - RT.07 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	KELOMPOK	50.000.000,00
278	SAYYID MUHAMMAD ANIES	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	REHAB BANGUNAN MADRASAH MDT-NU	DESA SUNGAI LUMBAH RT.05 KECAMATAAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	75.000.000,00
279	SAYYID MUHAMMAD ANIES	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PERBAIKAN JALAN	DESA BERINGIN RT.02/RT.03 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	350	Meter	350.000.000,00
280	SAYYID MUHAMMAD ANIES	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	PENGADAAN PERLENGKAPAN TENDA	DESA BERINGIN KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	SET	100.000.000,00
281	SAYYID MUHAMMAD ANIES	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	REHAB RUANG KELAS MDT KHALILIYAH, PENAMBAHAN RUANG MUSHOLA DAN HALAMAN SEKOLAH	KELURAHAN BERANGAN KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
282	SAYYID MUHAMMAD ANIES	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	PERBAIKAN JALAN KOMPLEK BATOLA RESIDENCE MENUJU SEKOLAHAN	KELURAHAN HANDIL BAKTI KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	800	Meter	800.000.000,00
283	SAYYID MUHAMMAD ANIES	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PERLENGKAPAN GRUP MAULID HABSYI ASSYARIFAH	KELURAHAN BERANGAS RT.03 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	KELOMPOK	30.000.000,00
284	SAYYID MUHAMMAD ANIES	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PERLENGKAPAN SPIKER DAN MIC GRUP YASINAN AL MADINAH	DESA PULAU SEWANGI RT.11 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	KELOMPOK	30.000.000,00
285	SAYYID MUHAMMAD ANIES	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	REHAB MUSHOLA GG BABINSA	DESA PULAU SEWANGI KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	50.000.000,00
286	SAYYID MUHAMMAD ANIES	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	KEPERLUAN SOUND SISTEM DAN TERBANG GRUP MAULID AL IKHWAN	DESA PULAU SEWANGI KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	KELOMPOK	30.000.000,00
287	SAYYID MUHAMMAD ANIES	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	BATU UNTUK HALAMAN MUSHOLA	DESA PULAU SEWANGI RT.11 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	30.000.000,00
288	SAYYID MUHAMMAD ANIES	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PERLENGKAPAN GRUP MAULID KHAIRUNNISA	DESA SEMANGAT DALAM KOMPLEK MITRA SEMANGAT RT.03 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	KELOMPOK	30.000.000,00
289	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	DERMAGA/PELABUHAN RUSAK	Pembangunan Dermaga Langgar Al Badawi, Desa Berangas Timur, Kec. Alalak	Desa Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	1	paket	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
290	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Peningkatan Jalan di Komplek Handil Bakti Indah, Desa Berangas Timur, Alalak	Komplek Handil Bakti Indah, Desa Berangas Timur, Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
291	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	DESA JELAPAT BARU HANDIL BABUI KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
292	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Rehabilitasi SDN Tinggiran Darat	Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
293	HARMUNI	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	PEMBANGUNAN JEMBATAN (4x17M) PENYEBRANGAN MASJID AL MUJAHIDIN	DESA TINGGIRAN DARAT RT.07 KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	300.000.000,00
294	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Rehabilitasi SDN Tamban Raya Baru	Desa Tamban Raya Baru RT.03 Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
295	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	RUANG GURU SEKOLAH TK/SD/SMP RUSAK	Rehabilitsasi Ruang Kantor SDN Tamban Raya Baru	Desa Tamban Raya Baru RT.03 Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
296	H. BAHRIANNOOR, S.AP	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman Kurang Tinggi	SDN Semangat Dalam 4 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	200.000.000,00
297	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	Pembuatan Tenda 1 Set/ Lengkap	Desa Mekarsari RT.10 Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	Set	100.000.000,00
298	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	Pembuatan Tenda 1 Set/ Lengkap	Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	Set	100.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
299	H. BAHRIANNOOR, S.AP	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman Kurang Memadai	SDN Semangat Dalam 5 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
300	H. BAHRIANNOOR, S.AP	DERMAGA/PELABUHAN RUSAK	Dermaga Rusak	Desa Berangas Timur Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	200.000.000,00
301	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	Pengadaan Tenda 1 Set/ Lengkap	Desa Sekata Baru RT.01 RW.17 Kecamatan Tamban , Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	Set	100.000.000,00
302	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	Pengadaan Tenda 1 Set/ Lengkap	Desa Tamban Raya RT.09 & RT.10 Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	Set	100.000.000,00
303	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN KABUPATEN RUSAK	Jalan Rusak	Desa Pulau Alalak Rt. 1 s/d 10 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	2000	Meter	-
304	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	Pengadaan Hand Traktor,, koptan " Tunas Harapan "	Desa Tinggiran Darat RT.03 Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	1	Unit	50.000.000,00
305	H. BAHRIANNOOR, S.AP	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman Kurang Memadai	SDN di Jalan Ray 17 Rt. 07 Desa Beringin Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
306	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan Rusak	Desa Panca Karya Rt. 01 s/d Rt. 05 Kec. alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
307	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan Rusak	Desa Semangat Bakti Rt. 02 s/d Rt. 06 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	2000	Meter	2.000.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
					PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
308	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	JALAN KABUPATEN RUSAK	Pengerasan jalan dengan Bekros jalan Handil Nasib Untung	Desa Indah Sari Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	2	Kilometer	200.000.000,00
309	H. BAHRIANNOOR, S.AP	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	Jalan Gelap	Desa Pulau Sugara Rt. 09 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	8	Buah	56.000.000,00
310	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peninggian Halaman SDN Porwosari Baru 2	Desa Porwosari Baru Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
311	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Pembuatan 2 buah jembatan dan 1 gorong- gorong	Desa Tamban Muara RT.04 Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	3	Buah	-
312	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Pembuatan Jembatan 2 Buah	Desa Tamban Kecil RT.07 dan RT.08 Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	2	Buah	-
313	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Pembuatan Jembatan Lantai Cor Beton	Desa Karang Mekar RT.06 Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Buah	-
314	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	JALAN KABUPATEN RUSAK	Peningkatan Jalan Aspal, Parit 13. RT.12 Desa Porwosari 1	Desa Porwosari 1 RT.12 Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	750	Meter	-
315	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	JALAN KABUPATEN RUSAK	Peningkatan Jalan Handil Malaya dengan Cor Beton	Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Kilometer	-
316	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	JALAN KABUPATEN RUSAK	Peningkatan Jalan Handil Pinang dan Jampalus	Desa Tamban Raya Baru RT.02 Kecamatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	1	Kilometer	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				Mekarsari, Kab. Barito Kuala	PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA			
317	Ahmad ridho S.E	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Permukiman Lingkungan	Desa Barambai Kolam Kanan Kecamatan Barambai, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	5000	Meter	5.000.000.000,00
318	H. BAHRIANNOOR, S.AP	DERMAGA/PELABUHAN RUSAK	Pembangunan Dermaga Penyebrangan Jalan Pulau Alalak RT.01	Desa Pulau Alalak RT.01 Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	200.000.000,00
319	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Rehabilitasi Jembatan Desa Bagus	Jl. S. Parman Desa Bagus RT.06 Kecamatan Marabahan, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	2	Buah	-
320	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Griya Permata Jalan Sapir 1 RT. 12	Komplek Griya Permata Jalan Sapir 1 RT. 12 Kecamatan Alalak , Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	2000	Meter	2.000.000.000,00
321	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Perbaikan Jalan Gang RT.01 Desa Pulau Sewangi	Desa Pulau Sewangi RT.01 Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
322	H. BAHRIANNOOR, S.AP	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	Penerangan Jalan Umum	Jalan Karayuda RT.05 Blok 9 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	10	Buah	70.000.000,00
323	H. BAHRIANNOOR, S.AP	DERMAGA/PELABUHAN RUSAK	Pembangunan Dermaga Penyebrangan	Jalan Pulau Alalak RT.01 Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
324	H. BAHRIANNOOR, S.AP	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT	Penyedian Air Bersih	Desa Panca Karya Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Buah	-
325	H. BAHRIANNOOR, S.AP	DERMAGA/PELABUHAN RUSAK	Dermaga Tidak ada	Desa Pulau Alalak Rt. 01 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	200.000.000,00
326	H. BAHRIANNOOR, S.AP	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	Penerangan Jalan Umum	Jalan Pembelah Pulau RT.01 Sampai dengan RT.12 Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	15	Buah	105.000.000,00
327	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Jembatan Rusak	Desa Bagus Rt. 06 Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Buah	-
328	H. BAHRIANNOOR, S.AP	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	Bedah Rumah Pa Hamdan	Desa Pulau Sewangi RT.01 Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	-
329	H. BAHRIANNOOR, S.AP	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	Bedah Rumah Pa Saidi	Desa Tanjung Harapan RT.03 Kecamatan Alalak , Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	-
330	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Jalan Rusak	Komplek Griya Permata Jalan Safir 1 Rt. 12 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	800	Meter	800.000.000,00
331	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Jalan Rusak	Komplek Mutiara Kemuning Indah Rt. 26 Kel. Handil Bakti Kec.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	1000	Meter	1.000.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				Alalak, Kab. Barito Kuala	PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
332	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Jalan Rusak	Komplek Shalli Messi Village Desa Semangat Dalam Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
333	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Jalan Rusak	Komplek Shalli Messi 5 Desa Semangat Karya Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
334	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN KABUPATEN RUSAK	Jalan Rusak	Desa Pulau Sewangi Rt. 01 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1500	Meter	-
335	H. BAHRIANNOOR, S.AP	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	Jalan Gelap	Jalan Karayuda Rt. 05 Blok 09 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	10	Buah	70.000.000,00
336	H. BAHRIANNOOR, S.AP	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	Jalanan Gelap	Desa Pulau Sewangi Rt. 01 s/d Rt. 12 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	12	Buah	84.000.000,00
337	H. BAHRIANNOOR, S.AP	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	Rumah Rusak	Desa Pulau Sewangi Rt. 01 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	-
338	H. BAHRIANNOOR, S.AP	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	Rumah Rusak	Desa Tanjung Harapan Rt. 03 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
339	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan Penghubung RT.10	Desa Belandean Muara RT.04 DAN RT.10 Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	2	Buah	-
340	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN KABUPATEN RUSAK	Peningkatan Jalan Kabupaten	Jalan Ray 17 RT.08, 09,10,dan 14 Desa Belandean Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	2	Kilometer	-
341	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Perbaikan Jalan Warga RT.01 Panjang 160 M Lebar 1 M	Desa Pulau Sewangi RT.01 Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	160	Meter	150.000.000,00
342	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan Rusak	Desa Pulau Sewangi Rt. 01 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	800	Meter	800.000.000,00
343	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan Gang Mesjid Nurul Amin RT.09	Desa Pulau Sewangi RT.09 Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	300	Meter	-
344	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Pembuatan Titian Ulin RT.05	Desa Pulau Sewangi RT.05 Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
345	H. BAHRIANNOOR, S.AP	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	Bedah Rumah	Desa Pulau Sewangi Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	3	Buah	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
346	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan Rusak	Gang Masjid Nurul Amin Rt. 09 Desa Pulau Sewangi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	300	Meter	-
347	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Jembatan belum Ada	Desa Pulau Sewangi Rt. 05 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	100.000.000,00
348	H. BAHRIANNOOR, S.AP	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	Bantuan Pembuatan WC	Desa Pulau Sewangi Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	-	Unit	-
349	H. BAHRIANNOOR, S.AP	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	Rumah Rusak	Desa Pulau Sewangi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	3	Buah	-
350	H. BAHRIANNOOR, S.AP	MASIH KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA SANITASI UNTUK MASYARAKAT	Perlunya Toilet Umum	Desa Pulau Sewangi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Buah	-
351	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Perluasan Halaman Sekolah SDN Sungai Gampa RT.07	Desa Sungai Gampa RT.07 Kecamatan Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
352	YULIA DWI ASTUTI	JALAN KABUPATEN RUSAK	Peningkatan Halaman Kantor Koramil	Koramil Mandastana Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Kilometer	-
353	YULIA DWI ASTUTI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN	Bantuan Rehablitasi Musholla Mawaizunnafsi	Alamat Desa Tabing Rimbah RT.03 Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Set	50.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
		BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)						
354	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan Halaman Sekolah SDN Pantai Hambawang RT.04 RW.02	Desa Pantai Hambawang RT.04 RW.02 Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
355	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan Halaman Sekolah SDN Sungai Ramania	Desa Sei Ramania RT. 03 Kecamatan Mandastna, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
356	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Pemeliharaan Halaman Sekolah SDN Sei Ramania	Desa Sei Ramania RT.03 Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
357	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan Halaman Sekolah SDN Tanipah 1	SDN Tanipah 1 RT.04 dan RT.06 Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
358	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan Halaman Sekolah SDN Tanipah 2	SDN Tanipah 2 Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
359	YULIA DWI ASTUTI	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Pemeliharaan Ruas Jalan Di lingkungan Kecil dan Sempit	Desa Tanipah RT.04 sampai RT.06 Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
360	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan Halaman SDN Tabing Rimbah 1	SDN Tabing Rimbah 1 Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
361	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan Halaman SDN Tabing Rimbah 2	SDN Tabing Rimbah 2 Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
362	YULIA DWI ASTUTI	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Ruang Kelas SDN Tabing Rimbah 2 Rusak	SDN Tabing Rimbah 2 Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
363	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan Halaman Sekolah SDN Puntik Luar 1	SDN Puntik Luar 1 Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
364	YULIA DWI ASTUTI	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Puntik Luar 1	SDN Puntik Luar 1 Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
365	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan Halaman SDN Puntik Tengah	SDN Puntik Tengah Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
366	SAYYID MUHAMMAD ANIES	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PERBAIKAN JALAN SAKA BINJAI	DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
367	YULIA DWI ASTUTI	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Jejangkit Muara 2	SDN Jejangkit Muara 2 Kecamatan Jejangkit, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
368	SAYYID MUHAMMAD ANIES	FASILITAS KESEHATAN RUSAK/TIDAK MEMADAI	FASILITAS DESA MOBIL AMBULANCE	DESA PANCA KARYA RT.05 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	400.000.000,00
369	YULIA DWI ASTUTI	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Jejangkit Barat 2	SDN Jejangkit Barat 2 Kecamatan Jejangkit, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
370	SAYYID MUHAMMAD ANIES	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	PENGADAAN TIANG LISTRIK LAMPU PENERANG JALAN	DESA PANCA KARYA RT.05 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	15	BUAH	165.000.000,00
371	YULIA DWI ASTUTI	WC SEKOLAH TK/SD/SMP RUSAK	Rehabilitasi WC Guru dan Murid SDN Jejangkit Barat 2	SDN Jejangkit Barat 2 Kecamatan Jejangkit, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
372	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan Halaman Sekolah SDN Jejangkit Barat 1	SDN Jejangkit Barat 1 RT.01 Kecamatan Jejangkit, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
373	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan Halaman Sekolah SDN Jejangkit Barat 2	SDN Jejangkit Barat 2 RT.05 Kecamatan Jejangkit, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
374	SAYYID MUHAMMAD ANIES	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PERLENGKAPAN SOUND SISTEM GRUP MAULID 2 BUAH SPIKER AKTIF 12INCH, 1 MIXER 8CH, 4 BIJI TERBANG JEPARA DAN SERAGAM 20 LEMBAR	DESA BERINGIN RT.04 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	KELOMPOK	50.000.000,00
375	SAYYID MUHAMMAD ANIES	SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN TIDAK MEMADAI	ALAT TRANSPORTASI TOSA	DESA BERINGIN KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	100.000.000,00
376	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan Halaman SDN Sampurna II	Desa Sampurna RT.08 Kecamatan Jejangkit, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
377	SAYYID MUHAMMAD ANIES	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	PERBAIKAN JALAN KOMPLEK ALAMANDA RESIDENCE	DESA SEMANGAT DALAM KOMPLEK ALAMANDA RESIDENCE JALUR 4 RT.06 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	300	Meter	300.000.000,00
378	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan Halaman SDN Sampurna I	Desa Sampurna RT.04 Keacamatan Jejangkit, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
379	SAYYID MUHAMMAD ANIES	MASIH KURANGNYA BIBIT UNTUK PETANI (PADI/JERUK/NENAS)	PERMINTAAN PUPUK PERTANIAN	DESA SEMANGAT KARYA KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	17	KARUNG	29.750.000,00
380	SAYYID MUHAMMAD ANIES	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	SIRING KUBAH AL HABIB SALMIN BIN AHMAD AL BALGHAITS	KELURAHAN BERANGAS RT.06 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	200.000.000,00
381	YULIA DWI ASTUTI	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Rehabilitasi ./ Pembangunan Jembatan Infeksi Peyambung Antara Desa Sei Ramania dengan Desa Puntik Luar	Desa Sei Ramania RT.01 Kecamatan Mandastana , Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Buah	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
382	SAYYID MUHAMMAD ANIES	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PERBAIKAN JALAN	KELURAHAN BERANGAS RT.06 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	600	METER	-
383	YULIA DWI ASTUTI	JALAN KABUPATEN RUSAK	Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten Puntik Raya	Jalan Puntik Raya Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Kilometer	-
384	SAYYID MUHAMMAD ANIES	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT	INSTALASI PERAIRAN BERSIH (PDAM) UNTUK 100 RUMAH	KELURAHAN BERANGAS RT.05/RT.06 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	100	BUAH	-
385	YULIA DWI ASTUTI	JALAN KABUPATEN RUSAK	Peningkatan / Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten dan Pengaspalan	Jalan Ray 3 Polden Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	5	Kilometer	-
386	SAYYID MUHAMMAD ANIES	SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN TIDAK MEMADAI	KEPERLUAN ALAT TRANSPORTASI TOSA	KELURAHAN BERANGAS RT.04 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	100.000.000,00
387	YULIA DWI ASTUTI	JALAN KABUPATEN RUSAK	Pemeliharaan Ruas Jalan Kabupaten dan Pengaspalan	Desa Tanipah RT.01.02.03 Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	3	Kilometer	-
388	SAYYID MUHAMMAD ANIES	FASILITAS KESEHATAN RUSAK/TIDAK MEMADAI	PENGADAAN MOBIL AMBULANCE UNTUK MASYARAKAT	KELURAHAN BERANGAS RT.05 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	400.000.000,00
389	SAYYID MUHAMMAD ANIES	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PEMBIKINAN JALAN TITIAN ULIN	DESA PULAU SEWANGI RT.11 KECAMATAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	50	METER	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				ALALAK, Kab. Barito Kuala	PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
390	YULIA DWI ASTUTI	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Pembangunan Jembatan Infiksi Rusak	Desa Lokrawa Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Buah	200.000.000,00
391	SAYYID MUHAMMAD ANIES	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PENGADAAN SARANA PERLENGKAPAN MAULID HANSYI GRUP RAUDATUL JANNAH	DESA PULAU SEWANGI, KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	KELOMPOK	50.000.000,00
392	SAYYID MUHAMMAD ANIES	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PERBAIKAN JALAN	DESA BERANGAS BARAT RT.02/RT.03 KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	METER	-
393	Ahmad ridho S.E	MASIH KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA SANITASI UNTUK MASYARAKAT	Pembuatan WC Warga Desa Batik RT.03 dan RT.04	Desa Batik RT.03 dan RT.04 Kecamatan Bakumpai, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	15	Buah	-
394	GUNAWAN	MASIH KURANGNYA BIBIT UNTUK PETANI (PADI/JERUK/NENAS)	BIBIT PADI UNGGUL UNTUK 6 KELOMPOK	DESA SAMPURNA KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	6	TON	108.000.000,00
395	Ahmad ridho S.E	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Lepasan 1	Jl. Atak Imberasnyah RT.05 RW.02 Kelurahan Lepasan Kecamatan Bakumpai, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
396	Ahmad ridho S.E	RUANG GURU SEKOLAH TK/SD/SMP RUSAK	Rehabilitasi Ruang Guru SDN Lepasan 1	Jl. Atak Imberasnyah RT.05 RW.02 Kelurahan Lepasan Kecamatan Bakumpai, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
397	GUNAWAN	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	PENGADAAN TENDA PANGGUNG DAN PERLENGKAPAN MASAK PIRING PANCI DLL	DESA SAMPURNA KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	SET	100.000.000,00
398	Ahmad ridho S.E	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan Halaman SDN Murung Raya	Desa Murung Raya Kecamatan Bakumpai, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
399	YULIA DWI ASTUTI	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	Pembangunan Moshola AR-RAUDAH	Desa Sungai Pantai RT.06 Kecamatan Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Set	300.000.000,00
400	GUNAWAN	MASIH KURANGNYA BIBIT UNTUK PETANI (PADI/JERUK/NENAS)	SAPRODI BIBIT UNGGUL UNTUK 7 KELOMPOK	DESA JEJANGKIT MUARA KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	7	TON	126.000.000,00
401	GUNAWAN	MASIH KURANGNYA BIBIT UNTUK PETANI (PADI/JERUK/NENAS)	KELOMPOK PERKEBUNAN SAWIT PENGOLAHAN LAHAN DAN BIBIT SERTA PUPUK	DESA JEJANGKIT TIMUR KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	100	TON	2.000.000.000,00
402	GUNAWAN	MASIH KURANGNYA BIBIT UNTUK PETANI (PADI/JERUK/NENAS)	SAPRODI PERTANIAN UNTUK 9 KELOMPOK	DESA CAHAYA BARU KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	9	TON	162.000.000,00
403	GUNAWAN	ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR	NORMALISASI ALIRAN SUNGAI MENUJU ALIRAN SUNGAI BARITO	DESA CAHAYA BARU KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	6	KILOMETER	200.000.000,00
404	GUNAWAN	MASIH KURANGNYA BIBIT UNTUK PETANI (PADI/JERUK/NENAS)	SAPRODI UNTUK 9 KELOMPOK	DESA JEJANGKIT PASAR KECAMATAN JEJANGKIT, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	9	TON	162.000.000,00
405	HASIMUDIN	SIRING JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	SIRING ULIN	DESA ANJIR MUARA LAMA RT.02 KECAMATAN ANJIR	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	500	Meter	500.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				MUARA LAMA, Kab. Barito Kuala	KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
406	BASRIN, S.Hut	JALAN KABUPATEN RUSAK	Peningkatan Jalan Ruas no.043, karena tidak layak	Jalan Ruas No.043, Jalan tembus Tabukan Raya ke Muara Pulau, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	kilometer	-
407	BASRIN, S.Hut	JALAN KABUPATEN RUSAK	Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Jalan 43	Desa Muara Pulau, Tabukan, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	kilometer	-
408	BASRIN, S.Hut	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Pemeliharaan Rutin Jembatan Ruas Jalan 43	Desa Tamba Jaya, Tabukan, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	buah	-
409	BASRIN, S.Hut	SIRING SUNGAI RUSAK	Pembuatan Siring Ruas jalan 43	Des Teluk Tamba, Tabukan, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	kilometer	-
410	BASRIN, S.Hut	JALAN KABUPATEN RUSAK	Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan 38	Desa Jambu Baru, Kuripan, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	kilometer	-
411	BASRIN, S.Hut	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Pemeliharaan Rutin Jembatan Ruas Jalan 39	Desa Kabuau, Kuripan, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	buah	-
412	BASRIN, S.Hut	SIRING SUNGAI RUSAK	Pembuatan Siring Ruas Jalan 38	Desa Jambu Baru, Kuripan, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	buah	-
413	BASRIN, S.Hut	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	pemeliharaan RutinJembatan Ruas Jalan 39	Kabuau, Kuripan, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	buah	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
					KAB. BARITO KUALA			
414	BASRIN, S.Hut	FASILITAS KESEHATAN RUSAK/TIDAK MEMADAI	Keperluan Ambulan Desa	Desa Muara Pulau, Tabukan, Kab. Barito Kuala	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	1	unit	400.000.000,00
415	BASRIN, S.Hut	FASILITAS KESEHATAN RUSAK/TIDAK MEMADAI	Keperluan Ambukan Desa	Desa Jambu Baru, Kuripan, Kab. Barito Kuala	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	1	unit	400.000.000,00
416	BASRIN, S.Hut	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	Keperluan Hand Tractor untuk desa	Desa Pantang Raya, Tabukan, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	1	unit	50.000.000,00
417	BASRIN, S.Hut	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	Keperluan Hand Tractor	Desa Pantang Baru, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	1	unit	50.000.000,00
418	SYAIFUL ASARI, S.H.	MASIH KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA SANITASI UNTUK MASYARAKAT	Pembangunan MCK Desa Tabunganen Pemurus	Desa Tabunganen Pemurus, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	paket	-
419	SYAIFUL ASARI, S.H.	ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR	Normalisasi Sungai Desa Tabunganen Pemurus Tengah	Desa Tabunganen Pemurus Tengah, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	paket	200.000.000,00
420	Ahmad ridho S.E	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pengaspalan Jalan Pemukiman Desa Rimbun Tulang RT.01 sampai RT.08	Desa Rimbun Tulang RT.01 sampai dengan RT.08 Kecamatan Kuripan, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1600	Meter	1.600.000.000,00
421	Ahmad ridho S.E	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	Rehab Gedung XKS MTQ Kecamatan Kuripan	Desa Rimbun Tulang RT.07 Kecamatan Kuripan , Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Set	250.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
422	Ahmad ridho S.E	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	Pengadaan Sound Sistem Untuk Langgar AL- HUSNA Desa Rimbun Tulang Kecamatan Kuripan	Desa Rimbun Tulang RT.06 Kecamatan Kuripan , Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Set	30.000.000,00
423	YULIA DWI ASTUTI	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Pemeliharaan jalan lingkungan Desa Pantai Hambawang RT.04,05,06	Desa Pantai Hambawang RT.04,05 dan RT.06 Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
424	YULIA DWI ASTUTI	SIRING JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Pembuatan Siring Jalan Poros Desa Sungai Kambat RT.01 Kecamatan Cerbon	Jln Poros Desa Sungai Kambat RT.01 Kecamatan Cerbon, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	150	Meter	-
425	YULIA DWI ASTUTI	JALAN KABUPATEN RUSAK	Pemeliharaan / Peningkatan Jalan Kabupaten Desa Sungai Kambat RT.01, dengan RT.05	Desa Sungai Kambat RT.01 sampai dengan RT.05 Kecamatan Cerbon, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	6	Kilometer	-
426	JUNAIDIN, S.H.	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Jembatan yang ada kuran memadai	Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban , Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	17	meter	-
427	JUNAIDIN, S.H.	JALAN KABUPATEN RUSAK	Peningkatan Jalan	Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban , Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1000	meter	-
428	JUNAIDIN, S.H.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pembuatan Jalan Titian	Desa Tinggiran 2 Luar Kecamatan Tamban , Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
429	JUNAIDIN, S.H.	TABAT/PINTU AIR RUSAK	tabat air belum ada	Desa Tinggiran 2 Luar RT. 01 Kecamatan Tamban , Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2	Buah	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
					KAB. BARITO KUALA			
430	JUNAIDIN, S.H.	MASIH KURANG MEMADAINYA FASILITAS KEAGAMAAN/SOSIAL UNTUK MASYARAKAT	halaman	Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen , Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	600	meterpersegi	250.000.000,00
431	JUNAIDIN, S.H.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pembuatan Jalan Titian	Desa Tinggiran 2 Luar RT. 07Kecamatan Tamban , Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
432	JUNAIDIN, S.H.	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Jembatan Kurang layak	Jalan M. dhani Jelapat Kecamatan Tamban , Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	60	meterpersegi	-
433	JUNAIDIN, S.H.	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Bangun baru untuk SD	Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban , Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
434	JUNAIDIN, S.H.	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Jembatan Gantung	Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen , Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	30	meter	-
435	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	Hibah 1 Handtraktor Rotary, Kelompok Tani Karya Bakti, Desa Puntik Dalam, Kec. Mandastana	Kelompok Tani Karya Bakti, Desa Puntik Dalam, Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	1	buah	50.000.000,00
436	JUNAIDIN, S.H.	JALAN KABUPATEN RUSAK	Peningkatan Jalan	Desa Karang Mekar Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	7000	meter	-
437	JUNAIDIN, S.H.	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Pembuatan Jembatan Baru	Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban , Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	15	meter	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
438	JUNAIDIN, S.H.	JALAN KABUPATEN RUSAK	Peningkatan Jalan usaha Tani	Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban , Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	100	meter	200.000.000,00
439	JUNAIDIN, S.H.	JALAN KABUPATEN RUSAK	Peningkatan Jalan Kabupaten	Desa Tamban Bangun Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1500	meter	-
440	Dra. ARFAH	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	PEMBUATAN WC RUMAH WARGA YANG TIDAK LAYAK HUNI (200JT)	KELURAHAN BERANGAS KEC.ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	4	BUAH	200.000.000,00
441	Dra. ARFAH	MASIH KURANG MEMADAINYA FASILITAS KEAGAMAAN/SOSIAL UNTUK MASYARAKAT	PENAMBAHAN HALAMAN MESJID RAHMAT KELURAHAN BERANGAS KEC.ALALAK (200JT)	KELURAHAN BERANGAS KEC.ALALAK, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	400	METER	200.000.000,00
442	Dra. ARFAH	MASIH KURANG MEMADAINYA FASILITAS KEAGAMAAN/SOSIAL UNTUK MASYARAKAT	REHAB PKBM(PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT) IBNU AHMAD DESA BERANGAS TIMUR KEC. ALALAK (200JT)	DESA BERANGAS TIMUR, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	BUAH	200.000.000,00
443	Dra. ARFAH	ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR	NORMALISASI SUNGAI/HANDIL DI DESA BERINGIN KEC. ALALAK (200JT)	DESA BERINGIN KEC.ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1000	METER	200.000.000,00
444	Dra. ARFAH	ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR	NORMALISASI SUNGAI/HANDIL RAY 3 DESA BALANDEAN KEC.ALALAK (200JT)	HANDIL Ray 3 DESA BALANDEAN KEC ALALAK(200JT), Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1000	METER	200.000.000,00
445	Dra. ARFAH	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	REHAB RUANGAN DAN PLAPON SPMN.3 DESA BALANDEAN KEC.ALALAK (200JT)	DESA BALANDEAN KEC.ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
446	Dra. ARFAH	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	REHAB JEMBATAN MENUJU TEMPAT IBADAH 2X5 METER (100JT)	DESA TERANTANG RT 14 KEC.MANDASTANA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	100.000.000,00
447	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL	Pembuatan Tenda Satu Set / Lengkap Desa Mekarsari RT.04	Desa Mekarsari RT.04 Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	Set	100.000.000,00
448	H. MASLAN, S.Pd, M.A.	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan Halaman Sekolah SDN Tinggiran Baru 2	SDN Tinggiran Baru 2 Desa Tinggiran Baru 2 Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
449	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan Rusak	Jalan Landihung Rt. 06 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1500	Meter	1.500.000.000,00
450	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan Rusak	Jalan Palihin Rt. 05 dan Jalan Sungai Teras Rt. 04 Desa Sei Pitung Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1500	Meter	1.500.000.000,00
451	H. BAHRIANNOOR, S.AP	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman Rendah	SDN Handil Bakti 1 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
452	H. BAHRIANNOOR, S.AP	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Perlunya Peningkatan Halaman	SDN Semangat Dalam 1 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
453	H. BAHRIANNOOR, S.AP	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Ruang Kelas Rusak	SDN Semangat Dalam 1 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
454	H. BAHRIANNOOR, S.AP	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman Tidak Memadai	SDN Semangat Dalam 4 Desa Semangat Dalam	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala				
455	H. BAHRIANNOOR, S.AP	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Ruang Kelas Rusak	SDN Semangat Dalam 4 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
456	H. BAHRIANNOOR, S.AP	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman Tidak Memadai	SDN Semangat Dalam 5 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
457	H. BAHRIANNOOR, S.AP	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman tidak memadai	SDN Beringin Jalan Ray 17 Rt. 07 Desa Beringin Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
458	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN KABUPATEN RUSAK	Jalan Rusak	Desa Semangat Bakti Rt. 02 s/d 06 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1800	Meter	-
459	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Jalan Tidak Memadai	Komplek Griya Permata Jalan Safir 1 Rt. 12 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1500	Meter	1.500.000.000,00
460	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Jalan Tidak Memadai	Komplek Mutiara Kemuning Indah Kel. Handil Bakti Rt. 26 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1600	Meter	1.600.000.000,00
461	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Jalan Tidak Memadai	Komplek Shalli Messi Village Jalan Sungai 2 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	2000	Meter	2.000.000.000,00
462	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Jalan Tidak Memadai	Komplek Shalli Messi 5 Desa Semangat Karya Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	2000	Meter	2.000.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
					PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
463	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan Tidak Memadai	Desa Pulai Sewangi Rt. 01 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
464	H. BAHRIANNOOR, S.AP	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	Rumah Tidak Layak	Desa Pulau Sewangi Rt. 01 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	2	Unit	-
465	H. BAHRIANNOOR, S.AP	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	Rumah Tidah Layak	Desa Tanjung Harapan Rt. 03 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	2	Buah	-
466	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Jembatan Penghubung	Desa Belandean Muara Rt. 04 dan Rt. 10, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Unit	-
467	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan tidak memadai	Desa Pulau Sewangi Rt. 01 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
468	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Jembatan titian tidak ada	Desa Pulau Sewangi Rt. 05 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	100	Meter	100.000.000,00
469	H. BAHRIANNOOR, S.AP	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	Rumah Tidak Layak	Desa Pulau Sewangi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	3	Unit	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
					PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
470	H. BAHRIANNOOR, S.AP	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	Jalanan Gelap	Desa Pulau Alalak Rt. 1 s/d 12 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	10	Unit	70.000.000,00
471	H. BAHRIANNOOR, S.AP	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	Jalan Gelap	Desa Semangat Dalam Rt. 05 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	10	Unit	70.000.000,00
472	H. BAHRIANNOOR, S.AP	DERMAGA/PELABUHAN RUSAK	Dermaga tidak ada	Desa Pulau Alalak Rt. 01 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
473	H. BAHRIANNOOR, S.AP	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	Jalan gelap	Desa Pulau Sugara Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	10	Unit	70.000.000,00
474	H. BAHRIANNOOR, S.AP	DERMAGA/PELABUHAN RUSAK	Dermaga belum ada	Desa Pulau Alalak Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
475	H. BAHRIANNOOR, S.AP	DERMAGA/PELABUHAN RUSAK	Dermaga belum ada	Desa Berangas Timur Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
476	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman Tidak Memadai	SDN Sungai Gampa Rt. 07 Desa Sungai Gampa Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
477	YULIA DWI ASTUTI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan Tidak Memadai	Desa Sungai Sahurai Rt. 03 Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	600	Meter	-
478	YULIA DWI ASTUTI	JALAN KABUPATEN RUSAK	Jalan Tidak memadai	Desa Sawahan Rt. 01 s/d 03 Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	2500	Meter	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
479	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman tidak memadai	SDN Pantai Hambawang Rt. 04 Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
480	YULIA DWI ASTUTI	SIRING SUNGAI RUSAK	siring belum ada	Desa Sungai Ramania Rt. 01 s/d 06 Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	300	Meter	200.000.000,00
481	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman tidak memadai	SDN Tanipah 1 Desa Tanipah Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
482	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman tidak memadai	SDN Tanipah 2 Desa Tanipah Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
483	YULIA DWI ASTUTI	SIRING SUNGAI RUSAK	Siring belum ada	Desa Tanipan Rt. 04 s/d 05 Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	600	Meter	200.000.000,00
484	YULIA DWI ASTUTI	JALAN KABUPATEN RUSAK	Jalan Rusak	Jalan Ray 3 Polden Desa Puntik Luar Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	5000	Meter	-
485	YULIA DWI ASTUTI	SIRING SUNGAI RUSAK	Siring belum ada	Jalan Ray 3 Polden Desa Puntik Luar Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	3000	Meter	200.000.000,00
486	YULIA DWI ASTUTI	JALAN KABUPATEN RUSAK	Jalan Rusak	Jalan Puntik Raya Desa Puntik Luar Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	200	Meter	-
487	YULIA DWI ASTUTI	MASIH KURANGNYA RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP	Ruang Kelas Kurang	SDN Desa Bangkit Baru Rt. 03 Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
488	YULIA DWI ASTUTI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan tidak memadai	Desa Lok Rawa Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	100	Meter	-
489	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman tidak memadai	SDN Tabing Rimbah 1 Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
490	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman tidak memadai	SDN Tabing Rimbah 2 Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
491	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman tidak memadai	SDN Puntik Luar 1 Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
492	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman kurang memadai	SDN Puntik Tengah Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
493	YULIA DWI ASTUTI	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Ruang Kelas Rusak	SDN Jejangkit Muara 2 Kec. Jejangkit, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
494	YULIA DWI ASTUTI	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Ruang Kelas Rusak	SDN Jejangkit Barat 2 Kec. Jejangkit, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
495	YULIA DWI ASTUTI	WC SEKOLAH TK/SD/SMP RUSAK	WC belum ada	SDN Jejangkit Barat 2 Kec. Jejangkit, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
496	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman tidak memadai	SDN Jejangkit Barat 1 Kec. Jejangkit, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
497	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman Banjir	SDN Jejangkit Barat 2 Kec. Jejangkit, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
498	YULIA DWI ASTUTI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Halaman tidak memadai	SDN Sampurna 2 Kec. Jejangkit, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
499	H. BAHRIANNOOR, S.AP	FASILITAS KESEHATAN RUSAK/TIDAK MEMADAI	Kurangnya Fasilitas Kesehatan Berupa Mobil Ambulance Untuk Karang Taruna Karya Muda	Jl. Ray XI RT.03 Desa Panca Karya Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	400.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
500	Ahmad ridho S.E	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Pemukiman Desa Barambai Kolam Kanan RT.01 RW.01	Desa Barambai Kolam Kanan RT.01 RW.01 Kecamatan Barambai, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
501	Ahmad ridho S.E	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Perbaiakan Jalan Dengan Metode Pengurukan Batu untuk Pengersan Jalan di Desa Murung Raya RT.06	Desa Murung Raya RT.06 Kecamatan Bakumpai, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
502	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	MASIH KURANG MEMADAINYA FASILITAS KEAGAMAAN/SOSIAL UNTUK MASYARAKAT	Paving block Halaman Mushola Komplek Persada Permai Baru 1 Rt 31, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak	Komplek Persada Permai Baru 1 Rt 31, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	paket	300.000.000,00
503	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	GORONG-GORONG RUSAK	Rehab Gorong-gorong Ruas jalan Semangat Dalam Rt 06, Kec. Alalak	Semangat Dalam Rt 06, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	paket	-
504	SYAIFUL ASARI, S.H.	MASIH KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA SANITASI UNTUK MASYARAKAT	pembuatan MCK Desa Tabunganen tengah	Desa Tabunganen tengah , Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	paket	-
505	SYAIFUL ASARI, S.H.	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PENUNJANG FUNGSI HUNIAN	peningkatan jalan inspeksi menuju alkah Desa tabunganen tengah RT.5	Desa tabunganen tengah RT.5, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
506	SYAIFUL ASARI, S.H.	MASIH KURANG MEMADAINYA FASILITAS KEAGAMAAN/SOSIAL UNTUK MASYARAKAT	pembuatan MCK Langgar/mushola RT.5 Desa tabunganen tengah	Langgar/mushola RT.5 Desa tabunganen tengah, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	paket	120.000.000,00
507	SYAIFUL ASARI, S.H.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	lanjutan cor beton jalan inspeksi Desa Tabunganen tengah	Desa Tabunganen tengah, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	1	paket	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
					PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA			
508	SYAIFUL ASARI, S.H.	WC SEKOLAH TK/SD/SMP RUSAK	MCK SDN Tabunganen tengah 1	SDN Tabunganen tengah 1, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
509	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Renovasi Mushola	Desa Anjir Serapat Baru, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	buah	50.000.000,00
510	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	FASILITAS KESEHATAN RUSAK/TIDAK MEMADAI	Pembuatan Pagar Puskesmas	Desa Anjir Muara Kota, Kec. Anjir Muara , Kab. Barito Kuala	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	200.000.000,00
511	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Pengecoran Halaman SD Anjir MUara Kota 2	Desa Anjir Muara Kota, Kec Anjir MUara, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
512	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Renovasi Mushola	Desa Anjir Muara Kota, Kec. Anjir MUara, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	buah	50.000.000,00
513	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Inspeksi	Desa Patih Muhur Lama, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	400	meter	-
514	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Renovasi Mushola	Desa Sepakat Bersama, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	buah	50.000.000,00
515	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Renovasi Balai Desa	Desa Beringin Jaya, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	buah	50.000.000,00
516	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN	Renovasi Mushola	Desa Anjir Serapat Baru 1, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	buah	50.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
		BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)						
517	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Renovasi Mushola	Desa Anjir Muara Lama, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	buah	50.000.000,00
518	HARMUNI	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	PENERANGAN JALAN UMUM 40 TIANG LISTRIK	DESA TINGGIRAN TENGAH KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	40	BUAH	280.000.000,00
519	HARMUNI	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN (TPS/ALAT ANGKUTAN SAMPAH)	TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI 3 KECAMATAN	KECAMATAAN TABUNGANEN, TAMBAN, ,MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	6	BUAH	-
520	HARMUNI	FASILITAS KESEHATAN RUSAK/TIDAK MEMADAI	PENINGKATAN HALAMAN PUSKESMAS	DESA MEKARSARI KECAMATAN MEKARSARI, Kab. Barito Kuala	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	200.000.000,00
521	HARMUNI	SIRING JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	SIRING JALAN	DESA ANJIR SERAPAT BARU RT.04 KECAMATAN ANJIR MUARA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
522	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	REHAB JALAN INSPEKSI	DESA ANJIR SERAPAT BARU RT.01 KECAMATAN ANJIR MUARA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
523	HARMUNI	MASIH KURANGNYA RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP	RUANG KELAS BARU SDN ANJIR SERAPAT BARU	DESA ANJIR SERAPAT BARU KECAMATAN ANJIR MUARA, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
524	HARMUNI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN	SIRING DAN URUK HALAMAN PAUD	DESA ANJIR SERAPAT BARU KECAMATAN ANJIR	SEKRETARIAT DAERAH	1	UNIT	75.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
		BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)		MUARA, Kab. Barito Kuala				
525	HARMUNI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGASPALAN JALAN DESA	DESA ANJIR SERAPAT LAMA RT.01 KECAMATAN ANJIR MUARA, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
526	HASIMUDIN	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	PEMASANGAN BATAKO HALAMAN MASJID ISTIQAMAH	DESA ROHAM RAYA RT.12 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	BUAH	200.000.000,00
527	HASIMUDIN	FASILITAS KESEHATAN RUSAK/TIDAK MEMADAI	PEMASANGAN BATAKO HALAMAN PUSKESMAS WANARAYA	DESA SIDOMULYO RT.10 KECAMATAN WANARAYA, Kab. Barito Kuala	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	200.000.000,00
528	H. MURJANI, S.Sos.	FASILITAS KESEHATAN RUSAK/TIDAK MEMADAI	PEMBUATAN HALAMAN PUSKESMAS 50x50 METER	DESA TABUNGANEN KECIL RT.06 KECAMATAN TABUNGANEN, Kab. Barito Kuala	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	200.000.000,00
529	SYAHRUDIN. HS	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Inspeksi simpang sirih RT.3 panjang 1200 meter, lebar 2 meter	Desa Gandaraya, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1200	Meter	1.200.000.000,00
530	SYAHRUDIN. HS	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Usaha Tani panjang 1500 meter, lebar 3 meter	Desa Binaan Baru RT.2, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1500	Meter	1.500.000.000,00
531	SYAHRUDIN. HS	SIRING JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Siring Beton	Desa Sukaramai RT.1 dan 2, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	600	Meter	600.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
532	SYAHRUDIN. HS	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Pembangunan jembatan Sungai besar lebar 2 meter dan panjang 10 meter	Desa Banyiur RT.3, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	2	Unit	200.000.000,00
533	SYAHRUDIN. HS	SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN TIDAK MEMADAI	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	Desa Sungai Seluang Pasar RT.4, Kab. Barito Kuala	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	1	Buah	950.286.150,00
534	SYAHRUDIN. HS	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	Pengadaan Handtraktor Rotari Kelompok Tani	Desa Bambangin RT.2, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	1	Buah	50.000.000,00
535	SYAHRUDIN. HS	MASIH KURANGNYA RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP	Rehab Gedung Sekolah (3 Kelas)	SDN Sungai Seluang Pasar RT. 6, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
536	SYAHRUDIN. HS	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Paping Halaman SMP 1 Belawang 20 meter x 40 meter	Belawang RT. 1, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
537	SYAHRUDIN. HS	MASIH KURANG MEMADAINYA FASILITAS KEAGAMAAN/SOSIAL UNTUK MASYARAKAT	Paping Halaman Mesjid Hidayatullah 30 meter x 40 meter	Desa Sungai Seluang RT.3, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1200	m2	180.000.000,00
538	SYAHRUDIN. HS	MASIH KURANG MEMADAINYA FASILITAS KEAGAMAAN/SOSIAL UNTUK MASYARAKAT	Rehab Mesjid Bambangin	Desa Bambangin RT.3, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Buah	75.000.000,00
539	SYAHRUDIN. HS	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pengaspalan Jalan	Desa Sukaramai RT. 1, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
540	SYAHRUDIN. HS	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan Halaman SDN Parimata	Desa Parimata RT. 4, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
541	SYAHRUDIN. HS	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peninggian Halaman SDN Sukaramai	Desa Sukaramai RT. 1, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
542	SYAHRUDIN. HS	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Inspeksi Sungai Besar	Desa Gandaraya RT.5, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
543	SYAHRUDIN. HS	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Inspeksi	Desa Bambangin RT. 5, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
544	SYAHRUDIN. HS	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Inspeksi	Desa Binaan Baru RT.4, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	-
545	Hj. RINI DEWI KENCANA, S.Pd.	WC SEKOLAH TK/SD/SMP RUSAK	Pembuatan WC siswa dan Rehab ruang kelas SDN Tanjung Harapan	SDN Tanjung Harapan Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
546	Hj. RINI DEWI KENCANA, S.Pd.	PERPUSTAKAAN SEKOLAH SD/SMP RUSAK	Rehab ruang perpustakaan	Kecamatan Alalak SDN Berangas Timur 1, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
547	Hj. RINI DEWI KENCANA, S.Pd.	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan mutu halaman sekolah TKN 2 Persada Permai jalur 3	Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
548	Hj. RINI DEWI KENCANA, S.Pd.	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peningkatan mutu halaman sekolah	SDN Semangat Dalam 4 Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
549	Hj. RINI DEWI KENCANA, S.Pd.	RUANG GURU SEKOLAH TK/SD/SMP RUSAK	Pembuatan Kantor (ruang guru)	SDN Semangat Bakti Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
550	Hj. RINI DEWI KENCANA, S.Pd.	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Rehap ruang UKS	SMP Negeri Alalak Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
551	Hj. RINI DEWI KENCANA, S.Pd.	TK/SD/SMP BELUM MEMILIKI PAGAR	Pembuatan pagar dan peningkatan mutu halaman	SDN Semnagat Dalam 5 Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
552	Hj. RINI DEWI KENCANA, S.Pd.	TK/SD/SMP BELUM MEMILIKI PAGAR	Pembuatan Pagar Sekolah	SDN Sungai Lumbah 3 Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
553	Hj. RINI DEWI KENCANA, S.Pd.	SIRING JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Pembuatan Siring (siring kiri kanan panjang 40 meter) dan pengerasan jalan RT.24 Komplek Grand Purnama 2 (lebar 4 meter dan panjang 100 meter)	Desa Tatah Mesjid Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	100	Meter	200.000.000,00
554	Hj. RINI DEWI KENCANA, S.Pd.	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PENUNJANG FUNGSI HUNIAN	Pembuatan Gedung PKG Korwil Alalak	Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
555	SRI WAHYUNINGSIH	SIRING JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Siring Jalan Handil Mesjid	Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
556	SRI WAHYUNINGSIH	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Handil Daham (600 meter x 3 meter)	Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	600	meter	-
557	SRI WAHYUNINGSIH	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pengaspalan Jalan poros Anjir Serapat (350 meter x 3 meter)	Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	350	Meter	350.000.000,00
558	SRI WAHYUNINGSIH	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pengaspalan jalan poros Anjir Serapat (350 meter x 3 meter)	Desa Anjir Serapat lama Kecamatan Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	350	Meter	350.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
559	SRI WAHYUNINGSIH	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pengaspalan Jalan Poros (350 meter x 3 meter)	Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Kecamatan Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	350	meter	-
560	SRI WAHYUNINGSIH	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Handil Ketapi (1000 meter x 2 meter)	Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
561	SRI WAHYUNINGSIH	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Sei Ulak (1000 meter x 2 meter)	Desa Anjir Serapat Muara I Kecamatan Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
562	SRI WAHYUNINGSIH	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan JUT (1000 meter x 2 meter)	Desa Patih Muhur Lama RT.6 Kecamatan Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
563	SRI WAHYUNINGSIH	RUANG KELAS UNTUK TK/SD/SMP RUSAK	Rehab ruangan	SDN Patih Muhur Baru Kecamatan Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
564	SRI WAHYUNINGSIH	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Pengurukan Halaman (8 x 20 x 0,3 meter)	SDN Patih Muhur Baru Kecamatan Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
565	NANANG KADERI, SH.	MASIH KURANG MEMADAINYA FASILITAS KEAGAMAAN/SOSIAL UNTUK MASYARAKAT	Hibah untuk pembangunan Mushola Ar- Raudhah (10 x 10 m)	Desa Batik RT.02 , Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	250.000.000,00
566	NANANG KADERI, SH.	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Peningkatan Halaman Musholla Ar-Raudhah (20 x 18 m)	Desa Batik RT. 2 Kecamatan Bakumpai, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	300.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
567	NANANG KADERI, SH.	FASILITAS KESEHATAN RUSAK/TIDAK MEMADAI	Peningkatan halaman Pustu (20x60 m)	Desa Batik RT.2 Kecamatan Bakumpai, Kab. Barito Kuala	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	200.000.000,00
568	NANANG KADERI, SH.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pengaspalan Jalan menuju TK Karamunting (3 x 150 m)	Desa Batik RT.4 Kecamatan Bakumpai, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	150	Meter	150.000.000,00
569	H. BAHRIANNOOR, S.AP	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Perbaikan Jalan Gang Masjid Nurul Amin	Desa Pulau Sewangi Rt. 09 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	400	Meter	-
570	H. BAHRIANNOOR, S.AP	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	Jalanan Gelap	Desa Semangat Dalam RT.05 Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	10	Unit	70.000.000,00
571	BACHTIAR EFFENDI	JALAN KABUPATEN RUSAK	Perbaikan jalan poros	Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai RT. 6 sampai dengan RT.8, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	2	km	-
572	BACHTIAR EFFENDI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Lingkungan (pengamparan batu)	Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai RT.4, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
573	BACHTIAR EFFENDI	MASIH KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA SANITASI UNTUK MASYARAKAT	Pembuatan MCK	Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Unit	-
574	BACHTIAR EFFENDI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Perbaikan jalan menuju sei rungun	Desa Barambai Kecamatan Barambai RT.3, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
575	BACHTIAR EFFENDI	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	Penerangan Lampu (tiang listrik)	Desa Karya Tani Kecamatan Barambai RT.6, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	1	km	140.000.000,00
576	BACHTIAR EFFENDI	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT	Penyambungan PDAM 350 meter paralon	Desa Karya Tani Kecamatan Barambai dari RT.5 ke RT.6, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Paket	-
577	BACHTIAR EFFENDI	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	Alat pertanian (traktor)	Desa Karya Tani Kecamatan Barambai RT. 1, 3,5,6, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	4	Buah	200.000.000,00
578	BACHTIAR EFFENDI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Rehab halaman SDN Karya Tani	Desa Karya Tani Kecamatan Barambai RT.2, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
579	BACHTIAR EFFENDI	MASIH KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA SANITASI UNTUK MASYARAKAT	Pengadaan WC Umum	Desa Karya Tani Kecamatan Barambai, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	-	Unit	-
580	BACHTIAR EFFENDI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pengerasan jalan ray 8	Desa Kolam kiri kecamatan Barambai Ray 8 RT.1, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
581	BACHTIAR EFFENDI	MASIH KURANG MEMADAINYA FASILITAS KEAGAMAAN/SOSIAL UNTUK MASYARAKAT	Rehab tempat Wudhu Masjid Al-Istiqamah	Desa Kolam Kiri Kecamatan Barambai, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	75.000.000,00
582	BACHTIAR EFFENDI	JALAN KABUPATEN RUSAK	Penyambungan aspal perbaikan jalan poros Desa Kolam Kiri	Desa Kolam Kiri Kecamatan Barambai Ray 3 sampai Ray 6, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1300	meter	-
583	BACHTIAR EFFENDI	JALAN KABUPATEN RUSAK	Perbaikan jalan menuju Barambai Muara	Desa Kolam Kiri Kecamatan Barambai, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1500	meter	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
					KAB. BARITO KUALA			
584	BACHTIAR EFFENDI	MASIH KURANG MEMADAINYA FASILITAS KEAGAMAAN/SOSIAL UNTUK MASYARAKAT	Rehab Mesjid Al-Falah	Desa Karya Tani Kecamatan Barambai RT.1, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Buah	75.000.000,00
585	BACHTIAR EFFENDI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pengecoran jalan permukiman	Desa Barambai Kecamatan Barambai, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	160	Meter	160.000.000,00
586	BACHTIAR EFFENDI	BANYAKNYA RUMAH MASYARAKAT YANG TIDAK LAYAK HUNI	Bedah Rumah (atas nama Redah)	Desa Karya Tani Kecamatan Barambai RT.6, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	-
587	BACHTIAR EFFENDI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Pengurukan dan pembatakoan Halaman dan Area Parkir Sekolah SDN Barambai Kolam Kiri 5 (halaman 33 m x 29 m), (Parkiran 29 m x 11,5 m)	Desa Kolam Kiri Dalam Kecamatan Barambai, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
588	BACHTIAR EFFENDI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Peninggian/Pembatakoan Halaman Sekolah SDN Barambai 1	Desa Barambai Kecamatan Barambai, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
589	BACHTIAR EFFENDI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pengaspalan Jalan	Desa Kolam Kanan Kecamatan Barambai Ray 2 RT.2, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
590	BACHTIAR EFFENDI	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Jembatan Ulin	Desa Pantang Raya Kecamatan Tabukan, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	100.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
591	BACHTIAR EFFENDI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan Cor	Desa Pantang Raya Kecamatan Tabukan, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
592	BACHTIAR EFFENDI	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Pengaspalan jalan perumahan Komplek Korpri Galam 5	Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
593	BACHTIAR EFFENDI	MASIH KURANG MEMADAINYA FASILITAS KEAGAMAAN/SOSIAL UNTUK MASYARAKAT	Salon/Pengeras suara Grup ibu-ibu yasinan	Desa Kolam Kiri Kecamatan Barambai, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Set	30.000.000,00
594	BACHTIAR EFFENDI	MASIH KURANG MEMADAINYA FASILITAS KEAGAMAAN/SOSIAL UNTUK MASYARAKAT	Kendaraan Roda 3 untuk angkutan Jenazah (Tosa)	Desa Kolam Kanan Kecamatan Barambai, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Buah	25.000.000,00
595	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	TABAT/PINTU AIR RUSAK	Rehabilitasi saluran irigasi Handil Ramania	Desa Sungai Ramania Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Paket	200.000.000,00
596	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	JALAN KABUPATEN RUSAK	Peningkatan jalan poros Desa Puntik Luar	Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Paket	-
597	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PENUNJANG FUNGSI HUNIAN	Pengadaan tenda, kursi meja	Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	Paket	100.000.000,00
598	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PENUNJANG FUNGSI HUNIAN	Pengadaan Tenda Kursi, meja	Desa Terantang Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	Set	100.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
599	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pemasangan Paving Jalan Desa Terantang RT.7 dan RT.8	Desa Terantang Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Paket	-
600	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PENUNJANG FUNGSI HUNIAN	Pengadaan Tenda, Kursi Meja	Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	Set	100.000.000,00
601	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	Pengadaan Handtraktor	Desa Tatah Alayung Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	1	Unit	50.000.000,00
602	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pengecoran Jalan	Desa Tatah Alayung RT.02, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Paket	-
603	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	FASILITAS KESEHATAN RUSAK/TIDAK MEMADAI	Peningkatan Halaman Puskesmas	Puskesmas Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	1	UNIT	200.000.000,00
604	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	JALAN KABUPATEN RUSAK	Rehabilitasi jalan Inspeksi	Desa Samuda RT.06 Kecamatan Belawang, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Paket	200.000.000,00
605	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pengaspalan Jalan Desa patih Selera	Desa Patih Selera Kecamatan Belawang, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
606	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	GORONG-GORONG RUSAK	Pembuatan gorong-gorong	Desa Murung Keramat Kecamatan Belawang, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Paket	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
					KAB. BARITO KUALA			
607	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan jalan lingkungan menuju pemakaman Desa Karang buah	Desa Karang Buah Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
608	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Peningkatan jalan Alpukat Desa karang Buah	Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
609	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PENUNJANG FUNGSI HUNIAN	Pengadaan tenda, Kursi Meja	Desa Karang Buah Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	Set	100.000.000,00
610	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan lingkungan	Desa Karang Dukuh RT.11 Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
611	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	Pengadaan Handtraktor	Desa Karang Dukuh Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	1	Unit	50.000.000,00
612	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Kunci	Desa Karang Dukuh Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
613	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Pengadaan tenda, Kursi Meja	Desa Karang Dukuh Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	Set	100.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
		PENUNJANG FUNGSI HUNIAN						
614	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan jalan kunci	Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
615	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PENUNJANG FUNGSI HUNIAN	Pengadaan Tenda Kursi Meja	Desa Karang Dukuh Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	Paket	100.000.000,00
616	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	GORONG-GORONG RUSAK	Pembuatan gorong-gorong	Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Paket	-
617	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PENUNJANG FUNGSI HUNIAN	Pengadaan Tenda, Kursi Meja	Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	Paket	100.000.000,00
618	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	JALAN KABUPATEN RUSAK	Peningkatan jalan poros penghubung Desa Karang Dukuh dan Desa Karang Bunga	Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Paket	-
619	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan jalan lingkungan	Desa Karang Bunga RT.19 Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
620	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	Pengadaan Hantraktor	Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	1	Unit	50.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
621	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PENUNJANG FUNGSI HUNIAN	Pengadaan Tenda, Kursi Meja	Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	Paket	100.000.000,00
622	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Lanjutan pengaspalan jalan menuju pemakaman umum	Desa Karang Indah, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	750.000.000,00
623	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pemeliharaan jalan lingkungan	Desa Karang Indah RT.10 Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
624	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	GORONG-GORONG RUSAK	Pembuatan gorong-gorong	Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Paket	-
625	SARIFUDIN	MASIH KURANG MEMADAINYA FASILITAS KEAGAMAAN/SOSIAL UNTUK MASYARAKAT	Rehab Total Musholla salamun najah	Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari RT.7, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Buah	120.000.000,00
626	SARIFUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan Aspal	Desa Tamban Raya Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
627	SARIFUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan aspal	Desa Tinggiran Baru RT.08 Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
628	SARIFUDIN	TABAT/PINTU AIR RUSAK	Pendalaman Handil/Irigasi	Desa Tinggiran Darat , Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8000	meter	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
					KAB. BARITO KUALA			
629	SARIFUDIN	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Rehab Total jembatan ukuran 4 x 40 meter	Desa Beringin Kencana Kecamatan Tabunganen, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
630	SARIFUDIN	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Jembatan antar Desa (30 x 3 meter)	Desa Tinggiran Baru RT.09 Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Buah	-
631	SARIFUDIN	MASIH KURANG MEMADAINYA FASILITAS KEAGAMAAN/SOSIAL UNTUK MASYARAKAT	Rehab Total Musholla (7m x 10 m)	Desa Tinggiran Baru RT.7 Kecamatan Mekarsari , Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	2	Buah	200.000.000,00
632	SARIFUDIN	TABAT/PINTU AIR RUSAK	Pendalaman Handil Agap/Saluran	Desa Tinggiran Tengah RT.6 Kecamatan Mekarsari , Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	4000	meter	200.000.000,00
633	SARIFUDIN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan bcross /Inspeksi	Desa Tinggiran Tengah RT.6 Kecamatan Mekarsari , Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	2000	Meter	2.000.000.000,00
634	SARIFUDIN	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PENUNJANG FUNGSI HUNIAN	Pengadaan tenda Meja Kursi	Desa tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	Paket	100.000.000,00
635	SARIFUDIN	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PENUNJANG FUNGSI HUNIAN	Pengadaan Tenda Meja Kursi	Desa Damsari RT.6 Kecamatan Tamban , Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	Paket	100.000.000,00
636	SLAMET RIYADI	GORONG-GORONG RUSAK	Pembuatan gorong-gorong	Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Paket	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
				Badauh, Kab. Barito Kuala	KAB. BARITO KUALA			
637	SLAMET RIYADI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Pemasangan Paving Block Halaman Mesjid	Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	200.000.000,00
638	SLAMET RIYADI	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA UNTUK MASYARAKAT	Pembuatan lapangan bulutangkis Outdoor	Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	1	Paket	200.000.000,00
639	SLAMET RIYADI	GORONG-GORONG RUSAK	Pembuatan Gorong-gorong DIR Sungai Sahurai	Desa Sungai Sahurai Kecamatan Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Paket	200.000.000,00
640	BASUNI BAHDI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Perbaikan Pengaspalan Jalan samping	Desa Jelapat I RT.17 Kecamatan Tamban , Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
641	BASUNI BAHDI	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Perbaikan Jembatan Ulin (Panjang 50 meter, Lebar 2 meter	Desa Jelapat I RT.23 Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	-
642	BASUNI BAHDI	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Perbaikan Jembatan Ulin (Panjang 50 meter dan lebar 2 meter)	Desa Jelapat I RT.8 Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	-
643	BASUNI BAHDI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Pagar dan menara mesjid Ni'matul Mesjid	Desa Jelapat I Kecamatan Tamban RT.7 dan RT.8, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Buah	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
644	BASUNI BAHDI	PERPUSTAKAAN SEKOLAH SD/SMP RUSAK	Rehab Perpustakaan SMP 8 Tamban	Desa Jelapat I RT. 22 Kecamatan Tamban , Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
645	BASUNI BAHDI	RUANG GURU SEKOLAH TK/SD/SMP RUSAK	Pembuatan Ruang Kantor SMP 8 Tamban	Desa Jelapat I RT. 22 Kecamatan Tamban , Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
646	BASUNI BAHDI	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Rehab Lapangan Sekolah SMPN 2 Tamban	Desa Jelapat I Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
647	BASUNI BAHDI	SIRING JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Pembuatan Siring Jalan	Desa Jelapat I RT. 16 Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	300	Meter	300.000.000,00
648	BASUNI BAHDI	SIRING JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Siring Jalan	Desa Sekata Baru RT. 3,4,5,6, Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
649	BASUNI BAHDI	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Perbaikan Pengaspalan Jalan (Panjang 800 meter lebar 2 meter)	Desa Mekarsari RT.8 Kecamatan Mekarsari, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	400	Meter	400.000.000,00
650	BASUNI BAHDI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Rehab/Pembangunan tempat ibadah baru	Jl. Taman Sari Bunga Desa Jelapat Baru RT.7 Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Buah	200.000.000,00
651	BASUNI BAHDI	RUANG GURU SEKOLAH TK/SD/SMP RUSAK	Rehab Ruang Kantor TK Negeri 1 Tamban	Desa jelapat 1 RT. 8 Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Ruang	200.000.000,00
652	BASUNI BAHDI	JALAN KABUPATEN RUSAK	Perbaikan jalan sekata baru	Desa Sekata Baru RT. 1 sampai RT. 16 Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	10	km	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
653	BASUNI BAHDI	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PENUNJANG FUNGSI HUNIAN	Pengerasan halaman Puskesmas (Panjang 10 meter, dan lebar 10 meter)	Desa Jelapat 1 RT. 7 Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
654	BASUNI BAHDI	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PENUNJANG FUNGSI HUNIAN	Pengadaan Tenda	Desa Jelapat I Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	1	Buah	100.000.000,00
655	BASUNI BAHDI	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA KESENIAN UNTUK MASYARAKAT	Pengadaan Alat Musik Rebana/Hadrah (10 buah)	Desa Jelapat I Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	1	Set	25.000.000,00
656	BASUNI BAHDI	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Mobil Ambulance Mesjid Nurul Islam	Desa Jelapat RT.18, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Buah	300.000.000,00
657	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Renovasi Musholla RaudatulJannah RT.04	Desa Anjir Serapat Baru, Kec. Anjir Muara , Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	buah	50.000.000,00
658	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Inspeksi RT.06	Desa Anjir Muara Kota, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
659	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	HALAMAN SEKOLAH TK/SD/SMP KURANG MEMADAI	Pengecoran Halaman SDN Anjir Muara Kota 2	Desa Anjir Muara Kota, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
660	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Renovasi Musholla Noor Hidayah Rt.06	Desa Anjir Muara Kota, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	buah	50.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
661	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Renovasi Langgar Darul Ibadah RT.04	Desa Beringin Jaya, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	buah	50.000.000,00
662	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Inspeksi RT.02	Desa Beringin Jaya, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
663	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Renovasi Mushola Sabilal Muttaqin RT.03	Desa Anjir Serapat Baru 1, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	buah	50.000.000,00
664	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Renovasi Mushola Miftahul Khair di Rt.03	Desa Anjir Muara Lama, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	buah	50.000.000,00
665	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Inspeksi di RT.05	Desa Anjir Muara Kota Tengah, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
666	JAUHAR ARIF, S.E.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN DESA ANJIR PASAR KOTA 1	DESA ANJIR PASAR KOTA 1, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
667	HENDRI DYAH ESTININGRUM, SH	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan yang ada berupa cor beton dan perkerasan sudah tidak memadai lagi	Komp. Persada RT. 23 Kel. Handil Bakti (Jalur 5,Jalur 6 ,Jalur 7 dan Jalur 8) , Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	560	Meter	560.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
668	HENDRI DYAH ESTININGRUM, SH	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan dari tanah asal dan belum ada penangan jalan	Desa Sungai Lumbah RT. 07 Kel. Handil Bakti, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	600	Meter	600.000.000,00
669	HENDRI DYAH ESTININGRUM, SH	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Jalan cor beton dan aspal banyak rusak menimbulkan genangan air klo musim hujan	Jalan Nilam RT. 10 Kel. Handil Bakti (Nilam 1, Nilam 2 dan Nilam 3), Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	600	Meter	600.000.000,00
670	HENDRI DYAH ESTININGRUM, SH	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Melanjutkan pekerjaan jalan tahun 2024	Jalan Ray 19 Desa Tanjung Harapan RT. 02 Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	600	Meter	600.000.000,00
671	HENDRI DYAH ESTININGRUM, SH	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Jalan yang ada berupa cor beton sudah rusak dan tidak memadai lagi	Jalan Safir 2 dan Safir 3 RT.12 Kel. Handil Bakti, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
672	HENDRI DYAH ESTININGRUM, SH	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Jalan asal sudah rusak	Jalan Komp. Persada Indah RT. 19 Kel. Handil Bakti (belakang polindes griya permata), Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	500	Meter	500.000.000,00
673	HENDRI DYAH ESTININGRUM, SH	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA KESENIAN UNTUK MASYARAKAT	Tidak memiliki peralatan maulid al habsy	Kelurahan Handil Bakti, Kab. Barito Kuala	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	5	Paket	50.000.000,00
674	HENDRI DYAH ESTININGRUM, SH	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	Tidak memiliki Hand Traktor untuk membantu pekerjaan petani dalam meningkatkan hasil pertanian	Desa Sungai Pitung Kel. Handil Bakti, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2	Buah	100.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
					KAB. BARITO KUALA			
675	HENDRI DYAH ESTININGRUM, SH	MASIH KURANGNYA ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK MASYARAKAT	Tidak memiliki Mesin Perontok untuk membantu pekerjaan petani dalam meningkatkan hasil pertanian	Desa Sungai Lumbah Kel. Handil Bakti, Kab. Barito Kuala	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	5	Buah	90.000.000,00
676	HENDRI DYAH ESTININGRUM, SH	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Jalan rusak karena banjir	Jalan Komplek Kruwing Kec. Alalak (Jalan Merpati RT. 24, Jalan Cendrawasih RT. 24 dan Jalan Kasuari RT. 24) , Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	550	Meter	550.000.000,00
677	JUNAIDIN, S.H.	DERMAGA/PELABUHAN RUSAK	Memerlukan tambahan armada Feri Penyeberangan Desa Jelapat Baru - Berangas	Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	200.000.000,00
678	JUNAIDIN, S.H.	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Elevasi Jalan rendah sehingga sering terendam air apabila banjir	Komplek Sajadah Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	400	Meter	400.000.000,00
679	JUNAIDIN, S.H.	MASIH KURANG MEMADAINYA FASILITAS KEAGAMAAN/SOSIAL UNTUK MASYARAKAT	Bangunan Langgar Fathul Jannah sudah tua sehingga banyak bagian bangunan langgar yang lapuk	Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Buah	150.000.000,00
680	JUNAIDIN, S.H.	MASIH KURANG MEMADAINYA FASILITAS KEAGAMAAN/SOSIAL UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan Halaman Kuburan karena Letaknya berada dipersawahan	Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1300	meterpersegi	200.000.000,00
681	REIDAN WINATA, S.E.	JALAN KABUPATEN RUSAK	Jalan inspeksi rusak dan perlu peningkatan jalan	jalan desa sungai Gampa RT. 07 RW. 03 Kecamatan Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1000	meter	200.000.000,00
682	SYARIF FAISAL, ST	KURANGNYA RUANG GURU UNTUK SEKOLAH TK/SD/SMP	Pembangunan Ruang Guru dan Toilet	SDN Penghulu Kecamatan Marabahan, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
683	SYARIF FAISAL, ST	KURANG MEMADAINYA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PENUNJANG FUNGSI HUNIAN	Pembangunan Rumah Dinas Guru	SDN Rimbun Tulang Kecamatan Kuripan, Kab. Barito Kuala	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
684	SYARIF FAISAL, ST	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan Usaha Tani	Desa Bambangin Kecamatan Belawang, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1000	Meter	1.000.000.000,00
685	SYARIF FAISAL, ST	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Perbaikan / Rehab Jembatan Poros	Desa Pantang Baru Kecamatan Tabukan, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	5	Buah	-
686	SYARIF FAISAL, ST	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan Usaha Tani Ray 1 dan Ray 2 Jalan menuju Makam	Barambai Kolam Kanan, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
687	SYARIF FAISAL, ST	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan perumahan	Desa kolam Kanan Kecamatan Barambai, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
688	SYARIF FAISAL, ST	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Jalan Usaha Tani	Desa Sido Makmur Ray 9, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
689	SYARIF FAISAL, ST	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Jembatan Ray 3	Desa Sido Makmur , Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	100.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
690	SYARIF FAISAL, ST	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Jembatan Ray 3	Desa Sido Makmur, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	100.000.000,00
691	SYARIF FAISAL, ST	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Jembatan Poros Desa Tamba Jaya	Desa Tamba Jaya, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Unit	100.000.000,00
692	IBRAHIM	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT	PEMBUATAN JARINGAN PIPA PDAM (200 JUTA)	DESA BANTUIL KEC.CERBON, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1000	METER	-
693	IBRAHIM	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENINGKATAN JALAN INFEKSI SDA (200JUTA)	DESA BANTUIL RT.01, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1000	METER	200.000.000,00
694	IBRAHIM	JALAN KABUPATEN RUSAK	PENGASPALAN JALAN DESA BANTUIL-SAWAHAN KEC.CERBON (BINA MARGA/200JUTA)	DESA BANTUIL-SAWAHAN KEC. CERBON, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1000	METER	-
695	IBRAHIM	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PENGASPALAN JALAN DESA (PERKIM/200 JUTA)	DESA BANTUIL RT.01 KEC. CERBON, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
696	IBRAHIM	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	JLN INFEKSI DESA SIMPANG NUNGKI (200 JUTA)	DESA SIMPANG NUNGKI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
697	IBRAHIM	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	PEMASANGAN LAMPU PJU	DESA SIMPANG NUNGKI, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	50	BUAH	350.000.000,00
698	IBRAHIM	JALAN KABUPATEN RUSAK	PENGASPALAN JALAN RUAS/POROS (BINA MARGA/200 JUTA)	DESA SIMPANG NUNGKI, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1000	METER	-
699	IBRAHIM	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	JALAN INFEKSI DESA BANTUIL (200 JUTA)	DESA BANTUIL, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
700	IBRAHIM	TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN (PJU)	PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN (DISHUB/200 JUTA)	DESA BANTUIL, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	50	BUAH	350.000.000,00
701	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Renovasi Jembatan Poros Desa Handil Baru Rt.01 dan Desa Handil H. Ramli Rt.02	Desa Anjir Serapat Baru 1, Kec Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	2	buah	-
702	AMALIA SHALEHA PUTRI, S.Pd	ALIRAN SUNGAI TIDAK LANCAR	Pengerukan Handil Mingkudu Rt.03	Desa Anjir Serapat Baru 1, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	3500	meter	200.000.000,00
703	MOHAMAD AGUNG PURNOMO, S.Psi.	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Peningkatan jalan Komplek Bilindo, Desa Semangat Karya, Alalak	Komplek Bilindo, Desa Semangat Karya, Alalak, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
704	SUPARMAN	JALAN KABUPATEN RUSAK	Peningkatan Jalan Ruas	Desa Kolam Makmur jalan ruas 31 Kecamatan Wanaraya, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	Paket	-

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
705	SUPARMAN	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA UNTUK MASYARAKAT	Pembangunan Lapangan Bola Volly	Desa Sidomulyo Kecamatan Wanaraya, Kab. Barito Kuala	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
706	SUPARMAN	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA UNTUK MASYARAKAT	Pembangunan Gedung Bulutangkis	Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya, Kab. Barito Kuala	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	1	Unit	200.000.000,00
707	SUPARMAN	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA UNTUK MASYARAKAT	Pembangunan Tribun Lapangan Sepakbola	Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya, Kab. Barito Kuala	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	1	Paket	200.000.000,00
708	SUPARMAN	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Rehab RKB MTS MIFTAHUL ULUM	Desa Babat Raya Kecamatan Wanaraya, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Unit	75.000.000,00
709	SUPARMAN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.8	Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
710	SUPARMAN	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Pembangunan Pagar Mesjid Miftahul Khoir	Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya, Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	200.000.000,00
711	SUPARMAN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Lingkungan	Desa Kolam Makmur RT.14 Kecamatan Wanaraya, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
712	SUPARMAN	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Peningkatan Jalan Lingkungan	Desa Sumber Rahayu Kecamatan Wanaraya, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Paket	-
713	AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Pengaspalan Jalan Komplek Perumahan Hj. NOR AIDA	Desa Pindahan Baru RT. 7 Kecamatan Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	200	Meter	200.000.000,00
714	SALEH	JALAN KOMPLEK PERUMAHAN RUSAK	Pengecoran Gang Panglima Batur	Gang Panglima Batur RT.8, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Paket	-
715	SALEH	JEMBATAN KEWENANGAN KABUPATEN RUSAK	Pembangunan Jembatan Anjir talaran	Anjir Talaran, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	1	buah	-
716	SALEH	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	Pelebaran jalan Gang Kuburan	Jalan Gang kuburan RT.5 Ulu Benteng, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Paket	-
717	SALEH	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	Pembangunan Jembatan Kuburan	Kelurahan ulun Benteng RT.11 Kecamatan Marabahan, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	1	Buah	-
718	HALIMAH	DERMAGA/PELABUHAN RUSAK	Peningkatan Jalan Dermaga RT 3,Desa Tabukan Raya Kec Tabukan Volume 300 m.	Dermaga RT 3,Desa Tabukan Raya Kec Tabukan, Kab. Barito Kuala	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	300	meter	200.000.000,00

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
719	SAYYID MUHAMMAD ANIES	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	PERBAIKAN JALAN	JALAN SEPAKAT RT.10 KELURAHAN BERANGAS KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	300	Meter	300.000.000,00
720	SAYYID MUHAMMAD ANIES	JEMBATAN DI JALAN LINGKUNGAN/PERMUKIMAN RUSAK	PERBAIKAN JEMBATAN	JL. SEPAKAT RT.10 KELURAHAN BERANGAS KECAMATAN ALALAK, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	4	Unit	200.000.000,00
721	H. MURJANI, S.Sos.	JALAN PERMUKIMAN/LINGKUNGAN RUSAK	JALAN TETIAN ULIN PANJANG 50 METER LEBAR 1 METER	DESA TABUNGANEN PEMURUS RT.07 KECAMATAN TABUNGANEN, Kab. Barito Kuala	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	50	METER	200.000.000,00
722	H. MURJANI, S.Sos.	MASIH KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA SANITASI UNTUK MASYARAKAT	PEMBUATAN 2 BUAH MCK	DESA TABUNGANEN PEMURUS RT.09, DESA TABUNGANEN TENGAH RT.04 KECAMATAN TABUNGANEN, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	2	BUAH	-
723	HENDRI DYAH ESTININGRUM, SH	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN (KEAGAMAAN/SOSIAL)	Jalan menuju TPU masih tanah setempat (seluas 1200 m2) sehingga mobil jenazah tidak bisa masuk ke area pemakaman	Desa Puntik Luar Kec. Mandastana , Kab. Barito Kuala	SEKRETARIAT DAERAH	400	meter	400.000.000,00
724	REIDAN WINATA, S.E.	JALAN KABUPATEN RUSAK	Jalan inspeksi rusak berat (lebar 2 meter)	Desa Sungai Pantai RT. 07 Kecamatan Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	2000	meter	200.000.000,00

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

2.5 INOVASI DAERAH

Inovasi daerah adalah pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dalam pembangunan daerah, inovasi memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
  Inovasi membantu pemerintah daerah memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, murah, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat, misalnya melalui digitalisasi layanan administrasi, aplikasi pelayanan, atau sistem pengaduan masyarakat.
- Mendorong efektivitas dan efisiensi pembangunan
  Dengan inovasi, pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas secara lebih optimal sehingga program pembangunan menghasilkan dampak yang lebih besar.
- Menyelesaikan permasalahan daerah secara kreatif
  Setiap daerah memiliki tantangan berbeda seperti kemiskinan, pengangguran, sampah, ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Inovasi menjadi cara untuk menemukan solusi yang lebih tepat sesuai kondisi lokal.
- Meningkatkan daya saing daerah
  Inovasi dapat mengembangkan potensi unggulan daerah, seperti inovasi di sektor pertanian, UMKM, pariwisata, industri kreatif, dan pengelolaan sumber daya alam sehingga ekonomi daerah lebih berkembang.
- Mendorong partisipasi masyarakat
  Inovasi daerah dapat membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan komunitas untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan.
- Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah
  Inovasi membantu perangkat daerah bekerja lebih adaptif, memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, serta mencapai target pembangunan daerah.
- Mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah
  Inovasi mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta target dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025 melalui Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2/416/KUM/2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Inovasi dalam 3 (tiga) aspek yang mendorong percepatan pembangunan, yaitu dalam aspek pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan peran serta / partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.107 Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

No	Inovasi	Pelaksana	Kategori Inovasi
1	LAKAS JADI (Pelacakan Berkas dan Jaringan Administrasi Terintegrasi)	Sekretariat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan
2	SIPAWAI ASN (Sistem Perhitungan Belanja Pegawai ASN)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tata Kelola Pemerintahan
3	Penerapan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik
4	Optimalisasi Promosi Kesehatan Melalui Serial Catatan Julak Haji (CJH)	Dinas Kesehatan	Pelayanan Publik
5	Semua Masyarakat Sehat Bangun Jamban (SEMANGAT BAJA)		Partisipasi Masyarakat
6	Si BERAS UNUS (Siap Atasi Stunting Melalui Skrining dan Deteksi Dini Secara Langsung Balita Stunting yang Terinfeksi TB)		Pelayanan Publik
7	GISELLA (Gigi Sehat Ibu Hamil dan Bayi Selamat)		Pelayanan Publik
8	SI PETARUNG (Aplikasi Pembuatan Surat Keterangan Tata Ruang)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik
9	PADU SERASI (Pelayanan Terpadu Penyelesaian Masalaha Sertifikat Tanah eks Transmigrasi)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pelayanan Publik
10	INOVASI PELAYANAN PERENTANAN (Perekaman Rentan Administrasi Kependudukan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Publik
11	PAIKAT BATOLA (Peta Informasi Perizinan Rakyat dan Investasi di Barito Kuala)	Dinas PMPTSP	Tata Kelola Pemerintahan
12	Gerakan Penghijauan Daerah Rendah Tutpan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat
13	SIP BATOLA (Sistem Informasi POPT (Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) Batola)	Dinas Pertanian TPH	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik

No	Inovasi	Pelaksana	Kategori Inovasi
14	SIKAPIN (Sistem Informasi Kepegawaian Internal) melalui Pesan Otomatis WhatsApp	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Tata Kelola Pemerintahan
15	PERAK HATI (Perkawinan Anak Hapus dan Tindakan)	DPPKBP3A	Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat
16	Barito Kuala Serumpun Festival	Dinas Kepemudaan, Olahraga Budaya dan Pariwisata	Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat
17	Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Percepatan Penegasan Batas Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tata Kelola Pemerintahan
18	SIMANIS LAILA (Sistem Informasi dan Administrasi UPT Balai Latihan Kerja)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik
19	BAIMAN BEDA (Barito Kuala Mewujudkan UMKM Naik Kelas dengan Pembinaan dan Pendampingan)	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Pelayanan Publik
20	Optimalisasi Layanan Kunjungan Tamu di DPRD Kabupaten Barito Kuala melalui Sistem Aplikasi E-BAELANG	Sekretariat DPRD	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik
21	SILVER – Optimalisasi Verifikasi SPJ dan Rekapitulasi Realisasi Anggaran dengan Aplikasi Sistem Informasi Lembar Verifikasi Berbasis Web pada Bakesbangpol Barito Kuala	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tata Kelola Pemerintahan
22	MARS (Majalah Andalan Rumah Sakit)		Pelayanan Publik
23	SI PEPARE (Sistem Informasi Pelayanan Kecepatan, Kepastian dan Akurasi Hasil Radiologi Era Digital)	RSUD H. Abdul Aziz	Pelayanan Publik
24	SUSAN MAKAN DI PATEN (Survei Kepuasan Masyarakat Secara Online di Pelayanan Terpadu Kecamatan)	Kecamatan Rantau Badauh	Pelayanan Publik
25	SKTM HYBRID – Surat Keterangan Tidak Mampu Berbasis Offline dan Online Pada Kecamatan Barambai	Kecamatan Barambai	Pelayanan Publik

No	Inovasi	Pelaksana	Kategori Inovasi
26	BATUAH PROJECT (Batatukan Membawa Berkah)	Muhammad Hidayatullah	Partisipasi Masyarakat
27	GELITA (Gerakan Literasi Ije Jela)	Muhammad Noor Fadillah	Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat
28	PERTALIMITER : Sistem Terpadu Limitasi Konsumsi BBM Bersubsidi Menggunakan e-KTP di Batola	Benny Rahman Hakim	Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat
29	DATA SELIDAH: Sistem Informasi Tata Kelola Administrasi Kependudukan Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala	Nor Aida	Pelayanan Publik
30	SPESIALIZ: Sistem Informasi Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Barito Kuala Berbasis Android	Martini	,Pelayanan Publik
31	KEMALAM (Biotaraktan Untuk Mengendalikan Lalat Buah)	M. Ilham Ramadhona	Partisipasi Masyarakat
32	Inovasi Teknologi Tepat Guna “Seeder Wira Wiri”	Hatni	Partisipasi Masyarakat
33	Sistem Informasi Mitigasi Banjir Barito Kuala (SIMBALA)	Mislaini	Pelayanan Publik
34	Satu Pixel Satu Batola Solusi Digital untuk Promosi Sekolah di Barito Kuala	M. Samsul Nurbaris	Pelayanan Publik
35	BAHALAP Market Sistem Informasi terpadu Pengelolaan dan Peningkatan Layanan Pasar Marabahan	Huzaimah Hasnur	Pelayanan Publik
36	DAMRI BAHALAP: Aplikasi Terintegrasi untuk Optimalisasi Layanan Moda Damri di Kabupaten Barito Kuala	Ade Kurnia, S.Pd	Pelayanan Publik
37	PEPALAM (Pestisida Daun Pepaya dan Daun Galam)	Mahdianoor	Partisipasi Masyarakat
38	SI-ECENG	Erwin Maulana	Partisipasi Masyarakat
39	TALENT MAPPING: Maksimalkan Potensi, Evaluasi, Pelajari dan Kembangkan	Nisrina Nuarani	Partisipasi Masyarakat

No	Inovasi	Pelaksana	Kategori Inovasi
40	SIDARA BAKULA (Sistem Informasi Digital dan Administrasi Rakyat Desa Barito Kuala)	Anton Setiawan	Pelayanan Publik
41	KOMPOR JELASTFOAM	Anindya Yumna	Partisipasi Masyarakat
42	Biobrik Kulit Kayu Galam (BIOKUKAM) Solusi Energi Terbarukan)	Jenita Eka Putri	Partisipasi Masyarakat
43	PEMBRILIMANG (Pembuatan Briket Ramah Lingkungan dari Limbah Kulit Galam dan Arang Sebagai Energi Alternatif)	Marisa Nurul Husna	Partisipasi Masyarakat
44	SUSU MILET sebagai alternatif Susu Nabati yang Sehar dan Ramah Lingkungan	Dwi Salsabila	Partisipasi Masyarakat
45	Bioplastik Berbasis Pati Singkong Eco-Friendly (EcoTapi) Solusi Ramah Lingkungan untuk Mengurangi Sampah Plastik Konvensional	Hanisa Pratiwi	Partisipasi Masyarakat
46	Lilin Aroma Terapi Berbasia Alam Terbaik (LIARTERTEBAK)	Indah Ramadani	Partisipasi Masyarakat
47	Alternatif Briket dari Biji Ketapang	Aisyah Tiara	Partisipasi Masyarakat

Sumber: Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2/416/KUM/2025

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa inovasi di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025 didominasi yang terkait dengan Pelayanan Publik dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah. Inovasi ini tentu saja berlangsung berkelanjutan pada tahun 2026 yang mana proses pengusulan inovasi daerah masih berlangsung hingga sekarang.

Tabel 2.108 Daftar Usulan Inovasi Daerah Tahun 2026

No	Inovasi	Pelaksana	Kategori Inovasi
1	GEOBATOLA (GEOSPASIAL BARITO KUALA TERINTEGRASI DAN TERKELOLA)	BAPPERIDA	Tata Kelola Pemerintahan
2	Optimalisasi Pelayanan melalui Inovasi SAPA (Sistem Aplikasi Pelayanan dan Aspirasi) Berbasis Google Form untuk Digitalisasi Buku Tamu dan Survei Kepuasan di BKPP Kabupaten Barito Kuala	BKPP	Tata Kelola Pemerintahan

No	Inovasi	Pelaksana	Kategori Inovasi
3	BATAJAK OPSEN (Batola Taat Pajak Opsen PKB dan Opsen BBN-KB)	BP2RD	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik
4	SISTEM PERHITUNGAN BELANJA PEGAWAI ASN (SIPAWAI ASN)	BPKAD	Tata Kelola Pemerintahan
5	Optimalisasi Promosi Kesehatan Melalui Serial Catatan Julak Haji (CJH) Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala 2026	DINKES	Pelayanan Publik
6	AKOMODASI DATA DUKUNG TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUNAN	DINSOS	Tata Kelola Pemerintahan
7	AKOMODASI DATA DUKUNG TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUNAN	DINSOS	Tata Kelola Pemerintahan
8	Mengingat KPR (Kontrol Populasi HPR)	DISBUNNAK	Pelayanan Publik
9	SIKAPIN V2 (Sistem Informasi Kepegawaian Internal Versi 2)	DISBUNNAK	Tata Kelola Pemerintahan
10	MELON (Media E-Learning Online Network)	DISDIK	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik
11	Aplikasi Layanan Publik Online SIPESONA	DISDUKCAPIL	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik
12	JUM’AT ARSIP	DISKOPERINDAG	Tata Kelola Pemerintahan
13	PAISAN-GURAMI BATOLA (Pelayanan Administrasi Desa/Kelurahan Menurunkan angka pengannguran atasi kemiskinan Kabupaten Barito Kuala)	DISNAKERTRANS	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik
14	BAHIMAT (BEDAH RUMAH BERSIH NAYAMAN DAN SEHAT)	DISPERKIM	Pelayanan Publik
15	SISTEM ABSENSI PEGAWAI HONORER PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (SAPA PUSIP)	DISPERPUSIP	Tata Kelola Pemerintahan

No	Inovasi	Pelaksana	Kategori Inovasi
16	INOVASI KULINER RAMADHAN BAIMAN KAWASAN WISATA BAWAH JEMBATAN BARITO	DISPORABUDPAR	Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat
17	LAPOR IKAN (LAYANAN PELAPOR KEGIATAN PERIKANAN)	DKPP	Pelayanan Publik
18	PERAK HATI (PERKAWINAN ANAK, HAPUS DAN TIADAKAN)	DP2KBP3A	Pelayanan Publik
19	PAIKAT BATOLA (PETA INFORMASI PERIZINAN RAKYAT DAN INVESTASI DI BARITO KUALA)	DPMPTSP	Tata Kelola Pemerintahan
20	Optimalisasi Pengelolaan JDIH DPRD Kabupaten Barito Kuala Berbasis Digital Terintegrasi	DPRD	Tata Kelola Pemerintahan
21	SI PETARUNG (Aplikasi Pembuatan Surat Keterangan Tata Ruang)	DPUPR	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik
22	GERAKAN JUMAT MEMILAH ARSIP INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA (JUMARIANTO)	INSPEKTORAT	Tata Kelola Pemerintahan
23	Optimalisasi Disposisi Surat Masuk pada Badan Kesatuan melalui Aplikasi Sistem Informasi Disposisi Surat (SIDISPOS) Bangsa dan Politik	KESBANGPOL	Tata Kelola Pemerintahan
24	SI HANDUK (SISTEM DAFTAR HADIR , BUKU TAMU, NOTULENSI DAN DOKUMENTASI	RSUD H. Abdul Aziz	Tata Kelola Pemerintahan
25	Sarana Informasi Administrasi dan Pelaporan Via WhatsApp	Kecamatan Alalak	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik
26	SIMAS-SKM (Sistem Informasi Mandiri Survei Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Anjir Muara	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik
27	BURAS (Buku tamu, survey kepuasan masyarakat, dan layanan Aduan masyarakat) Berbasis QR Code	Kecamatan Anjir Pasar	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik
28	SI BINA BARAMBAI (SISTEM BARCODE INVENTARISIR ASET BARAMBAI)	Kecamatan Barambai	Tata Kelola Pemerintahan

No	Inovasi	Pelaksana	Kategori Inovasi
29	GEMOY - Gerakan Jumat Gotong Royong	Kecamatan Jejangkit	Pelayanan Publik
30	“SI DAPUR DATA KECAMATAN” SISTEM DASHBOARD PENGUMPULAN & PELAPORAN DATA TERPADU KECAMATAN KURIPAN	Kecamatan Kuripan	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik
31	Sistem Manajemen Tamu Kecamatan Mandastana (SI MANTAN)	Kecamatan Mandastana	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik
32	WEBSITE KECAMATAN RANTAU BADAUH	Kecamatan Rantau Badauh	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik
33	DIPLOMASI (DIGITALISASI PELAYANAN DAN INFORMASI)	Kecamatan Tabunganen	Tata Kelola Pemerintahan
34	SIMPONI (SISTEM INFORMASI MONITOR PELAYANAN ONLINE TERKINI)	Kecamatan Wanaraya	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik
35	Pemanfaatan Sampah Plastik & Kertas Menjadi Produk Bernilai Ekonomi	Kecamatan Tabukan	Partisipasi Masyarakat
36	Marlapor : Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan dan Jembatan Berbasis Web	Muhammad Ammar Firdaus	Partisipasi Masyarakat
37	HANDIL MARKET: Solusi Teknologi Tepat Guna untuk Digitalisasi dan Pemberdayaan UMKM Lokal di Handil Bakti	MUHAMMAD SAMSUL NURBAHRIS	Partisipasi Masyarakat
38	OPTIMALISASI LAHAN RAWA GAMBUT KABUPATEN BARITO KUALA MENGGUNAKAN SABABARI (SISTEM TANAM BALURAN BAWANG MERAH DAN PADI)	Beny Rahman Hakim, M.Kom.	Partisipasi Masyarakat
39	“RATU” (RODA BANTU) RODA BANTU PADA ALAT TANAM TRANSPLATER R4	Hatni	Partisipasi Masyarakat
40	RANCAMH BANGUN LAMPU STROBO DAN SIRINE DIGITAL UNTUK MOBIL PEMADAM KEBAKARAN BERBASIS ARDUINO	Hidayatul Azmi	Partisipasi Masyarakat

No	Inovasi	Pelaksana	Kategori Inovasi
41	RASPADI (Rakit Apung Semai Padi)	Sri Devi	Partisipasi Masyarakat
42	LEBUBAHALAP.WEB.ID	Muhammad Noor Fadillah	Partisipasi Masyarakat
43	SIMBA: Sistem Informasi Bahan Pangan Kabupaten Barito Kuala	Ade Kurnia	Partisipasi Masyarakat
44	LITNUM TUAH (LITERASI DAN NUMERASI TERPADU UNTUK ANAK HEBAT)	SDN Murung Raya	Pelayanan Publik
45	RINTAL SABAR (RINTISAN SEKOLAH DIGITAL SISTEM ABSENSI BARCODE)	SDN SUNGAI GAMPA 1	Pelayanan Publik
46	BISKUIT SARA DAUN KATUK BANTU LANCARKAN ASI	DESA KARANG DUKUH	Partisipasi Masyarakat
47	TAMPAI (TAYANGAN MEDIA PELAYANAN ADMINISTRASI INFORMATIF)	KEL. MARABAHAN KOTA	Pelayanan Publik
48	GISELLA BERSINAR (GIGI SEHAT IBU HAMIL DAN BAYI SELAMAT SERTA BERDAYA CEGAH STUNTING SEJAK DINI)	PUSKESMAS WANARAYA	Pelayanan Publik
49	QR CODE INFORMASI OBAT “CODE SIBAT”	PUSKESMAS TAMBAN	Pelayanan Publik
50	KAWAN RAYA (KARTU AKSI WUJUDKAN ANAK SEHAT WANARAYA)	PUSKESMAS WANARAYA	Pelayanan Publik
51	SI GERCEK (SISTEM INFORMASI GERAKAN CEGAH KANKER SERVIKS TERINTEGRASI)	PUSKESMAS BERANGAS	Pelayanan Publik
52	KOJIWA (KONTROL OBAT TERJAGA,JIWA WARAS)	PUSKESMAS BELAWANG	Pelayanan Publik
53	GEMATI (GERAKAN REMAJA PUTRI MINUM TABLET TAMBAH DARAH)	PUSKESMAS WANARAYA	Pelayanan Publik
54	KOMPAK stop BABS (KOLABORASI MASYARAKAT DAN PARTISIPASI AKTIF MENUJU DESA BEBAS BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN)	PUSKESMAS ANJIR MUARA	Pelayanan Publik
55	Satu pelukan Satu Keputusan	PUSKESMAS WANARAYA	Partisipasi Masyarakat

No	Inovasi	Pelaksana	Kategori Inovasi
56	“GEMA INTERNET” (GEMAR MAKAN IKAN TELUR SAYURAN TAHU TEMPE DAN TABLET TAMBAH DARAH)	PUSKESMAS MARABAHAN	Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat
57	Diversifikasi Produk Daun Kelor : Sabun Herbal Dan Gummy sebagai Solusi Kesehatan Alami	SMAN 1 MARABAHAN	Partisipasi Masyarakat
58	Dragon Harmony Spreed	SMAN 1 MARABAHAN	Partisipasi Masyarakat
59	INOVASI SELAI CEMPEDAK SEBAGAI ISIAN DONAT (ARTEGERA PUFFNUT)	SMAN 1 MARABAHAN	Partisipasi Masyarakat
60	GERNUSA (GERakan NUmerasi SemestA)	GIBS	Partisipasi Masyarakat
61	Pirolisis Sampah Plastik Sebagai Alternatif Bahan Bakar Minyak Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan	SMAN 1 MARABAHAN	Partisipasi Masyarakat
62	SAWAH CRUNCH (Mengubah Hama Sawah Menjadi Sumber Protein Lokal Yang Bernilai)	SMAN 1 MARABAHAN	Partisipasi Masyarakat
63	Biopestisida Alami Berbasis Kulit Jeruk Siam (Citrus nobilis) Mendukung Pertanian Berkelanjutan Yang Ramah Lingkungan sebagai Biopest Orange Untuk	SMAN 1 MARABAHAN	Partisipasi Masyarakat
64	Pemanfaatan Eceng Gondok Menjadi Sabun Egona Savon	SMAN 1 MARABAHAN	Partisipasi Masyarakat
65	PARJAPIZI (PEMBUATAN ABON BERBASIS JANTUNG PISANG BERGIZI)	SMAN 1 MARABAHAN	Partisipasi Masyarakat
66	“Modernisasi Jamu Tradisional Melalui Produk Gummy Herbal Untuk Mendukung Ekonomi Kreatif Daerah”	SMAN 1 MARABAHAN	Partisipasi Masyarakat

Sumber: Bidang Inovasi dan Riset Daerah Bapperida Kab. Barito Kuala (diolah)

2.6 PENYAJIAN DATA PEMBANGUNAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip **perencanaan berbasis data** (*evidence-based*

planning) sebagai landasan dalam perumusan kebijakan, penetapan sasaran pembangunan, penyusunan prioritas pembangunan, serta penyusunan program dan kegiatan daerah. Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, konsisten, dan mampu menjawab berbagai permasalahan pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan **Permendagri Nomor 14 Tahun 2026**, penyajian data dalam RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 mengacu pada **e-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)** sebagai sumber utama data pembangunan daerah. e-Walidata SIPD merupakan sistem pengelolaan data pembangunan yang mengintegrasikan data sektoral dari seluruh perangkat daerah sehingga menghasilkan basis data yang seragam, konsisten, dan dapat digunakan secara bersama dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Selain memanfaatkan e-Walidata SIPD, penyusunan RKPD Tahun 2027 juga menggunakan berbagai sumber data resmi lainnya, antara lain data statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), data kementerian dan lembaga pemerintah, data hasil survei dan pendataan sektoral perangkat daerah, data hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), data Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta berbagai data pendukung lainnya yang telah melalui proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan kualitas, konsistensi, dan keterpaduan data pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga telah melaksanakan **Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Barito Kuala** sebagai wadah koordinasi penyelenggaraan tata kelola data pembangunan daerah. Forum SDI dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah sebagai produsen data, Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala sebagai Pembina Data, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata Daerah, serta Bapperida sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah. Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan data pembangunan, melakukan verifikasi dan validasi data sektoral, menyelesaikan perbedaan data antarperangkat daerah, serta menyepakati penggunaan data prioritas yang menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan Forum SDI memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas data pembangunan yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. Melalui forum tersebut dilakukan pembahasan mengenai standar data, metadata, interoperabilitas data, kode referensi, serta konsistensi indikator pembangunan daerah sehingga data yang digunakan dalam penyusunan indikator makro daerah, evaluasi capaian pembangunan, perumusan isu strategis, penetapan target pembangunan, hingga penyusunan program prioritas memiliki validitas dan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Penerapan prinsip Satu Data Indonesia juga mendukung terwujudnya sinkronisasi antara data perencanaan, data penganggaran, dan data evaluasi pembangunan sehingga mampu meminimalkan terjadinya perbedaan data antarperangkat daerah. Dengan tersedianya data yang berkualitas, proses pengambilan keputusan pembangunan menjadi lebih objektif, transparan, dan akuntabel serta mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Barito Kuala.

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia melalui pengembangan e-Walidata SIPD, peningkatan kapasitas pengelola data pada perangkat daerah, penyempurnaan mekanisme verifikasi dan validasi data, serta penguatan koordinasi antara produsen data, walidata, pembina data, dan pengguna data. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem data pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan informasi pembangunan daerah.

Tabel 2.109 Sumber Data Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

No	Sumber Data	Instansi Penanggung Jawab	Pemanfaatan dalam RKPD
1	e-Walidata SIPD	Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Data pembangunan daerah, indikator kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan
2	Badan Pusat Statistik (BPS)	BPS Kabupaten Barito Kuala	Data makro ekonomi, sosial, kependudukan, dan statistik sektoral
3	Data Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Data capaian program, indikator kinerja, SPM, dan data sektoral
4	Kementerian/Lembaga	Kementerian/Lembaga terkait	Data nasional, kebijakan sektoral, dan target pembangunan nasional
5	Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Barito Kuala	Bapperida, Diskominfo, BPS, dan Perangkat Daerah	Verifikasi, validasi, sinkronisasi, dan penyepakatan data pembangunan daerah



Gambar 2.17 Alur Pengelolaan Data Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

Dengan penerapan e-Walidata SIPD dan penguatan penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia, penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang didukung oleh data yang valid, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini memperkuat kualitas analisis pembangunan, meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan, serta mendukung pengambilan keputusan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

2.9.1 Kebijakan Penyajian Data Pembangunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip **perencanaan berbasis data (*evidence-based planning*)**, yaitu penyusunan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perumusan sasaran, prioritas, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kondisi riil daerah serta mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan **Permendagri Nomor 14 Tahun 2026**, penyajian data dalam RKPD Tahun 2027 mengacu pada **e-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)** sebagai sumber utama data pembangunan daerah yang didukung oleh sumber data resmi lainnya. Data yang digunakan meliputi data statistik sektoral perangkat daerah, data Badan Pusat Statistik

(BPS), data kementerian/lembaga, hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta sumber data resmi lainnya yang telah melalui proses verifikasi dan validasi.

Dalam rangka menjamin kualitas dan konsistensi data, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menerapkan prinsip **Satu Data Indonesia** melalui penyelarasan standar data, metadata, kode referensi, dan interoperabilitas data antarperangkat daerah. Pengelolaan data tersebut didukung oleh pelaksanaan **Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Barito Kuala** sebagai wadah koordinasi antara perangkat daerah, Walidata Daerah, Pembina Data Statistik, dan Bapperida dalam melakukan sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data pembangunan.

Data yang disajikan dalam RKPD merupakan **data statistik sektoral** yang dihasilkan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya serta telah dilengkapi dengan sumber data dan keterangan yang jelas. Data tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan evaluasi pembangunan, perumusan isu strategis, penetapan target indikator kinerja, penyusunan prioritas pembangunan, hingga pengalokasian program dan kegiatan Tahun 2027.

Melalui kebijakan penyajian data yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat konsistensi antar dokumen pembangunan, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan pembangunan daerah

2.9.2 Daftar Data Daerah Kabupaten Barito Kuala

Sebagai implementasi penyelenggaraan **Satu Data Indonesia** di daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menyusun **Daftar Data Daerah** yang menjadi acuan dalam pengelolaan data pembangunan daerah. Daftar Data Daerah merupakan himpunan data yang dihasilkan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Keberadaan Daftar Data Daerah bertujuan untuk mewujudkan keseragaman jenis data yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Melalui Daftar Data Daerah, setiap perangkat daerah memiliki kepastian mengenai data yang harus dikumpulkan, dikelola, diperbarui, dan disampaikan sesuai standar data, metadata, serta kode referensi yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027, Daftar Data Daerah menjadi salah satu rujukan utama dalam penyediaan data pembangunan. Data yang tercantum dalam Daftar Data Daerah telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh perangkat daerah sebagai produsen data, Walidata Daerah, dan Pembina Data Statistik sehingga memiliki tingkat konsistensi dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, seluruh

indikator pembangunan, analisis kondisi daerah, evaluasi capaian pembangunan, serta perumusan kebijakan dalam RKPD disusun berdasarkan data yang sama dan terintegrasi.

Ke depan, Daftar Data Daerah akan terus diperbarui secara berkala menyesuaikan perkembangan kebutuhan informasi pembangunan, perubahan regulasi, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembaruan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola data pembangunan sekaligus mendukung terwujudnya sistem perencanaan daerah yang semakin akurat, efektif, dan berbasis data.

Tabel 2.110 Daftar Data Daerah Kabupaten Barito Kuala

No	Uraian	Keterangan
1	Nama Dokumen	Daftar Data Daerah Kabupaten Barito Kuala
2	Fungsi	Acuan penyelenggaraan data pembangunan daerah
3	Produsen Data	Seluruh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan
4	Walidata Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Pembina Data Statistik	Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala
6	Koordinator Pemanfaatan Data	Bapperida Kabupaten Barito Kuala
7	Pemanfaatan	Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, KUA-PPAS, APBD, monitoring, dan evaluasi pembangunan
8	Pemutakhiran Data	Dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan dan kebutuhan pembangunan

Sumber: Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Daftar Data Daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan **Data Prioritas Daerah** sebagai kelompok data yang memiliki nilai strategis dan menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Data prioritas tersebut dijelaskan pada Subbab **2.9.3 Data Prioritas Daerah**.

2.9.3 Data Prioritas Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis data, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan **Data Prioritas Daerah** sebagai bagian dari implementasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di daerah. Data Prioritas Daerah merupakan sekumpulan data yang memiliki nilai strategis, digunakan secara luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Penetapan Data Prioritas Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pencapaian target pembangunan daerah, indikator kinerja daerah, kebutuhan pelayanan publik, serta keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Data prioritas juga disusun berdasarkan hasil

koordinasi antara perangkat daerah sebagai produsen data, Walidata Daerah, Pembina Data Statistik, serta Bapperida sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027, Data Prioritas Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi capaian pembangunan, analisis isu strategis, penyusunan indikator makro daerah, penetapan sasaran pembangunan, serta perumusan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan. Dengan menggunakan Data Prioritas Daerah, proses penyusunan RKPD menjadi lebih objektif, terukur, dan mampu menggambarkan kondisi pembangunan daerah secara lebih akurat.

Data Prioritas Daerah Kabupaten Barito Kuala mencakup berbagai bidang pembangunan yang memiliki pengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, antara lain bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan, ekonomi, investasi, infrastruktur, ketahanan pangan, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta bidang strategis lainnya sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan melakukan pemutakhiran Data Prioritas Daerah secara berkala melalui mekanisme Forum Satu Data Indonesia dan pengelolaan e-Walidata SIPD agar data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan senantiasa mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan pembangunan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan kualitas tata kelola data pembangunan daerah.

Tabel 2.111 Data Prioritas Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

No	Kelompok Data Prioritas	Contoh Data
1	Kependudukan	Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur umur, kemiskinan ekstrem
2	Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah
3	Kesehatan	Usia Harapan Hidup, prevalensi stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi, cakupan pelayanan kesehatan
4	Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), penyerapan tenaga kerja
5	Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, inflasi, PDRB per kapita, Rasio Gini
6	Investasi	Realisasi investasi, jumlah pelaku usaha, nilai investasi PMDN/PMA
7	Infrastruktur	Kondisi jalan, jembatan, irigasi, akses air minum layak, sanitasi layak
8	Ketahanan Pangan	Produksi padi, luas panen, indeks ketahanan pangan, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan

No	Kelompok Data Prioritas	Contoh Data
9	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD), luas kawasan lindung, pengelolaan sampah
10	Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Pelayanan Publik, Opini BPK

Sumber: Daftar Data Prioritas Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027.

Keterkaitan Data Prioritas Daerah dengan Penyusunan RKPD

Data Prioritas Daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi statistik, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan seluruh substansi RKPD Tahun 2027. Data tersebut digunakan untuk menganalisis capaian pembangunan, mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis, menetapkan target indikator makro daerah, menyusun sasaran pembangunan, menentukan prioritas pembangunan, hingga mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, seluruh kebijakan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 telah didasarkan pada data prioritas yang tervalidasi dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Untuk menjamin kualitas dan konsistensi Data Prioritas Daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyelenggarakan **Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Barito Kuala** sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data antarperangkat daerah.

2.9.4 Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Barito Kuala

Dalam rangka mewujudkan tata kelola data pembangunan yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyelenggarakan **Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Barito Kuala** sebagai wadah koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Forum ini merupakan media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menghasilkan data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan digunakan secara bersama sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pelaksanaan Forum SDI merupakan bagian penting dalam mendukung penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 yang berbasis data (*evidence-based planning*). Melalui forum ini dilakukan pembahasan mengenai kebutuhan data pembangunan, penyelarasan indikator, verifikasi dan validasi data sektoral, penyelesaian perbedaan data antarperangkat daerah, serta penyepakatan penggunaan data yang menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Forum SDI Kabupaten Barito Kuala melibatkan seluruh perangkat daerah sebagai **Produsen Data**, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pembina Data Statistik**, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai **Walidata Daerah**, serta Bapperida sebagai

koordinator perencanaan pembangunan daerah dan pengguna utama data dalam penyusunan dokumen perencanaan. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam RKPD berasal dari sumber yang sah, memiliki standar yang sama, dan telah melalui proses pengendalian kualitas data.

Dalam pelaksanaannya, Forum SDI membahas berbagai aspek penyelenggaraan data, antara lain penyusunan Daftar Data Daerah, penetapan Data Prioritas Daerah, penyelarasan standar data dan metadata, penggunaan kode referensi dan data induk, interoperabilitas data antar sistem informasi, serta mekanisme pembaruan data secara berkala. Forum juga menjadi sarana penyelesaian apabila terdapat perbedaan data antarperangkat daerah sehingga dapat ditetapkan satu data yang disepakati bersama sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil pelaksanaan Forum SDI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027. Data yang telah melalui proses koordinasi, verifikasi, dan validasi digunakan sebagai dasar penyusunan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi capaian pembangunan, identifikasi isu strategis, penetapan indikator makro daerah, penyusunan sasaran pembangunan, hingga perumusan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan. Dengan demikian, seluruh substansi RKPD disusun berdasarkan data yang konsisten dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Ke depan, Forum SDI akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola data pembangunan daerah. Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas produsen data, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, peningkatan kualitas statistik sektoral, serta perluasan pemanfaatan data dalam seluruh tahapan siklus pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan.

Tabel 2.112 Peran Pemangku Kepentingan dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Barito Kuala

Pemangku Kepentingan	Peran
Bapperida	Mengoordinasikan pemanfaatan data dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta memfasilitasi pelaksanaan Forum SDI.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Walidata Daerah)	Mengelola data daerah, melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian standar data, metadata, serta mengintegrasikan data ke dalam Portal Data Daerah dan e-Walidata SIPD.
Badan Pusat Statistik (Pembina Data Statistik)	Memberikan pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral, pembinaan standar statistik, serta verifikasi kualitas data statistik.

Pemangku Kepentingan	Peran
Perangkat Daerah (Produsen Data)	Menghasilkan, memperbarui, dan menyampaikan data sektoral sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Pemangku Kepentingan Lainnya	Memberikan dukungan data dan masukan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

2.9.5 Portal Data Daerah dan Integrasi dengan Portal Satu Data Indonesia Nasional

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola data pembangunan yang terintegrasi dan mendukung transformasi digital pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus mengembangkan **Portal Data Daerah** sebagai media penyediaan, pengelolaan, dan diseminasi data pembangunan daerah. Portal Data Daerah berfungsi sebagai pusat informasi data sektoral yang dikelola secara terintegrasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Portal Data Daerah dikembangkan sebagai implementasi prinsip **Satu Data Indonesia**, yaitu menyediakan data yang memenuhi standar data, memiliki metadata yang jelas, menggunakan kode referensi dan data induk yang baku, serta dapat dipertukarkan antar sistem informasi pemerintah. Keberadaan portal ini juga mendukung keterbukaan informasi publik dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyediaan data pembangunan yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027, Portal Data Daerah menjadi salah satu media pendukung dalam penyediaan data statistik sektoral dan data pembangunan yang digunakan sebagai dasar analisis kondisi daerah, evaluasi capaian pembangunan, penetapan indikator kinerja, penyusunan sasaran pembangunan, serta perumusan prioritas dan program pembangunan daerah. Pemanfaatan Portal Data Daerah diharapkan mampu meningkatkan konsistensi data antarperangkat daerah sekaligus mengurangi perbedaan data yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan.

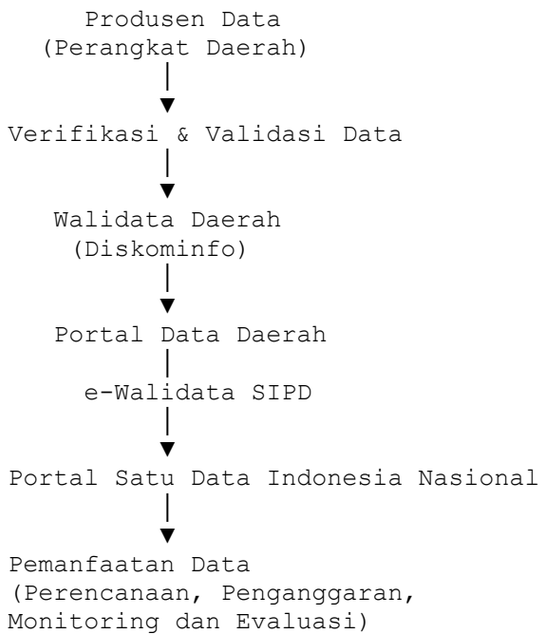
Sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang tata kelola data, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga terus mendorong **integrasi Portal Data Daerah dengan Portal Satu Data Indonesia Nasional** secara bertahap. Proses integrasi dilakukan melalui penyelarasan standar data, metadata, kode referensi, interoperabilitas sistem informasi, serta penguatan kualitas data statistik sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Langkah tersebut bertujuan untuk mendukung pertukaran data secara lebih efektif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan.

Ke depan, pengembangan Portal Data Daerah akan terus diarahkan untuk memperkuat ekosistem data pembangunan yang terintegrasi, meningkatkan kualitas pelayanan data kepada

masyarakat, serta mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, pengembangan portal juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, adaptif, dan berbasis data, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan pembangunan yang lebih cepat, tepat, dan efektif.

Tabel 2.113 Peran Portal Data Daerah dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

No	Aspek	Uraian
1	Fungsi	Media penyediaan, pengelolaan, dan diseminasi data pembangunan daerah
2	Pengelola	Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata Daerah
3	Pengguna	Bapperida, Perangkat Daerah, BPS, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha
4	Jenis Data	Data Statistik Sektoral, indikator makro daerah, indikator pelayanan dasar, indikator RPJMD, indikator RKPD, dan data pembangunan lainnya
5	Pemanfaatan	Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, KUA-PPAS, APBD, monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan
6	Arah Pengembangan	Integrasi dengan Portal Satu Data Indonesia Nasional, peningkatan interoperabilitas data, dan penguatan layanan data publik



Gambar 2.18 Integrasi Portal Data Daerah dengan Portal Satu Data Indonesia Nasional

Pengembangan Portal Data Daerah dan integrasinya dengan Portal Satu Data Indonesia Nasional merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memperkuat tata kelola data pembangunan yang berkualitas. Melalui sistem data yang semakin terintegrasi, diharapkan proses penyusunan RKPD dan dokumen perencanaan lainnya dapat didukung oleh data yang lebih akurat, konsisten, dan mudah diakses,

sehingga mampu meningkatkan kualitas perencanaan serta efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

2.9.6 Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 didukung oleh **Data Statistik Sektoral** yang dihasilkan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Data statistik sektoral merupakan salah satu sumber utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah karena mampu memberikan gambaran mengenai kondisi riil pada setiap urusan pemerintahan, capaian pembangunan, serta perkembangan indikator kinerja daerah.

Pemanfaatan data statistik sektoral dilakukan secara terintegrasi dengan data statistik dasar yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), data administrasi pemerintahan, serta data hasil monitoring dan evaluasi pembangunan. Integrasi berbagai sumber data tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas analisis pembangunan, menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, serta memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dalam RKPD didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, data statistik sektoral dimanfaatkan pada seluruh tahapan penyusunan dokumen, mulai dari penyusunan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi capaian pembangunan, identifikasi permasalahan dan isu strategis, penyusunan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, penetapan sasaran pembangunan, hingga penyusunan prioritas pembangunan, program, kegiatan, dan subkegiatan. Dengan demikian, seluruh substansi RKPD disusun berdasarkan informasi yang terukur dan didukung oleh data yang telah melalui proses verifikasi dan validasi.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus mendorong peningkatan kualitas statistik sektoral melalui penguatan koordinasi antara perangkat daerah sebagai produsen data, Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Data Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata Daerah, serta Bapperida sebagai pengguna utama data dalam proses perencanaan pembangunan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang semakin akurat, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Tabel 2.114 Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

No	Bidang Data	Produsen Data	Sumber Data	Pemanfaatan dalam RKPD
1	Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SIAK, Data Administrasi Kependudukan	Proyeksi penduduk, pelayanan dasar, sasaran pembangunan
2	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dapodik, Statistik Pendidikan	IPM, Indeks Pendidikan, analisis pelayanan pendidikan
3	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan, SATUSEHAT, SPM	UHH, stunting, pelayanan kesehatan
4	Sosial	Dinas Sosial	DTKS, Data P3KE	Kemiskinan, perlindungan sosial
5	Ketenagakerjaan	Disnakertrans	Statistik Ketenagakerjaan	TPT, TPAK, kesempatan kerja
6	Pertanian	Dinas Pertanian	Statistik Pertanian, Luas Panen, Produksi	Ketahanan pangan, PDRB sektor pertanian
7	Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Statistik Perikanan	Produksi perikanan dan ekonomi sektor kelautan
8	Infrastruktur	Dinas PUPR	Data Jalan, Jembatan, Irigasi, Air Minum	Pilar Infrastruktur dan pelayanan dasar
9	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	IKLHD, data persampahan dan pencemaran	Analisis kualitas lingkungan hidup
10	Tata Kelola Pemerintahan	Bapperida, Inspektorat, BKPSDM, Diskominfo, Setda	SAKIP, SPBE/Indeks PEMDI, RB, IP ASN	Evaluasi tata kelola pemerintahan

No	Bidang Data	Produsen Data	Sumber Data	Pemanfaatan dalam RKPD
11	Statistik Makro	Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala	Barito Kuala Dalam Angka, indikator makro daerah	LPE, PDRB, inflasi, kemiskinan, Rasio Gini, IPM

Sumber: Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, dan e-Walidata SIPD.

Prinsip Pemanfaatan Data Statistik Sektoral

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027, pemanfaatan data statistik sektoral dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Akurat**, yaitu data menggambarkan kondisi riil pembangunan daerah.
2. **Mutakhir**, yaitu menggunakan data terbaru yang tersedia pada saat penyusunan RKPD.
3. **Terpadu**, yaitu data telah diselaraskan melalui mekanisme Satu Data Indonesia dan e-Walidata SIPD.
4. **Dapat Dipertanggungjawabkan**, yaitu berasal dari sumber resmi dan telah melalui proses verifikasi serta validasi.
5. **Mudah Diakses**, yaitu tersedia melalui sistem informasi pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pemanfaatan data statistik sektoral yang berkualitas, penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, memperkuat sinkronisasi antar dokumen perencanaan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah dalam mencapai target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

2.9.7 Pemanfaatan Data Geospasial dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

Selain memanfaatkan data statistik sektoral, penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 juga didukung oleh **Data Geospasial** dan **Informasi Geospasial Tematik (IGT)** sebagai instrumen untuk memperkuat analisis pembangunan berbasis kewilayahan (*spatial planning*). Pemanfaatan data geospasial bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai karakteristik wilayah, persebaran potensi daerah, lokasi permasalahan pembangunan, serta keterkaitan

antarwilayah sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Data geospasial yang digunakan dalam penyusunan RKPD meliputi peta administrasi wilayah, peta penggunaan lahan, peta pola ruang dan struktur ruang, jaringan jalan, jaringan sungai, kawasan rawan banjir, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan permukiman, kawasan strategis daerah, lokasi pelayanan dasar, serta berbagai informasi geospasial tematik lainnya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Barito Kuala. Data tersebut bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah terkait, serta informasi geospasial yang telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan data geospasial dilakukan untuk mendukung berbagai tahapan penyusunan RKPD, antara lain dalam mengidentifikasi kesenjangan pembangunan antarwilayah, menentukan lokasi prioritas pembangunan, menganalisis pemerataan pelayanan dasar, mengidentifikasi kawasan rawan bencana, serta mendukung sinkronisasi pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pembangunan tidak hanya mempertimbangkan capaian indikator statistik, tetapi juga memperhatikan aspek spasial sehingga lebih efektif dalam menjawab kebutuhan pembangunan di setiap wilayah.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, data geospasial dimanfaatkan untuk mendukung penetapan prioritas pembangunan pada lima fokus pembangunan daerah, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis unggulan daerah, peningkatan konektivitas dan infrastruktur, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui analisis spasial, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi wilayah yang memerlukan intervensi pembangunan secara lebih terarah berdasarkan karakteristik, potensi, dan tingkat permasalahan masing-masing wilayah.

Pemanfaatan data geospasial juga mendukung penguatan kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan, khususnya dalam penentuan lokasi program prioritas, pemerataan pelayanan publik, pengembangan kawasan strategis, pembangunan infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang, pengurangan risiko bencana, serta perlindungan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator

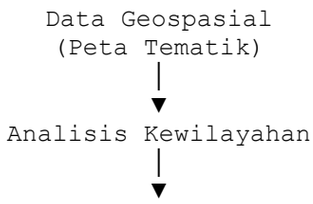
kinerja, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan ruang dan keseimbangan pembangunan antarwilayah.

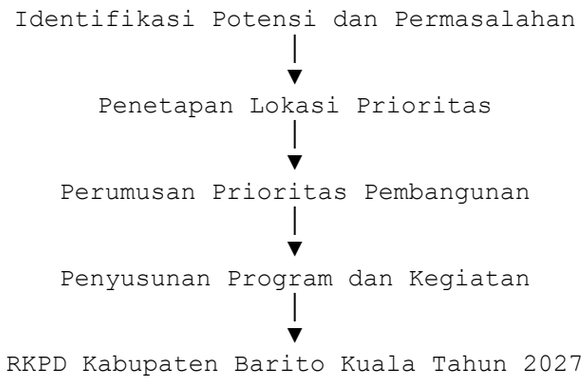
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan terus meningkatkan pemanfaatan data geospasial melalui pengembangan basis data spasial daerah, integrasi dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik, serta penguatan interoperabilitas data spasial dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Portal Satu Data Indonesia, dan sistem informasi pembangunan lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, adaptif, berbasis bukti, dan berorientasi pada pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Tabel 2.115 Pemanfaatan Data Geospasial dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

No	Data Geospasial	Pemanfaatan dalam RKPD
1	Peta Administrasi Wilayah	Analisis sebaran pembangunan dan pelayanan publik
2	Peta RTRW dan Pola Ruang	Sinkronisasi pembangunan dengan rencana tata ruang
3	Peta Jaringan Jalan dan Jembatan	Penentuan prioritas pembangunan konektivitas wilayah
4	Peta Kawasan Rawan Banjir	Mitigasi risiko bencana dan penentuan lokasi prioritas penanganan
5	Peta Penggunaan Lahan	Pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan kawasan
6	Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perencanaan ketahanan pangan dan perlindungan lahan pertanian
7	Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan	Analisis pemerataan pelayanan dasar
8	Peta Kawasan Strategis Daerah	Pengembangan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi
9	Peta Lingkungan Hidup	Pengelolaan kawasan lindung dan pengendalian pencemaran
10	Peta Tematik Lainnya	Mendukung analisis sektoral sesuai kebutuhan pembangunan

Sumber: Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Badan Informasi Geospasial (BIG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan perangkat daerah terkait.





Gambar 2.19 Pemanfaatan Data Geospasial dalam Penyusunan RKPD

2.10 Penyajian Peta Tematik Pembangunan Daerah

Dalam rangka memperkuat analisis kondisi daerah serta mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis spasial, Dokumen RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 dilengkapi dengan penyajian peta-peta tematik pembangunan. Penyajian informasi geospasial ini merupakan implementasi prinsip **Satu Data Indonesia**, penyelenggaraan **Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah**, serta mendukung pemanfaatan data spasial dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

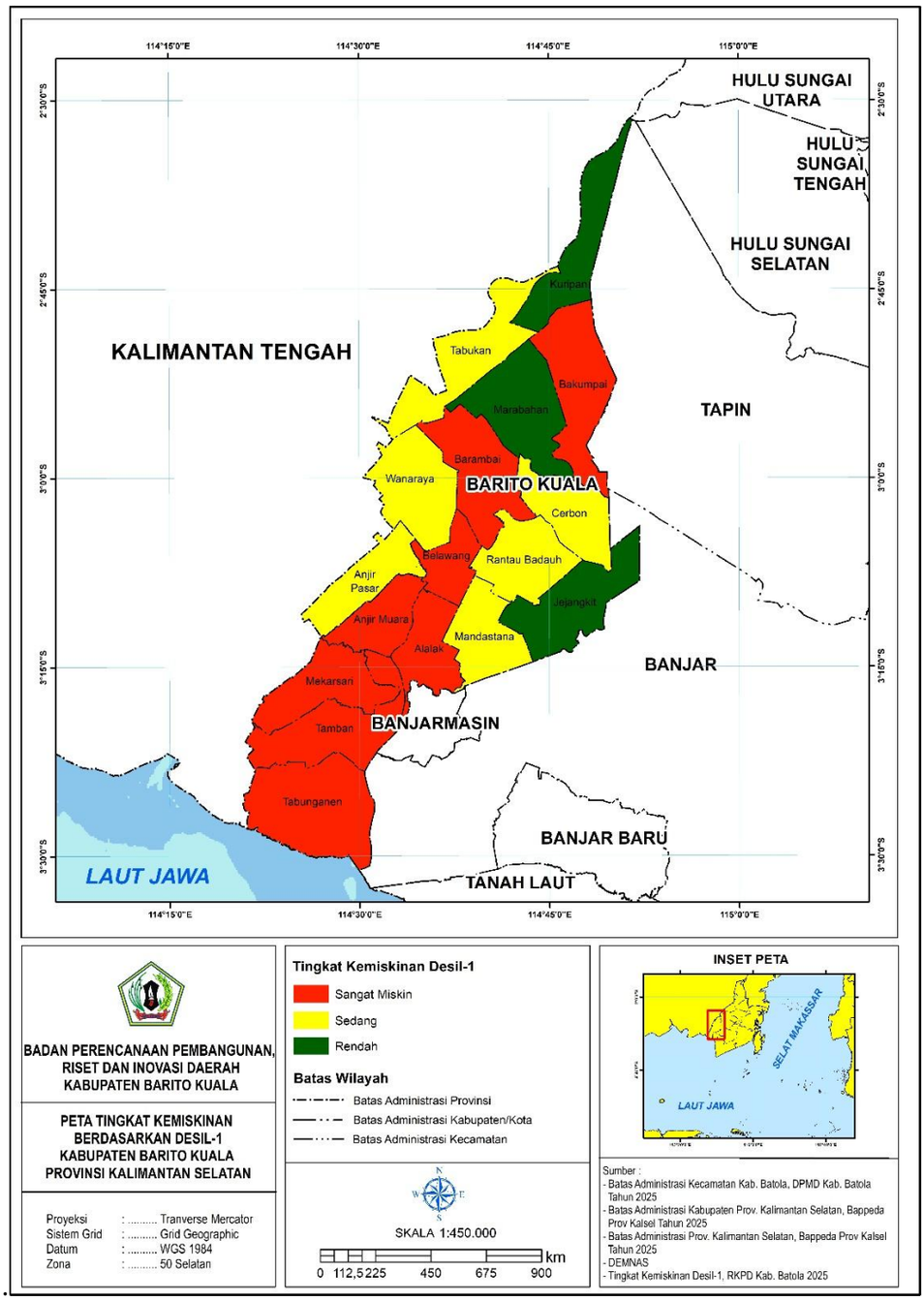
Peta tematik disusun sebagai instrumen analisis untuk mengidentifikasi karakteristik wilayah, persebaran permasalahan pembangunan, potensi sumber daya, serta lokasi prioritas intervensi pembangunan. Dengan demikian, penyusunan program dan kegiatan tidak hanya didasarkan pada data statistik sektoral, tetapi juga mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Penyajian peta tematik dalam RKPD Tahun 2027 juga mendukung peningkatan kualitas tata kelola data pembangunan, implementasi Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG), serta menjadi bagian dari upaya peningkatan **Indeks Bhumandala** dan **Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Indeks PEMDI)**.

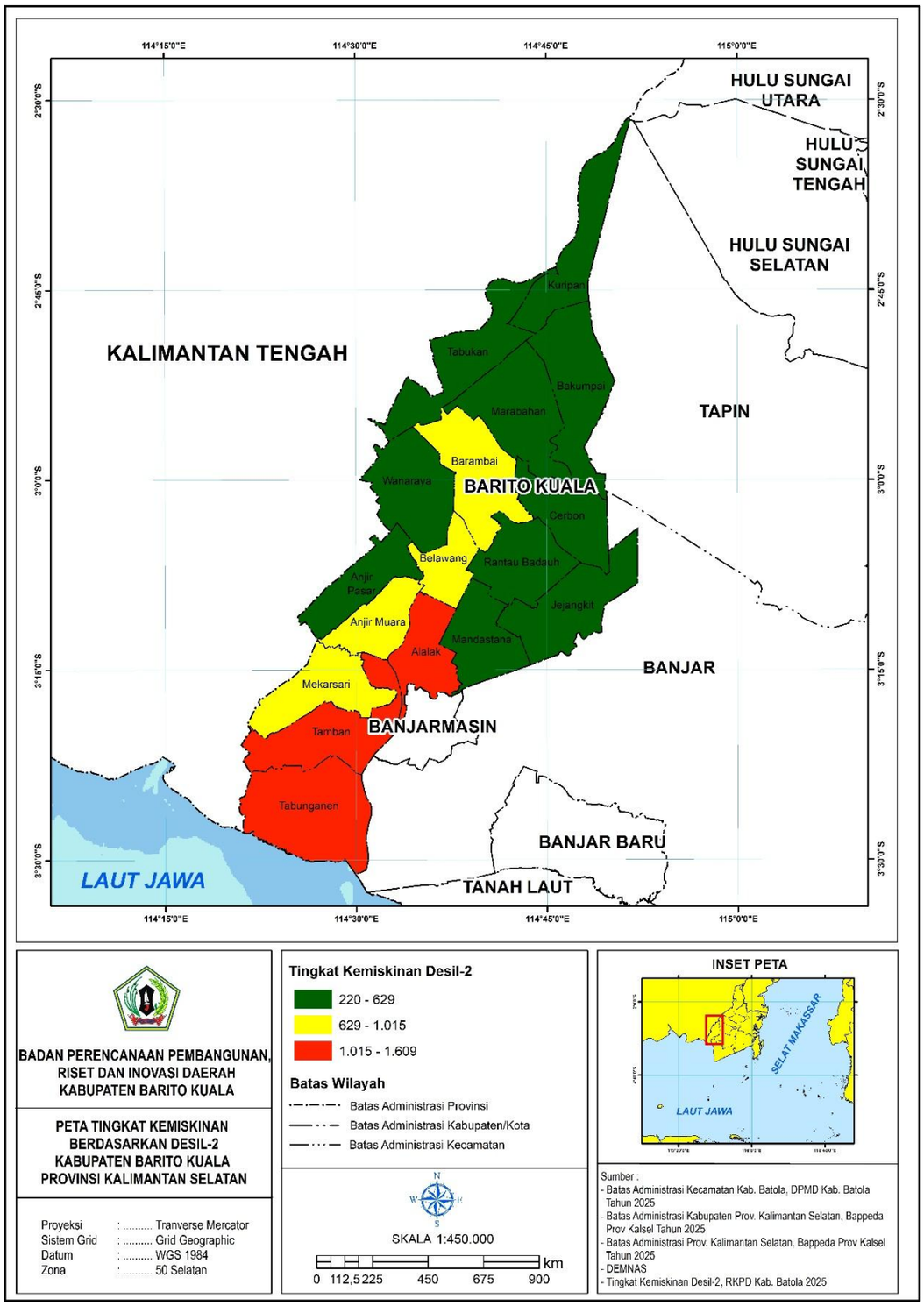
Adapun peta-peta tematik yang digunakan sebagai pendukung analisis dalam RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 meliputi sebagai berikut.

1. Peta Sebaran Tingkat Kemiskinan per Kecamatan

Peta ini menggambarkan distribusi tingkat kemiskinan pada masing-masing kecamatan sehingga dapat diketahui wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi maupun rendah. Informasi tersebut menjadi dasar dalam penentuan lokasi prioritas program pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta pengembangan ekonomi lokal yang lebih terarah



Gambar 2.20 Peta Tingkat Kemiskinan berdasarkan desil 1 Kabupaten Brito Kuala



Gambar 2.21 Peta Tingkat Kemiskinan berdasarkan desil 2 Kabupaten Brito Kuala

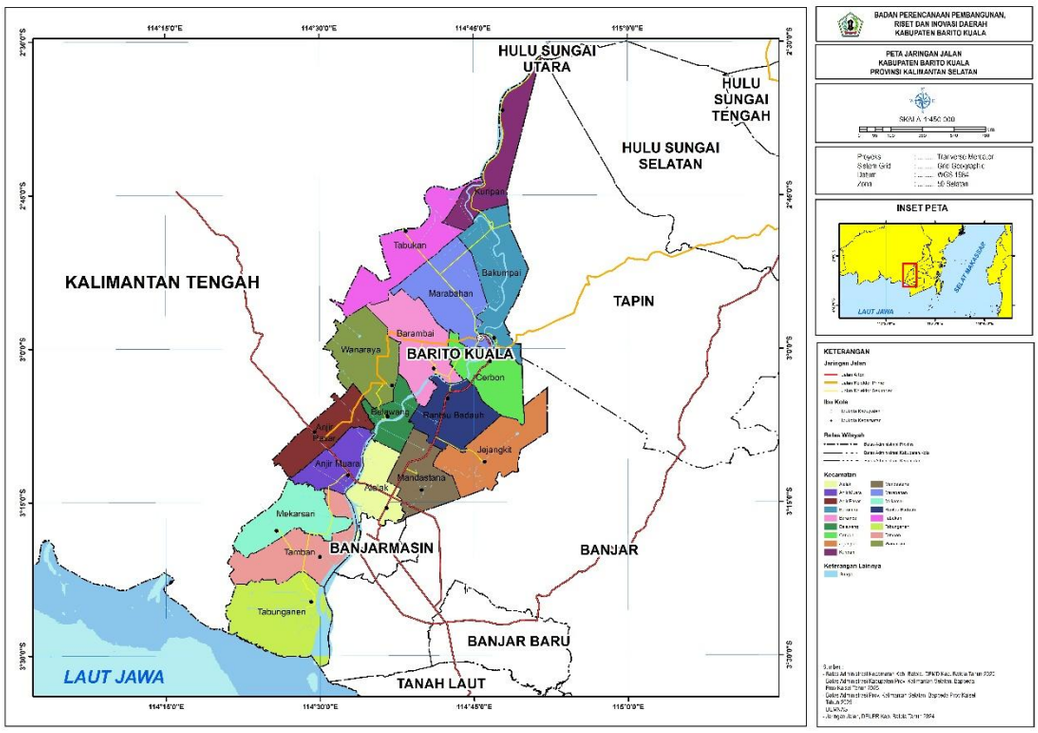
2. Peta Kawasan Rawan Banjir

Peta kawasan rawan banjir menunjukkan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana banjir berdasarkan karakteristik hidrologi, topografi, jaringan sungai, serta riwayat kejadian banjir. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program pengendalian banjir, peningkatan sistem drainase, pembangunan infrastruktur pengendali

banjir, rehabilitasi daerah aliran sungai, penataan kawasan permukiman, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

3. Peta Jaringan Jalan Kabupaten

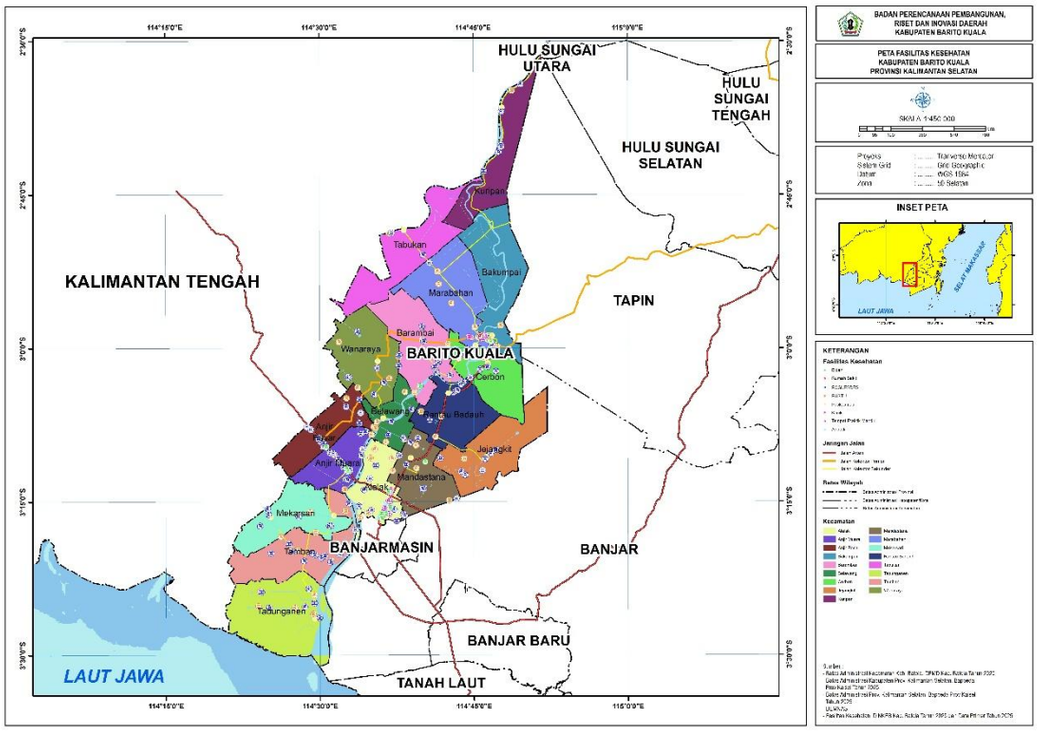
Peta jaringan jalan menggambarkan kondisi dan sebaran jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai penghubung antarwilayah, kawasan permukiman, kawasan produksi, serta pusat pelayanan masyarakat. Peta ini digunakan untuk menentukan prioritas peningkatan kemantapan jalan, rekonstruksi ruas jalan rusak berat, pengembangan jalan produksi, jalan usaha tani, serta peningkatan konektivitas menuju sentra pertanian, kawasan industri, kawasan logistik, dan pusat pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2.22 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Barito Kuala

4. Peta Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan

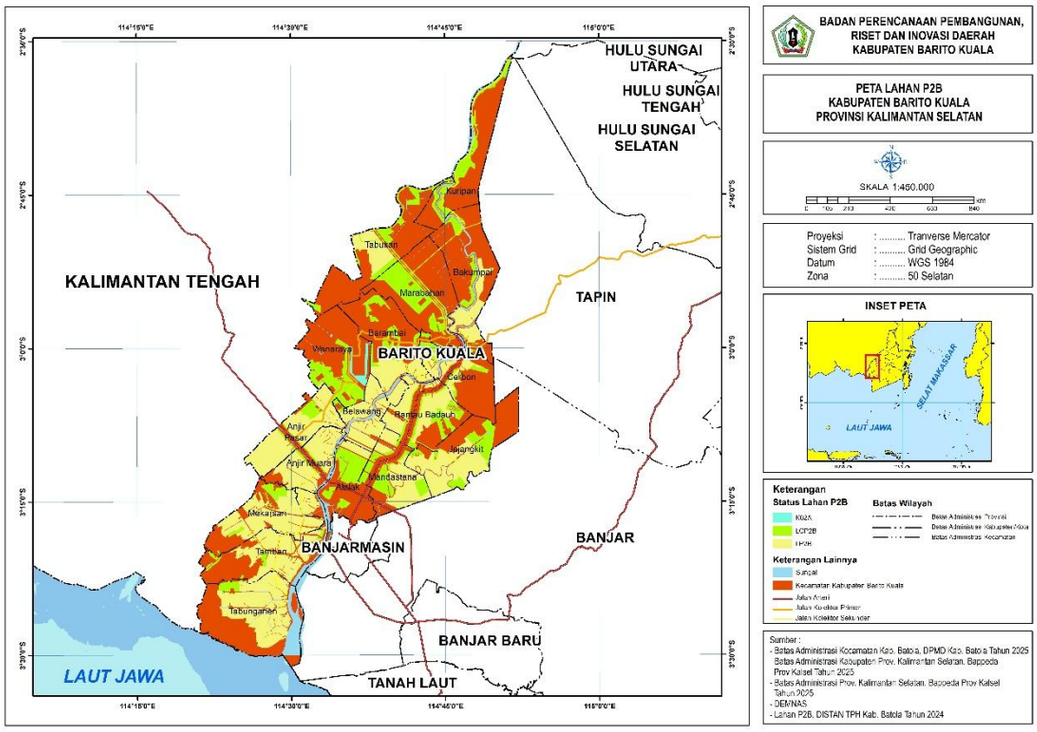
Peta ini menyajikan persebaran fasilitas pendidikan dan kesehatan pada seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala, sehingga dapat dianalisis tingkat pemerataan pelayanan dasar antarwilayah. Informasi tersebut menjadi dasar dalam penentuan lokasi pembangunan sekolah, puskesmas, rumah sakit, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta pemerataan akses pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Gambar 2.23 Peta Fasilitas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

5. Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

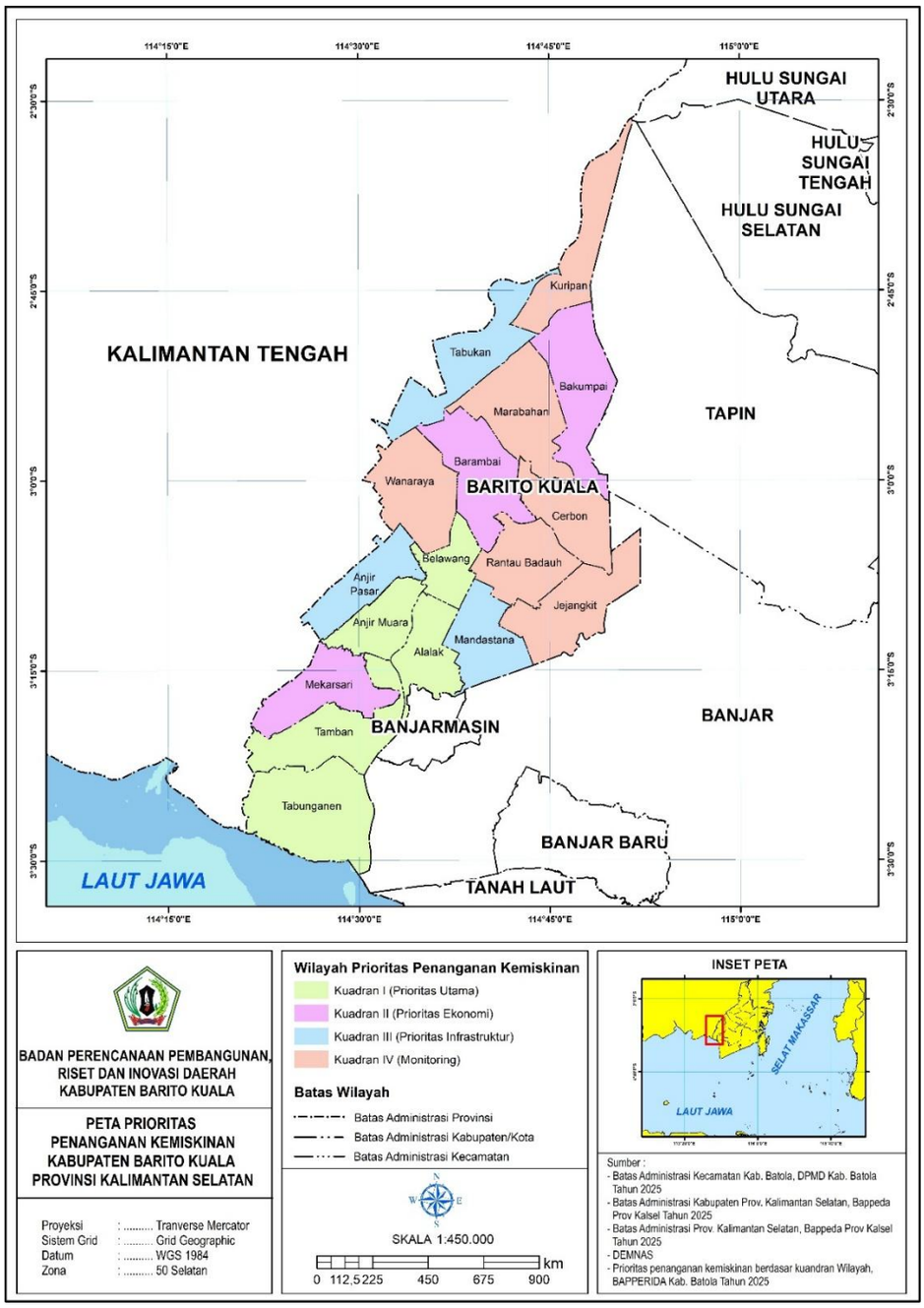
Peta LP2B menggambarkan kawasan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional. Peta ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perlindungan lahan sawah, peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan irigasi pasang surut, mekanisasi pertanian, serta pengembangan kawasan sentra produksi pangan di Kabupaten Barito Kuala.



Gambar 2.24 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Barito Kuala

6. Peta Lokasi Program Prioritas Tahun 2027

Peta lokasi program prioritas menunjukkan sebaran spasial kegiatan pembangunan yang menjadi fokus RKPD Tahun 2027. Penyajian peta ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai lokasi pelaksanaan program prioritas pada masing-masing kecamatan, sehingga mendukung sinkronisasi antar sektor, pemerataan pembangunan, efisiensi pengalokasian anggaran, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.



Gambar 2.25 Peta Prioritas Penanganan Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala

Penyajian peta-peta tematik tersebut memperkuat pendekatan **perencanaan pembangunan berbasis spasial (spatial planning approach)** yang mengintegrasikan data statistik sektoral dengan informasi geospasial. Dengan pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat menetapkan prioritas pembangunan secara lebih objektif berdasarkan karakteristik wilayah, tingkat kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta risiko yang dihadapi, sehingga pelaksanaan pembangunan Tahun 2027 diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 serta arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan.

2.7 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

2.7.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, tentunya sesuai dengan prioritas yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2027. Sebelum berbicara mengenai priorias pembangunan daerah, Kabupaten Batola sudah mengalokasikan ketentuan *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai dan pengaturan porsi keuangan di daerah sudah sesuai dengan amanat konstitusi yang berlaku. *Mandatory Spending* tersebut meliputi:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan yaitu 0,75% (0,75 persen) dari total belanja APBD untuk daerah yang APBD nya Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus juta milyar rupiah), sesuai Permendagri Pedoman Penyusunan APBD.

Permasalahan-permasalah yang muncul adalah sebagai berikut:

1) *Masih rendahnya kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Barito Kuala* dibuktikan dengan:
   - Capaian pembangunan sumber daya manusia yang tergambar pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada pada peringkat 13 dari 13, atau paling bawah di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2025, meskipun sudah menyandang status “Tinggi”;
   - Capaian indikator makro Usia Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020 berada pada peringkat 13 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan di tahun 2024, dengan selisih lebih rendah 0,1 Tahun dari Hulu Sungai Utara, menurun dari tahun 2024 sebelumnya yang masih berada di posisi 12;
   - Capaian Angka Harapan Lama Sekolah berada pada posisi 11 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan lebih unggul 0,09 dari Kabupaten Tapin, dan dibawah 0,01 (sangat tipis) denagn Kabupaten Tanah Laut yang memiliki angka HLS 12,70;
   - Rata-rata lama sekolah berada pada peringkat 12 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan di tahun 2024, berada di atas Kabupaten Kotabaru dengan unggul sekitar 0,28 dan berada tipis di bawah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan selisih hanya 0,01 (Angka RLS Kab. Hulu Sungai Utara adalag 8,00); dan
   - Memburuknya kualitas lingkungan akibat meningkatnya polusi terutama pencemaran

air yang berpengaruh terhadap kualitas kesehatan, salah satunya adalah masih banyaknya pemanfaatan jamban sebagai sarana sanitasi masyarakat yang berpengaruh pada kualitas air sungai, yang mana masih menjadi sumber air masyarakat.

2) *Masih rendahnya Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala* dibuktikan dengan:
   - Meningkatnya jumlah penduduk Kalimantan Selatan, berakibat meningkatnya permintaan dan kebutuhan pangan terutama terhadap bahan pangan pokok;
   - Belum optimalnya perdagangan produk olahan/lanjutan berbahan baku lokal; dan
   - Sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan terhadap perolehan PDRB dalam perekonomian Barito Kuala. Sementara PDRB yang bergantung pada sektor primer (usaha hulu) tanpa pengembangan sektor skunder (usaha hilir) berakibat terhadap akan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum.
3) *Masih rendahnya konektivitas dan ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala* dibuktikan dengan:
   - Tingginya *unit cost* pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan berakibat pada belum optimalnya besaran output pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dan antar desa, dan biaya pembangunan infrastruktur yang sanga tinggi di Kabupaten Barito Kuala, seperti tercermin dalam Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang cukup tinggi di Kabupaten Barito Kuala;
   - Meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan permukiman dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penduduk disamping kebutuhan orientasi bisnis properti yang semakin berkembang; dan
   - Masih terdapat beberapa kawasan permukiman kumuh akibat perkembangan permukiman yang tidak disertai pemenuhan sarana dan prasarana atau utilitas lainnya.
4) *Belum maksimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum yang termasuk dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani di Kabupaten Barito Kuala* dibuktikan dengan:
   - Masih rendahnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap lembaga yang memberikan pelayanan terutama pendidikan dan kesehatan;
   - Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian dan evaluasi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
   - Komitmen Kepala SKPD dalam mencapai target kinerja yang masih kurang dan terkadang masih terdapat ego sektoral;
   - Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala; dan
   - Rotasi pegawai yang terjadi menyebabkan penyusunan kegiatan perencanaan di lingkungan SKPD seringkali mengalami penyesuaian ulang karena kapasitas pegawai yang menangani pengelolaan perencanaan tidak selalu sama.

5) *Masih rendahnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Barito Kuala*, dibuktikan dengan:

- Memiliki resiko cukup tinggi terhadap terjadinya bencana alam berupa banjir dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla);
- Kualitas air Sungai Barito sebagai pemasok air baku saat ini berada di bawah standar baku mutu air akibat pencemaran di beberapa tempat, terutama dari limbah perkebunan sawit; dan
- Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) belum dilaksanakan secara optimal.

2.7.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan pemerintahan sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yakni urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yag tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pencapaian target-target pembangunan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tersebut, antara lain adalah:

a) Belum optimalnya Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, dikarenakan medan lokasi Kabupaten Barito Kuala yang berupa rawa sehingga memerlukan perlakuan khusus yang memerlukan biaya lebih tinggi;

b) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana;

c) Luas lahan pertanian maupun produktivitas pertanian di Kabupaten Barito Kuala memang masih tinggi, namun mulai maraknya peralihan fungsi lahan menyebabkan beberapa komoditas unggulan di Kabupaten Barito Kuala seperti Jeruk Siam dan Nanas mengalami penurunan produktivitas yang cukup tinggi;

d) Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,75 point dibandingkan dengan tahun 2024, namun secara peringkat Kabupaten Barito Kuala masih berada pada peringkat 13 dari 13 kabupaten/kota (peringkat terakhir) di Kalimantan Selatan. Capaian ini didasari dari komponen yang membentuk IPM yakni Usia Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita.

e) Akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya manusia yang masih perlu untuk ditingkatkan, termasuk belum meratanya distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan antar wilayah di Barito Kuala.

f) Masih rendahnya jumlah UMKM dan IKM di Barito Kuala sehingga belum memberikan peran yang signifikan terhadap aktivitas perekonomian di Barito Kuala.

g) Masih rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan yang diperlukan oleh pangsa kerja. Saat ini tenaga kerja yang ada mayoritas adalah tenaga kerja pada sektor pertanianBerdasarkan analisis kondisi daerah dan hasil evaluasi pembangunan, terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027, antara lain: Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, Ketimpangan pembangunan antar wilayah, Keterbatasan infrastruktur dasar, Risiko bencana banjir dan genangan air, Ketergantungan ekonomi pada sektor primer , dan Akses layanan dasar dan pelayanan public yang belum merata.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, prioritas, dan program pembangunan daerah ke depan. Dengan memahami permasalahan secara komprehensif, diharapkan pembangunan yang direncanakan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

2.7.3 Analisis SWOT Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) serta kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi pembangunan daerah. Analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi pembangunan yang tepat, realistis, dan berbasis potensi daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala dan hasil analisis kondisi daerah, Kabupaten Barito Kuala memiliki karakteristik sebagai daerah agraris dengan potensi sumber daya alam yang besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM.

A. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

1) Kekuatan (Strengths)

- Potensi lahan pertanian yang luas dan subur (lumbung pangan daerah)
- Kontribusi sektor pertanian tinggi (±36–39% PDRB)
- Ketersediaan komoditas unggulan (padi, jeruk siam, perikanan)
- Letak geografis strategis dekat dengan Kota Banjarmasin
- Dukungan kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan

Kekuatan utama Kabupaten Barito Kuala terletak pada sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Potensi lahan yang luas dan dukungan kebijakan menjadikan daerah ini memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai pusat produksi pangan dan agroindustri.

2) Kelemahan (Weaknesses)

- Kualitas SDM masih relatif rendah (IPM ±69–70)

- Ketergantungan tinggi pada sektor primer
- Infrastruktur belum merata (jalan, irigasi)
- Kontribusi PAD masih rendah (±8–12%)
- Terbatasnya industri pengolahan (hilirisasi belum optimal)

Kelemahan utama terletak pada rendahnya nilai tambah ekonomi akibat dominasi sektor primer serta keterbatasan SDM. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum optimal dan daya saing daerah masih terbatas.

3) Peluang (Opportunities)

- Dukungan program nasional (ketahanan pangan dan hilirisasi)
- Perkembangan teknologi digital dan pertanian modern
- Peningkatan permintaan produk pangan
- Peluang investasi di sektor pertanian dan UMKM
- Konektivitas wilayah dengan pusat ekonomi regional

Peluang yang dimiliki Barito Kuala cukup besar, terutama dari sisi dukungan kebijakan nasional dan perkembangan teknologi. Jika dimanfaatkan dengan baik, peluang ini dapat mendorong transformasi ekonomi daerah.

4) Ancaman (Threats)

- Risiko bencana banjir dan perubahan iklim
- Fluktuasi harga komoditas pertanian
- Persaingan antar daerah dalam investasi
- Degradasi lingkungan
- Urbanisasi dan migrasi tenaga kerja

Ancaman yang dihadapi sebagian besar berasal dari faktor eksternal, seperti perubahan iklim dan dinamika ekonomi global. Tanpa strategi yang tepat, ancaman ini dapat menghambat pembangunan daerah.

Dari analisa SWOT yang dijelaskan di atas, maka dapat dilihat Matriks SWOT seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.116 Matriks SWOT Kabupaten Barito Kuala

Faktor Internal / Eksternal	Peluang (O)	Ancaman (T)
Kekuatan (S)	**Strategi SO** - Pengembangan pertanian modern berbasis teknologi - Peningkatan investasi sektor unggulan	**Strategi ST** - Penguatan sistem irigasi dan pengendalian banjir - Diversifikasi ekonomi untuk mengurangi risiko
Kelemahan (W)	**Strategi WO** - Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan - Pembangunan infrastruktur dasar	**Strategi WT** - Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat - Penguatan tata kelola lingkungan

Matriks SWOT menunjukkan bahwa strategi pembangunan daerah harus mampu memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang (SO), sekaligus mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman secara tepat.

Strategi SO menekankan pada optimalisasi potensi pertanian melalui modernisasi dan peningkatan investasi. Strategi ST diarahkan pada mitigasi risiko, terutama terkait bencana dan ketergantungan ekonomi.

Sementara itu, strategi WO berfokus pada perbaikan kelemahan internal, seperti peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur. Strategi WT bertujuan untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai risiko eksternal.

Pendekatan SWOT membantu memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar berbasis kondisi nyata daerah.

B. Narasi Analisis Strategis

Berdasarkan hasil analisis SWOT, dirumuskan arah strategi pembangunan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul

Peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas utama mengingat IPM masih berada pada kategori sedang. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan keterampilan masyarakat. SDM yang unggul akan menjadi motor penggerak pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah.

2) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah

Penguatan sektor pertanian sebagai sektor unggulan dilakukan melalui peningkatan produktivitas, diversifikasi produk, serta pengembangan agroindustri. Ekonomi berbasis potensi lokal akan lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

3) Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah

Pembangunan infrastruktur difokuskan pada peningkatan aksesibilitas wilayah, terutama jalan dan irigasi. Infrastruktur yang baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan wilayah.

4) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi pelayanan. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pembangunan.

5) Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan

Upaya ini dilakukan melalui penguatan sistem mitigasi bencana, pengelolaan lingkungan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Ketahanan terhadap bencana menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis SWOT diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama pada sektor pertanian. Namun, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi kelemahan internal dan menghadapi berbagai tantangan eksternal.Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah yang telah diuraikan pada Bab II, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Kabupaten Barito Kuala masih menghadapi berbagai permasalahan yang bersifat mendasar dan memerlukan penanganan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Data dan informasi yang disajikan tidak hanya menggambarkan capaian pembangunan, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi eksisting dengan kondisi yang diharapkan.

Permasalahan pembangunan tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi isu strategis daerah, yang merupakan kondisi penting, mendasar, dan berdampak luas terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta memiliki tingkat urgensi tinggi untuk segera ditangani. Adapun permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Barito Kuala yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1) Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Perlu Ditingkatkan

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan, namun posisinya masih relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Kondisi ini menjadi isu strategis karena kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mendukung daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

2) Ketimpangan Akses Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

Kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh rawa dan daerah aliran sungai menyebabkan belum meratanya pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah terpencil. Akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi masih

terbatas di beberapa wilayah. Hal ini menjadi isu strategis karena berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan pemerataan pembangunan.

3) Tingginya Risiko Bencana Alam, Khususnya Banjir

Karakteristik wilayah yang berada pada dataran rendah dan dipengaruhi oleh pasang surut air menyebabkan Kabupaten Barito Kuala memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana banjir dan genangan. Peningkatan indeks risiko bencana dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya upaya mitigasi yang lebih sistematis dan terintegrasi. Isu ini menjadi strategis karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.

4) Struktur Ekonomi yang Masih Didominasi Sektor Primer

Perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan sektor primer lainnya yang memiliki nilai tambah relatif rendah dan sangat bergantung pada kondisi alam. Hal ini menunjukkan perlunya transformasi ekonomi menuju sektor yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Oleh karena itu, penguatan sektor hilirisasi dan investasi menjadi isu strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

5) Masih Adanya Kemiskinan dan Kerentanan Sosial

Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Permasalahan ini menjadi isu strategis karena berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan sosial.

Dengan dirumuskannya permasalahan dan isu strategis tersebut, maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 harus difokuskan pada upaya penanganan isu-isu tersebut secara terintegrasi. Isu strategis ini selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan yang akan dirumuskan pada Bab IV RKPD.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah merupakan landasan dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi yang mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kerangka ekonomi daerah tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi makro yang telah dicapai, tetapi juga memberikan proyeksi perkembangan ekonomi daerah serta arah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menghadapi berbagai dinamika pembangunan pada Tahun 2027.

Penyusunan kerangka ekonomi daerah dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi global, nasional, dan regional yang berpengaruh terhadap perekonomian daerah, evaluasi capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya, proyeksi indikator makro ekonomi dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027, serta berbagai kebijakan fiskal nasional yang mempengaruhi kapasitas fiskal daerah.

Kabupaten Barito Kuala memiliki struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer, terutama pertanian, kehutanan, perikanan, serta didukung oleh sektor perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, dan jasa. Kondisi tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Ketergantungan terhadap komoditas primer menyebabkan perekonomian daerah cukup sensitif terhadap perubahan harga komoditas, perubahan iklim, serta dinamika perekonomian nasional dan global. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sektor unggulan, penguatan investasi, pengembangan kawasan strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, serta perluasan kesempatan kerja yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Selanjutnya, kerangka ekonomi daerah menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, penguatan pembiayaan pembangunan, serta perluasan sumber-sumber pendanaan pembangunan di luar APBD. Dengan demikian, kerangka ekonomi dan arah kebijakan fiskal memiliki keterkaitan yang erat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, tangguh, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah

Kondisi ekonomi makro daerah merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Daerah karena menggambarkan tingkat perkembangan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan daya saing daerah. Analisis terhadap indikator ekonomi makro dilakukan untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai, mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang pembangunan, serta menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi dan fiskal daerah Tahun 2027.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Barito Kuala dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin positif. Berbagai indikator makro memperlihatkan adanya peningkatan kualitas pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan, serta membaiknya kualitas lingkungan hidup. Perkembangan tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Meskipun demikian, Kabupaten Barito Kuala masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, antara lain struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer, belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan, terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal, masih adanya kantong-kantong kemiskinan di wilayah perdesaan dan kawasan rawa, serta meningkatnya tekanan terhadap kualitas lingkungan akibat perubahan iklim dan aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Tahun 2027 diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih produktif, inklusif, hijau, dan berkelanjutan.

Perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Barito Kuala selama periode 2024–2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Barito Kuala

Indikator	2024	2025 (Realisasi)	Target 2026	Target 2027
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,61	72,05	72,70	73,30
Tingkat Kemiskinan (%)	4,36	4,31	3,88	3,75
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,74	3,23	3,30	2,80
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,76	5,27	5,70	6.50
Rasio Gini	0,291	0,269	0,242	0,230
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	64,01	71,44	66,57	66,79

Sumber: RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, BPS Kabupaten Barito Kuala, dan perangkat daerah terkait.

Berdasarkan tabel di atas, kondisi ekonomi makro Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren yang relatif positif dan memberikan optimisme terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun 2027. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya sebagian besar indikator pembangunan yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah.

3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Pada Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi mencapai **5,27 persen**, meningkat dibandingkan Tahun 2024 sebesar **4,76 persen**, dan diproyeksikan mencapai **5,40 persen pada Tahun 2027**. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian daerah mulai pulih dan semakin kuat setelah dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi nasional maupun global.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh masih kuatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor basis Kabupaten Barito Kuala, yang didukung oleh meningkatnya produksi tanaman pangan, berkembangnya aktivitas perdagangan, jasa, konstruksi, serta meningkatnya investasi pemerintah dan swasta. Struktur ekonomi Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh sektor primer sehingga kinerja ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, produktivitas lahan pertanian, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan nasional di bidang pangan.

Di sisi lain, dominasi sektor primer menunjukkan bahwa nilai tambah ekonomi daerah masih relatif terbatas. Kontribusi industri pengolahan dan sektor-sektor bernilai tambah tinggi belum berkembang secara optimal sehingga pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan pendapatan dan mempercepat penurunan kemiskinan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa transformasi ekonomi menuju sektor hilir masih menjadi tantangan pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan RKPD Tahun 2027 difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui modernisasi sektor pertanian, pengembangan kawasan pertanian terpadu, hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan investasi, penguatan UMKM, pembangunan kawasan strategis ekonomi, serta peningkatan konektivitas infrastruktur yang mendukung distribusi hasil produksi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi Kabupaten Barito Kuala.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Pada Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi mencapai **5,27 persen**, meningkat dibandingkan Tahun 2024 sebesar **4,76 persen**, dan diproyeksikan mencapai **5,40 persen pada Tahun 2027**. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas

perekonomian daerah mulai pulih dan semakin kuat setelah dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi nasional maupun global.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh masih kuatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor basis Kabupaten Barito Kuala, yang didukung oleh meningkatnya produksi tanaman pangan, berkembangnya aktivitas perdagangan, jasa, konstruksi, serta meningkatnya investasi pemerintah dan swasta. Struktur ekonomi Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh sektor primer sehingga kinerja ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, produktivitas lahan pertanian, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan nasional di bidang pangan.

Di sisi lain, dominasi sektor primer menunjukkan bahwa nilai tambah ekonomi daerah masih relatif terbatas. Kontribusi industri pengolahan dan sektor-sektor bernilai tambah tinggi belum berkembang secara optimal sehingga pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan pendapatan dan mempercepat penurunan kemiskinan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa transformasi ekonomi menuju sektor hilir masih menjadi tantangan pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan RKPD Tahun 2027 difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui modernisasi sektor pertanian, pengembangan kawasan pertanian terpadu, hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan investasi, penguatan UMKM, pembangunan kawasan strategis ekonomi, serta peningkatan konektivitas infrastruktur yang mendukung distribusi hasil produksi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi Kabupaten Barito Kuala.

perkuat ketahanan ekonomi daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala memiliki peran strategis dalam mendukung Pro-SN, khususnya pada bidang **ketahanan pangan**, **pertumbuhan ekonomi**, **pengentasan kemiskinan**, serta **peningkatan kualitas sumber daya manusia**. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian, pengembangan kawasan pangan, modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan UMKM, peningkatan investasi daerah, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas distribusi hasil produksi.

Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan juga diarahkan untuk meningkatkan investasi, memperkuat daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi diharapkan memberikan dampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kesejahteraan

masyarakat, serta peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang menjadi indikator penting dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah maupun nasional.

Keterkaitan antara proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 dengan Program Strategis Nasional ditunjukkan melalui dukungan terhadap beberapa Pro-SN yang menjadi fokus pembangunan daerah, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Keterkaitan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dengan Program Strategis Nasional (Pro-SN)

Pro-SN	Program Prioritas RKPD	Pagu Indikatif (Rp)	Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	66.351.645.856	Meningkatkan daya beli dan produktivitas masyarakat
Ketahanan Pangan	Modernisasi Pertanian dan Perikanan	86.507.458.848	Menjaga stabilitas produksi pangan dan meningkatkan nilai tambah sektor primer
Kesehatan untuk Semua	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	165.423.210.900	Meningkatkan kualitas SDM produktif
Perluasan Akses Pendidikan	Peningkatan Mutu Pendidikan	379.984.345.718	Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan Investasi, UMKM, dan Hilirisasi	79.783.102.542	Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,40%

Melalui sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dan Program Strategis Nasional, proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja ekonomi daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Pendekatan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mewujudkan pembangunan yang selaras antara kepentingan daerah dan prioritas pembangunan nasional, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2027

Berdasarkan hasil analisis perkembangan ekonomi daerah, arah kebijakan pembangunan nasional, target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, serta potensi ekonomi daerah, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diproyeksikan mencapai **6,50 persen**. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian Tahun 2025 sebesar **5,27 persen** dan diarahkan sebagai bentuk percepatan transformasi ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan, peningkatan investasi, serta penguatan produktivitas masyarakat.

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar **6,50 persen** didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu meningkatnya produktivitas sektor pertanian sebagai sektor basis daerah, pengembangan kawasan pertanian modern dan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, serta meningkatnya konsumsi masyarakat sebagai dampak dari membaiknya daya beli dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan kawasan strategis daerah dan peningkatan kualitas pelayanan investasi diharapkan mampu mendorong terbentuknya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Target pertumbuhan ekonomi tersebut juga didukung oleh pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah, antara lain modernisasi pertanian, pengembangan sentra agroindustri, penguatan UMKM, peningkatan investasi daerah, pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan pangan. Sinergi antarprogram tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, serta mendorong peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Barito Kuala secara berkelanjutan.

Selain mendukung sasaran pembangunan daerah, target pertumbuhan ekonomi sebesar **6,50 persen** juga merupakan kontribusi Kabupaten Barito Kuala terhadap pencapaian **Program Strategis Nasional (Pro-SN)**, khususnya pada program **Pertumbuhan Ekonomi**, **Ketahanan Pangan**, **Penanggulangan Kemiskinan**, **Perluasan Akses Pendidikan**, dan **Kesehatan untuk Semua**. Penguatan sektor pertanian, pengembangan investasi, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan mampu meningkatkan produktivitas daerah sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar **6,50 persen** memerlukan dukungan berbagai prasyarat pembangunan, antara lain stabilitas ekonomi makro, peningkatan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi daerah, peningkatan produktivitas sektor unggulan, kemudahan berusaha, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan RKPD Tahun 2027 akan difokuskan pada program-program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara realistis dan berkelanjutan.

Tabel 3.3 Skenario Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2027

Skenario	Pertumbuhan Ekonomi	Asumsi
Konservatif	5,80%	Kondisi ekonomi nasional melambat, investasi tumbuh terbatas
Moderat	6,20%	Investasi dan produktivitas meningkat sesuai

		target RKPD
Optimistis (Target RKPD saran Provinsi)	**6,50%**	Seluruh program prioritas berjalan optimal, investasi meningkat signifikan, infrastruktur strategis selesai tepat waktu, dan sektor pertanian memberikan kontribusi tinggi

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah karena mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan nilai tambah barang dan jasa selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya ditunjukkan oleh meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga oleh kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.

a) Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala

Perekonomian Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren yang semakin membaik dalam beberapa tahun terakhir. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari **4,76 persen pada Tahun 2024 menjadi 5,27 persen pada Tahun 2025**, yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah telah pulih dan berkembang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Untuk Tahun 2026 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar **5,70 persen**, sedangkan pada Tahun 2027 ditargetkan meningkat menjadi **6,50 persen** sebagai bagian dari percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Peningkatan tersebut mencerminkan semakin membaiknya kinerja sektor-sektor ekonomi utama Kabupaten Barito Kuala, terutama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor basis daerah, yang didukung oleh peningkatan aktivitas perdagangan, konstruksi, jasa, serta mulai meningkatnya realisasi investasi. Posisi Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan wilayah penyangga Kawasan Banjarbakula memberikan peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan pertanian modern, agroindustri, logistik, serta peningkatan konektivitas wilayah.

Target pertumbuhan ekonomi sebesar **6,50 persen** pada Tahun 2027 merupakan target yang progresif sekaligus menjadi bentuk kontribusi Kabupaten Barito Kuala terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya Program Strategis Nasional (Pro-SN) di bidang pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, investasi, dan pengembangan wilayah.

b) **Analisis Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis.

Pertama, **meningkatnya produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan** sebagai sektor dengan kontribusi terbesar terhadap struktur PDRB daerah. Perbaikan produktivitas didukung oleh peningkatan luas tanam, pengembangan kawasan pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi, pemanfaatan mekanisasi pertanian, serta meningkatnya produksi komoditas unggulan. Sebagai daerah dengan karakteristik lahan rawa pasang surut, Kabupaten Barito Kuala memiliki keunggulan komparatif dalam mendukung ketahanan pangan nasional sehingga sektor pertanian tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Kedua, **meningkatnya konsumsi rumah tangga** sebagai komponen terbesar pembentuk PDRB menurut pengeluaran. Perbaikan daya beli masyarakat dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, bertambahnya kesempatan kerja, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta meningkatnya berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Membaiknya konsumsi masyarakat memberikan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan sektor perdagangan, transportasi, jasa, dan usaha mikro kecil.

Ketiga, **meningkatnya investasi daerah** yang ditandai dengan berkembangnya investasi pada sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pergudangan, perumahan, serta jasa. Perbaikan iklim investasi didukung oleh penyederhanaan perizinan melalui sistem berbasis elektronik, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta pengembangan kawasan strategis daerah yang memberikan kepastian bagi dunia usaha.

Keempat, **meningkatnya belanja pemerintah daerah** yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, serta program prioritas pembangunan. Belanja pemerintah memberikan stimulus terhadap aktivitas ekonomi melalui pembangunan jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Meskipun demikian, struktur ekonomi Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh sektor primer sehingga masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, produktivitas yang belum merata, keterbatasan nilai tambah hasil produksi, serta ketergantungan terhadap transfer fiskal. Oleh karena itu, transformasi struktur ekonomi melalui hilirisasi dan diversifikasi menjadi agenda penting dalam pembangunan Tahun 2027.

c) **Dampak terhadap Pembangunan Daerah**

Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek pembangunan daerah.

Pertama, **meningkatnya kesempatan kerja**, seiring berkembangnya sektor pertanian modern, perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa. Kondisi tersebut diharapkan mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi **2,80 persen** pada Tahun 2027.

Kedua, **meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli**, yang akan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

Peningkatan pendapatan masyarakat juga diharapkan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan hingga **3,75 persen** pada Tahun 2027.

Ketiga, **meningkatnya kapasitas fiskal daerah**, terutama melalui bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta aktivitas ekonomi lainnya. Kapasitas fiskal yang semakin baik akan memperluas ruang pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan.

Keempat, **meningkatnya daya saing daerah**, melalui berkembangnya investasi, meningkatnya kualitas infrastruktur, penguatan konektivitas wilayah, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. Kondisi tersebut akan memperkuat posisi Kabupaten Barito Kuala sebagai kawasan penyangga Banjarbakula sekaligus salah satu pusat produksi pangan di Kalimantan Selatan.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diharapkan meningkatkan nilai PDRB per kapita, memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas hidup yang tercermin pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

d) **Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2027**

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar **6,50 persen**, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan beberapa arah kebijakan strategis sebagai berikut:

- **Mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah**, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, guna meningkatkan nilai tambah produk lokal serta memperluas pasar.
- **Meningkatkan investasi daerah** melalui penyederhanaan perizinan, penguatan promosi investasi, pengembangan kawasan strategis, serta penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi.
- **Mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas**, meliputi jalan, jembatan, irigasi, kawasan permukiman, dan infrastruktur logistik guna menurunkan biaya distribusi dan meningkatkan efisiensi ekonomi.
- **Mengembangkan UMKM dan kewirausahaan masyarakat** melalui peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi usaha, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pasar.
- **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia** melalui penguatan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, literasi digital, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha.
- **Memperkuat ketahanan pangan daerah** melalui modernisasi pertanian, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, peningkatan produktivitas komoditas unggulan, dan pengembangan sistem logistik pangan.

- **Mendukung pencapaian Program Strategis Nasional (Pro-SN)** melalui penguatan sektor pertanian, pengembangan investasi, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah memberikan kontribusi nyata terhadap sasaran pembangunan nasional.

Dengan arah kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diharapkan tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga menjadi lebih **inklusif, berdaya saing, bernilai tambah, dan berkelanjutan**, sehingga mampu mempercepat pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 sekaligus mendukung visi *BATOLA SATU*.

3.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha merupakan indikator utama yang menggambarkan struktur perekonomian daerah berdasarkan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan nilai tambah regional. Analisis PDRB tidak hanya menunjukkan sektor-sektor yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan gambaran mengenai tingkat ketergantungan ekonomi daerah, potensi pengembangan sektor unggulan, serta arah transformasi ekonomi yang diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

a) Struktur PDRB Kabupaten Barito Kuala

Struktur perekonomian Kabupaten Barito Kuala hingga Tahun 2025 masih didominasi oleh **lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**, yang menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi Kabupaten Barito Kuala masih berbasis pada sektor primer, sejalan dengan potensi wilayah sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan kawasan pertanian strategis di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain sektor pertanian, kontribusi PDRB juga berasal dari sektor **Perdagangan Besar dan Eceran**, **Konstruksi**, **Industri Pengolahan**, **Administrasi Pemerintahan**, serta **Transportasi dan Pergudangan** yang terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur daerah.

Dominasi sektor primer memberikan keunggulan komparatif bagi Kabupaten Barito Kuala, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Namun di sisi lain, struktur ekonomi yang masih terkonsentrasi pada sektor pertanian menyebabkan perekonomian daerah relatif rentan terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serangan hama dan penyakit tanaman, serta perubahan kondisi pasar. Oleh karena itu, transformasi struktur ekonomi menjadi salah satu agenda penting pembangunan Tahun 2027 agar pertumbuhan ekonomi lebih stabil, bernilai tambah, dan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

b) **Analisis Sektor Basis**

Berdasarkan struktur PDRB Kabupaten Barito Kuala, **sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** merupakan sektor basis yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Sektor ini didukung oleh luasnya kawasan pertanian rawa pasang surut, tingginya produksi tanaman pangan, berkembangnya usaha perikanan tangkap dan budidaya, serta keberadaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Kontribusi sektor ini tidak hanya menjadi sumber utama pendapatan masyarakat, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mendukung Program Strategis Nasional (Pro-SN) di bidang ketahanan pangan.

Selain sektor pertanian, sektor **Perdagangan Besar dan Eceran** menunjukkan perkembangan yang positif seiring meningkatnya aktivitas distribusi barang dan jasa, pertumbuhan UMKM, serta posisi strategis Kabupaten Barito Kuala sebagai wilayah penyangga Kawasan Banjarbakula. Peningkatan konektivitas jalan dan transportasi juga mendorong berkembangnya aktivitas perdagangan antarwilayah.

Sektor **Konstruksi** juga menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah yang terus tumbuh seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar, kawasan permukiman, jaringan jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pembangunan kawasan strategis daerah. Pertumbuhan sektor konstruksi memberikan efek berganda terhadap sektor lainnya melalui peningkatan permintaan tenaga kerja, material bangunan, dan jasa konstruksi.

c) **Analisis Sektor Unggulan**

Selain sektor basis, Kabupaten Barito Kuala memiliki beberapa sektor unggulan yang memiliki prospek besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Sektor **Industri Pengolahan** mempunyai peluang besar untuk berkembang melalui hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selama ini sebagian besar hasil produksi masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku, sehingga nilai tambah yang dinikmati daerah masih relatif terbatas. Pengembangan agroindustri, industri pangan, serta industri pengolahan hasil perikanan menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan memperluas kesempatan kerja.

Sektor **Transportasi dan Pergudangan** juga memiliki prospek yang semakin baik seiring berkembangnya konektivitas wilayah dan posisi Kabupaten Barito Kuala sebagai pintu distribusi menuju Kota Banjarmasin dan kawasan Banjarbakula. Peningkatan kualitas jaringan jalan, pelabuhan sungai, serta kawasan logistik akan memperkuat peran sektor ini dalam mendukung distribusi barang dan jasa.

Selain itu, sektor **Informasi dan Komunikasi** menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan sebagai dampak transformasi digital di berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi

informasi dalam pelayanan publik, pendidikan, perdagangan digital, dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi peluang baru dalam meningkatkan produktivitas daerah.

d) **Analisis Sektor yang Mengalami Perlambatan**

Di samping sektor yang berkembang, masih terdapat beberapa lapangan usaha yang pertumbuhannya relatif lebih rendah dibandingkan sektor lainnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya investasi, rendahnya nilai tambah produksi, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Sektor industri pengolahan misalnya masih menghadapi kendala berupa terbatasnya skala industri, rendahnya diversifikasi produk, dan belum berkembangnya industri hilir berbasis komoditas unggulan daerah. Demikian pula beberapa sektor jasa modern masih memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan, serta dukungan infrastruktur digital agar mampu berkembang lebih cepat.

Selain itu, ketergantungan terhadap sektor primer menyebabkan kinerja ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, perubahan iklim, serta fluktuasi harga komoditas pertanian. Oleh karena itu, diversifikasi struktur ekonomi menjadi salah satu kebutuhan strategis untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

e) **Analisis Sektor Potensial**

Kabupaten Barito Kuala memiliki sejumlah sektor potensial yang diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru pada Tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya.

Potensi terbesar terdapat pada pengembangan **agroindustri berbasis komoditas unggulan**, termasuk pengolahan hasil padi, hortikultura, perikanan, dan peternakan. Pengembangan sektor ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha.

Selain itu, pengembangan **kawasan strategis Alalak**, kawasan pergudangan, jasa logistik, perdagangan regional, serta kawasan ekonomi berbasis investasi diproyeksikan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi. Posisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin memberikan peluang besar dalam pengembangan kawasan permukiman, jasa, perdagangan, dan investasi.

Sektor **UMKM dan ekonomi kreatif** juga memiliki prospek yang semakin baik seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital, pemasaran daring, dan dukungan terhadap kewirausahaan masyarakat. Pengembangan ekonomi digital diharapkan mampu memperluas akses pasar produk lokal sekaligus meningkatkan daya saing usaha mikro dan kecil.

f) **Arah Kebijakan Tahun 2027**

Berdasarkan struktur PDRB dan dinamika perkembangan lapangan usaha, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diarahkan pada:

1. **Memperkuat sektor basis**, terutama pertanian, kehutanan, dan perikanan melalui modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan penguatan ketahanan pangan.
2. **Mendorong hilirisasi komoditas unggulan** melalui pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah.
3. **Mengembangkan sektor perdagangan, jasa, dan logistik** sebagai penopang pertumbuhan ekonomi kawasan Banjarbakula dengan memperkuat konektivitas dan distribusi barang.
4. **Meningkatkan investasi pada sektor-sektor produktif**, khususnya industri pengolahan, pergudangan, kawasan strategis, dan UMKM, guna mempercepat transformasi struktur ekonomi.
5. **Melakukan diversifikasi struktur ekonomi** agar ketergantungan terhadap sektor primer dapat dikurangi secara bertahap melalui pengembangan sektor industri, jasa, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif.
6. **Meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi dan sumber daya manusia** sebagai prasyarat peningkatan produktivitas, daya saing daerah, dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar **6,50 persen** pada Tahun 2027.

Dengan strategi tersebut, struktur PDRB Kabupaten Barito Kuala diharapkan berkembang menuju struktur ekonomi yang lebih seimbang, memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, serta mampu mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 dan Program Strategis Nasional secara berkelanjutan.

2. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan besaran nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh lapangan usaha di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Indikator ini menunjukkan kapasitas ekonomi daerah secara nominal dan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai perkembangan aktivitas ekonomi, struktur perekonomian, serta kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB.

Selama periode Tahun 2023–2025, nilai PDRB ADHB Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada Tahun 2025 nilai PDRB ADHB mencapai **Rp12.199,11 miliar**, meningkat sebesar **Rp849,50 miliar** dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar

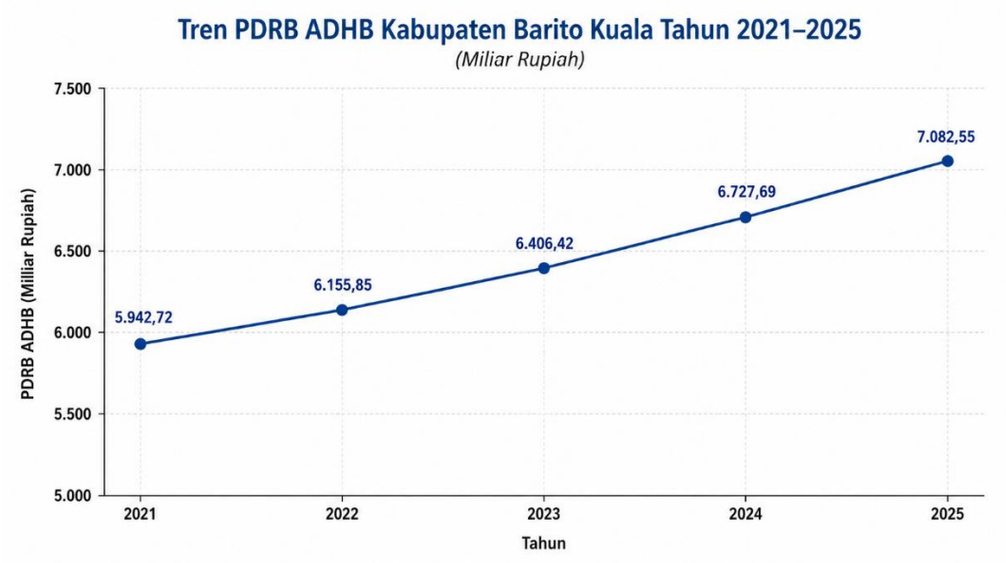
Rp11.349,61 miliar. Peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya aktivitas produksi barang dan jasa di berbagai sektor ekonomi serta meningkatnya nilai transaksi ekonomi di Kabupaten Barito Kuala. Selain dipengaruhi oleh peningkatan volume produksi, kenaikan nilai PDRB ADHB juga dipengaruhi oleh perubahan harga barang dan jasa selama periode berjalan.

Tabel 3.4 PDRB Kabupaten Barito Kuala Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2023–2025

Lapangan Usaha/*Industry*		2021	2022	2023	2024**	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	1.613,96	1.629,04	1.666,44	1.745,84	1.888,13
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	5,51	5,73	5,93	5,98	6,19
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	926,63	942,28	949,97	987,37	1.015,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	6,13	6,49	6,88	7,20	7,60
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	17,91	18,86	19,83	20,62	21,60
F	Konstruksi/*Construction*	835,90	893,47	954,95	1.011,21	1.051,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	708,72	757,74	808,17	843,37	885,61
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	200,11	208,83	217,42	231,11	243,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	145,20	157,50	167,57	181,70	194,50
J	Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*	156,73	167,27	177,86	188,17	198,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	105,39	104,47	111,96	117,70	121,86
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	244,31	258,46	277,99	294,25	309,45
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	8,94	9,59	10,16	10,74	11,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	444,03	445,46	457,17	476,26	491,81
P	Jasa Pendidikan/*Education*	379,87	399,14	414,30	437,93	456,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	94,26	99,41	105,20	110,21	115,75
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	49,11	52,11	54,61	58,04	62,32
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**5.942,72**	**6.155,85**	**6.406,42**	**6.727,69**	**7.082,55**

Sumber: BPS Barito Kuala Dalam Angka 2026

https://baritokualakab.bps.go.id



Gambar 3.1 PDRB ADHB Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021–2025

Berdasarkan struktur PDRB Kabupaten Barito Kuala, **lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah, yaitu sekitar **35–40 persen** dari total PDRB. Dominasi sektor ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala masih memiliki karakteristik sebagai daerah agraris dengan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada produksi tanaman pangan, hortikultura, perikanan budidaya maupun tangkap, serta peternakan rakyat. Sebagai salah satu lumbung pangan Provinsi Kalimantan Selatan, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Kontributor terbesar kedua adalah **sektor Perdagangan Besar dan Eceran**, dengan kontribusi sekitar **15–18 persen**. Perkembangan sektor perdagangan dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas barang dan jasa, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta posisi Kabupaten Barito Kuala sebagai wilayah penyangga Kawasan Banjarbakula yang memiliki hubungan ekonomi erat dengan Kota Banjarmasin. Peningkatan aktivitas perdagangan menunjukkan semakin kuatnya fungsi Kabupaten Barito Kuala sebagai pusat distribusi hasil pertanian, perikanan, dan komoditas lokal ke pasar regional.

Kontributor terbesar berikutnya adalah **Industri Pengolahan** dengan kontribusi sekitar **10–12 persen**, diikuti oleh **sektor Konstruksi** sekitar **8–10 persen**. Meskipun kontribusinya belum sebesar sektor pertanian, kedua sektor ini menunjukkan perkembangan yang semakin baik seiring meningkatnya investasi, pembangunan infrastruktur, serta tumbuhnya kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Perkembangan tersebut menjadi indikasi awal terjadinya transformasi struktur ekonomi menuju kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, struktur ekonomi Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh sektor primer. Kondisi ini menyebabkan perekonomian daerah

relatif rentan terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas pertanian, produktivitas lahan, serta dinamika pasar hasil pertanian. Selain itu, sebagian besar komoditas unggulan masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku sehingga nilai tambah yang dinikmati masyarakat dan daerah masih relatif terbatas.

Di sisi lain, peningkatan kontribusi sektor perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, transportasi, dan jasa menunjukkan adanya peluang diversifikasi ekonomi yang perlu terus didorong. Pengembangan sektor-sektor tersebut akan memperkuat struktur ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi ketergantungan terhadap sektor primer.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diarahkan pada **transformasi struktur ekonomi** melalui penguatan sektor basis dan pengembangan sektor bernilai tambah. Strategi yang ditempuh meliputi pengembangan **hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan**, penguatan **agroindustri**, peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan, pengembangan kawasan pergudangan dan logistik, peningkatan daya saing UMKM, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor sekunder dan tersier tanpa mengurangi peran strategis sektor pertanian sebagai fondasi perekonomian Kabupaten Barito Kuala, sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar **6,50 persen** pada Tahun 2027 serta memperkuat kontribusi daerah terhadap **Program Strategis Nasional (Pro-SN)** di bidang ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan investasi.

3. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan indikator yang menggambarkan nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh lapangan usaha dengan menggunakan harga pada tahun dasar yang sama. Berbeda dengan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), PDRB ADHK tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga (inflasi), sehingga lebih tepat digunakan untuk mengukur **pertumbuhan ekonomi riil**, produktivitas sektor ekonomi, serta perkembangan kapasitas produksi daerah dari waktu ke waktu.

Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode Tahun 2021–2025. Nilai PDRB ADHK meningkat dari **Rp5.942,72 miliar pada Tahun 2021** menjadi **Rp6.155,85 miliar pada Tahun 2022**, **Rp6.406,42 miliar pada Tahun 2023**, **Rp6.727,69 miliar pada Tahun 2024**, dan mencapai **Rp7.082,55 miliar pada Tahun 2025**. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi riil Kabupaten Barito Kuala terus berkembang, ditandai dengan meningkatnya volume produksi barang dan jasa di berbagai lapangan usaha.

Tabel 3.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021–2025 *(Miliar Rupiah)*

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.476,18	2.613,93	2.755,50	2.959,65	**3.251,31**
B	Pertambangan dan Penggalian	8,13	8,68	9,18	9,43	**10,12**
C	Industri Pengolahan	1.439,62	1.505,58	1.535,28	1.621,58	**1.715,27**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,56	11,28	12,09	12,82	**13,68**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,72	28,56	30,38	31,66	**34,01**
F	Konstruksi	1.274,21	1.414,82	1.565,54	1.697,16	**1.793,74**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.141,87	1.301,65	1.433,78	1.538,40	**1.679,46**
H	Transportasi dan Pergudangan	304,20	334,73	370,08	406,86	**435,63**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	216,45	238,86	262,59	291,66	**321,59**
J	Informasi dan Komunikasi	203,86	222,49	239,88	256,99	**273,61**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	173,36	178,18	194,92	207,77	**221,22**
L	Real Estat	347,84	378,02	415,54	448,28	**480,52**
M,N	Jasa Perusahaan	14,67	16,39	18,01	19,65	**21,69**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	729,16	745,79	795,62	852,74	**888,22**
P	Jasa Pendidikan	581,49	622,05	661,72	706,41	**748,91**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	147,94	159,73	172,43	184,40	**196,95**
R,S,T,U	Jasa Lainnya	78,68	87,13	95,34	104,14	**113,18**
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**9.174,92**	**9.867,87**	**10.567,88**	**11.349,61**	**12.199,11**

Keterangan:

- *) Angka sementara
- **) Angka sangat sementara

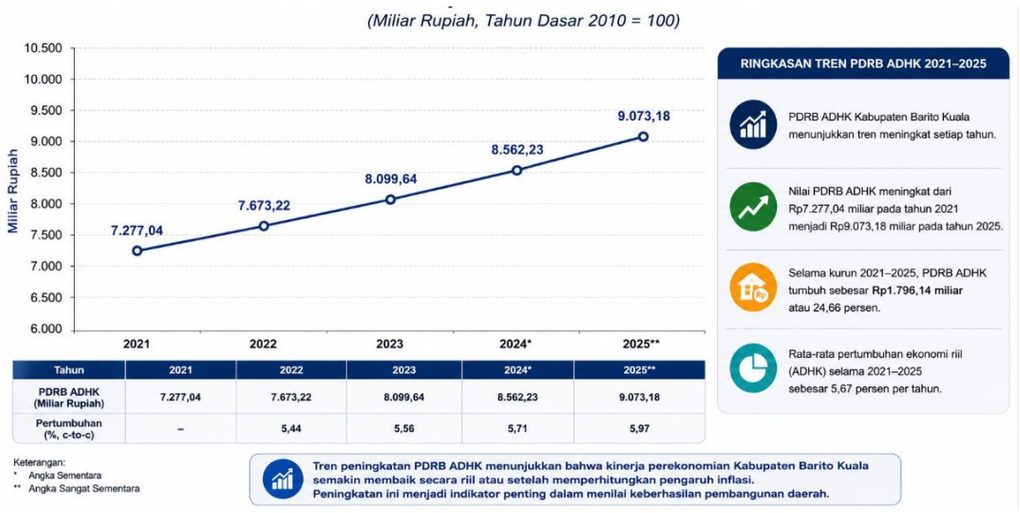
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2026*.

Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan peningkatan nilai tambah selama periode 2021–2025. Nilai PDRB meningkat dari **Rp9,17 triliun** pada Tahun 2021 menjadi **Rp12,20 triliun** pada Tahun 2025 atau bertambah sekitar **Rp3,02 triliun** (32,96 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah terus berkembang seiring meningkatnya produksi barang dan jasa, investasi, konsumsi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur.

Pada Tahun 2025, **sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai tambah mencapai **Rp3,25 triliun**, diikuti oleh **sektor Konstruksi** sebesar **Rp1,79 triliun**, **Industri Pengolahan** sebesar **Rp1,72 triliun**, dan **Perdagangan Besar dan Eceran** sebesar **Rp1,68 triliun**. Keempat sektor tersebut menyumbang lebih dari dua pertiga total PDRB Kabupaten Barito Kuala dan menjadi motor utama perekonomian daerah.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun struktur ekonomi Kabupaten Barito Kuala masih didominasi sektor pertanian sebagai sektor basis, sektor-sektor nonpertanian seperti konstruksi, perdagangan, transportasi, dan jasa juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini mengindikasikan adanya proses transformasi ekonomi secara bertahap menuju struktur ekonomi yang lebih beragam dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi Tahun 2027 diarahkan pada penguatan sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan, sekaligus mendorong percepatan investasi, pengembangan industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk memperkuat daya saing serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala sebesar **6,50 persen**.



Tahun	2021	2022	2023	2024*	2025**
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	7.277,04	7.673,22	8.099,64	8.562,23	9.073,18
Pertumbuhan (%, c-to-c)	–	5,44	5,56	5,71	5,97

Gambar 3.2 Tren PDRB ADHK Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021–2025

Peningkatan nilai PDRB ADHK tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan harga, tetapi juga didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi riil. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas ekonomi

daerah mengalami penguatan secara bertahap, sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian pascapandemi, meningkatnya investasi, serta semakin pulihnya aktivitas perdagangan, jasa, dan konstruksi.

Ditinjau menurut lapangan usaha, **sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** masih menjadi penggerak utama perekonomian Kabupaten Barito Kuala. Sebagai daerah lumbung pangan Provinsi Kalimantan Selatan, sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB dan menjadi sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk. Meskipun pertumbuhannya relatif stabil, kinerja sektor ini masih dipengaruhi oleh faktor iklim, produktivitas lahan rawa, serangan organisme pengganggu tanaman, serta fluktuasi harga komoditas pertanian.

Selain sektor pertanian, beberapa sektor menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil analisis PDRB ADHK, **sektor Perdagangan Besar dan Eceran** mengalami peningkatan yang signifikan, dari **Rp689,11 miliar pada Tahun 2020 menjadi Rp845,54 miliar pada Tahun 2024**, atau tumbuh sekitar **22,70 persen** dalam empat tahun. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK juga meningkat dari **11,96 persen menjadi 12,95 persen**, menunjukkan semakin kuatnya peran perdagangan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah.

Perkembangan tersebut didukung oleh meningkatnya mobilitas barang dan jasa, berkembangnya aktivitas UMKM, serta posisi strategis Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah penyangga Kawasan Banjarbakula yang memiliki keterkaitan ekonomi yang erat dengan Kota Banjarmasin. Meningkatnya konektivitas wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan juga memberikan dampak positif terhadap kelancaran distribusi barang dan perluasan pasar produk lokal.

Sektor **Konstruksi** juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Nilai tambah sektor konstruksi meningkat dari sekitar **Rp781,44 miliar pada Tahun 2020 menjadi Rp1.031,34 miliar pada Tahun 2024**, atau tumbuh sekitar **32 persen**. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, kawasan permukiman, fasilitas pelayanan publik, serta investasi pada pembangunan kawasan strategis daerah.

Di sisi lain, sektor **Informasi dan Komunikasi** menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat, meningkat sekitar **34,50 persen** selama periode 2020–2024. Perkembangan ini dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan teknologi informasi, digitalisasi pelayanan publik, berkembangnya ekonomi digital, serta semakin luasnya pemanfaatan internet dalam aktivitas masyarakat maupun dunia usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital mulai memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sektor **Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial** serta **Real Estate** juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, masing-masing sekitar **32,40 persen** dan **29,59 persen** selama periode

2020–2024. Pertumbuhan kedua sektor tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pembangunan kawasan permukiman, serta bertambahnya aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan jasa-jasa perkotaan.

Sementara itu, beberapa sektor masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih lambat dibandingkan sektor lainnya, terutama **Industri Pengolahan**. Nilai tambah sektor industri pengolahan meningkat dari sekitar **Rp901,26 miliar pada Tahun 2020 menjadi Rp987,97 miliar pada Tahun 2024**, atau tumbuh sekitar **9,60 persen**. Laju pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan sektor perdagangan, konstruksi, maupun informasi dan komunikasi, yang menunjukkan bahwa proses hilirisasi komoditas unggulan daerah masih belum optimal.

Pertumbuhan industri pengolahan yang relatif lambat menjadi salah satu tantangan pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala. Sebagian besar komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku sehingga nilai tambah yang dinikmati masyarakat dan daerah belum maksimal. Kondisi ini mengakibatkan struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor primer dan relatif rentan terhadap fluktuasi harga komoditas maupun perubahan kondisi iklim.

Secara keseluruhan, tren PDRB ADHK menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Barito Kuala mulai mengalami transformasi. Di satu sisi, sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama perekonomian daerah, namun di sisi lain sektor perdagangan, konstruksi, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, serta real estate menunjukkan perkembangan yang semakin kuat sebagai sektor pendukung pertumbuhan ekonomi. Transformasi tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan struktur ekonomi yang lebih beragam, produktif, dan berdaya saing.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diarahkan pada percepatan transformasi ekonomi melalui penguatan sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi. Kebijakan yang ditempuh meliputi pengembangan **hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan**, peningkatan investasi pada industri pengolahan, pengembangan kawasan agroindustri, penguatan perdagangan dan logistik, percepatan transformasi digital, serta peningkatan kualitas infrastruktur ekonomi. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi riil, meningkatkan produktivitas daerah, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala sebesar **6,50 persen pada Tahun 2027**, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan **Program Strategis Nasional (Pro-SN)** di bidang ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan investasi.

4. Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha menggambarkan kinerja masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah riil

selama periode tahun berjalan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai sektor-sektor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sektor yang memerlukan perhatian dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi.

Berdasarkan perkembangan PDRB Kabupaten Barito Kuala, pertumbuhan ekonomi didorong oleh beberapa lapangan usaha yang menunjukkan kinerja relatif tinggi, antara lain **sektor Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, serta Perdagangan Besar dan Eceran**. Pertumbuhan sektor konstruksi didukung oleh meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, kawasan permukiman, dan fasilitas pelayanan publik. Sementara itu, pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran berkembang seiring meningkatnya aktivitas perdagangan regional, pertumbuhan UMKM, serta semakin kuatnya keterkaitan ekonomi Kabupaten Barito Kuala dengan kawasan Banjarbakula.

Di sisi lain, **sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan, serta Real Estate** juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik sebagai dampak meningkatnya digitalisasi pelayanan, kebutuhan layanan kesehatan, serta berkembangnya aktivitas pembangunan kawasan permukiman dan investasi properti.

Sementara itu, **sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** sebagai sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Namun demikian, perkembangan sektor ini masih dipengaruhi oleh kondisi iklim, produktivitas lahan rawa, ketersediaan sarana produksi, serta fluktuasi harga komoditas pertanian dan perikanan. Selain itu, **sektor Industri Pengolahan** masih tumbuh relatif lebih lambat dibandingkan sektor lainnya, yang menunjukkan bahwa proses hilirisasi komoditas unggulan daerah masih perlu terus diperkuat untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa **struktur ekonomi Kabupaten Barito Kuala mulai mengalami diversifikasi**, ditandai dengan meningkatnya peran sektor perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, **sektor primer, khususnya pertanian, masih menjadi penggerak utama perekonomian daerah**, sehingga penguatan sektor unggulan melalui hilirisasi, peningkatan produktivitas, pengembangan infrastruktur ekonomi, serta peningkatan investasi tetap menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala pada tahun-tahun mendatang.

5. Distribusi (Share) PDRB Menurut Lapangan Usaha

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha menggambarkan besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten Barito Kuala. Analisis distribusi PDRB penting untuk mengetahui struktur

perekonomian daerah, mengidentifikasi sektor basis yang menjadi penggerak utama pembangunan, serta melihat arah transformasi ekonomi yang terjadi dari waktu ke waktu.

Berdasarkan struktur PDRB Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025, **lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** masih menjadi kontributor terbesar terhadap pembentukan PDRB daerah. Dominasi sektor ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Barito Kuala masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, khususnya sektor pertanian dalam arti luas yang didukung oleh potensi lahan rawa, produksi tanaman pangan, perikanan budidaya, serta peternakan. Sebagai salah satu sentra produksi pangan di Provinsi Kalimantan Selatan, sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Meskipun sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Barito Kuala masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor primer. Ketergantungan tersebut menyebabkan perekonomian daerah relatif rentan terhadap perubahan iklim, bencana banjir, fluktuasi harga komoditas pertanian, serta perubahan produktivitas lahan. Oleh karena itu, transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian, pengembangan agroindustri, dan hilirisasi komoditas unggulan menjadi salah satu kebutuhan utama pembangunan ekonomi daerah.

Selain sektor pertanian, **sektor Perdagangan Besar dan Eceran** merupakan kontributor terbesar berikutnya terhadap PDRB Kabupaten Barito Kuala. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas distribusi barang dan jasa, pertumbuhan UMKM, serta meningkatnya keterkaitan ekonomi Kabupaten Barito Kuala dengan kawasan Banjarbakula. Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin memberikan keuntungan komparatif bagi daerah dalam mengembangkan perdagangan regional dan jasa distribusi.

Kontribusi **sektor Konstruksi** juga terus menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar, kawasan permukiman, fasilitas pelayanan publik, serta proyek-proyek strategis daerah. Perkembangan sektor konstruksi tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.

Di samping itu, sektor **Industri Pengolahan**, **Transportasi dan Pergudangan**, **Informasi dan Komunikasi**, serta berbagai sektor jasa lainnya mulai menunjukkan kontribusi yang semakin meningkat. Kondisi ini merupakan indikasi bahwa struktur ekonomi Kabupaten Barito Kuala secara bertahap mulai mengalami diversifikasi menuju sektor-sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Meskipun kontribusinya belum sebesar sektor pertanian, perkembangan sektor-sektor tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah pada masa mendatang.

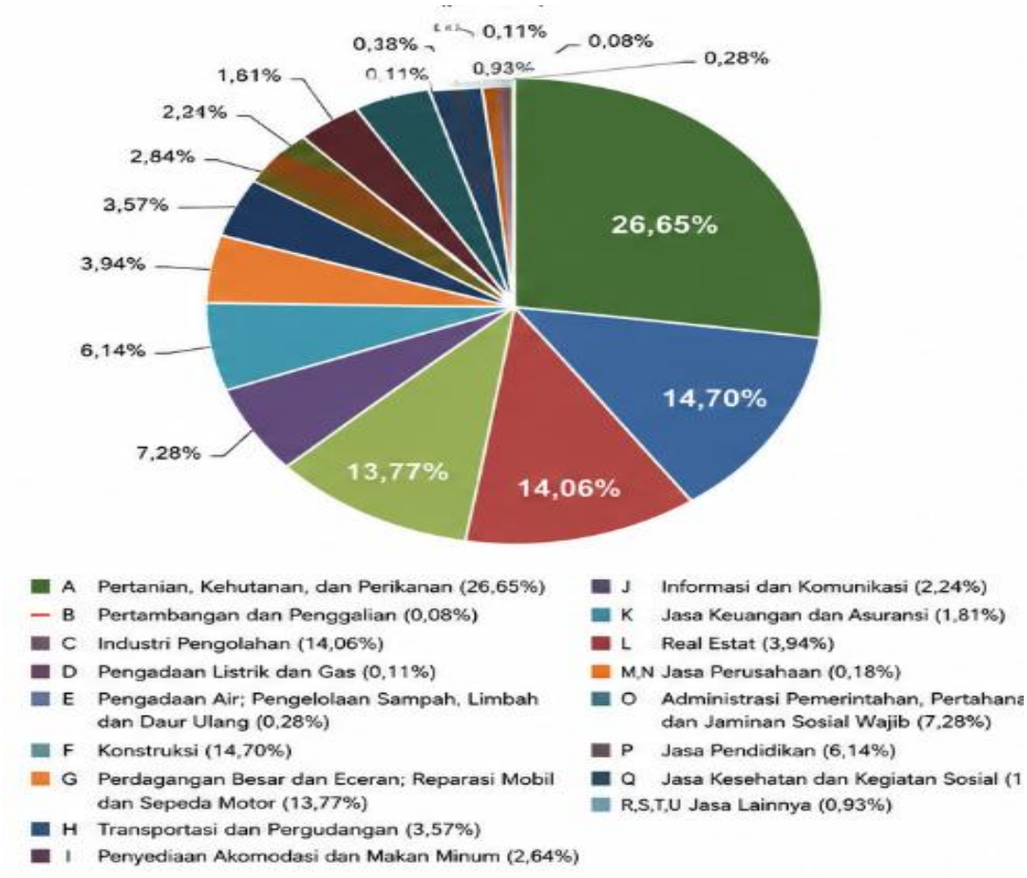
Secara keseluruhan, distribusi PDRB Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa **sektor pertanian masih menjadi sektor basis dan penggerak utama perekonomian daerah**, namun peran sektor perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, transportasi, dan jasa semakin berkembang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kondisi ini menunjukkan adanya proses transformasi struktur ekonomi yang perlu terus didorong agar perekonomian daerah menjadi lebih seimbang, tangguh, dan berdaya saing.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diarahkan pada penguatan sektor basis melalui peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, sekaligus mempercepat transformasi ekonomi melalui **hilirisasi komoditas unggulan**, pengembangan **agroindustri**, peningkatan **investasi**, penguatan **UMKM**, pengembangan **kawasan perdagangan dan logistik**, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang mampu meningkatkan kontribusi sektor-sektor bernilai tambah tinggi terhadap pembentukan PDRB daerah.

Tabel 3.6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021–2025

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,99	26,49	26,07	26,08	**26,65**
B	Pertambangan dan Penggalian	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
C	Industri Pengolahan	15,69	15,26	14,53	14,29	**14,06**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28
F	Konstruksi	13,89	14,34	14,81	14,95	**14,70**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,45	13,19	13,57	13,55	**13,77**
H	Transportasi dan Pergudangan	3,32	3,39	3,50	3,58	**3,57**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,36	2,42	2,48	2,57	**2,64**
J	Informasi dan Komunikasi	2,22	2,25	2,27	2,26	2,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,89	1,81	1,84	1,83	1,81
L	Real Estat	3,79	3,83	3,93	3,95	**3,94**
M,N	Jasa Perusahaan	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,95	7,56	7,53	7,51	**7,28**
P	Jasa Pendidikan	6,34	6,30	6,26	6,22	**6,14**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,61	1,62	1,63	1,62	1,61
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,86	0,88	0,90	0,92	**0,93**
	Total PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala 2026.



Gambar 3.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

3.1.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran

Selain ditinjau berdasarkan lapangan usaha, perkembangan perekonomian Kabupaten Barito Kuala juga dapat dianalisis dari sisi pengeluaran. Pendekatan ini menggambarkan struktur permintaan akhir (*final demand*) yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dapat diketahui komponen pengeluaran yang paling dominan dalam membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Komponen penyusun PDRB menurut pengeluaran meliputi **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, Ekspor Barang dan Jasa, serta Impor Barang dan Jasa**. Analisis terhadap komponen-komponen tersebut memberikan gambaran mengenai pola konsumsi masyarakat, tingkat investasi, aktivitas pemerintah, serta keterbukaan ekonomi daerah.

1. PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai pengeluaran akhir seluruh pelaku ekonomi berdasarkan harga yang

berlaku pada tahun berjalan. Pendekatan ini menunjukkan besarnya permintaan barang dan jasa dalam perekonomian daerah serta memberikan gambaran mengenai komponen pengeluaran yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala.

Selama periode Tahun 2021–2025, nilai PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku menunjukkan tren yang terus meningkat seiring membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya investasi, serta pulihnya kegiatan usaha pascapandemi. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya aktivitas konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, investasi, serta perdagangan barang dan jasa yang berlangsung di Kabupaten Barito Kuala.

a. Konsumsi Rumah Tangga sebagai Motor Penggerak Ekonomi

Dari sisi pengeluaran, struktur PDRB Kabupaten Barito Kuala masih **didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT)** yang menjadi komponen terbesar dalam pembentukan PDRB daerah. Dominasi konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala masih sangat dipengaruhi oleh tingkat daya beli masyarakat dan aktivitas konsumsi domestik.

Meningkatnya konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pendapatan masyarakat, membaiknya kesempatan kerja, terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendukung perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor perdagangan, transportasi, jasa, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Sebagai daerah dengan karakteristik ekonomi berbasis pertanian, konsumsi rumah tangga juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan hasil produksi pertanian, harga komoditas pangan, serta stabilitas pasokan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, menjaga daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen penting lainnya dalam struktur PDRB menurut pengeluaran adalah **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** yang mencerminkan aktivitas investasi di daerah. Peningkatan PMTB menunjukkan semakin besarnya investasi pada pembangunan gedung, jalan, jembatan, kawasan permukiman, irigasi, mesin, peralatan, serta aset produktif lainnya.

Meningkatnya investasi tersebut tidak hanya memperbesar kapasitas produksi daerah, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya saing Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah penyangga Kawasan Banjarbakula.

c. Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Barito Kuala. Belanja pemerintah berperan sebagai stimulus ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

Belanja pemerintah memiliki efek berganda (*multiplier effect*) terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena mampu mendorong permintaan barang dan jasa, meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal, serta memperluas kesempatan kerja pada berbagai sektor ekonomi.

d. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa

Kabupaten Barito Kuala juga memiliki aktivitas perdagangan antarwilayah yang cukup tinggi, khususnya dalam pemasaran komoditas pertanian, perikanan, dan hasil perkebunan ke Kota Banjarmasin dan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun ekspor luar negeri secara langsung masih relatif terbatas, sebagian produk unggulan daerah telah menjadi bagian dari rantai pasok ekspor melalui pelabuhan di Banjarmasin.

Perkembangan ekspor dan impor barang serta jasa mencerminkan semakin terbukanya perekonomian Kabupaten Barito Kuala. Oleh karena itu, peningkatan daya saing produk unggulan, efisiensi distribusi, dan pengembangan logistik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kontribusi sektor eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

e. Analisis Struktur Pengeluaran

Struktur PDRB menurut pengeluaran menunjukkan bahwa **konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala**, sedangkan investasi melalui PMTB mulai menunjukkan peran yang semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian daerah masih bertumpu pada permintaan domestik (*domestic demand*), sehingga peningkatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas harga menjadi faktor yang sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, meningkatnya investasi menunjukkan adanya optimisme dunia usaha terhadap prospek perekonomian Kabupaten Barito Kuala. Oleh karena itu, peningkatan investasi perlu terus didorong agar struktur pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada konsumsi masyarakat, tetapi juga didukung oleh peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas ekonomi daerah.

f. Arah Kebijakan Tahun 2027

Berdasarkan struktur PDRB menurut pengeluaran, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diarahkan pada:

1. menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan masyarakat;
2. meningkatkan investasi daerah melalui kemudahan berusaha, pengembangan kawasan strategis, dan optimalisasi pelayanan OSS Berbasis Risiko;
3. meningkatkan kualitas belanja pemerintah agar lebih produktif dan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah;
4. memperkuat hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbesar investasi sektor riil;
5. mengembangkan perdagangan, logistik, dan konektivitas wilayah guna memperluas pasar produk lokal; serta
6. memperkuat sinergi dengan Program Strategis Nasional (Pro-SN), khususnya pada bidang **Pertumbuhan Ekonomi, Ketahanan Pangan, Pengembangan Investasi, dan Penanggulangan Kemiskinan**, sehingga struktur permintaan daerah mampu mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala sebesar **6,50 persen** pada Tahun 2027.

Tabel 3.7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2021–2025 *(Miliar Rupiah)*

No	Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.062,60	6.878,18	7.537,67	8.270,86	**8.797,91**
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	147,10	159,97	181,24	219,75	**239,88**
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.364,55	1.403,57	1.503,88	1.689,23	**1.746,56**
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	2.747,04	3.041,34	3.371,60	3.686,48	**3.936,93**
5	Perubahan Inventori	2,70	-30,62	4,45	-1,48	**0,73**
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.149,06	-1.584,56	71,70	-1.077,07	**-2.101,12**
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**9.174,92**	**9.867,87**	**10.567,88**	**11.349,61**	**12.199,11**

Keterangan:

- *) Angka sementara
- **) Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala Menurut Pengeluaran Tahun 2021–2025*.

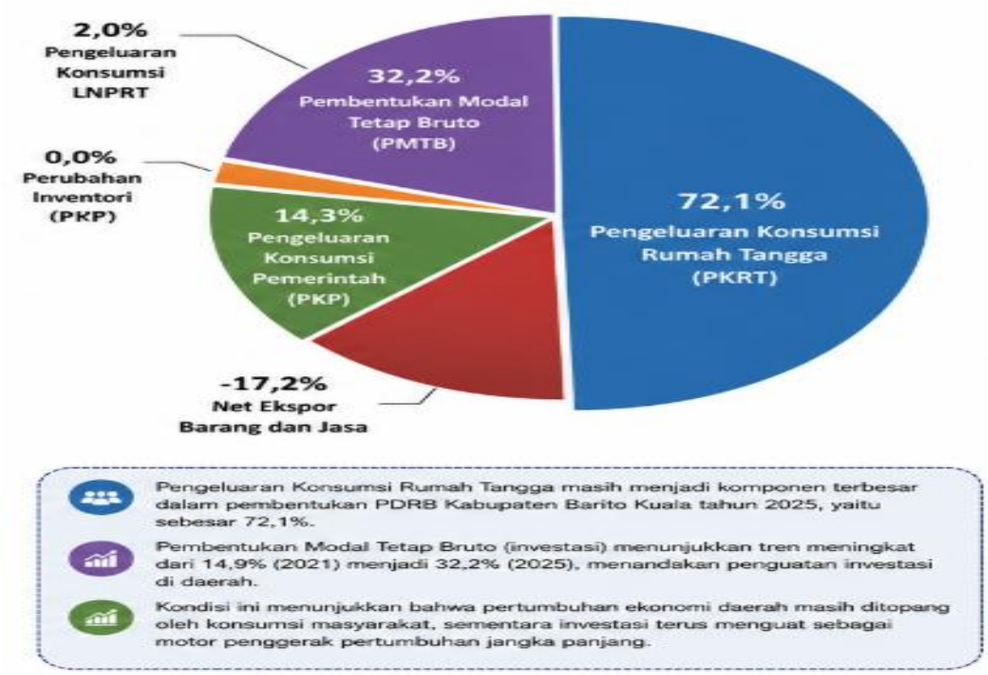
Berdasarkan Tabel 3.xx, struktur PDRB Kabupaten Barito Kuala dari sisi pengeluaran menunjukkan bahwa **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT)** merupakan komponen terbesar dalam pembentukan PDRB selama periode 2021–2025. Pada Tahun 2025, nilai konsumsi rumah tangga mencapai **Rp8.797,91 miliar** atau sekitar **72,1 persen** dari total PDRB ADHB. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi masyarakat masih menjadi motor utama penggerak perekonomian daerah.

Komponen terbesar kedua adalah **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** yang mencapai **Rp3.936,93 miliar** pada Tahun 2025. Peningkatan PMTB mencerminkan semakin meningkatnya aktivitas investasi, baik oleh pemerintah maupun swasta, terutama pada pembangunan infrastruktur, kawasan permukiman, sarana produksi, serta aset produktif lainnya yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Sementara itu, **Pengeluaran Konsumsi Pemerintah** juga menunjukkan tren meningkat dari **Rp1.364,55 miliar pada Tahun 2021** menjadi **Rp1.746,56 miliar pada Tahun 2025**. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah tetap berperan sebagai stimulus dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

Di sisi lain, komponen **Net Ekspor Barang dan Jasa** masih menunjukkan nilai negatif pada sebagian besar periode pengamatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai barang dan jasa yang masuk ke Kabupaten Barito Kuala masih lebih besar dibandingkan dengan nilai barang dan jasa yang keluar secara langsung dari wilayah tersebut. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik Kabupaten Barito Kuala yang sebagian besar aktivitas perdagangan antarwilayah dan ekspornya masih melalui pusat distribusi di Kota Banjarmasin.

Secara keseluruhan, struktur PDRB menurut pengeluaran menunjukkan bahwa **pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi**, sedangkan kontribusi ekspor masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Tahun 2027 diarahkan pada peningkatan daya beli masyarakat, penguatan investasi produktif, hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan industri pengolahan, serta perluasan akses pasar untuk meningkatkan kontribusi sektor eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 3.4 komposisi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Kuala tahun 2025

2. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran atas dasar harga konstan (ADHK) menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi riil dari sisi permintaan akhir (*final demand*) dengan menggunakan harga pada tahun dasar yang sama. Berbeda dengan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), PDRB ADHK menghilangkan pengaruh perubahan harga (inflasi), sehingga mampu menunjukkan perubahan volume produksi dan konsumsi secara riil. Analisis ini menjadi penting untuk mengetahui komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala.

Secara umum, struktur PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT)**, diikuti oleh **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** dan **Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP)**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah masih bertumpu pada permintaan domestik, sementara investasi mulai menunjukkan peranan yang semakin penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) merupakan komponen terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Barito Kuala. Dominasi konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat daya beli masyarakat, pendapatan rumah tangga, serta stabilitas harga kebutuhan pokok.

Perkembangan konsumsi rumah tangga secara riil menunjukkan kecenderungan meningkat seiring membaiknya kondisi ekonomi masyarakat, meningkatnya kesempatan kerja, stabilitas inflasi, serta meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Berbagai program pemerintah, seperti perlindungan sosial, peningkatan produksi pertanian, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan infrastruktur dasar juga memberikan kontribusi terhadap meningkatnya konsumsi masyarakat.

Sebagai daerah agraris, konsumsi rumah tangga di Kabupaten Barito Kuala masih memiliki keterkaitan yang kuat dengan kinerja sektor pertanian. Produksi pertanian yang baik akan meningkatkan pendapatan petani sehingga berdampak pada meningkatnya konsumsi masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan serta jasa.

b. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen kedua yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB menurut pengeluaran adalah **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** yang mencerminkan aktivitas investasi dalam bentuk pembangunan aset tetap, seperti gedung, jalan, jembatan, irigasi, mesin, peralatan produksi, serta infrastruktur ekonomi lainnya.

Perkembangan PMTB Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren yang terus meningkat, yang mengindikasikan semakin besarnya aktivitas investasi pemerintah maupun swasta. Peningkatan investasi tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur strategis, pengembangan kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan fasilitas pelayanan publik, serta tumbuhnya investasi pada sektor perdagangan dan jasa.

Meningkatnya PMTB memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas produksi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas ekonomi, serta memperkuat daya saing Kabupaten Barito Kuala sebagai kawasan penyangga Banjarbakula. Kondisi ini juga menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi daerah.

c. Ekspor Barang dan Jasa

Komponen ekspor dalam PDRB menurut pengeluaran mencerminkan kemampuan daerah dalam memasarkan barang dan jasa ke luar wilayah. Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi ekspor yang cukup besar, terutama berasal dari komoditas pertanian, perikanan, dan hasil perkebunan.

Namun demikian, sebagian besar perdagangan luar daerah masih dilakukan melalui pusat distribusi di Kota Banjarmasin sehingga kontribusi ekspor langsung Kabupaten Barito Kuala terhadap PDRB relatif masih terbatas. Selain itu, sebagian besar komoditas unggulan masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku sehingga nilai tambah yang diperoleh daerah belum optimal.

Ke depan, pengembangan agroindustri, peningkatan kualitas produk, sertifikasi mutu, serta perluasan akses pasar diharapkan mampu meningkatkan kontribusi ekspor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Barito Kuala.

d. Impor Barang dan Jasa

Komponen impor dalam PDRB menurut pengeluaran menggambarkan penggunaan barang dan jasa yang berasal dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan produksi maupun konsumsi masyarakat. Sebagai daerah yang berada dalam kawasan metropolitan Banjarbakula, Kabupaten Barito Kuala masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan berbagai barang industri, bahan baku, peralatan produksi, serta barang konsumsi dari luar daerah.

Tingginya kebutuhan terhadap barang modal dan bahan baku merupakan konsekuensi dari berkembangnya aktivitas pembangunan infrastruktur, perdagangan, serta industri pengolahan. Oleh karena itu, nilai impor yang relatif besar tidak selalu menunjukkan kondisi yang kurang baik, melainkan juga mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi.

Meskipun demikian, peningkatan impor perlu diimbangi dengan penguatan produksi lokal agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi secara bertahap. Pengembangan industri pengolahan, peningkatan produktivitas pertanian, serta penguatan rantai pasok lokal menjadi strategi penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.

e. Analisis Struktur Pengeluaran

Struktur PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa **konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah**, sedangkan **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** menunjukkan tren yang semakin meningkat sebagai indikator menguatnya investasi. Di sisi lain, aktivitas ekspor masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, sementara impor masih didominasi oleh kebutuhan bahan baku dan barang modal untuk mendukung kegiatan produksi dan pembangunan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Barito Kuala masih bertumpu pada permintaan domestik, namun secara bertahap mulai diperkuat oleh peningkatan investasi produktif. Struktur ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui peningkatan investasi, penguatan sektor industri pengolahan, pengembangan perdagangan regional, serta peningkatan daya saing produk unggulan daerah.

f. Arah Kebijakan Tahun 2027

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diarahkan pada:

1. menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan rumah tangga;
2. meningkatkan investasi produktif melalui pengembangan kawasan strategis, kemudahan berusaha, dan optimalisasi pelayanan OSS Berbasis Risiko;
3. mempercepat hilirisasi komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbesar kontribusi ekspor;
4. mengurangi ketergantungan terhadap barang dari luar daerah melalui pengembangan industri pengolahan dan penguatan rantai pasok lokal;
5. meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi, logistik, dan konektivitas wilayah untuk memperlancar arus barang dan jasa; serta
6. memperkuat sinergi dengan **Program Strategis Nasional (Pro-SN)** di bidang pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, investasi, dan pengembangan wilayah sehingga struktur pengeluaran daerah semakin mampu mendukung target **pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala sebesar 6,50 persen pada Tahun 2027**.

3. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran menggambarkan perkembangan komponen permintaan akhir (*final demand*) yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis ini memberikan gambaran mengenai komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan perkembangan PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Barito Kuala, pertumbuhan ekonomi selama periode Tahun 2021–2025 masih didorong oleh **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT)**, **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**, dan **Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP)**. Ketiga komponen tersebut menjadi penggerak utama peningkatan aktivitas ekonomi daerah seiring membaiknya kondisi perekonomian pascapandemi, meningkatnya investasi, serta berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa.

a. Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala. Selama periode 2021–2025, nilai konsumsi rumah tangga terus meningkat dari **Rp6.062,60 miliar** menjadi **Rp8.797,91**

miliar, atau meningkat sekitar **45,1 persen**. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin membaiknya daya beli masyarakat serta meningkatnya aktivitas konsumsi barang dan jasa.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan masyarakat, membaiknya kondisi pasar tenaga kerja, terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas perdagangan, serta pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai daerah yang sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian, peningkatan hasil produksi pertanian dan perikanan juga berkontribusi terhadap meningkatnya konsumsi masyarakat.

Dominasi konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa stabilitas daya beli masyarakat masih menjadi faktor utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala.

b. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan selama periode 2021–2025. Nilai PMTB meningkat dari **Rp2.747,04 miliar** pada Tahun 2021 menjadi **Rp3.936,93 miliar** pada Tahun 2025 atau meningkat sekitar **43,3 persen**.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya aktivitas investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Investasi diarahkan pada pembangunan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, kawasan permukiman, fasilitas pelayanan publik, sarana pertanian, serta pengembangan kawasan ekonomi strategis. Meningkatnya PMTB juga menunjukkan adanya optimisme dunia usaha terhadap prospek perekonomian Kabupaten Barito Kuala.

Pertumbuhan investasi menjadi indikator penting karena tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta memperkuat daya saing daerah dalam jangka panjang.

c. Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah juga mengalami peningkatan yang relatif stabil dari **Rp1.364,55 miliar** pada Tahun 2021 menjadi **Rp1.746,56 miliar** pada Tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penyelenggaraan pemerintahan.

Belanja pemerintah memiliki efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian karena mampu mendorong permintaan barang dan jasa lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung tumbuhnya aktivitas usaha di berbagai sektor ekonomi.

d. Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa

Perkembangan komponen **Net Ekspor Barang dan Jasa** masih menunjukkan fluktuasi selama periode pengamatan. Pada Tahun 2023 sempat mencatat nilai positif sebesar **Rp71,70 miliar**, namun kembali mengalami nilai negatif pada Tahun 2024 dan Tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan luar daerah masih didominasi oleh arus masuk barang dan jasa dibandingkan dengan arus keluar secara langsung dari Kabupaten Barito Kuala.

Meskipun demikian, kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan lemahnya daya saing ekonomi daerah. Sebagian besar komoditas unggulan Kabupaten Barito Kuala dipasarkan melalui pusat distribusi di Kota Banjarmasin sehingga nilai ekspor langsung daerah relatif kecil dalam pencatatan PDRB menurut pengeluaran. Selain itu, meningkatnya impor barang modal dan bahan baku juga menjadi indikasi bertambahnya aktivitas investasi dan pembangunan ekonomi daerah.

e. Analisis Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

Berdasarkan perkembangan seluruh komponen pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa **pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala masih didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB)**. Konsumsi rumah tangga menjadi penggerak utama permintaan domestik, sedangkan PMTB menunjukkan semakin kuatnya aktivitas investasi yang akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya.

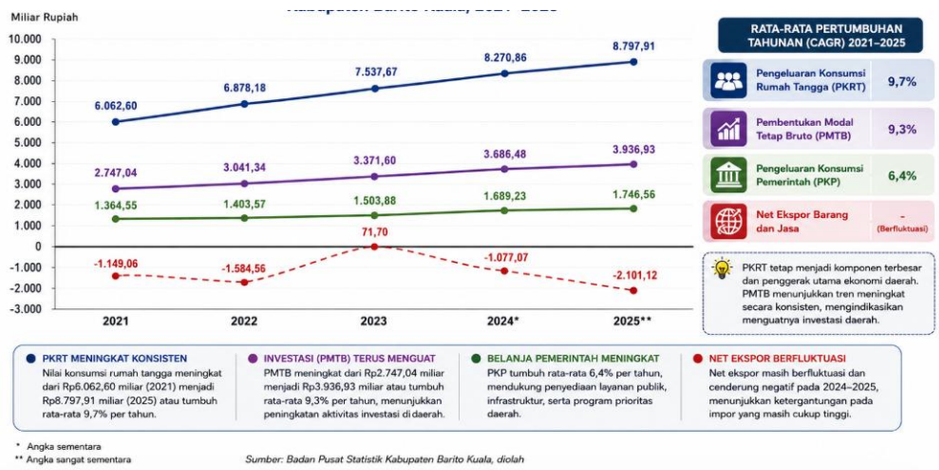
Sementara itu, kontribusi ekspor masih perlu terus diperkuat melalui peningkatan daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industri pengolahan, hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan, serta perluasan akses pasar regional maupun nasional. Dengan demikian, struktur pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya bertumpu pada konsumsi masyarakat, tetapi juga semakin didukung oleh investasi dan peningkatan ekspor.

f. Arah Kebijakan Tahun 2027

Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan daya beli masyarakat** melalui pengendalian inflasi, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta perluasan kesempatan kerja.
2. **Mendorong peningkatan investasi produktif** melalui kemudahan perizinan, pengembangan kawasan strategis, optimalisasi pelayanan OSS Berbasis Risiko, serta pembangunan infrastruktur pendukung investasi.
3. **Meningkatkan kualitas belanja pemerintah** agar lebih produktif dan memiliki efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

4. **Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan** dan pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah serta memperbesar kontribusi ekspor.
5. **Mengembangkan sistem logistik dan perdagangan daerah** guna memperlancar distribusi barang, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing produk lokal.
6. **Mendukung pencapaian Program Strategis Nasional (Pro-SN)** melalui penguatan investasi, ketahanan pangan, pengembangan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga target **pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala sebesar 6,50 persen pada Tahun 2027** dapat tercapai secara berkelanjutan



Gambar 3.5 Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran kabupaten Barito Kuala 2021-2025

4. Distribusi (Share) PDRB Menurut Pengeluaran

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran menggambarkan besarnya kontribusi masing-masing komponen permintaan akhir terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Barito Kuala. Analisis distribusi ini penting untuk mengetahui sumber utama penggerak perekonomian daerah, tingkat ketergantungan terhadap konsumsi maupun investasi, serta arah transformasi struktur ekonomi yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Berdasarkan struktur PDRB menurut pengeluaran Tahun 2025, **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT)** masih menjadi komponen terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Barito Kuala. Nilai konsumsi rumah tangga mencapai **Rp8.797,91 miliar** atau sekitar **72,1 persen** dari total PDRB atas dasar harga berlaku sebesar **Rp12.199,11 miliar**. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Barito Kuala masih sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat dan kondisi daya beli rumah tangga.

Dominasi konsumsi rumah tangga mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah masih bertumpu pada permintaan domestik (*domestic demand*). Oleh karena itu, peningkatan

pendapatan masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, pengendalian inflasi, perluasan kesempatan kerja, serta keberhasilan program perlindungan sosial menjadi faktor yang sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai daerah agraris, peningkatan pendapatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM juga memiliki pengaruh langsung terhadap meningkatnya konsumsi masyarakat.

Komponen terbesar kedua adalah **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** dengan nilai **Rp3.936,93 miliar** atau sekitar **32,3 persen** terhadap total PDRB. Meskipun proporsinya masih berada di bawah konsumsi rumah tangga, kontribusi PMTB menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2021–2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas investasi di Kabupaten Barito Kuala semakin berkembang, baik melalui pembangunan infrastruktur pemerintah maupun investasi sektor swasta pada bidang perdagangan, jasa, pertanian, kawasan permukiman, dan sektor produktif lainnya.

Peningkatan kontribusi PMTB merupakan sinyal positif karena investasi menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kapasitas produksi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat produktivitas ekonomi, serta meningkatkan daya saing daerah dalam jangka panjang. Dengan semakin meningkatnya investasi, struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala diharapkan menjadi lebih berkualitas dan tidak hanya bergantung pada konsumsi masyarakat.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB. Belanja pemerintah berfungsi sebagai instrumen fiskal yang mampu mendorong aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan. Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, belanja pemerintah juga memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap sektor perdagangan, konstruksi, dan jasa.

Sementara itu, **Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)** memiliki kontribusi yang relatif kecil namun menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas organisasi kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, dan sosial yang turut berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Di sisi lain, komponen **Net Ekspor Barang dan Jasa** masih menunjukkan nilai negatif. Kondisi ini menggambarkan bahwa nilai barang dan jasa yang masuk ke Kabupaten Barito Kuala masih lebih besar dibandingkan dengan nilai barang dan jasa yang keluar secara langsung dari daerah. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh karakteristik Kabupaten Barito Kuala sebagai wilayah penyangga Kota Banjarmasin, di mana sebagian besar aktivitas perdagangan antardaerah dan ekspor komoditas masih melalui pusat distribusi di Kota Banjarmasin. Selain itu, kebutuhan terhadap barang modal, bahan baku industri, serta barang

konsumsi dari luar daerah masih cukup tinggi untuk mendukung aktivitas pembangunan dan investasi.

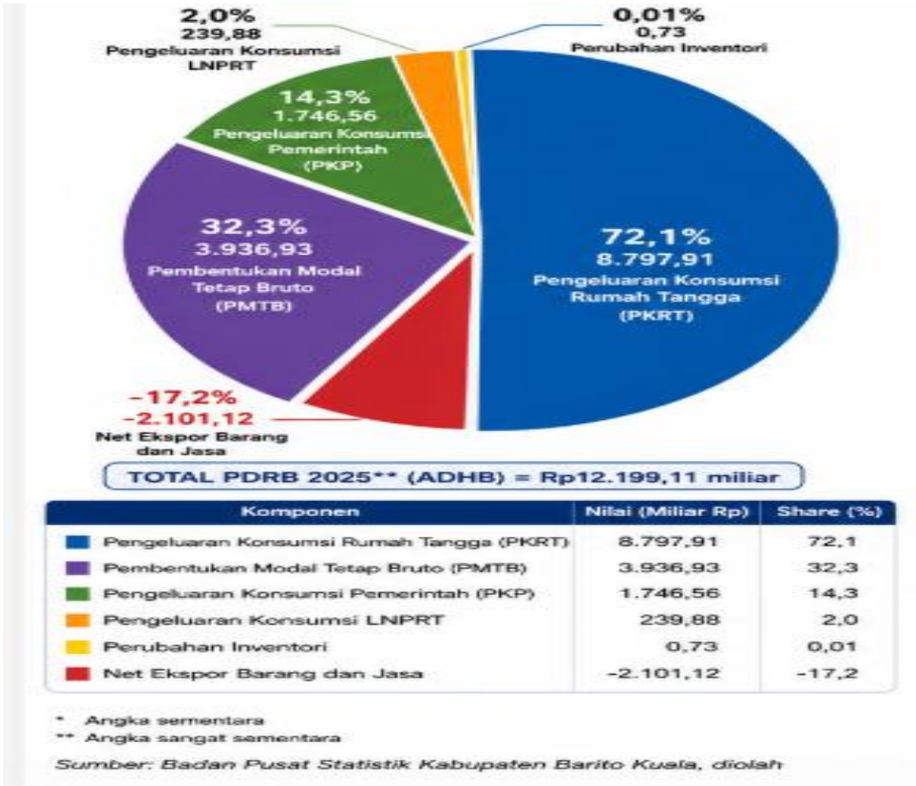
Secara keseluruhan, distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan bahwa **struktur perekonomian Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi**, sementara **kontribusi PMTB yang terus meningkat menunjukkan bahwa investasi mulai menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi daerah**. Kondisi ini merupakan sinyal positif menuju transformasi ekonomi yang lebih produktif, karena pertumbuhan tidak hanya didorong oleh konsumsi, tetapi juga oleh peningkatan investasi dan pembangunan aset produktif.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diarahkan pada upaya menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan rumah tangga, sekaligus mempercepat pertumbuhan investasi melalui pengembangan kawasan strategis, kemudahan berusaha, pembangunan infrastruktur, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan UMKM, serta peningkatan daya saing produk daerah. Dengan strategi tersebut diharapkan struktur PDRB menurut pengeluaran menjadi semakin seimbang, sehingga mampu mendukung pencapaian target **pertumbuhan ekonomi sebesar 6,50 persen pada Tahun 2027** secara berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 3.8 Distribusi (Share) PDRB Kabupaten Barito Kuala Menurut Pengeluaran Tahun 2021–2025

Komponen Pengeluaran	**2021 (%)**	**2022 (%)**	**2023 (%)**	**2024 (%)**	**2025 (%)**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	66,08	69,70	71,33	72,87	**72,12**
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,60	1,62	1,71	1,94	**1,97**
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,87	14,22	14,23	14,88	**14,32**
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	29,94	30,82	31,90	32,48	**32,27**
Perubahan Inventori	0,03	-0,31	0,04	-0,01	**0,01**
Net Ekspor Barang dan Jasa	-12,52	-16,06	0,68	-9,49	**-17,22**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, diolah.



Gambar 3.6 komposisi PDRB Kabupaten Barito Kuala menurut pengeluaran tahun 2025

3.1.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. Indikator ini menggambarkan persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan, sehingga mencerminkan kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang produktif. Penurunan tingkat pengangguran menjadi salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala karena berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan kemiskinan, dan peningkatan daya saing daerah.

a) Kondisi Tingkat Pengangguran Kabupaten Barito Kuala

Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kondisi yang semakin baik. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari **3,74 persen pada Tahun 2024 menjadi 3,23 persen pada Tahun 2025**. Selanjutnya pada Tahun 2026 diproyeksikan sebesar **3,30 persen**, dan ditargetkan kembali menurun menjadi **2,80 persen pada Tahun 2027**. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah mulai mampu menyerap tenaga kerja secara lebih optimal seiring meningkatnya investasi, pembangunan infrastruktur, serta berkembangnya sektor usaha produktif.

Meskipun demikian, tantangan ketenagakerjaan masih dihadapi, terutama terkait kualitas tenaga kerja, kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia usaha, serta terbatasnya lapangan

kerja formal di luar sektor pertanian. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan Tahun 2027.

b) **Analisis Penyebab Pengangguran**

Penurunan tingkat pengangguran dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, khususnya pada sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa. Pembangunan infrastruktur serta meningkatnya investasi juga memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama pada kegiatan konstruksi, perdagangan, dan usaha mikro.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran belum dapat ditekan secara optimal, antara lain:

- masih terbatasnya kesempatan kerja formal dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja (*mismatch*) dengan kebutuhan dunia usaha;
- rendahnya produktivitas sebagian tenaga kerja, terutama pada sektor informal;
- belum optimalnya pengembangan industri pengolahan yang mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tambah tinggi; serta
- masih tingginya kecenderungan lulusan usia muda yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memasuki dunia kerja.

Selain itu, perubahan teknologi dan digitalisasi menuntut peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja yang semakin dinamis.

c) **Kelompok Umur yang Perlu Mendapat Perhatian**

Karakteristik pengangguran di Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh **angkatan kerja usia muda (15–24 tahun)** yang baru memasuki pasar kerja. Kelompok ini umumnya merupakan lulusan SMA/SMK maupun perguruan tinggi yang belum memiliki pengalaman kerja sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.

Selain kelompok usia muda, perhatian juga diberikan kepada tenaga kerja produktif yang terdampak perubahan struktur ekonomi, terutama pekerja pada sektor informal yang memiliki tingkat produktivitas relatif rendah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi keahlian, dan pengembangan kewirausahaan menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah.

d) **Sektor Penyerap Tenaga Kerja**

Sebagai daerah agraris, **sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Barito Kuala. Sektor ini menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

Selain sektor pertanian, peningkatan penyerapan tenaga kerja juga didukung oleh:

- sektor **Perdagangan Besar dan Eceran** melalui berkembangnya UMKM dan aktivitas perdagangan;
- sektor **Konstruksi** seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah;
- sektor **Transportasi dan Pergudangan** yang berkembang karena posisi Kabupaten Barito Kuala sebagai wilayah penyangga Kawasan Banjarbakula;
- sektor **Jasa Pendidikan dan Kesehatan** yang terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan publik; serta
- sektor **Industri Pengolahan** yang mulai berkembang melalui pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja formal sekaligus meningkatkan kualitas pekerjaan masyarakat.

e) **Arah Kebijakan Tahun 2027**

Dalam rangka menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi **2,80 persen** pada Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi, dan peningkatan keterampilan digital;
2. memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan investasi, UMKM, dan industri pengolahan berbasis potensi unggulan daerah;
3. memperkuat kewirausahaan masyarakat, khususnya bagi generasi muda dan pelaku usaha mikro;
4. meningkatkan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja (*link and match*);
5. mengembangkan kawasan ekonomi dan sentra produksi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru; serta
6. meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja melalui transformasi digital pelayanan ketenagakerjaan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memperkuat produktivitas ekonomi daerah, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027.

3.1.1.5 Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan tingkat harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Stabilitas inflasi sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus kebijakan ekonomi daerah yang dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan.

a) Kondisi Inflasi Kabupaten Barito Kuala

Perkembangan inflasi Kabupaten Barito Kuala dalam beberapa tahun terakhir relatif terkendali dan sejalan dengan sasaran inflasi nasional. Pada Tahun 2025 inflasi tercatat sekitar **1,95 persen**, sedangkan target inflasi Tahun 2026 dan Tahun 2027 ditetapkan sebesar **1,98 persen** sesuai target RPJMD Kabupaten Barito Kuala. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga di daerah relatif terjaga meskipun masih dipengaruhi oleh dinamika pasokan pangan, distribusi barang, serta kondisi cuaca.

Sebagai daerah yang berada dalam kawasan aglomerasi Banjarbakula, perkembangan inflasi Kabupaten Barito Kuala juga dipengaruhi oleh pergerakan harga di Kota Banjarmasin sebagai daerah acuan inflasi Provinsi Kalimantan Selatan.

b) **Komoditas Penyumbang Inflasi**

Pergerakan inflasi di Kabupaten Barito Kuala umumnya dipengaruhi oleh kelompok **makanan, minuman, dan tembakau**, terutama komoditas pangan strategis yang berfluktuasi akibat perubahan musim, distribusi, maupun permintaan masyarakat.

Beberapa komoditas yang secara umum menjadi penyumbang inflasi antara lain:

- beras;
- cabai merah dan cabai rawit;
- bawang merah;
- daging ayam ras;
- telur ayam ras;
- minyak goreng; serta
- gula konsumsi.

Selain komoditas pangan, inflasi juga dipengaruhi oleh perubahan tarif transportasi, harga energi, dan beberapa komponen jasa, terutama pada periode hari besar keagamaan nasional.

c) **Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)**

Pengendalian inflasi di Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan melalui **Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)** yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten bersama Bank Indonesia, perangkat daerah, instansi vertikal, serta pelaku usaha.

Strategi pengendalian inflasi dilakukan melalui pendekatan **4K**, yaitu:

- **Keterjangkauan Harga**, melalui operasi pasar dan stabilisasi harga;
- **Ketersediaan Pasokan**, melalui peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan;
- **Kelancaran Distribusi**, melalui perbaikan jaringan distribusi dan pengendalian hambatan logistik; serta
- **Komunikasi Efektif**, melalui penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan harga dan langkah pengendalian inflasi.

Melalui koordinasi TPID, pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas harga sekaligus mengantisipasi potensi gejolak inflasi akibat faktor musiman maupun gangguan pasokan.

d) **Keterkaitan Inflasi dengan Ketahanan Pangan**

Inflasi daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi ketahanan pangan. Sebagian besar komoditas penyumbang inflasi merupakan bahan pangan yang sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi, distribusi, dan kondisi cuaca. Oleh karena itu, peningkatan produksi pertanian, penguatan cadangan pangan, modernisasi pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi, serta penguatan sistem logistik pangan menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi.

Sebagai salah satu daerah sentra produksi padi di Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan pangan daerah maupun regional. Penguatan sektor pertanian tidak hanya mendukung pencapaian Program Strategis Nasional bidang ketahanan pangan, tetapi juga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi, peningkatan pendapatan petani, dan stabilitas daya beli masyarakat.

e) **Arah Kebijakan Tahun 2027**

Untuk menjaga inflasi tetap berada pada kisaran target, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis;
- memperkuat peran TPID dalam pemantauan harga dan stabilisasi pasokan;
- meningkatkan efisiensi distribusi pangan melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan logistik;

- memperluas kerja sama antar daerah dalam penyediaan komoditas strategis;
- meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan harga dan distribusi pangan; serta
- memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Indonesia, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga.

Dengan kebijakan tersebut, inflasi Kabupaten Barito Kuala diharapkan tetap terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan iklim usaha semakin kondusif sehingga mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi **6,50 persen**, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Tahun 2027.

3.1.1.6 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator utama pembangunan yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk. Penurunan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan kesempatan kerja, akses terhadap pelayanan dasar, serta efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

a) Kondisi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren yang semakin membaik. Tingkat kemiskinan menurun dari **4,36 persen pada Tahun 2024 menjadi 4,31 persen pada Tahun 2025**. Selanjutnya ditargetkan turun menjadi **3,88 persen pada Tahun 2026** dan **3,75 persen pada Tahun 2027** sebagai bagian dari upaya percepatan pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Barito Kuala relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap guncangan ekonomi akibat fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, rendahnya produktivitas usaha, keterbatasan akses pekerjaan formal, serta terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar di beberapa wilayah.

b) Karakteristik Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala

Karakteristik kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala memiliki ciri yang berbeda dengan daerah perkotaan. Sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah perdesaan dengan mata pencaharian utama pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan usaha informal.

Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian primer yang sangat dipengaruhi kondisi musim dan fluktuasi harga komoditas;
- produktivitas usaha tani yang masih belum optimal;
- rendahnya nilai tambah hasil pertanian karena sebagian besar komoditas masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah;
- terbatasnya kesempatan kerja formal di luar sektor pertanian;
- rendahnya keterampilan tenaga kerja dan kewirausahaan masyarakat;
- masih terdapat rumah tangga yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, sanitasi, air minum layak, serta infrastruktur dasar; dan
- adanya kelompok masyarakat rentan yang mudah kembali miskin akibat tekanan ekonomi maupun bencana.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala harus dilakukan secara terpadu melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

c) Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan hasil pemetaan kemiskinan dan analisis data **Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)**, **Desil 1–2**, serta hasil analisis dalam Dokumen RPKD Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala, terdapat beberapa kecamatan yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan.

Wilayah prioritas tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk miskin, tingkat kerentanan sosial ekonomi, keterbatasan akses pelayanan dasar, serta kebutuhan percepatan intervensi pembangunan. Penanganan pada wilayah prioritas dilakukan melalui pendekatan lintas sektor yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta perlindungan sosial.

Program penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada desa-desa yang memiliki konsentrasi rumah tangga miskin tertinggi sebagaimana telah ditetapkan dalam basis data P3KE dan hasil pemutakhiran data kemiskinan daerah. Pendekatan spasial tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah sehingga manfaat pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

d) Keterkaitan dengan Program Strategis Nasional (Pro-SN)

Penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian dari dukungan terhadap **Program Strategis Nasional (Pro-SN) Penanggulangan Kemiskinan**. Berbagai program daerah diarahkan untuk mendukung sasaran nasional melalui

peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan perlindungan sosial.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program prioritas, antara lain:

- pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- pengembangan UMKM dan kewirausahaan;
- peningkatan kesempatan kerja;
- penguatan ketahanan pangan;
- peningkatan akses pendidikan;
- peningkatan pelayanan kesehatan;
- percepatan penurunan stunting;
- pembangunan infrastruktur dasar; serta
- perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan target penurunan kemiskinan sebesar **3,75 persen pada Tahun 2027** dapat tercapai.

f) Arah Kebijakan Tahun 2027

Untuk mempercepat penurunan kemiskinan, arah kebijakan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 difokuskan pada:

- peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dan UMKM;
- penguatan sektor pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan;
- penciptaan lapangan kerja baru;
- peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- percepatan pembangunan infrastruktur dasar;
- peningkatan efektivitas perlindungan sosial berbasis data P3KE;
- percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi terpadu pada desa dan kecamatan prioritas.

3.1.1.7 Kinerja Investasi

Investasi merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan usaha, meningkatkan penerimaan daerah, serta memperkuat daya saing ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan investasi menjadi salah satu sasaran strategis pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027.

a) Kondisi Investasi Kabupaten Barito Kuala

Kinerja investasi Kabupaten Barito Kuala menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga Tahun 2025 realisasi investasi mencapai sekitar **Rp3,11 triliun**, dengan target meningkat menjadi sekitar **Rp3,40 triliun pada Tahun 2026** dan **Rp3,80 triliun pada Tahun 2027**. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi daerah serta membaiknya pelayanan perizinan dan pembangunan infrastruktur pendukung.

b) Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)

Realisasi investasi di Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh **Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, pergudangan, konstruksi, dan jasa. Sementara itu, investasi yang berasal dari **Penanaman Modal Asing (PMA)** masih relatif terbatas, namun memiliki peluang untuk terus berkembang, khususnya pada sektor industri pengolahan, logistik, energi, dan pengembangan kawasan strategis.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus mendorong peningkatan PMDN maupun PMA melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kepastian hukum, penyediaan infrastruktur, serta promosi investasi yang lebih intensif.

c) Proyek Strategis Daerah yang Mendukung Investasi

Peningkatan investasi didukung oleh pengembangan sejumlah proyek dan kawasan strategis daerah, antara lain:

- pengembangan **Kawasan Permukiman Terpadu Alalak**;
- pengembangan kawasan pergudangan dan logistik;
- pengembangan kawasan agroindustri;
- pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan strategis;
- pengembangan sentra pertanian modern;
- pengembangan kawasan perikanan dan peternakan;
- pengembangan kawasan industri berbasis potensi unggulan daerah.

Proyek-proyek tersebut diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi swasta sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

d) Pelayanan Perizinan melalui OSS

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus meningkatkan kualitas pelayanan investasi melalui penerapan **Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko**. Sistem OSS

memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam memperoleh perizinan secara lebih cepat, transparan, dan terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kepastian berusaha dan memperbaiki iklim investasi daerah.

Penerapan OSS juga didukung oleh penyederhanaan prosedur pelayanan, pendampingan kepada investor, digitalisasi pelayanan perizinan, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

e) Hambatan Pengembangan Investasi

Meskipun menunjukkan perkembangan positif, investasi di Kabupaten Barito Kuala masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- terbatasnya infrastruktur pendukung pada beberapa kawasan investasi;
- belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan;
- keterbatasan tenaga kerja terampil;
- perlunya percepatan penyediaan lahan siap investasi;
- masih terbatasnya promosi investasi yang terintegrasi; dan
- perlunya peningkatan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan pemasaran.

f) Arah Kebijakan Tahun 2027

Untuk mencapai target investasi sebesar **Rp3,80 triliun**, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- meningkatkan kemudahan berusaha melalui optimalisasi OSS Berbasis Risiko;
- memperkuat promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah;
- mengembangkan kawasan strategis dan kawasan industri berbasis agro;
- mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung investasi;
- mendorong hilirisasi sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan;
- meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri; dan
- memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, BUMN, BUMD, dan sektor swasta untuk menarik investasi yang berkelanjutan.

Dengan kebijakan tersebut, investasi diharapkan menjadi salah satu pengungkit utama pencapaian target **pertumbuhan ekonomi 6,50 persen**, peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, dan penguatan struktur ekonomi Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2027.

7) Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala karena menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi

serta berfungsi sebagai media distribusi barang dan jasa. Perkembangan sektor perdagangan tidak hanya mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, penguatan sektor perdagangan menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027.

a) Perkembangan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Perkembangan sektor perdagangan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren yang positif seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, membaiknya konektivitas wilayah, serta pulihnya aktivitas usaha pascapandemi. Pertumbuhan sektor perdagangan didukung oleh meningkatnya produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan sebagai komoditas utama daerah, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa.

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga Kawasan Banjarbakula. Kondisi tersebut menjadikan aktivitas perdagangan semakin berkembang karena tingginya mobilitas barang dan jasa antarwilayah. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, Kabupaten Barito Kuala juga berperan sebagai pemasok berbagai komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan bagi Kota Banjarmasin dan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan.

Perkembangan perdagangan juga didukung oleh meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan usaha, berkembangnya perdagangan berbasis digital (*e-commerce*), serta meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang memanfaatkan pemasaran secara daring. Transformasi tersebut menjadi peluang untuk memperluas akses pasar produk lokal dan meningkatkan daya saing usaha masyarakat.

b) **Sistem Distribusi Barang dan Jaringan Perdagangan**

Distribusi barang di Kabupaten Barito Kuala didukung oleh jaringan transportasi darat dan sungai yang menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pusat perdagangan di wilayah Banjarbakula maupun daerah lainnya. Komoditas utama seperti padi, ikan, hasil perkebunan, ternak, serta berbagai produk UMKM didistribusikan melalui jalur jalan kabupaten, jalan nasional, dan transportasi sungai menuju pasar lokal maupun pasar regional.

Perbaikan kualitas infrastruktur jalan, pembangunan jembatan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah selama beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak positif terhadap kelancaran distribusi barang. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala berupa

keterbatasan infrastruktur logistik di beberapa wilayah, biaya distribusi yang relatif tinggi pada daerah terpencil, serta belum optimalnya sistem rantai pasok (*supply chain*) yang menghubungkan produsen dengan pasar.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur konektivitas dan logistik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efisiensi perdagangan serta meningkatkan daya saing produk unggulan Kabupaten Barito Kuala.

c) **Kondisi Pasar dan Pengembangan UMKM**

Aktivitas perdagangan di Kabupaten Barito Kuala ditunjang oleh keberadaan pasar rakyat, pasar tradisional, toko modern, koperasi, serta jaringan usaha mikro dan kecil yang tersebar di seluruh kecamatan. Pasar-pasar tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat transaksi ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan, serta produk olahan lokal.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus mendorong revitalisasi pasar rakyat, peningkatan kualitas sarana perdagangan, penguatan koperasi, serta pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses pembiayaan, pelatihan manajemen usaha, sertifikasi produk, dan digitalisasi pemasaran. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperluas jaringan pemasaran hingga ke tingkat regional dan nasional.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya nilai tambah produk, keterbatasan kemasan dan standar mutu, serta belum optimalnya pemanfaatan platform digital oleh sebagian pelaku usaha. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas UMKM menjadi salah satu fokus kebijakan pembangunan ekonomi Tahun 2027.

d) **Perdagangan Antarwilayah dan Potensi Ekspor**

Perdagangan Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh perdagangan antarwilayah, khususnya dengan Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta daerah lainnya di Kalimantan Selatan. Komoditas utama yang diperdagangkan meliputi beras, ikan air tawar, hasil perkebunan, hasil peternakan, serta berbagai produk olahan UMKM.

Meskipun aktivitas ekspor langsung dari Kabupaten Barito Kuala masih relatif terbatas, beberapa komoditas unggulan daerah telah menjadi bagian dari rantai pasok ekspor melalui pelabuhan di Kota Banjarmasin maupun daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan daya saing produk unggulan melalui pengembangan agroindustri, peningkatan kualitas produk, sertifikasi mutu, serta perluasan akses pasar internasional.

Ke depan, pengembangan hilirisasi komoditas unggulan diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk daerah sehingga tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan baku, tetapi juga dalam bentuk produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

e) **Konektivitas sebagai Pendukung Perdagangan**

Pengembangan konektivitas menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan Kabupaten Barito Kuala. Peningkatan kualitas jalan, jembatan, jaringan transportasi, kawasan pergudangan, serta pengembangan kawasan strategis ekonomi akan mempercepat arus barang dan jasa serta menurunkan biaya logistik.

Posisi Kabupaten Barito Kuala sebagai pintu gerbang menuju Kawasan Banjarbakula memberikan peluang besar untuk mengembangkan pusat distribusi regional, kawasan pergudangan, serta sentra perdagangan yang terintegrasi dengan kawasan industri, pertanian, dan permukiman. Oleh karena itu, pembangunan konektivitas tidak hanya mendukung perdagangan daerah, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi Kabupaten Barito Kuala dalam lingkup regional.

f) **Permasalahan dan Tantangan**

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, sektor perdagangan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- masih terbatasnya nilai tambah produk unggulan daerah;
- belum optimalnya pengembangan industri pengolahan sebagai pendukung perdagangan;
- keterbatasan fasilitas logistik dan pergudangan;
- biaya distribusi yang masih relatif tinggi pada beberapa wilayah;
- rendahnya pemanfaatan perdagangan digital oleh sebagian pelaku UMKM;
- keterbatasan akses pasar nasional dan internasional; serta
- perlunya peningkatan standar mutu dan sertifikasi produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

g) **Arah Kebijakan Tahun 2027**

Dalam rangka memperkuat sektor perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- meningkatkan daya saing produk unggulan melalui hilirisasi komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan;
- memperkuat pengembangan UMKM melalui digitalisasi pemasaran, peningkatan kualitas produk, sertifikasi, dan akses pembiayaan;
- merevitalisasi pasar rakyat dan meningkatkan sarana perdagangan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat;

- mengembangkan kawasan perdagangan, pergudangan, dan logistik yang terintegrasi dengan kawasan strategis daerah;
- meningkatkan konektivitas transportasi untuk memperlancar distribusi barang dan menurunkan biaya logistik;
- memperluas akses pasar regional, nasional, dan internasional melalui promosi perdagangan dan kerja sama antardaerah; serta
- mendukung pelaksanaan **Program Strategis Nasional (Pro-SN)** di bidang pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan pengembangan UMKM melalui penguatan sistem perdagangan yang efisien, inklusif, dan berdaya saing.

Dengan kebijakan tersebut, sektor perdagangan diharapkan mampu menjadi salah satu pengungkit utama pencapaian target **pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala sebesar 6,50 persen pada Tahun 2027**, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi daerah, serta mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus menunjukkan peningkatan sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Barito Kuala. Nilai IPM meningkat dari **71,61 pada Tahun 2024 menjadi 72,05 pada Tahun 2025**, dan ditargetkan mencapai **72,70 pada Tahun 2026** serta **73,30 pada Tahun 2027**.

Peningkatan IPM tersebut mencerminkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan standar hidup layak. Ke depan, peningkatan IPM akan difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan, penurunan angka putus sekolah, peningkatan akses pendidikan tinggi, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan produktivitas masyarakat melalui pengembangan keterampilan dan kewirausahaan.

c. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren menurun dari **4,36 persen pada Tahun 2024 menjadi 4,31 persen pada Tahun 2025**, dengan target sebesar **3,75 persen pada Tahun 2027**. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan dasar mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, laju penurunan kemiskinan masih relatif lambat dibandingkan target RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki kerentanan ekonomi, terutama rumah tangga yang bergantung pada sektor pertanian tradisional, pekerja informal, serta masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses pelayanan dasar yang masih

terbatas. Selain itu, kenaikan harga bahan pangan dan keterbatasan kesempatan kerja produktif turut memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam meningkatkan pendapatan.

Kondisi tersebut berimplikasi pada perlunya penguatan kebijakan pembangunan yang lebih terintegrasi. Pada Tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengarahkan kebijakan pada penguatan ekonomi keluarga, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, pengembangan kawasan pertanian terpadu, peningkatan ketahanan pangan, serta penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus mengurangi kerentanan sosial masyarakat.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perkembangan yang semakin baik dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari **3,74 persen pada Tahun 2024 menjadi 3,23 persen pada Tahun 2025**. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, perdagangan, jasa, konstruksi, serta tumbuhnya investasi yang membuka kesempatan kerja baru.

Meskipun target Tahun 2026 diproyeksikan sebesar **3,30 persen** sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika ekonomi nasional, pada Tahun 2027 TPT kembali ditargetkan turun menjadi **2,80 persen**. Upaya pencapaiannya dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan kewirausahaan, peningkatan investasi padat karya, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif dan UMKM.

e. Rasio Gini

Rasio Gini Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren yang semakin membaik, yaitu dari **0,291 pada Tahun 2024 menjadi 0,269 pada Tahun 2025**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat semakin merata sebagai dampak dari meningkatnya pemerataan pembangunan dan akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi produktif.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menargetkan Rasio Gini terus menurun menjadi **0,242 pada Tahun 2026** dan **0,230 pada Tahun 2027** melalui kebijakan pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan ekonomi perdesaan, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kesempatan kerja yang lebih inklusif.

f. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

Pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala diarahkan agar tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya nilai **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)** dari **64,01 pada Tahun 2024 menjadi 71,44 pada Tahun 2025**.

Pada Tahun 2026 dan Tahun 2027 nilai IKLHD diproyeksikan berada pada kisaran **66,57–66,79** sebagai bentuk penyesuaian terhadap metodologi pengukuran dan kondisi riil kualitas lingkungan. Upaya peningkatan kualitas lingkungan akan terus dilakukan melalui pengendalian pencemaran, rehabilitasi kawasan rawa dan sempadan sungai, peningkatan pengelolaan sampah, konservasi sumber daya air, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

Secara keseluruhan, perkembangan indikator ekonomi makro menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala berada pada jalur pembangunan yang positif. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, menurunnya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, serta membaiknya kualitas lingkungan hidup menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, berbagai tantangan seperti transformasi struktur ekonomi, peningkatan produktivitas sektor unggulan, penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan daya saing daerah, serta adaptasi terhadap perubahan iklim masih memerlukan perhatian yang serius. Oleh karena itu, kerangka ekonomi daerah Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sumber daya manusia, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, penguatan sektor unggulan daerah, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kerangka ekonomi makro tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan fiskal Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 yang dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah, kondisi ekonomi makro, potensi unggulan daerah, dinamika ekonomi nasional dan global, serta sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Arah kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, inklusif, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan arah kebijakan ekonomi daerah juga memperhatikan tema RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027, yaitu **"Penguatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Investasi serta Infrastruktur Terintegrasi"**, yang selaras dengan tema pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Tema tersebut menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan investasi, serta penyediaan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah menuju struktur ekonomi yang lebih produktif, tangguh, dan berkelanjutan.

Kabupaten Barito Kuala memiliki keunggulan komparatif pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, serta posisi geografis yang strategis sebagai bagian dari kawasan metropolitan Banjarbakula. Keunggulan tersebut menjadi modal utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer menyebabkan nilai tambah ekonomi belum optimal sehingga diperlukan transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan, diversifikasi usaha, peningkatan produktivitas, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang memiliki daya saing tinggi.

Selain itu, perkembangan ekonomi global yang ditandai dengan ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, transformasi digital, dan tuntutan pembangunan rendah karbon menuntut Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menyusun kebijakan ekonomi yang adaptif, inovatif, dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Tahun 2027 diarahkan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan hasil pembangunan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, dan pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diarahkan pada beberapa kebijakan strategis sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah

Pertumbuhan ekonomi diarahkan melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan yang menjadi basis perekonomian Kabupaten Barito Kuala, terutama sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Kebijakan ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas, penerapan teknologi pertanian modern, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas sarana dan prasarana produksi, serta pengembangan kawasan sentra produksi yang terintegrasi dengan sistem logistik dan pemasaran.

Selain meningkatkan produksi primer, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga mendorong pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan agar mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Mendorong Peningkatan Investasi Daerah

Investasi merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan pelayanan perizinan berbasis risiko, peningkatan kepastian hukum, penyediaan infrastruktur pendukung, penyediaan kawasan investasi, serta peningkatan promosi investasi daerah.

Fokus investasi diarahkan pada sektor pertanian modern, agroindustri, kawasan pergudangan dan logistik, industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, kawasan permukiman terpadu di Kecamatan Alalak, perdagangan dan jasa, energi baru terbarukan, serta pengembangan ekonomi kreatif. Dengan meningkatnya investasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas basis penerimaan daerah, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Barito Kuala.

3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Pendukung Ekonomi

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting dalam meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan Tahun 2027 diarahkan pada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, jaringan transportasi sungai, infrastruktur kawasan pertanian, infrastruktur permukiman, jaringan air minum, sanitasi, listrik, telekomunikasi, dan internet.

Pengembangan infrastruktur diprioritaskan untuk membuka akses menuju sentra produksi pertanian, kawasan industri, kawasan investasi, pusat perdagangan, kawasan permukiman baru, serta wilayah-wilayah yang masih mengalami keterisolasian sehingga dapat mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah.

4. Mengembangkan Hilirisasi dan Transformasi Ekonomi Daerah

Untuk meningkatkan daya saing daerah, pembangunan ekonomi diarahkan pada transformasi struktur ekonomi melalui pengembangan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Hilirisasi dilakukan dengan memperkuat keterkaitan antara sektor produksi, industri pengolahan, distribusi, dan pemasaran sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap penjualan bahan baku.

Transformasi ekonomi juga dilakukan melalui pengembangan ekonomi kreatif, digitalisasi UMKM, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan industri berbasis inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung transformasi ekonomi digital.

5. Memperkuat Ketahanan Pangan Daerah

Sebagai salah satu lumbung pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Tahun 2027 diarahkan pada peningkatan produksi pangan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas lahan rawa, penguatan cadangan pangan daerah, pengembangan kawasan hortikultura, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan pangan, meningkatkan pendapatan petani, mengendalikan inflasi daerah, sekaligus mendukung pencapaian Program Strategis Nasional di bidang ketahanan pangan.

6. Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Ekonomi Kerakyatan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan memperkuat pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, digitalisasi pemasaran, sertifikasi produk, penguatan koperasi, pengembangan usaha berbasis desa, serta kemitraan dengan dunia usaha.

Penguatan ekonomi kerakyatan diharapkan mampu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, mengurangi kesenjangan pendapatan, serta memperluas kesempatan kerja di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.

7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Penggerak Ekonomi

Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi juga diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan tenaga kerja, pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, serta pengembangan kewirausahaan. Upaya tersebut bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha serta dunia industri.

8. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala diarahkan agar tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Pengembangan ekonomi dilakukan dengan menerapkan prinsip pembangunan rendah karbon, konservasi kawasan rawa, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sampah terpadu, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Penerapan prinsip ekonomi hijau diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan sehingga pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

9. Meningkatkan Sinergi Pembangunan Regional

Sebagai bagian dari kawasan strategis Banjarbakula, Kabupaten Barito Kuala terus memperkuat kerja sama pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten/kota sekitar, pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat. Sinergi tersebut diarahkan pada pengembangan kawasan ekonomi, konektivitas

wilayah, pengembangan investasi, pengendalian banjir, ketahanan pangan, serta pengembangan sistem logistik regional.

Melalui sinergi pembangunan regional diharapkan Kabupaten Barito Kuala mampu memanfaatkan posisi strategisnya sebagai kawasan penyangga ibu kota provinsi sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Selatan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan ekonomi hijau. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian target makro pembangunan daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar **5,40 persen**, tingkat kemiskinan **3,75 persen**, Tingkat Pengangguran Terbuka **2,80 persen**, Rasio Gini **0,230**, Indeks Pembangunan Manusia **73,30**, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah **66,79** pada Tahun 2027.

3.1.3 Arah Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal daerah merupakan instrumen strategis Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah melalui pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan Tahun 2027, kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah (fiscal sustainability), memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta memperluas sumber-sumber pendanaan pembangunan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Perumusan arah kebijakan fiskal Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, antara lain perkembangan ekonomi makro nasional dan daerah, kebijakan transfer ke daerah, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, arah kebijakan fiskal nasional, hasil evaluasi pengelolaan APBD tahun-tahun sebelumnya, serta kebutuhan pendanaan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tema RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 yaitu **"Penguatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Investasi serta Infrastruktur Terintegrasi"** memerlukan dukungan kapasitas fiskal yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan fiskal diarahkan tidak hanya untuk menjaga stabilitas APBD, tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran agar setiap rupiah belanja daerah mampu menghasilkan manfaat pembangunan yang optimal bagi masyarakat.

A. Kondisi Fiskal Daerah

Kemampuan fiskal Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif terbatas sehingga ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi.

Di sisi lain, kebutuhan belanja pembangunan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengendalian banjir, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan kawasan strategis daerah. Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mengelola APBD secara lebih efektif melalui peningkatan kapasitas fiskal, pengendalian belanja yang kurang produktif, serta optimalisasi berbagai sumber pembiayaan pembangunan.

B. Ruang Fiskal (Fiscal Space)

Ruang fiskal (fiscal space) merupakan kemampuan keuangan daerah yang dapat digunakan secara fleksibel untuk mendanai program prioritas pembangunan setelah dikurangi berbagai belanja yang bersifat mengikat (earmarked expenditure) dan belanja wajib (mandatory spending). Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengakselerasi pembangunan sesuai prioritas daerah.

Dalam struktur APBD Kabupaten Barito Kuala, ruang fiskal dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- besarnya Dana Transfer;
- kewajiban belanja pegawai;
- pemenuhan mandatory spending;
- kewajiban pembiayaan daerah; dan
- efisiensi belanja operasional.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus berupaya meningkatkan ruang fiskal melalui:

1. optimalisasi PAD;
2. peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah;
4. efisiensi belanja operasional;
5. pengendalian belanja administrasi pemerintahan;
6. peningkatan kualitas belanja modal yang produktif; dan
7. pemanfaatan skema pendanaan non-APBD.

Dengan meningkatnya ruang fiskal, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala diharapkan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mendukung program prioritas pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi daerah, dan pengurangan kemiskinan.

C. Kesenjangan Fiskal (Fiscal Gap)

Fiscal gap merupakan selisih antara kebutuhan pendanaan pembangunan dengan kemampuan riil keuangan daerah. Seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah, terutama untuk mendukung pencapaian target RPJMD Tahun 2025–2029, kebutuhan pendanaan diperkirakan masih lebih besar dibandingkan kapasitas fiskal yang tersedia.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fiscal gap antara lain:

- meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur;
- peningkatan kebutuhan pelayanan dasar;
- meningkatnya kebutuhan pembiayaan pendidikan dan kesehatan;
- pembangunan kawasan strategis;
- pengendalian banjir dan perubahan iklim;
- terbatasnya peningkatan PAD dibandingkan kebutuhan belanja pembangunan.

Untuk mengurangi fiscal gap tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menerapkan beberapa strategi, yaitu:

- meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah;
- meningkatkan investasi swasta;
- memperluas kerja sama pendanaan pembangunan;
- mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- meningkatkan akses hibah pemerintah pusat maupun luar negeri;
- meningkatkan efisiensi belanja daerah melalui penerapan belanja berbasis kinerja (performance based budgeting).

D. Mandatory Spending

Pengalokasian APBD Tahun 2027 tetap memperhatikan ketentuan mandatory spending sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mandatory spending merupakan alokasi anggaran minimal yang wajib dipenuhi pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu.

Prioritas mandatory spending Kabupaten Barito Kuala meliputi:

Bidang	**Ketentuan Minimal**
Pendidikan	≥ 20% APBD
Infrastruktur Pelayanan Publik	sesuai kemampuan fiskal
Pengawasan Internal	sesuai ketentuan nasional
Dana Desa (transfer)	sesuai ketentuan pemerintah pusat

Pemenuhan mandatory spending tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga memastikan tersedianya pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Oleh karena itu, alokasi anggaran pendidikan difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan, penurunan angka putus sekolah, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Sementara itu, alokasi anggaran kesehatan diarahkan untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

E. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi seluruh sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Strategi yang ditempuh meliputi:

- optimalisasi penerimaan pajak daerah;
- optimalisasi retribusi daerah;
- peningkatan pemanfaatan aset daerah;
- digitalisasi sistem pemungutan pendapatan daerah;
- peningkatan kepatuhan wajib pajak;
- penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- peningkatan investasi sebagai sumber pertumbuhan PAD jangka panjang.

F. Strategi Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada prinsip **money follows program** dan **spending better**, yaitu mengutamakan kualitas belanja dibandingkan besarnya belanja.

Kebijakan belanja Tahun 2027 diprioritaskan untuk mendukung:

- peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- pembangunan infrastruktur strategis;

- penguatan ketahanan pangan;
- peningkatan investasi;
- penanggulangan kemiskinan;
- penguatan tata kelola pemerintahan;
- adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.

Belanja daerah juga diarahkan untuk meningkatkan proporsi belanja yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama belanja modal dan belanja pelayanan publik.

G. Strategi Pembiayaan Pembangunan

Mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan memperluas sumber pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema alternatif di luar APBD, antara lain:

- Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- hibah pemerintah pusat;
- hibah luar negeri sesuai ketentuan;
- Corporate Social Responsibility (CSR);
- investasi swasta;
- kemitraan dengan BUMN dan BUMD;
- optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); serta
- berbagai bentuk pembiayaan kreatif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diversifikasi sumber pembiayaan tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap kemampuan APBD.

H. Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2027

Berdasarkan kondisi ekonomi daerah, kapasitas fiskal, kebutuhan pembangunan, dan proyeksi keuangan daerah, arah kebijakan fiskal Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diarahkan untuk:

1. meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
2. menjaga kesinambungan fiskal daerah dengan pengelolaan APBD yang sehat dan berkelanjutan;
3. meningkatkan ruang fiskal melalui efisiensi belanja operasional;
4. memperbesar proporsi belanja yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
5. memenuhi mandatory spending secara tepat sasaran;
6. memperkuat kualitas belanja melalui pendekatan belanja berbasis kinerja;

7. mengurangi fiscal gap melalui diversifikasi sumber pendanaan pembangunan; dan
8. memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal daerah dengan arah pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, serta target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Melalui arah kebijakan fiskal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat, adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil sehingga mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah Tahun 2027 secara optimal, berkelanjutan, dan akuntabel.

3.2 Realisasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023–2025

Realisasi keuangan daerah merupakan gambaran mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menghimpun pendapatan, mengalokasikan belanja, serta mengelola pembiayaan daerah selama periode Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025. Evaluasi terhadap realisasi APBD menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 karena memberikan informasi mengenai kapasitas fiskal daerah, efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tingkat kemandirian fiskal, kualitas belanja, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Analisis realisasi keuangan daerah dilakukan terhadap empat komponen utama, yaitu perkembangan pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah, perkembangan pembiayaan daerah, dan analisis kinerja APBD. Keempat komponen tersebut saling berkaitan dalam membentuk kapasitas fiskal Kabupaten Barito Kuala sekaligus menjadi dasar penyusunan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2027.

Selama periode Tahun 2023–2025, kondisi keuangan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kecenderungan yang cukup stabil meskipun masih dihadapkan pada tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kualitas belanja daerah, mengendalikan pembiayaan, serta menjaga kesinambungan fiskal daerah agar mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan.

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang menambah kekayaan bersih pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Struktur pendapatan Kabupaten Barito Kuala terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perkembangan pendapatan daerah selama periode Tahun Anggaran 2025 sampai dengan proyeksi Tahun 2027 menunjukkan bahwa struktur pendapatan Kabupaten Barito Kuala masih

didominasi oleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu terus ditingkatkan melalui optimalisasi sumber-sumber PAD tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

:

Tabel 3.9 (TC – 20) Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala

REKENING	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	R-APBD 2027	KETERANGAN (TAMBAH/KURANG)
PENDAPATAN DAERAH	**1.763.659.331.284,53**	**1.785.146.411.590,00**	**1.685.607.969.230,53**	**-99.538.442.359,47**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**135.005.388.190,53**	**488.768.858.590,00**	**389.230.416.230,53**	**-99.538.442.359,47**
Pajak Daerah	58.349.464.853,00	93.108.175.325,00	70.000.000.000,00	**-23.108.175.325,00**
Retribusi Daerah	5.925.507.107,00	284.157.156.000,00	248.500.000.000,00	**-35.657.156.000,00**
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.050.047.152,00	12.080.814.259,00	10.050.047.152,00	**-2.030.767.107,00**
Lain-lain PAD yang Sah	60.680.369.078,53	99.422.713.006,00	60.680.369.078,53	**-38.742.343.927,47**
PENDAPATAN TRANSFER	**1.583.197.274.779,00**	**1.287.723.901.000,00**	**1.287.723.901.000,00**	**0,00**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	1.467.231.251.248,00	1.190.178.901.000,00	1.190.178.901.000,00	**0,00**
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	115.966.023.531,00	97.545.000.000,00	97.545.000.000,00	**0,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**45.456.668.315,00**	**8.653.652.000,00**	**8.653.652.000,00**	**0,00**
Pendapatan Hibah				**0,00**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**45.456.668.315,00**	8.653.652.000	8.653.652.000	**0,00**
Jumlah Pendapatan	**1.763.659.331.284,53**	**1.785.146.411.590,00**	**1.685.607.969.230,53**	**-99.538.442.359,47**

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa total pendapatan daerah Tahun 2025 terealisasi sebesar **Rp1,763 triliun** dan Tahun 2026 sebesar **Rp1,785 triliun**, sedangkan pada Rancangan APBD Tahun 2027 diperkirakan sebesar **Rp1,686 triliun**. Penurunan proyeksi pendapatan Tahun 2027 terutama dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan transfer pemerintah pusat dan penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah yang lebih realistis sesuai kondisi ekonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2027 diproyeksikan mencapai **Rp389,23 miliar** atau sekitar **23,09 persen** dari total pendapatan daerah. Komponen PAD terbesar masih berasal dari retribusi daerah sebesar **Rp248,50 miliar**, diikuti pajak daerah sebesar **Rp70,00 miliar**, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar **Rp10,05 miliar**, serta lain-lain PAD yang sah sebesar **Rp60,68 miliar**.

Sementara itu, Pendapatan Transfer masih menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dengan nilai mencapai **Rp1,288 triliun** atau sekitar **76,39 persen** dari total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Barito Kuala masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal nasional, sehingga peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD menjadi agenda strategis pemerintah daerah.

Untuk mencapai target pendapatan daerah Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan melaksanakan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak.
2. Optimalisasi penerimaan retribusi daerah sesuai potensi riil daerah.
3. Digitalisasi sistem pemungutan pendapatan daerah.
4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
5. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
6. Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam optimalisasi dana transfer.
7. Mendorong peningkatan investasi sebagai basis pertumbuhan PAD jangka panjang.
8. Evaluasi dan monitoring pengelolaan pendapatan daerah secara berkala.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan pendapatan daerah tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah penerimaan, tetapi juga peningkatan kualitas pendapatan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan kemandirian fiskal daerah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi secara bertahap.

3.2.2 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah menjadi instrumen utama dalam mewujudkan sasaran pembangunan karena mencerminkan prioritas

kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Barito Kuala disusun berdasarkan prinsip **money follows program**, **value for money**, **spending better**, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil (result based budgeting). Melalui pendekatan tersebut, alokasi belanja diarahkan pada program-program yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Selain memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator makro pembangunan, antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan tingkat kemiskinan, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Perkembangan kebutuhan belanja daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Rancangan APBD Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10 (TC-21) Proyeksi Penghitungan Kebutuhan Belanja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

REKENING	2025	APBD 2026	R-APBD 2027	KETERANGAN (TAMBAH/KURANG)
BELANJA	**1.715.903.536.407,55**	**1.985.146.411.590,00**	**1.638.032.326.101,52**	**-347.114.085.488,48**
BELANJA OPERASI	**1.201.112.915.566,55**	**1.339.794.113.245,00**	**875.691.294.958,52**	
Belanja Pegawai	751.250.372.759,00	794.662.698.340,00	627.785.924.331,40	-166.876.774.008,60
Belanja Barang dan Jasa	397.006.262.950,55	461.110.935.921,00	*206.608.062.627,12*	-254.502.873.293,88
Belanja Hibah	48.933.424.354,00	83.640.330.984,00	*41.297.308.000,00*	-42.343.022.984,00
Belanja Bantuan Sosial	3.922.855.503,00	380.148.000,00		-380.148.000,00
BELANJA MODAL	**283.467.980.075,00**	**357.067.640.712,00**	**484.683.851.678,00**	**127.616.210.966,00**
Belanja Modal Tanah	2.907.548.340	2.937.352.853	30.370.000.000	27.432.647.147,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.636.683.235	50.563.386.409	95.293.705.007	44.730.318.598,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.442.359.320	128.642.743.398	152.142.201.216	23.499.457.818,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144.945.475.856	169.759.076.362	200.769.346.734	31.010.270.372,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	396.579.000	1.181.579.000	1.397.420.680	215.841.680,00
Belanja Modal Aset Lainnya	3.282.700.000	3.983.502.690	4.711.178.041	727.675.351,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.382.325.900,00**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	2.382.325.900,00	10.000.000.000	10.000.000.000	0,00
BELANJA TRANSFER	**228.940.314.866,00**	**278.284.657.633**	**267.657.179.465**	**-10.627.478.168,00**
Belanja Bagi Hasil	6.823.810.137	6.455.087.233	37.726.533.133	31.271.445.900,00
Belanja Bantuan Keuangan	252.770.702.200	271.829.570.400	229.930.646.333	-41.898.924.067,00
Jumlah Belanja	**1.715.903.536.407,55**	**1.985.146.411.590,00**	**1.638.032.326.101,52**	**-347.114.085.488,48**
Total Surplus/(Defisit)	**47.755.794.876,98**	**-200.000.000.000,00**	**47.575.643.129,01**	

Berdasarkan tabel tersebut, total belanja daerah pada Tahun 2025 terealisasi sebesar **Rp1.715.903.536.407,55**. Pada Tahun Anggaran 2026 meningkat menjadi **Rp1.985.146.411.590,00**, kemudian pada Rancangan APBD Tahun 2027 disusun sebesar **Rp1.638.032.326.101,52**. Penyesuaian pagu belanja Tahun 2027 dilakukan sebagai konsekuensi terhadap proyeksi kemampuan pendapatan daerah sekaligus menjaga keseimbangan fiskal dan keberlanjutan APBD.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan komponen terbesar dalam struktur APBD Kabupaten Barito Kuala karena digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan operasional pemerintahan. Pada Tahun 2025 realisasi belanja operasi mencapai **Rp1,201 triliun**, meningkat menjadi **Rp1,339 triliun** pada Tahun 2026.

Pada Tahun 2027, komponen terbesar belanja operasi terdiri atas:

Komponen	**Nilai (Rp)**
Belanja Pegawai	627.785.924.331,40
Belanja Barang dan Jasa	206.608.062.627,12

Penurunan belanja pegawai dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam meningkatkan ruang fiskal melalui pengendalian belanja yang bersifat rutin sehingga alokasi anggaran dapat lebih diarahkan kepada belanja produktif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Belanja barang dan jasa diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, operasional perangkat daerah, digitalisasi pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta pelayanan administrasi pemerintahan.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan instrumen utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan aset tetap pemerintah daerah. Pada Tahun 2025 realisasi belanja modal sebesar **Rp283,47 miliar**, meningkat menjadi **Rp357,0,6 miliar** pada Tahun 2026 dan direncanakan meningkat secara signifikan menjadi **Rp484,68 miliar** pada Tahun 2027.

Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Alokasi terbesar berada pada pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang mencapai sekitar **Rp200,77 miliar**, diikuti pembangunan gedung dan bangunan sebesar **Rp152,14 miliar**.

Komposisi tersebut mencerminkan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mendukung peningkatan konektivitas wilayah, produktivitas pertanian, pengembangan kawasan strategis, dan peningkatan investasi daerah.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) dialokasikan sebesar **Rp10 miliar** pada Tahun 2027. Alokasi tersebut disiapkan untuk mengantisipasi keadaan darurat, bencana alam, bencana nonalam, kejadian luar biasa, maupun kebutuhan mendesak lainnya yang tidak dapat diprediksi pada saat penyusunan APBD.

Keberadaan BTT merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah terhadap berbagai risiko pembangunan.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun 2027 belanja transfer dialokasikan sebesar **Rp267.657.179.465**. Belanja bantuan keuangan masih mendominasi komponen transfer karena diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, peningkatan pelayanan dasar, serta percepatan pembangunan wilayah perdesaan.

e. Struktur Belanja Daerah Tahun 2027

Berdasarkan Rancangan APBD Tahun 2027, struktur belanja daerah Kabupaten Barito Kuala terdiri atas Belanja Operasi 50,13%. Belanja Modal 33,4%, Belanja Transfer 15,88% dan Belanja Tidak Terduga 0,59%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga APBD dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Analisis Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan belanja daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 telah menunjukkan pergeseran menuju belanja yang lebih produktif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya proporsi belanja modal untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penguatan sektor unggulan, peningkatan pelayanan dasar, dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

Belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung pencapaian lima prioritas pembangunan daerah, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, reformasi tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Ke depan, pengelolaan belanja daerah akan terus diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan menerapkan prinsip **belanja berkualitas (quality spending)**, sehingga setiap alokasi anggaran mampu memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala.

3.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah berfungsi untuk menutup defisit anggaran, memanfaatkan surplus anggaran, serta menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan.

Dalam pengelolaan APBD Kabupaten Barito Kuala, kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan secara hati-hati (prudent fiscal management). Pembiayaan daerah juga menjadi instrumen untuk menjaga likuiditas kas daerah, meningkatkan efektivitas pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta mendukung pembiayaan program-program prioritas yang belum dapat dibiayai sepenuhnya dari pendapatan daerah.

Perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 sampai dengan proyeksi Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11(TC-22) Proyeksi Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

REKENING	2025	APBD 2026	R-APBD 2027	KETERANGAN (TAMBAH/KURANG)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**194.598.438.289,53**	**208.000.000.000,00**	**0,00**	**-208.000.000.000,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	186.598.438.289,53	200.000.000.000,00	0	-200.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	0	-8.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**194.598.438.289,53**	**208.000.000.000,00**	**0,00**	**-208.000.000.000,00**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**8.000.000.000**	**0**	
Penyertaan Modal Daerah				
Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	0	-8.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**8.000.000.000**	**8.000.000.000**	**0**	-8.000.000.000
Pembiayaan Netto		**200.000.000.000,00**	**0,00**	**-200.000.000.000**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**242.354.233.166,51**	**0,00**		

Berdasarkan tabel tersebut, penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar **Rp194.598.438.289,53**, yang sebagian besar bersumber dari **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya** sebesar **Rp186.598.438.289,53** atau sekitar **95,89 persen** dari total penerimaan pembiayaan. Selain itu terdapat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar **Rp8.000.000.000,00**.

Pada Tahun Anggaran 2026, penerimaan pembiayaan meningkat menjadi **Rp208.000.000.000,00**, yang terdiri atas SILPA sebesar **Rp200.000.000.000,00** dan penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar **Rp8.000.000.000,00**. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya ruang fiskal yang masih tersedia sebagai konsekuensi dari pengelolaan APBD yang relatif terkendali.

Di sisi pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengalokasikan **Rp8.000.000.000,00** pada Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 dalam bentuk **pemberian pinjaman daerah**. Kebijakan tersebut dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta manfaat ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh pemanfaatan SILPA tahun anggaran sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memiliki kemampuan menjaga stabilitas kas daerah, namun pada saat yang sama juga mengindikasikan masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan program sehingga akumulasi SILPA dapat lebih dioptimalkan.

Pemanfaatan SILPA diarahkan untuk:

- menutup defisit anggaran apabila terjadi kekurangan pendanaan;
- menjaga kesinambungan pembiayaan program prioritas;
- meningkatkan likuiditas kas daerah;
- mengantisipasi ketidakpastian penerimaan daerah.

Sementara itu, penerimaan kembali pinjaman daerah merupakan bentuk pengembalian dana atas pinjaman yang telah diberikan kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada periode tersebut relatif kecil dibandingkan penerimaan pembiayaan. Alokasi pengeluaran pembiayaan difokuskan pada pemberian pinjaman daerah sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ke depan, kebijakan pengeluaran pembiayaan akan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah, tingkat risiko keuangan, serta keberlanjutan APBD agar tidak menimbulkan beban fiskal pada tahun-tahun berikutnya.

c. Pembiayaan Netto

Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan menghasilkan pembiayaan netto yang menjadi salah satu sumber penyeimbang dalam struktur APBD. Pembiayaan netto berfungsi untuk menutup defisit anggaran apabila pendapatan daerah belum mampu membiayai seluruh kebutuhan belanja pembangunan.

Pengelolaan pembiayaan netto dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal (fiscal prudence), sehingga tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan daerah dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan proyeksi APBD Tahun 2026, **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)** diperkirakan sebesar **Rp41.523.566.441,00**, jauh lebih rendah dibandingkan SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai **Rp242.354.233.166,51**. Penurunan SiLPA tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran diarahkan semakin efektif sehingga proporsi anggaran yang tidak terserap dapat ditekan.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBD melalui penyempurnaan proses perencanaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, SiLPA diharapkan tetap berada pada tingkat yang wajar sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah yang sehat.

Analisis Pembiayaan Daerah

Secara umum, struktur pembiayaan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kondisi fiskal yang relatif terkendali. Penerimaan pembiayaan yang didominasi oleh SILPA menggambarkan tersedianya cadangan fiskal untuk menjaga kesinambungan pembangunan, namun juga menjadi sinyal perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan percepatan realisasi belanja agar pemanfaatan anggaran menjadi lebih optimal.

Di sisi lain, rendahnya pengeluaran pembiayaan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala belum bergantung pada instrumen pembiayaan yang berisiko tinggi, seperti pinjaman daerah. Kondisi ini mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal serta komitmen untuk menjaga stabilitas APBD dalam jangka panjang.

Ke depan, kebijakan pembiayaan daerah akan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan SILPA secara lebih produktif, peningkatan efisiensi pengelolaan kas daerah, diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan, serta pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti **Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hibah, Corporate Social Responsibility (CSR), investasi swasta, serta berbagai bentuk pembiayaan kreatif** yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027.

3.2.4 Analisis Kinerja APBD

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemampuan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mengelola sumber daya keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Evaluasi terhadap kinerja APBD tidak hanya menitikberatkan pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga pada kemampuan APBD dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis kinerja APBD Kabupaten Barito Kuala dilakukan melalui beberapa indikator utama, yaitu tingkat kemandirian fiskal, efektivitas pendapatan daerah, kualitas struktur belanja, keseimbangan fiskal, efisiensi pengelolaan pembiayaan, serta kemampuan APBD dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.

A. Analisis Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah.

Berdasarkan struktur pendapatan Tahun Anggaran 2027, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar **Rp389,23 miliar**, sedangkan total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar **Rp1,686 triliun**. Dengan demikian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai sekitar **23,09 persen**, sedangkan sisanya masih berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Barito Kuala masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian fiskal menjadi salah satu agenda strategis pemerintah daerah melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta peningkatan investasi yang mampu memperluas basis penerimaan daerah.

B. Analisis Struktur Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah menunjukkan bahwa sumber utama pembiayaan pembangunan masih berasal dari Pendapatan Transfer yang diproyeksikan mencapai **Rp1,288 triliun** atau sekitar **76,39 persen** dari total pendapatan daerah. Di sisi lain, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya memberikan kontribusi sekitar **0,51 persen**, sedangkan PAD memberikan kontribusi sekitar **23,09 persen**.

Komposisi tersebut menggambarkan bahwa struktur pendapatan Kabupaten Barito Kuala masih memiliki tingkat ketergantungan yang relatif tinggi terhadap transfer pemerintah pusat. Meskipun demikian, peningkatan PAD dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan kapasitas fiskal daerah yang perlu terus diperkuat melalui reformasi pengelolaan pendapatan daerah.

C. Analisis Struktur Belanja Daerah

Dari sisi belanja, APBD Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kecenderungan yang semakin produktif. Berdasarkan Rancangan APBD Tahun 2027, komposisi belanja terdiri atas Belanja Operasi 50,13%. Belanja Modal 33,4%, Belanja Transfer 15,88% dan Belanja Tidak Terduga 0,59%.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan infrastruktur melalui alokasi belanja modal yang mencapai lebih dari sepertiga total APBD. Persentase belanja modal sebesar **33,40 persen** mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, irigasi, gedung pelayanan publik, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan infrastruktur pendukung investasi.

Di sisi lain, proporsi belanja operasi yang mencapai sekitar **50 persen** masih diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik, pembayaran belanja pegawai, operasional pemerintahan, serta penyediaan barang dan jasa yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

D. Analisis Keseimbangan Fiskal

Keseimbangan fiskal merupakan kondisi dimana kemampuan pendapatan daerah mampu mendukung kebutuhan belanja daerah tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan.

Pada Tahun Anggaran 2025, APBD Kabupaten Barito Kuala masih mencatat **surplus anggaran sebesar Rp47,76 miliar**. Namun pada proyeksi Tahun Anggaran 2026 diperkirakan terjadi **defisit sebesar Rp158,48 miliar**, yang selanjutnya ditutup melalui penerimaan pembiayaan terutama dari pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan masih mampu menjaga kesinambungan APBD tanpa harus mengandalkan pinjaman daerah.

Pada Rancangan APBD Tahun 2027, pendapatan dan belanja daerah direncanakan dalam kondisi berimbang sehingga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas fiskal serta meningkatkan disiplin penganggaran.

E. Analisis Efektivitas Pembiayaan Daerah

Struktur pembiayaan Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki cadangan fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Di sisi lain, rendahnya pengeluaran pembiayaan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala belum bergantung pada pembiayaan yang bersumber dari

pinjaman daerah maupun instrumen pembiayaan berisiko tinggi. Hal ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang relatif sehat serta tingkat risiko fiskal yang masih terkendali.

Meskipun demikian, besarnya SILPA juga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas perencanaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, dan efektivitas penyerapan anggaran sehingga pemanfaatan APBD dapat lebih optimal.

F. Analisis Kualitas Belanja (Quality Spending)

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus menerapkan kebijakan **quality spending** melalui pengalokasian anggaran yang lebih berorientasi pada hasil (outcome) dibandingkan hanya pada penyerapan anggaran (output).

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian lima prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah;
3. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi;
4. Reformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Selain itu, belanja daerah juga diselaraskan dengan Program Strategis Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

G. Tantangan Pengelolaan Fiskal Daerah

Meskipun kinerja APBD menunjukkan perkembangan yang positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan fiskal daerah, antara lain:

1. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang masih relatif rendah dibandingkan total pendapatan daerah.
3. Meningkatnya kebutuhan belanja pelayanan dasar seiring pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas layanan publik.
4. Besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pengendalian banjir.

5. Perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan program agar SILPA dapat ditekan.
6. Perlunya diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.

H. Implikasi Kebijakan terhadap RKPD Tahun 2027

Hasil evaluasi kinerja APBD menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah Tahun 2027. Arah kebijakan fiskal difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD, peningkatan kualitas belanja, efisiensi pengelolaan keuangan daerah, penguatan belanja yang berorientasi pada hasil, serta perluasan sumber pembiayaan pembangunan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Corporate Social Responsibility (CSR), hibah, investasi swasta, dan bentuk pembiayaan alternatif lainnya.

Dengan kebijakan tersebut diharapkan APBD Kabupaten Barito Kuala tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi fiskal Kabupaten Barito Kuala berada pada kategori **cukup sehat**, dengan kemampuan menjaga keseimbangan anggaran, memenuhi kebutuhan belanja prioritas, serta mempertahankan kesinambungan fiskal daerah. Namun demikian, penguatan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD, optimalisasi kualitas belanja, dan diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan masih menjadi agenda strategis yang harus terus dilakukan agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

3.3 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2027

Proyeksi keuangan daerah merupakan estimasi kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun Anggaran 2027. Penyusunan proyeksi keuangan daerah dilakukan sebagai bagian dari penyusunan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKD) yang berfungsi sebagai dasar dalam menentukan kapasitas fiskal, ruang fiskal, prioritas pendanaan, serta kemampuan daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Proyeksi keuangan daerah Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan fiskal daerah, antara lain perkembangan ekonomi makro nasional dan daerah, arah kebijakan fiskal nasional, kebijakan transfer ke daerah, proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi realisasi APBD Tahun Anggaran 2023–2025, perkembangan regulasi pengelolaan keuangan daerah, serta dinamika lingkungan strategis yang diperkirakan akan mempengaruhi kapasitas keuangan daerah.

Selain mempertimbangkan kondisi internal daerah, penyusunan proyeksi keuangan juga mengacu pada arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027, serta tahapan pembangunan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Dengan demikian, proyeksi keuangan daerah diharapkan mampu mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan secara efektif sekaligus menjaga kesinambungan fiskal daerah.

Dalam penyusunannya, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggunakan pendekatan **moderat (baseline scenario)** sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2027. Pendekatan ini mempertimbangkan kondisi riil kemampuan keuangan daerah, proyeksi transfer pemerintah pusat, kapasitas peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kebutuhan belanja prioritas, serta kemampuan pembiayaan daerah. Di samping itu, sebagai bagian dari manajemen risiko fiskal, juga dilakukan analisis terhadap skenario optimistis dan konservatif sebagai dasar antisipasi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal nasional.

Secara umum, proyeksi keuangan daerah Tahun 2027 diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, adaptif, efisien, transparan, dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas fiskal, penguatan kualitas belanja, optimalisasi pembiayaan pembangunan, serta diversifikasi sumber pendanaan di luar APBD. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi sebesar **6,50 persen**, penurunan tingkat kemiskinan menjadi **3,75 persen**, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi **2,80 persen**, penurunan Rasio Gini menjadi **0,230**, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi **73,30**, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebesar **66,79**.

Selanjutnya, proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2027 diuraikan ke dalam empat komponen utama, yaitu:

1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
2. Proyeksi Pendapatan Daerah;
3. Proyeksi Belanja Daerah; dan
4. Proyeksi Pembiayaan Daerah.

Keempat komponen tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2027.

3.3.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2027 yang disusun untuk menjamin tersedianya sumber daya fiskal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kebijakan keuangan daerah menjadi instrumen utama dalam menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), meningkatkan kualitas belanja daerah, memperkuat kapasitas fiskal, serta mengoptimalkan pembiayaan pembangunan guna mendukung pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Perumusan arah kebijakan keuangan daerah didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023–2025, proyeksi kondisi ekonomi makro Tahun 2027, kebijakan fiskal nasional, kemampuan riil keuangan daerah, perkembangan regulasi pengelolaan keuangan daerah, serta dinamika pembangunan yang diperkirakan akan mempengaruhi kapasitas fiskal Kabupaten Barito Kuala.

Pengelolaan keuangan daerah Tahun 2027 juga diarahkan untuk mendukung tema RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027, yaitu **"Penguatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Investasi serta Infrastruktur Terintegrasi"**, melalui pengalokasian anggaran yang lebih berkualitas, berorientasi pada hasil pembangunan (*result oriented budgeting*), serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan evaluasi terhadap struktur APBD beberapa tahun terakhir, kemampuan fiskal Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif terbatas. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah terus melakukan penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah, efisiensi belanja, peningkatan kualitas pembiayaan, serta diversifikasi sumber pendanaan pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah Tahun 2027 diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah yang saling terintegrasi untuk menjaga keseimbangan APBD sekaligus mendukung percepatan pembangunan.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi seluruh sumber penerimaan daerah tanpa menimbulkan beban yang berlebihan terhadap masyarakat maupun dunia usaha. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, daya saing daerah, dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Strategi kebijakan pendapatan daerah meliputi:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Optimalisasi penerimaan retribusi daerah berdasarkan potensi riil pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah.
3. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi melalui digitalisasi sistem pemungutan.
4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan.
5. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber dividen daerah.
6. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam optimalisasi dana transfer.
7. Mendorong peningkatan investasi daerah sebagai basis peningkatan PAD dalam jangka menengah dan panjang.
8. Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.

Melalui kebijakan tersebut diharapkan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat secara bertahap sehingga tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Barito Kuala semakin kuat.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan pada prinsip **money follows program**, **spending better**, dan **value for money**, yaitu mengalokasikan anggaran kepada program-program yang memberikan manfaat terbesar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung lima prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027, yaitu:

- peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah;
- pembangunan infrastruktur yang terintegrasi;
- peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
- peningkatan kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana.

Dalam implementasinya, kebijakan belanja daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan proporsi belanja yang bersifat produktif, terutama belanja modal.
2. Pengendalian belanja operasional agar lebih efisien.
3. Pemenuhan mandatory spending sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peningkatan kualitas belanja pelayanan dasar.
5. Penguatan belanja yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi.
6. Penguatan belanja berbasis kinerja (*performance based budgeting*).
7. Penguatan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan APBD.
8. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja daerah juga diarahkan agar mampu mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Strategis Nasional, prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, serta target RPJMD Kabupaten Barito Kuala.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menjaga keseimbangan APBD serta menjamin tersedianya sumber pendanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian fiskal dengan mengutamakan pemanfaatan sumber pembiayaan yang memiliki risiko rendah terhadap stabilitas keuangan daerah.

Kebijakan pembiayaan Tahun 2027 meliputi:

1. Optimalisasi pemanfaatan SILPA secara lebih produktif.
2. Pengendalian pengeluaran pembiayaan agar tetap sesuai kemampuan fiskal daerah.
3. Pemanfaatan penerimaan kembali pinjaman daerah secara optimal.

4. Diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan melalui skema non-APBD.
5. Penguatan pengelolaan kas daerah untuk menjaga likuiditas APBD.

Selain pembiayaan konvensional, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga akan memperluas alternatif pembiayaan pembangunan melalui:

- Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- Corporate Social Responsibility (CSR);
- Hibah Pemerintah Pusat;
- Hibah Pemerintah Provinsi;
- Dana Alokasi Khusus (DAK);
- investasi swasta;
- kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); serta
- berbagai bentuk pembiayaan kreatif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diversifikasi pembiayaan tersebut menjadi penting mengingat kebutuhan pembangunan Kabupaten Barito Kuala terus meningkat, sementara kapasitas APBD memiliki keterbatasan.

D. Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2027

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menerapkan beberapa prinsip utama sebagai berikut:

1. **Akuntabilitas**, yaitu setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan manfaat.
2. **Transparansi**, yaitu seluruh proses pengelolaan APBD dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
3. **Efektivitas**, yaitu setiap anggaran harus mampu mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
4. **Efisiensi**, yaitu penggunaan anggaran dilakukan secara hemat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
5. **Keadilan**, yaitu distribusi anggaran memperhatikan pemerataan pembangunan antarwilayah dan kelompok masyarakat.

6. **Keberlanjutan Fiskal**, yaitu menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja dalam jangka panjang.
7. **Berorientasi Hasil**, yaitu penganggaran diarahkan pada pencapaian outcome pembangunan, bukan hanya penyerapan anggaran.

E. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2027

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan keuangan daerah dan proyeksi kondisi fiskal Tahun 2027, arah kebijakan keuangan Kabupaten Barito Kuala difokuskan pada:

- meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
- mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer secara bertahap;
- meningkatkan kualitas belanja daerah melalui pendekatan belanja berbasis kinerja;
- memperbesar proporsi belanja produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
- menjaga keseimbangan fiskal daerah melalui pengelolaan APBD yang sehat;
- meningkatkan efektivitas pemanfaatan pembiayaan daerah;
- memperluas sumber pendanaan pembangunan melalui skema non-APBD;
- memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan.

Melalui arah kebijakan keuangan tersebut diharapkan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2027 mampu menjadi instrumen utama dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai visi pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

F. Matriks Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2027

Sebagai implementasi dari arah kebijakan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan strategi pengelolaan keuangan yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan kualitas belanja, menjaga kesinambungan pembiayaan, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Strategi tersebut dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan APBD, kondisi ekonomi makro daerah, proyeksi kemampuan fiskal, serta dinamika kebijakan fiskal nasional. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan

efektivitas pengelolaan APBD sekaligus memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi berbagai dinamika pembangunan.

Tabel 3.12 Matriks Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

Aspek	Kondisi Eksisting	Arah Kebijakan Tahun 2027	Hasil yang Diharapkan
Pendapatan Daerah	Ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi	Optimalisasi PAD melalui pajak, retribusi, digitalisasi pendapatan, pemanfaatan aset, dan investasi	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah
Pendapatan Transfer	Masih menjadi sumber utama APBD	Memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi agar transfer tetap optimal	Stabilitas kapasitas fiskal daerah
Belanja Operasi	Proporsi masih cukup besar	Efisiensi belanja operasional dan peningkatan produktivitas belanja	Ruang fiskal semakin meningkat
Belanja Modal	Menjadi instrumen pembangunan	Memperbesar proporsi belanja infrastruktur dan pelayanan publik	Pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan meningkat
Mandatory Spending	Harus memenuhi ketentuan regulasi	Menjaga proporsi belanja pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pembiayaan	Didominasi pemanfaatan SILPA	Optimalisasi pembiayaan dan diversifikasi sumber pendanaan	APBD lebih sehat dan berkelanjutan
Pendanaan Non-APBD	Belum optimal	Pengembangan KPBU, CSR, hibah, investasi swasta, dan pembiayaan kreatif	Percepatan pembangunan tanpa membebani APBD
Tata Kelola Keuangan	Terus ditingkatkan	Digitalisasi pengelolaan keuangan, penguatan pengendalian intern, peningkatan akuntabilitas	Tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan akuntabel

Berdasarkan matriks tersebut, arah kebijakan keuangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diarahkan pada penguatan kapasitas fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah, efisiensi belanja operasional, peningkatan proporsi belanja produktif, optimalisasi pembiayaan pembangunan, serta diversifikasi sumber pendanaan di luar APBD. Seluruh kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal (*fiscal prudence*), kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), serta pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil (*result-oriented budgeting*).

Arah kebijakan keuangan daerah tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2027 sebagaimana diuraikan pada subbab berikutnya.

3.3.2 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan seluruh hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan menjadi sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023–2025, proyeksi APBD Tahun 2026, target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, arah kebijakan fiskal nasional, perkembangan ekonomi makro daerah, serta potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah.

Penyusunan proyeksi pendapatan daerah menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential fiscal policy*) dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional, kebijakan transfer pemerintah pusat, perkembangan investasi, potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut bertujuan agar target pendapatan yang ditetapkan realistis, terukur, dan dapat dicapai sehingga mampu mendukung stabilitas APBD dan kesinambungan pembangunan daerah.

Berdasarkan proyeksi keuangan daerah, total pendapatan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar **Rp1.685.607.969.230,53**.

Berdasarkan TC.20 tabel 3.9, struktur pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 masih didominasi oleh **Pendapatan Transfer** sebesar **Rp1.287.723.901.000,00** atau sekitar **76,40 persen** dari total pendapatan daerah. Sementara itu **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** diproyeksikan sebesar **Rp389.230.416.230,53** atau sekitar **23,09 persen**, sedangkan **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** sebesar **Rp8.653.652.000,00** atau sekitar **0,51 persen**.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Barito Kuala masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tetap menjadi salah satu fokus utama kebijakan keuangan daerah.

A. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar **Rp389,23 miliar** pada Tahun Anggaran 2027. Target tersebut disusun berdasarkan evaluasi realisasi penerimaan daerah, potensi ekonomi daerah, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta kebijakan optimalisasi pajak dan retribusi daerah.

Tabel 3.13 Komposisi PAD Tahun 2027

Komponen PAD	Nilai (Rp)	Persentase terhadap PAD
Pajak Daerah	70.000.000.000	17,98%
Retribusi Daerah	248.500.000.000	63,84%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.050.047.152	2,58%
Lain-lain PAD yang Sah	60.680.369.078	15,60%
Jumlah PAD	**389.230.416.230**	**100%**

Komponen terbesar PAD masih berasal dari **Retribusi Daerah** yang mencapai hampir dua pertiga dari total PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang menghasilkan retribusi masih menjadi sumber utama penerimaan daerah. Di sisi lain, kontribusi pajak daerah masih perlu terus ditingkatkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pelayanan perpajakan, serta optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

Untuk mencapai target PAD Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan melaksanakan beberapa strategi sebagai berikut:

1. optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
2. peningkatan efektivitas pemungutan retribusi daerah;
3. digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi;
4. optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
5. peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

6. penguatan pengawasan dan evaluasi penerimaan daerah; dan
7. peningkatan investasi sebagai basis perluasan objek pajak dan retribusi.

B. Proyeksi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer masih menjadi sumber utama pendanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar alokasi transfer tetap optimal sesuai kebijakan nasional.

Tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan Transfer Tahun 2027

Jenis Transfer	Nilai (Rp)
Dana Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	1.057.971.124.000
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	132.207.777.000
Transfer Antar Daerah	97.545.000.000
Jumlah	**1.287.723.901.000**

Meskipun demikian, ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer menjadi tantangan tersendiri bagi penguatan kemandirian fiskal daerah. Oleh sebab itu, peningkatan PAD tetap menjadi prioritas kebijakan keuangan daerah dalam jangka menengah.

C. Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar **Rp8.653.652.000,00** yang seluruhnya berasal dari pendapatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontribusi kelompok pendapatan ini relatif kecil terhadap struktur APBD, namun tetap menjadi salah satu sumber pendapatan yang mendukung keseimbangan fiskal daerah.

D. Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil proyeksi, struktur pendapatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 menunjukkan beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. **Pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer**, sehingga penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD menjadi agenda strategis.
2. **PAD menunjukkan potensi peningkatan**, terutama dari sektor retribusi daerah, pajak daerah, dan optimalisasi aset daerah.

3. **Transfer pemerintah pusat masih menjadi penyangga utama APBD**, sehingga perubahan kebijakan fiskal nasional akan sangat mempengaruhi kapasitas keuangan daerah.
4. **Pendapatan lain-lain yang sah memiliki kontribusi relatif kecil**, sehingga tidak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggunakan **skenario moderat (baseline scenario)** sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2027. Namun demikian, untuk mengantisipasi dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal nasional, disusun pula skenario optimistis dan konservatif sebagai berikut.

Tabel 3.15 Skenario Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2027

Skenario	Karakteristik	Implikasi
Optimistis	Pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari target, investasi meningkat, penerimaan pajak dan retribusi meningkat, transfer pemerintah tetap optimal	Ruang fiskal meningkat sehingga pembangunan dapat dipercepat.
Moderat (Baseline)	Pertumbuhan ekonomi sesuai target RKPD, transfer pemerintah sesuai proyeksi, realisasi PAD sesuai target	Menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2027.
Konservatif	Pertumbuhan ekonomi melambat, transfer pemerintah menurun, PAD tidak mencapai target	Dilakukan penyesuaian prioritas belanja dan penguatan efisiensi anggaran.

Penggunaan tiga skenario tersebut merupakan bagian dari penerapan **manajemen risiko fiskal**, sehingga Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memiliki fleksibilitas dalam mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi maupun kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi kemampuan pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Barito Kuala masih berada pada kategori **sedang**, dengan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer yang masih relatif tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan investasi, digitalisasi pengelolaan pendapatan, penguatan pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

3.3.3 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Penyusunan proyeksi belanja daerah Tahun Anggaran 2027 dilakukan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah, kebutuhan pembiayaan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, serta memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, keadilan, akuntabilitas, dan kesinambungan fiskal.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2027 juga disusun dengan mengacu pada tema RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 yaitu **"Penguatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Investasi serta Infrastruktur Terintegrasi"**. Oleh karena itu, belanja daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur strategis, penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan proyeksi APBD Tahun 2027, total belanja daerah Kabupaten Barito Kuala direncanakan sebesar **Rp1.685.607.969.230,53**, atau menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah sehingga APBD Tahun 2027 disusun dalam kondisi berimbang.

A. Struktur Proyeksi Belanja Daerah

Komposisi belanja daerah Tahun 2027 terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sebagaimana disajikan pada tabel TC.21 pada table 3.10

Tabel 3.16 Komposisi belanja daerah Tahun 2027

Jenis Belanja	Nilai (Rp)	Persentase
Belanja Operasi	845.023.986.959	50,13%
Belanja Modal	562.929.324.639	33,40%
Belanja Transfer	267.657.179.465	15,88%
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	0,59%
Jumlah Belanja	**1.685.607.969.230**	**100,00%**

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa struktur APBD Kabupaten Barito Kuala mulai mengarah pada peningkatan kualitas belanja (*quality spending*), dengan proporsi belanja modal yang relatif tinggi untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

B. Proyeksi Belanja Operasi

Belanja operasi diproyeksikan sebesar **Rp845,02 miliar** atau sekitar **50,13 persen** dari total belanja daerah. Belanja ini digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik, yang terdiri atas belanja pegawai sebanyak 627.785.924.331 dan belanja barang dan jasa sebanyak 206.608.062.627

Pengendalian belanja pegawai dilakukan untuk menjaga ruang fiskal sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih besar dalam meningkatkan belanja pembangunan. Sementara itu, belanja barang dan jasa diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, operasional perangkat daerah, digitalisasi pemerintahan, serta penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi.

C. Proyeksi Belanja Modal

Belanja modal diproyeksikan sebesar **Rp562.929.324.639,01** atau sekitar **33,40 persen** dari total belanja daerah. Dibandingkan realisasi Tahun 2025 sebesar **Rp283,47 miliar**, alokasi belanja modal menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Alokasi terbesar berada pada pembangunan **jalan, jaringan, dan irigasi**, yang mencerminkan fokus pembangunan Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah agraris dengan kebutuhan konektivitas wilayah dan penguatan sistem irigasi. Selain itu, pembangunan gedung dan bangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan, kesehatan, serta fasilitas pelayanan publik.

D. Proyeksi Belanja Transfer

Belanja transfer diproyeksikan sebesar **Rp267.657.179.465** atau sekitar **15,88 persen** dari total belanja daerah. Dengan komposisi Belanja bagi hasil sebanyak 37.726.533.133 dan Belanja Bantuan Keuangan 229.930.646.333

Belanja bantuan keuangan tetap menjadi komponen terbesar dalam belanja transfer karena diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, peningkatan pelayanan masyarakat, serta percepatan pembangunan kawasan perdesaan.

E. Proyeksi Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) diproyeksikan sebesar **Rp10.000.000.000,00** atau sekitar **0,59 persen** dari total belanja daerah. Alokasi ini disediakan untuk mengantisipasi keadaan darurat, bencana alam, bencana nonalam, kejadian luar biasa, serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak dapat diprediksi pada saat penyusunan APBD.

Penyediaan BTT merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan fiskal daerah terhadap berbagai risiko pembangunan, khususnya mengingat Kabupaten Barito Kuala memiliki kerawanan terhadap bencana banjir dan perubahan iklim.

F. Prioritas Belanja Daerah Tahun 2027

Belanja daerah Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian lima prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala, yaitu:

1. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia**, melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
2. **Penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah**, melalui pengembangan pertanian modern, perikanan, perkebunan, UMKM, investasi, dan hilirisasi komoditas unggulan.
3. **Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi**, meliputi jalan, jembatan, irigasi, jaringan air minum, sanitasi, kawasan permukiman, serta infrastruktur pendukung investasi.
4. **Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**, melalui digitalisasi pelayanan, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas aparatur, serta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana**, melalui rehabilitasi lingkungan, pengendalian banjir, pengelolaan persampahan, konservasi kawasan rawa, dan pengurangan risiko bencana.

G. Analisis Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan proyeksi APBD Tahun 2027, kebijakan belanja Kabupaten Barito Kuala menunjukkan beberapa karakteristik utama.

Pertama, proporsi **belanja modal yang mencapai 33,40 persen** menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur yang produktif. Kondisi ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas wilayah, memperluas investasi, dan meningkatkan pelayanan publik.

Kedua, belanja operasi tetap dipertahankan pada tingkat yang memadai untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik tanpa mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan.

Ketiga, belanja transfer tetap diarahkan untuk memperkuat pembangunan desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, sehingga pembangunan dapat berlangsung lebih merata.

Keempat, penyediaan Belanja Tidak Terduga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan terhadap risiko bencana maupun keadaan darurat lainnya.

Secara keseluruhan, proyeksi belanja daerah Tahun Anggaran 2027 telah disusun berdasarkan prinsip **belanja berkualitas (quality spending)**, **belanja berbasis kinerja (performance-based budgeting)**, dan **value for money**, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027.

3.3.4 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran dalam satu tahun anggaran. Pembiayaan daerah memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menjamin keberlanjutan pendanaan pembangunan, serta menjaga stabilitas fiskal daerah.

Penyusunan proyeksi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2027 dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023–2025, proyeksi kondisi fiskal Tahun 2026, kemampuan riil keuangan daerah, serta arah kebijakan pengelolaan

pembiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2027 diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), meningkatkan fleksibilitas pengelolaan APBD, mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia, serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan yang berisiko tinggi. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*fiscal prudence*) sehingga pembiayaan daerah tidak menimbulkan beban fiskal pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

A. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau mendukung pembiayaan program prioritas apabila kemampuan pendapatan daerah belum sepenuhnya mencukupi.

Berdasarkan proyeksi APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala **tidak merencanakan penerimaan pembiayaan**, sehingga nilai penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp0,00**. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penyusunan APBD Tahun 2027 diarahkan pada kondisi anggaran yang berimbang (*balanced budget*), di mana seluruh kebutuhan belanja direncanakan dapat dibiayai melalui pendapatan daerah tanpa bergantung pada pemanfaatan SILPA maupun sumber pembiayaan lainnya.

Kondisi tersebut merupakan indikator positif bagi kesehatan fiskal daerah karena menunjukkan adanya peningkatan keseimbangan antara kapasitas pendapatan dengan kebutuhan belanja daerah.

B. Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan

Sejalan dengan kebijakan penerimaan pembiayaan, pada Tahun Anggaran 2027 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga **tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan**, sehingga nilai pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp0,00**. Kebijakan ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah tidak merencanakan penyertaan modal baru, pemberian pinjaman daerah, maupun pembayaran kewajiban pembiayaan lainnya pada Tahun Anggaran 2027.

Dengan tidak adanya penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, struktur APBD Tahun 2027 menjadi lebih sederhana dan menunjukkan bahwa keseimbangan fiskal dicapai melalui optimalisasi pendapatan dan pengendalian belanja.

C. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Karena pada Tahun Anggaran 2027 tidak terdapat penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, maka **pembiayaan netto diproyeksikan sebesar Rp0,00**. Kondisi ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 disusun dalam kondisi **anggaran berimbang**, tanpa ketergantungan pada sumber pembiayaan untuk menutup defisit. Kebijakan anggaran berimbang tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan disiplin fiskal yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, meningkatkan kredibilitas pengelolaan APBD, serta meminimalkan risiko fiskal pada masa yang akan datang.

D. Strategi Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Meskipun pada Tahun Anggaran 2027 tidak direncanakan adanya transaksi pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tetap menyiapkan berbagai strategi pengelolaan pembiayaan sebagai langkah antisipatif apabila terjadi perubahan kondisi fiskal atau kebutuhan pendanaan pembangunan di masa mendatang.

Strategi tersebut meliputi:

1. mengoptimalkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) apabila diperlukan untuk menjaga kesinambungan fiskal;
2. meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga akumulasi SILPA dapat ditekan pada tingkat yang optimal;
3. menjaga likuiditas kas daerah melalui pengelolaan arus kas yang efektif dan efisien;
4. mengembangkan skema pembiayaan alternatif yang tidak membebani APBD secara langsung;
5. memperkuat pengendalian terhadap risiko fiskal melalui monitoring dan evaluasi kondisi keuangan daerah secara berkala.

E. Pengembangan Sumber Pembiayaan Non-APBD

Mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan terus mendorong pemanfaatan berbagai sumber pendanaan di luar APBD sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan.

Beberapa alternatif pendanaan yang akan dikembangkan meliputi:

1. **Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)** untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum, kawasan permukiman, serta infrastruktur ekonomi lainnya.
2. **Dana Alokasi Khusus (DAK)** baik fisik maupun nonfisik dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pembangunan sektor prioritas.
3. **Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan** sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
4. **Corporate Social Responsibility (CSR)** perusahaan sebagai bentuk dukungan dunia usaha terhadap pembangunan daerah.
5. **Hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun lembaga donor** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. **Investasi swasta** melalui pengembangan kawasan strategis daerah, kawasan industri, kawasan pergudangan, serta kawasan permukiman terpadu.
7. **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus penguatan pembiayaan operasional pada sektor-sektor tertentu.
8. **Kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perguruan tinggi, dan lembaga pembiayaan** dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi daerah.
9. **Pembiayaan kreatif (innovative financing)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemanfaatan instrumen pembiayaan hijau (*green financing*) dan pembiayaan berbasis hasil (*result-based financing*) apabila memungkinkan.

Pengembangan sumber pendanaan non-APBD tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program prioritas pembangunan tanpa meningkatkan tekanan terhadap APBD serta memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

F. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2027 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menerapkan kebijakan fiskal yang lebih konservatif dan berorientasi pada keberlanjutan. Tidak adanya penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan menunjukkan bahwa struktur APBD telah dirancang berdasarkan kemampuan riil pendapatan daerah sehingga tidak memerlukan dukungan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Kebijakan tersebut memiliki beberapa implikasi strategis. Pertama, pengelolaan APBD menjadi lebih sehat karena tidak bergantung pada pemanfaatan SILPA atau sumber pembiayaan lainnya. Kedua, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjaga stabilitas fiskal apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi maupun kebijakan nasional. Ketiga, fokus kebijakan dapat diarahkan pada peningkatan kualitas pendapatan dan efisiensi belanja sehingga kapasitas fiskal daerah semakin kuat.

Di sisi lain, kebutuhan pembangunan daerah yang terus meningkat mengharuskan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk memperluas sumber pendanaan di luar APBD. Oleh karena itu, pengembangan skema KPBU, pemanfaatan hibah, peningkatan investasi, penguatan BLUD, dan pembiayaan kreatif menjadi strategi penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2027 diharapkan mampu menjaga kesinambungan fiskal, meningkatkan ketahanan keuangan daerah, memperluas kapasitas pendanaan pembangunan, serta mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Barito Kuala secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3.4 Pendanaan Non APBD

Pendanaan non-APBD di Kabupaten Barito Kuala bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan (CSR), filantropi, serta swadaya masyarakat. Sumber dana ini menjadi pendorong utama percepatan infrastruktur, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi. Kabupaten Barito Kuala secara rutin menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik dan dana dari kementerian untuk program strategis seperti Cetak Sawah Rakyat, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK).

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan hasil perumusan isu strategis pembangunan daerah pada Bab II, yang mencerminkan permasalahan utama dan tantangan pembangunan Kabupaten Barito Kuala, maka diperlukan arah kebijakan yang mampu menjawab isu-isu tersebut secara sistematis dan terintegrasi. Isu strategis yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar, pengurangan risiko bencana, transformasi struktur ekonomi, serta penanggulangan kemiskinan, menjadi dasar dalam penentuan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027. Penetapan prioritas pembangunan ini juga memperhatikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Dengan demikian, prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 dirumuskan sebagai bentuk respons strategis terhadap isu pembangunan yang dihadapi, sekaligus sebagai upaya percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran langsung dari tujuan dan sasaran RPJMD yang disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025, perkembangan kondisi ekonomi makro daerah, kemampuan keuangan daerah, dinamika lingkungan strategis, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui pendekatan sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sinkronisasi vertikal memastikan keterpaduan antara RPJPN Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, RKP Tahun 2027, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027, dan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Sementara itu, sinkronisasi horizontal dilakukan melalui penyelarasan antarurusan pemerintahan, prioritas pembangunan daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Strategis Nasional (PSN), Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN/Pro-SN), serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Melalui pendekatan tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan daerah tidak hanya menjadi target kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendukung

pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui penguatan produktivitas daerah, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

4.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2027

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang merupakan penjabaran tahunan RPJMN Tahun 2025–2029. Tahun 2027 merupakan tahun akselerasi pelaksanaan RPJMN yang diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah menempatkan peningkatan produktivitas, investasi, dan industrialisasi sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

A. Tema RKP Tahun 2027

Tema Rancangan RKP Tahun 2027 adalah:

"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri."

Tema tersebut menegaskan bahwa pembangunan nasional tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui tiga pengungkit utama, yaitu:

1. **Produktivitas**, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi pendidikan, kesehatan, inovasi, riset, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
2. **Investasi**, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, penyederhanaan regulasi, peningkatan kepastian hukum, dan pengembangan kawasan ekonomi.
3. **Industri**, melalui hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri manufaktur, pengembangan industri berbasis teknologi, serta peningkatan daya saing ekspor.

Arah tersebut menjadi landasan bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2027 sehingga program pembangunan daerah memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran pembangunan nasional.

B. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027

Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut, RKP Tahun 2027 diarahkan melalui Prioritas Nasional yang merupakan implementasi RPJMN Tahun 2025–2029 dan

mendukung pencapaian Asta Cita Presiden. Prioritas tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa fokus pembangunan lintas sektor yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas ekonomi, pemerataan pembangunan, penguatan sumber daya manusia, serta reformasi tata kelola pemerintahan.

Secara substansi, arah prioritas nasional meliputi:

- Penguatan produktivitas nasional melalui pendidikan, kesehatan, inovasi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
- Peningkatan investasi dan kemudahan berusaha.
- Hilirisasi komoditas strategis dan penguatan industri nasional.
- Swasembada pangan, energi, dan air.
- Pembangunan infrastruktur dan konektivitas ekonomi.
- Transformasi digital dan reformasi birokrasi.
- Penguatan perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan.
- Pembangunan rendah karbon dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Prioritas tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.

C. Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN/Pro-SN)

Sebagai penajaman implementasi Prioritas Nasional, RKP Tahun 2027 memperkenalkan **Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)** atau **Program Strategis Nasional (Pro-SN)** yang merupakan kumpulan program konkret, terukur, dan berdampak tinggi (high impact) untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Beberapa program prioritas nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan Kabupaten Barito Kuala seperti pada table berikut:

Tabel 4.1 Dukungan Kabupaten Barito Kuala terhadap Progran Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional	Arah Dukungan Kabupaten Barito Kuala
Swasembada Pangan	Modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas padi, rehabilitasi jaringan irigasi, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
Makan Bergizi Gratis	Dukungan penyediaan bahan pangan lokal, peningkatan gizi masyarakat, pemberdayaan petani dan UMKM pangan
Sekolah Rakyat dan Revitalisasi Sekolah	Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar, rehabilitasi sarana pendidikan
Layanan Kesehatan	Penguatan puskesmas, peningkatan layanan rujukan,

Berkualitas	penurunan stunting, peningkatan cakupan UHC
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Penguatan kelembagaan ekonomi desa, pemberdayaan UMKM dan koperasi
Hilirisasi Pertanian dan Perikanan	Pengembangan agroindustri, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan nilai tambah komoditas
Penguatan Infrastruktur	Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, dan konektivitas kawasan produksi

Program-program tersebut menjadi dasar sinkronisasi antara program pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala.

D. Proyek Strategis Nasional (PSN)

Proyek Strategis Nasional merupakan proyek dan/atau program yang memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun pemerataan pembangunan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung implementasi PSN sesuai kewenangannya, terutama melalui penyediaan dokumen perencanaan, dukungan tata ruang, percepatan perizinan, penyediaan infrastruktur pendukung, serta koordinasi lintas sektor.

Bagi Kabupaten Barito Kuala, dukungan terhadap PSN diarahkan pada:

- peningkatan konektivitas kawasan Banjarbakula;
- pengembangan sentra produksi pangan nasional;
- pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
- pengembangan kawasan logistik dan investasi;
- peningkatan konektivitas jalan strategis;
- penguatan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan rawa;
- pengembangan kawasan permukiman terpadu dan infrastruktur dasar.

Seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (ProSN):

Tabel 4.2 Program Strategis Nasional (ProSN)

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		3. Sekolah Rakyat
		4. Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/*Food Estate*)
3.	Kesehatan untuk semua	1. Stunting
		2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		3. Jaminan Kesehatan Nasional
		4. Penuntasan TBC
		5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD
		2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
		4. Makan Bergizi Gratis
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)
		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas menitikberatkan pada:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
3. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan

4. Transformasi ekonomi dan digital
5. Reformasi birokrasi

Arah pembangunan nasional menekankan pentingnya transformasi ekonomi dan peningkatan kualitas manusia sebagai fondasi utama menuju Indonesia maju. Hal ini menjadi acuan penting bagi daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Berikut table dukungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mendukun Program Prioritas Nasional

Tabel 4.3 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN)

No	Pro-SN	Proyek Kegiatan	Proyek/Kegiatan	Indikator	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Anggaran 2027
1	Pengentasan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrm	Menurunnya Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem	Tingkat Kemiskinan	%	Sosial		Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	330.823.600,00
									1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	416.079.300,00
									1.06.05.1.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	225.000,00
							Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang	15.000.000,00

										Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Sekolah Rakyat	Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat Tahun 2029	Tingkat Kemiskinan	%	Sosial		Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	-
								Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.052.020.008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	416.079.300,00
							Lingkungan Hidup	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	2.11.062.010.001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	59.299.950,00

								Hidup (PPLH)				
		Pembangunan 3 Juta Rumah	Meningkatnya Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.800.000.000,00
									1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00
								Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	500.000.000,00

										Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
									1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru	250.000.000,00

							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	348.900.000,00

2	Ketahanan Pangan	Irigasu untuk mendukung swasembada pangan	Terlaksananya jaringan irigasi swasembada pangan yang berkelanjutan	Tingkat kesiapan teknis dan operasi pemeliharaan irigasi untuk mendukung swasembada pangan	%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	10.000.000,00
									1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	4.000.000.000,00
									1.03.02.1.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	9.880.000,00
									1.03.02.1.02.0127	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku	-
		Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Beroperasinya Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Operasionalisasi BPP	Unit	Pertanian		Penyuluh Pertanian	3.27.07.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	277.759.200,00

										Kecamatan dan Desa	
									3.27.07.1.01.0016	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/ BPP dan Desa	-
		Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	Meningkatnya Indeks Pertanaman hasil cetak sawah	Luas hasil cetak sawah yang ditingkatkan IP-nya	Hektare	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	-
							Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	48.066.000,00
									2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00

							Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	973.436.240,00
		Pangan Akuatik	Terwujudnya tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Produksi Garam	Ton	Kelautan dan Perikanan	Perindustrian	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.25.03.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	-
				Produksi perikanan tangkap	Ton		Perdagangan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	287.635.200,00
							Lingkungan Hidup		3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	14.866.100,00
		Kampung Nelayan	Terwujudnya tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sektor perikanan	Miliar Rupiah	Kelautan dan Perikanan	Perdagangan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.25.03.2.02.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	287.635.200,00
							Lingkungan Hidup		3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha	14.866.100,00

										Nelayan Skala Kecil	
3	Kesehatan untuk semua	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	%	Kesehatan		Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	29.970.400,00
									1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	-
							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03.2.01.0028	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	-
							Pangan	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	105.693.800,00

							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita)	-
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, dan Lansia yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai Upaya Deteksi Dini,	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	Kesehatan		Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	54.499.978.400,00
									1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyekit Menular	782.431.548,00
									1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1.539.577.280,00

			Pencegahan Penyakit, dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2.12.04.2.02.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	83.424.570,00
		Jaminan Kesehatan Nasional	Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	Kesehatan		Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	54.499.978.400,00
							Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	416.079.300,00
							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2.12.04.2.02.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	83.424.570,00

		Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	Tercapainya Penuntasan TBC melalui peningkatan upaya pencegahan TBC, Intensifikasi penmuan kasus secara masif dan pengobatan TBC sampai tuntas	Cakupan penemuan kasus TBC	%	Kesehatan		Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	33.805.000,00
									1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	52.950.000,00
							Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	330.823.600,00
							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2.12.04.2.02.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	83.424.570,00
		Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Rumah Sakit Tipe atau Kelas D Menjadi C melalui	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar	%	Kesehatan		Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	-

			Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas di Rumah Sakit Daerah					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.01.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-
		Makan Bergizi Gratis	Meningkatnya Asupan Gizi dan Pengetahuan Gizi Kelompok Sasaran	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat dan SMA/ sederajat.	%	Pendidikan		Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.1.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	376.217.200,00
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita			Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/	9.020,00

											Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	12.326.885.872,00
							Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.993.500,00

							Kelautan dan Perikanan	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	14.995.000,00
4	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun dalam Pendidikan Menengah	%	Pendidikan		Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-

		Menengah, Sekolah Unggulan Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus					1.01.02.1.02.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.400.000.000,00
									1.01.02.1.03.0025	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	795.600.000,00
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	Pengendalian Inflasi dengan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan Pemantauan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Provinsi	Bulan	Perdagangan	Pangan	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	48.119.500,00
		Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal melalui	Proporsi Koperasi Desa/Keluraha n Merah Putih yang Menjalankan RAT	%	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	185.462.475,00

			Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih									
		Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)										
		Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	Lingkungan Hidup		Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0012	Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	29.169.848.171,00
									2.11.11.2.01.0016	Penanganan Sampah melalui Pengumpulan	-
							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	-

				Penurunan Emisi GRK	%	Lingkungan Hidup		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota	-
									2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	85.053.000,00

Tabel 4.4 Dukungan terhadap Program Tematik Pembangunan

No	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Tematik	Program	Kode	Sub Kegiatan	Anggaran 2027
1	Pengarustamaan Gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, dan Peran Perempuan melalui Penguatan Tata Kelola dan	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.022.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	29.134.700,00

		Pelembagaan PUG dalam Pembangunan				Sosial	Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial.	15.000.000,00
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks		Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.285.378.000,00
						Kesehatan	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	-
						Tenaga Kerja	PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.042.010.005	Perluasan Kesempatan Kerja	-
						Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	30.670.800,00

2	Perlindungan Anak	Terpenuhinya Hak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Penguatan Pelembagaan dan Tata Kelola Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Pembangunan	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peringkat dalam KLA	%	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.062.02.0012	Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks		Pendidikan	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.022.020.055	Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi	-
						Kesehatan	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-
						Sosial	REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,	15.000.000,00

									Spiritual, dan Sosial	
						Perencanaan	PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.02.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	260.902.600,00
3	Masyarakat Adat	Meningkatnya Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, serta Akses Masyarakat Hukum Adat terhadap Pelayanan Dasar dan Pelestarian Budaya secara Berkelanjutan	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui	%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.052.010.001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-
								2.13.052.010.002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	63.430.800,00

									Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
4	Ekonomi Syariah	Terintegrasinya Implementasi Ekonomi Syariah dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	Sosial		PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	600.000.000,00
			Jumlah Produk tersertifikasi Halal	Produk	Usaha Kecil dan Menengah	Usaha Kecil dan Menengah	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	37.932.900,00
					Pariwisata	Pariwisata	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	3.26.02.1.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	-
					Perindustrian	Perindustrian	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0008	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	15.000.000,00

					Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan ekonomi Makro	-
					Pendidikan	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.1.01.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-
5	Pembinaan Ideologi Pancasila	Terwujudnya Internalisasi, Institusionalisasi, dan Aktualisasi Ideologi Pancasila dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Indeks Pelaksanaan Peta Jalan PIP	Indeks	Kesbangpol		PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	304.020.900,00
								8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
								8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	1.211.811.580,00

6	Penanggulangan Bencana	Tingkat Keberhasilan Pemerintah dalam Melaksanakan Upaya Pengurangan Risiko, Penanganan Darurat, dan Pemulihan Pascabencana secara Cepat, Tepat, Terkoordinasi, dan Berkelanjutan Guna Melindungi Masyarakat serta Meminimalkan Dampak Bencana	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana	Nilai	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	-
			Persentase Penurunan Potensi Kehilangan PDB Sektor Terdampak Bahaya Iklim	%				1.05.03.1.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-
								1.05.03.1.04.0010	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	38.618.000,00
								1.05.03.1.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	13.920.000,00

E. Target Makro Pembangunan Nasional Tahun 2027

Sebagai arah pembangunan nasional, RKP Tahun 2027 menetapkan sasaran makro yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun target pembangunan daerah.

Tabel 4.5 Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2027

Indikator	Target Nasional Tahun 2027
Pertumbuhan Ekonomi	6,3–7,5%
Tingkat Kemiskinan	6,0–6,5%
Kemiskinan Ekstrem	0%
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,30–4,87%
Rasio Gini	0,375–0,378
Indeks Modal Manusia	0,58
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,84

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027.

Sasaran makro tersebut menjadi acuan dalam menetapkan target pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027. Meskipun target daerah disesuaikan dengan karakteristik lokal, seluruh indikator diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

F. Implikasi terhadap RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2027 memberikan implikasi yang signifikan terhadap penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala. Tema pembangunan daerah **"Penguatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Investasi serta Infrastruktur Terintegrasi"** telah selaras dengan tema RKP Tahun 2027 karena sama-sama menempatkan produktivitas, investasi, dan pembangunan infrastruktur sebagai pengungkit utama pembangunan.

Sinkronisasi tersebut tercermin dalam lima prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah.

3. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
4. Reformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Dengan demikian, kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diharapkan tidak hanya mampu mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan pembangunan nasional secara keseluruhan.

4.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 memperhatikan dan mengacu pada arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 sebagai bentuk implementasi prinsip sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027.

Sinkronisasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Barito Kuala tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi bagian dari pencapaian target pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan pembangunan nasional. Sebagai salah satu kabupaten yang berada di Kawasan Metropolitan Banjarbakula serta merupakan lumbung pangan utama Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, konektivitas wilayah, serta peningkatan daya saing daerah.

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan **top-down** dan **bottom-up**, dengan mengedepankan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial. Dokumen tersebut disusun dengan memperhatikan dinamika global, nasional, maupun regional, termasuk perubahan iklim, ancaman resesi ekonomi, dinamika geopolitik, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

A. Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027

Berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027, tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 adalah:

"Penguatan Sumber Daya Manusia dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas."

Tema tersebut merupakan penjabaran pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan investasi pada sektor-sektor unggulan daerah, serta pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah.

Secara substansi, tema pembangunan tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan tema RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027, yaitu **"Penguatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Investasi serta Infrastruktur Terintegrasi."** Kedua tema tersebut sama-sama menempatkan pembangunan manusia, investasi, dan infrastruktur sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dijabarkan ke dalam arah prioritas pembangunan yang berorientasi pada penyelesaian berbagai isu strategis pembangunan daerah. Berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027, prioritas pembangunan difokuskan pada lima bidang utama, yaitu:

1. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia**, melalui peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan karakter masyarakat, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta percepatan penurunan stunting.
2. **Penguatan ekonomi daerah dan peningkatan investasi**, melalui pengembangan sektor unggulan, hilirisasi komoditas, peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM, perdagangan, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
3. **Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata**, untuk meningkatkan konektivitas wilayah, mendukung distribusi barang dan jasa, memperluas akses pelayanan dasar, serta memperkuat daya saing kawasan.
4. **Penguatan ketahanan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana**, melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, rehabilitasi lingkungan, pengendalian banjir, adaptasi perubahan iklim, dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. **Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik**, melalui penguatan tata kelola pemerintahan, digitalisasi pelayanan publik, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kelima prioritas tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun prioritas pembangunan daerah agar tercipta sinergi antara pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten.

C. Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027

Dalam rangka mewujudkan visi **"KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan"**, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan sasaran pembangunan Tahun 2027 yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Sasaran pembangunan tersebut meliputi:

Tabel 4.6 Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Sasaran Pembangunan Provinsi	Indikator Utama
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia meningkat
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin dan TPT menurun
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan investasi meningkat
Meningkatnya pemerataan infrastruktur	Kualitas dan aksesibilitas infrastruktur meningkat
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH meningkat dan risiko bencana menurun
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP, SPBE, Reformasi Birokrasi meningkat

Sasaran tersebut menjadi referensi dalam penetapan target indikator makro Kabupaten Barito Kuala sehingga terdapat kesinambungan antara target kabupaten dengan target pembangunan provinsi.

D. Program Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengarahkan program prioritas pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan daerah, antara lain:

- peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan layanan pendidikan;
- peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan percepatan penurunan stunting;
- pengembangan pertanian modern dan ketahanan pangan;
- penguatan hilirisasi sektor unggulan daerah;
- pengembangan UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif;
- peningkatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi;
- pembangunan jalan, jembatan, irigasi, serta infrastruktur konektivitas;
- peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi;
- digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik;
- pengendalian banjir, rehabilitasi lingkungan, serta penguatan mitigasi bencana.

Program-program tersebut selanjutnya menjadi dasar penyelarasan program prioritas Kabupaten Barito Kuala agar memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

E. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu wilayah strategis dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, terutama sebagai sentra produksi pangan, kawasan penyangga Metropolitan Banjarbakula, serta wilayah pengembangan investasi berbasis pertanian dan logistik. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 disusun selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 4.7 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan	Prioritas Kabupaten Barito Kuala	Bentuk Sinkronisasi
Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, perlindungan sosial
Penguatan ekonomi dan investasi	Penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah	Pertanian modern, perikanan, UMKM, investasi, hilirisasi
Infrastruktur berkualitas	Pembangunan infrastruktur terintegrasi	Jalan, jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, konektivitas kawasan
Ketahanan lingkungan	Ketahanan lingkungan hidup dan bencana	Pengendalian banjir, konservasi rawa, mitigasi bencana
Reformasi birokrasi	Tata kelola pemerintahan yang adaptif	SPBE, reformasi birokrasi, pelayanan publik, SAKIP

Matriks tersebut menunjukkan bahwa seluruh prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala telah diselaraskan dengan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi secara terintegrasi.

F. Implikasi terhadap RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 memberikan landasan strategis bagi penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027. Penetapan tema pembangunan daerah, prioritas pembangunan, sasaran pembangunan, serta program prioritas Kabupaten Barito Kuala disusun dengan mempertimbangkan tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, lima isu strategis pembangunan daerah, serta visi **KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan** beserta lima misinya.

Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diharapkan tidak hanya mampu mewujudkan target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia, peningkatan investasi sektor unggulan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, penguatan ketahanan lingkungan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2027 tidak disusun sebagai tujuan baru, melainkan merupakan kelanjutan dan penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyelarasan tersebut bertujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan sehingga setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2027 memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 adalah:

"Terwujudnya Barito Kuala SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, dan Unggul)."

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan lima misi pembangunan yang menjadi landasan penyusunan arah kebijakan, strategi, program prioritas, dan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis potensi unggulan daerah.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana.

RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan RPJMD melalui penguatan sinergi antarperangkat daerah, optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan, serta penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan.

A. Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2027

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, tujuan pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2027 meliputi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, dan berkarakter.

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berbasis potensi unggulan daerah.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur serta konektivitas antarwilayah.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana.

Kelima tujuan tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam penetapan sasaran pembangunan tahunan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program prioritas pada Tahun 2027.

B. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 menetapkan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Tabel 4.8 Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran Pembangunan Tahun 2027	Indikator Utama
Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat	IPM, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Umur Harapan Hidup
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	LPE, PDRB Per Kapita, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka
Meningkatkan infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah	Kemantapan jalan, akses air minum, sanitasi, irigasi
Meningkatkan tata kelola	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP, Reformasi Birokrasi, SPBE, Indeks Pelayanan Publik
Meningkatkan kualitas lingkungan	Meningkatnya ketahanan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana	IKLH, luas kawasan terdampak banjir, indeks risiko bencana

C. Arah Pencapaian Sasaran Tahun 2027

Sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan melalui beberapa fokus kebijakan, yaitu:

1. Percepatan peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penurunan stunting.
2. Penguatan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM, serta investasi daerah sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
3. Percepatan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, dan infrastruktur pendukung kawasan strategis.
4. Penguatan reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik, implementasi SPBE, peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja.
5. Penguatan pengendalian banjir, rehabilitasi lingkungan, konservasi kawasan rawa, serta peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

D. Keterkaitan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 telah disusun selaras dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Keselarasan tersebut diwujudkan melalui penguatan pembangunan manusia, peningkatan investasi dan daya saing ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, penguatan ketahanan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, pelaksanaan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diharapkan mampu mempercepat pencapaian target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan target pembangunan nasional Tahun 2027.

4.1.4 Tujuan RKPD Tahun 2027

RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, tujuan pembangunan dalam RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran langsung dari tujuan pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan tujuan RKPD dilakukan untuk memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan pembangunan tahunan serta memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan dokumen perencanaan tahunan.

Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026, tujuan RKPD tidak disusun sebagai tujuan baru, tetapi merupakan target tahunan dari tujuan RPJMD yang disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025, perkembangan indikator

makro pembangunan, kemampuan keuangan daerah, dinamika pembangunan nasional dan daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang.

Tujuan RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan Kabupaten Barito Kuala melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan struktur perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana.

Pencapaian tujuan pembangunan tersebut diukur melalui indikator tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 dengan target tahun ketiga pembangunan sebagai berikut.

Tabel 4.9 Tujuan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Kondisi 2025	Target 2026	Target 2027
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,05	72,70	**73,30**
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,27	5,70	**6,50**
Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,31	3,88	**3,75**
Menurunkan tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,23	3,30	**2,80**
Meningkatkan pemerataan pembangunan	Rasio Gini	0,269	0,242	**0,230**
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	71,44	66,57	**66,79**

Sumber: RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 dan target RKPD Tahun 2027.

Berdasarkan tabel tersebut, arah pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pencapaian indikator makro pembangunan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi **73,30** diarahkan melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, perluasan akses pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penguatan perlindungan sosial. Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi

sebesar **6,50 persen** didorong melalui peningkatan investasi, penguatan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pengembangan UMKM, serta hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Penurunan tingkat kemiskinan menjadi **3,75 persen** dan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi **2,80 persen** menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang didukung oleh penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar. Sementara itu, penurunan Rasio Gini menjadi **0,230** menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.

Di bidang lingkungan hidup, target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebesar **66,79** menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, memperkuat konservasi kawasan rawa, mengendalikan pencemaran lingkungan, serta meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, khususnya banjir yang masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan daerah.

Pencapaian tujuan RKPD Tahun 2027 akan dilaksanakan melalui sinergi antarperangkat daerah, dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, partisipasi masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, tujuan RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi penghubung yang efektif antara arah pembangunan jangka menengah daerah dengan implementasi program dan kegiatan tahunan yang berorientasi pada hasil (outcome).

Tabel 4.10 Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran RKPD Tahun 2027, Prioritas Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD/RKPD Tahun 2027	Indikator Sasaran	Target 2027	Perangkat Daerah Pengampu	Prioritas Pembangunan
Terwujudnya Barito Kuala SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu dan Unggul)	**Misi 1** Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	**75,10**	Dinas Kesehatan	Peningkatan Kualitas SDM
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	**64,00**	Dinas Pendidikan	Peningkatan Kualitas SDM
			Meningkatnya kerukunan sosial masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia	**88,00**	Bakesbangpol	Peningkatan Kualitas SDM
			Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	**75,00**	Dinas Sosial	Peningkatan Kualitas SDM
Terwujudnya Barito Kuala SATU	**Misi 2** Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	**3,75**	Multi-Sektoral	Penguatan Ekonomi Daerah
			Meningkatnya kontribusi sektor unggulan	Rasio PDRB Sektor Unggulan terhadap Total	**43,00**	BPS/Bapperida	Penguatan Ekonomi Daerah

				PDRB			
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	**38,50**	BPS	Penguatan Ekonomi Daerah
			Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	**73,70**	Disnakertrans	Penguatan Ekonomi Daerah
			Meningkatnya inovasi pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	**42,00**	Bapperida	Penguatan Ekonomi Daerah
			Meningkatnya ketahanan pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	**3,80**	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Penguatan Ekonomi Daerah
			Stabilitas ekonomi daerah	Laju Inflasi (%)	**1,98**	Setda (Bagian Ekosda)	Penguatan Ekonomi Daerah
Terwujudnya Barito Kuala SATU	**Misi 3** Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Pilar Infrastruktur	**74,00**	Dinas PUPR	Infrastruktur Terintegrasi
Terwujudnya Barito Kuala SATU	**Misi 4** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan melayani	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	**75,00**	Bapperida, Inspektorat, Setda	Reformasi Tata Kelola
			Meningkatnya digitalisasi pemerintahan	**Indeks PEMDI**	**1,50**	Diskominfo	Reformasi Tata Kelola
			Terwujudnya tata	Opini BPK	**WTP**	Inspektorat	Reformasi Tata

			kelola keuangan yang akuntabel				Kelola
			Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	**75,00**	BKPP	Reformasi Tata Kelola
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	**4,49**	Bagian Organisasi Setda	Reformasi Tata Kelola
			Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Persepsi Korupsi	**78,31**	Inspektorat	Reformasi Tata Kelola
Terwujudnya Barito Kuala SATU	**Misi 5** Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Tingkat Kesiapsiagaan Bencana (%)	**100**	BPBD	Ketahanan Lingkungan dan Bencana
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Tingkat Pencemaran Lingkungan	**79,00**	Dinas Lingkungan Hidup	Ketahanan Lingkungan dan Bencana

Sumber: RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 (target tahun 2027), hasil evaluasi capaian tahun 2025, dan penyelarasan RKPD Tahun 2027.

4.1.5 Sasaran RKPD Tahun 2027

Sasaran RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 merupakan penjabaran operasional dari tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Sasaran pembangunan disusun untuk menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD melalui indikator kinerja yang terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Penetapan sasaran RKPD Tahun 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. capaian indikator sasaran RPJMD Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD;
2. evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025;
3. perkembangan indikator makro pembangunan daerah;
4. proyeksi kemampuan fiskal daerah Tahun 2027;
5. arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027; dan
6. dinamika isu strategis daerah yang berkembang.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian indikator sasaran telah berkembang sesuai arah yang diharapkan, namun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan upaya percepatan karena realisasinya masih berada di bawah target RPJMD. Di sisi lain, terdapat pula beberapa indikator yang telah melampaui target sehingga memerlukan penyesuaian target pada evaluasi RPJMD berikutnya agar tetap menantang (*stretch target*).

A. Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2027

Tabel 4.11 Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

No	Sasaran Pembangunan	Indikator Sasaran	Target 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	**75,10**	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	**64,00**	Dinas Pendidikan
3	Meningkatnya kerukunan masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia	**88,00**	Bakesbangpol

4	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	**75,00**	Dinas Sosial
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	**3,75**	Multi-Sektoral
6	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Rasio PDRB Sektor Unggulan terhadap Total PDRB	**43,00**	BPS/Bapperida
7	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	**38,50**	BPS
8	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	**73,70**	Disnakertrans
9	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	**42,00**	Bapperida
10	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Pilar Infrastruktur	**74,00**	Dinas PUPR
11	Meningkatnya ketahanan pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	**3,80**	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
12	Terjaganya stabilitas harga	Laju Inflasi (%)	**1,98**	Bagian Ekonomi Setda
13	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	**75,00**	Bapperida, Inspektorat, Setda
14	Meningkatnya kualitas pemerintahan digital	Indeks PEMDI	**1,50**	Diskominfo
15	Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel	Opini BPK	**WTP**	Inspektorat
16	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	**75,00**	BKPP
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	**4,49**	Bagian Organisasi Setda
18	Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Persepsi Korupsi	**78,31**	Inspektorat
19	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Tingkat Kesiapsiagaan Bencana (%)	**100**	BPBD
20	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	*IKLHD*	**79,00**	Dinas Lingkungan Hidup

B. Analisis Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Berdasarkan evaluasi capaian indikator sasaran Tahun 2025, sasaran pembangunan RKPD Tahun 2027 dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori sebagai berikut.

1. Sasaran yang Memerlukan Percepatan Pencapaian

Beberapa indikator masih menunjukkan capaian yang berada di bawah target RPJMD sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat pada Tahun 2027, yaitu:

- Usia Harapan Hidup (UHH);
- Indeks Pendidikan;
- Indeks Harmoni Indonesia;
- Indeks Kesejahteraan Sosial;
- Tingkat Kemiskinan;
- Rasio PDRB Sektor Unggulan terhadap Total PDRB;
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
- Pilar Infrastruktur;
- Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan; dan
- Nilai SAKIP.

Untuk indikator-indikator tersebut diperlukan penguatan sinergi lintas perangkat daerah, peningkatan efektivitas program prioritas, penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta optimalisasi dukungan pembiayaan pembangunan.

2. Sasaran yang Berkembang Sesuai Jalur Pencapaian

Beberapa indikator menunjukkan perkembangan yang relatif sesuai dengan target RPJMD sehingga kebijakan pada Tahun 2027 diarahkan pada upaya menjaga konsistensi pencapaian, antara lain:

- PDRB Per Kapita;
- Laju Inflasi;
- Opini BPK;
- Indeks Pelayanan Publik; dan
- Tingkat Kesiapsiagaan Bencana.

3. Sasaran yang Memerlukan Peninjauan Target

Hasil evaluasi Tahun 2025 menunjukkan terdapat indikator yang realisasinya telah melampaui target RPJMD Tahun 2027, yaitu:

- Indeks Inovasi Daerah;
- Indeks Profesionalitas ASN; dan
- Indeks Persepsi Korupsi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam RPJMD relatif konservatif sehingga pada saat evaluasi RPJMD perlu dipertimbangkan penyesuaian target agar lebih menantang dan mampu mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

C. Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran Tahun 2027

Untuk memastikan seluruh sasaran pembangunan dapat dicapai sesuai target RPJMD, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
2. mempercepat penurunan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan perlindungan sosial;
3. memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah, khususnya pertanian, perikanan, dan UMKM;
4. meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan dasar;
5. memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas, digitalisasi pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik;
6. meningkatkan kapasitas inovasi daerah dan profesionalitas aparatur sipil negara; serta
7. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana.

Dengan arah kebijakan tersebut, sasaran RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan target pembangunan nasional.

4.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

Tema dan prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027. Penetapan tema pembangunan dilakukan sebagai bentuk penahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 pada tahun ketiga pembangunan, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025, perkembangan indikator makro daerah, isu strategis pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta sinkronisasi dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Penentuan tema pembangunan juga memperhatikan berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi Kabupaten Barito Kuala, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penurunan kemiskinan, penguatan daya saing ekonomi daerah, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pengendalian banjir, peningkatan investasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis digital.

Selain itu, tema pembangunan Tahun 2027 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator makro daerah, yaitu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 dirumuskan sebagai berikut.

4.4 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027

Tema RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 adalah:

"Penguatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Investasi serta Infrastruktur Terintegrasi."

Tema tersebut menggambarkan arah pembangunan Kabupaten Barito Kuala pada tahun ketiga RPJMD yang difokuskan pada penguatan kualitas manusia sebagai modal utama pembangunan, percepatan investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas wilayah, pelayanan dasar, dan daya saing daerah.

Tema pembangunan tersebut juga telah diselaraskan dengan:

- Tema RKP Tahun 2027: *Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri*.
- Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027: *Penguatan Sumber Daya Manusia dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas*.
- Tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Dengan demikian, tema pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 memiliki kesinambungan vertikal dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta kesinambungan horizontal dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala.

Makna Tema Pembangunan

Tema pembangunan Tahun 2027 memiliki makna strategis sebagai berikut.

a. Penguatan Sumber Daya Manusia

Penguatan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kompetensi tenaga kerja, karakter masyarakat yang religius dan harmonis, perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan kualitas SDM menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing daerah.

b. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyederhanaan pelayanan perizinan, pengembangan kawasan strategis, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan UMKM, serta peningkatan kemitraan dengan dunia usaha.

c. Infrastruktur Terintegrasi

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendukung kawasan produksi pertanian dan perikanan, meningkatkan akses pelayanan dasar, memperkuat kawasan permukiman, mengurangi kesenjangan wilayah, serta mendukung pengembangan investasi daerah.

4.2.2 Fokus Pembangunan Tahun 2027

Untuk mengimplementasikan tema pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan lima fokus pembangunan Tahun 2027.

Fokus I Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Difokuskan pada:

- peningkatan mutu pendidikan;
- peningkatan pelayanan kesehatan;
- percepatan penurunan stunting;
- peningkatan kesejahteraan sosial;
- peningkatan kualitas tenaga kerja;
- penguatan karakter religius dan harmonis.

Fokus II Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Difokuskan pada:

- modernisasi pertanian;
- pengembangan perikanan;
- hilirisasi komoditas unggulan;
- penguatan UMKM;
- peningkatan investasi;
- penciptaan lapangan kerja.

Fokus III Infrastruktur Terintegrasi

Difokuskan pada:

- pembangunan jalan dan jembatan;
- rehabilitasi jaringan irigasi;
- pengembangan air minum;
- sanitasi;
- perumahan dan kawasan permukiman;
- konektivitas kawasan strategis.

Fokus IV Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

Difokuskan pada:

- implementasi SPBE/PEMDI;
- reformasi birokrasi;
- peningkatan SAKIP;
- peningkatan kualitas pelayanan publik;
- penguatan inovasi daerah.

Fokus V Ketahanan Lingkungan Hidup dan Bencana

Difokuskan pada:

- pengendalian banjir;
- rehabilitasi kawasan rawa;
- pengelolaan sampah;
- konservasi lingkungan;
- mitigasi bencana;
- adaptasi perubahan iklim.

4.5 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 untuk Mencapai Target Indikator Tujuan dan Sasaran

Prioritas pembangunan daerah merupakan fokus penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2027 yang ditetapkan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Penetapan prioritas pembangunan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025, capaian indikator sasaran RPJMD, isu strategis daerah, kemampuan keuangan daerah, serta sinkronisasi dengan RKP Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027.

Prioritas pembangunan tersebut juga mempertimbangkan tingkat urgensi penyelesaian permasalahan pembangunan daerah, terutama pada indikator yang realisasinya masih berada di bawah target RPJMD, seperti Usia Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Tingkat Kemiskinan, Rasio PDRB Sektor Unggulan, Pilar Infrastruktur, Nilai SAKIP, serta indikator ketahanan pangan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan Tahun 2027 difokuskan pada upaya percepatan pencapaian target indikator sasaran melalui program-program prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan **lima Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027**, yaitu:

Prioritas 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul

Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, penguatan karakter masyarakat yang religius dan harmonis, peningkatan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum aman melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), rehabilitasi jaringan perpipaan, peningkatan kualitas pelayanan BUMD Air Minum, optimalisasi sumber air baku, serta perluasan cakupan pelayanan pada kawasan perkotaan dan perdesaan, sehingga mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), SDGs Tujuan 6, dan target RPJMN Tahun 2025–2029

Tabel 4.12 Capaian Pelayanan Air Minum Kabupaten Barito Kuala

Indikator	2024	2025	Perubahan	Catatan
Sambungan Rumah (SR) Baru	1.256	555	-55,8%	Penurunan perlu menjadi evaluasi kapasitas pendanaan dan pembangunan jaringan SPAM
Indikator RPJMD	Akses Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	-	Diselaraskan menjadi **Akses Air Minum Aman** mulai RKPD 2027
Arah Kebijakan 2027	-	-	-	Perluasan SPAM, peningkatan kualitas layanan, rehabilitasi jaringan, dan peningkatan akses air minum aman

Prioritas ini mendukung pencapaian indikator sasaran:

- Usia Harapan Hidup (75,10 tahun)
- Indeks Pendidikan (64,00)
- Indeks Harmoni Indonesia (88,00)
- Indeks Kesejahteraan Sosial (75,00)

Prioritas 2

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah

Prioritas ini diarahkan pada penguatan struktur ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penguatan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan kesempatan kerja, serta penguatan ketahanan pangan.

Prioritas ini mendukung pencapaian indikator sasaran:

- Tingkat Kemiskinan (3,75%)
- Rasio PDRB Sektor Unggulan terhadap Total PDRB (43,00%)
- PDRB Per Kapita (Rp38,50 juta)
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (73,70%)
- Indeks Inovasi Daerah (42,00)
- Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (3,80%)
- Laju Inflasi (1,98%)

Prioritas 3 Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah

Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas wilayah, pelayanan publik, kawasan produksi, kawasan strategis, dan investasi. Fokus pembangunan meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jaringan irigasi, penyediaan air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman, serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi daerah.

Prioritas ini mendukung pencapaian indikator:

- Pilar Infrastruktur (74,00)

Selain itu, prioritas ini juga berkontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas wilayah, efisiensi distribusi barang dan jasa, pengurangan biaya logistik, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Prioritas 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, adaptif, dan berbasis digital melalui reformasi birokrasi, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan akuntabilitas kinerja, peningkatan

profesionalitas ASN, penguatan integritas penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Prioritas ini mendukung pencapaian indikator sasaran:

- Nilai SAKIP (75,00)
- Indeks PEMDI (1,50)
- Opini BPK (WTP)
- Indeks Profesionalitas ASN (75,00)
- Indeks Pelayanan Publik (4,49)
- Indeks Persepsi Korupsi (78,31)

Prioritas 5 Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan

Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, meningkatkan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, pengendalian banjir, rehabilitasi kawasan rawa, pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan, konservasi sumber daya alam, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Prioritas ini mendukung pencapaian indikator sasaran:

- Tingkat Kesiapsiagaan Bencana (100%)
- Tingkat Pencemaran Lingkungan (79,00) *(atau disesuaikan menjadi IKLHD apabila indikator RPJMD direvisi)*

Tabel 4.13 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

Prioritas Pembangunan	Sasaran yang Didukung	Indikator Kinerja Utama	Perangkat Daerah Koordinator
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Peningkatan kualitas SDM	UHH, Indeks Pendidikan, Indeks Harmoni Indonesia, Indeks Kesejahteraan Sosial	Bapperida, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bakesbangpol
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah	Pertumbuhan ekonomi inklusif dan penurunan kemiskinan	Kemiskinan, Rasio PDRB Sektor Unggulan, PDRB Per Kapita, TPAK, Indeks Inovasi Daerah, Ketahanan Pangan, Inflasi	Bapperida, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Disnakertrans, DPMPTSP, Diskoperindag
3. Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah	Pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Pilar Infrastruktur	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	SAKIP, Indeks PEMDI, Opini BPK, IPA ASN, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Persepsi Korupsi	Setda, Bapperida, Inspektorat, Diskominfo, BKPP
5. Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan	Ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Tingkat Kesiapsiagaan Bencana, Tingkat Pencemaran Lingkungan	BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR

Tabel 4.14 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

Prioritas Nasional (RKP 2027)	Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan 2027	Prioritas Kabupaten Barito Kuala 2027	Sasaran RPJMD yang Didukung	Indikator Sasaran Utama	Program Prioritas Daerah
Penguatan Produktivitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Meningkatnya kualitas SDM	Usia Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Harmoni Indonesia, Indeks Kesejahteraan Sosial	Peningkatan mutu pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, perlindungan sosial, peningkatan kompetensi tenaga kerja
Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Industri	Penguatan Ekonomi dan Investasi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan, Rasio PDRB Sektor Unggulan, PDRB Per Kapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Inovasi Daerah, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Laju Inflasi	Modernisasi pertanian, pengembangan perikanan, hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, ketahanan pangan
Pembangunan Infrastruktur Berkualitas	Infrastruktur Berkualitas dan Konektivitas Wilayah	Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Pilar Infrastruktur	Pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi irigasi, penyediaan air minum, sanitasi, kawasan permukiman, konektivitas kawasan strategis
Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP, Indeks PEMDI, Opini BPK, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Persepsi Korupsi	Reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, implementasi SPBE/PEMDI, peningkatan pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja

Ketahanan Lingkungan Hidup dan Adaptasi Perubahan Iklim	Ketahanan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	**Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan**	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah	Tingkat Kesiapsiagaan Bencana, Tingkat Pencemaran Lingkungan*	Pengendalian banjir, rehabilitasi kawasan rawa, pengelolaan persampahan, konservasi lingkungan, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim

Sumber: RKP Tahun 2027, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027, RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, dan hasil penyelarasan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027.

Matriks sinkronisasi tersebut menunjukkan bahwa seluruh prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 telah dirumuskan secara konsisten dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap prioritas pembangunan daerah tidak hanya mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan serta target pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RKP Tahun 2027.

Prioritas **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul** mendukung agenda nasional peningkatan produktivitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan karakter masyarakat. Prioritas **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah** diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, peningkatan investasi, hilirisasi komoditas, dan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya, **Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah** menjadi instrumen utama dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing wilayah.

Di sisi tata kelola, prioritas **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik** berfokus pada reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun prioritas **Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan** diarahkan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan keterkaitan tersebut, RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 memiliki konsistensi yang kuat dengan dokumen perencanaan pada tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Hal ini menjadi dasar bagi penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah pada subbab berikutnya, sehingga setiap kebijakan dan program prioritas memiliki hubungan yang jelas dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai.

4.6 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah merupakan pedoman strategis yang memberikan arah bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Arah kebijakan disusun sebagai penjabaran dari tema pembangunan daerah, prioritas pembangunan, hasil evaluasi RKPD Tahun 2025, isu strategis pembangunan, kemampuan

keuangan daerah, serta sinkronisasi dengan RKP Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027.

Sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, pembangunan Tahun 2027 diarahkan pada percepatan pencapaian indikator sasaran yang masih memerlukan peningkatan kinerja, khususnya pada aspek kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, reformasi tata kelola pemerintahan, serta peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan hidup.

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2027 juga mengedepankan prinsip pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, berbasis kinerja (*performance based development*), serta berorientasi pada hasil (*outcome oriented*), sehingga setiap program pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan daerah dijabarkan berdasarkan lima prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027.

4.3.1 Arah Kebijakan Prioritas I

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul

Arah Kebijakan

Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan akses, mutu, pemerataan, dan daya saing pendidikan serta kesehatan. Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan pada penguatan karakter masyarakat yang religius, harmonis, produktif, serta memiliki kompetensi yang mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan dunia kerja.

Kebijakan ini menjadi prioritas karena hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan bahwa beberapa indikator pembangunan manusia, seperti **Usia Harapan Hidup**, **Indeks Pendidikan**, dan **Indeks Kesejahteraan Sosial**, masih berada di bawah target RPJMD sehingga memerlukan percepatan melalui intervensi lintas sektor.

Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi aman melalui pembangunan dan rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta integrasi program sanitasi dengan percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

Strategi Kebijakan

Strategi yang ditempuh meliputi:

- peningkatan mutu pendidikan dasar;
- pemerataan akses pendidikan;
- penguatan pendidikan karakter;
- peningkatan kompetensi guru;
- peningkatan pelayanan kesehatan primer;
- percepatan penurunan stunting;
- peningkatan gizi masyarakat;
- penguatan jaminan kesehatan;
- peningkatan perlindungan sosial;
- peningkatan kualitas tenaga kerja;
- peningkatan kerukunan umat beragama;
- penguatan peran keluarga.
- Penguatan Pembangunan Kepemudaan
- Penguatan Karakter Masyarakat melalui Kebudayaan dan Nilai Keagamaan
- Peningkatan Literasi Digital Masyaraka
- Penguatan Pembangunan Keluarga Berkualitas

Outcome yang Diharapkan

- meningkatnya IPM;
- meningkatnya UHH;
- meningkatnya Indeks Pendidikan;
- meningkatnya Indeks Kesejahteraan Sosial;
- meningkatnya Indeks Harmoni Indonesia.

4.3.2 Arah Kebijakan Prioritas II

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah

Arah Kebijakan

Pembangunan ekonomi diarahkan pada transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, perdagangan, UMKM, serta peningkatan investasi. Kebijakan ini bertujuan

memperkuat struktur ekonomi daerah, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi juga difokuskan pada pengembangan kawasan produksi, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan rantai pasok, digitalisasi pemasaran, serta peningkatan kemudahan berusaha.

a. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (*skills mismatch*) antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Pengembangan kompetensi difokuskan pada sektor-sektor unggulan Kabupaten Barito Kuala, yaitu **pertanian pasang surut, perikanan budidaya, perdagangan, jasa, logistik, agroindustri, serta kawasan peri-urban Banjarbakula**.

Program pelatihan kerja akan menggunakan pendekatan **link and match** dengan kebutuhan pasar kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, pemagangan industri, inkubasi wirausaha, serta peningkatan produktivitas pekerja informal.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

b. Bidang Koperasi dan UMKM

Pengembangan koperasi dan UMKM diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, modernisasi tata kelola usaha, peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi pemasaran, sertifikasi produk, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Hilirisasi komoditas unggulan daerah menjadi fokus utama melalui pengembangan usaha pengolahan **beras Anjir, jeruk siam, nenas, ikan air tawar, serta produk olahan pertanian lainnya** sehingga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi masyarakat.

Pendampingan UMKM akan dilakukan secara terpadu mulai dari produksi, pengemasan, legalitas usaha (NIB, PIRT, Halal), pemasaran digital, hingga akses terhadap pembiayaan dan kemitraan usaha.

c. Bidang Perdagangan

Pembangunan perdagangan diarahkan pada penguatan sistem distribusi barang dan logistik daerah melalui peningkatan sarana perdagangan, revitalisasi pasar rakyat, pengembangan dermaga distribusi, peningkatan konektivitas jalan menuju sentra produksi, serta penguatan perdagangan antarwilayah.

Pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas melalui penguatan **Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)** dan pelaksanaan **Strategi Pengendalian Harga Pangan (SP2KP)**, sehingga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga.

Prioritas pembangunan perdagangan lebih diarahkan pada peningkatan efisiensi rantai pasok dibandingkan orientasi ekspor langsung, mengingat karakteristik Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah produsen pangan dan pemasok utama kawasan Banjarbakula.

d. Bidang Perindustrian

Pengembangan industri diarahkan pada percepatan hilirisasi komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan melalui pengembangan industri pengolahan skala kecil dan menengah.

Prioritas industri meliputi:

- pengeringan dan penggilingan padi modern;
- industri olahan jeruk siam;
- industri olahan nenas;
- pengolahan ikan air tawar;
- pengolahan hasil peternakan.

Selain itu dilakukan modernisasi peralatan produksi, penerapan standar mutu, sertifikasi produk, serta penguatan kemitraan industri dengan UMKM sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.

e. Bidang Kelautan dan Perikanan

Pengembangan sektor perikanan diarahkan sesuai hasil **Rakortekbang Tahun 2026** melalui peningkatan budidaya perikanan, penyediaan benih unggul, sarana budidaya, peningkatan kapasitas pembudidaya dan nelayan, serta penguatan kelembagaan usaha perikanan.

Pengembangan hilirisasi dilakukan melalui pembangunan unit pengolahan ikan, pengembangan rantai dingin (*cold chain*), peningkatan mutu hasil perikanan, serta penguatan pemasaran produk perikanan.

f. Bidang Perkebunan dan Peternakan

Pembangunan perkebunan dan peternakan diarahkan pada peningkatan produktivitas komoditas unggulan melalui penyediaan bibit unggul, pengembangan pakan lokal, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian penyakit ternak, serta peningkatan kualitas bibit.

Di bidang peternakan juga dikembangkan hilirisasi produk melalui pengolahan susu, daging, telur, serta produk turunannya guna meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar, dan mendukung ketahanan pangan daerah.

g. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mendukung program nasional **Swasembada Pangan** melalui peningkatan produktivitas lahan rawa pasang surut, rehabilitasi jaringan irigasi, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, peningkatan indeks pertanaman (IP), optimalisasi lahan rawa, diversifikasi komoditas pangan, serta penguatan kelembagaan petani.

Selain peningkatan produksi, pembangunan pertanian juga diarahkan pada penguatan hilirisasi padi dan hortikultura, penyediaan sarana pascapanen, pengembangan gudang penyimpanan, pengering gabah, dan rice milling modern sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Kebijakan tersebut juga mendukung pengendalian inflasi pangan melalui peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan.

h. Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengembangan investasi diarahkan melalui penyusunan **Investment Project Ready to Offer (IPRO)** yang memuat proyek-proyek investasi siap ditawarkan pada sektor agroindustri, perikanan, logistik, kawasan pergudangan, dan pengembangan kawasan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan memperkuat kemudahan berusaha melalui digitalisasi pelayanan perizinan berbasis **Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)**, percepatan penyelesaian perizinan, penyediaan data potensi investasi yang komprehensif, serta penguatan promosi investasi berbasis potensi lokal.

i. Bidang Pariwisata

Pengembangan pariwisata diarahkan pada pengembangan destinasi berbasis potensi lokal yang meliputi:

- wisata sungai;
- wisata rawa;
- wisata agro jeruk siam;
- wisata agro nenas;
- wisata budaya Banjar;
- desa wisata;
- ekonomi kreatif.

Pengembangan tersebut didukung melalui peningkatan aksesibilitas kawasan wisata, penyediaan sanitasi dan homestay, peningkatan kualitas SDM pariwisata, pengembangan kalender event daerah, promosi digital, serta penguatan kemitraan dengan pelaku ekonomi kreatif.

Keberhasilan pembangunan pariwisata diukur melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, peningkatan lama tinggal wisatawan, peningkatan belanja wisatawan, serta peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Tabel 4.15 Arah Kebijakan Prioritas II Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah

Urusan	Fokus Arah Kebijakan 2027	Outcome
Tenaga Kerja	Link and Match, pelatihan berbasis pasar kerja	TPT menurun, penempatan tenaga kerja meningkat
Koperasi & UMKM	Digitalisasi, pembiayaan, sertifikasi, hilirisasi	UMKM naik kelas
Perdagangan	TPID, SP2KP, pasar rakyat, logistic	Inflasi terkendali
Perindustrian	Hilirisasi agroindustry	Nilai tambah meningkat
Perikanan	Budidaya, cold chain, hilirisasi	Produksi dan pendapatan nelayan meningkat
Peternakan	Bibit unggul, pakan lokal, kesehatan hewan	Produktivitas ternak meningkat

Pertanian	Swasembada pangan, irigasi, mekanisasi	Produksi padi meningkat
Penanaman Modal	OSS-RBA, IPRO, promosi investasi	Investasi meningkat
Pariwisata	Wisata sungai, agro, budaya, ekonomi kreatif	Kunjungan wisatawan dan PAD meningkat

Strategi Kebijakan

- modernisasi pertanian;
- peningkatan produktivitas padi;
- pengembangan kawasan pertanian terpadu;
- hilirisasi hasil pertanian;
- pengembangan perikanan budidaya;
- penguatan UMKM;
- peningkatan investasi;
- pengembangan kawasan industri;
- peningkatan ketahanan pangan;
- penciptaan lapangan kerja;
- penguatan koperasi.

Outcome yang Diharapkan

- meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
- meningkatnya PDRB per kapita;
- meningkatnya kontribusi sektor unggulan;
- menurunnya kemiskinan;
- meningkatnya TPAK;
- meningkatnya investasi.

4.3.3 Arah Kebijakan Prioritas III

Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah

Arah Kebijakan

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat kawasan produksi, memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan pelayanan dasar, serta mendukung pengembangan kawasan strategis daerah.

Pembangunan infrastruktur dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek pemerataan wilayah, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan keberlanjutan lingkungan.

Meningkatkan kualitas infrastruktur sanitasi, drainase perkotaan, dan pengendalian genangan melalui pembangunan jaringan air limbah domestik, rehabilitasi sistem drainase, peningkatan pelayanan pengolahan air limbah domestik, serta pengembangan infrastruktur permukiman yang berkelanjutan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum.

Dalam rangka memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur jalan Tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kemantapan jalan kabupaten melalui rekonstruksi ruas jalan dengan kondisi rusak berat, peningkatan jalan produksi dan jalan usaha tani, serta pembangunan konektivitas menuju sentra pertanian, kawasan industri, pusat distribusi, dan kawasan permukiman.

Prioritas pembangunan diarahkan pada ruas-ruas strategis yang menghubungkan **sentra produksi padi di Kecamatan Tamban, Tabunganen, dan Alalak** menuju pusat pengumpulan hasil panen, penggilingan padi, kawasan pergudangan, serta jaringan distribusi menuju Kota Banjarmasin dan wilayah Banjarbakula. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi komoditas pertanian, meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan, serta memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai sektor basis Kabupaten Barito Kuala.

Selain itu, pembangunan jalan juga diintegrasikan dengan peningkatan akses menuju kawasan pendidikan, fasilitas kesehatan, sentra UMKM, kawasan permukiman, serta kawasan strategis pengembangan investasi. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan antarwilayah, peningkatan investasi, dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar **6,50 persen** pada Tahun 2027.

Tabel 4.16 Prioritas Pengembangan Infrastruktur Jalan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

Fokus Prioritas	Lokasi Prioritas	Sasaran	Dukungan terhadap Pro-SN
Rekonstruksi jalan rusak berat	Ruas jalan kabupaten pada kawasan produksi	Meningkatkan kemantapan jalan	Pengembangan Wilayah
Peningkatan jalan usaha tani	Kecamatan Tamban	Memperlancar distribusi hasil panen	Ketahanan Pangan

Peningkatan jalan usaha tani	Kecamatan Tabunganen	Menurunkan biaya logistik pertanian	Ketahanan Pangan
Peningkatan jalan usaha tani	Kecamatan Alalak	Mendukung kawasan penyangga Banjarbakula	Pertumbuhan Ekonomi
Peningkatan konektivitas kawasan ekonomi	Sentra perdagangan, pergudangan, dan industri	Meningkatkan investasi dan distribusi barang	Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program prioritas pembangunan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan kebijakan untuk memperkuat **Readiness Criteria (RC)** setiap usulan pembangunan melalui penyediaan lahan yang siap dibangun (*land ready*). Kebijakan ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap usulan proyek strategis kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat telah didukung oleh status kepemilikan lahan yang jelas, kesesuaian dengan RTRW, bebas dari sengketa, serta kelengkapan dokumen administrasi pertanahan.

Kebijakan tersebut diprioritaskan pada proyek-proyek strategis daerah, antara lain pembangunan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum, sanitasi, kawasan permukiman, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kawasan industri, kawasan pertanian, serta infrastruktur pendukung investasi. Dengan kesiapan lahan yang memadai, diharapkan pelaksanaan proyek dapat berlangsung lebih efektif, mempercepat realisasi investasi pemerintah, dan meningkatkan peluang memperoleh dukungan pembiayaan dari APBD Provinsi, APBN, DAK, Inpres, maupun skema KPBU.

Tabel 4.17 Penguatan Readiness Criteria (RC) Proyek Prioritas Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

Komponen RC	Kondisi yang Diharapkan	Penanggung Jawab
Kesesuaian RTRW	Lokasi sesuai RTRW/RDTR	DPUPR
Status Kepemilikan Lahan	Tanah bersertifikat atau memiliki legalitas yang jelas	Badan Pengelola Keuangan danAset Daerah, Disperkim, Kantor Pertanahan
Bebas Sengketa	Tidak terdapat konflik atau sengketa pertanahan	Bagian Hukum, Kecamatan, Desa
Dokumen Perencanaan	DED, FS, atau dokumen teknis tersedia sesuai kebutuhan	OPD Pengusul
Kesiapan Pendanaan	Dukungan APBD, APBN, DAK, KPBU atau sumber lain	BPKAD dan Bapperida
Perizinan	Persetujuan lingkungan dan perizinan teknis tersedia	OPD terkait

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui percepatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengurangan backlog perumahan, penanganan kawasan kumuh secara terpadu, serta pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Penyediaan **Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)** diprioritaskan pada kawasan pertumbuhan baru, terutama kawasan permukiman di Kecamatan **Alalak**, kawasan perkotaan **Marabahan**, serta kawasan strategis lainnya yang berkembang sebagai bagian dari kawasan penyangga Banjarbakula. Penyediaan PSU meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase, jaringan air minum, sanitasi, penerangan jalan umum, ruang terbuka hijau, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum sehingga kawasan permukiman baru berkembang secara layak, sehat, aman, dan berkelanjutan.

Kebijakan tersebut juga mendukung pencapaian target nasional dalam pengurangan backlog perumahan, peningkatan akses rumah layak huni, pengurangan kawasan kumuh, serta pelaksanaan **Program Strategis Nasional (Pro-SN)** di bidang pengembangan wilayah, pelayanan dasar, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Tabel 4.18 Arah Kebijakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2027

Fokus Prioritas	Arah Kebijakan	Dukungan Nasional
Rumah Layak Huni	Rehabilitasi RTLH dan peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah	Pengurangan backlog perumahan
Pengurangan Backlog	Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui kolaborasi pemerintah dan swasta	RPJMN 2025–2029
Penanganan Kawasan Kumuh	Penataan lingkungan permukiman secara terpadu berbasis infrastruktur dasar	Target pengurangan kawasan kumuh nasional
Penyediaan PSU	Jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, PJU, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum	Pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan
Kawasan Pertumbuhan Baru	Prioritas pada kawasan pengembangan permukiman baru dan kawasan strategis daerah	Pengembangan wilayah dan Banjarbakula

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan memastikan bahwa target pembangunan rumah layak huni, pengurangan backlog perumahan, penanganan kawasan kumuh, serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dalam RKPD Tahun 2027 diselaraskan dengan target RPJMN Tahun 2025–2029, RKP Tahun 2027, serta kebijakan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga mendukung pencapaian indikator nasional *bidang perumahan dan kawasan permukiman secara terintegrasi.*

Pengembangan sistem transportasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diarahkan pada peningkatan keterpaduan jaringan transportasi darat dan transportasi sungai sebagai satu kesatuan sistem konektivitas wilayah. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui revitalisasi trayek angkutan yang potensial, peningkatan pelayanan angkutan umum, pengembangan simpul transportasi, serta integrasi moda transportasi darat dan sungai untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memprioritaskan peningkatan keselamatan pelayaran sungai melalui pemasangan dan rehabilitasi **rambu-rambu sungai, tanda alur pelayaran, serta fasilitas keselamatan navigasi**, terutama pada jalur distribusi hasil pertanian, kawasan sentra produksi pangan, serta wilayah yang masih bergantung pada transportasi sungai. Kebijakan tersebut mendukung penguatan sistem logistik daerah, menurunkan biaya distribusi, serta mendukung pelaksanaan **Program Strategis Nasional (Pro-SN)** pada bidang ketahanan pangan, pengembangan wilayah, dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.19 Arah Kebijakan Pengembangan Transportasi Tahun 2027

Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Arah Kebijakan RKPD 2027
Trayek angkutan aktif masih terbatas	6 dari 24 trayek aktif	Revitalisasi trayek potensial dan peningkatan pelayanan angkutan umum
Belum terintegrasinya moda darat dan sungai	Sistem transportasi masih berjalan sendiri-sendiri	Integrasi konektivitas moda darat–sungai
Keselamatan pelayaran sungai	Rambu dan sarana navigasi masih terbatas	Penambahan rambu sungai, tanda alur pelayaran, dan fasilitas keselamatan
Distribusi logistik hasil pertanian	Biaya logistik masih relatif tinggi	Penguatan transportasi logistik menuju sentra produksi dan pusat distribusi

Strategi Kebijakan

- pembangunan jalan kabupaten;
- rehabilitasi jalan;
- pembangunan jembatan;
- peningkatan irigasi;
- pembangunan SPAM;

- sanitasi;
- kawasan permukiman;
- penataan kawasan strategis;
- infrastruktur digital;
- peningkatan transportasi.

Outcome

- meningkatnya Pilar Infrastruktur;
- meningkatnya konektivitas wilayah;
- meningkatnya akses pelayanan dasar;
- meningkatnya daya saing daerah.

5.3.4 Arah Kebijakan Prioritas IV

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi dalam mendukung pencapaian seluruh prioritas pembangunan daerah melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas aparatur sipil negara, transformasi digital pemerintahan, serta penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

Pada Tahun 2027, arah kebijakan Prioritas IV diarahkan untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi yang berdampak melalui peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan pemerintahan digital, serta peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat transformasi birokrasi menuju birokrasi yang lincah (*agile bureaucracy*), adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan memperkuat implementasi **Satu Data Indonesia** melalui optimalisasi Portal Satu Data Daerah, Forum Satu Data Indonesia (Forum SDI), peningkatan kualitas

data statistik sektoral, penguatan validata dan produsen data, serta pengembangan **Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah**. Pemanfaatan informasi geospasial akan diintegrasikan dalam proses perencanaan pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang, pengambilan keputusan berbasis lokasi, serta evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan **lima pilar Infrastruktur Informasi Geospasial**, yaitu kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan **Indeks Bhumandala** sebagai salah satu komponen penilaian **Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Indeks PEMDI)**.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga akan memperkuat kualitas akuntabilitas kinerja melalui penyelarasan dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penguatan implementasi **SAKIP** dilakukan melalui peningkatan kualitas indikator kinerja, penguatan pengendalian pembangunan, evaluasi berbasis hasil (*result-based management*), serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi.

Di bidang pelayanan publik, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi pelayanan dilakukan melalui digitalisasi layanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan standar pelayanan, penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik dan pelayanan terpadu berbasis elektronik.

Penguatan kapasitas aparatur sipil negara juga menjadi fokus utama melalui peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan digital, pengembangan budaya kerja berorientasi pelayanan, penerapan sistem merit, penguatan integritas aparatur, serta peningkatan profesionalisme ASN. Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan **Indeks Profesionalitas ASN**, **Indeks Pelayanan Publik**, dan **Indeks Persepsi Korupsi**.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan mendorong budaya inovasi pada seluruh perangkat daerah melalui pengembangan inovasi pelayanan publik, digitalisasi proses bisnis pemerintahan, serta penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Inovasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menargetkan peningkatan **Nilai SAKIP**, **Indeks PEMDI**, **Indeks SPBE**, **Indeks Profesionalitas ASN**,

Indeks Pelayanan Publik, **Indeks Persepsi Korupsi**, serta **Indeks Inovasi Daerah**, sehingga tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas dapat menjadi pengungkit utama dalam pencapaian seluruh sasaran pembangunan daerah Tahun 2027.

Tabel 4.20 Arah Kebijakan Prioritas IV Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas
Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan	Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP	Penguatan SAKIP, Reformasi Birokrasi, Pengendalian Kinerja
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Digitalisasi pelayanan dan penyederhanaan proses bisnis	SPBE, Mal Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu
Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital	Pengembangan SPBE, Indeks PEMDI, dan transformasi digital	Pengembangan Sistem Pemerintahan Digital
Meningkatkan kualitas data pembangunan	Penguatan Satu Data Indonesia, Statistik Sektoral, Forum SDI, dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial	Portal Satu Data, Walidata, Informasi Geospasial
Meningkatkan profesionalisme ASN	Penguatan sistem merit, pengembangan kompetensi, dan budaya kerja	Pengembangan Kompetensi ASN
Meningkatkan inovasi daerah	Pengembangan inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Laboratorium Inovasi Daerah
Meningkatkan transparansi dan integritas	Penguatan pengawasan internal, manajemen risiko, dan pengendalian gratifikasi	Penguatan APIP dan Zona Integritas

4.3.5 Arah Kebijakan Prioritas V

Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan

Arah Kebijakan

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan, penguatan ketahanan daerah terhadap bencana, pengendalian banjir, rehabilitasi kawasan rawa, konservasi sumber daya alam, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Kebijakan ini menjadi penting mengingat Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah yang memiliki karakteristik lahan rawa dan wilayah yang rentan terhadap banjir, sehingga pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Pembangunan lingkungan hidup Tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi tutupan lahan, pengembangan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan limbah B3 secara berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan program Tahun 2025, pendekatan pembangunan bidang lingkungan hidup akan mengedepankan **mediasi, konsultasi publik, komunikasi risiko, dan edukasi lingkungan berbasis kewilayahan**, khususnya pada lokasi-lokasi yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur lingkungan. Pendekatan tersebut bertujuan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program pemerintah sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memprioritaskan peningkatan **Ruang Terbuka Hijau (RTH)** melalui penanaman pohon, rehabilitasi kawasan sempadan sungai, pengembangan taman kota, penghijauan kawasan permukiman, serta konservasi kawasan lindung sebagai upaya meningkatkan kualitas tutupan lahan dan mendukung peningkatan nilai **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**.

Tabel 4.21 Arah Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

Permasalahan	Kondisi Tahun 2025	Arah Kebijakan Tahun 2027	OPD Penanggung Jawab
Nilai IKLH belum optimal	Komponen tutupan lahan masih perlu ditingkatkan	Rehabilitasi tutupan lahan, penghijauan, peningkatan RTH	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Limbah B3	Program belum terealisasi akibat penolakan masyarakat di Desa Sungai Pitung	Pendekatan mediasi, konsultasi publik, edukasi lingkungan, penetapan lokasi secara partisipatif	Dinas Lingkungan Hidup
Ruang Terbuka Hijau	Cakupan RTH masih perlu ditingkatkan	Pengembangan taman kota, penghijauan kawasan permukiman, sempadan sungai, dan kawasan strategis	DLH, DPUPR, Disperkim
Partisipasi Masyarakat	Belum optimal	Edukasi lingkungan berbasis desa dan penguatan komunitas peduli lingkungan	DLH, Kecamatan, Desa

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menargetkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melalui penguatan kualitas tutupan lahan, perluasan ruang terbuka hijau, rehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi, serta pengelolaan lingkungan

berbasis partisipasi masyarakat. Pelaksanaan program lingkungan hidup pada Tahun 2027 akan mengedepankan pendekatan mediasi, edukasi, dan komunikasi publik sehingga setiap pembangunan infrastruktur lingkungan memperoleh dukungan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara efektif, berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target RPJMN Tahun 2025–2029, RKP Tahun 2027, dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Strategi Kebijakan

- pengendalian banjir;
- normalisasi sungai;
- rehabilitasi rawa;
- pengelolaan persampahan;
- konservasi kawasan lindung;
- peningkatan ruang terbuka hijau;
- pengurangan risiko bencana;
- peningkatan kapasitas BPBD;
- edukasi masyarakat;
- adaptasi perubahan iklim.

Outcome

- meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- meningkatnya kesiapsiagaan bencana;
- menurunnya risiko banjir;
- meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan.

4.3.4 Arah Kebijakan Prioritas IV

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Arah Kebijakan

Pemerintahan diarahkan menuju birokrasi yang profesional, adaptif, inovatif, transparan, akuntabel, dan berbasis digital melalui reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas aparatur, serta transformasi pelayanan publik.

Peningkatan tata kelola pemerintahan juga diarahkan pada penguatan kualitas perencanaan pembangunan, penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas pengawasan internal, penguatan inovasi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Strategi Kebijakan

- peningkatan SAKIP;
- implementasi Indeks PEMDI;
- reformasi birokrasi;
- penguatan SPIP;
- peningkatan profesionalitas ASN;
- digitalisasi pelayanan publik;
- peningkatan inovasi daerah;
- peningkatan kualitas perencanaan;
- penguatan pengawasan.

Outcome

- meningkatnya Nilai SAKIP;
- meningkatnya Indeks PEMDI;
- meningkatnya IPA ASN;
- meningkatnya Indeks Pelayanan Publik;
- meningkatnya Opini BPK;
- meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi.

Tabel 4.22 Matriks Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2027

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi Utama	Outcome
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	peningkatan akses dan kualitas pendidikan kesehatan, penguatan kepemudaan, pembangunan karakter berbasis kebudayaan dan nilai keagamaan, peningkatan literasi digital, serta pembangunan keluarga berkualitas	Pendidikan, kesehatan, stunting, tenaga kerja, perlindungan social, kesbangpol, kemenag, kominfo, KB, PPPA, sosial	SDM unggul dan berdaya saing
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah	Penguatan sektor unggulan, investasi, UMKM, hilirisasi	Pertanian, perikanan, UMKM, investasi, ketahanan pangan	Pertumbuhan ekonomi meningkat dan kemiskinan menurun
Meningkatkan Konektivitas dan	Pembangunan infrastruktur dasar dan	Jalan, jembatan, irigasi, air minum,	Infrastruktur berkualitas dan

Infrastruktur Daerah	konektivitas wilayah	sanitasi, permukiman	merata
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi digital	SAKIP, PEMDI, SPIP, pelayanan publik, ASN	Pemerintahan profesional, akuntabel, dan adaptif
Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan	Pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana	Pengendalian banjir, rehabilitasi rawa, konservasi, mitigasi	Daerah yang tangguh dan lingkungan yang berkelanjutan

4.7 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan instrumen utama pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Program prioritas disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025, capaian indikator sasaran RPJMD, isu strategis daerah, arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, kemampuan keuangan daerah, serta hasil sinkronisasi dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Program prioritas diarahkan pada program-program yang memiliki daya ungkit tinggi (*high leverage*) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. Selain itu, seluruh program prioritas telah diselaraskan dengan Prioritas Nasional, Program Strategis Nasional (Pro-SN), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara umum, program prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 dikelompokkan ke dalam lima prioritas pembangunan daerah. Selain 5 prioritas pembangunan daerah juga terdapat 12 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati diantaranya Instentif kaum masjid dan Guru TPA, Kawasan Industri Khusus, Pupuk Subsidi dan ATM Beras, Jalan Beton, Layanan Mobil Keliling, Kartu Beasiswa Batola, Kartu Siap Kerja, Tanah Bengkok, UMKM Baiman, Batola Respon Cepat, Desa Peduli Stunting dan Simfoni PPA dengan target terdapat pada lampiran.

4.7.1 Program Prioritas Pembangunan untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul

Prioritas pertama diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengembangan kompetensi tenaga kerja, penguatan karakter masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Program prioritas yang dilaksanakan meliputi:

- Program Pengelolaan Pendidikan;
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- Program Pemberdayaan Sosial;
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Program Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan:

- Usia Harapan Hidup;
- Indeks Pendidikan;
- Indeks Harmoni Indonesia;
- Indeks Kesejahteraan Sosial.

4.7.2 Program Prioritas Pembangunan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah

Prioritas kedua diarahkan pada penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan melalui modernisasi sektor pertanian, pengembangan perikanan, perkebunan, UMKM, investasi, ketahanan pangan, serta peningkatan produktivitas masyarakat.

Program prioritas meliputi:

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- Program Penyediaan Prasarana Pertanian;
- Program Penyuluhan Pertanian;
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- Program Pemberdayaan UMKM;
- Program Promosi Penanaman Modal;
- Program Pengembangan Perdagangan;

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- Program Penempatan Tenaga Kerja.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan:

- PDRB Per Kapita;
- Rasio PDRB Sektor Unggulan;
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
- Indeks Inovasi Daerah;
- Ketahanan Pangan;
- Penurunan Kemiskinan.

4.7.3 Program Prioritas Pembangunan untuk Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah

Prioritas ketiga diarahkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan akses pelayanan dasar, dan penguatan konektivitas wilayah.

Program prioritas meliputi:

- Program Penyelenggaraan Jalan;
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Program Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Program Pengembangan Kawasan Permukiman;
- Program Penataan Bangunan Gedung;
- Program Penyelenggaraan Perhubungan.

Program tersebut mendukung peningkatan:

- Pilar Infrastruktur;
- akses jalan mantap;
- akses air minum layak;
- akses sanitasi layak;
- konektivitas kawasan produksi.

4.7.4 Program Prioritas Pembangunan untuk Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Prioritas keempat diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, efisien, serta berbasis digital.

Program prioritas meliputi:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Program Penelitian dan Pengembangan;
- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- Program Aplikasi Informatika;
- Program Pengembangan Kompetensi ASN;
- Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan:

- Nilai SAKIP;
- Indeks PEMDI;
- Indeks Profesionalitas ASN;
- Opini BPK;
- Indeks Pelayanan Publik;
- Indeks Persepsi Korupsi.

4.7.5 Program Prioritas Pembangunan untuk Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan

Prioritas kelima diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan ketahanan daerah terhadap bencana melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Program prioritas meliputi:

- Program Pengelolaan Persampahan;
- Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
- Program Pengendalian Banjir.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan:

- Tingkat Kesiapsiagaan Bencana;
- kualitas lingkungan hidup;
- pengendalian banjir;
- ketahanan terhadap perubahan iklim.

Tabel 4.23 Matriks Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengembangan SDM	Pendidikan, Kesehatan, KB, Sosial, Pelatihan Kerja, Kesbang, Kartu Beasiswa Batola, Kartu Siap Kerja, Insentif Kaum Mesjid dan Guru TPA, Desa Pedul Stunting dan Simfoni PPA	UHH, Indeks Pendidikan, Indeks Harmoni Indonesia, Indeks Kesejahteraan Sosial	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disnaker, DPPKBP3A, Bakesbangpol, Sekretariat Daerah
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah	Penguatan sektor unggulan, investasi, UMKM, dan ketahanan pangan	Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan, UMKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Kawasan Industri Khusus, UMKM Baiman, Pupuk Subsidi dan ATM Beras, serta Tanah Bengkok	Kemiskinan, Rasio PDRB Sektor Unggulan, PDRB Per Kapita, TPAK, Indeks Inovasi Daerah, Inflasi	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, DPMPTSP, Diskoperindag, Disnakertrans, Bapperida
Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah	Pemerataan infrastruktur dan peningkatan konektivitas	Jalan, SDA, Air Minum, Sanitasi, Permukiman, Perhubungan, Jalan Beton	Pilar Infrastruktur	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi, digitalisasi, akuntabilitas, dan pelayanan publik	Penunjang Pemerintahan, Perencanaan, Litbang, Informatika, Pengawasan, Pengembangan ASN, Layanan Mobil Keliling, dan Batola Respon Cepat	SAKIP, Indeks PEMDI, IPA ASN, Opini BPK, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Persepsi Korupsi	Bapperida, Inspektorat, Diskominfo, BKPP, Setda, Dinkes, Disdukcapil, Dinsos dan BPBD
Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan	Penguatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Persampahan, Pengendalian Pencemaran, Konservasi, Penanggulangan Bencana, Pengendalian Banjir	Tingkat Kesiapsiagaan Bencana, Tingkat Pencemaran Lingkungan	DLH, BPBD, Dinas PUPR

Lingkungan				

4.7.6 Kontribusi Program Prioritas terhadap Sasaran Pembangunan

Seluruh program prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 dirancang untuk memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Program pada prioritas pertama berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan indikator pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan harmoni masyarakat. Prioritas kedua diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan.

Pada prioritas ketiga, pembangunan infrastruktur diharapkan meningkatkan konektivitas wilayah, memperluas akses pelayanan dasar, dan mendukung pengembangan kawasan strategis. Prioritas keempat memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas, digitalisasi pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, prioritas kelima diarahkan untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana, memperbaiki kualitas lingkungan hidup, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan keterkaitan tersebut, program prioritas RKPD Tahun 2027 menjadi instrumen utama untuk mencapai sasaran RPJMD sekaligus memberikan kontribusi terhadap target pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan pembangunan nasional

4.7.7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja dan Pendanaan

Program prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 merupakan instrumen implementasi kebijakan pembangunan daerah yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. Agar pelaksanaannya efektif, setiap prioritas pembangunan diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta didukung oleh pengalokasian pendanaan yang memadai.

Perencanaan program dan pendanaan dilakukan dengan menerapkan prinsip **money follows program priority**, yaitu pengalokasian anggaran diarahkan pada program-program yang memiliki kontribusi paling besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan pendekatan tersebut, keterbatasan kapasitas fiskal daerah dapat dioptimalkan melalui penentuan prioritas yang tepat, efisiensi belanja, serta penguatan

sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

Selain bersumber dari APBD Kabupaten Barito Kuala, pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2027 juga didukung melalui berbagai sumber pembiayaan lainnya, seperti Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi, hibah pemerintah, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta bentuk pembiayaan inovatif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin keterpaduan antara prioritas pembangunan, arah kebijakan, program prioritas, dan pendanaan, disusun matriks keterkaitan sebagai berikut.

Tabel 4.24 Matriks Keterkaitan Prioritas Pembangunan, Program Prioritas, Indikator Sasaran, Perangkat Daerah, dan Pendanaan Tahun 2027

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Sasaran yang Didukung	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Sumber Pendanaan
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kompetensi SDM	Meningkatnya kualitas SDM	Pendidikan, Kesehatan, KB, Sosial, Pelatihan Kerja, Kesbang, Kartu Beasiswa Batola, Kartu Siap Kerja, Insentif Kaum Mesjid dan Guru TPA, Desa Pedul Stunting dan Simfoni PPA	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disnaker, DPPKBP3A, Bakesbangpol, Sekretariat Daerah	APBD, DAK, TKD, Bantuan Keuangan Provinsi, BLUD, CSR
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah	Penguatan sektor unggulan, investasi, UMKM, ketahanan pangan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan, UMKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Kawasan Industri Khusus, UMKM Baiman, Pupuk Subsidi dan ATM Beras, serta Tanah Bengkok	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, DPMPTSP, Diskoperindag, Disnakertrans, Bapperida	APBD, DAK, APBN, KPBU, CSR, Investasi Swasta
3. Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah	Pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Jalan, SDA, Air Minum, Sanitasi, Permukiman, Perhubungan, Jalan Beton	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan	APBD, DAK Fisik, APBN, KPBU, Bantuan Keuangan Provinsi
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, peningkatan pelayanan public	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Penunjang Pemerintahan, Perencanaan, Litbang, Informatika, Pengawasan, Pengembangan ASN, Layanan Mobil Keliling, dan Batola Respon Cepat	Bapperida, Inspektorat, Diskominfo, BKPP, Setda, Dinkes, Disdukcapil, Dinsos dan BPBD	APBD, Dana Insentif Fiskal, Hibah Pemerintah

5. Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan	Pengurangan risiko bencana dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya ketahanan daerah dan kualitas lingkungan	Persampahan, Pengendalian Pencemaran, Konservasi, Penanggulangan Bencana, Pengendalian Banjir	DLH, BPBD, Dinas PUPR	APBD, DAK Lingkungan Hidup, APBN, Dana Siap Pakai BNPB, CSR

Tabel 4.25 Kontribusi Prioritas Pembangunan terhadap Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2027

Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran RPJMD yang Didukung	Target Tahun 2027
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Usia Harapan Hidup	75,10
	Indeks Pendidikan	64,00
	Indeks Harmoni Indonesia	88,00
	Indeks Kesejahteraan Sosial	75,00
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah	Tingkat Kemiskinan (%)	3,75
	Rasio PDRB Sektor Unggulan terhadap Total PDRB (%)	43,00
	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	38,50
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73,70
	Indeks Inovasi Daerah	42,00
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	3,80
	Laju Inflasi (%)	1,98
Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah	Pilar Infrastruktur	74,00

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	75,00
	Indeks PEMDI	1,50
	Opini BPK	WTP
	Indeks Profesionalitas ASN	75,00
	Indeks Pelayanan Publik	4,49
	Indeks Persepsi Korupsi	78,31
Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan	Tingkat Kesiapsiagaan Bencana (%)	100
	Tingkat Pencemaran Lingkungan*	79,00

*Disesuaikan dengan nomenklatur indikator dalam RPJMD apabila menggunakan IKLHD.

4.8 Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Tahun 2027

Penyelenggaraan pembangunan daerah pada Tahun 2027 dihadapkan pada berbagai dinamika lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dinamika tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti perubahan kondisi perekonomian nasional dan global, perubahan kebijakan pemerintah pusat, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, perubahan iklim, potensi bencana alam, perkembangan teknologi informasi, hingga perubahan kondisi sosial masyarakat. Berbagai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan apabila tidak dikelola secara sistematis.

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menerapkan manajemen risiko pembangunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, serta memantau berbagai risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan, meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa seluruh perangkat daerah mampu mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang mungkin terjadi selama pelaksanaan RKPD Tahun 2027. Dengan demikian, risiko pembangunan tidak hanya dipandang sebagai potensi hambatan, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan strategi mitigasi sehingga pencapaian target pembangunan dapat berlangsung secara lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan.

Manajemen risiko pembangunan pada RKPD Tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko sektor publik, serta memperhatikan karakteristik wilayah Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah yang memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, namun juga memiliki tingkat kerentanan terhadap banjir, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Pelaksanaan manajemen risiko diarahkan untuk mendukung pencapaian lima prioritas pembangunan daerah, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis unggulan daerah, peningkatan konektivitas dan infrastruktur, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, identifikasi dan mitigasi risiko dilakukan terhadap setiap prioritas pembangunan agar seluruh program prioritas memiliki strategi pengendalian yang memadai.

Secara umum, risiko pembangunan daerah Tahun 2027 dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu risiko strategis, risiko fiskal, risiko operasional, risiko lingkungan, serta risiko sosial. Risiko strategis berkaitan dengan kemungkinan tidak tercapainya sasaran pembangunan daerah akibat perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, maupun dinamika sosial. Risiko fiskal berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan, termasuk kemungkinan terjadinya penurunan pendapatan daerah maupun perubahan kebijakan transfer ke daerah. Risiko operasional berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti keterlambatan pelaksanaan proyek, keterbatasan sumber daya manusia, maupun rendahnya kapasitas kelembagaan. Risiko lingkungan meliputi potensi banjir, degradasi lingkungan, dan dampak perubahan iklim, sedangkan risiko sosial mencakup kemiskinan, pengangguran, kerawanan pangan, serta potensi konflik sosial.

Berdasarkan hasil identifikasi, beberapa risiko strategis diperkirakan memiliki tingkat pengaruh yang tinggi terhadap pencapaian target RKPD Tahun 2027. Risiko tersebut antara lain belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, belum meratanya pertumbuhan ekonomi, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, tingginya kerentanan terhadap banjir dan perubahan iklim, serta belum optimalnya transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan berbagai langkah mitigasi melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan efektivitas program prioritas, optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan, penguatan sistem pengendalian internal, percepatan transformasi digital pemerintahan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan risiko.

Manajemen risiko pembangunan juga menjadi bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027. Setiap perangkat daerah berkewajiban melakukan identifikasi risiko terhadap program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya serta menyusun langkah-langkah mitigasi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, hasil pelaksanaan mitigasi risiko menjadi salah satu bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD yang dilaksanakan secara berkala oleh

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui koordinasi Bapperida bersama perangkat daerah terkait.

Dengan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi, diharapkan pelaksanaan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 menjadi lebih adaptif terhadap berbagai perubahan lingkungan strategis, mampu meminimalkan potensi kegagalan pencapaian sasaran pembangunan, serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya pembangunan dalam mewujudkan visi Kabupaten Barito Kuala yang **Sejahtera, Agamis, Terpadu, dan Unggul (SATU)**

4.6.1 Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah

Kebijakan manajemen risiko pembangunan daerah merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui pengelolaan berbagai risiko secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan mampu mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan pencapaian target RKPD Tahun 2027.

Kebijakan ini disusun sebagai implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pengelolaan risiko sektor publik yang menempatkan risiko sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan pembangunan. Dengan demikian, setiap kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam RKPD tidak hanya mempertimbangkan peluang pencapaian sasaran, tetapi juga memperhitungkan berbagai potensi hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya.

Penerapan manajemen risiko pembangunan diarahkan untuk mendukung pencapaian lima prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis unggulan daerah, peningkatan konektivitas dan infrastruktur daerah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah perlu mengintegrasikan identifikasi dan pengendalian risiko ke dalam proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja.

Kebijakan manajemen risiko juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam merespons perubahan lingkungan strategis, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Risiko eksternal meliputi perubahan kondisi perekonomian nasional dan global, perubahan kebijakan pemerintah pusat, fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, bencana alam, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial masyarakat. Sementara itu, risiko internal meliputi keterbatasan kapasitas fiskal daerah, keterbatasan sumber daya manusia aparatur, koordinasi antarperangkat daerah, kualitas data perencanaan, dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan manajemen risiko pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 berpedoman pada beberapa prinsip sebagai berikut.

1. **Terintegrasi**, yaitu manajemen risiko menjadi bagian dari seluruh tahapan penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan.
2. **Berorientasi pada pencapaian sasaran**, yaitu pengelolaan risiko difokuskan pada upaya menjaga ketercapaian tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, serta target prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.
3. **Berbasis bukti (*evidence-based*)**, yaitu identifikasi dan penilaian risiko dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan, data statistik, capaian indikator kinerja, kondisi lingkungan strategis, serta hasil analisis kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. **Kolaboratif**, yaitu pengelolaan risiko dilaksanakan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
5. **Adaptif**, yaitu kebijakan manajemen risiko mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan strategis sehingga pembangunan daerah tetap berjalan secara efektif meskipun terjadi perubahan kondisi yang tidak direncanakan.
6. **Berkelanjutan**, yaitu proses identifikasi, penilaian, mitigasi, pemantauan, dan evaluasi risiko dilakukan secara berkala sebagai bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan RKPD.

Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan bahwa setiap perangkat daerah wajib melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, menyusun langkah-langkah mitigasi yang proporsional terhadap tingkat risiko, serta melaksanakan

pemantauan secara berkala terhadap efektivitas mitigasi yang telah dilakukan. Hasil pengelolaan risiko tersebut menjadi bagian dari proses pengendalian pembangunan daerah dan digunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan, perubahan RKPD apabila diperlukan, serta penyusunan dokumen perencanaan pada tahun berikutnya.

Melalui penerapan kebijakan manajemen risiko yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, responsif terhadap dinamika lingkungan strategis, serta mampu menjaga keberlanjutan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

4.6.2 Identifikasi Risiko Strategis Pembangunan Daerah

Identifikasi risiko merupakan tahapan awal dalam penerapan manajemen risiko pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengenali berbagai kejadian atau kondisi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027. Identifikasi risiko dilakukan secara sistematis melalui telaah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025, capaian indikator RPJMD Tahun 2025–2029, kondisi makro ekonomi daerah, kemampuan keuangan daerah, karakteristik wilayah, serta perkembangan lingkungan strategis pada tingkat nasional, regional, dan daerah.

Pendekatan identifikasi risiko juga mempertimbangkan hubungan antara sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan program prioritas sehingga risiko yang diidentifikasi benar-benar berkaitan dengan pencapaian target pembangunan daerah. Dengan pendekatan tersebut, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, antisipatif, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa risiko pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal. Risiko eksternal meliputi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan global, perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat, fluktuasi harga komoditas pertanian, perubahan iklim, potensi banjir, serta perkembangan teknologi dan digitalisasi. Sementara itu, risiko internal meliputi keterbatasan kapasitas fiskal daerah, belum optimalnya kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan perangkat daerah, kualitas data pembangunan, serta efektivitas koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, risiko strategis pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 dikelompokkan sesuai dengan lima prioritas pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.26 Identifikasi Risiko Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Risiko Strategis	Penyebab Utama	Dampak terhadap Pembangunan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Meningkatnya kualitas SDM	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan belum optimal	Stunting masih terjadi, kualitas pembelajaran belum merata, keterbatasan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, akses pelayanan dasar belum merata	Target IPM, UHH, Indeks Pendidikan dan Indeks Kesejahteraan Sosial tidak tercapai
		Penurunan kemiskinan berjalan lambat	Produktivitas masyarakat masih rendah, keterbatasan kesempatan kerja dan perlindungan sosial	Ketimpangan kesejahteraan meningkat dan target kemiskinan tidak tercapai
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target	Fluktuasi harga komoditas, rendahnya hilirisasi, investasi belum optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per kapita tidak mencapai target
		Investasi daerah tumbuh lebih rendah dari target	Keterbatasan infrastruktur pendukung, daya saing investasi, kepastian lahan	Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi melambat
		Ketahanan pangan menurun	Perubahan iklim, banjir, gangguan produksi pertanian	Produktivitas pertanian menurun dan inflasi pangan meningkat
Meningkatkan Konektivitas dan	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Pembangunan infrastruktur tidak selesai	Keterbatasan anggaran, keterlambatan	Pilar Infrastruktur tidak mencapai

Infrastruktur Daerah		sesuai target	pengadaan, kondisi geografis, cuaca ekstrem	target dan konektivitas wilayah terganggu
		Kerusakan infrastruktur akibat banjir	Tingginya intensitas hujan, sedimentasi sungai, sistem drainase belum optimal	Meningkatnya biaya pemeliharaan dan terganggunya pelayanan publik
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola	Reformasi birokrasi belum optimal	Implementasi manajemen kinerja belum konsisten, kualitas SDM aparatur belum merata	Nilai SAKIP dan kualitas pelayanan publik belum mencapai target
		Transformasi digital berjalan lambat	Infrastruktur TIK dan kapasitas SDM digital masih terbatas	Implementasi Indeks PEMDI tidak optimal
Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan	Meningkatnya ketahanan daerah	Frekuensi banjir meningkat	Curah hujan tinggi, perubahan iklim, pendangkalan sungai	Kerusakan infrastruktur, lahan pertanian, dan permukiman masyarakat
		Penurunan kualitas lingkungan hidup	Pencemaran, pengelolaan sampah belum optimal, degradasi lahan	Penurunan kualitas lingkungan dan meningkatnya risiko bencana ekologis

Sumber: Hasil identifikasi risiko berdasarkan evaluasi RKPD Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, analisis kondisi makro daerah, dan hasil sinkronisasi perangkat daerah.

Analisis Risiko Strategis

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa risiko pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 didominasi oleh risiko yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, ketahanan ekonomi daerah, kapasitas fiskal, pembangunan infrastruktur, serta kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi. Risiko-risiko tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain sehingga memerlukan penanganan secara terpadu melalui koordinasi lintas perangkat daerah.

Risiko pada sektor sumber daya manusia berpotensi mempengaruhi pencapaian indikator makro daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, dan produktivitas tenaga kerja. Di sisi lain, risiko pada sektor ekonomi dapat berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kemampuan fiskal daerah. Risiko pada sektor infrastruktur dan lingkungan hidup juga memiliki pengaruh yang signifikan mengingat karakteristik Kabupaten Barito Kuala sebagai wilayah rawa yang rentan terhadap banjir dan perubahan iklim.

Oleh karena itu, seluruh risiko strategis tersebut perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak yang ditimbulkan agar dapat ditetapkan prioritas penanganan serta strategi mitigasi yang tepat.

4.6.3 Analisis dan Penilaian Risiko Pembangunan Daerah

Setelah dilakukan identifikasi terhadap berbagai risiko strategis pembangunan, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis dan penilaian risiko guna mengetahui tingkat risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027. Analisis risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kemungkinan (*likelihood*) terjadinya suatu risiko dan besarnya dampak (*impact*) yang ditimbulkan terhadap pencapaian tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, serta keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Penilaian risiko dilakukan untuk menentukan prioritas penanganan sehingga sumber daya pemerintah daerah dapat difokuskan pada risiko-risiko yang memiliki tingkat pengaruh paling besar terhadap pencapaian target pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, strategi mitigasi yang disusun menjadi lebih efektif, efisien, dan proporsional terhadap tingkat risiko yang dihadapi.

Dalam RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027, tingkat risiko dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu **Risiko Sangat Tinggi**, **Risiko Tinggi**, **Risiko Sedang**, dan **Risiko Rendah**. Pengelompokan tersebut didasarkan pada hasil penilaian terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.

Risiko dengan kategori **Sangat Tinggi** merupakan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran pembangunan secara signifikan sehingga memerlukan penanganan segera melalui kebijakan lintas sektor, dukungan anggaran, serta pengendalian secara berkelanjutan. Risiko kategori **Tinggi** memerlukan langkah mitigasi yang terencana dan

pengawasan secara berkala. Risiko kategori **Sedang** memerlukan pengendalian rutin melalui pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, sedangkan risiko kategori **Rendah** cukup dipantau melalui mekanisme monitoring reguler.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi pembangunan Kabupaten Barito Kuala, beberapa risiko strategis diperkirakan berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi karena memiliki potensi yang besar dalam mempengaruhi pencapaian target pembangunan Tahun 2027, terutama yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan terhadap bencana.

Tabel 4.27 Penilaian Risiko Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

No	Risiko Strategis	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Prioritas Penanganan
1	Penurunan kualitas sumber daya manusia akibat belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan	Tinggi	Tinggi	**Sangat Tinggi**	Sangat Prioritas
2	Penurunan pertumbuhan ekonomi akibat fluktuasi harga komoditas dan rendahnya investasi	Tinggi	Tinggi	**Sangat Tinggi**	Sangat Prioritas
3	Penurunan kemampuan fiskal daerah akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat	Sedang	Tinggi	**Tinggi**	Prioritas
4	Keterlambatan pembangunan infrastruktur strategis	Sedang	Tinggi	**Tinggi**	Prioritas
5	Terjadinya banjir yang mengganggu aktivitas ekonomi dan pelayanan publik	Tinggi	Tinggi	**Sangat Tinggi**	Sangat Prioritas
6	Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan	Sedang	Sedang	**Sedang**	Menengah
7	Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan degradasi lahan	Sedang	Sedang	**Sedang**	Menengah
8	Keterbatasan kualitas data pembangunan sebagai dasar pengambilan kebijakan	Sedang	Sedang	**Sedang**	Menengah
9	Rendahnya efektivitas	Rendah	Sedang	**Rendah**	Monitoring

	koordinasi lintas perangkat daerah				
10	Perubahan regulasi nasional yang mempengaruhi pelaksanaan program daerah	Rendah	Tinggi	**Sedang**	Menengah

Sumber: Hasil analisis Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan evaluasi RKPD Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, kondisi makro pembangunan daerah, serta identifikasi risiko perangkat daerah.

Analisis Hasil Penilaian Risiko

Hasil penilaian menunjukkan bahwa risiko yang memiliki tingkat prioritas tertinggi berada pada aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan terhadap bencana. Risiko-risiko tersebut memiliki peluang kejadian yang relatif tinggi sekaligus memberikan dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah apabila tidak dilakukan langkah-langkah pengendalian secara tepat.

Risiko pada sektor sumber daya manusia dipandang sebagai risiko strategis karena berpengaruh langsung terhadap pencapaian indikator makro daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia, Usia Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan tingkat kemiskinan. Apabila kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan tidak meningkat sesuai target, maka pencapaian sasaran RPJMD pada tahun ketiga pelaksanaannya akan mengalami perlambatan.

Risiko pada sektor ekonomi juga memerlukan perhatian khusus mengingat struktur ekonomi Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh sektor pertanian yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, fluktuasi harga komoditas, dan produktivitas lahan. Selain itu, rendahnya investasi dan belum berkembangnya industri pengolahan berpotensi menghambat penciptaan lapangan kerja serta peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.

Di sisi lain, risiko bencana banjir masih menjadi ancaman utama karena karakteristik geografis Kabupaten Barito Kuala sebagai wilayah dataran rendah dan rawa. Gangguan terhadap infrastruktur jalan, jaringan irigasi, kawasan permukiman, serta lahan pertanian dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar apabila tidak diantisipasi melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dan penguatan sistem mitigasi bencana.

Sementara itu, risiko yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, transformasi digital, dan kualitas data pembangunan berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, risiko tersebut tetap memerlukan perhatian karena dapat mempengaruhi kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan program, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan bahwa risiko dengan kategori sangat tinggi dan tinggi menjadi prioritas utama dalam penyusunan strategi mitigasi risiko pada pelaksanaan RKPD Tahun 2027. Strategi mitigasi tersebut diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan sehingga target pembangunan daerah tetap dapat dicapai secara optimal.

4.6.4 Strategi Mitigasi Risiko Pembangunan Daerah

Strategi mitigasi risiko merupakan serangkaian kebijakan dan tindakan yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko maupun meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan strategi mitigasi dilakukan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian risiko sehingga setiap langkah pengendalian dapat diarahkan secara tepat sesuai tingkat risiko yang dihadapi.

Dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027, strategi mitigasi risiko diarahkan pada penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah, diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pembangunan daerah terhadap berbagai perubahan kondisi yang dapat mempengaruhi pencapaian target pembangunan.

Mitigasi risiko tidak hanya dilakukan pada tahap pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi telah dimulai sejak proses perencanaan melalui penyelarasan sasaran pembangunan, penetapan prioritas pembangunan, penyusunan indikator kinerja yang terukur, serta pengalokasian anggaran yang lebih berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*). Dengan demikian, risiko pembangunan dapat dikelola sejak awal sehingga kemungkinan terjadinya deviasi terhadap target pembangunan dapat diminimalkan.

Berdasarkan hasil analisis risiko, strategi mitigasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 difokuskan pada lima prioritas pembangunan daerah sebagai berikut.

Tabel 4.28 Strategi Mitigasi Risiko Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027

Prioritas Pembangunan	Risiko Strategis	Strategi Mitigasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan belum optimal	Peningkatan mutu pendidikan, pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, percepatan penurunan stunting, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, penguatan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPPPAKB	IPM meningkat, UHH meningkat, Indeks Pendidikan meningkat, prevalensi stunting menurun
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah	Pertumbuhan ekonomi dan investasi belum mencapai target	Pengembangan kawasan unggulan, hilirisasi komoditas pertanian, peningkatan investasi, penguatan UMKM, modernisasi pertanian, peningkatan akses pembiayaan usaha	Dinas Pertanian, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UMKM, Disnakertrans	LPE meningkat, investasi meningkat, PDRB per kapita meningkat, kemiskinan menurun
Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah	Keterlambatan pembangunan infrastruktur dan kerusakan akibat banjir	Percepatan pengadaan, penguatan pengendalian proyek, peningkatan kualitas konstruksi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pemeliharaan rutin	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan	Pilar Infrastruktur meningkat, aksesibilitas wilayah meningkat
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi digital belum optimal	Penguatan SAKIP, implementasi SPBE/Indeks PEMDI, peningkatan kapasitas ASN, penguatan pengawasan internal, digitalisasi pelayanan publik	Bapperida, Inspektorat, Diskominfo, BKPSDM, Setda	Nilai SAKIP meningkat, Indeks PEMDI meningkat, Indeks Pelayanan Publik meningkat
Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan	Banjir, perubahan iklim, dan penurunan kualitas	Normalisasi sungai, pembangunan sistem drainase, rehabilitasi kawasan rawa,	BPBD, DLH, Dinas PUPR	Tingkat kesiapsiagaan bencana meningkat, kualitas

Pengelolaan Lingkungan	lingkungan	konservasi lingkungan, peningkatan kapasitas BPBD, edukasi masyarakat		lingkungan hidup meningkat

Sumber: Hasil analisis risiko RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027.

Strategi Mitigasi Berdasarkan Aspek Pembangunan

Selain mitigasi yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga menerapkan beberapa strategi mitigasi yang bersifat lintas sektor untuk meningkatkan ketahanan pembangunan daerah.

1. Penguatan Tata Kelola Perencanaan

Mitigasi dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, penyelarasan dokumen perencanaan, penguatan pengendalian pembangunan, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan penguatan mekanisme verifikasi dokumen perencanaan menjadi instrumen utama untuk mengurangi risiko inkonsistensi antara RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

2. Penguatan Ketahanan Fiskal Daerah

Mitigasi risiko fiskal dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, efisiensi belanja daerah, pengendalian belanja operasional, serta optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan keuangan pemerintah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hibah, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

3. Penguatan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran pembangunan memerlukan sinergi antarperangkat daerah. Oleh karena itu, mitigasi risiko dilakukan melalui forum koordinasi pembangunan, penguatan mekanisme pengendalian lintas sektor, integrasi data pembangunan, serta peningkatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

4. Penguatan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim dan Bencana

Kabupaten Barito Kuala memiliki karakteristik wilayah rawa yang rentan terhadap banjir dan dampak perubahan iklim. Strategi mitigasi diarahkan pada pembangunan infrastruktur pengendali banjir, rehabilitasi daerah aliran sungai, peningkatan sistem peringatan dini (*early warning system*), penyusunan rencana kontinjensi, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan bencana.

5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Mitigasi risiko dilakukan melalui pemantauan berkala terhadap pencapaian indikator pembangunan, evaluasi pelaksanaan program prioritas, serta penyesuaian kebijakan apabila terjadi perubahan kondisi strategis. Monitoring dilaksanakan secara berkala oleh Bapperida bersama perangkat daerah sehingga potensi penyimpangan terhadap target pembangunan dapat diidentifikasi lebih awal dan segera dilakukan tindakan korektif.

Strategi mitigasi risiko pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 disusun sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa seluruh prioritas pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui penerapan strategi mitigasi yang terintegrasi dengan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pembangunan daerah terhadap berbagai risiko serta menjaga keberlanjutan pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

4.6.5 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Risiko Pembangunan Daerah

Pemantauan dan evaluasi risiko merupakan tahapan akhir dalam siklus manajemen risiko pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh strategi mitigasi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif serta mampu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko maupun dampaknya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pemantauan risiko juga menjadi bagian dari sistem pengendalian pembangunan daerah yang dilakukan secara berkelanjutan selama pelaksanaan RKPD Tahun 2027.

Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan risiko, efektivitas pelaksanaan strategi mitigasi, serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian target pembangunan. Mengingat dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang, risiko yang telah diidentifikasi pada awal penyusunan RKPD dapat mengalami perubahan baik dari sisi tingkat kemungkinan, besaran dampak, maupun munculnya risiko-risiko baru yang sebelumnya belum teridentifikasi. Oleh karena itu,

proses pemantauan dilakukan secara berkala agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah korektif secara cepat dan tepat.

Evaluasi risiko dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 melalui pengukuran tingkat ketercapaian indikator kinerja pembangunan, evaluasi efektivitas pelaksanaan program prioritas, serta penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan strategi mitigasi. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan, penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta bahan penyusunan Perubahan RKPD apabila terjadi perubahan kondisi strategis yang mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi risiko dilakukan secara terkoordinasi oleh seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Bapperida berperan sebagai koordinator pengendalian pelaksanaan RKPD melalui fasilitasi monitoring capaian pembangunan, evaluasi kinerja perangkat daerah, serta konsolidasi informasi risiko pembangunan. Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap efektivitas pengendalian risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Sementara itu, setiap perangkat daerah bertanggung jawab melakukan identifikasi, pemantauan, dan pelaporan perkembangan risiko terhadap sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam rangka memperkuat efektivitas pengendalian pembangunan, hasil pemantauan risiko diintegrasikan dengan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang meliputi evaluasi triwulanan, evaluasi semester, evaluasi tahunan RKPD, evaluasi capaian indikator kinerja daerah, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD. Integrasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan informasi yang komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan secara lebih cepat, tepat, dan berbasis data.

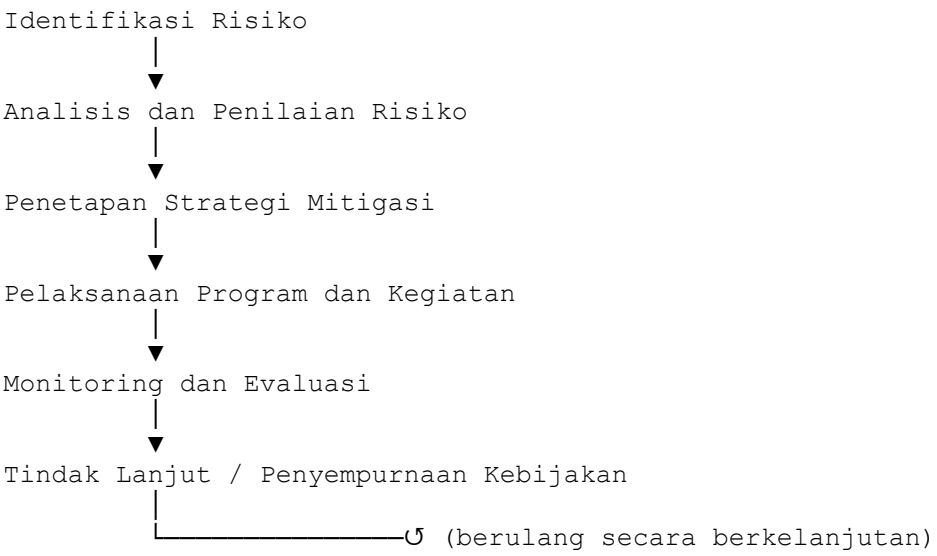
Selain itu, pemantauan risiko juga didukung melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sistem informasi pengendalian pembangunan, serta berbagai sumber data statistik yang dikelola oleh perangkat daerah dan instansi terkait. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemantauan, mempercepat penyampaian informasi, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mengantisipasi berbagai risiko pembangunan.

Melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkomitmen untuk membangun sistem pengendalian pembangunan yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan lingkungan

strategis. Dengan demikian, berbagai risiko pembangunan dapat dikelola secara lebih efektif sehingga pencapaian tujuan, sasaran, prioritas, dan target pembangunan daerah Tahun 2027 tetap terjaga sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029.

Tabel 4.29 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Risiko Pembangunan Daerah Tahun 2027

Tahapan	**Kegiatan**	**Penanggung Jawab**	**Waktu Pelaksanaan**	**Keluaran**
Identifikasi Risiko	Pemutakhiran risiko strategis dan operasional pembangunan	Perangkat Daerah	Awal Tahun dan apabila terjadi perubahan strategis	Daftar Risiko Terbaru
Pemantauan Risiko	Monitoring perkembangan risiko dan efektivitas mitigasi	Perangkat Daerah, Bapperida	Triwulanan	Laporan Monitoring Risiko
Evaluasi Risiko	Evaluasi tingkat risiko dan pencapaian indikator pembangunan	Bapperida bersama Perangkat Daerah	Semesteran	Laporan Evaluasi Risiko
Pengawasan Intern	Reviu efektivitas pengendalian risiko	Inspektorat Daerah	Sesuai Program Pengawasan Tahunan	Rekomendasi Perbaikan
Tindak Lanjut	Penyempurnaan kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi	Bapperida dan Perangkat Daerah	Berkelanjutan	Perbaikan Pelaksanaan RKPD dan bahan Perubahan RKPD



Gambar 4.1 Siklus Manajemen Risiko Pembangunan Daerah

Dengan diterapkannya manajemen risiko pembangunan secara terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berupaya memastikan bahwa seluruh prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan program prioritas Tahun 2027 dapat dilaksanakan secara efektif, adaptif, dan akuntabel. Hasil identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana kerja, penetapan prioritas pendanaan, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana diuraikan pada Bab V mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2027.

4.6 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Barito Kuala merupakan hasil penelaahan terhadap aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok pikiran DPRD menjadi salah satu bahan penting dalam penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 sebagai bentuk pendekatan politis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Penyelarasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dilakukan dengan memperhatikan:

- sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029;
- prioritas pembangunan daerah;
- kemampuan keuangan daerah;
- prioritas pembangunan nasional dan provinsi;

- kewenangan perangkat daerah.

Secara umum, Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 diarahkan pada:

1. peningkatan infrastruktur dasar wilayah;
2. penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan;
3. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
4. penanggulangan kemiskinan;
5. peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Selanjutnya, Pokok-Pokok Pikiran DPRD diverifikasi dan disinergikan dengan program dan kegiatan perangkat daerah agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

4.7 Hasil Musrenbang RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 merupakan forum konsultasi publik antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka memperoleh masukan terhadap prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, forum perangkat daerah, hingga Musrenbang RKPD Kabupaten. Hasil Musrenbang menjadi salah satu bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027.

Berdasarkan hasil Musrenbang, usulan masyarakat masih didominasi oleh:

1. pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan;
2. pembangunan infrastruktur pertanian dan irigasi;
3. peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan;
4. peningkatan bantuan bagi kelompok usaha masyarakat;
5. penanganan banjir dan peningkatan drainase;
6. pengembangan sarana air bersih dan sanitasi.

Seluruh usulan hasil Musrenbang selanjutnya dilakukan verifikasi dan penelaahan berdasarkan:

- kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah;
- target RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029;
- kewenangan pemerintah daerah;
- kemampuan keuangan daerah;
- tingkat urgensi kebutuhan masyarakat.

Hasil verifikasi Musrenbang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah Tahun 2027 sehingga pembangunan daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

4.8 Sasaran dan Indikator Kinerja

Tabel 4.30 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barito Kuala

Indikator	2024	2025 (Realisasi)	Target 2026	Target 2027
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,61	72,05	72,70	73,30
Tingkat Kemiskinan (%)	4,36	4,31	3,88	3,75
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,74	3,23	3,30	2,80
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,76	5,27	5,70	6.50
Rasio Gini	0,291	0,269	0,242	0,230
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	64,01	71,44	66,57	66,79

Target kinerja tahun 2027 menunjukkan adanya peningkatan yang bertahap dan realistis. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan.

Peningkatan IPM menjadi fokus utama karena mencerminkan kualitas hidup masyarakat. Penurunan kemiskinan dan pengangguran menunjukkan keberhasilan pembangunan

ekonomi yang inklusif. Indikator ini menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang efektif dan terarah.

Berdasarkan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 difokuskan pada:

Fokus Strategi Utama:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah
3. Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan

Dengan fokus strategi tersebut, pembangunan Kabupaten Barito Kuala diharapkan mampu menjawab tantangan yang ada, sekaligus memanfaatkan peluang yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 4.31 Keselarasan prioritas daerah, sasaran, urusan dan program prioritas

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027	Sasaran Utama RKPD Tahun 2027	Urusan Dominan	Urusan Penunjang	Outcome	Indikator Outcome	Program Prioritas
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Meningkatnya Kualitas SDM (IPM)	Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan karakter masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Kartu Beasiswa Batola, Desa Peduli Stunting, Program Peningkatan Status Gizi Masyarakat, Layanan Mobil Keliling dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan, Insentif Kaum Masjid dan Guru TPA, Program Kampung Religius Barito Kuala
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Penanaman Modal, Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja	Ketahanan Pangan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Pariwisata, Transmigrasi, Lingkungan Hidup	Meningkatnya produktivitas dan daya saing ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Program Intensifikasi Pertanian Modern, Program Pengembangan Sentra Agroindustri, UMKM BAIMAN, Program Pengembangan Wirausaha Lokal, Kartu Siap Kerja Batola, Pengembangan Kawasan Industri

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan, Penanaman Modal, Perdagangan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya kelompok rentan	Persentase Penduduk Miskin	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Prasejahtera, ATM Beras, Program Perluasan Kesempatan Kerja, UMKM BAIMAN, Program BUMDes Mandiri
3. Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan	Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Energi dan Sumber Daya Mineral (sesuai kewenangan)	Meningkatnya konektivitas wilayah dan akses pelayanan dasar masyarakat	Indeks Infrastruktur	Program Pembangunan Jalan Strategis, Program Rehabilitasi Infrastruktur Vital, Jalanan Beton, Program Desa Terintegrasi, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak, Program Pengembangan Infrastruktur Digital
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pengawasan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Kearsipan, Perpustakaan, Penelitian dan Pengembangan, Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik, Program Integrasi Perencanaan-Penganggaran-Evaluasi, Batola Respon Cepat, Program Pengembangan Kompetensi ASN,

						Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
5. Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan	Mendukung seluruh sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD dan Satpol PP), Lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik	Menurunnya risiko bencana dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program Desa Tangguh Bencana, Program Pengendalian Banjir dan Genangan, Program Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan, Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Prioritas Daerah

Program prioritas daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 merupakan penjabaran operasional dari sasaran dan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan pada BAB IV, serta didasarkan pada kondisi ekonomi dan fiskal daerah pada BAB II dan BAB III. Program ini dirancang untuk menjawab isu strategis daerah seperti kualitas SDM belum optimal, ketimpangan pembangunan antar wilayah, keterbatasan infrastruktur dasar, risiko bencana banjir dan genangan air serta ketergantungan ekonomi pada sektor primer

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala untuk capaian indikator keberhasilan:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekitar 72,05
2. Laju Pertumnuhan Ekonomi sekitar 5,27
3. Pilar Infrastruktur diangka 54,42
4. Reformasi Birokrasi masih diangka 76,98
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 71,44

Implikasi kebijakan:
Program prioritas harus mampu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
3. Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan

Dari 5 program prioritas diatas ditetapkan Program unggulan kepala daerah yang merupakan program strategis yang bersifat akseleratif dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Program unggulan Batola 2027:

1. Beasiswa pendidikan
2. Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan
3. Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu

4. Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Lokal
5. Peningkatan Jalan Kabupaten, Desa dan Jalan Usaha Tani (Pengecoran jalan)
6. Peningkatan tata kelola dan Digitalisasi Pelayanan Publik (E-Government)
7. Pengelolaan persampahan

Program unggulan ini selaras dengan karakteristik Barito Kuala sebagai daerah agraris. Fokus pada pertanian dan infrastruktur menunjukkan upaya memperkuat basis ekonomi lokal, sementara digitalisasi dan reformasi birokrasi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 5.1 Matriks Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Kuala

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Utama RKPD	Urusan Dominan	OPD Penanggung Jawab	Pagu Urusan (Rp)	% APBD	Urusan Penunjang	OPD Penunjang	Pagu Penunjang (Rp)	% APBD	Program Prioritas
1	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul**	Meningkatnya Kualitas SDM (IPM)	Pendidikan	Dinas Pendidikan	**383.707.722.527**	22,76%	Kepemudaan & Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, PPPA, Sosial, KB	Disporabudpar, DPPPAKB, Dinsos, Dinas Perpustakaan	32.615.692.285	1,93%	Kartu Beasiswa Batola, Desa Peduli Stunting, Peningkatan Status Gizi, Insentif Guru TPA dan Kaum Masjid
			Kesehatan	Dinas Kesehatan	**165.423.210.900**	9,81%					Layanan Mobil Keliling dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan
2	**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah**	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertanian	Dinas Pertanian	**20.270.749.118**	1,20%	Pangan, Perdagangan, Perindustrian, Penanaman Modal, Koperasi UKM, Tenaga Kerja, Perikanan, Pariwisata, Transmigrasi	Dinas Pertanian, DPMPTSP, Diskoperindag, Disnaker, DKPP, Disporabudpar	59.512.353.244	3,53%	Intensifikasi Pertanian Modern, Sentra Agroindustri, UMKM BAIMAN, Kartu Siap Kerja Batola

		Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	**36.451.380.978**	2,16%	Sosial, PMD, Koperasi UKM, Tenaga Kerja	Dinsos, DPMD, Diskoperindag, Disnaker	35.030.606.306	2,08%	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Prasejahtera, ATM Beras, BUMDes Mandiri
3	**Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah**	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR	**176.419.757.689**	10,47%	Perhubungan, Perkim, Pertanahan, Kominfo	Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, Diskominfo	136.917.740.801	8,12%	Pembangunan Jalan Strategis, Rehabilitasi Infrastruktur Vital, Jalan Beton, Desa Terintegrasi
			Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perkim	**67.127.475.201**	3,98%					Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak
4	**Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	**5.851.056.782**	0,35%	Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pengawasan, Statistik, Persandian, Kesbangpol	Bapperida, BPKAD, BKPSDM, Inspektorat, Diskominfo, Kesbangpol	501.660.439.903	29,76%	Integrasi Perencanaan–Penganggaran–Evaluasi, Batola Respon Cepat, Pengembangan Kompetensi ASN

5	**Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan**	Mendukung seluruh sasaran pembangunan daerah	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	**48.015.160.262**	2,85%	Trantibumlinmas, BPBD, PUPR, Pertanian, Perikanan	Satpol PP & Damkar, BPBD, PUPR	16.604.622.721	0,99%	Desa Tangguh Bencana, Pengendalian Banjir dan Genangan, Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

5.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Program Prioritas

Setiap kegiatan harus memiliki hubungan langsung dengan output dan dampak yang ingin dicapai. Hal ini penting agar pelaksanaan kegiatan tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi juga pada hasil yang dirasakan masyarakat. Kegiatan yang efektif adalah kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian indikator pembangunan. Secara detail terkait kegiatan dan subkegiatan masing-masing sebagaimana pada lampiran 1 dokumen ini

5.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menggambarkan kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

5.3.1 Pagu Indikatif

Tabel 5.2 Pagu Indikatif Berdasarkan Prioritas

Prioritas	Total Pagu (Rp)	Persentase APBD	Keterkaitan
SDM Unggul	581.746.625.712	34,51%	IPM
Ekonomi Unggulan & Kemiskinan	151.265.089.646	8,97%	Pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan
Infrastruktur & Konektivitas	380.464.973.691	22,57%	Pilar infrastruktur
Tata Kelola Pemerintahan	507.511.496.685	30,11%	Reformasi Birokrasi
Ketahanan Bencana & Lingkungan	64.619.782.983	3,83%	IKPLHD

Alokasi anggaran menunjukkan bahwa sektor infrastruktur dan pendidikan menjadi prioritas utama, sejalan dengan kebutuhan daerah dalam meningkatkan konektivitas dan kualitas SDM.

.5.3.2 Sumber Pendanaan

Persentase sumber pendanaan disbanding total pendapatan terdiri dari:

- APBD (PAD 23,09%, dana transfer 76,40%)
- APBN 76,21 %
- Dana desa
- Sumber lain yang sah 0,51%

Struktur pendanaan menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi. Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi sangat penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Diversifikasi sumber pendanaan akan memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan pembangunan.

5.3.3 Sinkronisasi dengan APBD

RKPD menjadi dasar penyusunan APBD, sehingga seluruh program dan kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sinkronisasi antara RKPD dan APBD memastikan bahwa perencanaan yang telah disusun dapat diimplementasikan secara nyata. Tanpa sinkronisasi, program berpotensi tidak terlaksana secara optimal. Perencanaan yang baik harus didukung oleh penganggaran yang realistis, terukur, dan berorientasi hasil.

Dengan perencanaan yang terintegrasi antara program, kegiatan, dan pendanaan, Kabupaten Barito Kuala diharapkan mampu mencapai pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 dan dijabarkan dalam RKPD Tahun 2027. IKU mencerminkan capaian kinerja strategis daerah yang berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya pada pelaksanaan kegiatan (output). Oleh karena itu, IKU menjadi alat ukur utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, kondisi indikator makro daerah saat ini adalah:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Kuala

No	INDIKATOR sasaran	TARGET RPJMD	REALISASI	TARGET	TARGET
		2025	2025	2026	2027
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,4	72,85	73,2	73,55
2	Indeks Pendidikan	62,4	61,89	63,2	64
3	Indeks Harmoni Indonesia	85	6,64	6,97	7,32
4	Indeks Kesejahteraan Sosial	72,5	56,03	59,6	63,17
5	Tingkat kemiskinan	4	4,31	3,88	3,75
6	Rasio PDRB sektor unggulan terhadap total PDRB	41,5	26,65	29,75	32,65
7	PDRB Per Kapita	35,5	36,34	37	38,5
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73,5	71,98	72,3	72,62
9	Indeks Inovasi Daerah	40	51,38	52,1	52,82
10	Pilar Infrastruktur	70	54,42	58,2	61,98
11	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	4,2	5,58	5,26	4,94
12	Laju Inflasi	1,98	1,95	3,5	3,1
13	Nilai SAKIP	72	67,19	68,5	69,81
14	Indeks SPBE	2,64	3,28	3,7	N/A
15	Indeks PEMDI	N/A	-	N/A	1,5
16	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Indeks Profesionalitas ASN	70	78,27	72,5	75
18	Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,35	4,42	4,49
19	Indeks Persepsi Korupsi	76,36	78,85	78,86	78,87
20	Tingkat kesiapsiagaan bencana	100	100	100	100

21	Tingkat Pencemaran Lingkungan/IKPLHD	75,7	71,44	72,6	73,76

IKU menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Barito Kuala telah berada pada jalur yang cukup baik, namun masih memerlukan percepatan untuk mencapai target yang lebih optimal. Peningkatan IPM menjadi prioritas utama karena mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Di sisi lain, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang stabil diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

IKU tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi arah bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan.

Tabel 6.2 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barito Kuala

Indikator	2024	2025 (Realisasi)	Target 2026	Target 2027
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,61	72,05	72,70	73,30
Tingkat Kemiskinan (%)	4,36	4,31	3,88	3,75
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,74	3,23	3,30	2,80
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,76	5,27	5,70	6.50
Rasio Gini	0,291	0,269	0,242	0,230
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	64,01	71,44	66,57	66,79

6.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara lebih spesifik. IKK mencerminkan capaian kinerja masing-masing sektor atau urusan pemerintahan.

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Kunci per Urusan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027	Sumber Data
1.a.1	Pendidikan	Persentase Anak Usia 5 s.d. 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	91,66%	93,5%	93,8%	Dinas Pendidikan
1.a.2	Pendidikan	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	97,20%	98,8%	98,8%	Dinas Pendidikan
1.a.3	Pendidikan	Persentase Anak Usia 7 s.d. 18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	83,82%	86,6%	87%	Dinas Pendidikan
1.a.4	Pendidikan	Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	36,19%	43%	50%	Dinas Pendidikan
1.a.5	Pendidikan	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	27,41%	34%	41%	Dinas Pendidikan
1.b.1	Kesehatan	Persentase Kematian ibu	0,10%	≤9 kasus	≤8 kasus	Dinas Kesehatan
1.b.2	Kesehatan	Prevanlensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	8,53%	8.5%	7.5%	Dinas Kesehatan
1.b.3	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	94%	95%	Dinas Kesehatan
1.b.4	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	99,64%	99.3%	99.4%	Dinas Kesehatan
1.b.5	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	98,72%	98.9%	99%	Dinas Kesehatan
1.b.6	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	88%	89%	Dinas Kesehatan
1.b.7	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%	98.2%	98.4%	Dinas Kesehatan
1.b.8	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	93,23%	86.5%	87.5%	Dinas Kesehatan
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	91%	91.5%	Dinas Kesehatan

1.b.10	Kesehatan	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.b.11	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.b.12	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.b.13	Kesehatan	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.b.14	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	66,04%	71,1%	73,1%	DPUPR
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	46,68%	48,2%	50,7%	DPUPR
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	72,62%	75%	77%	DPUPR
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78,25%	71.5%	72%	DPUPR
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	11,32%	56%	57%	DPUPR

1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase peningkatan perlindungan kawasan sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	100%	-%	-%	DPUPR
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100%	100%	100%	DPUPR
1.c.8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	100%	100%	100%	DPUPR
1.c.9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	72,96%	75.7%	76.2%	DPUPR
1.c.10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	0	44,02%	90%	DPUPR
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	Disperkim
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	104,86%	25.51%	44.13%	Disperkim
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	1,75%	20%	25%	Disperkim
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	96,67%	62%	66%	Disperkim
1.e.1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	0	90%	92,5%	BPBD
1.e.2	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	100%	100%	Satpol PP

1.e.3	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	100%	100%	100%	Satpol PP
1.e.4	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	63,64%	0.5%	0.6%	BPBD
1.e.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	BPBD
1.e.6	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	Satpol PP
1.f.1	Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	Dinas Sosial
1.f.2	Sosial	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	Dinas Sosial
1.f.3	Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	Dinas Sosial
1.f.4	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	Dinas Sosial
1.f.5	Sosial	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Dinas Sosial
1.f.6	Sosial	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	100%	100%	Dinas Sosial
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100%	100%	100%	Disnakertrans

2.a.2	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	100%	80%	82%	
2.a.3	Tenaga Kerja	Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	73,28%	47,59%	51,07%	Disnakertrans
2.b.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	DPPKBP3A
2.b.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	DPPKBP3A
2.c.	Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	108,69%	97%	97,5%	DKPP
2.c.	Pangan		108,69%	97%	97,5%	DKPP
2.d.1	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	5,99%	75%	80%	Disperkim
2.d.2	Pertanahan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	59,51%	44,02%	90%	DPUPR
2.d.3	Pertanahan	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan	0	50%	75%	DPUPR
2.e.1	Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
2.e.2	Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	24,55%	76,1%	76,5%	Dinas Lingkungan Hidup

2.f.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	97,54%	92%	93%	Disdukcapil
2.f.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	93,41%	100%	100%	Disdukcapil
2.f.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	100%	100%	100%	Disdukcapil
2.f.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Presentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	98,95%	99,4%	99,45%	Disdukcapil
2.f.5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	30%	32%	Disdukcapil
2.f.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	100%	100%	Disdukcapil
2.f.7	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	100%	100%	Disdukcapil
2.g.1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100%	100%	100%	DPMD
2.g.2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	54,55%	81%	83%	DPMD
2.g.3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	100%	80%	85%	DPMD
2.h.1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	100%	2.25	2.2	DPPKBP3A
2.h.2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	71,98%	86%	87.5%	DPPKBP3A

2.h.3	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	26,74%	6.5%	6%	DPPKBP3A
2.i.1	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,89	0,92	0,94	Dinas Perhubungan
2.i.2	Perhubungan	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,41	0,36	0,35	Dinas Perhubungan
2.i.3	Perhubungan	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	0	70%	75%	Dinas Perhubungan
2.j.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	97,78%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.j.2	Komunikasi dan Informatika	Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	16,85%	12%	13%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.j.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8,23%	65%	65,5%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.k.1	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Mengukur Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	10,89%	5%	7.5%	Dinas Kopperindag
2.k.2	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal	59,71%	52%	56%	Dinas Kopperindag
2.l.1	Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	4,53%	8%	10%	DPMPTSP
2.l.2	Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	29,68%	80%	85%	DPMPTSP
2.m.1	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	15,98%	1.95%	2.1%	Disporbudpar
2.m.2	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1,21%	4.8%	5%	Disporbudpar
2.m.3	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Atlet yang Berasal Dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	2,70%	12%	15%	Disporbudpar
2.m.4	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	66,67%	12 medali	13 medali	Disporbudpar

2.n	Statistik	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah	90,84%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.o	Persandian	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	42,81%	65	70	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.p.1	Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	100%	100%	100%	Disporbudpar
2.p.2	Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	170,17%	5%	10%	Disporbudpar
2.q.1	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	55,77	70	72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.q.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	1,12	78	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.r	Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	67,10	76.2%	76.6%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.a.1	Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	102,30%	97.75%	97.9%	DKPP
3.a.2	Kelautan dan Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	67,86	67,99	68,06	DKPP
3.b.1	Pariwisata	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	3,39%	5%	7.5%	Disporbudpar DPMPTSP
3.b.2	Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	70,90%	5%	10%	Disporbudpar
3.b.3	Pariwisata	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	5,93%	2.2%	2.4%	Disporbudpar
3.c.1	Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	16,15%	358615	360674	Distan TPH
3.c.2	Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	-30,50%	0.69%	0.70%	Distan TPH
3.c.3	Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	-22,47	6.00%	8.00%	Disbunnak

3.c.4	Pertanian	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari Surveylance Penyakit Dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	100%	90%	92.5%	Disbunnak
	Kehutanan	Tidak ada IKK				
	ESDM	Tidak ada IKK				
3.d	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	66,92%	43,5%	44,5%	Dinas Kopperindag
3.e.1	Perindustrian	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	78,03	75%	77.5%	Dinas Kopperindag
3.e.2	Perindustrian	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	0,66%	100%	100%	Dinas Kopperindag
3.e.3	Perindustrian	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	7,09%	7,25%	7,4%	Dinas Kopperindag
3.e.4	Perindustrian	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	22,89%	8%	10%	Dinas Kopperindag
	Transmigrasi	Tidak ada IKK				

IKK memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kinerja setiap sektor pembangunan. Misalnya, pada sektor pendidikan, peningkatan rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pada sektor kesehatan, penurunan angka stunting menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas generasi masa depan. Sementara itu, peningkatan jalan mantap pada sektor infrastruktur menunjukkan perbaikan konektivitas wilayah yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.

IKK menjadi jembatan antara program/kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai, sehingga setiap kegiatan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pembangunan.

6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran untuk menilai keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang mencakup evaluasi dari kinerja visi dan misi kepala daerah sertda dampak program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah daerah.

Tabel 6.4 Target Indikator Kinerja Daerah

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	TARGET 2027
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	64,02	66,36	71,44	66,57	66,79
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	0,02	0,02	0,02	0.11	0.2
Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	-	74,97	75,72	2,97	2,78
Penurunan Emisi GRK (Ton CO2 eq) - Kumulatif	Ton CO_2e	-	1.104.809,10	1.115.857,19	1.203.112,98	1.305.820,58
Penurunan Emisi GRK (Ton CO2 eq) - Tahunan	Ton CO_2e	-	96.847,25	97,815,72	98.323,66	102.727,32
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	156,15	129	67,6	125.25	121.5
Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	-	215,88	n/a	224,02	232,15
Kapasitas Air Baku	m3/detik	-	5,79	5,65	5,81	5,83
Akses Air Siap Minum Perpipaan	Persen	-	25	0	29,69	34,38
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	11,01	13	11,62	14,5	16
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	86,35	94	67,17	94,5	95
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,02	5,1	5.27	5,2	5,28
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,41	3,39	3.23	3,3	3,25
Indeks Gini	Angka	0,272	0,257	0.269	0,242	0,227
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,4	72	72.05	72.7	73.3
Angka Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,07	74,4	72.85	74.75	75.1
Prevalensi Stunting	Persen	10,39	9,5	8.53	8.5	7.5
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	-	28	n/a	31	34
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,92	8	7.99	8.13	8.39
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,56	12,96	12.69	13.07	13.19
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	73,53	74,26	n/a	74.76	75.26
Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,51	0,46	0.47	0.44	0.42
Tingkat kemiskinan	Persen	4,36	4	4.31	3.88	3.75
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	-	9,37	n/a	9.47	9.57
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	-	55,57	n/a	56.36	57.15
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	-	53,78	n/a	55.28	56.78
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	98,96	99	99.71	99,2	99,4
Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	127	≤10	128	≤9	≤8
Jumlah Kematian Balita	Per 1.000 kelahiran hidup	12	≤10	9	≤9	≤8
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	45,73	90	57	90.63	91.25
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	81,5	90	84.5	90.63	91.25
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	Persen	66,52	40,52	n/a	43.51	46.49

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	Persen	58,71	20,36	n/a	23.42	26.47
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	-	44,1	73,28	47.59	51.07
Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal Kab/Kota	Persen	-	30	0	31.88	33.75
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,46	73,5	71,98	73.6	73.7
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	-	33,28	n/a	33.52	33.76
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	-	1,4	n/a	1.42	1.44
Tingkat Inflasi di Barito Kuala	Persen	1,98	1,9	3,97	1,82	1,74
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	35,19	35,49	n/a	35,8	36,1
Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,29	15,28	n/a	16.11	16.94
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	-	2,5	2,57	2.57	2.65
Jumlah tamu wisatawan (hotel/Orang)	Orang	-	350.000	208.286	478.125	606.250
Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Kab/Kota	Persen	-	4,8	n/a	4.88	4.96
Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kab/Kota	Persen	11,25	11,73	n/a	12.11	12.48
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota	Persen	1,07	1,3	n/a	1.53	1.77
Rasio Kewirausahaan Daerah Kab/Kota	Persen	1,82	2	n/a	2.19	2.38
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,93	1,26	n/a	1.59	1.92
Return on Asset (RoA) BUMD	Persen	-	0,1	n/a	0,25	0,4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan)	Persen	57,66	58,12	n/a	58.44	59.49
Indeks Inovasi Daerah	Angka	39,4	40	51,38	41	42
Kontribusi Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persen	-	99,91	n/a	99.92	99.93

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	-	6,36	n/a	6.45	6.55
Koefisien harga antar wilayah tingkat kabupaten	Angka	-	7,28	n/a	7.13	6.97
Ekspor barang dan jasa	Persen	-	-17,28	n/a	-16.92	-16.56
Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap PDRB Kawasan Metropolitan Banjarbakula	Persen	-	12,52	n/a	17.69	22.87
Kredit UMKM ke bank umum/PDRB	Persen	-	14,36	n/a	15	15.64
Inklusi Keuangan	Persen	-	87,98	n/a	88.64	89.29
Indeks Daya Saing Daerah	Angka	-	3,54	n/a	3.59	3.64
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,94	71,2		71,5	72,2
Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	80,44	81,5		82,4	83,3
Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,28	96,88		97,48	98,08
Indeks SPBE	Angka	2,59	2,64	2,99	2,7	
Indeks PEMDI	Angka	-	-	-	-	1,5
Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,28	4,35		4,42	4,49
Indeks Integritas Nasional	Angka	73,2	76,36		77.34	78.31
Maturitas SPIP	Nilai	3,29	3,3		3,35	3,4
Nilai SPI	Nilai	73,2	75,22		76.15	77.07
Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen	-	90	90	90.63	91.25
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	-	62,62		63.83	65.05

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029. RKPD Tahun 2027 memiliki peran strategis sebagai instrumen penghubung antara perencanaan jangka menengah daerah dengan proses penganggaran daerah melalui penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penyusunan RKPD dilakukan secara teknokratis, partisipatif, politis, serta memadukan pendekatan top-down dan bottom-up planning guna memastikan bahwa pembangunan daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah, Kabupaten Barito Kuala masih menghadapi sejumlah tantangan strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2027, yaitu:

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait capaian pendidikan, kesehatan, dan daya saing tenaga kerja;
2. Ketimpangan pembangunan antar wilayah yang masih terlihat antara kawasan perkotaan, kawasan penyangga Banjarbakula, dan wilayah perdesaan berbasis rawa;
3. Keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berdampak pada aksesibilitas pelayanan dan aktivitas ekonomi masyarakat;
4. Tingginya risiko bencana banjir dan genangan air yang dipengaruhi oleh karakteristik geografis wilayah rawa dan pasang surut;
5. Ketergantungan struktur ekonomi pada sektor primer, khususnya pertanian dan perikanan, yang menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas;
6. Akses layanan dasar dan pelayanan publik yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 menetapkan tema pembangunan:

“Penguatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Investasi serta Infrastruktur Terintegrasi”

Tema pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam lima prioritas pembangunan daerah yang saling terintegrasi, yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan.

Kelima prioritas pembangunan tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran utama pembangunan daerah Tahun 2027 yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
3. Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial;
4. Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah;
5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam rangka memastikan keterukuran pembangunan, RKPD Tahun 2027 juga telah menetapkan target indikator makro pembangunan daerah, indikator kinerja utama daerah, indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta target pembangunan sektoral yang menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.

7.2 Arah Implementasi RKPD Tahun 2027

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sangat ditentukan oleh konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah wajib menjadikan RKPD sebagai pedoman utama dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, RKA Perangkat Daerah, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Implementasi RKPD Tahun 2027 diarahkan pada beberapa prinsip utama sebagai berikut:

1. Penguatan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Seluruh program dan kegiatan perangkat daerah harus selaras dengan sasaran RPJMD, RKPD, indikator kinerja daerah, serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Setiap usulan program wajib menunjukkan kontribusi yang jelas terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

2. Penguatan Pendekatan Kinerja dan Hasil

Pelaksanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih menekankan pada pencapaian outcome dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Penguatan Integrasi Program Prioritas

Program pembangunan harus dilaksanakan secara lintas sektor dan lintas perangkat daerah sehingga menghasilkan intervensi yang lebih efektif dan efisien. Integrasi program menjadi penting terutama pada bidang:

- Penanggulangan kemiskinan;
- Penurunan stunting;
- Ketahanan pangan;
- Pengembangan kawasan strategis;
- Pengendalian banjir;
- Peningkatan investasi daerah.

4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital

Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi data pembangunan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

5. Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pengendalian pembangunan harus dilaksanakan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi terhadap capaian program, kegiatan, dan indikator kinerja daerah. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan serta perbaikan kualitas perencanaan pada tahun berikutnya.

7.3 Harapan Pembangunan Tahun 2027

RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan prioritas pembangunan yang terarah, sinergi seluruh pemangku kepentingan, serta dukungan masyarakat secara aktif, diharapkan Kabupaten Barito Kuala mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan pembangunan, Kabupaten Barito Kuala diharapkan semakin mampu mewujudkan visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029, yaitu:

“Terwujudnya Barito Kuala SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu dan Unggul) Menuju indonesia emas

Demikian RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027 disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah secara terarah, terukur, terpadu, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Kuala.